



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2016–2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan

pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
14. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Surakarta.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 yang selanjutnya disebut RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
22. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
24. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
25. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
26. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
27. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
28. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah sampai dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
29. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
30. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
32. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan

urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

33. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
34. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
35. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
36. Kabupaten/kota sekitar adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari:
 - a. Visi, Misi, dan Program Walikota terpilih Tahun 2016; dan
 - b. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PD, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan:
 - a. RPJMD Provinsi;
 - b. RTRW;
 - c. KLHS; dan
 - d. RPJMD Kabupaten/Kota Sekitar.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman:

- a. penyusunan RKPD, Renstra PD, dan Renja PD;
- b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

- c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2016-2021.

Pasal 5

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 6

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan;
 - d. BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan;
 - g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
 - h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan;
 - i. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
 - j. BAB X : Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan;
 - k. BAB XI : Penutup
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan

c. hasil RPJMD.

- (4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa penilaian hasil pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan target pencapaian kinerja akhir pembangunan jangka menengah.
- (6) Penilaian hasil pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sebelum 2 (dua) tahun masa jabatan Walikota-Wakil Walikota berakhir.
- (7) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan daerah dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan daerah dan nasional.

Pasal 9

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Perda.

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan target kinerja tahunan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat RPJMD Tahun 2021-2026 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Agustus 2016

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd & Cap

F.X.HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 15 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
ASISTEN ADMINISTRASI,

Ttd & Cap
RAKHMAT SUTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA
TENGAH (9 /2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA
SURAKARTA TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun. RPJMN sebagai rencana jangka menengah selanjutnya diterjemahkan secara kongkrit, spesifik dan operasional menjadi rencana operasional tahunan.

Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi Walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota untuk waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra PD dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Selain

itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

II. PASAL DEMI

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/ investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Sistematika RPJMD merujuk pada Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 56

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2016-2021	1
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
A. Latar Belakang	I - 1
B. Dasar Hukum	I - 3
C. Hubungan Antar Dokumen	I - 6
D. Maksud dan Tujuan	I - 9
E. Sistematika	I - 10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II - 1
A. Aspek Geografi dan Demografi	II - 1
B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II - 10
C. Aspek Pelayanan Umum	II - 37
D. Aspek Daya Saing Daerah	II - 96
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN	III - 1
A. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III - 1
B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III - 21
C. Kerangka Pendanaan	III - 26
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	IV - 1
A. Permasalahan Pembangunan	IV - 1
B. Isu Strategis	IV - 10
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	V - 1
A. Visi	V - 1
B. Misi	V - 3
C. Keterkaitan Visi-Misi Walikota Tahun 2016-2021 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	V - 3
D. Tujuan dan Sasaran	V - 10
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI - 1
A. Strategi	VI - 1
B. Arah Kebijakan	VI - 5
C. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Terpadu (Kawasan Strategis)	VI - 20
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII - 1
A. Kebijakan Umum	VII - 1
B. Program Pembangunan	VII - 3

BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII - 1
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH.	IX - 1
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	X - 1
	A. Pedoman Transisi	X - 1
	B. Kaidah Pelaksanaan	X - 1
BAB X	PENUTUP	XI – 1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Diagram Alir Penyusunan RPJMD	I-3
Gambar 1.2	Diagram Hubungan Keterkaitan Antardokumen Perencanaan.....	I-7
Gambar 2.1	Peta Administrasi Wilayah Kota Surakarta.....	II-1
Gambar 2.2	Peta Rawan Banjir Kota Surakarta.....	II-5
Gambar 2.3	Peta Rawan Longsor Kota Surakarta	II-6
Gambar 2.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Surakarta Tahun 2010-2015	II-7
Gambar 2.5	Tingkat Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2015 (jiwa/km ²)	II-8
Gambar 2.6	Perbandingan Laju Inflasi Kota Surakarta dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015.....	II-17
Gambar 2.7	Perbandingan Garis Kemiskinan Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014	II-18
Gambar 2.8	Persentase Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2010-2014.....	II-19
Gambar 2.9	Sebaran Penduduk Miskin per Kecamatan.....	II-19
Gambar 2.10	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Surakarta Tahun 2010-2014	II-20
Gambar 2.11	Grafik Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surakarta Tahun 2010-2014.....	II-21
Gambar 2.12	Capaian IPM Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	II-22
Gambar 2.13	Posisi Capaian IPM Kota Surakarta Dibandingkan dengan Kab/Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2014.....	II-22
Gambar 2.14	Grafik Angka Harapan Hidup Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.....	II-23
Gambar 2.15	Grafik Harapan Lama Sekolah Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.....	II-24
Gambar 2.16	Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surakarta Dibandingkan dengan Capaian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014.....	II-25
Gambar 2.17	Grafik Pengeluaran Per Kapita Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 (Ribuan Rupiah)	II-26
Gambar 2.18	Grafik Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kota Surakarta Tahun 2010-2015 ..	II-27
Gambar 2.19	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH di Kota Surakarta Tahun 2010-2015	II-31
Gambar 2.20	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kota Surakarta dan Kota Lain di sekitarnya Tahun 2014.....	II-34
Gambar 2.21	Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kota Surakarta dengan Kabupaten/Kota Lain di Jawa Tengah Tahun 2014.....	II-35

Gambar 2.22	Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Surakarta dengan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2014.....	II-35
Gambar 2.23	Perbandingan Pengeluaran per Kapita Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2014.....	II-98
Gambar 2.24	Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Berdasarkan Tingkatan Pendidikan di Kota Surakarta Tahun 2010-2014.....	II-95
Gambar 3.1	Proporsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah (%)	III-2
Gambar 3.2	Proporsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Total PAD(%).	III-3
Gambar 3.3	Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2010-2015.....	III-7
Gambar 3.4	Perkembangan Rasio Likuiditas dan Solvabilitas Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	III-19
Gambar 3.5	Perkembangan Rasio Aktivitas Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2010-2015	III-19
Gambar 3.6	Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah (%).	III-21
Gambar 3.7	Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah (%)	III-22
Gambar 3.8	Rasio SILPA terhadap Total Belanja Daerah	III-26
Gambar 5.1	Skema keterkaitan Visi-Misi RPJMN 2015-2019 dengan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021.....	V-4
Gambar 5.2	Skema keterkaitan Visi-Misi RPJMD Provinsi dengan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021	V-7
Gambar 6.1	Tema Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2016 - 2021	VI-6
Gambar 6.2	Peta Pola Ruang SPK Kawasan I	VI-21
Gambar 6.3	Peta Pola Ruang SPK Kawasan II	VI-22
Gambar 6.4	Peta Pola Ruang SPK Kawasan III	VI-23
Gambar 6.5	Peta Pola Ruang SPK Kawasan IV	VI-24
Gambar 6.6	Peta Pola Ruang SPK Kawasan V	VI-25
Gambar 6.7	Peta Pola Ruang SPK Kawasan VI	VI-26
Gambar 6.8	Pembagian PPK dan SPK di Kota Surakarta	VI-27
Gambar 6.9	Pembagian Kawasan di Kota Surakarta Tahun 2016-2021	VI-31
Gambar 6.10	Peta Kawasan Pemukiman Kumuh SPK III	VI-33
Gambar 6.11	Peta Infrastruktur SPK III	VI-38
Gambar 6.12	Peta RTK SPK III	VI-42
Gambar 6.13	Peta Sentra Industri SPK III	VI-44
Gambar 6.14	Peta Kawasan Permukiman Kumuh SPK IV	VI-50
Gambar 6.15	Peta Infrastruktur SPK IV	VI-53
Gambar 6.16	Peta RTK SPK IV	VI-55
Gambar 6.17	Peta Sentra Industri SPK IV	VI-57

Gambar 6.18	Peta Kawasan Permukiman Kumuh SPK V	VI-63
Gambar 6.19	Peta Infrastruktur SPK V	VI-67
Gambar 6.20	Peta RTK SPK V	VI-70
Gambar 6.21	Peta Sentra Industri SPK V	VI-72
Gambar 6.22	Peta Kawasan Permukiman Kumuh SPK VI	VI-78
Gambar 6.23	Peta Infrastruktur SPK VI	VI-83
Gambar 6.24	Peta RTK SPK VI	VI-86
Gambar 6.25	Peta Sentra Industri SPK VI	VI-88
Gambar 6.26	Peta Kawasan Permukiman Kumuh SPK II	VI-95
Gambar 6.27	Peta Infrastruktur SPK II	VI-99
Gambar 6.28	Peta RTK SPK II	VI-102
Gambar 6.29	Peta Sentra Industri SPK II	VI-104
Gambar 6.30	Peta Kawasan Permukiman Kumuh SPK I	VI-111
Gambar 6.31	Peta Infrastruktur SPK I	VI-119
Gambar 6.32	Peta RTK SPK I	VI-122
Gambar 6.33	Peta Sentra Industri SPK I	VI-124

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta.....	II-1
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Kota Surakarta Menurut Usia Tahun 2015 (jiwa).....	II-8
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kota Surakarta Tahun 2010-2015	II-9
Tabel 2.4	PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kategori (Juta Rupiah) Kota Surakarta Tahun 2011-2015.....	II-11
Tabel 2.5	PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kategori (Juta Rupiah) Kota Surakarta Tahun 2011-2015	II-12
Tabel 2.6	Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Surakarta Tahun 2011-2015 ...	II-13
Tabel 2.7	Kontribusi Kategori/Sektoral PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha	II-15
Tabel 2.8	Tingkat Inflasi Kota Surakarta Tahun 2010-2015	II-16
Tabel 2.9	Indeks Gini Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	II-17
Tabel 2.10	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	II-17
Tabel 2.11	Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2010-2015	II-23
Tabel 2.12	Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surakarta dengan Kota Lain di Jawa Tengah Tahun 2010-2015 (Tahun).....	II-24
Tabel 2.13	Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kota Surakarta Tahun 2010-2015	II-25
Tabel 2.14	Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kota Surakarta Tahun 2010-2015 ..	II-26
Tabel 2.15	Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan SMP/MTs Kota Surakarta 2010-2015	II-27
Tabel 2.16	Capaian Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat dan SMP Sederajat Kota Surakarta Tahun 2010-2015	II-28
Tabel 2.17	Capaian Angka Kelulusan SD Sederajat dan SMP Sederajat Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	II-29
Tabel 2.18	Capaian Rata-Rata Nilai UASBN SD Sederajat dan Ujian Nasional SMP Sederajat Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	II-29
Tabel 2.19	Capaian Angka Melanjutkan SD Sederajat dan SMP Sederajat Siswa yang Bersekolah di Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	II-30
Tabel 2.20	Capaian Angka Melanjutkan SD Sederajat dan SMP Sederajat Siswa yang Bersekolah di Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	II-30

Tabel 2.21	Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita di Kota Surakarta Tahun 2010-2015	II-32
Tabel 2.22	Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	II-32
Tabel 2.23	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	II-33
Tabel 2.24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Surakarta Tahun 2010-2014.....	II-33
Tabel 2.25	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	II-35
Tabel 2.26	Jumlah Klub Olahraga di Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	II-36
Tabel 2.27	Rasio Ketersediaan Sekolah Jenjang SD/MI dan SMP/MTs dan Rasio Guru terhadap Murid Kota Surakarta Tahun 2010-2015	II-38
Tabel 2.28	Rasio Ketersediaan Sekolah Menengah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Menengah Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	II-38
Tabel 2.29	Persentase Pendidik dengan Kualifikasi D4/S1 Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kota Surakarta Tahun 2010-2015	II-39
Tabel 2.30	Capaian Indikator Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	II-39
Tabel 2.31	Capaian Indikator Pembangunan Kesehatan Kota Surakarta 2010-2015	II-42
Tabel 2.32	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kota Surakarta Tahun 2010-2015	II-46
Tabel 2.33	Capaian Pembangunan Bidang Tata Ruang Kota Surakarta Tahun 2010-2015	II-47
Tabel 2.34	Pencapaian Kinerja Urusan Perumahan di Kota Surakarta Tahun 2010-2015	II-48
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Surakarta Tahun 2010-2015	II-49
Tabel 2.36	Pencapaian Kinerja Bidang Sosial di Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	II-50
Tabel 2.37	Pencapaian Kinerja Bidang Tenaga Kerja Kota Surakarta Tahun 2010-2015	II-51
Tabel 2.38	Pencapaian Kinerja Berbagai Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Surakarta Tahun 2010-2015	II-52
Tabel 2.39	Pencapaian Kinerja SPM Bidang Layanan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Surakarta Tahun 2010-2015	II-53
Tabel 2.40	Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2010-2015	II-54

Tabel 2.41	Kinerja Pengelolaan Persampahan di Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	II-57
Tabel 2.42	Kinerja Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan di Kota Surakarta Tahun 2010-2015	II-58
Tabel 2.43	Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Surakarta Tahun 2010-2015	II-60
Tabel 2.44	Kinerja Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam di Kota Surakarta Tahun 2010-2015	II-60
Tabel 2.45	Kinerja Pengendalian Polusi di Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	II-61
Tabel 2.46	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Surakarta	II-61
Tabel 2.47	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2010-2015	II-62
Tabel 2.48	Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta Tahun 2010-2015	II-63
Tabel 2.49	Pencapaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	II-64
Tabel 2.50	Perlengkapan Jalan yang Tersedia di Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	II-66
Tabel 2.51	Capaian Pembangunan Urusan Perhubungan Kota Surakarta Tahun 2010-2015	II-67
Tabel 2.52	Kinerja Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa di Kota Surakarta Tahun 2010-2015	II-69
Tabel 2.53	Pencapaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM di Kota Surakarta Tahun 2010-2015	II-71
Tabel 2.54	Capaian Indikator Penanaman Modal di Kota Surakarta Tahun 2010-2015	II-72
Tabel 2.55	Jumlah Sarana Olahraga di Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	II-74
Tabel 2.56	Data Capaian Urusan Persandian di Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	II-76
Tabel 2.57	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	II-77
Tabel 2.58	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan Tahun 2010-2015.....	II-78
Tabel 2.59	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kearsipan.....	II-79
Tabel 2.60	Capaian Kinerja Urusan Perikanan Tahun 2010-2015	II-79
Tabel 2.61	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	II-80
Tabel 2.62	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2010-2015.	II-81
Tabel 2.63	Besarnya Kontribusi Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (ADHB) Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	II-82
Tabel 2.64	Kinerja Perdagangan Lainnya di Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	II-83

Tabel 2.65	Jumlah Industri dan Tenaga Kerja yang Terserap di Kota Surakarta Tahun 2015	II-85
Tabel 2.66	Capaian Kinerja Bidang Perindustrian Lainnya di Kota Surakarta Tahun 2010-2015	II-86
Tabel 2.67	Pencapaian Kinerja Indikator Urusan Transmigrasi di Kota Surakarta Tahun 2011-2015	II-87
Tabel 2.68	Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015	II-88
Tabel 2.69	Capaian Kinerja Keuangan Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	II-89
Tabel 2.70	Jumlah Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2015	II-90
Tabel 2.71	Gambaran Kepegawaian Kota Surakarta Tahun 2010-2014.....	II-90
Tabel 2.72	Capaian Pengawasan di Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	II-91
Tabel 2.73	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	II-92
Tabel 2.74	Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2010 – 2015	II-92
Tabel 2.75	Capaian Kinerja Sub Bidang Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2015.....	II-93
Tabel 2.76	Capaian Kinerja Sub Bidang Hukum dan HAM	II-95
Tabel 2.77	Capaian Kinerja Sekretariat Dewan.....	II-95
Tabel 3.1	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 – 2015.....	III-4
Tabel 3.2	Realisasi Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	III-8
Tabel 3.3	Alokasi Belanja Langsung Per Urusan/Bidang Tahun 2010-2015.....	III-9
Tabel 3.4	Perincian Pembiayaan Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	III-13
Tabel 3.5	Neraca Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	III-14
Tabel 3.6	Penghitungan Neraca Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	III-18
Tabel 3.7	Kapasitas Ruang Fiskal Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	III-23
Tabel 3.8	Defisit Riil Anggaran Kota Surakarta Tahun 2010-2015.....	III-24
Tabel 3.9	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Surakarta Tahun 2010 – 2015.....	III-24
Tabel 3.10	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Surakarta	III-25
Tabel 3.11	Rasio/Kontribusi SILPA terhadap Belanja Daerah.....	III-26
Tabel 3.12	Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Periodik dan Mengikat Belanja Tidak Langsung Tahun 2010 – 2015.....	III-27

Tabel 3.13	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Periodik dan Mengikat Belanja Langsung Tahun 2010 – 2015.....	III-27
Tabel 3.14	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Periodik dan Mengikat Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2010 – 2015.....	III-27
Tabel 3.15	Proyeksi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 – 2021	III-29
Tabel 3.16	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat Kota Surakarta Tahun 2016 – 2021	III-32
Tabel 3.17	Proyeksi Pembiayaan Kota Surakarta Tahun 2016 – 2021.....	III-35
Tabel 3.18	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 – 2021	III-36
Tabel 3.19	Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 – 2021.....	III-36
Tabel 3.20	Kerangka Pendanaan Alokasi Prioritas I, II, dan III Kota Surakarta Tahun 2016 – 2021	III-38
Tabel 3.21	Proyeksi APBD Kota Surakarta Tahun 2016 – 2021	III-38
Tabel 5.1	Sinkronisasi RPJMN 2014-2019 dengan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021	V-5
Tabel 5.2	Sinkronisasi RTRW Kota Surakarta Tahun 2011-2031,RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dengan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021.....	V-8
Tabel 5.3	Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator dalam Mencapai Visi RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021	V-11
Tabel 6.1	Sasaran dan Strategi Misi Waras	VI-1
Tabel 6.2	Sasaran dan Strategi Misi Wasis.....	VI-2
Tabel 6.3	Sasaran dan Strategi Misi Wareg	VI-3
Tabel 6.4	Sasaran dan Strategi Misi Mapan	VI-4
Tabel 6.5	Sasaran dan Strategi Misi Papan	VI-5
Tabel 6.6	Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan	VI-11
Tabel 6.7	Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	VI-16
Tabel 6.8	Kondisi Permukiman di SPK III	VI-34
Tabel 6.9	Infrastruktur Jalan SPK III	VI-39
Tabel 6.10	Sebaran Infrastruktur Jembatan SPK III	VI-39
Tabel 6.11	Sebaran Pintu Air SPK III	VI-40
Tabel 6.12	Potensi Sentra Industri SPK III	VI-45
Tabel 6.13	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	VI-47
Tabel 6.14	Kondisi Permukiman di SPK IV	VI-51
Tabel 6.15	Infrastruktur Jalan SPK IV	VI-54
Tabel 6.16	Kondisi Permukiman di SPK IV	VI-54
Tabel 6.17	Sebaran Pintu Air SPK IV.....	VI-54
Tabel 6.18	Potensi Sentra Industri SPK IV	VI-58

Tabel 6.19	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	VI-60
Tabel 6.20	Kondisi Permukiman di SPK V	VI-64
Tabel 6.21	Infrastruktur Jalan SPK V	VI-68
Tabel 6.22	Sebaran Infrastruktur Jembatan SPK V	VI-68
Tabel 6.23	Sebaran Pintu Air SPK V	VI-69
Tabel 6.24	Potensi Sentra Industri SPK V	VI-73
Tabel 6.25	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	VI-74
Tabel 6.26	Kondisi Permukiman di SPK VI	VI-79
Tabel 6.27	Infrastruktur Jalan SPK VI	VI-84
Tabel 6.28	Sebaran Infrastruktur Jembatan SPK VI	VI-84
Tabel 6.29	Sebaran Pintu Air SPK VI	VI-85
Tabel 6.30	Potensi Sentra Industri SPK VI	VI-89
Tabel 6.31	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	VI-91
Tabel 6.32	Kondisi Permukiman di SPK II	VI-96
Tabel 6.33	Infrastruktur Jalan SPK II	VI-100
Tabel 6.34	Sebaran Infrastruktur Jembatan SPK II	VI-100
Tabel 6.35	Sebaran Pintu Air SPK II	VI-100
Tabel 6.36	Potensi Sentra Industri SPK II	VI-105
Tabel 6.37	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	VI-107
Tabel 6.38	Kondisi Permukiman SPK I	VI-112
Tabel 6.39	Infrastruktur Jalan SPK I	VI-120
Tabel 6.40	Sebaran Infrastruktur Jembatan SPK I	VI-120
Tabel 6.41	Sebaran Pintu Air SPK I	VI-121
Tabel 6.42	Potensi Sentra Industri SPK I	VI-125
Tabel 6.43	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	VI-127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pada tanggal 9 Desember 2015 Pemerintah Kota Surakarta telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Berdasarkan hasil Pemilukada tersebut, telah terpilih pasangan FX. HADI RUDYATMO dan Dr. H. ACHMAD PURNOMO, Apt. sebagai Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.33-694 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Surakarta Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.33-695 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2016-2021.

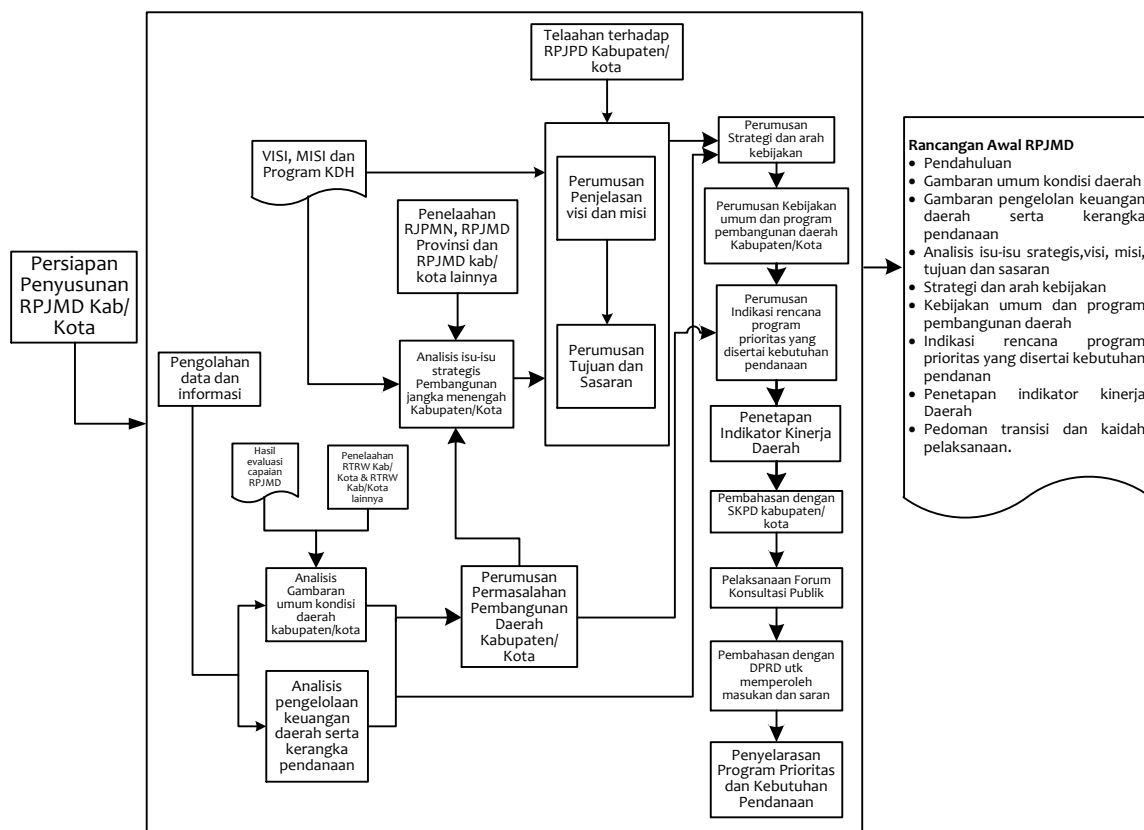
Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah Kepala Daerah dilantik, diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2016-2021. Dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya juga telah dinyatakan bahwa: “Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik”.

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2016-2021 memperhatikan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025. RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari tahap III RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025. Pada RPJPD tersebut, Visi yang akan dicapai adalah **SURAKARTA KOTA BUDAYA, MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA**. Tujuan pembangunan jangka panjang Kota Surakarta Tahun 2005-2025 dalam rangka mencapai visi adalah mewujudkan daerah dan masyarakat Kota Surakarta yang berbudaya, mandiri, maju, dan sejahtera sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain berpedoman pada dokumen RPJPD, penyusunan dokumen RPJMD juga memperhatikan rencana tata ruang, yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031. Setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang, yaitu program pembangunan sektoral wilayah kota, program pengembangan wilayah kota, dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD adalah: politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa dalam pendekatan politik memandang pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik, merupakan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan *stakeholders* dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, yang selanjutnya Dokumen Rencana hasil proses perencanaan tersebut diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan analisis setiap urusan pembangunan, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan *stakeholders* dan pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

Gambar 1.1
Diagram Alir Penyusunan RPJMD

B. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

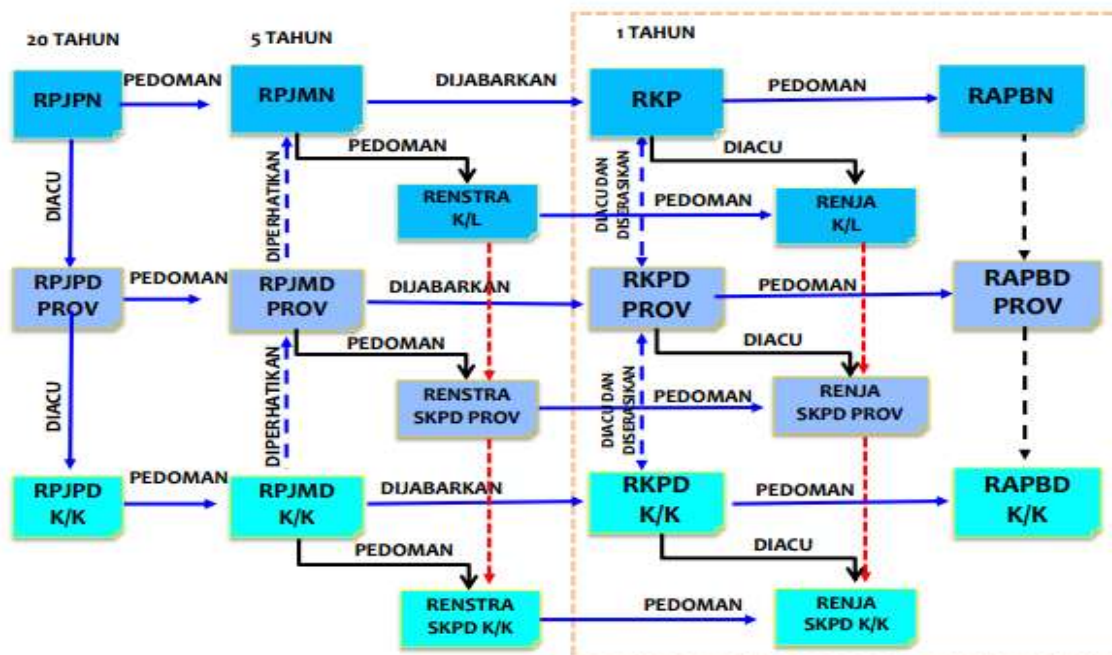
- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 25. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 26. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 27. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
32. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 1).

C. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPJMD memperhatikan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Penyusunan RPJMD memperhatikan juga RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJMD Daerah sekitar dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antardaerah, antarwaktu, antarruang, dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJP Nasional dan RPJP Provinsi yang juga telah diacu dalam RPJP Kota Surakarta akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. Selain itu, RPJMN yang telah diperhatikan dalam RPJMD Provinsi akan diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. RPJMD ini akan dijabarkan dalam RKPD dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Sementara RPJMD juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja PD. Hubungan keterkaitan antardokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.2
Diagram Hubungan Keterkaitan Antardokumen Perencanaan

1. **Hubungan RPJMD dengan RPJMN (Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019)**

Visi dan Misi dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 selaras dengan Visi, Misi, dan Sembilan agenda Prioritas yang disebut Program Nawacita yang dijabarkan dalam RPJMN yang berlaku saat ini.

2. **Hubungan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018)**

Visi dan Misi dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 selaras dengan Visi dan Misi yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang berlaku saat ini.

3. **Hubungan RPJMD Kota Surakarta dengan RPJPD Kota Surakarta (Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025)**

RPJMD berpedoman pada RPJPD Kota Surakarta. RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 menjabarkan prioritas pembangunan Tahap III pada RPJPD Kota Surakarta (Tahun 2015-2019) dan Tahap IV RPJPD (Tahun 2020-2025).

4. **Hubungan RPJMD dengan RTRW Kota Surakarta (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031)**

Pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek keruangan (*spasial*) menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat berpedoman pada kebijakan

pengembangan struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kota Surakarta Tahun 2011-2031.

5. Hubungan RPJMD dengan RKPD

RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana tersebut mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan demikian, RKPD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Surakarta yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

6. Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-PD dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.

Perangkat Daerah (PD) merupakan nomenklatur pengganti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang digunakan setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga Renstra-PD atau sebelumnya disebut dengan Renstra SKPD

sebagaimana tersebut dalam Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, memuat antara lain: pendahuluan; gambaran pelayanan PD; isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Ketentuan dalam BAB IX RPJMD, yaitu Penetapan Indikator Kinerja Daerah selaras dengan BAB VI Renstra-PD, yaitu indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

7. Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi, Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 serta Rekomendasi Musrenbang RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan Provinsi Jawa Tengah antara lain: Agenda Pembangunan Pasca 2015 yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), *Grand Design* Reformasi Birokrasi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Jawa Tengah, RAD Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah, RAD Pengurangan Resiko Bencana, dan Pedoman Pelaksanaan PUG di Jawa Tengah.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 adalah untuk menyediakan data *performance* pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun yang lalu dan menetapkan gambaran permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah pada kurun 5 tahun ke depan (2016-2021). Secara khusus, maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud dari penyusunan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah pembangunan jangka menengah Kota Surakarta Tahun 2016-2021;
- b. Menjadi landasan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis – Perangkat Daerah (Renstra-PD);
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Surakarta, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d. Sebagai panduan dan tolok ukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surakarta selama kurun waktu 2016-2021;

- e. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kota Surakarta Tahun 2016-2021; dan
- f. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah di Kota Surakarta selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
- b. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kota Surakarta selama kurun waktu 2016-2021;
- c. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan;
- d. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
- e. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kota Surakarta dengan daerah sekitar, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat; serta
- f. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

E. Sistematika

Sistematika penyusunan dokumen RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antardokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memaparkan gambaran umum kondisi daerah Kota Surakarta yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi, yang mencakup aspek: geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum serta daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab ini terdiri uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu seperti kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu seperti proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis yang dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap daerah tersebut, termasuk arah kebijakan pengembangan wilayah terpadu.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2016-2021 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan, dan hubungannya dengan isu strategis daerah.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait peserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah, dan disajikan pula pencapaian target indikator kinerja program pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan beserta kebutuhan pendanaannya.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan, dengan menggambarkan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri.

BAB X PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang RPJMD sebagai pedoman penyusunan RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun pertama kepemimpinan walikota periode berikutnya, dan kaidah pelaksanaan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dalam dokumen RPJMD.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Aspek Geografi dan Demografi
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Surakarta merupakan wilayah yang memiliki posisi strategis di Provinsi Jawa Tengah karena terletak di jalur utama lalu lintas yang menghubungkan antara bagian barat dan timur Pulau Jawa di lintas selatan. Luas wilayah Kota Surakarta adalah 44,04 km² terbagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan.



Sumber: Surakarta Dalam Angka, 2015
Gambar 2.1
Peta Administrasi Wilayah Kota Surakarta

Secara rinci pembagian wilayah administrasi di Kota Surakarta dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta

KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT
Laweyan	11	105	457
Serengan	7	72	312
Pasar Kliwon	9	100	422
Jebres	11	151	646
Banjarsari	13	176	877
Kota Surakarta	51	604	2.714

Sumber: Sekretriati Daerah Kota Surakarta, 2016

Adapun batas administrasi wilayah Kota Surakarta adalah sebagai berikut.

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar.

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis Kota Surakarta terletak antara 110° 45' 15" dan 110° 45' 35" Bujur Timur dan antara 7° 36' dan 7° 56' Lintang Selatan. Adapun dari sisi ketinggian wilayah, Kota Surakarta termasuk kawasan dataran rendah. Ketinggiannya hanya sekitar 92 meter dari permukaan laut, sedangkan kemiringan lahan di Kota Surakarta berkisar antara 0-15%. Kota Surakarta rata-rata memiliki suhu udara antara 25,8°C sampai dengan 28,9°C pada tahun 2015. Adapun kelembaban udaranya antara 65% sampai dengan 88%. Jumlah hari hujan terbanyak ada pada bulan Januari, yaitu 27 hari dengan curah hujan sebesar 306,00 mm.

3. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan lahan di wilayah Kota Surakarta sebagian besar untuk pemukiman, luasnya mencapai kurang lebih 66% dari total luas lahan, sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian dan fasilitas umum. Pemanfaatan ruang di Kota Surakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 terbagi atas pengembangan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas kawasan perlindungan setempat; Ruang Terbuka Hijau (RTH); kawasan cagar budaya; dan kawasan rawan bencana alam. Sedangkan kawasan yang termasuk dalam kawasan budidaya, yaitu kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; peruntukan permukiman; kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; kawasan peruntukan perkantoran; kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH); kawasan peruntukan kegiatan sektor informal; dan kawasan peruntukan lain (pertanian; perikanan; pelayanan umum yang meliputi pendidikan, kesehatan dan peribadatan; dan pertahanan dan keamanan).

Rencana pengembangan kawasan perlindungan setempat dilakukan dengan cara mempertahankan fungsi sempadan sungai dan mengendalikan perkembangannya, mengembalikan fungsi sempadan sungai di seluruh wilayah kota sebagai RTH secara bertahap, dan merehabilitasi kawasan sempadan sungai yang mengalami penurunan fungsi. Kawasan perlindungan setempat di Kota Surakarta meliputi kawasan sempadan Sungai Bengawan Solo, Kali Jenes, Kali Anyar, Kali Sumber, Kali Gajahputih, Kali Pepe, Kali Wingko, Kali Brojo, Kali Boro, dan Kali Pelem Wulung. Adapun luas kawasan perlindungan setempat mencapai 401 Ha yang tersebar di 5 wilayah kawasan.

Penyediaan RTH di Kota Surakarta berdasarkan RTRW yang telah disusun luasnya mencapai 882,04 Ha atau sekitar 20,03% dari luas kota. RTH yang ada meliputi RTH taman kota/alun-alun/monumen; RTH taman pemakaman; RTH penyangga air (resapan air); RTH jalur jalan kota; RTH sempadan sungai; RTH sempadan rel; RTH pada tanah negara; dan RTH kebun binatang.

Kawasan cagar budaya terbagi dalam dua kategori, yaitu ruang terbuka/taman, dan kawasan benda cagar budaya lainnya yang memenuhi kriteria yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kelompok bangunan, meliputi bangunan rumah tradisional, bangunan umum kolonial, bangunan tempat ibadah, gapura, tugu, monumen, dan perabot jalan. Luas kawasan ini sebesar 81 Ha. Adapun pengembangan kawasan cagar budaya ini melalui pengembangan jalur khusus wisata yang menghubungkan antar kawasan cagar budaya dan pelestarian benda cagar budaya yang mengalami penurunan fungsi dan kondisi bangunan.

Pengembangan kawasan budidaya yang pertama adalah kawasan peruntukan industri. Kawasan industri rumah tangga dan kawasan industri kreatif. Kawasan industri rumah tangga meliputi: industri rumah tangga mebel di Kecamatan Jebres; industri rumah tangga pembuatan *shuttlecock* dan gitar di Kecamatan Pasarkliwon; industri pengolahan tahu dan tempe di Kelurahan Mojosongo-Kecamatan Jebres; dan industri pembuatan sangkar burung di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres. Sementara itu kawasan industri kreatif meliputi industri batik di Kecamatan Pasarkliwon dan Kecamatan Laweyan.

Kawasan peruntukan pariwisata terdiri dari pariwisata cagar budaya dan nilai-nilai tradisional, pariwisata sejarah, pariwisata belanja dan pariwisata kuliner serta transportasi pariwisata. Kawasan pariwisata cagar budaya, sejarah, dan nilai-nilai tradisional terletak di Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari, dan Kecamatan Pasarkliwon. Kawasan pariwisata belanja meliputi wisata belanja batik di Kecamatan Pasarkliwon dan Kecamatan Laweyan; dan wisata barang antik di Pasar Antik Triwindu, Kecamatan Banjarsari. Kawasan pariwisata kuliner lokasinya tersebar di wilayah kota. Untuk mengembangkan pengelolaan kawasan pariwisata, hal yang akan dilakukan adalah pengembangan pola perjalanan wisata kota; pengembangan kegiatan pendukung yang meliputi hotel, restoran, pusat penukaran uang asing, pusat souvenir, dan oleh-oleh.

Pengembangan kawasan untuk permukiman seluas 2.275 Ha, yang tersebar di seluruh wilayah kota. Pengembangannya melalui perumahan vertikal berupa Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di Kecamatan Jebres, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari, dan Kecamatan Pasar Kliwon.

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Pasar tradisional berada di wilayah Kelurahan Kauman, Kelurahan Kemlayan, Kelurahan Semanggi, Kelurahan Sudiroprajan, Kelurahan Nusukan, Kelurahan

Danusuman, Kelurahan Panjang, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Karangasem, Kelurahan Manahan, Kelurahan Sriwedari, Kelurahan Ketelan, Kelurahan Keprabon, Kelurahan Mojosongo, dan Kelurahan Pasarkliwon. Pusat perbelanjaan meliputi pengembangan perdagangan skala regional kota di Kelurahan Setabelan Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Danusuman, Kelurahan Serengan, Kelurahan Kedunglumbu Kecamatan Pasarkliwon, dan Kelurahan Panularan-Kecamatan Laweyan berupa perdagangan grosir dan pasar besar; dan pengembangan kawasan perdagangan berbentuk rumah toko di sepanjang jalan protokol. Sedangkan toko modern berupa pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern di wilayah kota yang penempatannya ditetapkan dalam Peraturan Walikota. Kawasan peruntukan perkantoran di wilayah Kota Surakarta seluas 19 ha, meliputi: (1) Kawasan I seluas 1 (satu) ha, yaitu di Kecamatan Laweyan; (2) Kawasan II seluas 6 (enam) ha, yaitu di Kecamatan Banjarsari seluas 5 (lima) ha dan Kecamatan Laweyan seluas 1 (satu) ha; (3) Kawasan V seluas 4 (empat) ha, yaitu di Kecamatan Jebres; dan (4) Kawasan VI seluas 8 (delapan) ha, yaitu di Kecamatan Pasarkliwon.

Kawasan RTNH seluas 7 (tujuh) ha tersebar di seluruh wilayah kota, yang meliputi RTNH di kawasan I seluas 3 (tiga) ha, terletak di Kecamatan Jebres seluas 1 (satu) ha dan Kecamatan Pasarkliwon seluas 2 (dua) Ha, RTNH di kawasan III seluas 2 (dua) ha, terletak di Kecamatan Banjarsari, dan RTNH di kawasan V seluas 2 (dua) ha, terletak di Kecamatan Jebres.

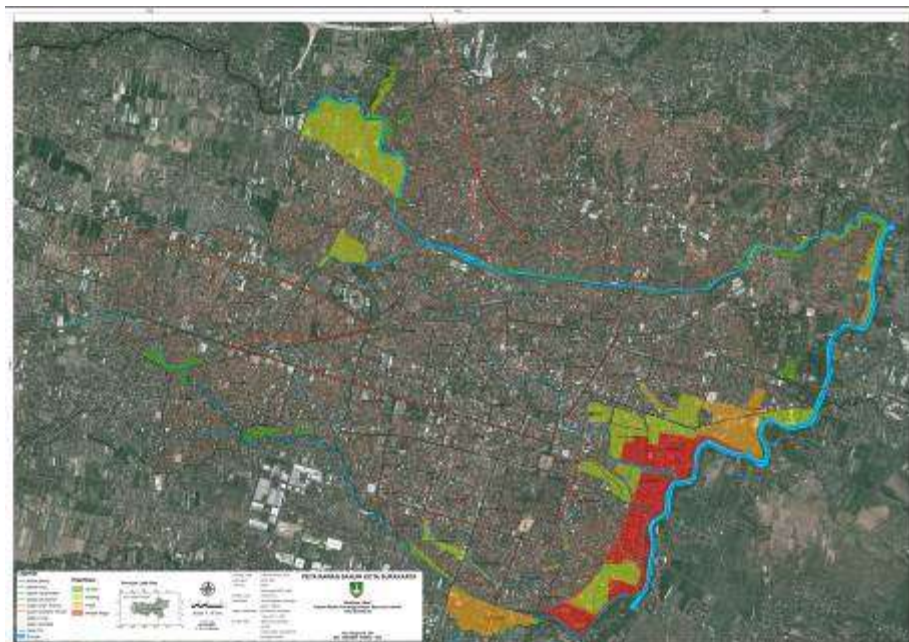
Kawasan peruntukan kegiatan sektor informal meliputi: (1) ruang yang sudah ditetapkan sebagai ruang relokasi dan pengelompokan PKL oleh Pemerintah Daerah; (2) ruang sekitar pusat perdagangan disediakan oleh pemilik pusat perdagangan sebagai bentuk dari *Coorporate Social Responsibility* (CSR), (3) ruang tempat penyelenggaraan acara Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta sebagai pasar malam (*night market*), di Jalan Diponegoro dan Jalan Gatot Subroto. Sebaran ruang bagi kegiatan sektor informal, antara lain adalah di Kawasan I, yaitu di Kelurahan Kedunglumbu, Kelurahan Jayengan, Kelurahan Kratonan, dan Kelurahan Sriwedari, Kawasan II yaitu di Kelurahan Purwosari-Kecamatan Laweyan; Kawasan V yaitu di Kelurahan Jebres dan Kelurahan Purwodiningratan-Kecamatan Jebres, Kawasan VI yaitu di Kelurahan Manahan, Kelurahan Kepatihan Kulon, Kelurahan Nusukan-Kecamatan Banjarsari.

Kawasan peruntukan lain pertanian seluas sekitar 111 ha yang terletak di, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari, dan Kecamatan Jebres, terdiri dari lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering yang ditetapkan dan dipertahankan sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kawasan perikanan budidaya dialokasikan di perairan umum darat tersebar di Kelurahan Manahan, Kelurahan Sumber, Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari dan Kelurahan Mojosongo-Kecamatan Jebres. Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tersebar di Balekambang di depo Kelurahan Gilingan dan Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari. Kawasan peruntukan

lain pelayanan umum yang meliputi pendidikan, kesehatan dan peribadatan dikembangkan di seluruh wilayah kota. Kawasan peruntukan lain pertahanan dan keamanan juga dikembangkan di seluruh wilayah kota.

4. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2011 menyebutkan bahwa kota Surakarta rawan terhadap berbagai bencana yaitu berada pada ranking 207 nasional dengan tingkat kerawanan tinggi. Bencana yang rawan terjadi di Kota Surakarta adalah bencana banjir dengan tingkat kerawanan tinggi, bencana kebakaran permukiman dengan tingkat kerawanan tinggi dan ranking 26 nasional, bencana angin topan dengan tingkat kerawanan tinggi dan ranking ke 68 nasional, bencana banjir dan tanah longsor dengan tingkat kerawanan tinggi dan ranking ke 96 nasional, dan bencana kecelakaan transportasi dengan tingkat kerawanan tinggi dan ranking ke 14 nasional. Oleh karena memiliki kerawanan terhadap bencana yang tinggi dan terdiri dari *multiple hazard*.



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta, 2015

Gambar 2.2
Peta Rawan Banjir Kota Surakarta

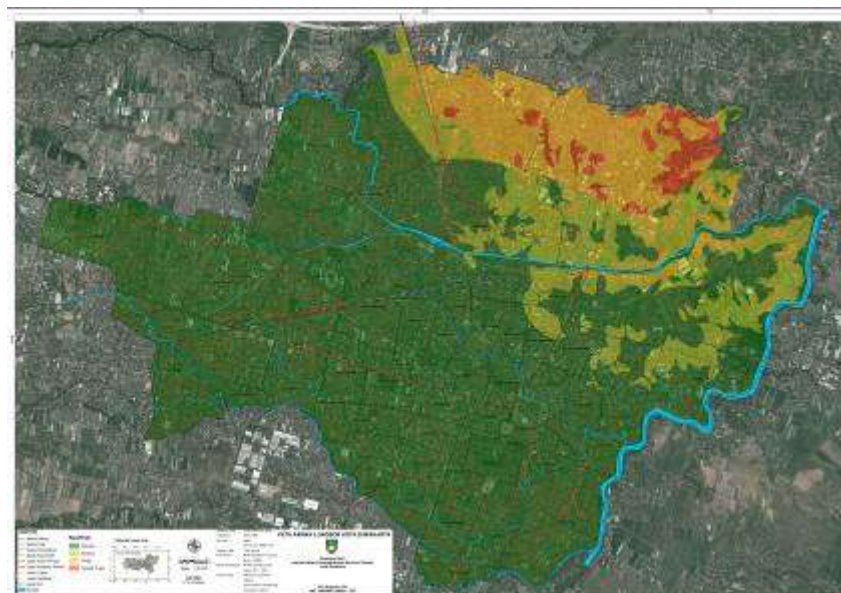
Pada pemetaan daerah rawan banjir di Kota Surakarta terdapat empat klasifikasi daerah rawan banjir yaitu:

- Kerawanan rendah terdapat pada Kelurahan Jebres, Kelurahan Kadipiro, Kelurahan Nusukan, Kelurahan Kerten, Kelurahan Gilingan, Kelurahan Pajang, Kelurahan Laweyan, Kelurahan Bumi.
- Kerawanan sedang yaitu pada Kelurahan Pucangsawit, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Gandekan, Kelurahan Sudioprajan, Kelurahan Serengan, Kelurahan Danukusuman, Kelurahan Kedung Lumbu, Kelurahan Serengan, Kelurahan Sudioprajan, Kelurahan Banyuanyar, Kelurahan Sumber, Kelurahan Jebres, Kelurahan Kadipiro.

- c. Kerawanan tinggi yaitu Kelurahan Jebres, Kelurahan Pucangsawit, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Joyosuran, Kelurahan Pasar Kliwon dan Kelurahan Joyotakan
- d. Kerawanan sangat tinggi yaitu Kelurahan Sewu, Kelurahan Sangkrah, Kelurahan Semanggi, Kelurahan Pucangsawit, dan Kelurahan Gandekan.

Pada pemetaan daerah rawan longsor terdapat empat klasifikasi daerah rawan longsor yaitu:

- a. Rawan Rendah, yaitu berada di lokasi rawan rendah berada di sebelah Selatan kota yaitu di Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Serengan.
- b. Rawan Sedang yaitu di Kecamatan Jebres, tepatnya di Kelurahan Mojosongo, Jebres dan Pucangsawit, Kecamatan Banjarsari yaitu di Kelurahan Kadipiro, Kelurahan Banyuanyar, dan Kelurahan Nusukan. Kecamatan Laweyan yaitu di Kelurahan Kerten, Kelurahan Jajar, dan Kelurahan Karangasem.
- c. Rawan Tinggi yaitu di Kelurahan Nusukan, Kelurahan Jebres, Kelurahan Kadipiro dan Kelurahan Mojosongo. Lokasi rawan tinggi di Kelurahan Jebres berada di daerah tebing sepanjang Kali Anyar.
- d. Rawan Sangat Tinggi yaitu berada di Kelurahan Kadipiro dan Kelurahan Mojosongoi kampung Kragilan. Sedangkan kejadian longsor yang pernah terjadi berada di kelurahan Mojosongo berada di lokasi makam Sentono Mulyo.



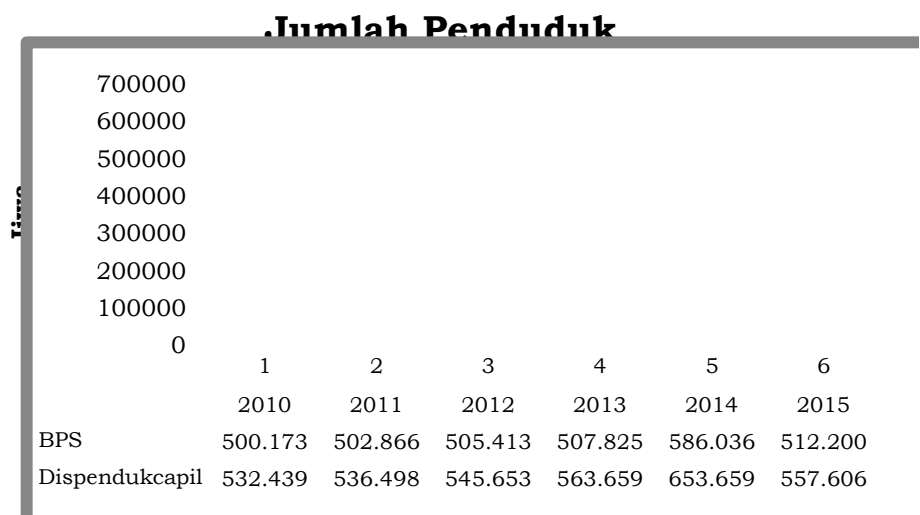
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta, 2015

Gambar 2.3
Peta Rawan Longsor Kota Surakarta

5. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2015 berdasarkan data Dispendukcapil berjumlah 557.606 jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk laki-laki jumlahnya lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 275.266 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sejumlah 282.340 jiwa. Dengan porsi

tersebut maka sex rasio penduduk di Kota Surakarta adalah 97,49 atau dapat diartikan bahwa di setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. Persebaran penduduk di Kota Surakarta tidak merata. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Banjarsari. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Kecamatan Banjarsari sebesar 175.648 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 86.540 jiwa dan perempuan sebesar 89.108 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Serengan. Jumlah penduduk Kecamatan Serengan sebesar 53.974 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 26.440 jiwa dan perempuan sebesar 27.534 jiwa.

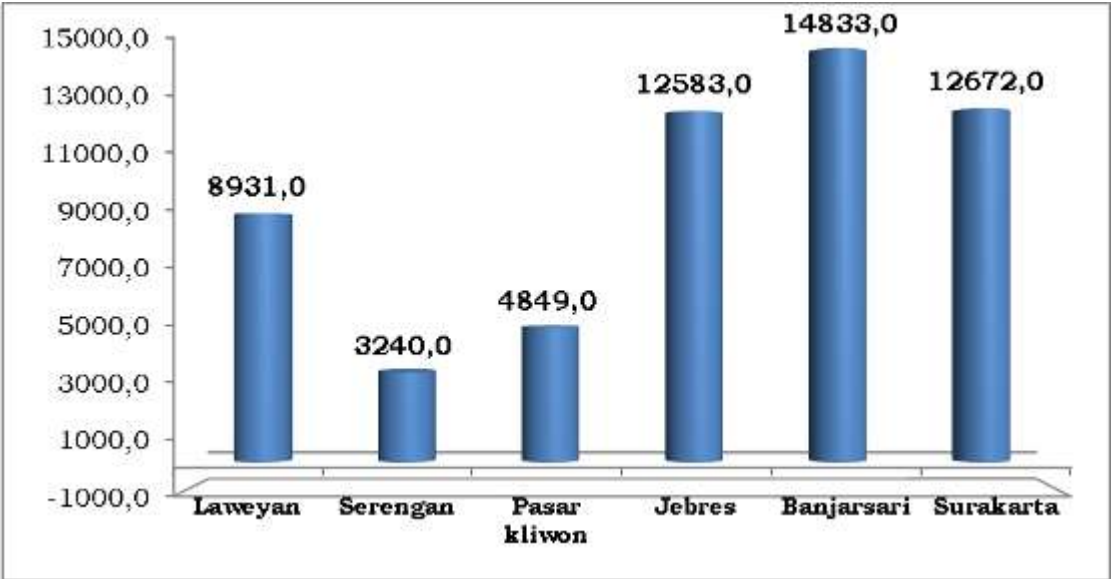


Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, April 2016

Gambar 2.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Surakarta
Tahun 2010-2015

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2010 sebesar 532.439 jiwa mengalami peningkatan tertinggi di tahun 2014 sebesar 653.659 jiwa. Sehubungan dengan kebijakan Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Direktorat Administrasi Kependudukan dilaksanakan pembersihan data ganda dari aplikasi SIAK dan dapat diperoleh data sisiran dimaksud dengan jumlah 557.606 jiwa di tahun 2015.

Kota Surakarta menjadi salah satu kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di Indonesia. Tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2015 sebesar 12.672 jiwa/km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Banjarsari, sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Serengan. Berikut ini adalah grafik kepadatan penduduk di wilayah Kota Surakarta.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2015

Gambar 2.5
Tingkat Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2015 (jiwa/km²)

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta pada tahun 2015 berada di angka 0,36; angka tersebut jika dibandingkan capaian tahun 2014 mengalami peningkatan karena pada tahun 2014 terjadi perlambatan laju pertumbuhan penduduk (-0,02) Dilihat dari komposisi penduduk menurut usia, diketahui bahwa jumlah usia produktif di Kota Surakarta tahun 2015 sebanyak 394.425 jiwa, sedangkan usia non produktif sebanyak 163.181 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk kota Surakarta menurut kategori usia disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kota Surakarta Menurut Usia Tahun 2015 (jiwa)

Usia (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	18.914	18.360	37.274
5-9	22.274	20.888	43.162
10-14	21.965	21.178	43.143
15-19	21.822	21.339	43.161
20-24	21.242	20.468	41.710
25-29	19.944	19.815	39.759
30-34	23.553	23.492	47.045
35-39	23.508	23.442	46.950
40-44	20.903	21.451	42.354
45-49	19.827	21.062	40.889
50-54	17.268	19.448	36.716
55-59	15.389	16.709	32.098
60-64	11.702	12.041	23.743
65-69	6.735	7.728	14.463
70-74	4.349	5.875	10.224
75+	5.871	9.044	14.915
Jumlah	275.266	282.340	557.606

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2015

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kota Surakarta Tahun 2010-2015

Kecamatan	2010			2011			2012			2013			2014			2015*)		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Laweyan	41.838	44.363	86.201	42.056	44.610	86.666	42.269	44.835	87.104	42.472	45.048	87.520	53.457	55.807	109.264	49.740	51.551	101.291
Serengan	21.113	22.614	43.727	21.223	22.739	43.962	21.331	22.854	44.185	21.433	22.963	44.396	29.981	31.198	61.179	26.440	27.534	53.974
Pasar Kliwon	36.715	37.676	74.391	36.906	37.886	74.792	37.094	38.077	75.171	37.271	38.258	75.529	44.869	46.903	91.772	42.022	42.495	84.517
Jebres	66.838	71.443	138.281	67.186	71.840	139.026	67.527	72.203	139.730	67.851	72.547	140.398	73.799	74.643	148.442	70.524	71.652	142.176
Banjarsari	76.793	80.780	157.573	77.191	81.229	158.420	77.584	81.639	159.223	77.955	82.027	159.982	86.395	88.984	175.379	86.540	89.108	175.648
Kota Surakarta	243.297	256.876	500.173	244.562	258.304	502.866	245.805	259.608	505.413	246.982	260.843	507.825	288.501	297.535	586.036	275.266	282.340	557.606

*Sumber: Badan Pusat Statistik 2015 dan *) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2016*

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Nilai PDRB Kota Surakarta berdasarkan harga konstan 2010 (ADHK 2010) menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. PDRB ADHK pada tahun 2015 tercatat sebesar 28,43 triliun rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 26,96 triliun rupiah. Secara kumulatif peningkatan PDRB ADHK 2010 dari tahun 2010 ke tahun 2015 mencapai Rp6,957 triliun rupiah. Angka PDRB dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dengan berbagai variasi. Hal ini dapat dimaklumi karena ada kebijakan kebijakan yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi perekonomian yang ada. Laju pertumbuhan ekonomi dua tahun terakhir mulai membaik. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir adalah 5,77%.

Dari 17 kategori atau sektor-sektor penyusun PDRB dapat dilihat bahwa pertumbuhan yang cukup tinggi pada kategori/sektor Jasa Perusahaan sebesar 9,28%, Jasa keuangan dan Asuransi 9,09% dan disusul Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,11%. Untuk sektor primer, pertumbuhan rata-ratanya di bawah 2%. Hal ini berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di Kota Surakarta.

PDRB Per Kapita ADHK 2010 juga mengalami peningkatan. Pendapatan per kapita pada tahun 2015 mencapai Rp55,61 juta/tahun, sedangkan pada tahun 2014 hanya Rp52,96 juta/tahun. Rata-rata pertumbuhan per kapita PDRB 5,28%. Dengan meningkatnya pendapatan perkapita, diharapkan dapat mencerminkan peningkatan kesejahteraan di masyarakat.

Tabel 2.4
PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kategori (Juta Rupiah) Kota Surakarta Tahun 2011-2015

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	116,492.47	119,290.28	125,292.13	127,634.25	129,926.80
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	115,983.01	118,782.94	124,753.47	127,112.81	129,399.81
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	7.93	7.59	7.73	7.56	7.47
	3 Perikanan	501.54	499.74	530.93	513.88	519.52
B	Pertambangan dan Penggalan	567.20	564.81	562.50	549.59	535.17
C	Industri Pengolahan	1,746,601.12	1,874,945.81	2,044,003.66	2,183,005.67	2,263,868.22
D	Pengadaan Listrik dan Gas	50,905.97	57,293.50	61,821.35	63,499.68	63,379.47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	49,441.81	48,187.39	47,384.05	48,594.69	49,454.24
F	Konstruksi	6,175,996.77	6,512,554.87	6,767,584.32	7,014,333.33	7,390,395.31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,647,923.34	5,764,372.04	6,193,415.14	6,461,014.08	6,730,422.13
H	Transportasi dan Pergudangan	591,897.31	630,022.97	695,071.27	750,148.23	811,007.78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,130,160.17	1,218,509.72	1,288,357.53	1,377,875.81	1,463,048.48
J	Informasi dan Komunikasi	2,646,721.83	2,959,428.76	3,204,036.98	3,490,330.91	3,723,082.11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	818,294.40	842,704.78	872,109.50	887,659.84	968,339.37
L	Real Estate	971,859.64	1,040,600.25	1,094,700.86	1,164,923.59	1,249,065.08
M,N	Jasa Perusahaan	151,629.26	162,516.32	177,726.37	189,915.26	207,530.85
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,426,534.36	1,450,191.36	1,506,447.18	1,543,921.96	1,623,466.15
P	Jasa Pendidikan	888,360.44	982,167.18	1,041,271.81	1,117,903.75	1,194,519.95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	205,314.81	220,699.59	238,715.15	268,758.62	285,590.16
R,S,T,U	Jasa lainnya	229,738.50	239,731.95	254,181.54	264,987.02	273,171.04
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	22,848,439.42	24,123,781.59	25,612,681.32	26,955,056.24	28,426,802.32
	Penduduk Per tengahan Tahun	500.032	500.328	506.619	508.951	511.142
	Pendapatan Per kapita (rupiah)	45,693,954.42	48,215,933.53	50,556,100.97	52,961,987.00	55,614,295.67

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2016

*data sementara

Tabel 2.5
PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kategori (Juta Rupiah) Kota Surakarta Tahun 2011-2015

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	123.953,56	134.120,70	156.759,32	167.748,49	182.751,51
	¹ Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	123.405,35	133.531,37	156.085,01	167.057,60	181.997,00
	² Kehutanan dan Penebangan Kayu	8,42	8,20	9,21	10,31	10,93
	³ Perikanan	539,79	581,12	665,10	680,59	743,58
B	Pertambangan dan Penggalian	589,94	589,56	600,78	697,25	680,26
C	Industri Pengolahan	1.932.330,19	2.184.220,23	2.423.165,97	2.748.121,10	2.959.727,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	51.207,57	57.110,07	58.962,30	60.879,07	63.911,56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	50.226,77	49.150,21	49.564,92	52.562,74	55.285,78
F	Konstruksi	6.463.871,49	7.132.200,69	7.747.302,44	8.636.295,68	9.459.585,64
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.839.528,28	6.167.070,06	6.839.466,39	7.307.631,60	7.893.738,82
H	Transportasi dan Pergudangan	595.691,62	639.607,23	713.390,43	827.899,95	931.398,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.191.045,72	1.416.920,94	1.624.045,03	1.837.723,25	2.028.007,25
J	Informasi dan Komunikasi	2.659.909,56	2.968.644,77	3.201.750,06	3.453.784,47	3.715.658,93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	874.845,28	980.309,86	1.065.842,54	1.173.873,01	1.342.072,22
L	Real Estate	997.530,77	1.081.941,05	1.148.116,83	1.296.580,03	1.436.443,80
M,N	Jasa Perusahaan	160.589,58	181.151,78	213.628,98	240.994,66	279.819,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.454.692,69	1.630.094,69	1.772.641,71	1.888.650,12	2.068.163,83
P	Jasa Pendidikan	1.055.833,37	1.286.013,89	1.507.134,90	1.693.219,76	1.833.219,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	219.979,97	265.871,64	296.594,32	346.392,98	385.675,46
R,S,T,U	Jasa lainnya	237.184,76	250.255,67	273.487,25	305.614,62	326.200,52
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	23.909.011,13	26.425.273,02	29.092.454,16	32.038.668,79	34.962.340,12
	Penduduk Per tengahan Tahun	500.032	500.328	506.619	508.951	511.142
	Pendapatan Per kapita (rupiah)	47.814.962,10	52.815.898,82	57.424.719,87	62.950.399,52	68.400.444,72

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2016

Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Surakarta Tahun 2011-2015

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,24	2,40	5,03	1,87	1,80
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	8,28	2,41	5,03	1,89	1,80
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	4,73	-4,20	1,77	-2,21	-1,16
	3 Perikanan	-0,19	-0,36	6,24	-3,21	1,10
B	Pertambangan dan Penggalian	-5,31	-0,42	-0,41	-2,29	-2,62
C	Industri Pengolahan	6,76	7,35	9,02	6,80	3,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,17	12,55	7,90	2,71	-0,19
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,36	-2,54	-1,67	2,55	1,77
F	Konstruksi	1,91	5,45	3,92	3,65	5,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,45	2,06	7,44	4,32	4,17
H	Transportasi dan Pergudangan	4,54	6,44	10,32	7,92	8,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,16	7,82	5,73	6,95	6,18
J	Informasi dan Komunikasi	8,50	11,81	8,27	8,94	6,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,50	2,98	3,49	1,78	9,09
L	Real Estate	7,09	7,07	5,20	6,41	7,22
M,N	Jasa Perusahaan	11,19	7,18	9,36	6,86	9,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,81	1,66	3,88	2,49	5,15
P	Jasa Pendidikan	13,06	10,56	6,02	7,36	6,85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,05	7,49	8,16	12,59	6,26
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,27	4,35	6,03	4,25	3,09
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6,42	5,58	6,17	5,24	5,46

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2016

*data sementara

Kontribusi per sektoral atau kategori pada PDRB dari tahun 2010 sampai 2015 masih didominasi oleh sektor/kategori konstruksi, sektor/kategori perdagangan besar dan eceran, dan sektor/kategori komunikasi dan informasi. Pada tahun 2010, sektor/kategori konstruksi menyumbang sebesar 27,06%, disusul perdagangan besar dan eceran sebesar 22,58% dan berikutnya sektor informasi dan komunikasi sebesar 11,36%. Meskipun merupakan sektor/kategori dominan selama lima tahun, namun kontribusi tiga sektor/kategori tersebut menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2015, kontribusi sektor/kategori konstruksi menyumbang 27,06%, sektor/kategori perdagangan besar dan eceran sebesar 22,58%, dan sektor/kategori komunikasi dan informasi sebesar 10,63%.

Sektor/kategori yang meningkat kontribusinya adalah sektor/kategori jasa keuangan dan asuransi serta sektor/kategori penyediaan akomodasi dan makan minum. Selama lima tahun terakhir menunjukkan tren positif. Kontribusi sektor/kategori jasa keuangan dan asuransi meningkat dari 3,65% pada tahun 2010 menjadi 3,84% pada tahun 2015. Sektor/kategori penyediaan akomodasi dan makan minum menunjukkan perkembangan meningkat sejak tahun 2010 hingga 2015. Pada tahun 2010 menyumbang 4,87% meningkat menjadi 5,80% pada tahun 2015.

Sektor/kategori yang lain relatif tidak berubah kontribusinya adalah sektor/kategori pertanian, pertambangan dan penggalian, dan industri pengolahan. Sektor/kategori pertanian memiliki kendala keterbatasan lahan, sektor ini relatif hanya memanfaatkan lahan yang tersedia dan tidak dimungkinkan adanya perkembangan. Kontribusi sektor pertanian yang cenderung bertahan di 0,52% adalah capaian di tengah tekanan perubahan alih fungsi lahan.

Tabel 2.7
Kontribusi Kategori/Sektoral PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.52	0.51	0.54	0.52	0.52
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0.52	0.51	0.54	0.52	0.52
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 Perikanan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0019
C	Industri Pengolahan	8.08	8.27	8.33	8.58	8.47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.21	0.22	0.20	0.19	0.18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.21	0.19	0.17	0.16	0.16
F	Konstruksi	27.04	26.99	26.63	26.96	27.06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24.42	23.34	23.51	22.81	22.58
H	Transportasi dan Pergudangan	2.49	2.42	2.45	2.58	2.66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.98	5.36	5.58	5.74	5.80
J	Informasi dan Komunikasi	11.13	11.23	11.01	10.78	10.63
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.66	3.71	3.66	3.66	3.84
L	Real Estate	4.17	4.09	3.95	4.05	4.11
M,N	Jasa Perusahaan	0.67	0.69	0.73	0.75	0.80
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.08	6.17	6.09	5.89	5.92
P	Jasa Pendidikan	4.42	4.87	5.18	5.28	5.24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.92	1.01	1.02	1.08	1.10
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.99	0.95	0.94	0.95	0.93

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2016

*data sementara

b. Laju Inflasi

Inflasi menurut Bank Indonesia adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dampak dari inflasi ini salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa.

Angka inflasi di Kota Surakarta selama lima tahun terakhir (2010-2014) fluktuatif dengan tren meningkat. Pada tahun 2010 inflasi di Kota Surakarta 6,65%, meningkat cukup drastis menjadi 8,01% pada tahun 2014. Angka tersebut disumbang oleh kelompok bahan makanan sebesar 12,49%; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 3,62%; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 8,91%; kelompok sandang 2,74%; kelompok kesehatan 4,93%; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 4,53%; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan memberikan sumbangan inflasi 12,17%.

Tabel 2.8
Tingkat Inflasi Kota Surakarta Tahun 2010-2015

Tahun	Tingkat Inflasi
2010	6,65 %
2011	1,93 %
2012	2,87 %
2013	8,32 %
2014	8,01 %
2015	2,56 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2016

Kota Surakarta merupakan kota dengan urutan inflasi nomor 5 di Provinsi Jawa Tengah pada Desember 2014. Angka inflasi pada tahun 2015 Kota Surakarta lebih rendah dari pada inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,73%. Pengendalian laju inflasi yang dilakukan oleh TPID mempunyai peran untuk mempertahankan daya beli masyarakat.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2016

Gambar 2.6
Perbandingan Laju Inflasi Kota Surakarta dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015

Dibandingkan enam kota di Provinsi Jawa Tengah yang dihitung angka inflasinya, inflasi Kota Surakarta lebih rendah dibandingkan Kudus, Kota Semarang dan Cilacap, dan lebih tinggi dibandingkan Purwokerto dan Kota Tegal.

Tabel 2.9
Perbandingan Laju Inflasi Kota Surakarta dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015

Tahun	Inflasi Kota Surakarta	Inflasi Provinsi Jawa Tengah	Inflasi Nasional
2010	6,65	6,88	6,96
2011	1,93	2,68	3,79
2012	2,87	4,24	4,30
2013	8,32	7,99	8,38
2014	8,01	8,22	8,36
2015	2,56	2,73	3,35

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2016

c. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan antar golongan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Tahun 2010 sebesar 0,338; meningkat menjadi 0,351 pada Tahun 2015. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar masyarakat meningkat selama 2010-2015 sebagai konsekuensi logis dari peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta. Perkembangan Indeks Gini Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 2.10
Indeks Gini Kota Surakarta Tahun 2010-2015

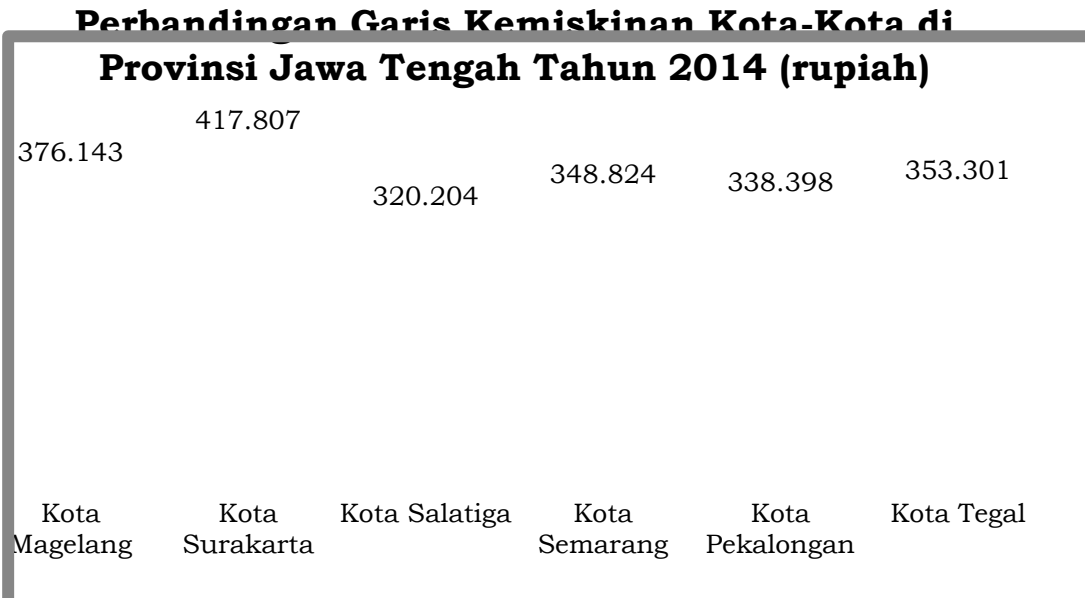
Tahun	Gini Rasio
2010	0,338
2011	0,332

Tahun	Gini Rasio
2012	0,370
2013	0,350
2014	0,353
2015	0,351*

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta dan
* Olah data Bappeda

d. Penduduk Miskin

Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah, tidak terkecuali juga bagi Pemerintah Kota Surakarta. Berbagai macam program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta diharapkan dapat terus menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Pada tahun 2014 garis kemiskinan Kota Surakarta sebesar 417.807 Rp/kapita/bulan mengalami kenaikan dari tahun 2013, yaitu 403.121 Rp/kapita/bulan. Sementara itu, apabila disandingkan dengan garis kemiskinan kota lainnya di Jawa Tengah, garis kemiskinan Kota Surakarta tertinggi. Ini menunjukkan biaya hidup di Kota Surakarta lebih mahal jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.7 di bawah ini.

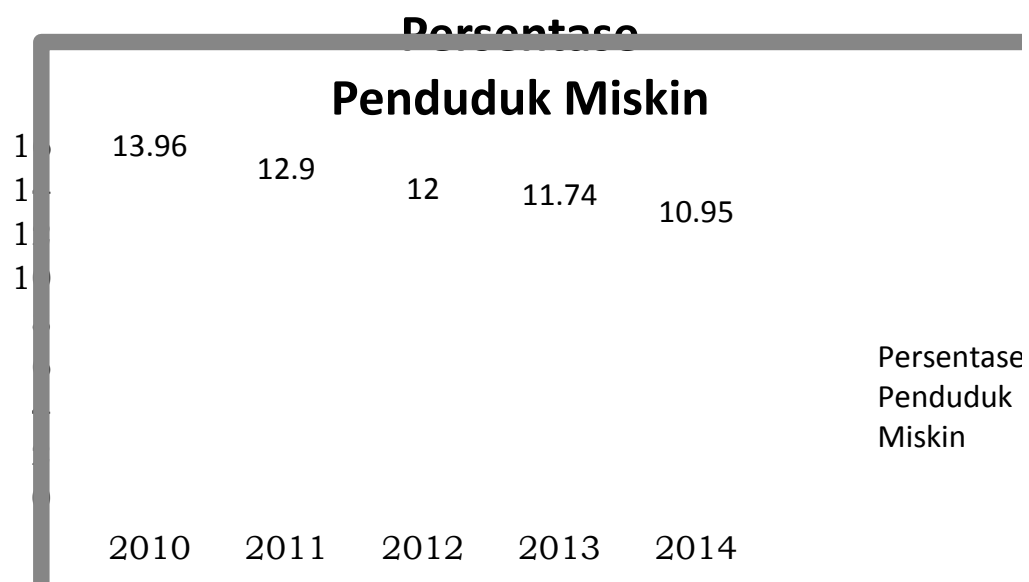


Sumber: TKPK Provinsi Jawa Tengah, 2016

Gambar 2.7
Perbandingan Garis Kemiskinan Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Persentase penduduk miskin di Kota Surakarta kondisinya selalu menurun dari tahun ke tahun, pada tahun 2010 persentase penduduk miskin di Kota Surakarta mencapai 13,96%, pada tahun

2015 persentase penduduk miskin berhasil diturunkan hingga 10,95%. Hal tersebut berarti berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan cukup berhasil.



Sumber: TKPK Provinsi Jawa Tengah, 2016

Gambar 2.8

Persentase Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2010-2014

Basis Data Terpadu (BDT) adalah sistem data elektronik yang berisi nama, alamat, NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu dari sekitar 25 juta rumah tangga di Indonesia. BDT diperoleh dari hasil PPLS 2011 telah menjadi acuan utama penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah. Berdasarkan Pemutakiran Basis Data Terpadu (PBDT), jumlah penduduk miskin di Kota Surakarta per kecamatan dapat dilihat pada Gambar 2.9.



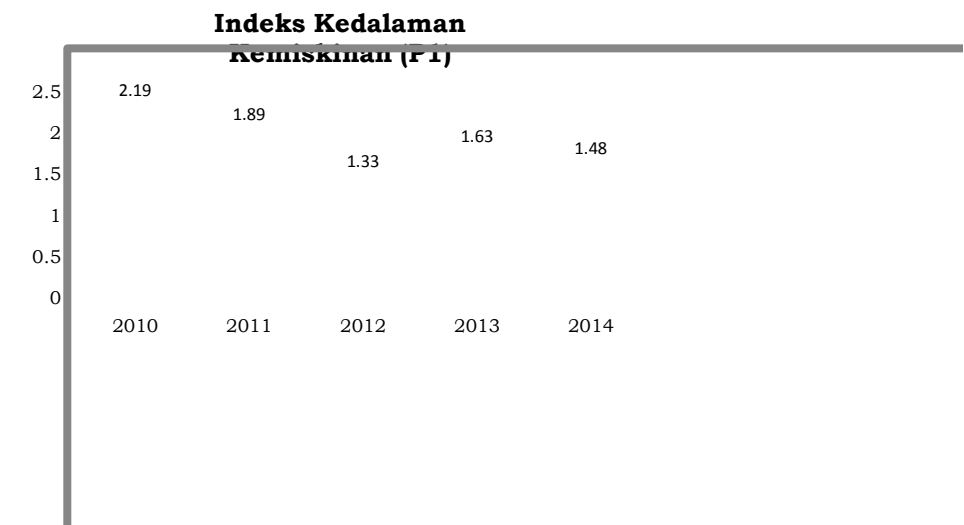
Sumber: PBDT, 2015

Gambar 2.9

Sebaran Penduduk Miskin per Kecamatan

1) Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Perkembangan P1 di Kota Surakarta pada tahun 2010 sebesar 2,19 menjadi 1,33 pada tahun 2012. Pada tahun 2013 meningkat menjadi 1,63, kemudian pada tahun 2014 menurun kembali menjadi 1,48. Kondisi pergerakan P1 di Kota Surakarta dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



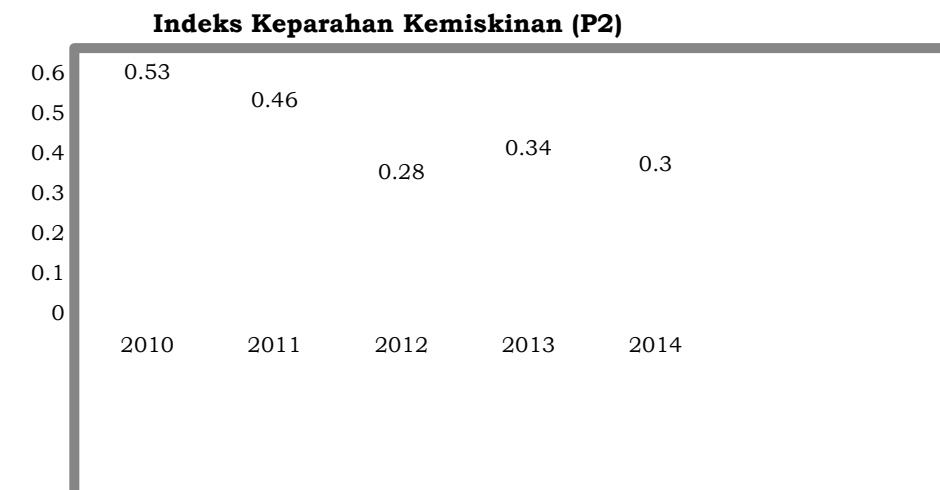
Sumber : TKPK Provinsi Jawa Tengah, 2016

Gambar 2.10
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Surakarta Tahun 2010-2014

Meskipun indeks kedalaman kemiskinan di Kota Surakarta menunjukkan tren menurun tetapi masih perlu menjadi perhatian agar P1 akan terus menurun pada tahun-tahun berikutnya.

2) Indeks Keparahan Kemiskinan

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan satuan indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2010-2014) di Kota Surakarta menunjukkan tren penurunan, yaitu sebesar 0,53 pada tahun 2010 menjadi 0,3 pada tahun 2014. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.11 di bawah ini.



Sumber : TKPK Provinsi Jawa Tengah, 2016

Gambar 2.11
Grafik Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kota Surakarta Tahun 2010-2014

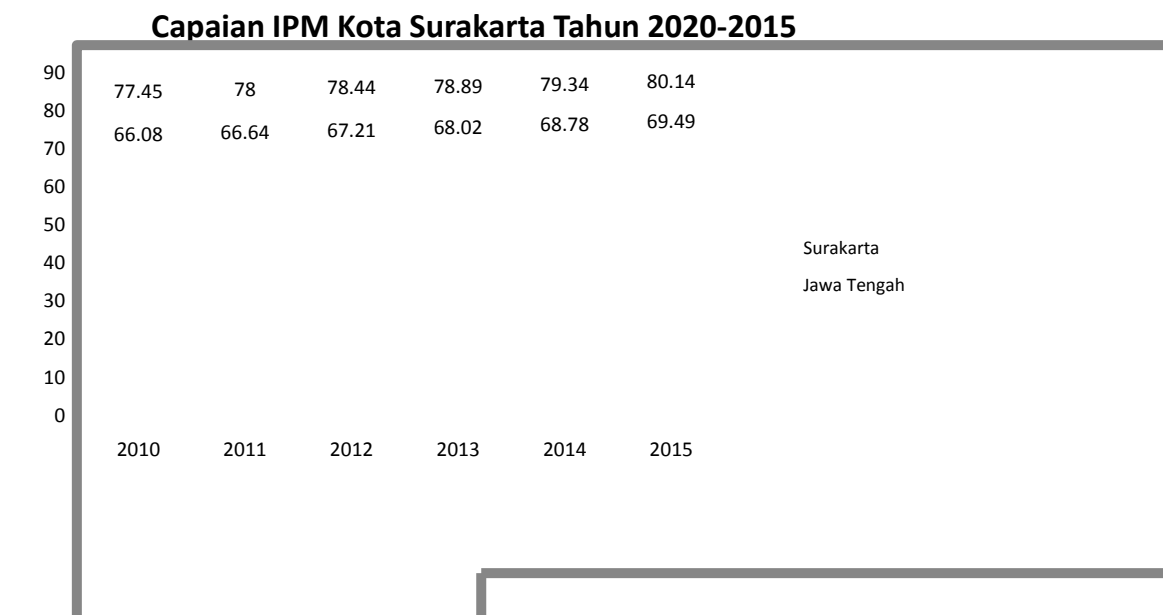
Meskipun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan tren penurunan tapi tetap perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi kenaikan P2 seperti yang terjadi pada tahun 2013 sebesar 0,34 dibandingkan tahun sebelumnya (2012) sebesar 0,28. Ke depan diharapkan nilai P2 lebih kecil lagi sehingga ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin menjadi lebih kecil.

2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: meliputi Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

IPM Kota Surakarta dari tahun ke tahun kondisinya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 IPM Kota Surakarta tercatat sebesar 77,45, meningkat menjadi 79,34 pada tahun 2014; dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 80,14 seperti terlihat pada Gambar 2.12 berikut:

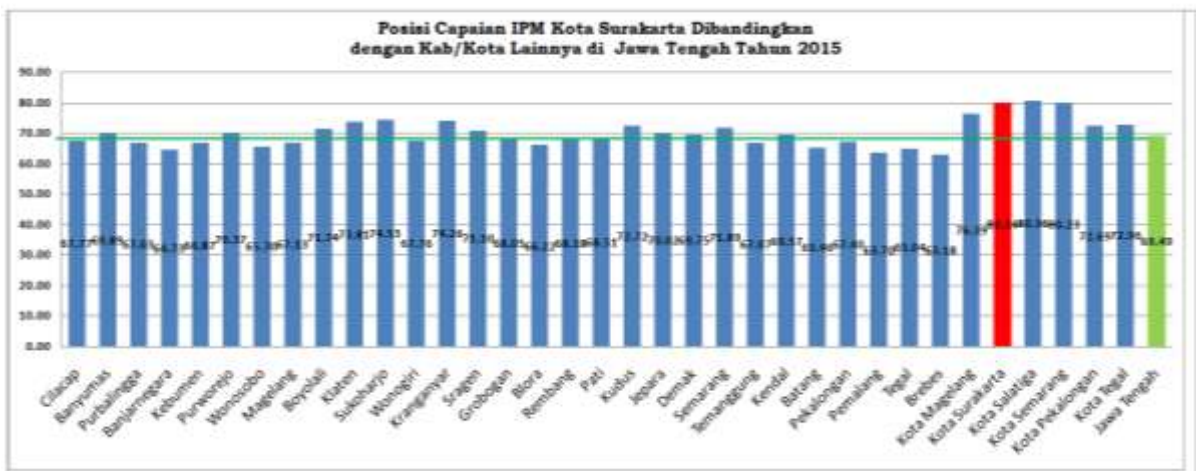


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2016

Gambar 2.12
Capaian IPM Kota Surakarta Tahun 2010-2015

Pemerintah Kota Surakarta perlu terus mendorong peningkatan IPM. Peningkatan IPM merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi).

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Surakarta pada tahun 2014 sebesar 79,34. Angka tersebut merupakan yang tertinggi nomor dua di seluruh wilayah Jawa Tengah, seperti terlihat pada Gambar 2.13 berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2016

Gambar 2.13
Posisi Capaian IPM Kota Surakarta Dibandingkan dengan Kab/Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2015

Capaian tertinggi IPM di Jawa Tengah adalah di Kota Salatiga sebesar 80,96 dan Kota Surakarta menempati peringkat kedua dengan indeks sebesar 80,14.

Gambaran indikator pembentuk IPM secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

1) **Angka Harapan Hidup**

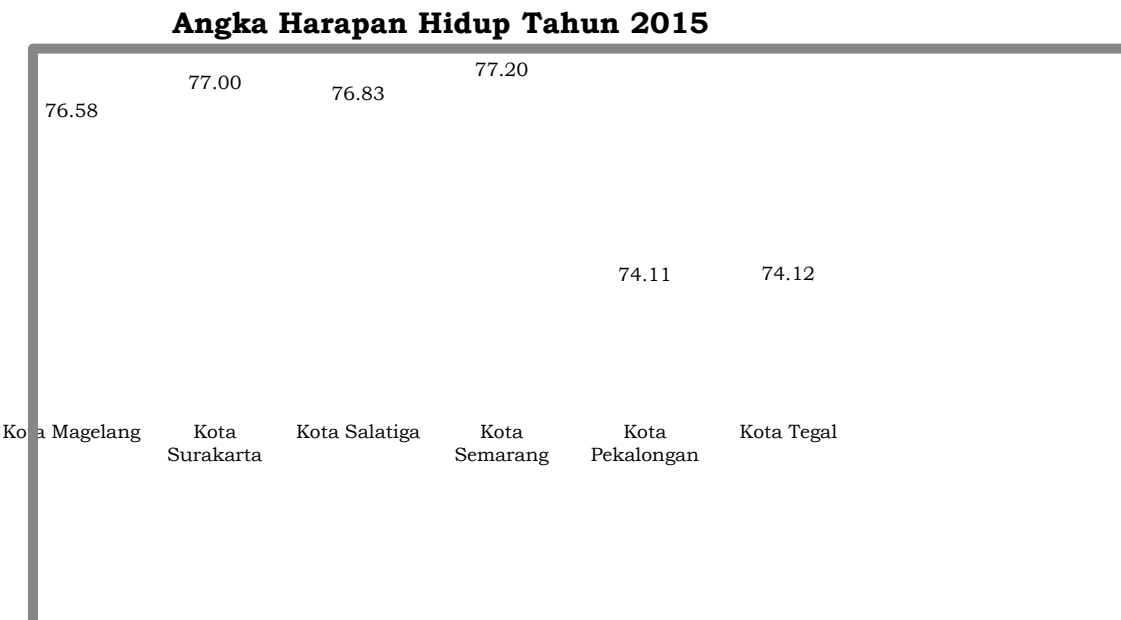
Angka harapan hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat Kota Surakarta secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang. Capaian rata-rata angka harapan hidup penduduk di Kota Surakarta menunjukkan kecenderungan meningkat. Dalam kurun waktu 2010 – 2015 capaian angka harapan hidup meningkat dari 76,85 tahun menjadi 77,0 tahun.

Tabel 2.11
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka harapan hidup (Tahun)	76,85	76,89	76,93	76,97	76,99	77,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2016

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan capaian angka harapan hidup di antara kota-kota di Provinsi Jawa Tengah, angka harapan hidup Kota Surakarta menempati posisi kedua setelah Kota Semarang. Angka harapan hidup kota-kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.14 berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2016

Gambar 2.14
Grafik Angka Harapan Hidup di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

2) Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan harapan lama sekolah di Kota Surakarta cenderung meningkat dari sebesar 13,17 (tahun 2010) menjadi 14,14 (tahun 2015). Perkembangan harapan lama sekolah di Kota Surakarta selama 2010 -2015 dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Harapan lama sekolah (tahun)	13,17	13,34	13,50	13,64	13,92	14,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2016

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan capaian harapan lama sekolah di antara kota-kota di Provinsi Jawa Tengah, angka harapan lama sekolah Kota Surakarta menempati posisi ketiga. Angka harapan lama sekolah kota-kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.15 berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2016

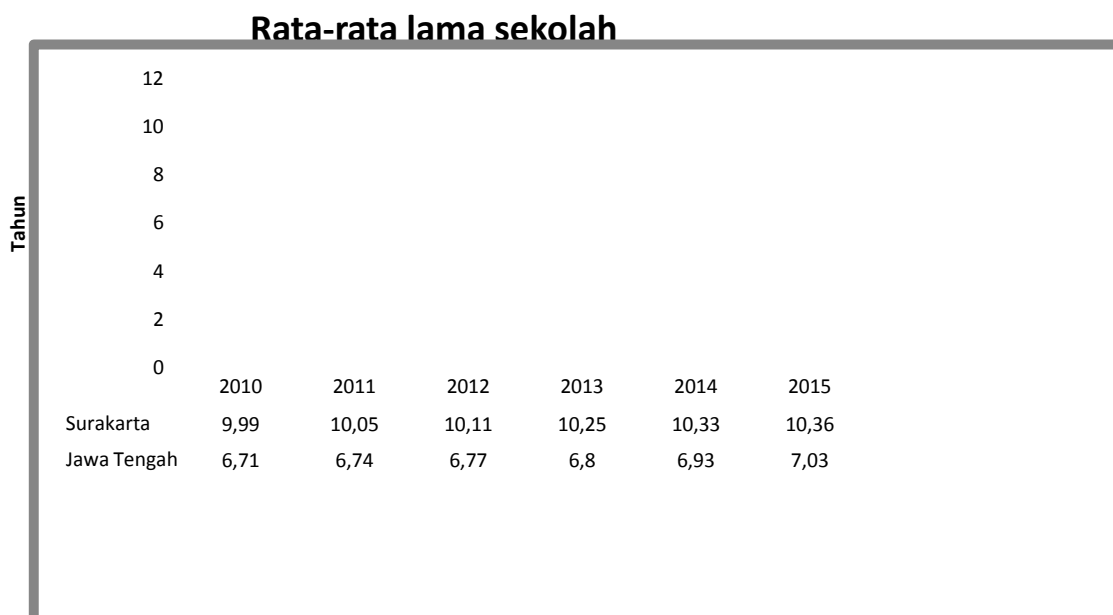
Gambar 2.15
Grafik Harapan Lama Sekolah Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

3) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka rata-rata lama sekolah bermanfaat untuk melihat

kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal. Capaian rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta menunjukkan kecenderungan meningkat. Dalam kurun waktu 2010 – 2015 capaian rata-rata lama sekolah meningkat dari 9,99 tahun menjadi 10,36 tahun.

Angka rata-rata lama sekolah Kota Surakarta selama kurun waktu 2010-2015 sudah berada jauh di atas rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.16 berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2016

Gambar 2.16
Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surakarta Dibandingkan dengan Capaian Provisi Jawa Tengah Tahun 2010-2015

Apabila dibandingkan kota-kota lain di Jawa Tengah. Posisi Rata-rata lama sekolah Kota Surakarta terlihat pada Tabel 2.13, meskipun nilai IPM Kota Surakarta lebih rendah daripada Kota Salatiga namun rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta lebih tinggi daripada di Kota Salatiga.

Tabel 2.13
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surakarta dengan Kota Lain di Jawa Tengah Tahun 2010-2015 (Tahun)

No	Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kota Surakarta	9,99	10,05	10,11	10,25	10,33	10,36
2.	Kota Magelang	10,08	10,14	10,20	10,22	10,27	10,28
3.	Kota Salatiga	8,86	8,97	9,09	9,20	9,37	9,81
4.	Kota Semarang	9,61	9,80	9,92	10,06	10,19	10,20
5.	Kota Pekalongan	7,60	7,72	7,80	7,96	8,12	8,28
6.	Kota Tegal	7,46	7,66	7,85	8,05	8,26	8,27

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tahun 2015

4) **Pengeluaran Per Kapita**

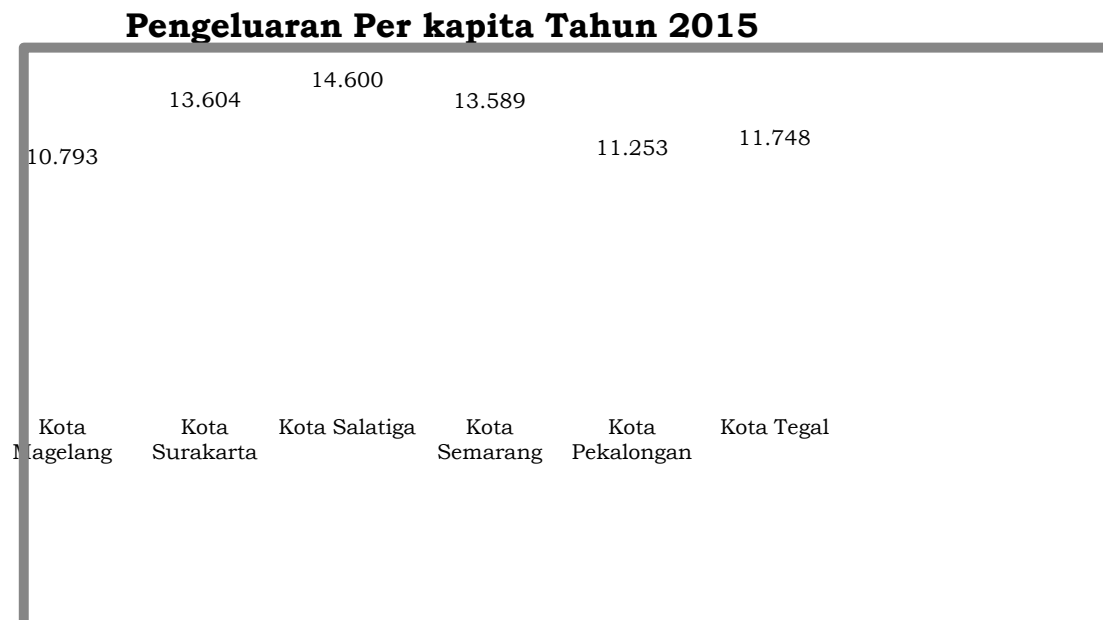
Pengeluaran perkapita di Kota Surakarta mengalami kenaikan dari Rp12.123 ribu (tahun 2010) menjadi Rp13.604 ribu (tahun 2015). Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran per kapita penduduk Kota Surakarta mengalami peningkatan. Perkembangan pengeluaran per kapita Kota Surakarta dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14
Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pengeluaran per kapita (ribu Rp)	12.123	12.464	12.680	12.820	12.907	13.604

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2016

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan capaian pengeluaran per kapita di antara kota-kota di Provinsi Jawa Tengah, capaian pengeluaran per kapita Kota Surakarta menempati posisi kedua. Angka harapan lama sekolah kota-kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.17 berikut.

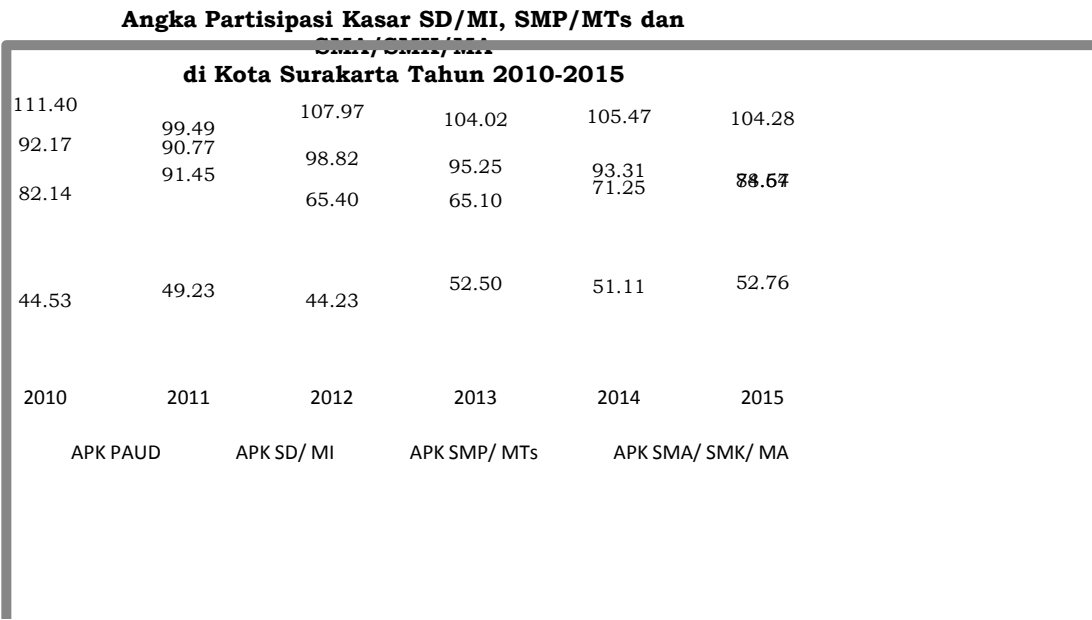


Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2016

Gambar 2.17
Grafik Pengeluaran Per Kapita Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 (Ribu Rupiah)

b. **Angka Partisipasi Kasar**

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tersebut.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2016

Gambar 2.18
Grafik Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kota Surakarta Tahun 2010-2015

Kinerja program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diukur melalui Indikator Angka Partisipasi Kasar. Capaian kinerja PAUD di sini termasuk pendidikan TK/RA. Pada tahun 2010 capaian APK PAUD_{3-6 Tahun} sebesar 44,53%, kemudian pada tahun 2014 APK PAUD_{3-6 Tahun} mengalami kenaikan menjadi sebesar 51,11 dan diperkirakan APK PAUD_{3-6 Tahun} pada tahun 2015 sebesar 52,76.

Tabel 2.15
Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	APK PAUD	44,53	49,23	44,23	52,50	51,11	52,76
2	APK SD/MI	111,40	99,49	107,97	104,02	105,47	104,28
3	APK SMP/MTs	82,14	91,45	98,82	95,25	93,31	88,54
4	APK SMA/SMK/MA	92,17	90,77	65,40	65,10	71,25	74,67

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2016

Penurunan APK SMA/ SMK/ MA pada tahun 2011 sebesar 90,77% menjadi sebesar 65,40% pada tahun 2012 dikarenakan pada tahun 2012 jumlah semu siswa jenjang SMA/ SMK/ MA (pembilangnya) mengalami penurunan. Di sisi yang lain, jumlah penduduk usia 16-18 tahun (penyebutnya) mengalami kenaikan, dengan demikian berakibat APK SMA/ SMK/ MA pada tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

c. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang

yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut.

Capaian APM pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) selama kurun waktu 2010-2015 fluktuatif. Capaian APM SMP sederajat selama kurun waktu sama menunjukkan fluktuatif. Secara rinci capaian APM SD sederajat dan SMP sederajat terlihat pada Tabel 2.16 berikut:

Tabel 2.16
Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan SMP/MTs Kota Surakarta 2010-2015

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka Partisipasi Murni SD sederajat	100	92,75	95,24	96,84	96,95	95,96
2.	Angka Partisipasi Murni SMP sederajat	72,62	70,45	82,03	87,92	83,90	77,21
3.	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/ MA	65,22	67,17	52,48	60,48	63,87	69,94

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2016

Penurunan APM SMA/ SMK/ MA pada tahun 2011 sebesar 67,17% menjadi sebesar 52,48% pda tahun 2012 dikarenakan pada tahun 2012 jumlah siswa jenjang SMA/ SMK/ MA yang berusia 16-18 tahun (pembilangnya) mengalami penurunan. Di sisi yang lain jumlah penduduk usia 16-18 tahun (penyebutnya) mengalami kenaikan, dengan demikian berakibat APM SMA/ SMK/MA pada tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

d. Angka Putus Sekolah

Tingkat keberhasilan Program Wajib Belajar 9 tahun salah satunya dapat diukur melalui Angka Putus Sekolah. Angka putus sekolah menggambarkan murid yang tidak lagi melanjutkan sekolah karena alasan tertentu. Alasan paling menonjol murid tidak bisa melanjutkan sekolah biasanya adalah alasan ekonomi atau ketidakmampuan orang tua membiayai sekolah anaknya. Alasan yang lain adalah karena minat anak untuk bersekolah kurang karena faktor lingkungan sosial.

Angka Putus Sekolah pendidikan dasar di Kota Surakarta menunjukkan kondisi yang relatif baik. Perkembangan Angka Putus Sekolah jenjang pendidikan SD sederajat selama kurun waktu 2010-2014 mendekati sebesar 0 dan diperkirakan pada tahun 2015 juga akan mendekati sebesar 0. Pada target nasional, Angka Putus Sekolah SD sederajat pada tahun 2015 adalah 0,15 sehingga Angka Putus Sekolah Kota Surakarta sudah di bawah Angka Putus Sekolah Nasional. Demikian juga untuk jenjang pendidikan SMP sederajat. Perkembangan Angka Putus Sekolah SMP selama kurun waktu 2010-2015 mengalami fluktuasi, pada tahun 2010 sebesar 1,84 dan pada tahun 2011 sebesar 3,04 pada periode tahun 2012-2014 mendekati sebesar 0. Dengan demikian, Angka Putus Sekolah SMP sederajat lebih rendah daripada target Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu sebesar 0,22. Secara rinci

perkembangan Angka Putus Sekolah di Kota Surakarta terlihat pada Tabel 2.17 berikut:

Tabel 2.17
Capaian Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat dan SMP Sederajat Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat	0	0	0	0	0	0
2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP Sederajat	1,84	3,04	0	0	0	0
3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	1,2	2,45	1,83	1,86	2,44	2,19

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta, 2016
 *data sementara

Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA di Kota Surakarta termasuk kategori tinggi dan masih di atas target Angka Putus Sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (0,22).

e. Angka Kelulusan

Keberhasilan pembangunan pendidikan juga diukur melalui indikator angka kelulusan. Angka kelulusan membandingkan antara jumlah peserta yang lulus ujian dengan jumlah peserta ujian. Angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD sederajat selama tahun 2010-2015 menunjukkan kecenderungan meningkat. Demikian juga untuk jenjang pendidikan SMP sederajat, angka kelulusannya juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Capaian Angka Kelulusan SD sederajat dan SMP sederajat termasuk dalam kategori sedang.

Angka Kelulusan Sekolah Menengah (SM) selama kurun waktu 2010-2015 menunjukkan fluktuatif kecenderungan meningkat. Angka Kelulusan SM di Kota Surakarta termasuk sedang karena di bawah target Angka kelulusan SM Nasional, yaitu sebesar 99,00.Perkembangan Angka Kelulusan terlihat pada Tabel 2.18 berikut:

Tabel 2.18
Capaian Angka Kelulusan SD Sederajat dan SMP Sederajat Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*
1	Angka Kelulusan SD Sederajat	96,4	99,08	100,00	97,63	100	100
2	Angka Kelulusan SMP Sederajat	89,34	89,17	89,59	86,44	89,46	92
3	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	88,13	80,41	96,78	97,84	92,18	94

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta, 2016
 *data sementara

f. Rata-Rata Nilai UN

Perkembangan rata-rata nilai Ujian Nasional pada jenjang pendidikan SD sederajat menunjukkan kecenderungan meningkat,

demikian juga pada jenjang SMP sederajat juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Perkembangan capaian UASBN dan UN terlihat pada Tabel 2.19 berikut:

Tabel 2.19
Capaian Rata-Rata Nilai UASBN SD Sederajat dan Ujian Nasional SMP Sederajat Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*
1	Rata-RATA nilai UASBN SD Sederajat (nilai)	7,39	5,24	5,14	5,3	7,43	7,5
2	Rata-rata nilai UN SMP Sederajat (nilai)	5,11	6,42	5,93	5,61	6,21	6,3
3	Rata-Rata nilai UN SMA /MA	5,24	6,18	4,75	6,46	6,58	6,7
4	Rata-Rata nilai UN SMK	6,65	6,93	7,49	6,76	6,76	6,9

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta, 2016
 *data sementara

Tabel 2.19 menunjukkan rata-rata nilai UASBN SD sederajat dan UN SMP Sederajat selama kurun waktu 2010-2015. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemampuan peserta didik SD sederajat dan SMP sederajat semakin meningkat.

Perkembangan capaian nilai rata-rata UN SMA/MA selama kurun waktu 2010-2015 fluktuatif cenderung meningkat. Nilai rata-rata UN SMA/MA pada tahun 2015 sebesar 6,7 sedangkan rata-rata nilai UN SMK tahun 2015 sebesar 6,9. Capaian nilai rata-rata UN relatif cukup dan perlu ditingkatkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan relatif sedang. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai rata-rata UN.

g. Angka Melanjutkan (AM)

Indikator Angka Melanjutkan merupakan indikator strategis untuk mengukur apakah semua lulusan SD sederajat melanjutkan ke SMP sederajat dan lulusan SMP sederajat melanjutkan ke Sekolah Menengah (SM). Diharapkan semua lulusan SD sederajat melanjutkan ke SMP sederajat, dan semua lulusan SMP sederajat melanjutkan ke SM. Capaian AM ke SMP sederajat dan ke SM terlihat pada Tabel 2.20 berikut:

Tabel 2.20
Capaian Angka Melanjutkan SD Sederajat dan SMP Sederajat Siswa yang Bersekolah di Kota Surakarta Tahun 2010-2015

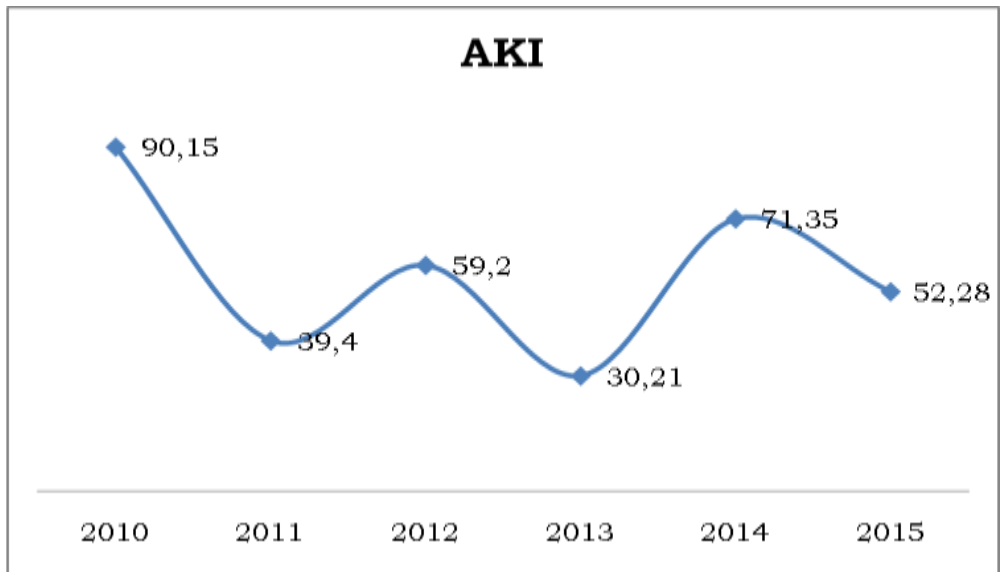
No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*
1	Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat	95,45	98,73	97,56	97,60	100	100
2	Angka Melanjutkan Ke Sekolah menengah (SMA/SMK)	89,25	92,52	88,29	90,08	95,21	97,19

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta, 2016
 *data sementara

Tabel 2.20 menunjukkan bahwa angka melanjutkan baik dari SD sederajat ke SMP sederajat pada tahun 2014 sudah mencapai 100% dan diperkirakan pada tahun 2015 juga akan sebesar 100%, sedangkan untuk angka melanjutkan dari SMP sederajat ke SMA/SMK pada tahun 2014 sebesar 95,71% dan pada tahun 2015 diperkirakan sebesar 97,19% ini menunjukkan kategori baik yaitu mendekati 100%. Hal ini berarti di bidang pendidikan SMP sederajat, SD sederajat dan SMA/SMK Kota Surakarta menjadi magnet di bidang pendidikan bagi daerah sekitarnya seperti Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, dan Sragen.

h. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik), persalinan, abortus (termasuk *abortus mola*), dan masa dalam kurun 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk didalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidentil. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Surakarta dari tahun 2010-2015 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010 AKI sebesar 90,15 per 100.000 kelahiran hidup, mengalami penurunan tajam pada tahun 2013 menjadi 30,21 per 100.000 kelahiran hidup dan sedikit meningkat pada tahun 2015 menjadi 52,28 per 100.000 kelahiran hidup. Salah satu penyebab AKI di Solo belum bisa mencapai angka nol karena masih banyak ibu hamil berisiko tinggi yang terlambat mendapatkan pertolongan penanganan persalinan.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2016

Gambar 2.19
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH di Kota Surakarta
Tahun 2010-2015

Salah satu upaya penurunan kasus kematian ibu adalah melalui pemberian pelayanan yang optimal kepada ibu hamil dan ibu melahirkan. Pelayanan kepada ibu hamil antara lain melalui pemeriksaan rutin selama proses kehamilan. Cakupan pelayanan

antenatal (K4) di Kota Surakarta sudah cukup baik. Pada tahun 2010 cakupan pelayanan *antenatal* (K4) mencapai 94,78%, pada tahun 2015 turun menjadi 92,74%. Selain pemeriksaan kepada ibu hamil, upaya lain dalam rangka mengurangi AKI adalah melalui pertolongan pada persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih. Capaian pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di Kota Surakarta tahun 2013 sudah mencapai 100%, tahun 2015 turun menjadi 92,17%.

i. Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kasus kematian bayi 0-12 bulan dalam kurun waktu satu tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Surakarta dari tahun 2010-2015 fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2010 AKB Kota Surakarta sebesar 6,61 per 1.000 kelahiran hidup turun pada tahun 2015 menjadi 2,82 per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Balita (AKBa) adalah kasus kematian bayi umur 0-12 bulan ditambah anak umur 1-5 tahun dalam kurun waktu satu tahun. AKBa di Kota Surakarta dari tahun 2010-2015 juga fluktuatif cenderung menurun, pada tahun 2010 sebesar 8,41 per 1.000 kelahiran hidup, menurun menjadi 3,56 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. AKBa tertinggi terjadi pada tahun 2010, yaitu 8,41 per 1.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.21
Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita di Kota Surakarta
Tahun 2010-2015

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	AKB (per 1.000 Kelahiran Hidup)	6,61	4,7	6,02	3,22	4,79	2,82
2	AKBa (per 1.000 Kelahiran Hidup)	8,41	5,34	6,61	4,43	5,30	3,56
3	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran Hidup	90,15	39,4	59,2	30,21	71,35	52,28
4	Prevalensi balita gizi kurang	7,54	5,86	3,45	3,72	2,58	1,95

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2016

j. Jaminan Kesehatan Masyarakat

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (PKMS) bertujuan untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat Kota Surakarta terutama masyarakat miskin. Kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat hingga tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.22 berikut.

Tabel 2.22
Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jamkesmas	100.019	100.019	100.019	160.020	160.020	159.255
2	PKMS	208.428	226.254	240.352	241.627	247.599	246.288
3	Jamkesda Provinsi	-	-	-	-	-	925
TOTAL		308.447	326.273	340.371	401.647	407.619	406.468

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2016

k. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan penduduk usia di atas 15 tahun yang bekerja dengan total jumlah penduduk usia di atas 15 tahun ke atas. Rasio penduduk yang bekerja cenderung menurun sejak tahun 2010 hingga dengan 2015. Berdasarkan data yang ada, rasio penduduk bekerja pada tahun 2010 mencapai 98,86. Hal tersebut berarti di setiap 100 penduduk angkatan kerja terdapat 98 orang yang bekerja. Sedangkan rasio penduduk bekerja pada tahun 2015 mencapai 82,01. Hal tersebut berarti pada tahun 2015 di setiap 100 penduduk angkatan kerja terdapat 82 orang yang bekerja.

Tabel 2.23
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Surakarta Tahun 2010-2015

INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Angkatan Kerja (orang)	258.573	272.144	272.144	279.953	279.953	287.762
Jumlah Penduduk Bekerja (orang)	255.621	259.864	265.000	259.864	258.234	235.998
Rasio Penduduk Bekerja	98,86	95,37	97,37	92,82	92,24	82,01

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2016

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat partisipasi tenaga kerja (*labor force participation rate*) adalah rasio antara angkatan kerja (semua yang saat ini bekerja atau mencari kerja) dengan total penduduk usia kerja. Dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014), dua variabel utama bidang ketenagakerjaan menunjukkan kinerja yang membaik. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan tren yang meningkat, sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan tren yang menurun. Walaupun demikian, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Surakarta pada tahun 2011 sebesar 70,52%, mengalami penurunan dari tahun 2012 sebesar 70,49%. Sementara itu tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi sebesar 7,18%, dari tahun 2012 sebesar 6,10%. Namun, kecenderungan dari tahun 2010 hingga 2014 angka pengangguran mengalami penurunan.

Tabel 2.24
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Surakarta Tahun 2010-2015

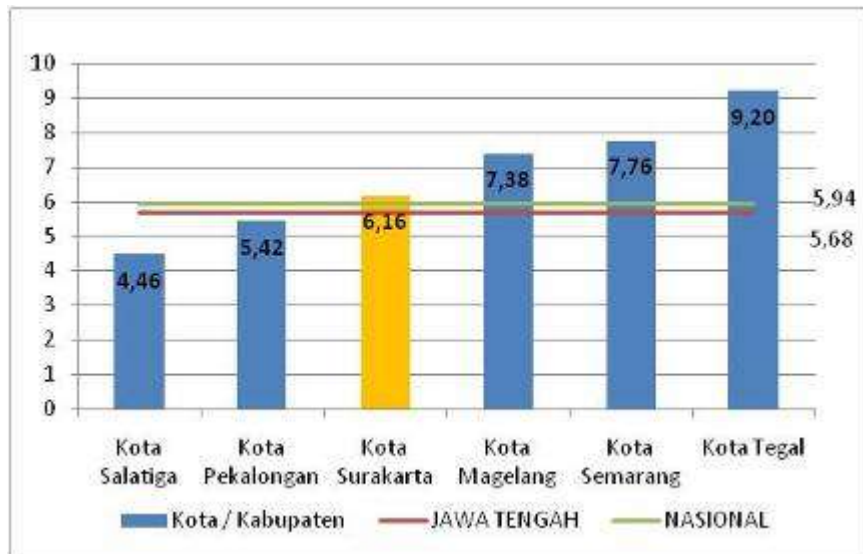
INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	66,81	70,52	70,49	72,57	74,65	70,12
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	8,73	6,40	6,10	7,18	6,08	5,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2016

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kota Surakarta dibandingkan dengan

jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Pada tahun 2014, tingkat pengangguran terbuka Kota Surakarta adalah sebesar 6,08%, lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2013 sebesar 7,18%. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan penurunan tahun (2011-2014). Dengan kondisi tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,08%, menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja ataupun dengan kondisi tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 6 orang merupakan pengangguran. Perkembangan kondisi tingkat pengangguran terbuka di Kota Surakarta ditunjukkan melalui gambar di bawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2015

Gambar 2.20
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kota Surakarta dan Kota Lain di sekitarnya Tahun 2014

m. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

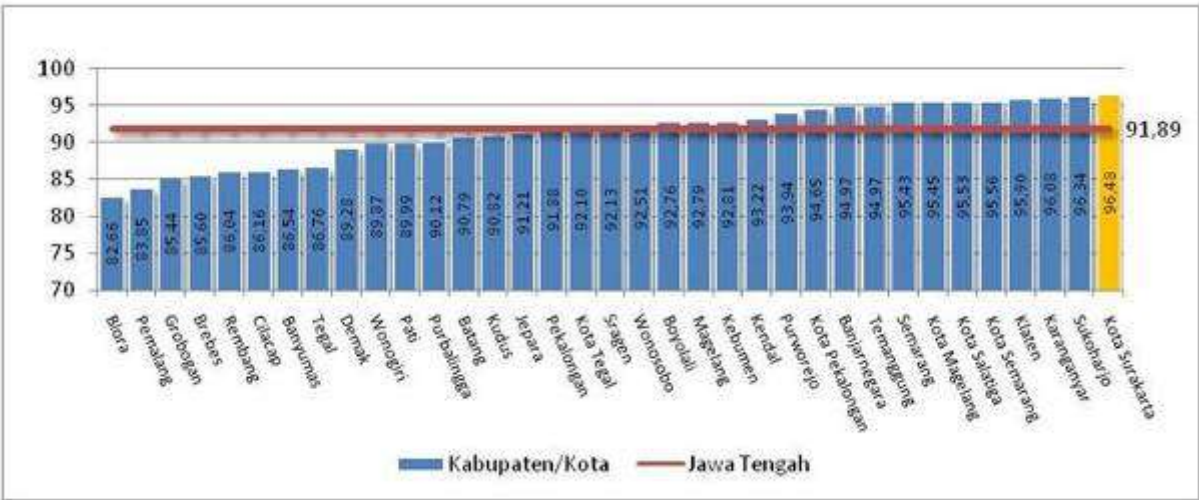
Kapabilitas dasar manusia yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) tetapi secara khusus memberi tekanan pada pencapaian yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan dengan melihat beberapa indikator, yaitu hidup yang lama dan sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surakarta menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 2010-2014, dari sebesar 95,28 pada tahun 2010 menjadi 96,48 pada tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia perempuan di Kota Surakarta semakin membaik, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan. IDG juga meningkat dari sebesar 75,75 pada tahun 2010 menjadi 79,32 pada tahun 2012 dan mengalami penurunan menjadi 74,93 pada tahun 2014. Perkembangan IPG dan IDG Kota Surakarta dapat dilihat pada Tabel 2.25 berikut:

Tabel 2.25
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender di Kota
Surakarta Tahun 2010-2015

INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,28	95,32	95,70	96,16	96,48	96,84
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,75	78,06	79,32	78,93	74,93	74,12

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender (Kementerian PP dan PA & BPS), 2016
*data sementara

Capaian IPG Kota Surakarta pada tahun 2014 adalah 96,48. Capaian ini, jika dibandingkan dengan capaian Kota lainnya di Jawa Tengah seperti Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, dan Kota Magelang adalah yang paling tinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Gambar 2.21
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kota Surakarta dengan Kabupaten/Kota
Lain di Jawa Tengah Tahun 2014

Capaian IDG Kota Surakarta pada tahun 2014 adalah 74,93. Capaian ini, lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Kota lainnya di Jawa Tengah seperti Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Temanggung, dan Kota Magelang namun lebih tinggi dari kota pekalongan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Gambar 2.22
Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Surakarta dengan Kabupaten/Kota
se-Jawa Tengah Tahun 2014

3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Jumlah grup kesenian yang ada di Kota Surakarta pada tahun 2015 tercatat sebanyak 374 organisasi, terdiri atas kelompok seni tari, kelompok seni musik, kelompok seni vokal, kelompok teater, dan kelompok seni rupa. Rasio grup seni per 10.000 penduduk di Kota Surakarta tahun 2015, yaitu 0,0374.

Berdasarkan data Dikpora Kota Surakarta, jumlah olahraga yang berkembang di masyarakat 40 cabang olahraga, dengan sarana prasarana olahraga yang cukup memadai, yaitu sejumlah 221 lapangan olah raga dan 1 gelanggang/balai remaja. Lapangan olahraga tersebut meliputi: lapangan untuk sepakbola, bulu tangkis, tenis, futsal, tenis meja, bola basket, sepak takraw, bola voli, *base ball/soft ball*, atletik, balap sepeda, panahan, bela diri (pencak silat, karate, taekwondo, gulat, judo, tarung derajat, tinju, wushu).

Tabel 2.26
Jumlah Klub Olahraga di Kota Surakarta Tahun 2010-2015

Indikator		Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jenis Olahraga (KLUB)							
1	Cabor Anggar	1	1	1	1	1	1
2	Cabor Angkat Besi	1	1	1	1	1	1
3	Cabor Aeromodeling	1	1	1	1	1	1
4	Cabor Atletik	2	2	2	2	3	3
5	Cabor Basket	1	1	2	2	3	3
6	Cabor Bola Voli/Voli Pantai	2	2	2	2	2	2
7	Cabor Bowling	1	1	1	1	1	1
8	Cabor Balap Sepeda	1	1	1	1	1	1
9	Cabor Balap Motor	1	1	1	1	1	1
10	Cabor Billiard	2	2	2	2	2	2
11	Cabor Bridge	1	1	1	1	1	1
12	Cabor Bulu Tangkis	7	7	8	8	10	10
13	Cabor Catur	2	2	2	2	3	3
14	Cabor Dansa	7	7	8	8	10	10
15	Cabor Drum Band	10	12	14	16	18	20
16	Cabor Golf	0	0	0	0	0	0
17	Cabor Gantole	0	0	0	0	0	0
18	Cabor Gulat	1	1	1	1	1	1
19	Cabor Judo	1	1	1	1	1	1
20	Cabor Karate	7	7	8	8	9	9

Indikator		Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
21	Cabor Kempo	1	1	1	1	1	1
22	Cabor Menembak	1	1	1	1	1	1
23	Cabor Panahan	2	2	2	2	3	3
24	Cabor Paralayang	1	1	1	1	1	1
25	Cabor Panjat Tebing	4	4	5	5	6	6
26	Cabor Pencak Silat	10	10	12	12	14	14
27	Cabor Renang/Loncat Indah	3	3	4	4	5	5
28	Cabor Sepak Takraw	3	3	3	3	3	3
29	Cabor Sepak Bola/Futsal	22	22	24	24	26	26
30	Cabor Senam	11	11	13	13	15	15
31	Cabor Sepatu Roda	2	2	2	2	2	2
32	Cabor Squash	0	0	0	0	0	0
33	Cabor Softball/Baseball	1	1	1	1	1	1
34	Cabor Tarung Drajat	1	1	1	1	1	1
35	Cabor Tae Kwondo	10	10	11	11	13	13
36	Cabor Tenis Meja	2	2	2	2	2	2
37	Cabor Tenis Lapangan	2	2	2	2	4	4
38	Cabor Tinju	1	1	1	1	1	1
39	Cabor Wushu	1	1	1	1	1	1
40	Cabor Criket	1	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta, 2016

C. Aspek Pelayanan Umum

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

1) Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran strategis dalam mempersiapkan anak-anak Indonesia, menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter baik. PAUD mempersiapkan anak sejak dini sejak usia sangat muda sehingga tumbuh kembang anak dan perkembangan emosional dan juga psikomotorik anak menjadi tarpantau dan terbina. PAUD mendidik anak menjadi insan yang berkualitas di kemudian hari.

2) Pendidikan Dasar 9 Tahun

Pendidikan dasar 9 tahun, merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Sejak tahun

2003, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003) yang bertujuan untuk mengatur dan memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Melalui pendidikan dasar 9 tahun diharapkan di masa mendatang, pendidikan minimal penduduk Indonesia adalah lulus SMP/MTs.

Untuk menunjang dan meningkatkan kualitas pendidikan dasar 9 tahun, dibutuhkan sarana prasarana dan tenaga pendidik yang mendukung proses pembelajaran. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah yang tersedia dibandingkan dengan penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah tahun 2010-2015 terlihat pada Tabel 2.27 berikut:

Tabel 2.27
Rasio Ketersediaan Sekolah Jenjang SD/MI dan SMP/MTs dan Rasio Guru terhadap Murid Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	34,1	54,25	50,72	61,28	49,78	34,1
2	Rasio guru/murid	71,45	58,63	60,27	60,43	89,94	91

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta, 2016

Rasio ketersediaan sekolah pendidikan per 100 penduduk usia pendidikan dasar menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah baik SD/MI maupun SMP/MTs relatif memadai. Sedangkan ketersediaan guru/murid pendidikan dasar cukup memadai. Rasio jumlah guru terhadap jumlah murid pendidikan dasar cenderung meningkat dari tahun 2010-2015.

3) Pendidikan Menengah

Pelayanan pendidikan menengah memiliki arti penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia umumnya dan di Kota Surakarta pada khususnya. Rasio ketersediaan sekolah menengah per 10.000 penduduk usia sekolah menengah selama kurun waktu 2010-2015 cenderung meningkat. Rasio ketersediaan sekolah menengah terhadap penduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk pada tahun 2015 sebesar 35.

Tabel 2.28
Rasio Ketersediaan Sekolah Menengah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Menengah Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Ketersediaan Sekolah Menengah	25,99	34,71	32,86	33,52	33,52	35

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta, 2016

4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah guru memenuhi kualifikasi D4/S1 selama kurun waktu 2010-2015 menunjukkan peningkatan. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 pada tahun 2015 sebesar 83%. Guru SD yang memenuhi kualifikasi D4/S1 sebesar 80%. Sedangkan Guru SMP yang memenuhi kualifikasi D4/S1 sebesar 85%. Guru SMA yang memenuhi kualifikasi D4/S1 sebesar 88%. Secara rinci perkembangan guru yang memiliki kualifikasi D4/S1 terlihat pada Tabel 2.29 berikut:

Tabel 2.29
Persentase Pendidik dengan Kualifikasi D4/S1 Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	53,38	67,79	74,03	77,62	77,62	80
2	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	75,13	78,83	82,11	82,11	82,10	85
3	Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	71,71	76,79	78,72	81,79	81,79	83
4	Guru SMA/SMK/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	88,62	85,44	81,19	85,99	85,99	88

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta, 2016

Tabel 2.29 menggambarkan bahwa secara keseluruhan kualifikasi guru di Kota Surakarta cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan terutama Guru SD/MI. capaian kinerja urusan pendidikan lainnya dapat dilihat dalam table berikut

Tabel 2.30
Capaian Indikator Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2010-2015

NO	NAMA INDIKATOR	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*
1	ANGKA MELEK HURUF	96,68	96,71	96,73	96,87	97,62	97,81
2	APK PAUD 3-6 TAHUN	44,53	49,23	44,23	52,50	51,11	52,76
3	APK SD/MI/PAKET A	113,40	99,49	107,97	104,02	105,47	108,25
4	APK SMP/MTs/PAKET B	82,14	91,45	98,82	95,25	93,31	96,65
5	APK SMA/MA/SMK/PAKET C	92,17	90,77	65,40	65,10	71,25	76,66
6	APM SD/MI/PAKET A	100,00	92,75	95,24	96,84	96,95	97,90
7	APM SMP/MTs/PAKET B	72,62	70,45	82,03	87,92	83,90	87,39
8	APM SMA/MA/SMK/PAKET C	65,22	67,17	52,48	60,48	63,87	66,81
9	APS 7-12 TAHUN	100,00	99,55	99,54	99,82	99,60	99,69
10	APS 13-15 TAHUN	91,67	96,05	97,94	95,79	97,21	98,46
11	APS 16-18 TAHUN	80,87	77,47	64,34	69,42	81,22	84,60
12	APtS SD/MI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA INDIKATOR	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*
13	APtS SMP/MTs	1,84	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00
14	APtS SMA/MA/SMK	1,20	2,45	1,83	1,86	2,44	2,19
15	AM dari SD/MI ke SMP/MTs	95,45	98,73	97,56	97,60	100,00	100,00
18	AM dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	89,25	92,52	88,29	90,08	95,71	97,19

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta, 2016

b. Kesehatan

Berdasarkan amanat Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat.

Capaian pembangunan kesehatan dari 2010-2015 dapat dilihat dari beberapa indikator di bawah ini.

1) Rasio Posyandu per satuan Balita

Jumlah posyandu di Kota Surakarta pada tahun 2015 sebanyak 603 posyandu. Rasio posyandu per satuan balita menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2010 rasio posyandu dengan balita sebesar 14,7 per 1.000 balita meningkat pada tahun 2015 menjadi 15,31 per 1.000 balita.

2) Rasio Tenaga Kesehatan

Keberhasilan pelayanan kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh rasio tenaga kesehatan yang ada. Ketersediaan tenaga kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan Kota Surakarta per Desember 2015, sebagai berikut: dokter umum sebanyak 31 orang, dokter gigi 20 orang, perawat 107 orang, bidan 94 orang, apoteker 4 orang, tenaga teknis Kefarmasian 56 orang, perawat gigi 16 orang, sarjana kesehatan masyarakat 12 orang, sanitarian 12 orang, tenaga gizi 19 orang, pranata laboratorium 25 orang, rekam medis 3 orang, fisioterapi 1 orang, tenaga non kesehatan 229 orang.

Jika dilihat dari rasio tenaga kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 81/Menkes/SK/I/2014 tentang pedoman penyusunan dan perencanaan SDM di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit, ketenagaan yang ada saat ini masih sangat kurang untuk melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

3) Penyakit Menular

Tingkat Prevalensi TB Paru di Kota Surakarta pada tahun 2014 adalah 105,6 per 100.000 penduduk, dan meningkat pada Tahun 2015 menjadi 126,2 per 100.000 penduduk. Sedangkan jumlah kematian akibat TB paru pada tahun 2014 sebanyak 1,0 per 100.000 penduduk, angka ini menurun pada tahun 2015 menjadi 0,2 per 100.000 penduduk.

Prevalensi HIV pada penduduk usia 15-24 tahun pada tahun 2010 mencapai angka 0,009, meningkat menjadi 0,015 pada tahun 2015 (prevalensi HIV AIDS pada populasi dewasa). Sementara itu proporsi penduduk yang memiliki pengetahuan tentang HIV AIDS pada tahun 2010 sebesar 13,5%, tahun 2015 meningkat menjadi 45%. Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat *antiretroviral* mencapai 90% pada tahun 2015.

Incident Rate (IR) DBD pada tahun 2010-2015 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010 IR DBD sebesar 10,1 per 10.000 penduduk turun tahun 2015 menjadi 9,2 per 10.000 penduduk. Angka Kematian karena DBD (CFR DBD) justru cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 CFR DBD sebesar 1,6 meningkat pada tahun 2015 menjadi 1,9.

4) Lingkungan yang Sehat

Pembangunan kesehatan lingkungan dilihat dari presentase rumah sehat, tempat-tempat umum yang sehat. Cakupan rumah sehat di Kota Surakarta dari tahun 2010-2015 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 cakupan rumah sehat sebesar 68,19% naik menjadi 73% pada tahun 2015. Angka bebas jentik cenderung mengalami peningkatan dari 92,5% pada tahun 2010 menjadi 94,61% pada tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa program pemberantasan sarang nyamuk berjalan dengan baik.

Kondisi lingkungan sehat juga dilihat dari cakupan kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan. Cakupan ini cenderung meningkat, yaitu dari 2010 sebesar 48% menjadi 62,19% pada tahun 2015. Namun capaian ini masih relatif rendah dibandingkan dengan target MDG's, yaitu 65%. Sedangkan cakupan penggunaan sarana penanganan air limbah dan jamban keluarga yang memenuhi syarat kesehatan relatif baik. Hal ini dapat dilihat dari cakupan tersebut pada tahun 2010 sebesar 83% meningkat pada tahun 2015 menjadi 90,17%.

5) Gizi Masyarakat

Di wilayah Kota Surakarta tidak ditemukan prevalensi gizi buruk. Kasus yang masih ditemukan adalah prevalensi gizi kurang, yang kasusnya cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010 prevalensi gizi kurang sebesar 7,54 menjadi 1,95 pada tahun 2015. Sedangkan persentase bayi 0-6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif relatif masih kurang. Pada tahun 2010 persentase bayi 0-6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif sebesar 26,3% meningkat pada tahun 2015 menjadi 73,64%.

6) Rasio Sarana Kesehatan per Satuan Penduduk

Sarana kesehatan di Kota Surakarta meliputi sarana kesehatan dasar dan sarana kesehatan rujukan. Sarana Kesehatan dasar meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, klinik, dokter praktik swasta, sedangkan sarana kesehatan rujukan meliputi rumah sakit tipe A, B, C dan D.

Sarana kesehatan dasar di Kota Surakarta sebanyak 17 puskesmas di antaranya 4 puskesmas dengan perawatan, sedangkan puskesmas pembantu sebanyak 24 puskesmas pembantu, 69 klinik, dan 5 rumah bersalin. Jumlah rumah sakit di Kota Surakarta berjumlah 14 unit, 1 RS tipe A, 3 RS tipe B, 5 RS tipe C, 2 RS tipe D, dan 3 RS Khusus. Berdasarkan data yang ada, dapat diketahui bahwa rasio sarana kesehatan dasar terhadap penduduk sebesar 0,23; sedangkan rasio sarana kesehatan rujukan terhadap penduduk sebesar 0,27.

Jumlah rumah sakit yang ada di Kota Surakarta sampai dengan 2015 sebanyak 14 rumah sakit dengan rincian 11 rumah sakit umum dan 3 rumah sakit khusus. Indikator pelayanan rumah sakit ditunjukkan dengan pemanfaatan tempat tidur (BOR = *Bed Ocupansi Rate*) dan rata-rata lama pasien dirawat (AVLOS = *Average Length of Stay*). Rata-rata BOR Tahun 2010 sebesar 64,4% mengalami peningkatan menjadi 67.9% pada tahun 2015. Rata-rata AVLOS pada tahun 2010 sebesar 4,4 hari menurun menjadi 3,9 hari pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik.

Pencapaian kinerja urusan kesehatan dengan mendasarkan beberapa indikator yang diatur dengan beberapa peraturan perundangan yang berlaku dapat diidentifikasi pada tabel berikut:

Tabel 2.31
Capaian Indikator Pembangunan Kesehatan Kota Surakarta 2010-2015

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan (%)	100	100	100	100	100	100
2.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100	100
3.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin(%)	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) (%)	43,50	44,48	44,44	42,55	38,54	53,17
5.	Rasio posyandu per satuan balita	14,96	15,05	16,07	16,45	16,84	15,31
6.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100	100
7.	Persentase Bayi ditimbang berat badannya (D/S) (%)	69,53	72,73	83,50	80,47	79,19	71,63
8.	Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif (%)	26,30	42,05	46,07	55,78	67,72	73,64

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
9.	Persentase Balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A (%)	99,90	99,86	100	100	100	100
10.	Persentase Ibu hamil mendapat 90 tablet besi (%)	93,14	96,35	97,14	97,50	96,74	93,10
11.	Cakupan Rumah Sehat (%)	68,19	64,83	74,99	71,71	71,38	73
12.	Angka jentik aedes	92,5	94,38	95,36	94,95	94,11	94,61
13.	Cakupan Kualitas Air minum yang memenuhi syarat kesehatan (%)	48	41,70	56,58	51,10	65,34	62,19
14.	Cakupan penggunaan Sarana air limbah dan jamban keluarga yang memenuhi syarat (%)	83	90,79	93,46	86,85	89,08	90,17
15.	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) (%)	98,04	100	100	100	100	98,04
16.	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	109,5	114	102	121,4	105,6	126,2 5
17.	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0	0,6	1,2	1,4	1,0	0,2
18.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR) (%)	75,57	78,10	70,15	80	63,1	65,5
19.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (<i>success rate</i>) (%)	90	96,46	95,35	90,96	84,20	93,7
20.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	100	100	100	100	100	100
21.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100	100
22.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun	0,009	0,007	0,006	0,017	0,020	0,015*
23.	Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS (%)	13,5	14,11	22,59	22,57	35	45
24.	Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat <i>antiretroviral</i> (%)	94,2	88	87	87	89	90
25.	Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk	0	0	0	0	0	0
26.	Persentase Diare KLB dapat ditangani < 24 jam	100	100	100	100	100	100
27.	<i>Acute Flaccid Paralysis</i> (AFP) Rate (%)	0,86	3,3	2,68	3,5	0,86	0
28.	Rasio dokter per satuan penduduk	1,22	1,2	1,28	1,5	1,8	2,0
29.	Cakupan puskesmas (%)	340	340	340	340	340	340
30.	Cakupan pembantu puskesmas (%)	47	47	47	47	47	47
31.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,2	0,2	0,2	0,18	0,22	0,23
32.	Proporsi Puskesmas PONEB sesuai standar (%)	23,53	23,53	23,53	23,53	23,53	23,53
33.	Rasio Rumah Sakit per satuan	0,24	0,26	0,26	0,24	0,27	0,25

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	penduduk						
34.	BOR (<i>Bed Occupancy Ratio</i>) (%)	64,4	66,5	68,3	69,5	72,2	67,9
35.	AVLOS (<i>Average Length of Stay</i> = Rata-rata lamanya pasien dirawat) (hari)	4,4	5,1	5,2	5,0	2,9	3,9
36.	TOI (<i>Turn Over Interval</i>)	2,4	3,05	3,05	5,78	3,8	2
37.	BTO (<i>Bed Turn Over</i> = Angka perputaran tempat tidur) (%)	72,3	69,2	59,84	39,78	46,31	70
38.	NDR (<i>Net Death Rate</i>) (%)	2,6	2,2	2,2	2,1	2,3	0,05
39.	Proporsi RS PONEK (%)	7,69	7,69	15,38	21,43	23,07	30
40.	Proporsi RS terakreditasi (%)	6,1	69	53	46	40	50
41.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan(%)	100	100	100	100	100	100
42.	Cakupan kunjungan bayi (%)	94,58	97,22	97,56	95,50	96,36	95,47
43.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	94,78	96,55	97,62	97,73	96,58	92,74
44.	Cakupan pelayanan nifas (%)	98,35	99,73	99,73	99,85	94,45	92,13
45.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	17,03	16,49	15,98	20,47	17,87	23,64
46.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	72,85	83,31	78,64	99,60	91,99	98,55
47.	Cakupan pelayanan anak balita (%)	69,63	93,20	78,64	80,47	82,58	73,75
48.	Cakupan peserta KB aktif (%)	81,10	83,22	84,27	81,85	80,96	66,83

Sumber Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2016

*Prevalensi HIV/AIDS pada populasi dewasa

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum adalah jenis pelayanan publik bidang pekerjaan umum yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Pentingnya penyelenggaraan urusan pekerjaan umum ini telah disadari oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan secara bertahap dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2019. Melihat kondisi tersebut perlu dilakukan penyusunan target SPM per tahun yang diintegrasikan dengan RPJMD.

Urusan pekerjaan umum merupakan pelayanan dalam menyediakan sarana dan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan pembangunan suatu daerah. Pekerjaan umum merupakan salah satu urusan pada suatu daerah yang perlu mendapatkan perhatian.

Pelayanan urusan pekerjaan umum difokuskan pada pelayanan urusan Jalan dan Jembatan, Sumber Daya Air, Perkotaan dan Perdesaan, Air Minum dan Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung dan Lingkungan, dan Jasa Konstruksi.

1) Jalan dan Jembatan

Kondisi jalan di Kota Surakarta sebagian besar dalam kondisi yang baik. Panjang jalan Kota Surakarta tahun 2014 adalah 676.656 km, kondisi jalan baik tahun 2010 sebesar 60%. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang ditetapkan sebesar 90% tahun 2020, tahun 2014 capaian kondisi jalan baik di Surakarta sudah mendekati target SPM yang ditetapkan tahun 2019. Tahun 2015 kondisi jalan baik di Kota Surakarta sebesar 73,37%. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan prasarana jalan baik di Kota Surakarta. Sementara itu untuk kondisi jembatan baik di Kota Surakarta tahun 2015 sebesar 85%, kondisi ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi jembatan baik pada tahun 2010 yang mencapai 80%.

2) Sumber daya air

Indikator SPM untuk jenis pelayanan Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat ada dua, yaitu 1) persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari dengan target 100% untuk tahun 2019, dan 2) persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya dengan target 70% tahun 2019. Rasio jaringan irigasi Kota Surakarta tahun 2015 sebesar 0,246, sementara itu persentase luas irigasi dalam kondisi baik sebesar 1,97%. Kondisi ini masih jauh dari target SPM seperti disebutkan di atas.

3) Air Minum dan Sanitasi

Pemenuhan terhadap air minum dan sanitasi merupakan salah satu target dari 8 tujuan dan 18 target MDG's. Air minum dan sanitasi termasuk dalam Tujuan 7 MDG's, yaitu pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan target 10 yakni mengurangi separuh, pada tahun 2015, dari proporsi penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi dasar.

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak tahun 2010 sebesar 71,35%, tahun 2015 meningkat menjadi 79,61%. Capaian kinerja penyediaan air minum layak di Kota Surakarta masih relatif rendah.

Dalam pemenuhan sanitasi Kota Surakarta melakukan beberapa kerjasama dengan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian antara lain kerjasama pengelolaan sampah tahun 2012-2013 dengan Bappenas, sanitasi perkotaan berbasis masyarakat dengan Kementerian Pekerjaan Umum RI dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2013. Selain dengan kementerian dan lembaga non pemerintah, Kota Surakarta juga bekerja sama dengan lembaga luar negeri dalam peningkatan akses masyarakat untuk air minum dan sanitasi. Salah satu kerjasama yang dilakukan dengan *Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene (IUWASH)* tahun 2012-2015.

4) Drainase

Drainase secara umum, didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas (Dr. Ir. Suripin, M. Eng (2004)). Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota. Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kota Surakarta tahun 2010 sebesar 70,00%. Kondisi tahun 2015 tidak berubah seperti tahun 2010, yaitu 70%.

Sampai dengan tahun 2015 Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi banjir. Tahun 2015 presentase wilayah bebas banjir mencapai 90%. Kondisi ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2010 dimana wilayah bebas banjir baru mencapai 85%.

Secara rinci capaian kinerja urusan pekerjaan umum di Kota Surakarta dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	70,00	75,00	78,00	80,00	60,00	69,77
2.	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (%)	19,00	20,00	25,00	27,00	30,00	35,00
3.	Panjang jalan kota dalam kondisi baik (%)	60,00	63,00	68,00	69,00	72,00	73,37
4.	Panjang jembatan kota dalam kondisi baik (%)	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00
5.	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan (%)	25,00	25,00	25,00	30,00	30,00	60,00
6.	Rasio Jaringan Irigasi	0,244	0,244	0,246	0,246	0,246	0,246
7.	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
8.	Persentase wilayah bebas banjir (%)	85,00	85,00	89,00	90,00	91,00	90,00
9.	Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi :						
	Air Minum Perkotaan (%) (PDAM)	71,35	77,23	78,44	79,65	80,94	79,61
	Air Minum (sumur dalam) (%) (DPU)	0,25	0,41	0,59	0,70	0,70	1,3
	Sanitasi (%)	80,0	85,0	87,0	96,10	97,00	97,10
10.	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di	ada	ada	ada	ada	ada	ada

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	kabupaten/kota						

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian, 2016

5) Penataan Ruang

Penataan Ruang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Penataan ruang di daerah ini sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota maupun keserasian dengan wilayah di sekitarnya. Peraturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta selama sepuluh tahun, telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan penjabaran RTRW ke dalam rencana distribusi penataan ruang dan bangunan serta bukan bangunan pada kawasan kota. Pemerintah Kota Surakarta menindaklanjuti RTRW dengan penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK). Pada tahun 2013, sebanyak 6 dokumen RDTRK yang telah disesuaikan dengan RTRW terbaru selesai dilaksanakan. Kota Surakarta sampai dengan tahun 2015 masih belum mempunyai Perda RDTRK namun demikian sudah ada kajian RDTRK.

Capaian kinerja Urusan Penataan Ruang selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.33 sebagai berikut:

Tabel 2.33
Capaian Pembangunan Bidang Tata Ruang Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan serta digital.	Tad	50%	50%	50%	50%	50%
2.	Persentase kawasan memiliki RTBL	1,75	3,50	3,50	0	3,50	3,50
3.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (ruang terbuka)	18,54	11,9	18,54	12,63	12,03	9,72*
4.	Jumlah pengajuan IMB	1.134	1.167	1.462	1.431	1.559	1.395

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Dins Tata Ruang Kota dan Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta, April 2016

*data dari BLH Kota Surakarta

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jumlah penduduk yang semakin meningkat berdampak pada peningkatan jumlah kebutuhan perumahan. Kondisi perumahan di Kota Surakarta sudah relatif baik, pemerintah meningkatkan kualitas hunian melalui program peningkatan rumah tidak layak huni. Program tersebut menunjukkan hasil yang cukup baik dimana terjadi penurunan jumlah rumah tangga kumuh yang memiliki rumah tidak layak huni. Pada tahun 2010 jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 1.309 unit, angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 4.540 unit pada tahun 2015.

Total luas lahan yang dipakai untuk taman pemakaman pada tahun 2014 berdasarkan data dari BPS mencapai 68,83 ha. Total luas tempat pemakaman umum yang dikelola oleh DKP Kota Surakarta adalah 469.906 m². Adapun rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk mencapai 63 pada tahun 2010, angka tersebut menurun menjadi 38 pada tahun 2015. Pencapaian kinerja urusan perumahan dengan mendasarkan beberapa indikator dapat diidentifikasi pada Tabel 2.34 berikut:

Tabel 2.34
Pencapaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rumah tangga pengguna air minum (PDAM) (%)	71,35	77,23	78,44	79,65	80,94	79,61
2	Kawasan Kumuh (%)	14	13,5	13	12,5	10,46	8,16
3	Rumah tidak layak huni (unit)	1.309	1.059	4.660	4.620	4.580	4.543
4	Sambungan rumah tangga limbah cair (PDAM) (%)	11,46	12,60	12,60	13,29	13,71	14,63
5	Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk	63	58	54	49	42	38
6	Jumlah APAR yang diperiksa (unit)	tad	tad	tad	1.000	1.054	1.100
7	Jumlah Personil yang dilatih penanganan bencana kebakaran (orang)	tad	tad	tad	0	104	100
8	Jumlah Kasus Kebakaran (buah)	88	92	81	106	109	78

Sumber: Dinas Tata Ruang Kota, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, PDAM, dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta, 2016

Berdasarkan Tabel 2.33, dapat diketahui bahwa indikator yang memiliki kinerja perlu ditingkatkan, yaitu rumah tangga pengguna air minum, pengurangan kawasan kumuh, dan peningkatan penanganan rumah tidak layak huni.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penegakan hukum terhadap pelanggaran K3 di Kota Surakarta dalam jangka waktu 2010-2015 berjalan dengan baik. Hal ini dapat

dilihat dari seluruh pelanggaran K3 yang terjadi dapat diselesaikan. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota Surakarta mengalami kenaikan dimana pada tahun 2010 penyelesaiannya sebesar 90% untuk tahun 2015 telah mencapai 99,17%. Sementara angka kriminalitas yang terjadi di Kota Surakarta tahun 2010 sampai dengan 2015 mengalami fluktuasi, angka kriminalitas tahun 2011 merupakan terendah selama kurun waktu 2010-2015 yaitu sebesar 111, sementara angka kriminalitas tertinggi terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 332.

Cakupan patroli petugas Satpol PP dalam 24 jam selama kurun waktu 2010-2015 konsisten dilakukan setiap tahun dengan patroli wilayah di 5 kecamatan. Dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Satpol PP didukung sejumlah aparat, sampai dengan tahun 2015 rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk sebesar 1,25. Dalam menjaga ketertiban dan keamanan juga dilakukan pemberdayaan terhadap anggota masyarakat dan bertugas sebagai linmas tahun 2015 jumlah linmas per 10.000 penduduk sebesar 23,7. Rasio pos siskamling per jumlah kelurahan sebesar 20,45.

Peningkatan wawasan kebangsaan dilakukan dengan memberikan pengarahan dan sosialisasi terhadap kelompok masyarakat. Tahun 2010 sebanyak 125 anggota kelompok masyarakat mendapatkan pengarahan dan sosialisasi wawasan kebangsaan, dan tahun 2014 sebanyak 800 kelompok masyarakat mendapatkan pengarahan dan sosialisasi wawasan kebangsaan, dan 300 kelompok masyarakat pada tahun 2015. Kantor Kesbangpol juga melakukan kegiatan pembinaan politik daerah, tahun 2010 dan 2011 sebanyak 1 kali sementara tahun 2012 dan 2014 sebanyak 4 kali, dan 2 kali pada tahun 2015.

Menindaklanjuti pembentukan satuan kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 dalam rangka pengendalian bencana di Kota Surakarta, telah dilakukan penanganan resiko bencana mulai tahun 2014 sebanyak 8 peristiwa dan pada tahun 2015 sebanyak 26 peristiwa.

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten (%)	90	95	95	97	98	79,33
2.	Persentase Pelanggaran Perda yang diselesaikan (%)	90	92	95	98	100	76,19
3.	Jumlah Konflik (Kasus)	0	0	1	0	1	0
4.	Jumlah Dialog Sosial (kegiatan)	5	3	4	4	4	0
5.	Jumlah kelurahan rawan bencana alam	22	22	22	22	22	22

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(kelurahan)						
6.	Jumlah Penanganan Bencana alam/sosial (peristiwa)	0	0	0	0	8	26
7.	Jumlah Personil yang dilatih penanganan bencana (orang)	0	0	0	0	100	100
8	Angka kriminalitas (kasus)	186	111	115	217	317	332
9	Cakupan patroli petugas Satpol PP (kecamatan)	5	5	5	5	5	5
10	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (Indeks)	1,79	1,7	1,5	1,4	1,17	1,25
11	Deteksi Dini Kriminalitas (Lokasi wilayah kritis)	8	9	9	9	10	9
12	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kabupaten/kota	tad	tad	tad	0,46	0,46	0,46
13	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	0	0	20,45	20,45	20,45	20,45
14	Peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada Ormas, LSM, dan OKP (orang)	125	125	125	700	800	300
15	Persentase Ormas, LSM, & OKP yang telah mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan (%)	20,1	22,1	25	32,4	29,5	35
16	Jumlah Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional (kali)	18	18	18	18	18	18
17	Kegiatan pembinaan politik daerah (kegiatan)	1	1	4	4	4	2
18	Jumlah Penangan bencana Alam/Sosial (peristiwa)	0	0	0	0	8	26

Sumber: Satuan Polisi Pramong Praja Kota Surakarta, Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta, 2016

f. Sosial

Penanganan PMKS di Kota Surakarta dapat dilihat dari jumlah PMKS yang diberikan bantuan kebutuhan dasar. Pada tahun 2015 persentase PMKS yang mendapat bantuan pelayanan dasar sebesar 19%. Capaian ini sangat kecil sekali karena terbatasnya daya tampung dan ketersediaan sarana dan prasarana panti sosial. Sedangkan jumlah sarana panti sampai dengan tahun 2015 sebesar 39 buah. Pada tahun 2015 Panti Sosial skala Kota yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial mencapai 25 persen.

Tabel 2.36
Pencapaian Kinerja Bidang Sosial di Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	0,41	tad	8,16	16	17	13
2.	Persentase PMKS skala Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	14	12	8	6	11	19
3.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (buah)	26	26	26	26	39	39
4.	Organisasi Sosial/Yayasan/LSM	-	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti (%).						

Sumber : Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Surakarta, 2016

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan di Kota Surakarta secara makro dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Data menunjukkan bahwa TPAK di Kota Surakarta sejak tahun 2010 hingga 2014 menunjukkan peningkatan, namun pada tahun terakhir mengalami penurunan. TPT dari tahun 2010 mengalami penurunan sampai dengan Tahun 2014 dengan nilai 6,16. Angka partisipasi kerja pada tahun 2014 mencapai angka 6,16. Adapun indikator-indikator lain dari urusan ketenaga kerjaan dapat dilihat dalam Tabel 2.37 berikut.

Tabel 2.37
Pencapaian Kinerja Bidang Tenaga Kerja Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	-	15,1	48,2	28,9	50,91	72,1
2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	50,6	51,58	63,09	70,62	3,50	3,58
3.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	8,73	6,40*	6,10*	7,18*	6,08*	5,95*
4.	Keselamatan dan perlindungan (%)	52	51,58	63,09	70,62	71,68	74,53
5.	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	100	100	100	100	100	78
6.	Persentase pekerja/ buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	67,24	74,23	72,03	74,51	72,32	76,63
7.	Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	76,71	70,03	68,26	70,50	63,08	50,39
8.	Persentase Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)	14,77	17,64	14,03	11,98	11,15	18,48

Sumber : Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Surakarta, 2016

*) data Statistik Daerah Kota Surakarta, 2015

b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak, pemerintah berupaya untuk memberikan hak yang sama dalam pembangunan melalui upaya kesetaraan gender. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang kemudian ditindaklanjuti dengan

diterbitkannya Permendagri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 mengamanatkan pengintegrasian isu gender dalam berbagai bidang pembangunan, pembentukan kelembagaan PUG serta dukungan pembiayaan pembangunan yang *responsive gender*. Selain itu juga telah diamanatkan Standar Pelayanan Minimal urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pelaksanaan SPM tersebut merupakan konsekuensi pelaksanaan program pembangunan yang responsif gender dan responsif anak.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan *responsive gender* dengan menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau *Gender Development Index* (GDI) dengan nilai minimal 40 dan terbesar 80. IPG merupakan IPM yang terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Berdasarkan data dari Pembangunan manusia berbasis gender (Kementerian PP dan PA & BPS) tahun 2016, diketahui bahwa nilai IPG dan nilai IDG menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Apabila di tahun 2010 angka IPG dan IDG menunjukkan angka 95,28 dan 75,75 maka pada tahun 2015 mencapai 96,84 dan 74,12.

Jumlah anak usia 0-19 tahun di Kota Surakarta tahun 2015 sebanyak 157.177 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 78.708 jiwa dan perempuan sebanyak 78.469 jiwa. Upaya pemerintah untuk melindungi dan memberikan hak anak antara lain diwujudkan dengan pembentukan forum anak, deklarasi Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak, dan pemenuhan hak-hak anak di berbagai bidang sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pencapaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mendasarkan indikator yang diatur dalam beberapa peraturan dapat diidentifikasi pada Tabel 2.38 berikut:

Tabel 2.38
Pencapaian Kinerja Berbagai Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	3,49	3,50	3,50	3,50	3,51	3,51
2	Angka melek huruf perempuan usia 15 th ke atas	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
3	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	53,67	53,67	53,68	53,68	53,68	53,69

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, PP, PA dan KB Kota Surakarta, 2016

Pelaksanaan SPM Bidang Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Surakarta telah dilaksanakan dengan baik. Seluruh korban kekerasan perempuan dan anak telah mendapat penanganan pengaduan. Namun penanganan bimbingan rohani belum dilaksanakan oleh tenaga rohaniwan yang dilatih. Berdasarkan data di bawah ini tidak semua korban kekerasan perlu dilakukan rehabilitasi sosial.

Tabel 2.39
Pencapaian Kinerja SPM Bidang Layanan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rasio KDRT	0,14	0,14	0,07	0,04	0,03	0,03
2.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan (%)	100	100	100	100	100	100
3.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS (%)	100	100	100	100	100	100
4.	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)	25	50	50	50	50	50
5.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	50	50	50	75	100	100
6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	50	50	50	60	80	100
7.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	50	60	70	80	100	100
8.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	70	80	90	100	100	100
9.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)	40	40	50	50	60	60

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, PP, PA dan KB Kota Surakarta, 2016

c. Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; (3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/keamanan pangan.

Ketersediaan pangan utama di Kota Surakarta pada tahun 2011 sebanyak 52.853.000 kg per kapita, dan mengalami peningkatan sampai dengan Tahun 2015 menjadi 90.059.570 kg perkapita. Berkaitan dengan ketersediaan pangan, Kota Surakarta menghadapi kendala produksi bahan pangan yang terbatas, sehingga memerlukan pasokan dari luar daerah. Diperlukan upaya peningkatan produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap bahan pangan dipengaruhi oleh inflasi daerah. Dalam kurun waktu lima tahun inflasi di Kota Surakarta relatif stabil, kenaikan harga bahan pangan terutama terjadi pada hari-hari besar keagamaan. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah Kota Surakarta, baik dalam rangka pemantauan maupun pengendalian harga dan pasokan bahan pangan. Berkaitan dengan kualitas/keamanan pangan, pemerintah Kota Surakarta secara rutin melakukan pengecekan sampel bahan pangan agar dapat dikonsumsi secara aman oleh masyarakat.

Beberapa kelompok bahan pangan yang masih rendah konsumsinya adalah daging, sayur dan buah, dan umbi-umbian. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi bahan pangan, dan daya beli masyarakat terhadap bahan pangan tertentu, dan potensi pangan lokal yang belum banyak dimanfaatkan penduduk.

Kinerja pembangunan urusan ketahanan pangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.40 berikut:

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Regulasi ketahanan pangan	Perda/ Perwal	tad	tad	ada	ada	ada	ada
2	Ketersediaan pangan utama	Kg/kap	tad	52.853.000	58.000.470	67.366.800	74.943.000	90.059.570
3	Ketersediaan Energi Per Kapita	Kkal/kap/ hari	tad	1.136,78	1.448,95	1.078,69	1.554,85	1.665,65
4	Ketersediaan Protein Per Kapita	gram/kap/ hari	tad	1.352,14	1.385,89	1.401,12	1.411,13	1.425,26

5	Skor PPH	-	84,9	86,11	89,6	90,1	90,3	80,8
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	tad	100	100	100	100	100
7	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	tad	20	40	20	0	0

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kota Surakarta, 2016

d. Pertanian

Sesuai pasal 2 ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanian, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam bidang pertanian sebagai berikut:

- 1) Pemberian izin lokasi, yang meliputi: (a). izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal; (b). perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku; dan (c). penanaman modal adalah yang menggunakan maupun tidak menggunakan fasilitas penanaman asing maupun penanaman modal dalam negeri.
- 2) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan. Pengadaan tanah adalah kegiatan untuk memperoleh tanah baik dengan cara memberikan ganti kerugian maupun tanpa memberikan ganti kerugian (secara sukarela).
- 3) Penyelesaian sengketa tanah garapan. Sengketa tanah garapan adalah pertikaian ataupun perbedaan kepentingan dari dua pihak atau lebih atas tanah garapan.
- 4) Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Ganti kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian tersebut atau bentuk lain.
- 5) Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* yang menjadi tanah *objek landreform*.
- 6) Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong. Tanah kosong adalah tanah yang dikuasai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai tanah, hak pengelolaan, atau tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagainya, yang belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.

- 7) Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong. Tanah kosong adalah tanah yang di kuasai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai tanah, hak pengelolaan, atau tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagainya, yang belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.
- 8) Pemberian izin membuka tanah. Diartikan sebagai izin yang diberikan kepada seseorang untuk mengambil manfaat dan mempergunakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
- 9) Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Hal ini diartikan merupakan pelaksanaan dan penetapan letak tepat rencana kegiatan yang telah jelas anggarannya baik dari pemerintah, swasta maupun perorangan yang akan membutuhkan tanah di wilayah Kabupaten/Kota tersebut berdasarkan data informasi pola penatagunaan tanah yang sesuai dengan kawasan rencana tata ruang wilayah. Adapun pola penatagunaan tanah adalah informasi mengenai keadaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan kawasan yang disiapkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Pembangunan dan penataan pertanahan menjadi sesuatu hal yang penting untuk dikembangkan menjadi lebih baik karena mempunyai peranan sosial dan ekonomi yang penting. Oleh karena itu, untuk dapat menguatkan dan membuktikan kepemilikan akan tanah perlu dibuatkan alat bukti berupa sertifikat tanah. Sertifikat tanah terdiri atas Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), Hak Pengelolaan, dan Wakaf.

Pada tahun 2015 aset Pemerintah Kota Surakarta berupa tanah seluruhnya seluas 4.676.310 m² (1.162 titik). Tanah yang sudah bersertifikat seluas 3.983.364 m² (952 titik) atau sebesar 85,18% dari luas total tanah aset, sedangkan yang belum memiliki sertifikat seluas 692.946 m² (210 titik) atau 14,82% dari luas total tanah aset.

Kewenangan lain yang dimiliki pemerintah daerah adalah pemberian izin lokasi. Data tahun 2013 izin lokasi yang sudah diberikan telah mencapai 100% dari total pengajuan atau dapat dikatakan bahwa seluruh pengajuan izin lokasi telah diselesaikan dengan baik.

Permasalahan pertanahan merupakan permasalahan yang cukup sensitif dan tidak jarang menimbulkan konflik. Hal tersebut tidak terkecuali juga terjadi pada tanah-tanah yang dimiliki oleh negara. Penyelesaian kasus tanah negara selama dua tahun terakhir menunjukkan persentase yang meningkat. Pada tahun 2013 jumlah kasus tanah yang terselesaikan mencapai 76,05%,

mengalami penurunan sehingga menjadi 57,44% pada tahun 2014, untuk tahun 2015 mengalami kenaikan 100%.

e. Lingkungan Hidup

Kinerja urusan lingkungan hidup Kota Surakarta dapat dilihat dari kinerja pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam pengelolaan sampah kegiatan yang dilakukan terdiri atas pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan dan daur ulang. Indikator kinerja yang ditunjukkan dalam penanganan sampah di Kota Surakarta ditunjukkan melalui pengelolaan persampahan. Sampai pada tahun 2015, kinerja penanganan sampah di Kota Surakarta sudah mencapai 95,72%. Sementara itu ketersediaan tempat pembuangan sampah (TPS) berdasarkan satuan jumlah penduduk menunjukkan kondisi yang meningkat dari 1,78 m³ pada tahun 2010 menjadi 2,5 m³ pada tahun 2015.

Tabel 2.41
Kinerja Pengelolaan Persampahan di Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase penanganan sampah (%)	95,72	95,72	95,14	96,33	95,82	95,90
2	Rasio Ketersediaan Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	1,78	1,77	1,81	1,04	2	2,5
3	Jumlah kelompok pengelola sampah (kelompok)	5	6	7	9	11	18

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta, 2016

Berdasarkan Statistik Daerah Kota Surakarta Tahun 2015, tercatat produksi sampah di Kota Surakarta pada Tahun 2014 mencapai 96,21 juta ton dengan rata-rata produksi sampah setiap harinya mencapai 264 ton. Komposisi jenis sampah di Kota Surakarta terdiri atas sampah kertas, kayu, kain, karet, kulit, plastik, metal/logam, gelas/kaca dan organik. Dari sekian banyak jenis sampah yang ada di Kota Surakarta, tertinggi di antaranya adalah jenis sampah organik (62,30%), sampah plastik (13,67%) dan sampah kertas (12,53%). Jumlah sampah yang terangkut setiap harinya di Kota Surakarta mencapai 263,59 ton. Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kota Surakarta saat ini tersedia 1 tempat, dengan jumlah sampah yang masuk di TPA mencapai 96.210 ton per tahun pada tahun 2015.

Ketersediaan sumber daya dalam pengelolaan sampah di Kota Surakarta meliputi jumlah pekerja kebersihan mencapai 407 orang dan 18 kelompok pengelola sampah. Sarana pengangkutan dan pengelolaan sampah di Kota Surakarta terdiri dari truk sampah sebanyak 25 unit, pick up sebanyak 7 unit, *arm roll* sebanyak 4

unit, *container* sebanyak 25 unit, toilet *container* sebanyak 8 unit, TPS sebanyak 8 unit, *buldozer* sebanyak 2 unit, *excavator* sebanyak 4 unit, *whell loader* sebanyak 1 unit dan gerobak motor sampah sebanyak 6 unit pada tahun 2015.

Usaha pengendalian dan pengelolaan lingkungan di Kota Surakarta dilakukan melalui pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan. Indikator yang dilaksanakan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di Kota Surakarta. Amdal merupakan kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau Kegiatan. Pasal 48 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 menyebutkan bahwa dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan izin lingkungan.

Secara administratif, usaha yang dikelola diwajibkan memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu persyaratan administratif adalah perusahaan harus memiliki persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air. Sampai tahun 2015, jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air di Kota Surakarta mencapai 100%. Secara umum capaian dalam lima tahun terakhir meningkat karena kondisi pada tahun 2010 baru mencapai 42,85%.

Sementara itu mengenai kasus gangguan perusahaan terhadap kondisi lingkungan di masyarakat menunjukkan sudah ditangani dengan baik. Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Surakarta sudah berjalan sesuai dengan yang diadukan masyarakat. Cakupan pengaduan yang ditindaklanjuti mencapai 100% setiap tahunnya dari mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Kondisi yang sama juga terjadi pada sistem penegakan hukum lingkungan. Dari kasus yang masuk ke pemerintah Kota Surakarta dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kinerja dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan di Kota Surakarta dapat dilihat pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42
Kinerja Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan di Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pemantauan status mutu air	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
2	Rasio Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	%	0	16,67	16,67	16,67	16,67	23,53
3	Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	42,85	57,14	71,43	71,43	60	70
4	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	100
5	Ketersediaan Laboratorium Penelitian Lingkungan	Lab	1	4	4	4	4	4
6	Penegakan hukum lingkungan	%	100	100	100	100	100	100
7	Jumlah Perda Lingkungan Hidup	Perda	0	0	0	1	1	1

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta, 2016

Dalam upaya memberikan ruang gerak kepada masyarakat dalam beraktivitas, berkomunikasi dan saling berinteraksi pemerintah Kota Surakarta menyediakan ruang terbuka hijau dalam bentuk taman ataupun arena. Secara teoritis, yang dimaksud ruang terbuka hijau adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidayapertanian. Sarana ruang terbuka hijau berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah sebesar 30% dari seluruh luas wilayah Kota Surakarta. Dari 30% tersebut, 20% di antaranya peruntukan ruang terbuka hijau bersifat publik dan 10% di antaranya untuk privat.

Sampai dengan tahun 2015, persentase ruang terbuka hijau di Kota Surakarta mencapai 9,72; menurun jika dibandingkan tahun 2010 sebesar 18,23. Kondisi tersebut menunjukkan ruang terbuka hijau di Kota Surakarta masih rendah karena masih berada jauh dari target yang ditetapkan dalam SPM. Untuk mendorong ketercapaian SPM dalam pemenuhan RTH, Pemerintah Kota Surakarta telah berupaya dengan membangun taman-taman baru. Sampai tahun 2015, jumlah taman yang dibangun sudah mencapai 11 taman. Pemetaan RTH sendiri akan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup di tahun 2015. Kinerja indikator pengelolaan RTH selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2.43 berikut.

Tabel 2.43
Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Surakarta
Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase RTH publik di wilayah perkotaan	%	18,54	11,9	18,54	12,63	12,03	9,72
2	Jumlah taman yang dibangun BLH	Unit	2	6	9	11	11	11

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta, 2016

Upaya perlindungan konservasi sumberdaya alam di Kota Surakarta selain dengan peningkatan kawasan hijau juga dilakukan dengan peningkatan area serapan. Area serapan yang dibangun pada wilayah-wilayah yang cenderung padat. Dalam meningkatkan area serapan air, Pemerintah Kota Surakarta telah membangun sumur resapan secara berkelanjutan setiap tahunnya. Tahun 2010, sumur resapan dibangun sebanyak 55 buah, jumlah sumur resapan dibangun menurun pada tahun 2011 menjadi 33 buah dan kembali meningkat pada tahun 2012 menjadi 42 dan tahun 2015 dibangun sebanyak 75 buah. Sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, telah digalakkan juga pelaksanaan kampung iklim yang mana pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sudah terbentuk 1 kampung tiap tahunnya, sehingga total yang ada sampai dengan tahun 2015 adalah 3 kampung iklim. Ketiga Kampung Iklim tersebut adalah RW IX di Kelurahan Kadipiro (2013), Kelurahan Sondakan (2014), dan RW XXIII kelurahan Kadipiro (2015).

Tabel 2.44
Kinerja Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam di Kota Surakarta
Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah sumur resapan	Unit	55	33	42	80	50	75
2	Jumlah percontohan kampung iklim	Kawasan	0	0	0	1	1	1

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta, 2016

Untuk melihat kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, Pemerintah Kota Surakarta dari setiap tahunnya melakukan kajian lingkungan. Hasil kajian tersebut berupa kondisi status lingkungan hidup daerah Kota Surakarta, yang menggambarkan kondisi lingkungan secara umum di Kota Surakarta.

Upaya pengendalian polusi atau pencemaran udara di Kota Surakarta salah satunya adalah dengan mengendalikan jenis-jenis usaha yang diduga berpotensi memberikan sumbangan dalam pencemaran udara. Pengendalian dengan melakukan pengawasan terhadap setiap jenis usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak agar selalu dapat memenuhi persyaratan administrasi dan

teknis pencegahan pencemaran udara. Sampai dengan tahun 2015, upaya pengendalian polusi secara administratif terhadap perusahaan-perusahaan yang dalam pengawasan sudah mencapai 100%, terpenuhi sesuai target SPM. Sedangkan dalam pemenuhan sarana monitoring pengendalian polusi, capaiannya masih rendah baru mencapai 28,57% pada tahun 2010. Pada Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mencapai 57,14%. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.45 di bawah ini.

Tabel 2.45
Kinerja Pengendalian Polusi di Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	%	75	75	100	100	80	80
2	Pemenuhan Sarana Monitoring Polusi	%	28,57	57,14	57,14	57,14	57,14	57,14

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta, 2016

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pemerintahan dalam negeri meliputi (1) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga; (2) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk; (3) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran; dan (4) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian. Berikut capaian masing-masing indikator SPM bidang pemerintahan dalam negeri jenis pelayanan dokumen kependudukan:

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Surakarta

No	Indikator	Capaian tahun 2014	Target	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100%	100%	2015
2	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	100%	100%	2015
3	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	100%	90%	2020
4	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	50%	70%	2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2016

Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Surakarta dalam jangka waktu 2010-2014 berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari rasio penduduk ber-KTP, rasio bayi berakte kelahiran, kepemilikan akta kelahiran dan rasio pasangan berakte nikah. Seluruh penduduk berusia 17 tahun ke atas di Kota Surakarta sejak tahun 2011 sudah memiliki KTP. Hal ini menunjukkan kesadaran dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi kependudukan sudah baik.

Akta kelahiran merupakan hak setiap anak yang dilahirkan, pemenuhannya harus dilakukan oleh orangtua. Dalam kurun waktu 2010-2015 rasio bayi yang memiliki akte kelahiran sebesar 100, hal ini berarti anak usia 0-5 tahun di Kota Surakarta pasti memiliki akte kelahiran. Tetapi akte kelahiran belum dimiliki oleh seluruh penduduk Kota Surakarta. Tahun 2010 baru sebesar 69% penduduk memiliki akte kelahiran, angka ini meningkat menjadi 85% pada tahun 2015. Walaupun terjadi peningkatan kepemilikan akte kelahiran tetapi masih banyak penduduk yang belum memilikinya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Surakarta.

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta
Tahun 2010-2015

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kepemilikan KTP (%)	94,5	100	100	100	100	99,95
2.	Rasio bayi ber-akte kelahiran	100	100	100	100	100	100
3.	Kepemilikan akta kelahiran (%)	69	69,47	69,55	73,62	75	85
4.	Rasio pasangan berakte nikah	97	100	100	100	100	98
5.	Ketersediaan database kependudukan	ada	ada	Ada	ada	ada	Ada
6.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
7.	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100	100	100	100	100	100
8.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	100	100	100	100	100	100
9.	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	69	69,47	69,55	73,62	75	85
10.	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	20	20	30	40	50	75,50

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2016

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usahanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Di sini subjek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat atau objek saja. Rukun Warga atau Rukun Tetangga (RW/RT) sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat hendaknya didorong untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya. Selain RT/RW, PKK menjadi aktor lain yang juga perlu mendapat perhatian.

Pembinaan-pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan yang ada dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia maupun organisasi. Organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Surakarta antara lain berdasarkan Data BPS Tahun 2015 meliputi PKK yang ada di setiap kelurahan, Posyandu yang berjumlah 602, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sejumlah 123 organisasi, dan masih banyak ormas lainnya yang bersifat sosial, keagamaan, lingkungan dan sebagainya.

Persentase Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) aktif di Kota Surakarta selama periode 2010-2015 mencapai 100%, demikian juga untuk indikator Posyandu Aktif selama tahun 2010-2015.

Selanjutnya, dikaji dari kegiatan usaha ekonomi masyarakat kelurahan masih menunjukkan secara kualitas maupun kuantitas belum sesuai harapan. Secara kuantitas kegiatan usaha ekonomi produktif belum menunjukkan perkembangan yang cukup, sedangkan secara kualitas dapat dilihat dari kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan usaha ekonomi produktif masih rendah dan belum mampu memenuhi tuntutan perkembangan usaha ekonomi produktif yang berkembang secara pesat serta belum terwujudnya kemitraan antar pelaku usaha serta kemitraan dengan pelaku usaha skala menengah maupun besar.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan termasuk partisipasi perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi belum menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Apabila dilihat dari kuantitas/keaktifan terlibat secara fisik cukup baik namun secara kapasitas belum menunjukkan kontribusi yang cukup baik.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Berkualitas tidaknya penyelenggaraan pelayanan publik tidak terlepas dari kapasitas SDM aparat kelurahan. Secara umum kapasitas aparat kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum optimal, pemahaman dan kemampuan aparat dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi atas hasil pembangunan belum menunjukkan hasil yang cukup baik.

Gambaran capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat Kota Surakarta selama kurun waktu 2010-2015 dapat disajikan dalam Tabel 2.48 berikut ini.

Tabel 2.48
Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta
Tahun 2010-2015

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase PKK aktif (%)	100	100	100	100	100	100
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (kelompok)	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368
3.	Persentase Posyandu	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	aktif (%)						
4.	Persentase LPM Berprestasi (%)	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80
5.	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	5	5	6	7	7	10
6.	Persentase Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%)	2	2	2,5	3	3	3

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, PP, PA dan KB, 2016

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta salah satunya disebabkan oleh keberhasilan program Keluarga Berencana. Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Surakarta setiap tahunnya di bawah 2 artinya masih dalam kondisi belum mengkhawatirkan di bawah rata-rata nasional dan provinsi. Walaupun terjadi peningkatan rata-rata jumlah anak per keluarga.

Cakupan PUS yang beristri di bawah usia 20 tahun sebanyak 0,42% tahun 2015, kondisi ini di bawah target MDG's yaitu 3,5%. Demikian juga *unmet need* Kota Surakarta masih relatif tinggi, yaitu 10,7%. Sedangkan cakupan peserta KB aktif sampai dengan tahun 2015 sebesar 66,83 dengan penggunaan alat kontrasepsi terbanyak adalah suntik, dan pil.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2010 sebesar 1,31 mengalami penurunan dengan kondisi -1,97 pada tahun 2014, sehubungan dengan pembersihan data ganda dari aplikasi pusat sehubungan dengan tertib administrasi kependudukan tingkat nasional. Pasca penertiban sistem administrasi kependudukan nasional di tahun 2015 laju pertumbuhan penduduk Kota Surakarta sebesar 0,897

Tabel 2.49
Pencapaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	0,88	1,71	1,34	1,13	1,42	0,93
2.	Rasio akseptor KB	77,6	78,7	78,7	77,9	77,8	66,8
3.	Cakupan peserta KB aktif (%)	77,58	78,72	78,72	77,93	77,76	66,83
4.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%)	0,51	0,54	0,54	0,65	0,42	0,42
5.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>) (%)	12,29	10,92	10,23	10,53	11,02	10,70
6.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan	17,58	9,77	10,67	10,26	10,08	9,70

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	usia 15-19 tahun (%)						
7.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern) (%)	77,58	78,72	78,72	77,93	77,76	66,83
8.	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	9	14	12	7	9	8,32
9.	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%)	75,5	75,5	75,5	75,6	76,17	76,01
10.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	71	72	71,5	77,7	77,8	77,24
11.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%) : dari Kelahiran	1,31	0,76	1,69	3,21	-1,97	0,90

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, PP, PA dan KB dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2016

i. Perhubungan

Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antarwilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Transportasi mendukung perkembangan kota dan wilayah sebagai sarana penghubung maupun titik simpul distribusi. Rencana tata guna lahan kota dan wilayah harus didukung secara langsung oleh rencana pola jaringan jalan yang merupakan rincian tata guna lahan yang direncanakan. Pola jaringan jalan yang baik akan mempengaruhi perkembangan kota dan wilayah yang direncanakan sesuai dengan rencana tata guna lahan. Ini berarti transportasi mendukung penuh perkembangan fisik suatu kota atau wilayah.

Terminal bus adalah sebuah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Kota Surakarta memiliki fasilitas sarana perhubungan berupa 1 buah terminal bus tipe A, dan 2 buah terminal tipe C. Jumlah terminal yang ada di Kota Surakarta ini sudah dapat memenuhi kebutuhan terminal sebesar 100%.

Sementara itu jumlah orang yang melalui terminal setiap tahun selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Tahun 2010 jumlah orang melalui terminal sebanyak 17.633.503 orang, menurun menjadi 16.182.815 orang pada tahun 2015. Kondisi ini dipengaruhi semakin tingginya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi, dan menggunakan moda transportasi lainnya

seperti kereta api dan pesawat terbang dalam melakukan aktivitasnya sehingga terjadi penurunan jumlah penumpang angkutan umum.

Sarana transportasi publik yang disediakan Pemerintah Kota Surakarta Batik Solo Trans (BST). Penyediaan halte BST dimaksudkan untuk mendukung kemudahan menggunakan moda transportasi massal. Jumlah halte BST pada trayek yang telah dilayani angkutan umum tahun 2014 baru mencapai 52,53%.

Angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kondisi dimaksudkan menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Jumlah uji KIR angkutan umum tahun 2010-2015 mengalami peningkatan dari 1.587 unit tahun 2010 menjadi 1.821 unit tahun 2015. Persentase perbandingan antara jumlah angkutan yang tidak memiliki KIR dengan jumlah angkutan keseluruhan tahun 2015 adalah 1.821 : 2.065.

Proses uji KIR angkutan umum ini sebenarnya tidak memerlukan waktu panjang, prosesnya hanya membutuhkan waktu 45 menit. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum meliputi : 1) JBB 2100: Rp. 30.000, 2) JBB 2101 s/d 3500: Rp. 35.000, 3) JBB 3501 s/d 8000: Rp. 40.000, 4) JBB 8001 s/d 15000: Rp.45.000, 5) JBB 15000 ke atas: Rp. 50.000, 6) Gandengan: Rp 45.000, dan 7) Tempelan: Rp. 45.000.

Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya tidak dipungkiri telah turut menyumbang pencemaran udara. Hal tersebut tentunya perlu upaya dan antisipasi dari Pemerintah Kota Surakarta. Sebagai salah satu upaya pengendalian kualitas udara ambien di jalan raya adalah dengan mengendalikan emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (lulus uji emisi) di Kota Surakarta mengalami peningkatan. Tahun 2010 sebanyak 27.942 unit kendaraan lulus uji emisi, tahun 2015 sebanyak 29.859 unit kendaraan lulus uji emisi.

Perlengkapan jalan yang tersedia di Kota Surakarta meliputi rambu, marka, *guardrail*, dan penerangan jalan umum. Kondisi perlengkapan jalan di Kota Surakarta dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.50 berikut:

Tabel 2.50
Perlengkapan Jalan yang Tersedia di Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No.	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rambu	Unit	141	1331	1520	1799	1937	2087
2	Marka	Unit	416.018	418.018	424.211	427.884	432.545	436.780
3	<i>Guardrail</i>	Unit	31,0	31,0	32,0	32,0	32,0	32,0
4	Penerangan Jalan Umum**	Unit	16.169	16.169	16.169	16.169	16.169	16.169

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta, 2016

**)sumber Dinas Kebersihan dan Pertamanan, (MoU DKP & PLN tahun 2007)

Meskipun mengalami peningkatan kualitas jalan dalam kondisi baik, namun kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan di Kota Surakarta belum sepenuhnya terpenuhi. Pada tahun 2015 fasilitas rambu-rambu lalu lintas di Kota Surakarta sebesar 2.087 unit. Jumlah marka jalan dan *guardrail* dari tahun 2010 hingga 2015 mengalami peningkatan. Marka jalan pada tahun 2010 sejumlah 416.018 unit menjadi 436.780 unit. *Guardrail* meningkat dari 31 unit pada tahun 2010 menjadi 32 unit pada tahun 2015.

Perkembangan capaian kinerja Urusan Perhubungan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.51 sebagai berikut:

Tabel 2.51
Capaian Pembangunan Urusan Perhubungan Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Terminal Bis Tipe A	Unit	1	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Terminal Bis Tipe C	Unit	2	2	2	2	2	2
3.	Persentase tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	%	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (Lulus uji emisi)	%	74,2	80,60	81,20	85,40	88,16	88,18
5.	Jumlah uji KIR angkutan umum	Kali	1587	1724	1705	1746	1803	1821
6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	74,2	80,60	81,20	85,40	88,16	88,18
7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	45'	45'	45'	45'	45'	45'
8.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Rp.	JBB 2100 : Rp. 22.500, JBB 2101 s/d 3500 : Rp. 25.000, JBB 3501 s/d 8000 : Rp. 28.500, JBB 8001 s/d 15000 : Rp. 31.000, JBB 15000 ke atas : Rp.34.000, Gandengan : Rp. 35.000, Tempelan : Rp. 40.000	JBB 2100 : Rp. 22.500, JBB 2101 s/d 3500 : Rp. 25.000, JBB 3501 s/d 8000 : Rp. 28.500, JBB 8001 s/d 15000 : Rp. 31.000, JBB 15000 ke atas : Rp. 34.000, Gandengan : Rp. 35.000, Tempelan : Rp. 40.000	JBB 2100 : Rp. 22.500, JBB 2101 s/d 3500 : Rp. 25.000, JBB 3501 s/d 8000 : Rp. 28.500, JBB 8001 s/d 15000 : Rp. 31.000, JBB 15000 ke atas : Rp. 34.000, Gandengan : Rp. 35.000, Tempelan : Rp. 40.000	JBB 2100 : Rp.30.000, JBB 2101 s/d 3500 : Rp. 35.000, JBB 3501 s/d 8000 : Rp. 40.000, JBB 8001 s/d 15000 : Rp. 45.000, JBB 15000 ke atas : Rp.50.000, Gandengan : Rp. 45.000, Tempelan : Rp. 45.000	JBB 2100 : Rp.30.000, JBB 2101 s/d 3500 : Rp. 35.000, JBB 3501 s/d 8000 : Rp. 40.000, JBB 8001 s/d 15000 : Rp. 45.000, JBB 15000 ke atas : Rp.50.000, Gandengan : Rp. 45.000, Tempelan : Rp. 45.000	JBB 2100 : Rp.30.000, JBB 2101 s/d 3500 : Rp. 35.000, JBB 3501 s/d 8000 : Rp. 40.000, JBB 8001 s/d 15000 : Rp. 45.000, JBB 15000 ke atas : Rp.50.000, Gandengan : Rp. 45.000, Tempelan : Rp. 45.000

No	Indikator	Satuan	Capaian					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
				: Rp. 40.000				
9.	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubungan Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	Unit	1	1	1	1	1	1
10.	Persenatse tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	%	100	100	100	100	100	100
11.	Jumlah angkutan kota	Unit	420	418	405	386	385	380
12.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	unit	420	418	405	386	385	380
13.	Jumlah orang melalui terminal per tahun	org	17.633.503	17.633.503	17.963.961	16.211.241	16.211.241	16.182.815
14.	Jumlah izin trayek	Unit	331	176	242	334	259	219
15.	Persentase tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	tad	tad	25	30	40	52,53
16.	Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) **	Unit	16.169	16.169	16.169	16.169	16.169	16.169
17.	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	rasio	647 : 4.427	837 : 4.427	1.035 : 4.427	1.393 : 4.427	1.723 : 4.427	2.087 : 4.427
18.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	Unit	647, 416.018, 31, 16.572	837, 418.018, 31, 16.572	1035, 424.211, 32, 16.572	1393, 427.884, 32, 16.572	1723, 432.545, 32, 16.572	2087, 436.780, 32, 16.572

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta, 2016

**): sumber Dinas Kebersihan dan Pertamanan, (MoU DKP & PLN tahun 2007)

- j. Komunikasi dan Informatika**
- Pembangunan dalam urusan informasi dan komunikasi ditandai melalui indikator pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi, serta kerjasama informasi dan media massa.
- Jaringan komunikasi adalah saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain. Pembangunan jaringan komunikasi dimaksudkan sebagai upaya mempercepat koordinasi dan penyelesaian berbagai tugas organisasi kelompok maupun perorangan. Guna mendukung kecepatan komunikasi di wilayah Kota Surakarta telah pada tahun 2015 telah dibangun

sebanyak 11 jaringan. Jumlah tersebut melayani seluruh sistem komunikasi yang ada di seluruh Kota Surakarta baik perorangan maupun dalam rangka pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam kurun empat tahun terakhir, jumlah jaringan komunikasi di Kota Surakarta belum ada penambahan.

Untuk mendukung sistem informasi dan komunikasi pembangunan, masing-masing Perangkat Daerah didorong untuk membangun jaringan komunikasi online melalui website. Pembangunan website di Surakarta selama lima tahun terakhir (2010-2015) sebanyak 9 web dari 41 Perangkat Daerah di Kota Surakarta. Tujuan pembangunan web bagi pemerintah Kota Surakarta adalah mempermudah komunikasi dengan antarlembaga, dengan masyarakat ataupun pihak-pihak terkait yang berusaha menjalin komunikasi untuk mendapatkan informasi. Komunikasi melalui website akan jauh lebih mudah karena tidak mengenal perbedaan lokasi baik jauh mapun dekat dan juga lebih efisien dalam hal biaya dan waktu.

Sementara itu dilihat dari sisi ketersediaan warung internet di Kota Surakarta menunjukkan kondisi menurun pada tahun 2015 sebesar 0,005% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,0076%. Penurunan rasio warnet maupun wartel di Kota Surakarta karena perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang. Saat ini hampir setiap orang memiliki *hand phone* yang bisa dibawa ke mana-mana. Sementara itu dalam mengakses internet, saat ini pengguna internet sebagian besar telah memiliki *handphone* dengan fasilitas akses internet yang lengkap dan memadai, sehingga dengan sendirinya jumlah orang yang menggunakan fasilitas warung internet semakin berkurang.

Guna mendukung berbagai berita dan informasi lainnya dalam bentuk media cetak, di Kota Surakarta juga telah beredar media masa dalam bentuk surat kabar. Media massa yang ada saat ini membantu memberikan berbagai pilihan topik yang bisa digunakan dalam membangun dialog dengan orang lain. Jumlah surat kabar yang beredar di Kota Surakarta saat ini terdapat 12 surat kabar. Sementara itu media informasi melalui penyiaran radio maupun TV saat ini terdapat 24 penyiaran. Perkembangan komunikasi dan informasi di Kota Surakarta selain didukung jaringan juga didukung jumlah layanan SST yang mencapai 376.000 SST. Kinerja pelaksanaan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa di Kota Surakarta selama tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.52 di bawah ini.

Tabel 2.52
Kinerja Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa di Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah jaringan komunikasi	Jaringan	11	11	11	11	11	11

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
2	Website milik pemerintah daerah	Web	8	8	8	9	9	9
3	Rasio wartel/warnet	%	0,01	0,01	0,009	0,008	0,0076	0,005
4	Jumlah surat kabar nasional/lokal	buah	12	12	12	12	12	12
5	Jumlah penyiaran radio/TV	Siaran	18	19	19	19	24	24
6	Jumlah Wartawan Media Cetak & Elektronik (L/P)	orang	40	45	45	50	55	55
7	Jumlah Penyediaan Informasi bagi tamu	buah	98	125	150	259	320	395
8	Rasio Peserta Sosialisasi	%	0	0	0,63	0,78	0,78	0,78
9	Frekuensi Penyebarluasan informasi melalui Media elektronik /Cetak	kali	22	43	94	115	155	178
10	Cakupan layanan SST	SST	-	-	380.000	380.000	381.000	376.000
11	Persentase Perangkat Daerah Telah Memiliki Website	%	20	20	20	22	22	20

Sumber: Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta, 2016

Dalam rangka meningkatkan sarana integrasi dan interaksi sosial bagi masyarakat, dilakukan kerjasama informasi dan media massa di Kota Surakarta dilaksanakan melalui diseminasi dan pendistribusian informasi nasional. Proses pelaksanaan desiminasi salah satunya dilakukan melalui penyebarluasan informasi melalui media elektronik/cetak. Pada tahun 2010 tercatat dilakukan penyebarluasan informasi sebanyak 22 kali dan meningkat menjadi 178 kali pada tahun 2015.

k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang penting dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya potensi koperasi dan UMKM di Kota Surakarta baik dari peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah, penyerapan tenaga kerja dan jumlah unit usahanya. Pencapaian kinerja urusan Koperasi dan UKM dengan mendasarkan indikator koperasi aktif, yakni koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha menunjukkan peningkatan dari 87,34% pada tahun 2011 menjadi 93,42% pada tahun 2015 dan capaian ni

perlu dipertahankan agar tidak mengalami penurunan di tahun berikutnya. Adapun persentase koperasi sehat dari jumlah koperasi aktif di Kota Surakarta sebanyak 525 pada tahun 2013 sebanyak 428 merupakan koperasi sehat (81,60%) serta dari 527 pada tahun 2015 sebanyak 458 merupakan koperasi sehat (87%). Angka tersebut masih kurang dari 100% sehingga perlu ditingkatkan.

Jika dilihat dari indikator Usaha Mikro dan Kecil, yakni perbandingan antara jumlah usaha mikro dan kecil dengan jumlah seluruh UKM menunjukkan peningkatan dari 75,00% pada tahun 2011 menjadi 99,5% pada tahun 2015 atau dari 10.362 unit pada tahun 2011 menjadi 43.618 unit pada tahun 2015. Sebagaimana tertulis pada Tabel 2.53 berikut:

Tabel 2.53
Pencapaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM di Kota Surakarta
Tahun 2010-2015

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Koperasi aktif (%)	-	87,34	93,00	93,42	93,42	93,42
2	Usaha Mikro dan Kecil Kategori Sehat (%)	-	75,00	75,00	99,29	99,29	99,5
3	Jumlah UMKM (Unit)	10.622	10.362	20.410	43.700	43.700	43.700
4	Koperasi yang ada (Unit)	546	558	562	562	563	565
5	Koperasi sehat (Unit)	93	100	100	100	110	112

Sumber : Dins Koperasi dan UMKM Kota Surakarta, April 2016

1. Penanaman Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Surakarta harus melaksanakan kewenangan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewenangan tersebut antara lain memberikan izin usaha kegiatan penanaman modal dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota baik di dalam negeri maupun ke luar negeri; mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota.

Potensi dan peluang penanaman modal di Kota Surakarta cukup terbuka khususnya di bidang usaha mikro dan jasa. Potensi dan peluang penanaman modal di bidang industri relatif tertutup untuk industri besar karena keterbatasan lahan. Potensi dan peluang penanaman modal di Kota Surakarta wajib dijaga karena meningkatnya penanaman modal akan memberikan pengaruh positif bagi pengurangan pengangguran.

Perkembangan penanaman modal di Kota Surakarta menunjukkan kecenderungan meningkat. Total investasi berskala nasional di Kota Surakarta tahun 2015 sebesar Rp2.082,61 milyar. Nilai tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan total Investasi tahun 2010 sebesar Rp1.311,25 milyar.

Pada tahun 2013 jumlah investor turun menjadi 864 dibandingkan tahun 2012. Namun demikian, para investor tersebut menginvestasikan capitalnya lebih tinggi daripada tahun 2012 menjadi sebesar Rp.2.884,31 Milyar.

Pada tahun 2014 jumlah investor meningkat menjadi 1.226 dibandingkan tahun 2013 karena banyak pelaku usaha kecil menengah yang melaksanakan daftar ulang. Namun demikian, nilai investasi menurun daripada tahun 2013 menjadi sebesar Rp.1.453,18 Milyar.

Capaian indikator penanaman modal di Kota Surakarta selama kurun waktu 2009-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.54 berikut:

Tabel 2.54
Capaian Indikator Penanaman Modal di Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Kali	1	1	1	1	1	1
2.	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kota	kegiatan	-	8	4	5	2	4
3.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.	Kegiatan	-	-	-	1	1	1
4.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	1.845	1.332	1.066	864	1.226	1.252
5.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Milyar)	Rp. Milyar	1.311,25	1.797,73	2.017,02	2.884,31	1.453,18	2.082,61
6.	Terselenggaranya pelayanan perlizinan dan nonperlizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal: Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin	dok	Izin Prinsip PM=0; Izin Usaha PM= 0; SIUP=1.845; TDP=1.584; dan IMTA=0	Izin Prinsip PM=0; Izin Usaha PM= 0; SIUP=1.752; TDP=1.651; dan IMTA=0	Izin Prinsip PM=0; Izin Usaha PM= 0; SIUP=1.791; TDP=1.711; dan IMTA=0	Izin Prinsip PM=0; Izin Usaha PM= 1; SIUP=1.429; TDP=1.276; dan IMTA=0	Izin Prinsip PM=0; Izin Usaha PM= 2; SIUP=1.288; TDP=1.509; dan IMTA=0	Izin Prinsip PM=5; Izin Usaha PM= 0; SIUP=1.379; TDP=1.570; dan IMTA=0

No	Indikator	Satuan	Capaian					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota							
7.	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	dok	1) izin prinsip PM =0 2) izin usaha PM = 0	1) izin prinsip PM =0 2) izin usaha PM = 0	1) izin prinsip PM =0 2) izin usaha PM = 0	1) izin prinsip PM =2 2) izin usaha PM = 1	1) izin prinsip PM =6 2) izin usaha PM = 2	1) izin prinsip PM =5 2) izin usaha PM = 1
8.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.	kali	tad	tad	1	1	1	1
9.	Rasio daya serap tenaga kerja	orang	0,28 SDM : 6.409 PERSH 1845	7,91 SDM : 13.865 PERSH 1752	9,16 SDM : 13.379 PERSH 1460	7.41 SDM : 10.558 PERSH 1425	12.99 SDM : 15.922 PERSH 1226	12.79 SDM : 15524 PERSH 1214

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta , 2016

Tabel 2.52 di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan urusan penanaman modal sudah dilaksanakan dengan baik, dengan capaian indikator yang relatif baik. Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penanaman modal menunjukkan kinerja yang cukup baik. Sebenarnya dengan kondisi yang ada di Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta mampu melaksanakan atau mencapai target lebih tinggi daripada yang ditetapkan dalam SPM bidang penanaman modal.

m. Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Ketentuan yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan dan bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan demikian, pembangunan kepemudaan memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan tinggi rasa nasionalismenya. Kegiatan dalam rangka pembinaan kepada pemuda dan kegiatan kepemudaan secara langsung dapat meningkatkan daya kreatif dan inovatif pemuda dan membiasakan kepada pemuda untuk selalu peka terhadap perkembangan jaman dan perkembangan lingkungannya.

Kegiatan kepemudaan diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Jenis kegiatan kepemudaan yang telah dilaksanakan antara lain, terkait dengan bidang pendidikan politik dan demokratisasi; sumberdaya ekonomi; kepedulian terhadap masyarakat; ilmu pengetahuan dan teknologi; olahraga, seni, dan budaya; kepedulian terhadap lingkungan hidup; pendidikan kewirausahaan; dan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pelayanan kepemudaan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 ditujukan untuk menumbuhkan budaya prestasi di antara para pemuda, termasuk di dalamnya prestasi dalam bidang olahraga. Fasilitasi keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta adalah fasilitasi pembentukan organisasi olahraga, pembangunan gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) dan gedung olahraga serta lapangan olahraga. Pemerintah juga melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan olahraga dalam rangka menjaring SDM keolahragaan yang baik dan berprestasi.

Jumlah organisasi kepemudaan di Kota Surakarta terdapat 76 buah, termasuk di dalamnya organisasi karang taruna dan organisasi kepemudaan berbasis keagamaan. Pembinaan keolahragaan di Kota Surakarta diarahkan untuk menumbuhkan budaya dan kecintaan berolahraga guna meningkatkan kesehatan dan prestasi. Pemantapan kapasitas dan kualitas organisasi kepemudaan dan kegiatan olahraga perlu ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga.

Tabel 2.55
Jumlah Sarana Olahraga di Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) (buah)	1	1	1	1	1	1
2.	Lapangan olahraga (buah)	195	200	205	210	215	221

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta, 2016

Pembinaan olahraga dibagi menjadi dua, yaitu olahraga prestasi dan olahraga massal atau masyarakat. Olahraga prestasi di Kota Surakarta cukup banyak mulai dari atletik, beladiri, bulu tangkis,

bola volley, bola basket, catur dan Sepakbola. Keberadaan klub-klub olahraga dan ditunjang sarana dan prasarana olahraga yang memadai khususnya untuk olahraga prestasi. Di Kota Surakarta banyak terdapat gedung olahraga dan lapangan olahraga.

Pembinaan olahraga prestasi di Kota Surakarta sudah cukup baik, namun kondisi tersebut perlu ditingkatkan agar lebih optimal. Rasio keberadaan balai pemuda dan gedung olahraga per 1.000 penduduk di Kota Surakarta pada tahun 2013 sebesar 0,22 dirasakan masih kurang, oleh karena itu sarana tersebut perlu ditambah agar aktivitas olahraga dan pemuda dapat terlaksana secara optimal.

n. Statistik

Kumpulan data atau yang disebut dengan statistik dapat berupa angka atau bukan yang tersusun dalam bentuk tabel (daftar) atau dalam bentuk diagram yang merupakan gambaran dari suatu keadaan atau masalah tertentu. Dalam hal ini, kumpulan data yang sudah diolah akan dijabarkan sehingga dapat digunakan untuk menyusun suatu dokumen perencanaan. Data yang tersedia juga dapat digunakan untuk mengambil suatu kebijakan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyediaan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga dapat memudahkan bagi perencana untuk menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan di masing-masing daerah. Data yang tersedia secara berkesinambungan harus selalu diperbaharui demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang tepat.

Perencanaan pembangunan yang terkait dengan statistik dapat diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu Buku “Kota Dalam Angka” dan “PDRB Kota”. Di Kota Surakarta, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2010-2015, Buku “Kota Dalam Angka” dan “PDRB Kota” selalu tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah Kota Surakarta dalam menyediakan suatu dokumen perencanaan sudah baik. Akan tetapi, waktu penyusunan perlu mendapatkan perhatian yang lebih karena terlambatnya waktu penyusunan penerbitan dapat berimplikasi pada proses perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

o. Persandian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi.

Dalam RPJMD periode sebelumnya sebagaimana pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, persandian bukan menjadi urusan

tersendiri melainkan menjadi bagian dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Tabel 2.56
Data Capaian Urusan Persandian di Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah surat masuk dalam bentuk sandi (dokumen)	12	12	18	23	24	24

Sumber: Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Surakarta, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah surat masuk dalam bentuk sandi mengalami peningkatan. Namun mekanisme persandian belum optimal.

p. Kebudayaan

Kota Surakarta merupakan salah satu pusat kebudayaan Jawa. Berbagai bentuk kesenian tradisi Jawa termasuk di dalamnya kesenian daerah atau kesenian rakyat, dan kesenian klasik yang hingga kini eksistensinya masih diakui oleh masyarakat luas. Nuansa budaya Jawa dalam kehidupan masyarakat masih terasa sangat kental hingga saat ini. Oleh karena itu, sangat beralasan jika seni pertunjukan dan tradisi Jawa yang melekat di masyarakat Surakarta perlu dilestarikan dan dikembangkan. Terlebih kesenian tradisi yang merupakan aset potensial bagi pengembangan pariwisata budaya di Surakarta.

Upaya memelihara dan mengembangkan kesenian tradisi yang sudah merakyat merupakan kontribusi besar dalam pembangunan budaya nasional. Hal ini sekaligus merupakan salah satu upaya untuk mengurangi masuk dan berkembangnya budaya asing yang sering bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa. Beberapa seni pertunjukan tradisi Jawa di Kota Surakarta yang hingga saat ini masih eksis dan berkembang di masyarakat diantaranya yaitu wayang kulit, wayang orang, ketoprak, dagelan, tari dan karawitan. Tradisi tersebut hingga kini masih hidup subur di Kota Surakarta, bahkan hampir setiap sekolah ataupun hotel memiliki seperangkat gamelan untuk menyambut kedatangan tamu atau hanya sekedar belajar sehari-hari.

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah yang dilaksanakan di Kota Surakarta, antara lain: 1. Solo Carnival, 2. Solo Menari, 3. Mangkunegaran Performing Art, 4. Mangkunegaran Art Festival, 5. Festival Gamelan Akbar, 6. Festival Kuliner, 7. Solo Keroncong Festival, 8. Solo Blues Festival, 9. Solo City Jazz, 10. Vastenburg Carnival Solo, 11. Pentas Seni di CFD, 12. Apresiasi Musik Kebangsaan.

Kinerja urusan kebudayaan di Kota Surakarta bisa dilihat dari beberapa indikator, diantaranya yaitu Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan; Penyelenggaraan festival seni dan budaya; misi kesenian; Sarana penyelenggaraan seni dan budaya; Jumlah grup kesenian; Cakupan Kajian Seni; Cakupan Fasilitasi

Seni; Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian; Cakupan Organisasi seni; Cakupan Tempat umum; dan Cakupan Gelar Seni. Jika dilihat dari capaian indikator Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan pada tahun 2010 adalah 69% meningkat sampai dengan tahun 2015 menjadi 72%. Peningkatan yang terjadi tidak menunjukkan angka yang signifikan, hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga profesional yang khusus menangani benda dan situs cagar budaya yang ada di Kota Surakarta. Cakupan organisasi seni pada tahun 2015 sebesar 50%. Adapun cakupan kinerja urusan kebudayaan kota Surakarta bisa dilihat pada Tabel 2.57 di bawah ini:

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	69	69	69	69	72	41,86
2	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	8	8	11	11	11	34
3	Misi Kesenian	kali	300	300	400	400	400	500
4	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	buah	34	34	34	34	37	37
5	Cakupan Kajian Seni	%	40	80	80	93	93	93
6	Cakupan Fasilitasi Seni	%	71,42	71,42	71,42	71,42	71,42	85,71
7	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	%	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan Organisasi seni	%	100	100	100	50	50	50
9	Cakupan Tempat umum	%	100	100	100	100	100	100
10	Cakupan Gelar Seni	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, 2016

q. Perpustakaan

Kinerja pembangunan urusan perpustakaan menurut Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu jumlah perpustakaan, tingkat kunjungan perpustakaan per tahun, dan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah.

Kota Surakarta memiliki 1 (satu) perpustakaan daerah yang dapat diakses oleh masyarakat dengan tingkat kunjungan yang meningkat dari tahun 2010-2015. Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2010 sebanyak 10.625 orang dan meningkat menjadi 25.000 orang pada tahun 2015. Menurunnya tingkat kunjungan perpustakaan disebabkan karena beberapa hal, diantaranya koleksi buku yang kurang lengkap, akses ke perpustakaan daerah yang kurang, fasilitas perpustakaan yang kurang menunjang, dan lain-lain. Pada Tahun 2014, koleksi buku berkurang sehubungan dengan proses pindah kantor sehingga banyak buku yang rusak terutama buku tua (beberapa dititipkan di gudang AUB ternyata termakan rayap).

Capaian kinerja pembangunan urusan perpustakaan dapat dilihat pada Tabel 2.58 di bawah ini.

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan Tahun 2010-2015

No	Indikator	Capaian				2014	2015
		2010	2011	2012	2013		
1.	Jumlah perpustakaan (unit)	1	1	1	1	1	1
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	10.625	18.250	20.300	23.500	3.383	385.020
3.	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	34.919 judul	35.655 judul	36.045 judul	36.719 judul	25.734 judul	26.508 judul
		41.536 eks	42.840 eks	43.606 eks	44.366 eks	34.664 eks	36.294 eks

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Surakarta, 2016

r. Kearsipan

Kearsipan sangat memegang peranan penting terkait dengan kelancaran sistem organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sumber ingatan bagi organisasi. Dengan adanya sistem kearsipan yang tertata dengan baik, maka akan memudahkan pemimpin untuk menentukan kebijakan. Kearsipan itu sendiri dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui sistem sentralisasi dimana semua arsip yang ada dari berbagai bidang (unit) disimpan dan dikelola pada satu ruangan tersendiri dan melalui sistem desentralisasi dimana arsip-arsip dibagi menurut bidangnya (unitnya) untuk kemudian disimpan dan dikelola oleh masing-masing unit pada ruangan khusus di tiap unit.

Di Kota Surakarta terdapat 1 (satu) Pusat Informasi Arsip Daerah yang berfungsi menyediakan informasi tertentu bagi instansi yang membutuhkan. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan kearsipan yang lebih baik, pemerintah Kota Surakarta berusaha untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga pengarsipan. Seluruh Perangkat Daerah dan BUMD diwajibkan menerapkan Sistem Pengelolaan Baku Kearsipan Melalui Aplikasi SIMARDI, sampai dengan tahun 2014 telah dilaksanakan implementasi aplikasi tersebut dengan capaian kinerja 37,89% mengalami penurunan di tahun 2015 menjadi 31%. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan arsip adalah rotasi pegawai yang telah mengikuti pelatihan SIMARDI sehingga Perangkat Daerah dan BUMD yang ditinggal kembali menerapkan proses pengelolaan arsip secara manual.

Akan tetapi, terkait dengan jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikat dalam bentuk informatika, baru dimulai pada tahun 2013, sejumlah 5000 dan tahun 2015 telah dikembangkan menjadi 15.200. Persentase arsip daerah yang diterbitkan naskah sumbernya pada tahun 2015 mencapai 15,2%. SDM pengelola kearsipan turun karena purna tugas. Capaian kinerja pembangunan urusan kearsipan dapat dilihat pada Tabel 2.57 di bawah ini.

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kearsipan

No	Indikator	Capaian					2015
		2010	2011	2012	2013	2014	
1.	Pusat Informasi Daerah (unit)	1	1	1	1	1	1
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang)	-	60	100	100	60	50
3.	Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikat dalam bentuk informatika (buku)	-	-	0	5.000	15.000	15.200
4.	Pengelolaan arsip secara baku (%)	0	0	26,32	31,58	37,89	31

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Surakarta, 2016

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan dalam kurun waktu tahun 2010-2015 menunjukkan angka yang fluktuatif, produksi tertinggi pada tahun 2014 sebesar 57,98 ton. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Surakarta masih cukup rendah yaitu di angka 3,8 kg/tahun. Tingkat konsumsi ini lebih rendah dari konsumsi ikan Jawa Tengah yang 16 kg/kapita/tahun padahal target Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih tinggi lagi, mencapai 31,64 kilogram per orang per tahun.

Rendahnya tingkat konsumsi ikan di Solo hanya karena soal selera. Sebagai penduduk yang tinggal jauh dari laut, kemungkinan tidak begitu suka makan makanan hasil laut, untuk harga tidak jadi masalah, karena harga ikan laut masih sangat terjangkau oleh masyarakat, apalagi dengan diadakannya bazar ikan murah. Perkembangan kinerja urusan perikanan dapat dilihat pada Tabel 2.60 berikut:

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Urusan Perikanan Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian				2014	2015
			2010	2011	2012	2013		
1	Produksi perikanan budidaya	ton	9,05	15,67	18,03	27,77	57,98	36,2
2	Tingkat konsumsi ikan penduduk	kg/tahun	1,4	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
3	Jumlah pameran/promosi produk perikanan	kali	2	2	4	4	3	2

Sumber : Dinas Pertanian Kota Surakarta, 2016

Berdasarkan capaian kinerja pada uraian sebelumnya, pengembangan budidaya perikanan, sesuai dengan RTRW Kota Surakarta perlu dikembangkan di kawasan perikanan budidaya yaitu di Kelurahan Manahan, Kelurahan Sumber, Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari dan Kelurahan Mojosongo-

Kecamatan Jebres. Sementara itu pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dikembangkan di Balekambang di depo Kelurahan Gilingan dan Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari.

b. Pariwisata

Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan Kota Solo merupakan salah satu kota yang terkenal dengan batik dan keratonnya di Jawa Tengah. Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang kaya akan potensi sumber daya pariwisatanya. Destinasi pariwisata yang ditawarkan di Kota Surakarta juga sangat beragam, diantaranya wisata religi, wisata alam, wisata geologi, taman rekreasi dan beberapa desa wisata. Sosok keraton yang menjadi simbol budaya Jawa, sampai saat ini masih kokoh eksistensinya baik secara fisik, komunitas maupun ritualnya. Selain wisata budaya, terdapat pula beberapa tempat dan even-even kebudayaan lain yang menarik untuk dinikmati.

Beberapa objek wisata di Kota Surakarta terdiri dari spesifikasi wisata budaya, wisata pendidikan, wisata sejarah, wisata belanja, dan wisata kuliner. Wisata budaya yang dapat dikunjungi di Kota Surakarta Wayang Orang Sriwedari, Ketoprak, Kirab Pusaka 1 Suro, Grebeg Sudiro, Grebeg Mulud, dan Solo Batik Carnival. Semua wisata budaya yang dapat dijumpai di Kota Surakarta tersebut dipelihara dan dijaga oleh masyarakat sebagai warisan budaya yang dimiliki Kota Surakarta (Arsip Disbudpar Kota Surakarta: Inventaris Data Wisata Budaya Kota Surakarta tahun 2011).

Sektor pariwisata di Kota Surakarta mempunyai potensi pertumbuhan yang sangat besar yang pengembangannya perlu direalisasikan agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Capaian kinerja urusan pariwisata di Kota Surakarta bisa dilihat dari 3 program, yaitu program pengembangan pemasaran pariwisata, program pengembangan destinasi pariwisata, program pengembangan kemitraan pariwisata. Pemasaran pariwisata Kota Surakarta yang dilakukan dengan besar-besaran bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Jika dilihat dari capaian kinerja urusan pariwisata di Kota Surakarta, meningkatnya jumlah kunjungan wisata berada di tahun 2010 hingga tahun 2015, yaitu meningkat dari 816.546 orang pada Tahun 2010 menjadi 3.265.117 orang pada Tahun 2014. Namun, jumlah kunjungan wisata pada Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 4.142.785 orang. Jumlah kunjungan wisata tersebut terdiri dari 36.546 wisatawan mancanegara dan 4.106.239 wisatawan domestik. Adapun cakupan kinerja urusan pariwisata Kota Surakarta bisa dilihat pada Tabel 2.61 berikut ini:

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian					2015
			2010	2011	2012	2013	2014	
1.	Kunjungan wisatawan mancanegara	orang	40.002	49.791	38.261	36.777	44.936	36.546

No	Indikator	Satuan	Capaian				2014	2015
			2010	2011	2012	2013		
2.	Kunjungan wisatawan domestik	orang	1.905.630	2.489.497	3.030.840	3.338.203	4.187.207	4.106.239
3.	Persentase objek wisata yang dipromosikan	%	100	100	100	100	100	100
3.	Jumlah objek wisata unggulan	objek	9	9	9	9	9	9
4.	Jenis kelas dan jumlah restoran							
	Restoran	unit	19	21	24	30	39	30
	Rumah Makan	unit	247	247	267	277	281	277
5.	Jenis kelas dan jumlah penginapan/hotel							
	Bintang -5	unit	2	2	2	2	2	3
	Bintang - 4	unit	4	4	4	4	4	7
	Bintang -3	unit	6	6	7	6	6	14
	Bintang -2	unit	6	6	6	6	6	8
	Bintang - 1	unit	5	5	7	7	7	10
	Melati-3	unit	21	21	21	21	*)	*)
	Melati-2	unit	36	36	36	36	*)	*)
	Melati-1	unit	53	53	53	53	*)	*)
	Non Bintang	unit	117	117	117	117	118	103
	Home Stay	unit	14	14	14	14	14	14

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Surakarta, 2016
 *) Mulai tahun 2014 Hotel melati diubah menjadi hotel nonbintang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

c. Pertanian

Pertanian hanya memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap perekonomian di Kota Surakarta, yaitu hanya 0,06% pada tahun 2010, dan menurun menjadi 0,048% pada tahun 2015. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan kota yang begitu pesat, sehingga kurang memungkinkan lagi untuk pengembangan pertanian. Produksi tanaman padi dalam kurun waktu tahun 2010-2015 menunjukkan angka yang fuktuatif, produksi tertinggi pada tahun 2015 sebesar 1.453 ton dengan tingkat produktivitas sebesar 73,18 kwintal/ha. Penerapan teknologi pertanian/perkebunan masih menjadi kendala, dapat dilihat dari persentase kelompok tani yang telah menerapkan teknologi pertanian/perkebunan baru mencapai 80% pada tahun 2015.

Pencapaian kinerja urusan Pertanian di Kota Surakarta dapat dilihat pada Tabel 2.62 berikut:

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tingkat pendapatan petani	Rp/ panen	5.532.790	5.927.580	6.205.910	5.790.120	4.363.435	3.962.435
2	Cakupan bina kelompok petani	%	10	10	10	10	10	10
3	Persentase kelompok tani menerapkan teknologi pertanian/perkebunan	%	10	12	15	20	22	80
4	Produksi padi	ton	1344,5	637,8	1030,4	1287,5	922,37	1.378*
5	Produktivitas padi per hektar	kw/ha	53	47,18	72,82	63,83	53,94	73,18*

No	Indikator	Satuan	Capaian					2015
			2010	2011	2012	2013	2014	
6	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,048
7	Angka prevalensi penyakit hewan	%	1	1	1	1	1	1
8	Angka prevalensi penyakit zoonosis	%	1	1	1	1	1	1
9	Produksi hasil peternakan	kg	9.360	2.562	2.885	2.996	2.935	3.834

Sumber : Dinas Pertanian Kota Surakarta, 2016

*) Angka Sementara

Hasil peternakan di Kota Surakarta meliputi daging kambing, daging domba, daging sapi, daging babi, daging ayam kampung, daging ayam ras, daging itik, telur, dan susu. Beberapa hasil peternakan produksinya cenderung meningkat, meliputi: semua jenis telur, daging ayam ras, daging domba, dan daging babi. Berkaitan dengan kesehatan hewan ternak, angka prevalensi penyakit hewan sebesar 1%, dan angka prevalensi penyakit zoonosis sebesar 1%.

d. Perdagangan

Perekonomian Kota Surakarta banyak didorong dan didukung oleh sektor perdagangan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya sumbangan dari sub sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta. Sumbangan sub sektor perdagangan terhadap PDRB dari tahun ke tahun selalu menunjukkan tren yang meningkat, baik dari sisi nominalnya maupun dari sisi persentasenya. Sumbangan sub sektor perdagangan pada tahun 2015 memberikan kontribusi sebesar 22,58% terhadap PDRB atas dasar harga berlaku, sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan mampu mencapai 23,68%. Secara rinci perkembangan kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB baik ADHB maupun ADHK dari tahun 2010-2015 dapat dilihat dalam Tabel 2.63 di bawah ini.

Tabel 2.63
Besarnya Kontribusi Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (ADHB)
Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Uraian	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	PDRB Sub Sektor Perdagangan	5.839.528,28	6.167.070,06	6.839.466,39	7.307.631,60	7.893.738,82
2	Total PDRB	23.909.011,13	26.425.273,02	29.092.454,16	32.038.668,79	34.962.340,12
3	Sumbangan PDRB Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	24,42	23,34	23,51	22,81	22,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2016

Kemajuan sektor perdagangan sebagai salah satu penggerak utama roda perekonomian di Kota Surakarta ditunjang dengan keberadaan sarana prasarana yang memadai. Penataan pasar-pasar

tradisional menjadi salah satu strategi yang diambil dalam rangka meningkatkan potensi di sektor perdagangan. Sampai tahun 2015 di Kota Surakarta terdapat 44 pasar tradisional, pasar-pasar tersebut secara bertahap sudah mulai ditata kebersihan, ketertiban dan kenyamanannya untuk meningkatkan daya saing dengan pasar-pasar modern yang ada. Data tahun 2015 menunjukkan sudah 63,64% pasar di Kota Surakarta telah memenuhi syarat kesehatan, bersih dan nyaman. Di antara pasar-pasar tersebut beberapa diantaranya merupakan pasar yang bersejarah dan menjadi ikon bagi Kota Surakarta. Pasar-pasar yang mampu menjadi ikon dan kebanggaan Kota Surakarta diantaranya yaitu Pasar Klewer, Pasar Gede, Pasar Klithikan, dan Pasar Notoharjo. Meskipun sektor perdagangan sudah cukup baik tetapi masih ada capaian urusan perdagangan yang perlu ditingkatkan.

Selain pengembangan dan penataan pasar, hal lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam mengembangkan perdagangan adalah penataan pedagang kaki lima (PKL). Jumlah PKL di Kota Surakarta berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta pada tahun 2015 mencapai 855 orang yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada. Kecamatan dengan jumlah PKL paling banyak adalah Banjarsari dengan jumlah PKL sebanyak 280 orang atau sebesar 32,75% dari total PKL yang ada di Kota Surakarta. Untuk mengelola keberadaan PKL tersebut telah dilakukan penataan lokasi untuk PKL tersebut. Sampai tahun 2015 lokasi PKL yang telah tertata mencapai 82,14%.

Guna mendukung pengembangan pasar agar semakin tertata, nyaman dan ramah terhadap konsumen, salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap pasar.

Tabel 2.64
Kinerja Perdagangan Lainnya di Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Psar Tradisional (Unit)	43	43	43	43	44	44
2	Jumlah PKL (Orang)	3.104	2.905	2.840	2.768	1.340	855
3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	100	100	100	100	100	100
4	Persentase lokasi PKL yang tertata (%)	57,14	61,22	65,31	69,39	80,36	82,14
5	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan (%)	39,53	44,19	46,51	53,49	56,82	63,64
6	Tingkat terlindunginya konsumen (%)	tad	tad	tad	42,86	24,18	43,52

Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, 2016

Di Kota Surakarta sejak tahun 2011 telah terbentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tugas pokok BPSK sesuai dengan undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Adapun fungsi dari BPSK adalah untuk menangani dan menyelesaikan sengketa

konsumen di luar pengadilan. Berdasarkan data yang ada, tingkat penyelesaian sengketa konsumen yang mampu ditangani oleh BPSK Kota Surakarta pada tahun 2014 mencapai 76,67% dari total kasus. Angka tersebut menurun dari capaian tahun sebelumnya yang mampu mencapai 81,25%. Pada tahun 2015 tidak ada laporan kasus karena tidak ada anggaran operasional BPSK.

Usaha perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat Kota Surakarta juga telah mampu menembus pasar global. Beberapa produk seperti batik dan barang-barang kerajinan lainnya cukup mampu bersaing di dunia internasional. Hal yang perlu mendapatkan perhatian dari sektor perdagangan luar negeri adalah semakin menurunnya nilai ekspor produk dari Kota Surakarta. Pada tahun 2015 nilai ekspor sebesar US\$ 30.706.644,73; angka tersebut menurun cukup signifikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 yang mencapai US\$ 53.826.324,55.

e. Perindustrian

Industri berdasarkan data dari statistik dibedakan menjadi 4 kelompok yang didasari oleh jumlah tenaga kerja yang diserap. Pertama adalah industri rumah tangga, yaitu industri dengan jumlah pekerja antara 1-4 orang. Kedua adalah industri kecil, yaitu jumlah pekerja antara 5-19 orang. Ketiga adalah industri sedang dengan tenaga kerja antara 20-99 orang dan yang keempat adalah industri besar, yaitu industri yang mampu menyerap tenaga kerja 100 orang tenaga kerja atau lebih.

Sedangkan menurut data yang ada di Kota Surakarta dalam Angka yang dirilis oleh BPS Kota Surakarta kategori industri yang ada, yaitu industri besar, menengah, dan kecil (formal dan nonformal). Industri kecil nonformal di wilayah Kota Surakarta memiliki jumlah paling banyak di antara kategori-kategori lainnya. Sedangkan kategori industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor industri kecil formal.

Menurut Disperindag Kota Surakarta jenis industri yang ada dibedakan menjadi industri besar, industri menengah, industri kecil dan industri non formal.

Tabel 2.65
Jumlah Industri dan Tenaga Kerja yang Terserap di Kota Surakarta
Tahun 2015

No	Jenis Industri	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		Jumlah	Tenaga Kerja	Jumlah	Tenaga Kerja	Jumlah	Tenaga Kerja	Jumlah	Tenaga Kerja	Jumlah	Tenaga Kerja	Jumlah	Tenaga Kerja
1	Besar	55	8.893	59	9.216	60	9248	63	11184	67	13735	68	13735
2	Menengah	106	7.957	126	8.697	134	8794	150	10335	151	11550	158	11550
3	Kecil	1.437	26.656	1.512	27.866	1532	27988	1561	28557	1582	29437	1608	29628
4	Non Formal	4.509	13.032	4.677	13.488	4777	13588	5360	14947	6010	16441	6010	16441
Total			6.107	56.538	6.374	59267	6503	59618	7134	65023	7810	71163	7844

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta, 2016

Berdasarkan data BPS, sektor perindustrian dalam komposisi perekonomian di kota memberikan kontribusi sebesar 8,47% dari total PDRB pada tahun 2015. Sedangkan jika dilihat dari total PDRB sektor industri, sebagian besar masih didominasi kontribusi dari industri makanan, minuman dan tembakau. Selanjutnya, sektor industri tekstil, barang kulit dan alas kaki.

Pengembangan perindustrian diarahkan dalam kategori kecil dan menengah. Jumlah perusahaan industri mikro, kecil, dan menengah (IMKM) di Kota Surakarta dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Dalam rangka meningkatkan keberadaan produk dari sektor industri mikro, kecil dan menengah ini dan agar diterima oleh masyarakat, pemerintah setiap tahun melakukan kegiatan pameran promosi produksi, baik yang sifatnya melaksanakan kegiatan sendiri maupun yang berupa pengiriman ke event-event yang diselenggarakan oleh pihak lain. Hanya saja kemampuan daerah untuk memfasilitasi pelaku IMKM dalam kegiatan tersebut masih terbatas. Rata-rata per tahun jumlah IMKM yang mendapat fasilitas untuk mengikuti pameran promosi produk baru sekitar 1,7% dari total industri yang ada. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut harapannya adalah akan mampu meningkatkan omset penjualan produk IMKM di Kota Surakarta. Persentase peningkatan omset penjualan produk IMKM kondisinya dari tahun 2010-2012 angkanya fluktuatif. Rata-rata peningkatan omset dari IMKM per tahun sebesar 20%.

Selain mengikutsertakan dalam kegiatan promosi dan pameran, hal lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam menguatkan pelaku IMKM adalah dengan mengadakan pembinaan yang dilaksanakan secara rutin.

Tabel 2.66
Capaian Kinerja Bidang Perindustrian Lainnya di Kota Surakarta
Tahun 2010-2015

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan pelaku usaha yang difasilitasi peningkatan SDM dan pemasaran (%)	1,88	3,75	5,85	8,35	10,23	12,23
2	Pertumbuhan industri (%)	3,19	4,19	1,98	8,84	8,66	3,53

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta, 2016

f. Transmigrasi

Kebijakan utama urusan transmigrasi diarahkan untuk fasilitasi kepada calon transmigran dalam penempatannya ke daerah tujuan transmigrasi. Kinerja urusan transmigrasi dapat dilihat dari jumlah transmigran yang diberangkatkan. Dalam kurun waktu lima tahun jumlah transmigran yang diberangkatkan relatif sedikit, tertinggi tahun 2012 sebanyak 15 KK, capaian tahun 2015 hanya 10 KK.

Pencapaian kinerja urusan Transmigrasi dengan mendasarkan indikator yang diatur dalam beberapa peraturan dapat diidentifikasi pada tabel berikut:

Tabel 2.67
Pencapaian Kinerja Indikator Urusan Transmigrasi di Kota Surakarta
Tahun 2011-2015

No.	INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	10 KK	9 KK	15 KK	10 KK	5 KK	10 KK

Sumber : Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrsi Kota Surakarta, 2016

4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

Berlakunya kebijakan otonomi seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten/kota menjadikan perencanaan pembangunan daerah bersifat strategis mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan memerlukan kelengkapan dan akurasi data yang tepat dan objektif. Fungsi strategis perencanaan pembangunan daerah diwujudkan melalui keterpaduan dokumen perencanaan antara dokumen perencanaan yang ada baik sektoral maupun perencanaan tingkatan pemerintahan di atasnya.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Kota Surakarta telah diupayakan sejalan dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan komitmen Kota Surakarta menyelesaikan permasalahan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 maka pemerintah daerah Kota Surakarta wajib menyusun dokumen perencanaan meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penjabarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, Kota Surakarta memiliki kewajiban untuk memenuhi komitmen internasional yang disepakati Pemerintah Pusat, meliputi: Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Millenium (MDG’s); RAD Pendidikan Untuk Semua (*Education for All*), dan RAD Kota Layak Anak dan lain-lain. Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan pembangunan juga telah dilakukan berbagai kajian dan penelitian terkait dengan dokumen Strategi Sanitasi Kota dan Dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi (DMPSS) dan Dokumen RPIJM Bidang Keciptakarya.

Capaian kinerja urusan wajib perencanaan pembangunan di Kota Surakarta mengacu pada 4 (empat) indikator kinerja kunci,

antara lain: 1) tersedianya dokumen perencanaan RPJPD 2005-2025; 2) tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD tahun 2010-2015; 3) tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD tiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota; dan 4) Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD untuk mengetahui tingkat capaian kinerja per tahun.

Secara lengkap hasil kinerja urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta tahun 2010-2015 dapat disajikan berikut ini.

Tabel 2.68
Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada (Rancangan Awal)
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perwal	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada *)	82,80	72,69	90	61,11	63

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta, 2016

Keterangan : *) tidak dilakukan evaluasi

b. Keuangan

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, termasuk tanggung jawab dan aktif mencari berbagai peluang peningkatan pendapatan daerah. Peraturan daerah dan kebijakan diformulasikan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatanyang sah. Kemampuan keuangan daerah masih terbatas maka pendapatan daerah mengandalkan dua sumber utama, yaitu Dana Perimbangan (termasuk DAU dan DAK) dan sumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menjadi sumber utama pendanaan pembangunan dan belanja pegawai.

Peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan kebijakan pengelolaan yang transparan dan akuntabel dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011. Pengelolaan keuangan daerah mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis akuntansi, nilai-nilai historis, realistis, periodisasi, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian secara wajar. Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2010-2014 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, termasuk kategori baik.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Surakarta tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.69
Capaian Kinerja Keuangan Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Belanja Publik terhadap DAU	Tidak ada dalam Permendagri No.13 Thn. 2006	Tidak ada dalam Permendagri No.13 Thn. 2006	79,33%	92,96%	Struktur dalam APBD tidak ada	Struktur dalam APBD tidak ada
2.	Belanja langsung terhadap total APBD (%)	29,93	33,90	37,33	40,43	43,07	37,78
3.	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (realisasi) (%)	13,10	17,59	18,69	21,38	21,91	24,07
4.	Rasio SILPA terhadap total pendapatan (%)	5,12	9,30	20,01	12	12,29	14,11
5.	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja (%)	93,31	93,24	86,78	91	88,25	86,37 (unaudited)
6.	Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD (%)	99,60	102,79	120,10	105,45	105,28	105,01
7.	Peningkatan PAD (%)	24,50	8,31	27,36	27,52	11,87	12,94
8.	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncana (%)	99,45	100,54	103,11	99,77	97,77	69,33
9.	Belanja untuk pelayanan dasar (%)	60,73	67,10	65,14	60,57	87,11	85,72
10.	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan (%)	52,83	54,54	52,86	46,35	87,11	85,72

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Surakarta, 2016

Optimalisasi pengelolaan aset daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peningkatan pemanfaatan, pendayagunaan, dan efisiensi pengelolaan aset daerah dilakukan untuk mendukung peningkatan PAD. Oleh karena itu, dilakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, pemutakhiran data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan

Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

c. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah aparatur pemerintah Kota Surakarta (tahun 2015) sebanyak 9.205 orang terdistribusi pada 84 Perangkat Daerah. Aparatur adalah unsur utama penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public, semakin meningkat kualitasnya, baik pendidikan aparatur, sarana dan prasarana serta reformasi birokrasi. Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diharapkan profesionalisme aparatur semakin meningkat di tahun-tahun mendatang. Gambaran kondisi aparatur Pemerintah Kota Surakarta tahun 2015, sebagai berikut:

Tabel 2.70
Jumlah Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2015

Berdasarkan Golongan				Berdasarkan Jabatan						Jenis Kelamin	
I	II	III	IV	Struktural				JFK	JFU	L	P
				Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Eselon V				
309	1.384	4.210	3.302	28	128	730	33	5.591	2.695	4.539	4.666
Total : 9.205				Total : 9.205						Total : 9.205	

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta, 2016

Tabel 2.71
Gambaran Kepegawaian Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rasio PNS terhadap penduduk	2,06	2,02	1,93	1,85	1,56	1,65
2.	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Fungsional (orang)	25	50	32	80	179	16
3.	Persentase aparatur PNS yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan kepemimpinan (%)	1,27	1,81	4,12	9,49	12,3	10,3

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta, 2016

d. Fungsi lain

1) Pengawasan

Pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat semakin ditingkatkan agar kinerja pembangunan daerah dan pelayanan publik lebih berdaya guna dan berhasil guna. Fokus pengawasan pada pengawasan internal secara berkala pada semua obyek pemeriksaan (obrik) bagi 84 Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Capaian kinerja pengawasan selama tahun 2010-2015 dapat dilaksanakan melalui pemeriksaan reguler pada objek pemeriksaan di Kota Surakarta sebanyak 178 LHP pada tahun 2010, 144 LHP pada tahun 2011 dan 2012, 216 LHP pada tahun 2013, dan 180 pada tahun 2014 dan tahun 2015. Capaian sub bidang pengawasan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 2.72
Capaian Pengawasan di Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	100	85,2	95	92	95	95
3.	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) (laporan)	178	144	144	216	180	180
4.	Jumlah laporan hasil tindak lanjut dan ekspose temuan hasil pengawasan yang telah disusun	430	389	428	688	656	676
5.	Persentase tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	30	35	100	100	100	100
6.	Jumlah LHP kasus/khusus dan pengaduan masyarakat (kasus)	21	17	17	19	11	14

Sumber: Inspektorat Kota Surakarta, 2016

2) Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Kota Surakarta semakin ditingkatkan sebagai perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang amanah dan pelayanan publik, mencakup prioritas sebagai berikut:

- a) Penataan dan penguatan organisasi Perangkat Daerah melalui penataan kelembagaan pada sebanyak 84 Perangkat Daerah Kota Surakarta;
- b) Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui berbagai diklat aparatur meliputi diklat teknik fungsional dan kepemimpinan, baik yang diselenggarakan di Kota Surakarta maupun di Provinsi Jawa Tengah dan Pusat;
- c) Penguatan akuntabilitas kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d) Penataan perundang-undangan, dilaksanakan dari tahun 2010-2015 telah diselesaikan penyusunan sebanyak 80 peraturan daerah dan 326 peraturan pelaksanaanya dengan Peraturan Walikota (Perwali);
- e) Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara periodik.

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan di lingkungan Perangkat Daerah Kota Surakarta semakin ditingkatkan melalui pelayanan terpadu berbasis teknologi informasi (TI). Hal ini merupakan komitmen dalam penataan sistem manajemen melalui website yang mudah diakses dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, untuk mendukung perwujudan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas kinerja, telah dibangun beberapa sistem informasi manajemen, antara lain: Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMDALBANGDA), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIK), Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), dan sistem informasi penunjang lainnya.

Untuk mewujudkan pelayanan perizinan terpadu yang berbasis internet melalui pelayanan perizinan dan nonperizinan untuk meningkatkan penanaman modal di Kota Surakarta.

Tabel 2.73
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Penghargaan dari pemerintah yang diterima Pemda Kota Surakarta (buah)	2	3	5	6	3	4
2	Keberadaan sistem informasi Pelayanan Perizinan dan administrasi pemerintah	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3	Keberadaan <i>E-procurement</i>	ada	ada	ada	ada	ada	ada
4	Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5	Keberadaan Perda tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6	Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surakarta, 2016

Kerjasama daerah merupakan salah satu upaya untuk lebih memantapkan hubungan dan keterpaduan daerah yang satu dengan yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah, penyelesaian permasalahan yang bersifat lintas batas wilayah serta meningkatkan teknologi, promosi daerah dan kapasitas fiskal. Bentuk kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta meliputi kerjasama antardaerah, kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, kerjasama dengan Swasta berbadan hukum serta kerjasama *sister city* dan kerjasama teknis dengan pihak luar negeri. Berikut merupakan gambaran mengenai data kerjasama daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2010-2015.

Tabel 2.74
Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2010 – 2015

No	Jenis Kerjasama Daerah	2011		2012		2013		2014		2015	
		Jumlah MoU	Jumlah MoU yang ditindaklanjuti hingga program aksi	Jumlah MoU	Jumlah MoU yang ditindaklanjuti hingga program aksi	Jumlah MoU	Jumlah MoU yang ditindaklanjuti hingga program aksi	Jumlah MoU	Jumlah MoU yang ditindaklanjuti hingga program aksi	Jumlah MoU	Jumlah MoU yang ditindaklanjuti hingga program aksi
A	Kerjasama Dalam	23	15	29	17	34	22	25	16	36	22

No	Jenis Kerjasama Daerah	2011		2012		2013		2014		2015	
		Jumlah MoU	Jumlah MoU yang ditindak lanjuti hingga program aksi	Jumlah MoU	Jumlah MoU yang ditindak lanjuti hingga program aksi	Jumlah MoU	Jumlah MoU yang ditindak lanjuti hingga program aksi	Jumlah MoU	Jumlah MoU yang ditindak lanjuti hingga program aksi	Jumlah MoU	Jumlah MoU yang ditindak lanjuti hingga program aksi
	Negeri										
	Kerjasama antardaerah	7	5	8	5	7	5	8	5	7	5
	Kerjasama dengan Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian	14	9	15	8	23	14	9	6	18	11
	Kerjasama dengan Swasta Berbadan Hukum	2	1	6	4	4	3	8	5	15	6
B	Kerjasama Luar Negeri	4	3	5	4	2	2	2	0	4	4
	Kerjasama Sister City	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1
	Kerjasama Teknis	3	3	4	4	2	2	2	2	3	3
	Total Persentase	66,7%		61,7%		66,7%		66,7%		65%	

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surakarta, 2016

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan perbaikan kinerja aparatur dengan penyederhanaan regulasi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada Pemerintah Kota Surakarta, terutama melalui:

- Pelayanan perizinan terpadu dan semakin ditingkatkan;
- Keberadaan LPSE telah dimulai tahun 2011;
- Pelayanan KTP elektronik tahun 2011;
- Pelayanan unit pengaduan masyarakat di semua Perangkat Daerah;
- Peningkatan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui *website* Pemerintah Kota Surakarta sudah dimulai sejak 2010. Sampai dengan tahun 2015 sebagian besar Perangkat Daerah Kota Surakarta telah memiliki *website* yang mudah diakses masyarakat dan dunia usaha.

Tabel 2.75
Capaian Kinerja Sub Bidang Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2015

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penataan Perangkat Daerah (Perangkat Daerah)	85 (Berdasar Perda No.14 Tahun 2008)	83 (Berdasar Perda No.6 Tahun 2011)	83 (Berdasar Perda No.6 Tahun 2011)	84 (Berdasar Perda No.5 Tahun 2013)	84 (Berdasar Perda No.5 Tahun 2013)	84 (Berdasar Perda No.5 Tahun 2013)
2.	Indeks Kepuasan	B (62,51-	B (62,51-	B (62,51-	B (62,51-	B (62,51-	B (62,51-

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Layanan Masyarakat (Diukur dari rata-rata nilai IKM di Kecamatan Kota Surakarta)	81,25)	81,25)	81,25)	81,25)	81,25)	81,25)
3.	Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah (urusan) Dasar (Perwali No 4-A Tahun 2010 tentang SPM bidang kesehatan)	1 (bidang Kesehatan)	1 (bidang Kesehatan)	1 (bidang Kesehatan)	1 (bidang Kesehatan)	1 (bidang Kesehatan)	1 (bidang Kesehatan)
4.	Ketepatan waktu penyampaian LPPD	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surakarta, 2016

Yang dimaksud dengan ketepatan waktu penyampaian LPPD (tepat) adalah LPPD dilaporkan Mendagri melalui Gubernur 3 bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran (per 31 Maret) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Pembangunan bidang Hukum dan HAM di Kota Surakarta dilaksanakan berdasarkan kewenangan daerah melalui penataan peraturan perundang-undangan yang meliputi kegiatan: penyusunan, penyebarluasan dan diseminasi peraturan daerah/ peraturan walikota guna mewujudkan kepastian hukum dalam masyarakat. Peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota yang ditetapkan antara tahun 2009-2015 menunjukkan capaian kinerja daerah atas pelaksanaan kewenangan yang dimaksud. Adapun peraturan daerah pada kurun waktu tersebut yang berhasil ditetapkan adalah sejumlah 12-17 buah, Peraturan Walikota 40-87 buah, dan Keputusan Walikota 247-495 buah. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut dalam perencanaannya telah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan peraturan perundangan yang baru.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dilaksanakan penyuluhan hukum di tingkat wilayah dengan melibatkan pemangku kepentingan. Di samping itu, upaya penguatan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, telah dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi tokoh masyarakat sampai tingkat kelurahan.

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Nasional dilakukan dengan sosialisasi yang bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan melibatkan aparatur pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan.

Peningkatan pelayanan publik dilaksanakan melalui publikasi berbagai dokumen produk hukum dan informasi hukum yang mudah diakses melalui website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surakarta sebagai tindak lanjut atas pengundangan produk hukum dalam berita daerah maupun lembaran daerah.

Tabel 2.76
Capaian Kinerja Sub Bidang Hukum dan HAM

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	PERDA yang ditetapkan (buah)	10	12	10	8	12	16
2.	Peraturan Walikota yang ditetapkan (buah)	40	63	87	62	65	55
3.	Keputusan Walikota yang ditetapkan (buah)	258	247	350	405	495	411

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surakarta, 2016

3) Sekretariat Dewan

Raperda yang disetujui DPRD menjadi Perda pada tahun 2015 mencapai angka 100%, kemudian terkait keputusan DPRD/keputusan pimpinan DPRD yang ditindaklanjuti dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.77
Capaian Kinerja Sekretariat Dewan

No	Indikator	Capaian					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	RAPERDA yang disetujui DPRD (%)	71	85,71	71,43	80	100	100
2.	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti (%)	32	28	35	32	35	28
3.	Keputusan Pimpinan DPRD yang ditindaklanjuti (%)	45	61	54	62	40	18

Sumber: Sekretariat DPRD, 2016

D. Aspek Daya Saing Daerah

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pengeluaran per kapita penduduk Kota Surakarta selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pengeluaran per kapita penduduk Kota Surakarta pada tahun 2015 mencapai angka 13.604 ribu rupiah. Angka ini meningkat dari 12.123 ribu rupiah pada tahun 2010.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2016

Gambar 2.22
Perbandingan Pengeluaran per Kapita Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2015

2. Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

a. Perhubungan

Kondisi jalan di Kota Surakarta sebagian dalam kondisi baik. Dari 676.656 km total panjang jalan; 73,37% di antaranya dalam kondisi baik. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2015 mencapai angka 0,080.

Jumlah bus yang masuk ke Terminal Tirtonadi pada tahun 2012 sebanyak 376.226 bus AKDP dan 400.950 bus AKAP. Pada tahun 2015 jumlah orang yang melalui terminal mencapai 16.182.815 orang. Sedangkan jumlah penumpang mencapai 18.331.299 orang. Adapun Stasiun Balapan melayani penumpang kereta api sebanyak 185.151 penumpang eksekutif, 149.951 penumpang kelas bisnis, dan 686.630 penumpang bisnis lokal. Sedangkan angkutan barang di Stasiun Tirtonadi mencapai 1.214.369 Kg.

b. Fasilitas Penunjang

Salah satu unsur penunjang pembangunan adalah adanya perbankan. Jasa perbankan di Kota Surakarta dilayani oleh 38 kantor bank yang ada. Bank tersebut terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik pemerintah daerah, dan bank milik swasta asing. Jumlah bank milik pemerintah berjumlah 4 unit, kemudian bank milik pemerintah daerah ada 1

unit, bank milik swasta nasional ada 30 unit, dan bank milik swasta asing ada 3 unit.

Fasilitas hotel juga menunjang perkembangan perekonomian di Kota Surakarta. Hotel ini akan memfasilitasi pengunjung dari luar kota yang akan melakukan kegiatan bisnis, wisata dan lain-lain. Berdasarkan Data Disbudpar Kota Surakarta Tahun 2015, jumlah hotel di Kota Surakarta saat ini adalah sebanyak 159 unit, terdiri atas 3 hotel Bintang 5, 7 hotel bintang 4, 14 hotel bintang 3, 8 hotel bintang 2, 10 hotel bintang 1, 103 hotel non bintang, dan 14 *home stay*.

c. Penggunaan Air Bersih

Kondisi rumah tangga di Kota Surakarta yang memiliki akses terhadap air minum layak pada tahun 2015 telah mencapai 79,61%. Sedangkan untuk rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak, tahun 2014 mencapai angka 97,00% dan meningkat menjadi 97,50% pada tahun 2015.

3. Iklim Berinvestasi

a. Angka Kriminalitas

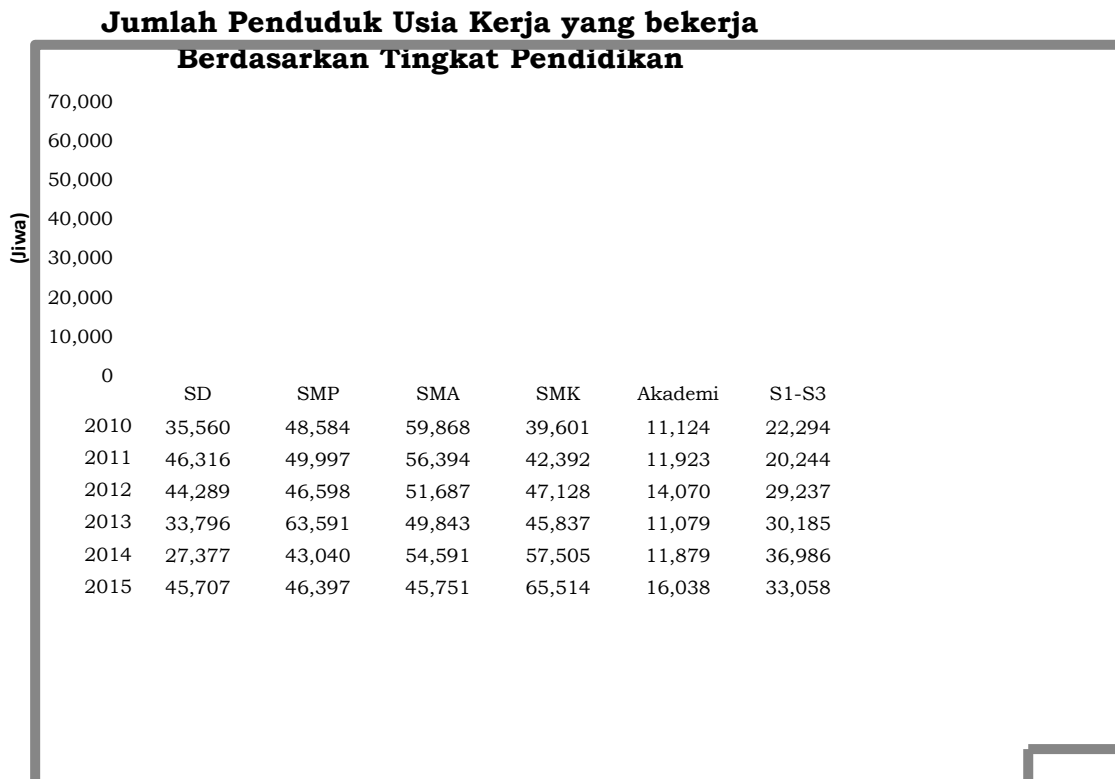
Sebagai kota besar, Surakarta tentu tidak lepas dari permasalahan sosial yang harus dihadapi. Salah satu permasalahan yang harus diminimalisir adalah angka kejahatan. Kejadian kriminalitas yang terjadi selama tahun 2010-2015 mengalami peningkatan. Angka kriminalitas pada tahun 2010 adalah 186 kasus, terus meningkat sampai dengan 332 kasus pada tahun 2015.

b. Perizinan

Pelayanan perizinan dilayani oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Jenis izin yang dilayani, yaitu pendaftaran penanaman modal, izin prinsip penanaman modal, izin usaha penanaman modal, tanda daftar perusahaan, dan surat izin usaha perdagangan.

4. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia yang termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) yang bekerja di Kota Surakarta pada tahun 2014 paling banyak adalah lulusan SMK. Kelompok usia yang trennya menurun adalah penduduk dengan pendidikan SD dan SMP. Adapun yang trennya meningkat, yaitu penduduk lulusan SMA, SMK, Akdemi, dan lulusan S1-S3. Sumber Daya Manusia di Kota Surakarta cukup baik dengan tingginya usia produktif yang siap untuk bekerja.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2016

Gambar 2.23
Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Berdasarkan Tingkatan Pendidikan di Kota Surakarta Tahun 2010-2014

Sumber Daya Manusia di Kota Surakarta cukup baik dengan tingginya usia produktif yang siap untuk bekerja. Berdasarkan data dari Dinsosnakertrans Kota Surakarta, jumlah penduduk usia 15-64 pada tahun 2015 adalah 394.425 jiwa, yang jika dibandingkan dengan penduduk usia non produktif nya sebanyak 163.181 jiwa maka dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan penduduk di Kota Surakarta adalah sebesar 41,37.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Gambaran pengelolaan keuangan daerah mencakup gambaran kinerja dan pengelolaan keuangan daerah tahun-tahun sebelumnya (2010-2015), serta kerangka pendanaan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah memberikan gambaran mengenai kemampuan anggaran daerah untuk membiayai belanja daerah. Kemampuan belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung akan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran pada masing-masing program yang akan dilaksanakan pada 5 (lima) tahun mendatang (tahun 2016-2021).

A. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki unsur Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Kinerja keuangan daerah dapat diketahui dari kinerja Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah tersebut. Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan Belanja daerah meliputi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL), sedangkan Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

1. Kinerja Pelaksanaan APBD

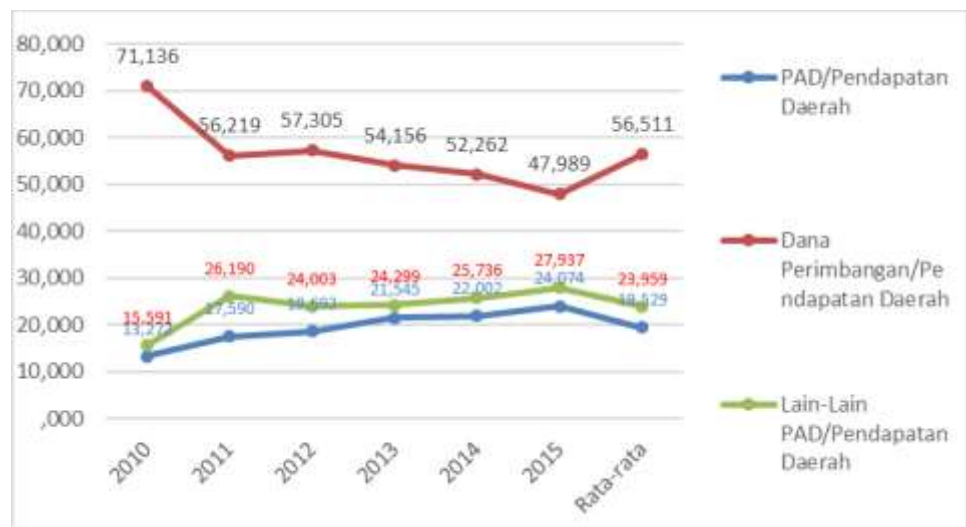
a. Pendapatan Daerah

Analisis pendapatan daerah memberikan gambaran kondisi pendapatan daerah yang tercermin dalam APBD. Pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD mencakup: 1) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK); serta 3) Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

Kinerja pendapatan daerah diukur dengan indikator derajat kemandirian keuangan daerah (desentralisasi fiskal). Indikator ini dihitung dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini akan diketahui seberapa besar *local taxing power* suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Derajat desentralisasi fiskal Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2010-2015 tergolong masih

rendah, terlihat dari rata-rata proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya sekitar 19,53%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kota Surakarta terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah cukup tinggi.

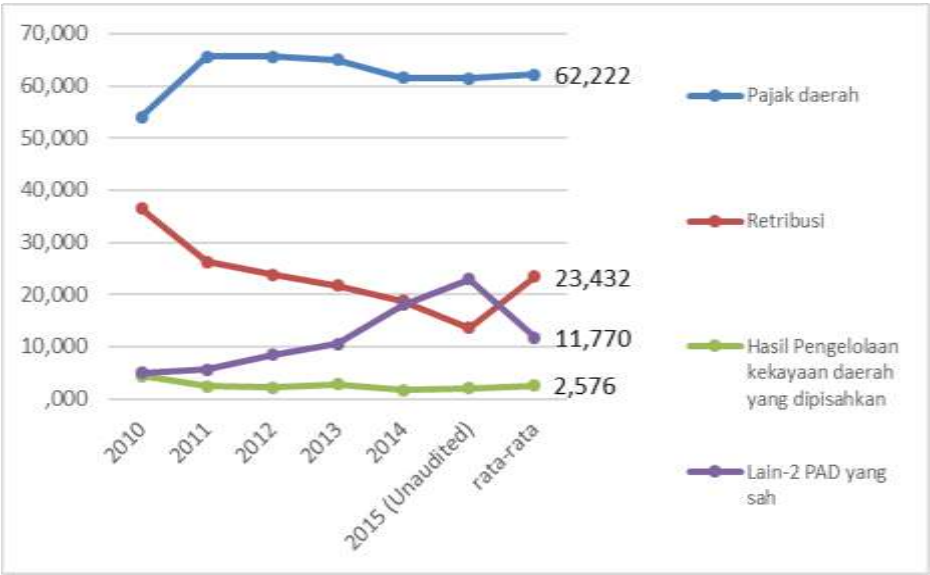
Berikut ini disajikan proporsi PAD Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah tahun 2010-2015.



Gambar 3.1
Proporsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah (%)

Berdasarkan Gambar 3.1 diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2010-2015 proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) menunjukkan peningkatan, begitu pula dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan proporsi Dana Perimbangan menunjukkan penurunan. Rata-rata rasio Dana Perimbangan selama kurun waktu 2010-2015 memberi kontribusi pada Total Pendapatan Daerah sebesar 56,51%, sedangkan rata-rata rasio PAD terhadap TPD sebesar 19,53%, dan rata-rata rasio Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap TPD memberikan kontribusi sebesar 23,96%.

Pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah menjadi sumber yang dominan dengan rata-rata kontribusi sebesar 62,22%.Selanjutnya,selama kurun waktu 2010-2015 Retribusi Daerah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 23,43%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 2,58%,dan rata-rata kontribusi Lain-lain PAD yang Sah sebesar 11,77%. Perbandingan proporsi unsur-unsur PAD dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2
Proporsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Total PAD(%)

Sementara itu, rata-rata pertumbuhan realisasi dari pos-pos Pendapatan Daerah di Kota Surakarta Tahun 2010-2015, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah beserta pos-pos yang menyertainya; dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
A	Pendapatan Daerah	858.513.967.371,85	1.029.523.688.529,00	1.239.451.422.517,00	1.385.005.106.508,00	1.525.575.850.952,00	1.568.482.686.616,77	13,00
1	Pendapatan Asli Daerah	113.946.007.541,85	181.096.816.152,00	231.672.100.429,00	298.400.846.632,00	335.660.206.640,00	372.798.426.790,77	27,84
a	Pajak daerah	61.641.623.410,00	118.816.234.506,00	151.905.454.913,00	193.906.210.948,00	206.750.725.212,00	233.085.404.386,00	33,52
b	Retribusi	41.588.097.172,00	47.671.386.160,00	55.056.791.081,00	64.767.799.578,00	62.973.172.755,00	51.234.923.568,00	5,27
c	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.984.197.541,00	4.464.830.924,00	5.118.469.295,00	8.244.980.845,00	5.507.540.256,00	7.584.189.359,00	13,96
d	Lain-2 PAD yang sah	5.732.089.418,85	10.144.364.562,00	19.591.385.140,00	31.481.855.261,00	60.428.768.417,00	80.893.909.477,77	71,32
								-
2	Dana Perimbangan	610.715.857.616,00	578.791.806.336,00	710.269.783.706,00	750.066.765.441,00	797.295.017.689,00	755.728.419.465,00	4,83
a	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	82.149.324.216,00	70.007.968.336,00	86.074.776.706,00	57.526.347.441,00	42.642.973.689,00	38.677.463.465,00	(12,03)
b	Dana Alokasi Umum (DAU)	499.448.133.400,00	473.888.738.000,00	595.222.827.000,00	659.647.382.000,00	710.803.934.000,00	713.300.856.000,00	7,88
c	Dana Alokasi Khusus (DAK)	29.118.400.000,00	34.895.100.000,00	28.972.180.000,00	32.893.036.000,00	43.848.110.000,00	3.750.100.000,00	(8,35)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	133.852.102.214,00	269.635.066.041,00	297.509.538.382,00	336.537.494.435,00	392.620.626.623,00	439.955.840.361,00	30,72
a	Pendapatan Hibah	2.000.000.000,00	4.697.159.200,00	1.331.870.800,00	2.126.000.000,00	19.439.000.000,00	-	167,44
b	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	47.953.758.943,00	94.213.357.401,00	96.254.550.582,00	95.630.535.435,00	116.062.798.623,00	129.786.943.361,00	26,24
c	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	60.150.000.112,00	124.680.549.440,00	175.527.411.000,00	218.373.319.000,00	232.478.998.000,00	275.572.129.000,00	39,49
d	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah	23.748.343.159,00	46.044.000.000,00	24.395.706.000,00	20.407.640.000,00	24.639.830.000,00	34.571.268.000,00	18,31

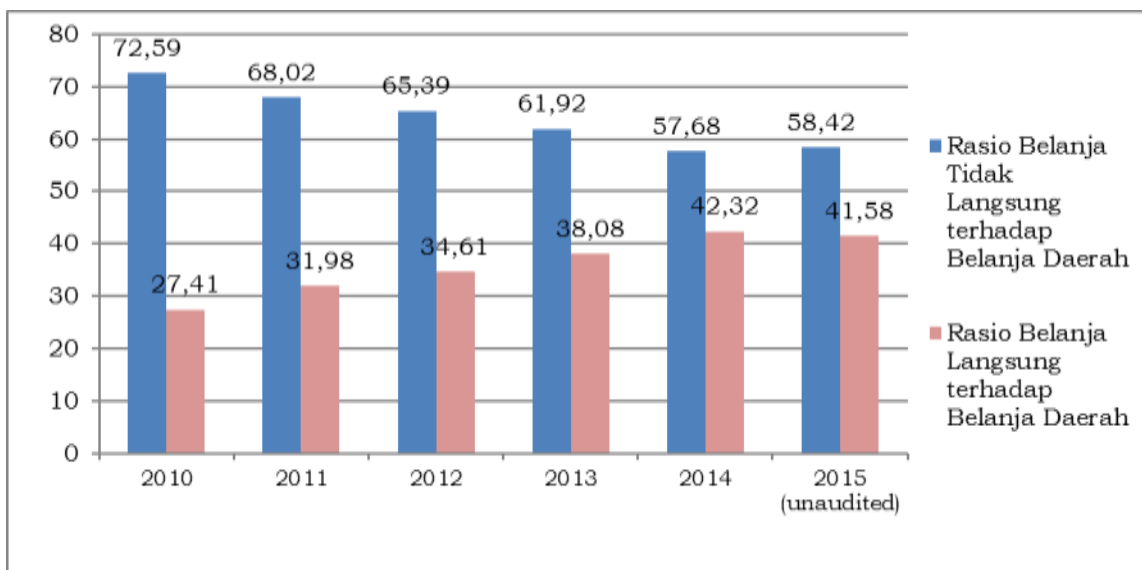
No	Uraian	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Daerah Lainnya							
e	Pendapatan lainnya	-	-	-	-	-	25.500.000,00	-

Sumber: DPPKA Kota Surakarta, 2016

Dari sinkronisasi Tabel 3.1, Gambar 3.1, dan Gambar 3.2, dapat dilihat struktur Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan rata-rata kontribusi/rasio sebesar 19,53% dan rata-rata pertumbuhan sebesar 28,22%. Trend rasio PAD yang terus meningkat mengindikasikan peningkatan desentralisasi fiskal, yang didominasi dari kontribusi Pajak Daerah dengan rata-rata sebesar 62,22% dan Retribusi Daerah sebesar 23,43%. Sedangkan dari sisi pertumbuhan, Lain-Lain PAD yang Sah menunjukkan peningkatan sebesar 73,38% dan pajak daerah sebesar 33,52%. Rasio pajak dan pertumbuhan pajak yang berkontribusi terhadap rasio dan pertumbuhan PAD terhadap pendapatan daerah yang terus meningkat salah satunya disebabkan oleh adanya kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah melalui pelimpahan kewenangan pengelolaan pajak BPHTB ke pemerintah daerah (kab/kota) tahun 2011 dan pelimpahan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaaan Perkotaan (PBBP2) ke pemerintah Daerah (kab/kota) tahun 2013, yang sebelumnya kedua objek pajak tersebut di kelola oleh Pemerintah Pusat melalui skema bagi hasil pajak kepada pemerintah daerah (kab/kota). Dengan adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan 2 objek pajak tersebut, menyebabkan rasio pajak dan pertumbuhan pajak daerah serta rata-rata pertumbuhan pajak daerah terhadap PAD meningkat. Dari sisi pertumbuhan Lain-Lain PAD yang sah yang meningkat sebesar 73,38% disebabkan oleh masuknya dana kapitasi JKN ke dalam pendapatan Puskesmas yang kemudian menjadi BLUD pada tahun 2015, serta pendapatan dari RSUD Kota Surakarta.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri atas Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Adapun Belanja Tidak Langsung meliputi jenis belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Struktur Belanja Daerah di Kota Surakarta masih didominasi oleh Belanja Tidak Langsung. Proporsi Belanja Tidak Langsung dari tahun 2010-2015 antara 72,59%-58,42%.



Gambar 3.3
Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2010-2015

Total Belanja Daerah Kota Surakarta dari tahun 2010-2015 mengalami peningkatan. Total Belanja tahun 2010 sebesar Rp825.858.500.472,00 meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp1.538.839.195.382,00. Proporsi Belanja Tidak Langsung cenderung mengalami penurunan dari sebesar 72,59% pada tahun 2010 menjadi 58,42% pada tahun 2015, sedangkan Belanja Langsung meningkat dari sebesar 27,41% pada tahun 2010 menjadi sebesar 41,58% pada tahun 2015. Proporsi belanja langsung yang hanya berkisar antara 27,41% hingga 41,58% memberikan gambaran bahwa alokasi anggaran untuk program pembangunan relatif terbatas, sebab lebih rendah dari alokasi belanja tidak langsung.

Tabel 3.2
Realisasi Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Belanja Daerah						
A	Belanja Tidak Langsung						
1	Belanja pegawai	520.436.276.028	582.126.262.859	663.857.081.094	732.801.975.077	769.847.763.306	839.220.621.613
2	Belanja bunga	2.326.912.038	1.864.595.060	2.630.068.948	3.011.103.582	707.163.870	543.941.049
3	Belanja subsidi	-	-	-	-	-	-
4	Belanja hibah	59.424.399.322	77.688.165.120	81.484.900.250	114.277.841.058	82.186.330.510	53.938.041.723
5	Belanja bantuan sosial	5.816.101.335	5.891.910.500	91.500.000	197.933.087	57.000.000	4.310.500.000
6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa /kota, pemerintahan desa dan partai politik	-	-	-	-	-	-
7	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ desa/partai politik	10.688.764.927	690.516.840	690.515.376	690.515.376	696.837.653	677.113.524
8	Belanja tidak terduga	823.475.000	244.195.000	139.773.250	644.528.220	33.409.391	275.878.668
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	599.515.928.650	668.505.644.379	748.893.838.918	851.623.896.400	853.528.504.730	898.966.096.577
B	Belanja langsung						
1	Belanja pegawai	27.225.361.619	34.426.626.374	34.529.693.915	48.547.410.395	62.962.792.286	34.057.188.790
2	Belanja barang dan jasa	119.354.711.920	151.270.535.022	175.597.070.413	230.158.026.782	276.844.848.456,63	369.986.319.313
3	Belanja modal	79.762.498.284	128.443.148.963	186.150.293.855	244.975.523.723	286.491.756.994	235.829.590.702

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Jumlah Belanja Langsung	226.342.571.823	314.140.310.359	396.277.058.183	523.680.960.900	626.299.397.736,63	639.873.098.805
	Total Jumlah Belanja	825.858.500.472	982.645.954.738	1.145.170.897.101	1.375.304.857.300	1.479.827.902.466,63	1.538.839.195.382

Sumber: DPPKA Kota Surakarta, 2016.

Alokasi anggaran pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan menunjukkan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Perkembangan alokasi anggaran pada setiap urusan pemerintahan Kota Surakarta Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Alokasi Belanja Langsung Per Urusan/Bidang Tahun 2010-2015

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Realisasi Belanja 2010	Realisasi Belanja 2011	Realisasi Belanja 2012	Realisasi Belanja 2013	Realisasi Belanja 2014	Realisasi Belanja 2015
	Urusan Wajib	176.230.071.690,00	302.694.576.141,00	370.087.513.453,00	452.781.016.793,00	614.933.130.956,63	599.558.711.229,00
101	Urusan WAJIB Bidang Pendidikan	18.189.914.533,00	65.822.710.820,00	50.194.341.650,00	48.383.623.826,00	71.737.567.525,00	74.320.964.210,00
102	Urusan WAJIB Bidang Kesehatan	32.780.678.501,00	44.092.238.611,00	64.719.897.103,00	43.184.580.000,00	78.322.223.516,00	79.838.882.606,00
103	Urusan WAJIB Bidang Pekerjaan Umum	16.770.523.534,00	50.524.616.907,00	26.081.227.728,00	74.107.238.253,00	57.721.013.157,00	82.729.635.135,00
104	Urusan WAJIB Bidang Perumahan	1.686.464.275,00	7.244.921.650,00	10.494.798.100,00	28.387.546.675,00	15.181.012.520,00	11.241.451.329,00
105	Urusan WAJIB Bidang Penataan Ruang	3.025.075.982,00	1.640.795.475,00	2.955.125.508,00	5.400.279.953,00	5.642.187.388,00	11.060.268.972,00
106	Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan	2.524.722.380,00	3.448.687.176,00	17.759.812.460,00	12.166.441.438,00	14.788.344.155,63	15.661.814.952,00
107	Urusan WAJIB Bidang Perhubungan	23.672.847.398,00	11.832.805.987,00	21.203.793.813,00	39.102.668.799,00	42.579.391.090,00	33.119.682.010,00
108	Urusan WAJIB Bidang	12.205.012.968,00	33.676.952.684,00	47.478.936.961,00	58.293.460.615,00	61.396.578.061,00	94.127.235.329,00

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Realisasi Belanja 2010	Realisasi Belanja 2011	Realisasi Belanja 2012	Realisasi Belanja 2013	Realisasi Belanja 2014	Realisasi Belanja 2015
	Lingkungan Hidup						
109	Urusan WAJIB Bidang Pertanahan	0	74.068.160,00	89.179.250,00	196.528.810,00	236,012,700,00	1.556.247.496,00
110	Urusan WAJIB Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	1.899.478.504,00	2.468.976.971,00	2.423.817.857,00	3.030.973.256,00	4.940.039.744,00	4.637.612.160,00
111	Urusan WAJIB Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	99.525.000,00	3.239.867.319,00	7.369.071.687,00	7.481.720.332,00
112	Urusan WAJIB Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	970.098.900,00	1.371.934.950,00	545.747.250,00	1.349.441.375,00	2.177.390.145,00	1.528.784.831,00
113	Urusan WAJIB Bidang Sosial	2.658.645.223,00	2.726.949.722,00	3.599.955.605,00	5.659.422.268,00	7.545.751.090,00	2.676.279.933,00
114	Urusan WAJIB Bidang Ketanagakerjaan	2.557.329.753,00	3.275.469.151,00	4.487.406.885,00	6.046.522.174,00	8.281.155.960,00	2.822,241.162,00
115	Urusan WAJIB Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.073.306.951,00	1.728.562.648,00	3.334.226.418,00	3.922.682.114,00	3.412.955.784,00	3.679.397.800,00
116	Urusan WAJIB Bidang Penanaman Modal Daerah	287.306.090,00	798.519.564,00	1.723.554.134,00	2.526.233.575,00	2.009.324.662,00	1.724.567.241,00
117	Urusan WAJIB Bidang Kebudayaan	328.084.845,00	1.554.001.300,00	3.779.383.794,00	4.059.237.552,00	6.001.000.148,00	8.768.818.595,00
118	Urusan WAJIB Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	444.089.150,00	1.109.532.250,00	2.175.461.486,00	3.529.540.557,00	5.695.055.374,00	5.329.028.450,00
119	Urusan WAJIB Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1.594.448.020,00	1.409.821.725,00	2.899.514.680,00	4.697.052.943,00	6.108.852.571,00	24.407.349.846,00
120	Urusan WAJIB Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	81.779.327.350,00	62.101.008.899,00	88.110.160.384,00	119.726.130.132,00	170.755.211.869,00	116.781.726.580,00
121	Urusan WAJIB Bidang Ketahanan Pangan	202.504.590,00	596.781.356,00	743.281.220,00	3.001.334.710,00	10.218.371.417,00	9.941.318.510,00
122	Urusan WAJIB Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.356.412.957,00	2.699.907.328,00	9.705.079.839,00	31.076.500.991,00	19.618.773.524,00	4.746.395.391,00

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Realisasi Belanja 2010	Realisasi Belanja 2011	Realisasi Belanja 2012	Realisasi Belanja 2013	Realisasi Belanja 2014	Realisasi Belanja 2015
123	Urusan WAJIB Bidang Statistik	16.506.000,00	49.351.250,00	158.692.600,00	220.936.750,00	221.222.400,00	200.306.700,00
124	Urusan WAJIB Bidang Kearsipan	29.800.000,00	183.994.200,00	320.191.450,00	360.345.835,00	366.688.750,00	700.740.416,00
125	Urusan WAJIB Bidang Komunikasi dan Informatika	1.311.637.650,00	1.688.285.270,00	4.092.692.325,00	5.623.208.016,00	5.924.565.573,00	7.207.989,916,00
126	Urusan WAJIB Bidang Perpustakaan	646.534.637,00	573.682.087,00	911.709.953,00	3.782.679.472,00	6.919.382.846,00	3.298.482.405,00
	Urusan Pilihan	26.342.327.181,65	28.579.188.997,00	53.827.027.440,00	68.486.332.160,00	65.977.250.295,00	25.111.475.847,00
201	Urusan PILIHAN Bidang Pertanian	2.665.557.609,00	3.906.348.677,00	3.958.793.795,00	6.298.458.967,00	8.152.959.771,00	2.427.693.321,00
203	Urusan PILIHAN Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	-	49.960.000,00	57.275.000,00	56.418.036,00	70.545.760,00	0
204	Urusan PILIHAN Bidang Pariwisata	4.977.069.989,00	5.788.998.074,00	5.861.842.386,00	7.338.080.888,00	8.444.318.393,00	5.538.875.727,00
205	Urusan PILIHAN Bidang Kelautan dan Perikanan	1.366.381.750,00	1.793.764.300,00	1.443.022.500,00	2.038.930.650,00	2.451.632.950,00	102.476.800,00
206	Urusan PILIHAN Bidang Perdagangan	15.822.882.426,65	16.065.140.949,00	41.724.535.409,00	51.596.018.794,00	45.250.746.303,00	15.558.227.509,00
207	Urusan PILIHAN Bidang Industri	1.510.435.407,00	974.976.997,00	781.558.350,00	1.115.530.825,00	1.394.432.118,00	1.291.770.490,00
208	Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi	0	0	0	42.894.000,00	212.615.000,00	192.432.000,00
	TOTAL	202.572.398.871,65	331.273.765.138,00	423.914.540.893,00	521.267.348.953,00	680.910.381.251,63	624.670.187.076,00

Sumber : DPPKA Kota Surakarta, 2016 (data diolah)

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah mencakup: (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; (2) Pencairan Dana Cadangan; (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (4) Penerimaan Pinjaman Daerah; (5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman/Kredit Bergulir (6) Penerimaan Piutang Daerah; dan Penerimaan dari Pihak Ketiga. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Surakarta dari tahun 2010-2015 fluktuatif, yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp21.076.048.635,00 meningkat menjadi Rp206.628.228.259,00 pada tahun 2013 dan turun menjadi Rp191.011.406.720 pada tahun 2015. Kontribusi terbesar dari Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah mencakup: (1) Pembentukan Dana Cadangan; (2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; (3) Pembayaran Pokok Utang; (4) Pemberian Pinjaman Daerah/Kredit Bergulir dan (5) Pengembalian Kepada Pihak Ketiga. Pengeluaran Pembiayaan Daerah cenderung meningkat pada tahun 2010 sebesar Rp.9.771.777.066,00 menjadi Rp.52.801.852.734,00 pada tahun 2013 dan turun menjadi Rp.4.779.546.668,00 pada tahun 2015. Kontribusi terbesar dari Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD dan pembayaran pokok utang.

Kinerja pembiayaan daerah Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Perincian Pembiayaan Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah						
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	19.956.619.185	43.959.738.469	95.706.261.245	202.754.302.668	163.507.637.834,00	187.509.120.270,19
b.	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0	7.799.999.000	30.748.989.309	0	-	-
c.	Penerimaan Piutang Daerah	293.869.300	284.427.750	272.810.700	-	385.002.868	337.523.000
d.	Penerimaan dari Pihak Ketiga	825.560.150	1.640.434.953	2.289.113.500	2.449.250.940	2.554.219.300	3.164.763.450
e.	Penerimaan/ Penarikan Deposito/ Dana Bergulir	-	-	-	516.016.481	-	-
f.	Penerimaan Pinjaman BLUD	-	3.000.000.000	-	908.658.170	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	21.076.048.635	56.684.600.172	129.017.174.754	206.628.228.259	166.446.860.002	191.011.406.720
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah						
a.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000	3.000.000.000	1.500.000.000	15.982.000.000	19.439.000.000	1.833.000.000
b.	Pembayaran Pokok Utang	6.950.332.903	2.996.753.020	17.117.065.270	33.681.693.943	3.331.701.018	888.943.868
c.	Pemberian Pinjaman Daerah	401.500.000	643.000.000	650.000.000	1.248.485.510	0	0
d.	Pengembalian Kepada Pihak Ketiga	419.944.163	1.216.319.698	1.725.472.550	1.889.673.281	1.914.987.200	2.057.602.800
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	9.771.777.066	7.856.072.718	20.992.537.820	52.801.852.734	24.685.688.218	4.779.546.668
	Jumlah Pembiayaan Netto	11.304.271.569	48.828.527.454	108.024.636.934	153.826.375.525	141.761.171.784	186.231.860.052
	Surplus/Defisit	32.655.466.900	46.877.733.791	94.280.525.416	9.700.249.208	45.747.948.486,19	35.955.788.413,07
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	43.959.738.469	95.706.261.245	202.305.162.350	163.526.624.733	187.509.120.270	222.187.648.465

Sumber : DPPKA Kota Surakarta, 2016 (data diolah)

b. Neraca Daerah

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Laporan Neraca Daerah menjadi salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah yang mempunyai fungsi sebagai alat manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Secara rinci perkembangan Neraca Daerah Kota Surakarta terdapat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Neraca Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan
1.1.	ASET LANCAR	55.929.735.050,26	109.910.277.350,26	224.789.472.895,11	247.114.240.097,16	250.715.973.891,91	304.825.870.981,98	46,80
1.1.1.	Kas	43.971.159.594,00	95.724.739.670,00	202.396.167.658,00	163.561.090.778,00	187.677.848.292,19	231.308.059.217,77	49,59
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-	0,00
1.1.3.	Piutang	932.528.481,00	2.190.294.336,00	3.183.271.374,00	63.503.914.797,29	45.159.898.708,00	-	389,25
1.1.4.	Piutang Pendapatan	-	-	-	-	-	85.696.861.980,00	0,00
1.1.5.	Piutang Lain-lain	5.205.803.871,00	4.978.882.428,00	4.935.288.964,00	7.199.773.702,00	5.130.440.652,41	4.593.827.799,00	0,29
1.1.6.	Penyisihan Piutang	-	-	-	-	-	(29.456.838.364,45)	0,00
1.1.7.	Beban Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-	215.743.917,00	0,00
1.1.8.	Persediaan	5.820.243.104,26	7.016.360.916,26	14.274.744.899,11	12.849.460.819,87	12.747.786.239,31	12.468.216.432,66	22,21
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	48.346.171.700,79	61.483.361.806,64	78.533.740.913,78	85.510.880.911,55	356.192.186.933,00	317.250.865.081,31	73,88
1.2.1.	Investasi Non Permanen	6.690.434.032,00	4.016.941.524,00	4.438.814.648,00	4.917.798.203,00	4.532.795.335,00	497.308.270,90	-23,10
1.2.2.	Investasi Permanen	41.655.737.668,79	57.466.420.282,64	74.094.926.265,78	80.593.082.708,55	351.659.391.598,00	316.753.556.810,41	80,42
1.3.	ASET TETAP	5.860.677.308.784,01	6.011.458.028.103,04	6.170.072.762.312,74	6.322.888.177.911,43	5.717.106.099.996,38	5.923.948.007.033,54	0,35
1.3.1.	Tanah	4.518.446.681.740,00	4.538.871.681.740,00	4.538.653.395.740,00	4.411.636.767.740,00	4.393.128.833.073,00	4.426.435.115.473,00	-0,40

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	196.787.401.263,00	231.642.107.155,65	274.667.756.709,35	352.092.057.844,04	421.555.935.469,09	475.945.853.111,98	19,42
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	718.959.374.146,00	750.097.104.128,05	845.191.957.638,05	954.310.111.034,05	1.157.035.520.136,05	1.350.770.574.815,05	13,58
1.3.4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	395.167.262.350,07	441.647.443.896,40	465.166.680.890,40	536.054.249.970,40	586.156.290.685,40	635.260.451.631,67	10,01
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	15.167.767.614,94	24.958.521.792,94	25.376.310.164,94	28.236.506.493,94	34.355.266.426,94	39.197.197.143,94	22,65
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	16.148.821.670,00	24.241.169.390,00	21.016.661.170,00	40.558.484.829,00	37.326.508.750,00	21.470.181.826,00	15,87
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	(912.452.254.544,10)	(1.025.131.366.968,10)	0,00
1.4.	DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	0,00
1.5.	ASET LAINNYA	413.481.216.435,00	416.279.563.635,00	433.139.677.940,65	439.930.906.611,53	414.001.803.415,88	347.001.380.148,00	-3,16
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	76.242.116.000,00	78.892.658.100,00	78.918.827.102,00	78.297.017.102,00	77.675.207.102,00	6.785.777.102,00	-17,87
1.5.4.	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	106.812.940,00	174.330.940,00	450.725.440,00	44,35
1.5.5.	Aset Lain-lain	337.239.100.435,00	337.386.905.535,00	354.220.850.838,65	361.527.076.569,53	336.152.265.373,88	339.764.877.606,00	0,23
	JUMLAH ASET	6.378.434.431.970,06	6.599.131.230.894,94	6.906.535.654.062,28	7.095.444.205.531,67	6.738.016.064.237,17	6.893.026.123.244,83	1,62
2	KEWAJIBAN							
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	23.035.479.749,64	28.106.679.088,53	34.866.354.049,04	23.449.974.943,17	21.316.606.832,99	45.657.451.628,24	23,68
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	4.755.236,00	23.953.683,00	0,00	5.787.837.351,00	80,75
2.1.2.	Utang Bunga	1.256.480.058,21	1.072.159.772,05	3.454.595.415,77	707.164.871,42	543.941.048,08	441.570.519,32	17,22
2.1.3.	Utang Pajak	-	-	-	-	-	-	0,00
2.1.4.	Bagian Lancar Utang Jangka	1.557.537.017,43	1.562.207.883,48	14.407.199.787,27	1.557.537.013,75	888.943.866,67	888.943.866,67	138,08

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan
	Panjang							
2.1.5.	Kewajiban kepada pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	0,00
2.1.6.	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	4.339.834,00	-	2.923.068.587,00	0,00
2.1.7.	Utang Jangka Pendek Lainnya	20.221.462.674,00	25.472.311.433,00	16.999.803.610,00	21.156.979.541,00	19.883.721.918,24	23.288.050.039,00	2,23
2.1.8.	Utang Beban						12.327.981.265,25	0,00
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	13.946.600.229,12	19.119.814.905,60	29.847.107.165,57	6.599.531.609,45	5.166.646.695,37	2.947.188.443,84	-9,87
2.2.1.	Utang Dalam Negeri	11.522.490.399,73	17.583.828.930,84	29.118.939.579,22	6.599.531.609,45	5.166.646.695,37	2.947.188.443,84	-4,76
2.2.2.	Utang Luar Negeri	2.424.109.829,39	1.535.985.974,76	728.167.586,35	-	-	-	-37,85
	JUMLAH KEWAJIBAN	36.982.079.978,76	47.226.493.994,13	64.713.461.214,61	30.049.506.552,62	26.483.253.528,36	48.604.640.072,08	-9,87
3	EKUITAS DANA	6.341.452.351.991,30	6.551.904.736.900,81	6.841.822.192.883,67	7.065.394.698.979,05	7.626.979.774.385,91	6.844.421.483.172,75	1,74
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	6.378.434.431.970,06	6.599.131.230.894,94	6.906.535.654.098,28	7.095.444.205.531,67	7.653.463.027.914,27	6.893.026.123.244,83	1,76

Sumber : DPPKA Kota Surakarta, 2016 (data diolah)

Kondisi Neraca Daerah Kota Surakarta dapat diketahui menggunakan beberapa perhitungan rasio berikut ini.

a. Rasio Lancar

Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya.

$$\begin{array}{l} \text{Rasio Lancar} \\ \text{(Current Ratio)} \end{array} = \frac{\text{Kas}}{\text{Hutang Jangka Pendek}}$$

b. Rasio Cair

Rasio Cair (*Quick Ratio*) dihitung dengan mengurangi persediaan dari aset lancar, dan hasilnya dibagi dengan hutang jangka pendek. Biasanya aset lancar terdiri atas kas di kas daerah, kas di pemegang kas bagian lancar tagihan penjualan/penerimaan, bagian lancar pinjaman, bagian lancar TPTGR, piutang pajak, piutang lain-lain dan persediaan. Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan.

$$\begin{array}{l} \text{Rasio Cair} \\ \text{(Quick Ratio)} \end{array} = \frac{(\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan})}{\text{Hutang Jangka Pendek}}$$

c. Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt Ratio*)

Rasio hutang terhadap aset adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan aset yang dimilikinya. Rasio hutang terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan total aset. Kewajiban tersebut terdiri dari Hutang pada pihak ketiga, Hutang Luar Negeri, Hutang pada Pemerintah Pusat dan Hutang Bunga. Analisis ini bertujuan mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan.

$$\begin{array}{l} \text{Rasio Hutang Terhadap} \\ \text{Aset (Debt Ratio)} \end{array} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$$

d. Rasio Ekuitas Dana terhadap Total Aset

Rasio ekuitas dana terhadap Total Aset dihitung dengan membandingkan total ekuitas dana dengan Total Aset yang dikuasai Pemerintah. Ekuitas dana tersebut terdiri atas Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dan Ekuitas Dana Cadangan. Rasio ini merupakan kebalikan dari rasio hutang terhadap Total Aset, sehingga yang diukur adalah jumlah dana yang disediakan dalam membiayai pembangunan.

$$\begin{array}{l} \text{Rasio Ekuitas Dana} \\ \text{Terhadap Total Aset} \end{array} = \frac{\text{Total Ekuitas Dana}}{\text{Total Aset}}$$

e. **Rasio Perputaran Persediaan (*Inventory Turnover*)**

Inventory turn over menunjukkan dana yang tertanah dalam inventory berputar dalam suatu periode tertentu, atau likuiditas dari inventory dan tendensi untuk adanya overstock.

Rasio perputaran persediaan mengukur efisiensi pengelolaan persediaan barang dagang untuk menilai efisiensi operasional. Rasio perputaran persediaan didasarkan pada *at cost* digunakan untuk mengukur perputaran fisik persediaan.

Semakin tinggi rasio perputaran persediaan semakin baik dan menunjukkan pengelolaan persediaan yang efisien.

Rumus menghitung umur persediaan :

a.
$$\text{Rata-rata persediaan} = \frac{(\text{persediaan awal} + \text{persediaan akhir})}{2}$$

b.
$$\text{Perputaran persediaan} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Rata-rata Persediaan}}$$

c.
$$\text{Rata-rata Umur Persediaan} = \frac{365 \text{ hari}}{\text{Perputaran Persediaan}}$$

f. **Rasio Umur Piutang**

Rasio ini mengukur efisiensi pengolahan piutang persediaan serta menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melunasi piutang atau pengubah piutang menjadi kas. Rata-rata umur piutang ini dihitung dengan membandingkan jumlah piutang dengan penjualan perhari.

Semakin tinggi rasio perputaran piutang semakin baik dan menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang rendah.

$$\text{Perputaran Piutang} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Piutang}}$$

$$\text{Rumus rata-rata umur piutang} = \frac{365 \text{ hari}}{\text{Perputaran Piutang}}$$

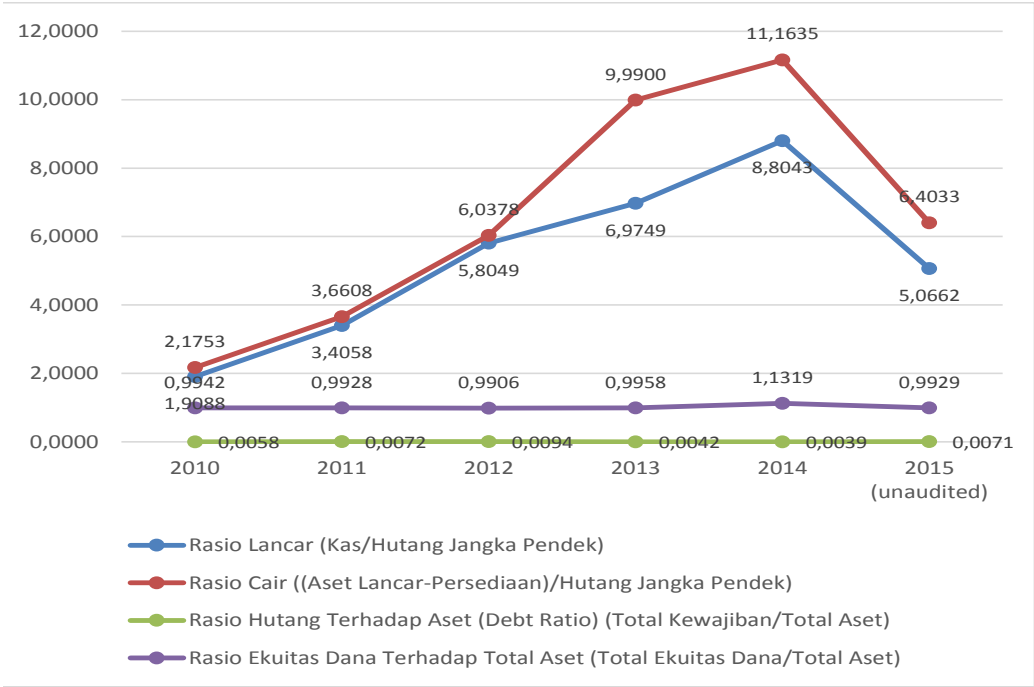
Hasil penghitungan Neraca Daerah Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.6

Tabel 3.6
Penghitungan Neraca Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No.	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
A	Rasio Likuiditas						
1.	Rasio Lancar (Kas/Hutang Jangka Pendek)	1,9088	3,4058	5,8049	6,9749	8,8043	5,0662
2.	Rasio Cair ((Aset Lancar-Persediaan)/Hutang Jangka Pendek)	2,1753	3,6608	6,0378	9,9900	11,1635	6,4033
B	Rasio Solvabilitas						
1.	Rasio Hutang Terhadap Aset (<i>Debt Ratio</i>) (Total Kewajiban/Total Aset)	0,0058	0,0072	0,0094	0,0042	0,0039	0,0071
2.	Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset	0,9942	0,9928	0,9906	0,9958	1,1319	0,9929

No.	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
	(Total Ekuitas Dana/Total Aset)						
C	Rasio Aktivitas :						
1.	Rata-rata Umur Piutang	119,94	23,44	23,48	107,78	109,97	124,14
2.	Rata-rata Umur Persediaan	357,18	398,01	553,36	338,62	364,79	332,69

Sumber : DPPKA Kota Surakarta, 2016 (data diolah)



Gambar 3.4
Perkembangan Rasio Likuiditas dan Solvabilitas
Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2010-2015



Gambar 3.5
Perkembangan Rasio Aktivitas Pemerintah Kota Surakarta
Tahun 2010 – 2015

Dari Tabel 3.6 di atas secara ringkas dapat dilakukan analisis atas kondisi keuangan Pemerintah Kota Surakarta sebagai berikut:

- a. Rasio Lancar (*Current Ratio*) selalu meningkat dari tahun 2010 sebesar 1,9088 menjadi 5,0662 pada tahun 2015. Hal ini mengindasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Surakarta dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya cukup baik, karena Pemerintah Kota Surakarta menerapkan kebijakan pinjaman daerah dilakukan dengan sangat hati-hati.
- b. Rasio Cair (*Quick Ratio*) selama lima tahun mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2010 sebesar 2,1753 menjadi sebesar 6,4033 pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Surakarta dalam menggunakan aktiva lancar untuk menutupi utang lancarnya dalam kondisi baik karena berada diatas angka 1. Idealnya, rasio lancar berada pada angka 1:1 atau minimal 0,8:1 karena apabila kurang dari itu, pemerintah daerah dianggap memiliki masalah keuangan.
- c. Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt Ratio*) Pemerintah Kota Surakarta cenderung rendah sejak tahun 2010 hingga tahun 2015, yaitu sebesar 0,0058 pada tahun 2010 dan naik menjadi 0,0071 pada tahun 2015, meskipun pernah mengalami penurunan pada tahun 2013 dan tahun 2014. Hal ini menunjukan bahwa solvabilitas keuangan Pemerintah Kota Surakarta dalam keadaan yang sehat, yaitu persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan adalah rendah.
- d. Rasio Ekuitas Dana terhadap Total Aset (*Total Debt Equity Ratio*) Pemerintah Kota Surakarta selama 5 tahun terakhir cenderung diatas 90%, yaitu sebesar 0,9942 pada tahun 2010 dan 0,9929 pada tahun 2015. Hal tersebut berarti bahwa jumlah dana yang disediakan dalam membiayai pembangunan sebagian besar bersumber dari kemampuan keuangan sendiri, bukan berasal dari pinjaman kreditor/donatur/pihak ketiga.
- e. Rata-rata umur piutang adalah rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Analisa rata-rata umur piutang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 cenderung mengalami fluktuatif dan mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Surakarta untuk mengubah piutang menjadi kas masih diatas berkiasr antara 119,94 pada tahun 2010 dan mengalami kenaikan menjadi 124,14 hari pada tahun 2015.
- f. Rasio Aktivitas-umur persediaan Rata-rata umur persediaan adalah rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (merubah persediaan menjadi penjualan). Dari data di atas, menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Surakarta untuk melakukan perputaran persediaan dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif yang masih tinggi. Persediaan yang ada, masih mengendap hampir 1 tahun dilihat dari nilai rata-rata

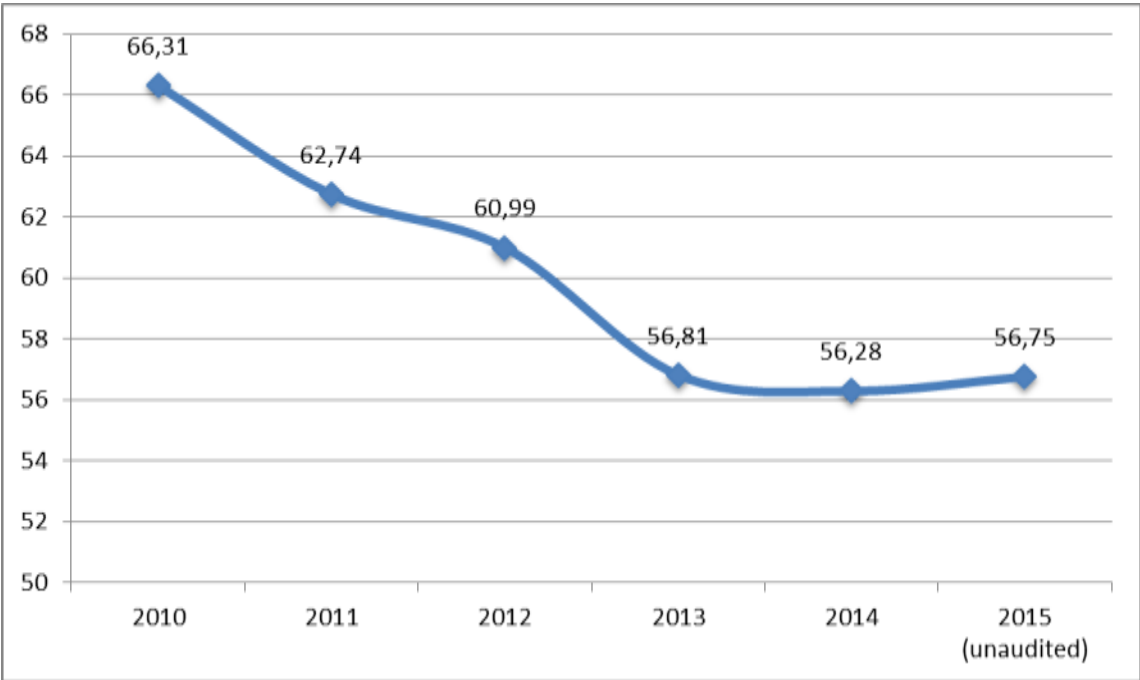
umur persediaan dari tahun 2010, yaitu 357,18 hari sampai dengan tahun 2015, yaitu 332,69 hari.

B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu juga dapat dilihat dari proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah. Tujuan penghitungan rasio Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah adalah untuk mengetahui proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah. Data Belanja Pegawai di sini adalah penjumlahan dari Belanja Pegawai Langsung dan Belanja Pegawai Tidak Langsung. Rasio ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai.

Perkembangan proporsi belanja pegawai terhadap Total Belanja Daerah menunjukkan kecenderungan menurun dari sebesar 66,31% pada tahun 2010 menjadi sebesar 56,75% pada tahun 2015. Perkembangan proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah dapat dilihat pada Gambar 3.6.

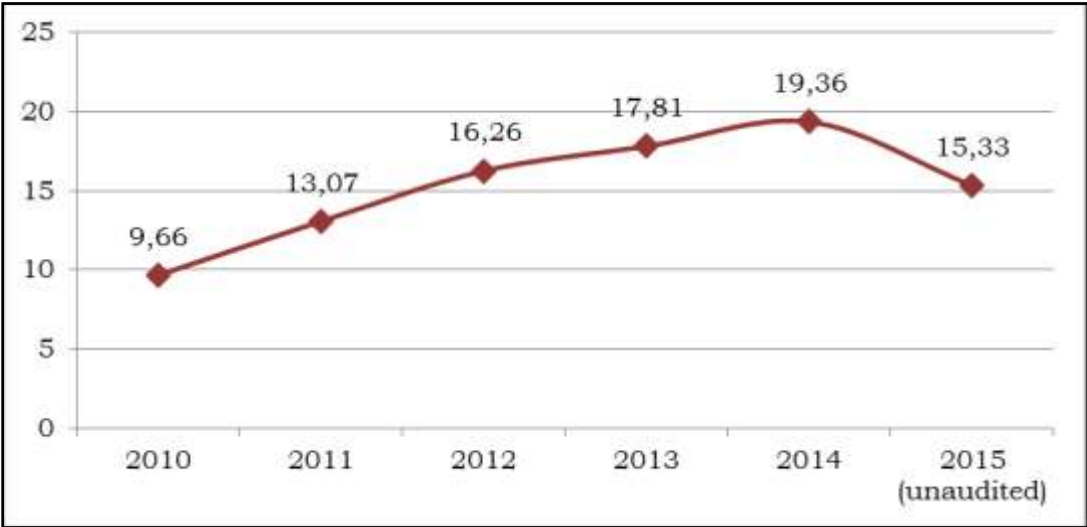


Gambar 3.6
Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah (%)

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah mencerminkan porsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk membiayai Belanja Modal. Belanja Modal ditambah belanja barang dan jasa merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, di samping pengaruh dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Realisasi Belanja Modal akan memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda

perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah Kota Surakarta menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam kurun waktu tahun 2010-2015, dari sebesar 9,66% pada tahun 2010 menjadi sebesar 15,33% pada tahun 2015. Perkembangan proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah dapat dilihat pada Gambar 3.7.



Gambar 3.7
Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah (%)

Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu juga dapat dilihat dari ruang fiskal. Ruang fiskal (*fiscal space*) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah. Perhitungan ruang fiskal daerah, yaitu total Pendapatan Daerah dikurangi dengan Pendapatan Hibah, pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*), dan belanja yang sifatnya mengikat, yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Bunga, kemudian dibagi dengan total pendapatannya.

Dalam kurun waktu tahun 2010-2015, Kapasitas Ruang Fiskal Daerah Kota Surakarta cenderung meningkat dari sebesar Rp.249.101.018.364,85 pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp.681.092.379.410,07 pada tahun 2015. Perkembangan kapasitas ruang fiskal daerah di Kota Surakarta selama kurun waktu 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Kapasitas Ruang Fiskal Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Belanja	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Pendapatan daerah	858.513.967.371,85	1.029.523.688.529,00	1.239.451.422.517,00	1.385.005.106.508,00	1.525.575.850.952,82	1.574.794.983.795,07
	Dikurangi:						
2	Belanja pegawai	547.661.637.647,00	582.126.262.859,00	663.857.081.094,00	732.801.975.077,00	769.847.763.306,00	839.220.621.613,00
3	Hibah	59.424.399.322,00	77.688.165.120,00	81.484.900.250,00	114.277.841.058,00	82.186.330.510,00	53.938.041.723,00
4	Belanja bunga	2.326.912.038,00	1.864.595.060,00	2.630.068.948,00	3.011.103.582,00	707.163.870,00	543.941.049,00
	Kapasitas fiskal	249.101.018.364,85	367.844.665.490,00	491.479.372.225,00	534.914.186.791,00	672.834.593.266,82	681.092.379.410,07

Sumber : DPPKA Kota Surakarta, 2016 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa ruang fiskal daerah Kota Surakarta saat ini masih sangat terbatas karena sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja rutin (Belanja Pegawai). Kapasitas Fiskal yang besar, diharapkan akan mampu mendanai pos-pos Belanja Daerah dalam APBD, khususnya untuk pos Belanja Langsung (BL), karena idealnya porsi belanja rutin lebih kecil dari belanja modal. Memperbesar ruang fiskal daerah untuk Belanja Modal sangat penting karena dapat menjadi stimulus perekonomian daerah. Pemerintah Daerah diharapkan dapat membuat kebijakan yang mampu menciptakan iklim perekonomian yang kondusif. Selain itu, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran di daerah juga dapat mendukung terciptanya ruang fiskal.

2. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pendanaan pembangunan daerah diluar kapasitas pendapatan daerah serta kewajiban-kewajiban yang menjadi beban pemerintah daerah. Analisis pembiayaan daerah tidak dapat terlepas dari kondisi defisit yang terjadi dalam APBD sehingga diperlukan pendanaan dari penerimaan pembiayaan daerah. Defisit riil dalam APBD terjadi apabila pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah menimbulkan adanya defisit dalam APBD. Kondisi defisit riil APBD Kota Surakarta Tahun 2010 – 2015 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Defisit Riil Anggaran Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	858.513.967.372	1.029.523.688.529	1.239.451.422.517	1.385.005.106.508	1.525.575.850.952,82	1.574.794.983.795,07
	Dikurangi realisasi:						
2.	Belanja Daerah	825.858.500.473	982.645.954.738	1.145.170.897.101	1.375.304.857.300	1.479.827.902.466,63	1.538.839.195.388
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	9.771.777.066	7.856.072.718	20.992.537.820	52.801.852.734	24.685.688.218	4.779.546.668
3.	Defisit riil	22.883.689.833	39.021.661.073	73. 287.987.596	(43.101.603.526,00)	21.062.260.268,19	31.176.241.739,07

Sumber : DPPKA Kota Surakarta, 2016 (data diolah)

Tabel 3.9
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Surakarta Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	19.956.619.185	43.959.738.469	95.706.261.245	202.754.302.668	163.526.624.732,59	187.509.120.270,19
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
3	Penerimaan dari Pihak Ketiga	825.560.150	1.639.672.153	2.340.675.950	516.016.481	0	3.164.763.450
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	7.799.999.000	30.748.989.309	3.357.909.110	0	0
5	Penerimaan/Penarikan Deposito	0	3.000.000.000	0	0	0	0
6	Penerimaan Piutang Daerah	293.869.300	284.427.750	221.248.250	0	385.002.868	0
7	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0	337.523.000

Sumber : DPPKA Kota Surakarta, 2016 (data diolah)

Tabel 3.10
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Surakarta

No	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Jumlah SiLPA Tahun Sebelumnya	19.956.619.185,40	43.959.738.469	95.706.261.245	202.754.302.668	163.526.624.733	187.509.120.270,19
2	Pelampauan penerimaan PAD	(483.350.273,15)	4.920.756.152	38.769.159.826	18.231.289.632	16.846.109.640,82	18.091.051.969,07
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	(3.384.064.384)	(80.399.359.664)	21.419.920.706	(1.752.054.559)	(18.622.935.790)	(17.165.338.535)
4	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	(7.837.676.786)	99.743.754.041	16.407.070.382	(3.242.538.565)	(11.494.145.377)	(22.524.457.639)
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	(59.176.541.527,75)	(71.266.912.731)	(119.664.251.747)	(141.584.020.050)	(192.741.842.744,37)	(242.841.708.882)
6	Surplus/Defisit	47.471.450.084,60	95.532.063.260	196.260.402.661	154.820.716.558	179.470.871.218,19	221.242.964.683,07
7	Pembiayaan Netto	(3.511.711.615,60)	174.197.985	6.044.759.689	8.705.908.175	8.038.249.052	944.683.782,19
	SILPA TAB	43.959.738.469	95.706.261.245	202.754.302.668	163.526.624.733	187.509.120.270,19	222.187.648.465,26

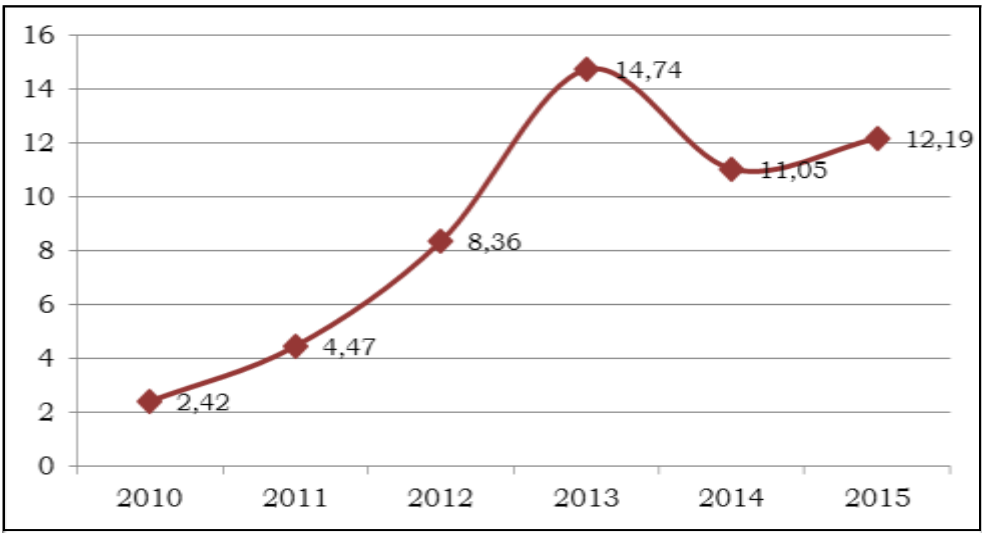
Sumber : DPPKA Kota Surakarta, 2016 (data diolah)

Besarnya SiLPA pada akhir tahun menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Rasio SiLPA terhadap total belanja daerah diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya SiLPA yang terjadi bisa menunjukkan rendahnya penyerapan belanja daerah. Namun demikian, besarnya SiLPA juga disebabkan adanya dana dari pusat yang bersifat *earmark* dan tidak dapat terserap pada akhir tahun anggaran dan sisa saldo kas pada BLUD. Rasio SiLPA terhadap total belanja di Kota Surakarta Tahun 2010-2015 mencapai rasio tertinggi pada tahun 2013, dengan kontribusi sebesar 14,74%. Secara umum rasio dan kontribusi SILPA terhadap Total Belanja Daerah trendnya meningkat.

Tabel 3.11
Rasio/Kontribusi SILPA terhadap Belanja Daerah

Tahun	SILPA	Total Belanja	Rasio SILPA terhadap Belanja Daerah
2010	19.956.619.185,00	825.858.500.472	2,42
2011	43.959.738.469,00	982.401.760.738	4,47
2012	95.706.261.245,00	1.145.031.123.851	8,36
2013	202.754.302.668,00	1.375.304.857.300	14,74
2014	163.526.624.732,59	1.479.827.902.466	11,05
2015	187.509.120.270,19	1.538.839.195.388	12,19

Sumber : DPPKA Kota Surakarta, 2016 (data diolah)



Gambar 3.8
Rasio SILPA terhadap Total Belanja Daerah

- C. Kerangka Pendanaan
1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
- Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, maka segala biaya pegawai dan biaya operasional SKPD menjadi pengeluaran wajib yang perlu dipenuhi. Dalam pemahaman umum pengeluaran periodik tersebut merupakan biaya tetap (*fixcost*) dalam pelaksanaan pemerintahan. Biaya tetap tersebut antara lain berupa belanja gaji dan tunjangan, tunjangan profesi guru, belanja bunga utang, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, belanja BLUD,

belanja yang bersumber dana dari pemerintah dan pemerintah provinsi (*earmark*), dan pengeluaran pembiayaan.

Tabel 3.12
Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Periodik dan Mengikat
Belanja Tidak Langsung Tahun 2010-2015

No.	Uraian	Pertumbuhan
1.	Belanja pegawai	11,62%
2.	Bunga utang	-12,78%
3.	Bantuan Keuangan	-19,09%
4.	Belanja Tidak Terduga	175,79%

Sumber : DPPKA Kota Surakarta, 2016 (data diolah)

Tabel 3.13
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Periodik dan Mengikat
Belanja Langsung Tahun 2010-2015

No.	Uraian	Pertumbuhan
1.	Belanja sumber dana <i>earmark</i> (DAK, hibah, bantuan keuangan)	1,05%
2.	Belanja BLUD	430,99%

Sumber : DPPKA Kota Surakarta, 2016 (data diolah)

Tabel 3.14
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Periodik dan Mengikat
Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2010-2015

No	Uraian	Pertumbuhan
1	Pembayaran utang pokok	69,65%
2	Penyertaan modal	179,31%
3	Pengembalian pihak ketiga	49,96%

Sumber : DPPKA Kota Surakarta, 2016 (data diolah)

2. Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2016-2021

a. Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2016-2021

Melihat capaian kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2010-2015, kedepan Pendapatan Daerah diharapkan dapat lebih meningkat, yang diikuti dengan berbagai upaya. Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah selama Tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- 2) Pendapatan daerah dikelola secara tertib dan transparan dengan menerapkan basis akrual;
- 3) Intensifikasi Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan pajak/retribusi, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras;
- 5) Perkuatan basis data dan potensi pajak dan retribusi daerah;
- 6) Peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah;
- 7) Optimalisasi kinerja bisnis BUMD yang berdampak terhadap kesehatan dan bagi hasil laba BUMD ke PAD;

- 8) Peningkatan tata kelola BLUD sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam rangka mendukung akuntabilitas PPK-BLUD;
- 9) Optimalisasi aset daerah;
- 10) Memberikan kompensasi/*tax holiday* guna peningkatan investasi. Secara jangka pendek *tax holiday* akan berdampak negatif terhadap capaian PAD, namun secara jangka panjang hal tersebut dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kenaikan PAD. *Tax holiday* dapat diterapkan melalui pemberian keringanan pajak untuk perodesasi tertentu kepada pihak swasta yang akan melakukan investasi atau pemberian keringan retribusi kepada masyarakat yang baru memulai usaha atau yang mengalami bencana. Pemberian keringanan tersebut harus dilakukan secara terukur, bijak dan tidak melanggar regulasi yang ada.

Berdasarkan kebijakan tersebut dan dengan mempertimbangkan laju capaian kinerja ekonomi makro daerah, maka proyeksi pendapatan daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021 disusun dengan berbasis pada asumsi :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan kinerja realisasi PAD Tahun 2010-2015 dan perilaku dari potensi masing-masing objek pajak dan objek retribusi daerah, kinerja, dan rencana bisnis BUMD dan BLUD serta trend pendapatan PAD lainnya;
- 2) Menyesuaikan kebijakan dana transfer dari pemerintah mendasarkan pada pencapaian Nawa Cita sampai dengan Tahun 2019;
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah, utamanya terkait dengan kebijakan hibah dari pemerintah, dana penyesuaian/DID serta kebijakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah selama Tahun 2016-2021 diformulasikan secara rinci sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15
Proyeksi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021

No	Uraian	APBD 2016	Proyeksi				Tahun 2021
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
A	Pendapatan Daerah						
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	380.675.658.000	407.322.951.000	435.835.553.000	466.344.038.000	498.988.116.000	533.917.281.000
a.	Pajak daerah	230.038.022.000	246.140.683.000	263.370.530.000	281.806.466.000	301.532.917.000	322.640.220.000
b.	Retribusi	59.413.766.000	63.572.729.000	68.022.819.000	72.784.416.000	77.879.324.000	83.330.876.000
c.	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.999.662.000	8.559.638.000	9.158.811.000	9.799.927.000	10.485.921.000	11.219.935.000
d.	Lain-lain PAD yang sah	83.224.208.000	89.049.901.000	95.283.393.000	101.953.229.000	109.089.954.000	116.726.250.000
2	Dana Perimbangan	1.222.819.483.000	1.228.585.787.000	1.254.432.918.000	1.281.043.442.000	1.308.440.141.000	1.336.646.478.000
a.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	59.509.745.000	60.104.842.000	60.705.890.000	61.312.948.000	61.926.077.000	62.545.337.000
b.	Dana Alokasi Umum	841.536.122.000	841.536.122.000	866.782.205.000	892.785.671.000	919.569.241.000	947.156.318.000
c.	Dana Alokasi Khusus	321.773.616.000	326.944.823.000	326.944.823.000	326.944.823.000	326.944.823.000	326.944.823.000
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	195.659.180.000	172.583.440.000	177.830.223.000	185.057.659.000	193.846.341.000	206.201.833.000
a.	Pendapatan Hibah	3.000.000.000	-	-	-	-	-
b.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	149.862.680.000	129.786.940.000	135.033.723.000	142.261.159.000	151.049.841.000	163.405.333.000
c.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
d.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	37.796.500.000	37.796.500.000	37.796.500.000	37.796.500.000	37.796.500.000	37.796.500.000
	Jumlah	1.799.154.321.000	1.808.492.178.000	1.868.098.694.000	1.932.445.139.000	2.001.274.598.000	2.076.765.592.000

Sumber : DPPKA Kota Surakarta, 2016 (data diolah)

b. Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2016-2021

Belanja daerah sebagai *fiscal tool* dapat digunakan pemerintah daerah untuk memberikan pemerataan belanja daerah dan menggerakkan perekonomian daerah. Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan publik;
- 2) Belanja daerah dikelola secara tertib dan transparan dengan menerapkan basis akrual;
- 3) Belanja yang bersifat wajib dan mengikat diutamakan dengan berprinsip pada asas efisien, efektif, dan akuntabel;
- 4) Belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sesuai kewenangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Belanja pegawai dianggarkan sesuai regulasi yang berlaku dan tunjangan pegawai diarahkan pada kinerja Aparat Sipil Negara (ASN);
- 6) Belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, dengan demikian semua belanja daerah harus mempunyai tolok ukur kinerja yang jelas dan terukur;
- 7) Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung secara bertahap diupayakan mencapai komposisi yang ideal dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku;
- 8) Belanja operasional SKPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dan belanja pembangunan daerah secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah;
- 9) Pendanaan pembangunan daerah sesuai dengan penyerahan urusan/kewenangan kepada kabupaten/kota;
- 10) Pendanaan program/kegiatan berdasarkan pada prioritas pembangunan sebagai penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih;
- 11) Pemilahan program/kegiatan unggulan didasarkan atas prinsip *Money Follow Program*. Penerapan konsep *money follows program* dalam rangka meningkatkan output kegiatan dilakukan dengan tiga cara, yaitu (1) memberikan kewenangan untuk memanfaatkan, memobilisasi dan mengelola sumber keuangan sendiri, (2) didukung oleh dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan (3) didukung oleh sumber pendanaan lain yang dapat bersumber dana masyarakat/swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), dana dari APBN (Tugas Pembantuan) dan dana dekonsentrasi dari Provinsi Jawa Tengah;

- 12) Pemenuhan alokasi anggaran yang bersifat mengikat, diutamakan mendanai belanja aparatur, belanja operasional, dan belanja yang bersifat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.

Secara lengkap, proyeksi kebutuhan Belanja Daerah Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat Kota Surakarta Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
A	Belanja Tidak Langsung	930.429.041.000	938.602.458.000	944.651.600.000	950.762.271.000	956.935.227.000	963.248.611.000
1	Belanja Pegawai	927.403.425.000	933.495.297.000	939.648.088.000	945.862.407.000	952.138.869.000	958.478.095.000
	- Gaji Pegawai, KDH dan DPRD	609.187.244.000	615.279.116.000	621.431.907.000	627.646.226.000	633.922.688.000	640.261.914.000
	- Tunjangan profesi Guru	297.807.043.000	297.807.043.000	297.807.043.000	297.807.043.000	297.807.043.000	297.807.043.000
	- Belanja penerimaan lainnya KDH dan DPRD	4.395.120.000	4.395.120.000,00	4.395.120.000,00	4.395.120.000,00	4.395.120.000,00	4.395.120.000,00
	- Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi	16.014.018.000	16.014.018.000	16.014.018.000	16.014.018.000	16.014.018.000	16.014.018.000
2	Belanja Bunga	455.100.000	336.645.000	232.996.000	129.348.000	25.842.000	-
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	770.516.000	770.516.000	770.516.000	770.516.000	770.516.000	770.516.000
4	Belanja Tidak Terduga	1.800.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
B	Belanja Langsung	310.005.180.000	313.105.228.000	316.236.278.000	319.398.637.000	322.592.620.000	325.818.542.000
1	Belanja Pegawai BLUD	856.162.000	864.722.000	873.369.000	882.101.000	890.921.000	899.829.000
2	Belanja Bahan Pakai Habis	23.439.015.000	23.673.405.000	23.910.139.000	24.149.240.000	24.390.732.000	24.634.639.000
3	Belanja Jasa Kantor	174.429.951.000	176.174.250.000	177.935.992.000	179.715.351.000	181.512.504.000	183.327.628.000
4	Belanja perawatan kendaraan	24.141.685.000	24.383.101.000	24.626.932.000	24.873.201.000	25.121.933.000	25.373.152.000
5	Belanja Pemeliharaan	18.064.719.000	18.245.366.000	18.427.819.000	18.612.097.000	18.798.217.000	18.986.199.000

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
6	Belanja Barang dan Jasa BLUD	69.073.648.000	69.764.384.000	70.462.027.000	71.166.647.000	71.878.313.000	72.597.095.000
C	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	23.064.331.000	16.857.859.000	7.807.859.000	7.807.859.000	7.363.387.000	6.918.915.000
1	Penyertaan Modal	15.807.000.000	15.968.915.000	6.918.915.000	6.918.915.000	6.918.915.000	6.918.915.000
2	Pembayaran hutang pokok	888.944.000	888.944.000	888.944.000	888.944.000	444.472.000	-
3	Pengembalian pihak ketiga	6.368.387.000	-	-	-	-	-
	Total (A + B + C)	1.263.498.552.000	1.268.565.545.000	1.268.695.737.000	1.277.968.767.000	1.286.891.234.000	1.295.986.068.000

Sumber : DPPKA Kota Surakarta, 2016 (data diolah)

c. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2021

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah direncanakan secara selektif dan berimbang antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kapasitas keuangan daerah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) diproyeksikan sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan analisa realisasi SiLPA lima tahun sebelumnya. Dalam lima tahun ke depan direncanakan adanya pinjaman daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah jangka menengah yang direncanakan untuk membiayai infrastruktur pelayanan publik.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan, dalam lima tahun kedepan Pemerintah Kota Surakarta merencanakan adanya penyertaan modal kepada beberapa BUMD guna meningkatkan kinerja dan penguatan struktur modal BUMD serta pengembalian pinjaman daerah. Gambaran proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2021 dapat dilihat di Tabel 3.17.

Tabel 3.17
Proyeksi Pembiayaan Kota Surakarta Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Penerimaan pembiayaan	229.055.836.000	100.500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	222.187.449.000	-	-	-	-	-
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	100.000.000.000	-	-	-	-
1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman/dana bergulir	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-	-
1.7	Penerimaan pihak ketiga	6.368.387.000	-	-	-	-	-
2	Pengeluaran Pembiayaan	23.064.331.000	16.857.859.000	36.379.287.000	36.379.287.000	35.934.815.000	21.204.629.000
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
2.2	Penyertaan modal (investasi)	15.807.000.000	15.968.915.000	6.918.915.000	6.918.915.000	6.918.915.000	6.918.915.000
2.3	Pembayaran hutang pokok	888.944.000	888.944.000	29.460.372.000	29.460.372.000	29.015.900.000	14.285.714.000
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
2.5	Pengembalian pihak ketiga	6.368.387.000	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	205.991.505.000	83.642.141.000	(35.879.287.000)	(35.879.287.000)	(35.434.815.000)	(20.704.629.000)

Sumber : DPPKA Kota Surakarta, 2016 (data diolah)

Pada Tahun 2017 salah satu sumber pembiayaan daerah bersumber dari penerimaan pinjaman daerah. Hal tersebut direncanakan untuk mempercepat salah satu target RPJMD dalam bidang kesehatan, yaitu untuk pembangunan satu rumah sakit umum daerah. Mengacu pada PP Nonor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, maka rencana pinjaman tersebut bersifat jangka menengah yang akan diselesaikan pada akhir masa jabatan Walikota. Durasi pencairan pinjaman akan dilakukan selama satu tahun anggaran dan selanjutnya masa pengembalian direncanakan selama 4 – 5 tahun atau lunas pada tahun 2021.

d. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Guna menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan, dilakukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kota Surakarta Tahun 2016-2021

No	Uraian	Proyeksi					
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Pendapatan Daerah	1.799.154.321.000	1.808.492.178.000	1.868.098.694.000	1.932.445.139.000	2.001.274.598.000	2.076.765.592.000
2	Penerimaan Pembiayaan	229.055.836.000	100.500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	Total Penerimaan	2.028.210.157.000	1.908.992.178.000	1.868.598.694.000	1.932.945.139.000	2.001.774.598.000	2.077.265.592.000
	Dikurangi :						
4	Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat (Prioritas I)	1.263.498.552.000	1.268.565.545.000	1.268.695.737.000	1.277.968.767.000	1.286.891.234.000	1.295.986.068.000
5	Kapasitas riil kemampuan keuangan	764.711.605.000	640.426.633.000	599.902.957.000	654.976.372.000	714.883.364.000	781.279.524.000

Sumber : DPPKA Kota Surakarta, 2016 (data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang belum dialokasikan dengan proyeksi seperti digambarkan pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19
Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Kapasitas Keuangan Daerah	2.028.210.157.000	1.908.992.178.000	1.868.598.694.000	1.932.945.139.000	2.001.774.598.000	2.077.265.592.000
1	Prioritas I (Wajib dan Mengikat)	1.263.498.552.000	1.268.565.545.000	1.268.695.737.000	1.277.968.767.000	1.286.891.234.000	1.295.986.068.000
1,1	Belanja Tidak Langsung	930.429.041.000	938.602.458.000	944.651.600.000	950.762.271.000	956.935.227.000	963.248.611.000
1,2	Belanja Langsung	310.005.180.000	313.105.228.000	316.236.278.000	319.398.637.000	322.592.620.000	325.818.542.000
1,3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	23.064.331.000	16.857.859.000	7.807.859.000	7.807.859.000	7.363.387.000	6.918.915.000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	764.711.605.000	640.426.633.000	599.902.957.000	654.976.372.000	714.883.364.000	781.279.524.000
2	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II	611.409.258.000	493.461.241.000	452.937.565.000	508.010.980.000	550.917.972.000	634.314.132.000
2,1	Belanja program kegiatan yang bersumber dana DAK	68.072.846.000	68.072.846.000	68.072.846.000	68.072.846.000	68.072.846.000	68.072.846.000
2,2	Belanja program kegiatan yang bersumber dana hibah	3.000.000.000	-	-	-	-	-
2,3	Belanja program kegiatan yang bersumber dana Bantuan Keuangan Provinsi	37.796.500.000	37.796.500.000	37.796.500.000	37.796.500.000	37.796.500.000	37.796.500.000
2,4	Belanja program kegiatan yang bersumber dana pinjaman	-	100.000.000.000	-	-	-	-
2,5	Pembayaran pokok hutang	-	-	28.571.428.000	28.571.428.000	28.571.428.000	14.285.714.000
2,6	Pembayaran bunga hutang	-	1.500.000.000	11.447.916.000	5.697.916.000	3.173.611.000	628.472.000

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
2,7	Belanja program prioritas dalam rangka pencapaian SPM dan pencapaian visi misi KDH	502.539.912.000	286.091.895.000	307.048.875.000	367.872.290.000	413.303.587.000	513.530.600.000
3	Rencana alokasi pengeluaran prioritas III	153.302.347.000	146.965.392.000	146.965.392.000	146.965.392.000	163.965.392.000	146.965.392.000
3.1	Belanja Tambahan Penghasilan	96.253.008.000	98.228.253.000	98.228.253.000	98.228.253.000	98.228.253.000	98.228.253.000
	- Tambahan Penghasiln PNS	96.243.308.000	96.243.308.000	96.243.308.000	96.243.308.000	96.243.308.000	96.243.308.000
	- Tambahan Penghasiln guru	9.700.000	1.984.945.000	1.984.945.000	1.984.945.000	1.984.945.000	1.984.945.000
3.2	Belanja Hibah	53.554.339.000	46.319.139.000	46.319.139.000	46.319.139.000	63.319.139.000	46.319.139.000
	- Belanja Hibah	53.554.339.000	46.319.139.000	46.319.139.000	46.319.139.000	46.319.139.000	46.319.139.000
	- Belanja Hibah Pemilukada	-	-	-	-	17.000.000.000	-
3.3	Belanja Sosial	3.495.000.000	2.418.000.000	2.418.000.000	2.418.000.000	2.418.000.000	2.418.000.000
4	Surplus Anggaran Riil/Berimbang	-	-	-	-	-	-

Sumber : DPPKA Kota Surakarta, 2016 (data diolah)

Pada prioritas pengeluaran daerah yang kedua dialokasikan rencana pembayaran hutang pokok dan bunga hutang selama lima tahun, yaitu sebagai konsekuensi rencana penerimaan pembiayaan pada tabel 3.17 terkait adanya rencana pinjaman daerah sebesar Rp. 100.000.000.000,00 pada tahun 2017. Dengan asumsi grace periode selama satu tahun maka pada tahun 2017 hanya akan dilakukan pembayaran bunga hutang, sedangkan pokok hutang dan sisa bunga akan dibayar secara bertahap sampai dengan tahun 2021.

Pada kelompok belanja hibah, sesuai periodisasi masa jabatan kepala daerah, pada tahun 2020 akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (pemilukada), yang akan diselenggarakan oleh KPU dan diawasi oleh Panwaslu.

Anggaran untuk pelaksanaan Pemilukada dialokasikan melalui belanja hibah sehingga pada tahun 2020 belanja hibah mengalami kenaikan.

Kapasitas riil keuangan Daerah yang dialokasikan untuk memenuhi Belanja Prioritas I, II, dan III sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.20.

Tabel 3.20
Kerangka Pendanaan Alokasi Prioritas I, II, dan III Kota Surakarta Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	Prioritas I	1.263.498.552.000	62,30	1.268.565.545.000	66,45	1.268.695.737.000	67,90	1.277.968.767.000	66,12	1.286.891.234.000	64,29	1.295.986.068.000	62,39
2	Prioritas II	611.409.258.000	30,15	493.461.241.000	25,85	452.937.565.000	24,24	508.010.980.000	26,28	550.917.972.000	27,52	634.314.132.000	30,54
3	Prioritas III	153.302.347.000	7,56	146.965.392.000	7,70	146.965.392.000	7,87	146.965.392.000	7,60	163.965.392.000	8,19	146.965.392.000	7,07
		2.028.210.157.000	100,00	1.908.992.178.000	100,00	1.868.598.694.000	100,00	1.932.945.139.000	100,00	2.001.774.598.000	100,00	2.077.265.592.000	100,00

Sumber : DPPKA Kota Surakarta, 2016 (data diolah)

Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I, II, dan III) bukan menunjukkan urutan besarnya persentase tetapi lebih untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Besaran persentase ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan dari program prioritas yang dirancang untuk menunjang prioritas dimaksud. Berdasarkan evaluasi atau analisis dari penyelenggaraan pembangunan daerah 5 (lima) tahun sebelumnya relatif baik untuk peningkatan alokasi pendanaan secara bertahap. Dengan demikian, kerangka pendanaan selama 5 (lima) tahun dapat ditampilkan pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21
Proyeksi APBD Kota Surakarta Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
A	Pendapatan Daerah	1.799.154.321.000	1.808.492.178.000	1.868.098.694.000	1.932.445.139.000	2.001.274.598.000	2.076.765.592.000
1	Pendapatan Asli Daerah	380.675.658.000	407.322.951.000	435.835.553.000	466.344.038.000	498.988.116.000	533.917.281.000
a	Pajak daerah	230.038.022.000	246.140.683.000	263.370.530.000	281.806.466.000	301.532.917.000	322.640.220.000
b	Retribusi daerah	59.413.766.000	63.572.729.000	68.022.819.000	72.784.416.000	77.879.324.000	83.330.876.000
c	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.999.662.000	8.559.638.000	9.158.811.000	9.799.927.000	10.485.921.000	11.219.935.000
d	Lain-2 PAD yang sah	83.224.208.000	89.049.901.000	95.283.393.000	101.953.229.000	109.089.954.000	116.726.250.000
2	Dana Perimbangan	1.222.819.483.000	1.228.585.787.000	1.254.432.918.000	1.281.043.442.000	1.308.440.141.000	1.336.646.478.000
a	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	59.509.745.000	60.104.842.000	60.705.890.000	61.312.948.000	61.926.077.000	62.545.337.000
b	Dana Alokasi Umum (DAU)	841.536.122.000	841.536.122.000	866.782.205.000	892.785.671.000	919.569.241.000	947.156.318.000
c	Dana Alokasi Khusus (DAK)	321.773.616.000	326.944.823.000	326.944.823.000	326.944.823.000	326.944.823.000	326.944.823.000
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	195.659.180.000	172.583.440.000	177.830.223.000	185.057.659.000	193.846.341.000	206.201.833.000
B	Belanja Daerah	2.005.145.826.000	1.892.134.319.000	1.832.219.407.000	1.896.565.852.000	1.965.839.783.000	2.056.060.963.000
1	Belanja Tidak Langsung	1.083.731.388.000	1.087.067.850.000	1.103.064.908.000	1.103.425.579.000	1.124.074.230.000	1.110.842.475.000
a	Belanja Mengikat	930.429.041.000	938.602.458.000	944.651.600.000	950.762.271.000	956.935.227.000	963.248.611.000
b	Prioritas II	-	1.500.000.000	11.447.916.000	5.697.916.000	3.173.611.000	628.472.000
c	Prioritas III	153.302.347.000	146.965.392.000	146.965.392.000	146.965.392.000	163.965.392.000	146.965.392.000
2	Belanja Langsung	921.414.438.000	805.066.469.000	729.154.499.000	793.140.273.000	841.765.553.000	945.218.488.000

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
a	Belanja Mengikat (Prioritas I)	310.005.180.000	313.105.228.000	316.236.278.000	319.398.637.000	322.592.620.000	325.818.542.000
b	Prioritas II	611.409.258.000	491.961.241.000	412.918.221.000	473.741.636.000	519.172.933.000	619.399.946.000
	Surplus/Defisit	(205.991.505.000)	(83.642.141.000)	35.879.287.000	35.879.287.000	35.434.815.000	20.704.629.000
C	Pembiayaan Daerah	205.991.505.000	83.642.141.000	(35.879.287.000)	(35.879.287.000)	(35.434.815.000)	(20.704.629.000)
1	Penerimaan	229.055.836.000	100.500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
2	Pengeluaran	23.064.331.000	16.857.859.000	36.379.287.000	36.379.287.000	35.934.815.000	21.204.629.000
	Total APBD	2.028.210.157.000	1.908.992.178.000	1.868.598.694.000	1.932.945.139.000	2.001.774.598.000	2.077.265.592.000

Sumber : DPPKA Kota Surakarta, 2016 (data diolah)

g. Kerangka Regulasi

Keterbatasan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan daerah menyebabkan tidak semua rencana program/kegiatan dapat dibiayai dari kerangka pendanaan APBD. Guna mendukung pengelolaan keuangan daerah dan pendanaan pembangunan, maka perlu adanya kerangka regulasi yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, yaitu :

- 1) Melakukan evaluasi atas Perda tentang Pajak Daerah, Perda tentang Retribusi Daerah, Perda tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan serta Perda tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- 2) Melakukan penyesuaian atas Perda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai regulasi yang baru dan kebijakan nasional;
- 3) Meningkatkan manajemen aset daerah dan mengoptimalkan pemakaian kekayaan daerah melalui inovasi-inovasi pengelolaan aset daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga/ investasi. Rencana pendanaan investasi adalah untuk pembangunan gedung Theater Wayang Orang dan Exhibition Hall;
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pendanaan program/kegiatan dari sumber dana APBN, dana dekonsentrasi dan APBD Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Pendanaan dari APBN diharapkan untuk mendanai program dan kegiatan yang sinkron dengan kebijakan Pemerintah Pusat, seperti program *universal acces* 100-0-100. Implementasi di daerah program tersebut adalah untuk penanganan air bersih, perumahan dan sanitasi.
- 6) Pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Tengah diharapkan mendanai program dan kegiatan yang menjadi komitmen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang diimplementasikan untuk sektor infrastruktur 20-30-50 serta program non infrastruktur dengan komposisi 40-60.
- 7) Kebijakan pembiayaan pembangunan melalui hutang kepada pemerintah, utamanya terhadap prioritas pembangunan yang membutuhkan dana besar, seperti bidang infrastruktur dan sarana prasarana layanan dasar kepada masyarakat;
- 8) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana pendanaan yang bersumber dari masyarakat antara lain untuk pembangunan masjid raya dan penataan PKL.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis Kota Surakarta untuk perencanaan jangka menengah daerah kurun 2016-2021 diidentifikasi melalui serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi permasalahan menurut urusan pemerintahan, analisis lingkungan strategis, kemudian diperoleh daftar calon isu strategis. Selanjutnya, dilakukan pembobotan melalui konsultasi publik, dihasilkan daftar isu strategis per bidang pemerintahan.

Dari kompilasi ini diperoleh kesimpulan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Surakarta dalam penyusunan program pembangunan daerah 2016-2021, yaitu (1) Penataan kebijakan dan kelembagaan perangkat daerah yang bersih, transparan, demokratis, partisipatif dan akuntabel; (2) Untuk meningkatkan daya saing daerah dan menciptakan kesejahteraan masyarakat; (3) Dalam tata kehidupan yang tertib dan aman, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, akan diuraikan daftar permasalahan urusan pemerintahan Kota Surakarta, lingkungan strategis, dan isu strategis kota dengan penjabarannya.

A. Permasalahan Pembangunan

Pembidangan permasalahan di Kota Surakarta, secara umum mencakup: (i) Bidang Pemerintahan Umum, (ii) Bidang Ekonomi, (iii) Bidang Sosial Budaya, (iv) Bidang Infrastruktur dan Perhubungan, (v) Bidang Lingkungan Hidup. Penjabaran permasalahan selengkapnya adalah sebagai berikut.

1. Bidang Pemerintahan Umum

a. Permasalahan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Dasar

Permasalahan yang muncul adalah: (i) Pemenuhan standar pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (ii) Belum terpenuhinya ketersediaan Standar Pelayanan Publik dan maklumat pelayanan publik; (iii) Tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dinilai belum sesuai yang diharapkan; (iv) Sistem inovasi daerah belum optimal pengembangannya.

b. Integrasi Perencanaan dan Pelaporan

Permasalahan yang muncul adalah: (i) Permasalahan akurasi, kebaruan data dan integrasi data untuk perencanaan dan evaluasi kinerja; (ii) Belum terintegrasinya pengelolaan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaporan dan evaluasi.

c. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Masalah pendataan data dasar (*based data*) objek dan subjek pajak berpengaruh terhadap intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang belum optimal.

Efektifitas dan efisiensi belanja daerah perlu dioptimalkan untuk belanja yang kemanfaatannya lebih besar di masyarakat.

Publikasi informasi keuangan daerah kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Publikasi ini harus dilakukan oleh semua SKPD sebagai bentuk akuntabilitas sosial (pasal 394, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). Ketertiban administrasi aset daerah perlu ditingkatkan terkait sertifikasi tanah, menyangkut persoalan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

d. Manajemen Kepegawaian dan Penataan Organisasi

Penempatan aparatur secara proporsional berdasarkan kebutuhan organisasi juga masih bermasalah, misalnya proporsi penempatan pegawai di kecamatan dan di kelurahan yang disesuaikan dengan luas wilayah. Manajemen aparatur berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan perlu dioptimalkan (merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara).

e. Penyusunan, Implementasi, dan Penegakan Regulasi Daerah

Produktivitas kajian peraturan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebutuhan/tuntutan masyarakat perlu ditingkatkan. Penegakan regulasi pemerintah untuk kasus-kasus sengketa lahan dan peruntukan lahan masih banyak persoalan.

f. Keterbukaan Informasi, Akuntabilitas Publik, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan

Pelibatan masyarakat dan kelembagaan forum warga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan transparansi informasi dan kemudahan akses publik masih perlu ditingkatkan, karena belum semua SKPD menggunakan teknologi informasi untuk mempublikasikan data dokumen rencana kerja dan dokumen anggaran secara rutin, mudah diakses, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Penanganan tindak lanjut aduan masyarakat sebagai wujud monitoring evaluasi pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat, belum optimal. Pelibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan dan kualitas dengar pendapat publik (*public hearing*) yang diadakan oleh DPRD dalam pembahasan Perda non APBD dan RAPBD masih perlu ditingkatkan.

g. Kerjasama Antardaerah dan Dunia Usaha (*Private Sector*)

Kerjasama antara daerah dalam rangka mengembangkan daya saing sejauh ini masih belum optimal, seringkali berhenti di kesepakatan dan kesepahaman (MOU: *Memorandum of Understanding*), tetapi tidak berlanjut hingga menghasilkan *outcome* peningkatan daya saing.

h. Kerjasama Internal Penyelenggara Pemerintahan dan DPRD

Kerjasama antara SKPD masih perlu dioptimalkan. Sinergi program dan kegiatan lintas sektor, termasuk sinergitas administrasi data dan pemanfaatan data untuk perencanaan dan evaluasi program/kegiatan.

Kerjasama dengan DPRD pada ranah legislasi, pengawasan, dan penganggaran perlu dioptimalkan sehingga fungsi perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis kinerja dapat lebih akuntabel.

i. Permasalahan Manajemen Pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Cakupan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih perlu ditingkatkan. Validitas data penduduk masih rendah. Validitas data bisa disebabkan oleh faktor penduduk dan faktor aparat. Penduduk sering mengabaikan isian data pada formulir pengur
usan data kependudukan, sehingga data tidak lengkap atau data janggal. Sementara itu, aparat pengelola layanan pengurusan kependudukan juga kurang tegas memeriksa validitas data. Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte pernikahan, akte perceraian, akte kelahiran, akte kematian) belum mencapai 100%.

j. Permasalahan Perlindungan Masyarakat

Ketertiban sosial dan toleransi terhadap keberagaman merupakan syarat tercapainya stabilitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan semakin mantapnya stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya maka masyarakat semakin terlindungi.

Kondusifitas kota masih perlu ditingkatkan: tingginya angka kriminalitas, banyaknya masyarakat kurang memahami peraturan hukum, kurangnya personil Satpol PP, belum optimalnya mekanisme persandian, kurangnya pengetahuan anggota linmas dan ketentuan aturan lainnya, mengoptimalkan struktur organisasi kelinmasan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.

2. Bidang Ekonomi

Permasalahan di bidang ekonomi dikelompokkan ke dalam beberapa sub permasalahan berdasar urusan sebagai berikut.

a. Koperasi dan UKM

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari berbagai sumber adalah sebagai berikut: (i) Masih kurangnya persentase koperasi sehat; (ii) Kurangnya SDM koperasi sesuai dengan standar keahlian teknis; (iii) Masih rendahnya aplikasi IPTEKS dalam sistem produksi UMKMP sehingga kurang mendukung daya saingnya; (iv) Keberlanjutan efektifitas pasar rakyat, seperti *night market*

Ngarsopuro; (v) Belum tersedianya kebijakan yang mendukung bagi perkembangan dan keberlanjutan UMKM; (vi) Masih kurangnya kualitas SDM dan daya saing pemasaran (promosi) produk UMKM, baik pada bidang sandang, pangan, kerajinan, dan jasa; (vii) Belum tersedianya data jumlah UMKM, dan informasi perkembangan usaha dari UKM yang valid; (viii) Masih rendahnya ketersediaan dan aksesibilitas UMKMK terhadap permodalan lembaga keuangan/pembiayaan mikro.

b. Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan penanaman modal dari berbagai sumber adalah sebagai berikut: (i) Ketersediaan regulasi dan implementasinya terkait informasi peluang investasi dan kemudahan pengurusan perizinan yang terintegrasi antar-SKPD berbasis teknologi informasi; (ii) Belum adanya regulasi untuk menghadapi kebebasan arus investasi dalam rangka menghadapi MEA; (iii) Belum optimalnya raihan investasi (masih didominasi oleh PMDN) dan kurangnya kemampuan kompetisi modal, barang, dan jasa; (v) Keterbatasan dan kekurangan SDM yang kompeten mengelola investasi daerah menghadapi MEA (termasuk BUMD); (vi) Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur daerah untuk penunjang peningkatan daya tarik investasi dan mendukung operasional investasi di daerah masih terbatas.

c. Ketahanan Pangan

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan ketahanan pangan dari berbagai sumber adalah sebagai berikut: (ii) Ketergantungan bahan pangan dari luar daerah yang masih besar; (iii) Belum optimalnya pencapaian skor pola pangan harapan; (v) Masih rendahnya konsumsi pangan berbasis lokal yang sehat dan aman bagi anak-anak sekolah; (vi) Kurang terjaminnya ketersediaan pasokan bahan pokok; (vii) Sering terjadi fluktuasi harga dari berbagai komoditas di Kota Surakarta.

d. Pertanian

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan pertanian dari berbagai sumber adalah sebagai berikut : (i) Belum optimalnya produksi dan produktivitas serta pemasaran hasil pertanian (perkebunan/peternakan/perikanan) karena lahan yang terbatas; (ii) Belum optimalnya penerapan teknologi pertanian dan pemanfaatan pekarangan dalam mendukung daya tahan pangan di masyarakat.

e. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Kelautan dan Perikanan dari berbagai sumber adalah sebagai berikut: (i) Belum optimalnya produksi perikanan budidaya; (ii) Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan penduduk.

f. Perdagangan

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Perdagangan dari berbagai sumber adalah sebagai berikut: (i) Masih banyaknya peredaran barang dan jasa yang belum terstandarisasi dan ada yang belum aman; (ii) Standarisasi produk barang dan jasa dalam rangka penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan peningkatan daya saing; (iii) Menurunnya nilai ekspor karena melemahnya pasar ekspor di beberapa wilayah tujuan ekspor (Amerika dan Eropa) karena adanya krisis global; meningkatnya harga bahan baku produk terutama produk bahan baku maupun bahan pelengkap dari impor dan fluktuasi nilai rupiah terhadap dolar; (iv) Masih belum optimalnya penataan PKL, termasuk kawasan kuliner Galabo dan Pucang Sawit dan kesadaran disiplin pelaku usaha kecil (PKL); (v) Masih kurangnya pasar tradisional yang memenuhi syarat kesehatan, kebersihan dan kenyamanan; (vi) Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia pelaku usaha UMK; (vii) Pertumbuhan pasar modern (minimarket) begitu pesat yang dapat mengancam pasar tradisional; (vi) Belum optimalnya pemantauan dan pengendalian penyaluran bahan bakar minyak, terutama LPG 3 kg; (vii) Masih rendahnya besaran rasio nilai ekspor terhadap PDRB.

g. Industri

Permasalahannya, yaitu: (i) Penguasaan teknologi pada IKM belum optimal; (ii) Penurunan kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB; (iii) Belum optimalnya pertumbuhan jumlah usaha; (iv) Ketergantungan bahan baku impor yang tinggi; (v) Ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas sesuai kebutuhan dunia usaha industri masih rendah.

h. Kemiskinan

Permasalahan terkait kemiskinan adalah (i) Masih tingginya tingkat kemiskinan; (ii) Kesenjangan pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan; (iii) Kesenjangan pendapatan di antara penduduk miskin. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks dan multidimensional, karenanya perlu penanganan secara sistematis, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

3. Bidang Sosial Budaya

a. Pendidikan

Keberhasilan perluasan dan pemerataan pendidikan formal: (i) Capaian APM masih berada di bawah target (SD = 95,96; SMP = 77,21; SMA = 69,94); (ii) Masih ada APS jenjang SMA/SMK/MA (2,19); (iii) APK pada jenjang PAUD juga masih kurang (52,76); (iv) Kualitas tenaga pendidik pada jenjang Sekolah Dasar/ sederajat yang belum memenuhi kualifikasi D4/S1 masih tinggi (20%).

b. Kesehatan

Kesimpulan permasalahan bidang kesehatan: (i) Masih rendahnya sinergitas pelayanan dalam perawatan kehamilan dan

kelahiran; (ii) Perlunya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan tingkat kepatuhan ibu dalam menjaga kesehatannya; (iii) Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular disebabkan oleh masih buruknya perilaku di masyarakat dalam mengikuti Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); (iv) Jangkauan transportasi umum menuju ke lokasi RSUD masih sulit.

c. Perempuan dan Anak

Permasalahan perempuan dan anak, yaitu: (i) Belum optimal/masih rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak yang ditunjukkan dengan masih adanya disparitas antara laki-laki dan perempuan (IPG sebesar 96,84 dan IDG sebesar 74,12); (ii) Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan partisipasi angkatan kerja perempuan dalam dunia kerja; (iii) Perlunya peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan melalui kerjasama Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) dengan SKPD terkait, LSM, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, layanan kesehatan, dan kelurahan; (iv) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini; (v) Belum tersedianya sistem pengelolaan data dan informasi serta indeks komposit perlindungan anak yang terpilah.

d. Keluarga Berencana

Permasalahan keluarga berencana di Kota Surakarta, yaitu: (i) Cakupan *unmet need* masih tinggi (10,7); (ii) Cakupan angka pemakaian kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate/CPR*) masih perlu ditingkatkan (66,83); (iii) Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB di setiap kelurahan masih kurang; (iv) Partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja, dengan indikasi cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) masih 77,24%.

e. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang masih dihadapi: (i) Kurangnya gelanggang olahraga, juga diikuti oleh minimnya pembinaan olahraga sehingga berimbas pada minimnya prestasi olahraga di kalangan pemuda; (ii) Masih rendahnya kapasitas dan kualitas kelembagaan kepemudaan.

f. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

PMKS meliputi anak balita terlantar, anak korban tindak kekerasan, anak nakal, anak jalanan, anak penyandang disabilitas, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Wanita Korban Tindak Kekerasan (WKTK), lanjut usia terlantar, lanjut usia tindak kekerasan, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), penyandang disabilitas bukan kusta, tuna susila, eks narapidana, pekerja migran bermasalah, dan korban NAPZA. Beberapa permasalahan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): (i) Penanganan PMKS untuk membangun kapasitas individu dan kelembagaan PMKS masih belum berjalan secara optimal; (ii)

Terbatasnya daya tampung dan ketersediaan sarana dan prasarana panti sosial; (iii) Belum optimalnya kemitraan lintas sektoral juga menjadi permasalahan dalam penanganan PMKS.

g. Tenaga Kerja

Permasalahannya: (i) Tingginya tingkat pengangguran terbuka, angka pengangguran di Kota Surakarta di tahun 2015 sebesar 5,95%.; (ii) Kesempatan kerja yang ada belum mampu menampung seluruh pencari kerja; (iii) Pencari kerja belum kompetitif, sehingga perlu difasilitasi pendidikan keterampilan sesuai standarisasi pasar tenaga kerja.

h. Kearsipan dan Perpustakaan

Permasalahan berkaitan dengan kearsipan dan perpustakaan adalah : (i) Jumlah arsip dalam wujud digitalisasi/aplikasi teknologi informasi masih sangat sedikit dan belum optimal; (ii) Pengelolaan/manajemen perpustakaan, layanan perpustakaan daerah dan perpustakaan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan di Kota Surakarta belum optimal; (iii) Belum dibangun interkoneksi dengan perpustakaan lain baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka pelestarian naskah-naskah kuno Kota Surakarta, (iv) Kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah masih rendah; (v) Kurangnya SDM pengelola kearsipan.

i. Kebudayaan dan Pariwisata

Permasalahannya: (i) Belum selesainya penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kota Surakarta sebagai panduan pembangunan pariwisata secara terpadu yang menyangkut aspek sosial dan ekonomi serta bersifat berkesinambungan; (ii) Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan warisan seni dan budaya; (iii) Belum optimalnya kreativitas masyarakat terhadap kekayaan seni dan budaya (iv) Belum dilakukan pemanfaatan jaringan informasi dan promosi pariwisata secara efektif; (v) Rendahnya peran aktif dari masyarakat khususnya generasi muda dalam upaya pembangunan pariwisata melalui pelestarian seni dan budaya.

4. Bidang Infrastruktur dan Perhubungan

Infrastruktur merupakan jaringan struktur pembentuk ruang yang memfasilitasi secara fungsional dan sosial untuk mendukung aktivitas kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Belum optimalnya kondisi infrastruktur di Kota Surakarta dalam mengimbangi dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta wilayah, berimplikasi pada beban masyarakat dalam penyediaan produksi dan mobilisasi sumberdaya. Permasalahan tersebut ditandai, yaitu:

a. Infrastruktur Permukiman

Di dalamnya terkait dengan sektor pengelolaan air bersih, penyehatan lingkungan (sanitasi), pengembangan penataan bangunan dan lingkungan serta pengembangan kawasan permukiman. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah: (i)

Belum optimalnya sistem penyediaan air minum regional dan pengembangan air minum terlindungi dikarenakan kurangnya ketersediaan prasarana sarana sumber daya air terkait ketersediaan air baku untuk air minum; (ii) Rendahnya pelayanan dan pengelolaan kegiatan penyehatan lingkungan sanitasi yang layak baik berupa sanitasi air limbah dan pengelolaan sampah 3R; terbatasnya lahan untuk penyerapan air pada waktu terjadi genangan dan pemenuhan sumur-sumur resapan pada kawasan permukiman, belum optimalnya dan ketersediaan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) kota, komunal, serta kawasan, belum optimalnya sinergisitas kerjasama dalam pengelolaan sampah kota secara regional (Solo Raya); (iii) Adapun pengembangan dan penataan lingkungan di Kota Surakarta menghadapi masalah diantaranya adalah masih banyak dijumpai permukiman pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, belum tergarapnya infrastruktur hijau (*green infrastructure*) dan upaya hemat energi, beberapa lahan tidak bersertifikat; (iv) Dalam sektor pengembangan kawasan permukiman diantaranya adalah: belum optimalnya penanganan kawasan kumuh perkotaan serta rendahnya pelayanan kualitas hunian, masih banyak rumah tidak layak huni (RTLH), rendahnya penyediaan rumah layak huni serta belum meratanya keterpaduan jaringan infrastruktur dalam pengatasan degradasi lingkungan pada kawasan kumuh.

b. Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi adalah: (i) Kemacetan pusat kota sudah sangat mendesak untuk ditangani hal ini disebabkan oleh pertumbuhan kendaraan pribadi yang tinggi; padatnya jalur transportasi antarkota yang melewati pusat kota; banyaknya titik perlintasan sebidang antara transportasi KA dan jalan raya, kurangnya kapasitas ruang parkir maupun titik-titik *rest area* yang tidak terkondisi dengan baik. Interkoneksi antarmoda transportasi udara, kereta api dan jalan raya menjadi kebutuhan efisiensi transportasi untuk mengurangi kemacetan. (ii) Belum optimalnya kualitas dan kapasitas kondisi jalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, utamanya terkait belum optimalnya kondisi kinerja pelayanan, keselamatan transportasi, integrasi antar moda transportasi dan pengembangan sistem transportasi massal; (iii) Belum optimalnya pemenuhan aksesibilitas transportasi untuk mendukung daya saing wilayah, utamanya lebih mengoptimalkan aksesibilitas transportasi pada kawasan tertinggal, Kota Surakarta bagian utara.

c. Infrastruktur Teknologi Informasi (TI)

Permasalahan yang muncul, antara lain: (i) Masih terbatasnya kapasitas *bandwidth internet*; (ii) Kondisi infrastruktur jaringan yang melayani belum merata di seluruh wilayah Kota Surakarta dan sesuai kapasitasnya; (iii) Masih terbatas pengetahuan dan SDM aparatur serta masyarakat terhadap teknologi informasi dan kelebagaannya. Teknologi informasi menjadi tantangan

menjembatani pemerintah dan pihak luar dalam peningkatan pencitraan kota dan penarikan *capital inflow* ke Kota Surakarta serta menuju keterbukaan informasi publik berbasis teknologi informasi.

d. Penataan Ruang

Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi serta masih adanya kesenjangan antarwilayah, memerlukan pengembangan wilayah kota secara terpadu, integral dan lintas sektor yang sinergis dalam rencana penataan ruang. Permasalahan utama bidang penataan ruang adalah belum terkoneksi penataan ruang dengan pembangunan sektoral. Dokumen perencanaan tata ruang kota dan turunannya (RTRW, RDRTK, RTBL) belum operasional sebagai dasar perizinan pemanfaatan ruang (IPR).

Sedangkan permasalahan penataan ruang pada kawasan strategis, yaitu: (i) Menurunnya daya dukung kawasan strategis cepat tumbuh (pusat kota); (ii) Tidak optimalnya daya dukung kawasan strategis Surakarta utara yang perlu menjadi perhatian; (iii) Kurang maksimalnya penguatan karakter kawasan kota secara berkelanjutan (fisik, sosial, ekonomi dan budaya) untuk mendukung Surakarta sebagai kota budaya dan pariwisata berbasis ekonomi lokal; (iv) Belum optimalnya penguatan kawasan konservasi bersejarah, menyangkut: perlindungan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan potensi benda cagar budaya; (v) Perlunya menumbuhkan ekosistem kota kreatif melalui 10 prinsip kota kreatif.

5. Bidang Lingkungan Hidup

a. Degradasi Lingkungan

Permasalahan lingkungan hidup di Kota Surakarta adalah menurunnya kualitas lingkungan binaan yang ditandai dengan meningkatnya ekosistem sungai yang melewati Kota Surakarta, meningkatnya frekuensi kejadian seperti banjir, tidak optimalnya upaya pemenuhan Kota Surakarta menjadi Kota Hijau terutama menyangkut ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik sebesar 9,72% dari 20% yang dipersyaratkan, pengembalian RTH pada kawasan konservasi alam dan lahan resapan air beserta pengelolaan.

Persampahan menjadi masalah lingkungan hidup, teridentifikasi: (i) Terbatasnya daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo; (ii) Pelembagaan pengelolaan persampahan kota menuju konsep *zero waste*; (iii) Pemahaman masyarakat akan pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) masih terbatas.

Masalah pencemaran yang ditemukan: (i) Pencemaran air yang disebabkan limbah industri dan domestik; (ii) Belum ditegakkan regulasi lingkungan seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UKL dan UPL; (iii) Peningkatan pencemaran air dan

menurunnya kualitas air permukaan, karena terbatasnya kemampuan industri kecil untuk mengolah limbahnya dengan standar pengolahan *waste water treatment*.

b. Penanggulangan Bencana

Kegiatan penanggulangan bencana masih belum berorientasi pada mitigasi bencana: identifikasi, kajian dan pemantauan risiko bencana serta penetapan sistem peringatan dini masih kurang. Upaya penanggulangan bencana dititikberatkan pada pencegahan atau pengurangan risiko diharapkan dapat lebih efektif daripada respon terhadap bencana.

Permasalahan dalam penanggulangan bencana antara lain: belum terintegrasi penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan (RKPD, RPJMD, RPJPD), membangun sistem penanggulangan bencana yang handal melalui kelembagaan yang kuat, pendanaan yang memadai, dan membangun masyarakat yang tangguh/tahan dalam menghadapi bencana.

B. Isu Strategis

1. Lingkungan Strategis

a. Lingkungan Internal

Pembahasan mengenai lingkungan internal yang akan dikaji dalam bagian ini, mencakup: (i) Posisi Geografis dan Geoekonomi Kota, (ii) Kondisi Demografi, dan (iii) Lingkungan Sosial Budaya. Penjelasan selengkapnya akan dipaparkan pada bagian berikut.

1) Posisi Geografis dan Geoekonomi Kota

Menurut RTRW Kawasan Kerjasama Regional yang terkait dengan Kota Surakarta adalah Kawasan Subosukawonosraten dan Kawasan Sosebo (Solo, Selo/Boyolali, dan Borobudur) yang memiliki SDA, kesuburan tanah, dan objek wisata. Dalam regional Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta dijadikan kawasan peruntukan industri skala wilayah untuk produk-produk unggulan berbasis industri kerajinan dan kawasan pariwisata.

Implikasi tantangannya: (i) harus mengembangkan industri kreatif, sektor jasa dan perdagangan; (ii) harus menciptakan iklim yang kondusif dan ramah investasi; (iii) mengembangkan kecakapan kota mengembangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) melingkupi aspek kebijakan/regulasi, aspek kelembagaan Iptek; aspek infrastruktur inovasi; budaya inovasi; dan pengembangan klaster industri secara komprehensif dan kolaboratif; (iv) mensinergikan nilai global dan nilai budaya lokal kota dalam penataan fungsi kota sebagai kota MICE; (v) menata kota yang berorientasi ekonomi perdagangan yang kompetitif, memberi kenyamanan bagi pelaku usaha atau investor untuk menambah lama tinggal (*length of stay*) di Kota Surakarta.

2) Kondisi Demografi

Kota Surakarta termasuk kota dengan laju pertumbuhan penduduk ranking 3 (tiga) terendah di Provinsi Jawa Tengah,

namun memiliki kepadatan penduduk tertinggi. Tantangan bagi kota: memanfaatkan data kependudukan untuk perencanaan persebaran penduduk, tata ruang dan tata guna lahan/tanah serta perencanaan dan penganggaran pembangunan, mengantisipasi dampak pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan perkotaan, yang dapat berisiko pada kesehatan lingkungan dan persaingan akses fasilitas hidup.

3) Lingkungan Sosial Budaya

Kota Surakarta adalah kota yang memiliki peninggalan 2 (dua) buah keraton, yaitu Keraton Kasunanan dan Keraton Mangkunegaran. Kota Surakarta menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia (*World Heritage*). Hal ini menempatkan Kota Surakarta sebagai kota yang punya mandat menguatkan nilai-nilai budaya Jawa sebagai kekayaan bangsa. Kebijakan cagar budaya perlu diprioritaskan.

Di Kota Surakarta banyak aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengorganisir komunitas warga. LSM sebagai modal sosial kota ini dapat dimanfaatkan sebagai forum bagi warga untuk berdiskusi dan bersama-sama pemerintah mengembangkan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya.

b. Lingkungan Eksternal

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Tantangan yang dihadapi dari kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bagi pembangunan daerah Kota Surakarta adalah: (i) mengelola penataan organisasi pemerintah daerah yang efisien dan efektif; (ii) mengelola aparatur supaya profesional, kompetitif, akuntabel; (iii) pengelolaan keuangan daerah yang memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar secara efisien dan akuntabel; (iv) tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dengan multi pemangku kepentingan dan akuntabel.

a) Tantangan Acuan Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Kebijakan pengurangan subsidi energi BBM dan tarif dasar listrik dari pemerintah berdampak pada risiko inflasi, kerentanan kelompok hampir miskin, penentuan standar satuan harga belanja barang dan jasa, dan kenaikan belanja rutin. Efisiensi belanja rutin dan prioritas alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan wajib dasar menjadi tantangan perencanaan pagu anggaran tahun 2016-2021.

Kebijakan moratorium PNS menjadi tantangan Pemerintah Kota Surakarta untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan pencari kerja selama 5 tahun di luar sektor PNS. Kreativitas pemerintah kota untuk mendidik wirausaha muda menjadi tantangan berat. Diperlukan

program terobosan pemerintah untuk memfasilitasi angkatan pencari kerja dengan pihak swasta pemilik usaha.

Tantangan dalam RPJMN: (i) menjalankan reformasi birokrasi publik; (ii) membuka partisipasi publik; (iii) membangun politik legislasi yang kuat: pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup.

RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, secara umum memberikan tantangan kepada pemerintah Kota Surakarta membuat perencanaan pembangunan 2016-2021 dengan memprioritaskan penataan kebijakan dan kelembagaan perangkat daerah yang bersih, demokratis, partisipatif dan akuntabel untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

b) Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Tantangan dari pemberlakuan MEA pada tahun 2015 adalah kesiapan pemerintah Kota Surakarta mempersiapkan mental dan keterampilan hidup penduduk Kota Surakarta menghadapi MEA, yaitu: (i) memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi untuk mencintai dan mendukung produk dalam negeri; (ii) mengupayakan standarisasi dan sertifikasi keterampilan yang dipersyaratkan untuk kompetisi pasar tenaga kerja; (iii) meningkatkan arus investasi, mencetak eksportir ke ASEAN, pengiriman tenaga terampil ke ASEAN, dan peningkatan kunjungan wisata.

c) Sustainable Development Goals (SDG's)

Kesepakatan *Sustainable Development Goals (SDG's)* terdiri atas 17 tujuan:

- (1) Hilangkan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia;
- (2) Hilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan;
- (3) Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur;
- (4) Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang;
- (5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan;
- (6) Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang;
- (7) Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan, dan modern untuk semua orang;
- (8) Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang;

- (9) Membangun infrastruktur yang berkualitas mendorong peningkatan produksi yang berkelanjutan serta mendorong inovasi;
- (10) Mengurangi ketidaksetaraan baik dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia;
- (11) Membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan;
- (12) Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi;
- (13) Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- (14) Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan;
- (15) Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus, serta tukar guling tanah;
- (16) Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan;
- (17) Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

2. Isu Strategis

Dari proses analisis lingkungan strategis dengan menyandingkan: (1) sasaran pokok pembangunan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 258, yaitu: peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; kesempatan kerja; lapangan berusaha; meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik; daya saing Daerah; (2) RPJPD: kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, perekonomian mantap, keamanan ketertiban lingkungan yang baik dan sehat; prasarana perkotaan yang cukup dan berkualitas; (3) RTRW: melayani PKN; sistem pusat pelayanan yang terintegrasi berwawasan lingkungan, (4) dimensi pokok pembangunan nasional RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, yaitu berdikari dan sejahtera; (5) hasil evaluasi RPJMD 2010-2015, ditemukan hal-hal yang masih harus dikejar dari penyelenggaraan urusan pemerintahan; (6) Visi misi Kepala Daerah Terpilih Kota Surakarta tahun 2016-2021, yang mengusung isu waras, wasis, wareg, mapan, papan.

Setelah melakukan analisis isu, dilakukan proses pembobotan isu, dan konsultasi publik, maka ditarik kesimpulan bahwa payung besar isu strategis Kota Surakarta disinergikan dengan pembidangan urusan dalam perencanaan pembangunan daerah, mencakup: (i) Kelompok isu bidang pemerintahan umum, (ii) Kelompok isu bidang ekonomi, (iii) Kelompok isu bidang sosial budaya, (iv) Kelompok isu bidang

infrastruktur dan perhubungan, (v) Kelompok isu bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan rangkaian proses sebagaimana dipaparkan pada bab ini, rumusan isu strategis Kota Surakarta kurun 2016-2021 dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kelompok, yaitu:

- a. Tata kelola pemerintahan (*governance*): bersih, transparan, kolaboratif, demokratis, dan akuntabel;
- b. Peningkatan daya saing daerah: meraih keunggulan;
- c. Kesejahteraan masyarakat: mapan, aman, nyaman;
- d. Lingkungan hidup: sehat, selamat, bermartabat;
- e. Kesenjangan wilayah: pemerataan yang berkeadilan dalam keterpaduan.

Penjabaran masing-masing isu dijelaskan pada bagian berikut :

a. Tata Kelola Pemerintahan (Governance): Bersih, Transparan, Kolaboratif, Demokratis, dan Akuntabel

Tata kelola pemerintahan sebagai proses memformulasi dan melaksanakan kebijakan, peraturan serta prioritas-prioritas pembangunan melalui interaksi antara eksekutif, legislatif dan birokrasi dengan partisipasi dari masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi (bisnis). Birokrasi sebagai bagian dari aktor tata kelola pemerintahan. Isu tata kelola pemerintahan adalah isu yang strategis karena menakar efektivitas kolaborasi semua elemen, yaitu pemerintah (eksekutif), DPRD, masyarakat sipil, dan masyarakat dunia usaha.

Hasil kajian tek^{nokratis} disandingkan dengan visi misi dan janji program yang diusung walikota terpilih 2016-2021 sebagai berikut:

1) Bidang Pemerintahan Umum

Isu bidang pemerintahan umum selaras dengan misi walikota terpilih 2016-2021 pada misi mapan, dimana memuat unsur sikap dan perilaku yang tertib dalam segala kehidupan. Hal ini berarti budaya yang melekat pada aparatur (ASN) dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat, sehingga membuahkan tata kehidupan kota yang tertib, aman, nyaman, dan damai.

Isu strategis bidang pemerintahan umum melingkupi fokus bidang regulasi, tata organisasi pemerintahan daerah, dan proses penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan umum. Tantangan isu strategis tata kelola pemerintahan Kota Surakarta adalah untuk mewujudkan kota yang tertib dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Isu SOTK dan kepegawaian, bidang pemerintahan umum perlu penyediaan regulasi dan pengendalian implementasinya terkait penataan organisasi perangkat daerah dan kepegawaian (rekrutmen, penetapan, mutasi maupun promosi) supaya mendukung gerakan antikorupsi dan budaya kerja, serta kualitas pelayanan publik.

Isu kemampuan pengelolaan aset dan keuangan daerah secara efisien dan akuntabel menjadi strategis untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal pelayanan wajib dasar dan efisiensi belanja. (ii) Penertiban aset daerah; (iii) Transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Isu regulasi, ketersediaan regulasi/kebijakan daerah yang tepat adalah berbasis akurasi data dan diimplementasikan berbasis sanksi yang jelas atas segala bentuk pelanggaran/pengabaian. Kurun 2016-2021 Kota Surakarta memerlukan: (1) Kebijakan yang memberi insentif dan disinsentif untuk intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah dan penegasan pelaksanaannya, mengatur aset daerah dan pengendalian konflik hak atas tanah; (2) Kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal; (3) Sistem Inovasi Daerah (SIDa); (4) tata guna lahan dan ruang kota; (5) konservasi dan pengembangan kekayaan sejarah, dan seni budaya daerah; (6) partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk mengungkit daya saing daerah; (7) Kebijakan tentang jaminan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat, termasuk kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah; (8) Kebijakan tentang partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam sistem pembangunan daerah; (9) Kebijakan pelaksanaan peraturan perundangan yang lebih tinggi lainnya.

Isu manajemen perencanaan pembangunan, manajemen perencanaan pembangunan merupakan proses berkesinambungan dan konsisten mulai dari tahap perencanaan, pengaturan sumber daya, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi kinerja hingga pelaporannya. Isu dari manajemen perencanaan pembangunan yang dihadapi Kota Surakarta adalah belum optimalnya pengendalian kebijakan tentang sistem akuntabilitas kinerja perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Isu kemitraan dan partisipasi masyarakat untuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah menjadi isu strategis mendorong upaya penurunan risiko korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Transparansi Informasi dengan mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi (TI) diharapkan meningkatkan akuntabilitas publik berbasis akurasi data. Transparansi informasi mencakup informasi; penyelenggaraan layanan publik; kinerja penyelenggaraan pemerintahan; pengelolaan keuangan daerah.

Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, kolaboratif, demokratis dan akuntabel akan semakin kuat jika didukung oleh hubungan antara pemerintah dan DPRD yang efektif. Optimalisasi peran DPRD menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat menjadi

embatan di antara fungsi regulasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Isu strategis perencanaan pembangunan berbasis data kependudukan, adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib data administrasi kependudukan. Tidak tertibnya penduduk dalam mengisi data kependudukan dan pemilikan dokumen kependudukan, berdampak pada rendahnya kualitas data informasi kependudukan.

Pembangunan wilayah dilakukan untuk kesejahteraan penduduk wilayah tersebut, karenanya harus dikondisikan pemanfaatan data dan informasi kependudukan sebagai dasar analisis program dan kegiatan SKPD. Perlu digalakkan pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan lintas sektor bagi upaya perlindungan dan pemberdayaan penduduk perlu terus ditingkatkan.

Isu Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan dunia privat bersifat strategis, karena KAD sarana untuk menyerasikan dan mensinergikan potensi antardaerah. Kerjasama dengan pihak ketiga penting untuk meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Kerjasama antardaerah dan kerjasama dengan dunia usaha berperan strategis untuk meningkatkan daya saing daerah. Kerjasama antardaerah juga diperlukan untuk memecahkan masalah lingkungan dan sumber daya publik, seperti persampahan, air.

Kerjasama dengan dunia usaha (*privat*) menjadi isu penting karena adanya kebutuhan transfer keterampilan, teknologi, dan modal dari dunia usaha. Selama ini bentuk kemitraan dengan dunia usaha melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Isu Perlindungan Masyarakat, adalah mengantisipasi dan melindungi masyarakat dari risiko bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial. Isu strategisnya adalah pergeseran paradigma pada pemerintah dan masyarakat dari penanganan bencana ke mitigasi bencana. Perlunya integrasi kegiatan mulai dari pra bencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana secara seimbang dan sinergis pemerintah dan masyarakat.

2) Bidang Sosial Budaya

Isu pengelolaan kearsipan dalam bentuk *e-government* menjadi kebutuhan bagi tata kelola pemerintahan.

3) Bidang Infrastruktur

Isu pendataan informasi pembangunan kota dan penataan pengendalian ruang menjadi isu strategis, karena berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis akurasi data.

Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota sampai pada tingkat kedetilan tertentu, data sebaran kemiskinan kota berbasis RT atau RW; sebaran kawasan tidak layak huni, data kemacetan dan sejenisnya perlu dipublikasikan secara optimal dengan

teknologi informasi, misalnya melalui peta analog dan serta digital. Review kebijakan keterpaduan antardokumen perencanaan, yaitu RTRW, Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum (RISPAM) Kota Surakarta, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (RP2KP) Kota Surakarta, Peraturan Daerah Bangunan Gedung, Strategi Sanitasi Kota (SSK) Surakarta, SPPIP Kota Surakarta, Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kota Surakarta, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Surakarta.

b. Peningkatan Daya Saing Daerah: Meraih Keunggulan

Daya saing daerah menjadi tujuan dari semua upaya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, kolaboratif, demokratis, dan akuntabel. Daya saing didefinisikan sebagai kondisi institusi, kebijakan, dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas ekonomi suatu daerah.

Pilar pendukung daya saing, yaitu: institusi, infrastruktur, makro ekonomi, kesehatan, pendidikan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis, dan inovasi.

Merujuk pilar pendukung sebagaimana diuraikan di atas, hal ini menunjukkan daya saing merupakan dampak pembangunan lintas sektor, mulai dari bidang pemerintahan umum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang infrastruktur.

Dari analisis penyelarasan isu strategis daerah dengan visi misi walikota terpilih 2016-2021, selaras dengan unsur visi Kota Surakarta sebagai kota budaya, mandiri, maju dan sejahtera. Ditinjau dari komponen misi isu daya saing daerah didukung oleh misi waras, wasis, wareg, dan mapan. Tantangan yang dihadapi Kota Surakarta menjadi kota berdaya saing tinggi memerlukan penanganan lintas sektor dari bidang pemerintahan umum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang infrastruktur sebagai berikut.

1) Bidang Pemerintahan Umum

Isu regulasi, iklim kebijakan daerah yang menjamin kepastian usaha dalam kompetisi sehat dan efisien, bersih dari ekonomi biaya tinggi mencakup: (1) Sinkronisasi sistem informasi perizinan SKPD teknis dengan sistem informasi PTSP BPMPT; (2) Pengembangan dan penyempurnaan Sistem informasi PTSP Online; (3) Kajian kebijakan yang pro investasi; (4) Penyiapan kecakapan aparatur untuk mengelola investasi yang kompeten termasuk Penataan Organisasi dan Manajemen BUMD; (5) Kebijakan kerjasama antardaerah; (6) Kebijakan yang mengatur pengembangan BUMD, kelembagaan ekonomi, Lembaga Pembiayaan bagi UMKMK dan pembentukan lembaga ekonomi kerakyatan; (7) Kebijakan investasi, (8) Sistem inovasi daerah (SIDa) yang berdaya saing.

Isu aparaturnya dan transparansi informasi, pembinaan aparaturnya perangkat daerah yang berintegritas dan antikorupsi menjadi isu strategis. Mengoptimalkan semua fungsi media komunikasi berbasis teknologi informasi maupun tradisional mendukung pemasaran daya saing kota.

Isu perlindungan masyarakat, mengingatkan pentingnya kondisi daerah yang tertib, aman, tidak banyak gangguan masalah sosial, akan menciptakan kondisi kota yang ramah investor, sehingga meningkatkan daya saing daerah.

2) Bidang Ekonomi

Isu strategisnya adalah meningkatkan produktivitas kota dan menumbuhkan jumlah wirausaha di kalangan muda yang berkelanjutan. Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM), menjadi ujung tombak daya saing kota. Daya saing kota merupakan ukuran perkembangan daerah dalam menciptakan produktivitas kota. Koperasi diharapkan menjadi lembaga penguat tumbuhnya usaha mikro para wirausahawan pemula. Oleh karena itu, peningkatan kuantitas dan kualitas koperasi aktif harus dikondisikan. Pertumbuhan usaha memerlukan penguatan kelembagaan, melalui pertumbuhan klaster UMKM. Pertumbuhan usaha *mikro* akan lebih cepat jika didukung oleh kemitraan/bapak angkat pengusaha besar dengan pengusaha kecil dan menengah. Kemitraan dengan BUMN dan BUMD melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) perlu dioptimalkan supaya tepat sasaran dan berkelanjutan menumbuhkembangkan UMKM, termasuk aksesibilitas Koperasi Usaha Mikro (KUM) terhadap lembaga keuangan/pembiayaan mikro.

Isu industri kreatif dan sertifikasi/standarisasi pengembangan industri menjadi komponen kunci peningkatan daya saing kota dan berujung pada peningkatan PDRB. Industri kreatif potensial dikembangkan di Kota Surakarta mengingat posisi geoekonominya, dan ketergantungan bahan baku impor yang tinggi perlu dipecahkan alternatifnya. Perencanaan dan pengendalian kebijakan kemitraan *stakeholders* (SKPD, lembaga swadaya masyarakat, dan perbankan) untuk pengembangan industri kreatif di Kota Surakarta perlu dioptimalkan, untuk mendorong perluasan pemasaran sektor industri pengolahan (makanan, obat, jamu, kosmetik herbal/agro, tekstil dan produk tekstil). Terkait posisi geoekonomi Kota Surakarta, pengembangan industri kreatif untuk mendukung daya saing pasar pariwisata perlu diprioritaskan. Hal yang mendesak dilakukan untuk peningkatan daya saing produk dan jasa adalah penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam rangka penerapan Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) kepada pelaku usaha dalam distribusi dan peredaran produk barang dan jasa. Ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas sesuai kebutuhan dunia usaha industri masih

rendah. Keberhasilan dalam penanganan industri kreatif di Kota Surakarta, diharapkan dapat memberikan kontribusi ke pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019, melalui indikator sumbangan sektor industri ke PDB Nasional dan juga penambahan jumlah industri kreatif yang masuk dalam kategori skala industri menengah dan besar.

Isu ramah investasi berimplikasi pada ketersediaan sistem informasi layanan investasi yang terintegrasi dan ramah pasar berbasis pada keunggulan daerah (*core competence*) juga penting untuk penguatan daya saing daerah.

Isu pasar rakyat dan komoditas, sebagai penopang daya saing daerah. Oleh karena itu, revitalisasi dan rehabilitasi pasar rakyat, ketersediaan stok komoditas pangan, dan terjaganya pengendalian harga merupakan isu strategis.

Isu penataan pedagang kaki lima (PKL) juga menjadi strategis, karena kehadiran PKL adalah konsekuensi dari pengembangan ekonomi kota.

3) Isu Bidang Infrastruktur

Isu kecukupan infrastruktur penunjang usaha dan kecukupan pemanfaatan jaringan teknologi komunikasi informasi di suatu daerah akan meningkatkan peluang daya saingnya.

Pengembangan sarana dan prasarana transportasi kota untuk mendukung sektor industri kreatif dan sektor pariwisata yang melayani Kawasan Andalan Subosuka Wonosraten, dan kemudahan aksesibilitas terhadap kegiatan skala nasional serta pengembangan infrastruktur dalam rangka mendukung kota sebagai pusat dan simpul utama kegiatan ekspor-impor serta pintu gerbang nasional dan internasional.

Isu mengurangi kemacetan melalui pengelolaan transportasi massal yang tepat sasaran, terjangkau dan interkoneksi antarmoda menjadi tantangan, seperti interkoneksi antara transportasi udara dengan transportasi darat. Isu lain yang perlu ditangani adalah adanya perlintasan sebidang, lalu lintas regional yang memasuki kawasan tengah kota, jalan arteri primer yang banyak perlintasan dengan jalan fungsi sekunder, sehingga menambah kepadatan, kemacetan, dan kerawanan lalu lintas. Integrasi perencanaan transportasi dengan pengembangan wilayah ke Utara menjadi tantangan.

Isu karakter dan identitas kota, penguatan karakter budaya kawasan dengan cara mengintegrasikan pembangunan karakter fisik lingkungan dengan pengembangan ekonomi wilayah dan pengembangan pariwisata budaya berbasis lokalitas. Aset seperti Keraton Kasunanan, Keraton Mangkunegaran, dan Beteng Vastenberg serta kawasan-kawasan bersejarah seperti kawasan Pasar Gede, kampung-kampung tradisional serta potensi ekonomi lokal seperti batik, kuliner, budaya dan adat istiadat menjadi kekuatan besar Kota Surakarta untuk bersaing dengan

daerah lain. Alih fungsi dan pengendalian ruang pada kawasan beridentitas budaya lokal menjadi tantangan.

4) Isu Lintas Bidang Infrastruktur, Bidang Ekonomi, dan Bidang Pemerintahan Umum: Kerjasama Antar Daerah dan Kerjasama Pihak Ketiga

Isu kerjasama antardaerah dan dunia privat memberi daya ungkit signifikan bagi daya saing daerah. Kerjasama daerah dilaksanakan sebagai sarana untuk mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Pengembangan kerjasama regional diarahkan untuk mengatasi konflik antarsektor dan antardaerah dalam kegiatan pemanfaatan ruang, seperti: pengaturan perjalanan wisata; pemanfaatan sumber daya alam air bersih; pengembangan sarana dan prasarana untuk pelayanan lintas wilayah seperti perumahan, dan sebagainya.

5) Isu Bidang Sosial Budaya

Isu-isu dari bidang sosial budaya berkontribusi menyiapkan kualitas sumber daya manusia Kota Surakarta untuk meraih keunggulan dalam persaingan pasar, termasuk perkembangan inovasi daerah. Semakin banyak inovasi daerah yang semakin tinggi potensi daya saing daerah.

Isu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, semakin tinggi kualitas sumber daya penduduk dari sisi kesehatan dan tingkat pendidikan, standarisasi, dan sertifikasi keterampilan kerja semakin tinggi kontribusinya pada daya saing daerah. Penyelenggaraan pendidikan vokasi yang mengacu pada sertifikasi atau standarisasi nasional untuk menghasilkan angkatan kerja yang kompetitif di pasar tenaga kerja.

Isu budaya dan pariwisata, meraih keunggulan dari bidang sosial budaya, juga melalui kekayaan seni budaya daerah sebagai komoditas jasa. Hal ini menjadi tantangan dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah, dan pemasaran wisata seni budaya di tingkat regional, nasional dan internasional melalui program kemitraan antarpelaku pariwisata serta melibatkan pemuda. Prioritas untuk mengembangkan industri kreatif pendukung daya saing pasar pariwisata. Dari isu kepemudaan dan olahraga, sinergitas penyelenggaraan even budaya dan olahraga dengan pengembangan ekonomi kreatif pemuda perlu untuk ditingkatkan, sebagai ajang promosi daerah. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga kota yang lengkap, menjadi modal bagi event-event olahraga nasional dan internasional diselenggarakan di Kota Surakarta, apalagi Surakarta sudah termasuk kota MICE. Jika hal ini terjadi maka memberi peluang peningkatan pemasaran produk Kota Surakarta.

c. Kesejahteraan Masyarakat: Mapan, Aman, Nyaman

Negara mempunyai kewajiban memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, sebagai pilar kesejahteraan rakyat. Hak ekonomi menjadi acuan pencapaian bersama dalam pemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Negara merupakan aktor pertama dan utama yang bertanggungjawab mencapai janji kesejahteraan. Pemerintah daerah, sebagai representasi negara, dapat menjalin kerjasama swasta (sektor kedua) untuk memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus memfasilitasi elemen-elemen masyarakat lokal dalam menggerakkan ekonomi rakyat untuk menciptakan pemerataan. Pertumbuhan dan pemerataan itu merupakan dua skema untuk membangun kemakmuran. Di sisi lain pemerintah daerah dapat meluncurkan reformasi pelayanan publik dan kebijakan (pembangunan) sosial untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pelayanan publik yang paling dasar adalah pendidikan dan kesehatan, sementara pengurangan kemiskinan merupakan aksi mendasar dalam kebijakan sosial.

Isu kesejahteraan dalam konteks visi misi walikota terpilih 2016-2021 selaras dengan unsur visi kota sejahtera, dan didukung melalui misi wareg, mapan, papan. Isu kesejahteraan memerlukan dukungan lintas sektor untuk intervensi program pembangunannya, yaitu dari bidang pemerintahan umum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang infrastruktur sebagai berikut.

1) Isu Kesejahteraan dari Bidang Pemerintahan Umum

Isu regulasi, penyediaan payung hukum daerah dan penegasan implementasi: (a) Kebijakan penanggulangan kemiskinan; (b) Jaminan Kesejahteraan Sosial dan kesejahteraan rakyat; (c) Regulasi untuk mengurangi risiko munculnya penyandang masalah sosial, misalnya: persyaratan operasi usaha kredit swasta, dan regulasi pelarangan pengemis dan pengamen; (d) Regulasi tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk memfasilitasi upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan sosial.

Isu perlindungan masyarakat, tantangannya adalah mengantisipasi bencana sosial yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Oleh karena itu, sangatlah penting membangun wawasan kebangsaan dari semua latar belakang kelompok masyarakat untuk mencegah timbulnya bencana sosial. Optimalisasi fungsi persandian juga penting untuk mencegah atau menurunkan risiko bencana sosial.

2) Isu Kesejahteraan dari Bidang Ekonomi

Isu kemiskinan: jaminan dan bantuan ekonomi bagi kelompok miskin. Tantangannya adalah meningkatkan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) produktif. Indikator yang akan dicapai dalam kelompok ini, mencakup 3 (tiga) hal, yaitu: (i) RTM memiliki keterampilan, (ii) RTM mampu bekerja, dan (iii) RTM

mampu berwirausaha secara mandiri. Targetnya merujuk pada RPJMN, terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi sekitar 4%-5% pada tahun 2019.

Isu ketahanan pangan dan perdagangan, tantangannya bagaimana meningkatkan produktivitas sumber pangan kota. Isu produktivitas hasil pertanian, peternakan, perikanan darat, ditekankan pada diversifikasi pengolahan hasil pertanian, peternakan, perikanan darat berbasis teknologi tepat. Aspek yang dipenuhi (1) ketersediaan, kecukupan, stabilitas, aksesibilitas, kualitas, kuantitas, keterjangkauan serta keamanan pangan secara berkesinambungan; (2) mengamankan stok cadangan pangan dan pengendalian harga daerah. Indikasi ketahanan pangan mencakup produksi dalam negeri dari hasil tanaman padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi dan produksi perikanan. Isu strategis bidang perdagangan adalah ketepatan distribusi dan stabilitas harga bahan bakar/energi, terutama LPG 3 kg.

3) Isu Kesejahteraan dari Bidang Infrastruktur

Isu fisik dan lingkungan, terutama menyangkut *degradasi* lingkungan meliputi isu kawasan kumuh, rumah tidak layak huni, rasio pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Kemiskinan Kota (*Urban Poverty*) diantaranya ditandai oleh adanya permukiman yang tidak layak huni (*slums*) dan permukiman informal yang menempati lahan yang bukan peruntukannya (*squatter settlements*) dan terbatasnya akses terhadap pemenuhan lahan hunian, rumah yang layak dan sehat, infrastruktur dan sarana prasarana kota. Bagaimana mewujudkan kota untuk menuju Solo Bebas Kumuh atau “*Cities Without Slums*” menjadi isu strategis. Indikasi sasarannya menurunkan jumlah rumah tangga kumuh yang memiliki RTLH (tahun 2105 ada 4.540 unit), meningkatkan cakupan rumah sehat (di tahun 2015 ada 73%), meningkatkan cakupan kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan (pada tahun 2015 ada 62,19%), meningkatkan cakupan rumah tangga yang dapat mengakses air bersih (tahun 2015 ada 79,61%), meningkatkan cakupan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi dasar (pada tahun 2015 ada 97,10%), dan meningkatkan pengelolaan limbah komunal pada kawasan permukiman padat perkotaan.

Akses terhadap pemenuhan lahan dan perumahan (*access to affordable land and housing*) juga merupakan target penurunan kemiskinan. Tantangannya adalah peningkatan kualitas padat kumuh melalui pembangunan vertikal rumah susun (rusunawa atau rusunami) dan peremajaan kota (*urban renewal*) dan relokasi (*resettlement*) hunian ilegal.

4) Isu Kesejahteraan dari Bidang Sosial Budaya

Isu kesehatan, yang krusial adalah (1) pengurangan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBa), (2) pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular (Demam Berdarah, TB Paru dan HIV/AIDS), (3) peningkatan mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang dapat dijangkau masyarakat tidak mampu; (4) mengoptimalkan pelayanan RSUD dengan model BLUD, dan peningkatan pelayanan kesehatan dasar; (5) kecukupan tenaga medis dan non medis sesuai standar kebutuhan teknis; (6) penguatan partisipasi masyarakat dalam membangun budaya perilaku hidup bersih dan sehat serta penyelenggaraan layanan pos pelayanan terpadu berbasis masyarakat; (7) penyelenggaraan layanan kesehatan berbasis teknologi informasi

Isu pendidikan, implementasi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun baik bagi laki-laki dan perempuan secara adil dan setara sebagai bagian dari Program Indonesia Pintar melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan, dan memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Pendidikan non formal juga strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecakapan hidup kompetitif untuk meningkatkan peluang usaha dan pendapatan. Pendidikan PAUD masih perlu diperluas cakupannya untuk membantu kualitas pendidikan usia dini. Kualitas tenaga pendidik dengan kualifikasi yang tersertifikasi perlu dioptimalkan substansi implemenntasinya supaya benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan anak didik. Penguatan masyarakat gemar membaca dan belajar menjadi isu strategis menuju masyarakat cerdas dan melek informasi.

Isu ketenagakerjaan, tantangan angka pengangguran terbuka sebanyak 5,95% di tahun 2015, tantangan menciptakan lapangan kerja, mata pencaharian berkelanjutan dan pertumbuhan berkeadilan melalui pengurangan jumlah kaum muda yang menganggur. Peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan pendidikan non formal dalam rangka membekali angkatan kerja dengan keahlian di bidangnya guna menekan angka pengangguran terbuka di masa mendatang.

Isu kesejahteraan sosial, penguatan kebijakan pelayanan bagi PMKS secara terpadu dan lintas sektoral, untuk meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS. Rasio jumlah dan kompetensi tenaga pengelola serta pelaksana program KB di Kota Surakarta diperlukan untuk memperluas cakupan peserta Keluarga Berencana; dan kesehatan seksual dan reproduksi, menuju keluarga sejahtera di Kota Surakarta. Isu kecukupan ruang publik sesuai kebutuhan masyarakat penting untuk mendukung kesejahteraan sosial dan rohani masyarakat. Kecukupan sarana prasarana olahraga menjadi bagian dari pemenuhan ruang publik yang penting.

Isu kesejahteraan sosial juga mencakup kesejahteraan rohani atau spiritual. Kehadiran sarana ibadah dan kebebasan menjalankan ibadah bagi semua kelompok pemeluk agama dan kepercayaan kepada Tuhan perlu mendapatkan perlindungan secara adil. Isu kesejahteraan spiritual sebagian terwakili dari tantangan peningkatan kualitas sarana peribadatan dan kebebasan penyelenggaraan kegiatan keagamaan, serta pembinaan kerohanian bagi semua kelompok agama dan kepercayaan kepada Tuhan.

Isu perempuan dan anak, dengan tantangan (1) mengeliminasi diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik; (2) peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan melalui sistem perlindungan dan kesejahteraan sosial terpadu keluarga, sebagai bagian untuk mengakhiri kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, melibatkan *collaborative* dan koordinasi lintas sektoral, serta partisipasi masyarakat; (3) menguatkan partisipasi masyarakat melanjutkan perwujudan kota layak anak.

d. Lingkungan Hidup: Sehat, Selamat, Bermartabat

Faktor terpenting dalam permasalahan lingkungan tidak hanya faktor alam, namun juga besarnya populasi manusia (laju pertumbuhan penduduk). Pertumbuhan penduduk memiliki arti pertumbuhan kawasan urban, kebutuhan tambahan produksi pangan, dan peningkatan kebutuhan energi. Masing-masing kebutuhan berimplikasi pada lingkungan, mulai dari pencemaran lingkungan hingga penyakit-penyakit menular karena lingkungan.

Isu lingkungan hidup dalam konteks visi misi walikota terpilih selaras dengan unsur visi sejahtera didukung misi waras, mapan, dan papan. Isu lingkungan hidup perlu ditangani lintas sektoral, karena saling terkait antara aspek regulasi kebijakan, aspek perilaku, dan aspek daya dukung serta daya tampung lingkungan.

1) Isu Lingkungan dari Bidang Infrastruktur

Isu sampah, RTH, limbah, air bersih, sanitasi, genangan dan banjir. Isu strategis lingkungan hidup adalah mengatasi degradasi lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan dan mengatasi perubahan iklim di Kota Surakarta.

Peningkatan kepadatan bangunan akibat pertambahan penduduk berimplikasi pada berkurangnya daerah-daerah resapan air dan krisis air tanah. Kondisi sistem drainase yang buruk di perkotaan memperparah terjadinya genangan dan banjir yang dapat membawa korban jiwa dan harta serta berbagai wabah penyakit. Kondisi topografis Kota Surakarta yang rawan terhadap meluapnya air Sungai Bengawan Solo juga menjadi salah satu penyebab banjir. Masalah eksploitasi energi, mengakibatkan pemanasan global, perubahan iklim global, dan kecenderungan peningkatan kejadian banjir.

Ruang terbuka hijau kota yang memenuhi persyaratan ekologi, sosial dan ekonomi, menjadi isu strategis karena

merupakan upaya perlindungan konservasi sumberdaya alam, aktivitas interaksi sosial dan ekonomi. Ruang terbuka hijau kota juga akan menyerap emisi gas kendaraan bermotor yang semakin tinggi akibat kemacetan pusat kota.

Isu pencemaran limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) mengakibatkan pencemaran air dan tanah, wabah beberapa penyakit akan meningkat pula. Penyebabnya: (1) ketidaktegasan pengendalian regulasi kepada pelaku usaha untuk memiliki dan menaati dokumen lingkungan seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UKL dan UPL; (2) kurangnya kesadaran masyarakat dan ketegasan kepada industri kecil untuk mengolah limbahnya dengan standar pengolahan *waste water treatment*.

Isu strategis persampahan adalah peningkatan tahapan proses mengurangi sampah dari sumber penghasil sampah menuju TPA sampai mencapai *concept Zero Waste*. Tantangan yang mendesak diselesaikan antara lain: (1) pemenuhan rasio ketersediaan tempat pembuangan sampah (TPS) berdasarkan satuan jumlah penduduk (2,5 per satuan penduduk pada tahun 2015); (2) penanganan tempat pembuangan akhir yang *overdumping*; (3) Pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) belum maksimal dilakukan di kawasan-kawasan permukiman; (4) Program Kampung Iklim (Kota Hijau) dan program pro lingkungan lainnya, seperti *Car Free Day* setiap hari Minggu di beberapa kawasan kota.

2) Isu Lingkungan Hidup dari Bidang Ekonomi

Isu Industri kreatif, yang ramah lingkungan, mengembangkan kelompok kreasi usaha rumah tangga menghasilkan karya dari program pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) untuk menambah penghasilan keluarga dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Misalnya: pembuatan kerajinan tangan dari sampah plastik.

3) Isu Lingkungan dari Bidang Pemerintahan Umum

Dari ranah isu regulasi, perlu penegasan *implementasi* kebijakan tata ruang wilayah dan tata guna lahan, kebijakan kebersihan dan ketertiban kota, dan kebijakan pro lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Isu perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat. Isu strategisnya adalah menggeser paradigma dari penanggulangan bencana menuju pengelolaan bencana. Fokus tidak hanya menangani bencana, namun juga di tanah mitigasi bencana keseluruhan manajemen risiko yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana. Isu perlindungan antisipasi bencana termasuk isu kecukupan sarana prasarana antisipasi bencana dan penanggulangan bencana, seperti kualitas sistem drainase kota, kecukupan hidran kota, kendaraan pemadam kebakaran, dan sejenisnya.

4) Isu Lingkungan dari Bidang Sosial Budaya

Isu pendidikan dan kesehatan, perilaku masyarakat masyarakat untuk hidup sehat dan tertib mendukung lingkungan sehat. Misalnya, gerakan membuang sampah pada tempat yang tepat, membuang limbah pada tempat yang tepat.

e. Kesenjangan Wilayah: Pemerataan yang Berkeadilan dalam Keterpaduan

Pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah merupakan masalah penting yang harus diatasi secara nasional maupun daerah karena (1) upaya pemerataan dan penciptaan kemakmuran yang merata adalah menjadi tugas pemerintah dan (2) ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antarwilayah dan kawasan sangat berisiko pada timbulnya bencana sosial.

Inti dari isu kesenjangan wilayah adalah pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Keterkaitan isu tersebut dalam konteks visi misi walikota terpilih mendukung perwujudan unsur visi kota sejahtera yang didukung melalui misi mapan dan papan.

Tantangan mengatasi isu ini adalah menyinergikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan antar-SKPD dalam menggarap wilayah-wilayah strategis tertinggal di Solo Utara, menyangkut keterpaduan penataan ruang dengan pembangunan infrastruktur, sarana prasarana dan transportasi yang inklusif, tidak diskriminatif, ramah bagi semua kelompok masyarakat, dari sisi gender, usia, dan perbedaan disabilitas menjadi tantangan dalam mengatasi isu kesenjangan wilayah.

1) Isu dari Bidang **Infrastruktur**

Isu dari bidang infrastruktur menyangkut isu prasarana, perencanaan dan pemanfaatan ruang, transportasi, dan infastruktur. Secara umum, pemerataan pembangunan antardaerah merupakan arahan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah melalui upaya penyebaran kegiatan ekonomi, sosial budaya, penduduk dan pusat-pusat kegiatan.

Terjadi disparitas pertumbuhan antara kawasan Solo Bagian Selatan dan kawasan Solo Bagian Utara (RTRW). Intensitas pemanfaatan ruang Kota Surakarta Bagian Selatan sudah sangat padat dan ruang terbuka untuk umum (*public space*) sangat terbatas. Penyediaan infrastruktur dan perhubungan seperti jalan, jembatan, akses bagi pejalan kaki, akses bagi pesepeda, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan transportasi bagian selatan sudah terpenuhi.

Sementara kawasan utara mengalami ketertinggalan karena kurangnya pengembangan aksesibilitas perhubungan menuju ke arah utara. Dalam dokumen RTRW kawasan utara ditetapkan sebagai kawasan strategis Kota Surakarta termasuk kawasan tertinggal yang ke depan akan selalu didorong perkembangannya dengan pemenuhan infrastruktur, sarana prasarana wilayah dan sarana perhubungan. Pengembangan perlu diarahkan melalui

perencanaan tata ruang, pemanfaatan, dan pengendaliannya pada kawasan strategis kawasan tertinggal.

2) Isu dari Bidang Pemerintahan Umum

Isu regulasi, keterpaduan implementasi rencana dari dokumen RTRW Kota Surakarta, Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum (RISPAM) Kota Surakarta, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (RP2KP) Kota Surakarta, Peraturan Daerah Bangunan Gedung, Strategi Sanitasi Kota (SSK) Surakarta, SPPIP Kota Surakarta, Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kota Surakarta, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Surakarta (RPIJ2M Kota Surakarta).

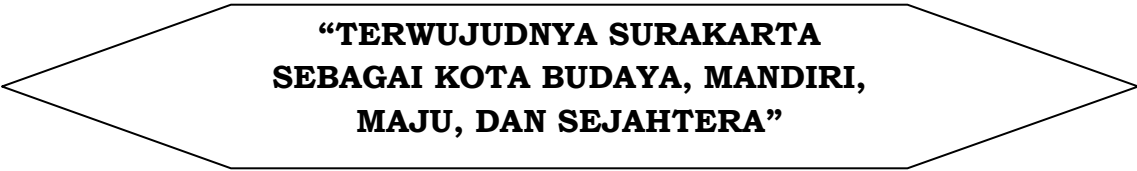
Ketegasan pembangunan infrastruktur entitas kawasan diprioritaskan pada Kawasan Strategis Kota (KSK) yang ditetapkan dalam RTRW (RPIJ2M Kota Surakarta).

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD (Sasaran Pokok Prioritas Pembangunan Tahap III dan Tahap IV) dan RPJMN dengan mempertimbangkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW, yang didalamnya memuat Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

A. Visi

Visi Walikota-Wakil Walikota Surakarta terpilih Tahun 2016-2021, ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021 adalah :



Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Budaya

Surakarta sebagai **Kota Budaya** mengandung maksud bahwa pengembangan Kota Surakarta memiliki wawasan budaya dalam arti luas, dimana seluruh komponen masyarakat dalam setiap kegiatannya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, berkepribadian, demokratis, rasional , berkeadilan sosial, menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) dan menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian unsur masyarakat dalam pengembangan Kota Surakarta sebagai **Kota Budaya** memiliki dimensi utama, yaitu secara individu memiliki moral dan perilaku terpuji, budi pekerti luhur dan secara sosial memiliki budaya komunikasi yang baik, kekerabatan yang akrab, menjunjung tinggi kerukunan dan harmoni sosial. Selain itu, kota budaya juga berarti pengembangan kota terintegrasi dengan upaya melestarikan, mempertahankan, dan mengembangkan seni dan budaya yang telah ada serta melindungi cagar budaya. Penjabaran Visi Kota Budaya akan diterjemahkan dalam Misi **Wasis**, **Mapan**, dan **Papan**, dengan indikator sebagai berikut :

MISI	TUJUAN	INDIKATOR
Wasis	Terwujudnya masyarakat yang cakap mengupayakan pelestarian warisan karya budaya, adat istiadat, nilai-nilai seni budaya, serta prestasi pemuda dan olah raga	1. Tingkat aktualisasi pelestarian seni dan budaya (%) 2. Tingkat prestasi pemuda dan olah raga (%)

MISI	TUJUAN	INDIKATOR
Mapan	Meningkatnya ketertiban, keamanan, penegakan hukum dan hak asasi manusia serta harmoni sosial masyarakat	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
Papan	Meningkatnya sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang berkualitas, merata, manusiawi, berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Persentase Sarana dan Prasarana (%): 1. kegiatan sosial dan budaya yang representatif 2. kegiatan ekonomi yang representatif

2. **Mandiri**

Mandiri dalam visi dapat diartikan bahwa daerah mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengandalkan dan mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki serta proaktif membangun jejaring dengan semua pemangku kepentingan terkait. Kemandirian dapat terwujud melalui pembangunan yang mengarah kepada kemajuan ekonomi yang bertumpu kepada potensi yang dimiliki dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan. Kemandirian daerah diupayakan melalui penguatan kemampuan inovatif pemerintah daerah, sosial dan budaya serta penguatan keberdayaan masyarakat Kota Surakarta. Penjabaran Visi Mandiri akan diterjemahkan dalam Misi **Wasis**, **Wareg**, dan **Mapan**, dengan indikator sebagai berikut :

MISI	TUJUAN	INDIKATOR
Wasis	Terwujudnya Pendidikan untuk semua yang berkarakter, unggul, dan berkeadilan	Harapan Lama Sekolah (tahun)
Wareg	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat jasmani dan rohani	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2. Tingkat Kemiskinan (%) 3. Indeks Gini 4. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)
Mapan	Terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis <i>E-Government</i>	Rata rata nilai survey kepuasan masyarakat

3. **Maju**

Maju diterjemahkan sebagai kondisi Kota Surakarta dengan masyarakatnya yang memiliki ciri-ciri keunggulan. Indikator keunggulan dapat ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya, dan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kreatif. Keunggulan masyarakat dilandasi oleh kepribadian masyarakat yang berakar dan tumbuh dari kehidupan bangsa Indonesia yang adiluhung jauh sebelum berdirinya Negara Republik Indonesia, serta sikap dan perilaku gotong royong sehingga mampu mengembangkan daya cipta, rasa, dan karsanya untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Ditinjau dari aspek sosial dan kependudukan, indikator kemajuannya antara lain ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang kecil dan dengan derajat kesehatan penduduk yang lebih tinggi, tingginya kualitas pelayanan sosial, serta tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pembangunan.

Ditinjau dari aspek ekonomi kemajuan antara lain ditandai dengan penduduk memiliki kesempatan bekerja yang lebih terbuka, berkembangnya sektor industri yang beragam, semakin tingginya tingkat kemakmuran dan pemerataannya. Keterpaduan berbagai unsur ekonomi yang mampu menghasilkan efek ganda dalam mendorong semakin majunya perekonomian daerah, disamping semakin tertata dan berfungsinya dengan baik berbagai lembaga dan pranata ekonomi dalam mendukung kemajuan dan stabilitas perekonomian.

Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang baik, kemajuan juga ditandai dengan kualitas infrastruktur semakin mantap, sistem dan kelembagaan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi, akses pelayanan publik dan penegakan hukum yang adil dan inklusif sehingga mendukung mantapnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta menurunnya tingkat pelanggaran hak asasi manusia. Keadilan dan inklusif dilihat dari sisi gender, kelompok sosial ekonomi, maupun kelompok kewilayahan. Penjabaran Visi Maju akan diterjemahkan dalam Misi **Waras, Wasis, Wareg, Mapan, dan Papan**, dengan indikator sebagai berikut :

MISI	TUJUAN	INDIKATOR
Waras	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Wasis	Terwujudnya Pendidikan untuk semua yang berkarakter, unggul, dan berkeadilan	Rata-rata lama sekolah (tahun)
Wareg	Terwujudnya perekonomian kota yang maju, kuat dan mandiri	1. Pertumbuhan ekonomi/ PDRB (%) 2. Tingkat inflasi (%)
Mapan	Meningkatnya kinerja pembangunan daerah berwawasan kependudukan dan keberlanjutan lingkungan	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan (%) : RPJMD RKPD
Papan	Tersedianya permukiman	Persentase luasan Kawasan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR
	dan infrastruktur perkotaan yang berkualitas, merata, manusiawi, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan siaga bencana	Kumuh (%)

4. Sejahtera

Sejahtera mencakup kesejahteraan lahir dan batin. Sejahtera lahir berarti kebutuhan sandang, pangan dan papan, terpenuhinya kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan tersedianya lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita serta kemampuan daya beli. Sejahtera batin berarti ketenteraman, keamanan, kenyamanan secara spiritual, serta kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan. Penjabaran Visi Sejahtera akan diterjemahkan dalam Misi **Waras, Wasis, Wareg, Mapan, dan Papan**, dengan indikator sebagai berikut :

MISI	TUJUAN	INDIKATOR
Waras	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, promosi dan preventif kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani	Angka Harapan Hidup (tahun)
Wasis	Terwujudnya Pendidikan untuk semua yang berkarakter, unggul, dan berkeadilan	1. Rata-rata lama sekolah (tahun) 2. Harapan Lama Sekolah (tahun)
Wareg	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat jasmani dan rohani	1. Pendapatan per kapita (rupiah) 2. Pengeluaran per kapita (rupiah)
Mapan	Meningkatnya kinerja pembangunan daerah berwawasan kependudukan dan keberlanjutan lingkungan	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan (%) : RPJMD RKPD
Papan	Tersedianya permukiman dan infrastruktur perkotaan yang berkualitas, merata, manusiawi, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan siaga bencana	Infrastuktur Kota dalam kondisi baik (%)

Visi tersebut bermakna bahwa pembangunan Kota Surakarta tahun 2016–2021 akan mewujudkan tatanan kota dan tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kepribadian

bangsa (**kota budaya**), mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki dan proaktif membangun jejaring (**mandiri**), memiliki ciri-ciri keunggulan kompetitif (**maju**), dan terpenuhi segala kebutuhan jasmani dan rohani dalam kondisi kota yang kondusif untuk tempat tinggal maupun bekerja (**sejahtera**).

B. Misi

Misi merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus ada dan bagaimana komitmen terus dijaga oleh segenap *stakeholders* selaku pemangku kepentingan dalam pembangunan. Misi Kepala Daerah Terpilih tahun 2016-2021 adalah “**Mewujudkan Masyarakat Surakarta yang Waras, Wasis, Wareg, Mapan, dan Papan.**” Penjabaran misi RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 dilakukan dengan menyelaraskan misi kepala daerah terpilih dengan misi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025. Penjabaran misi pembangunan Kota Surakarta Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut:

1. Waras

Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang sehat.

2. Wasis

Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, mandiri, dan berkarakter menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan melestarikan warisan budaya daerah.

3. Wareg

Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkeadilan mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani.

4. Mapan

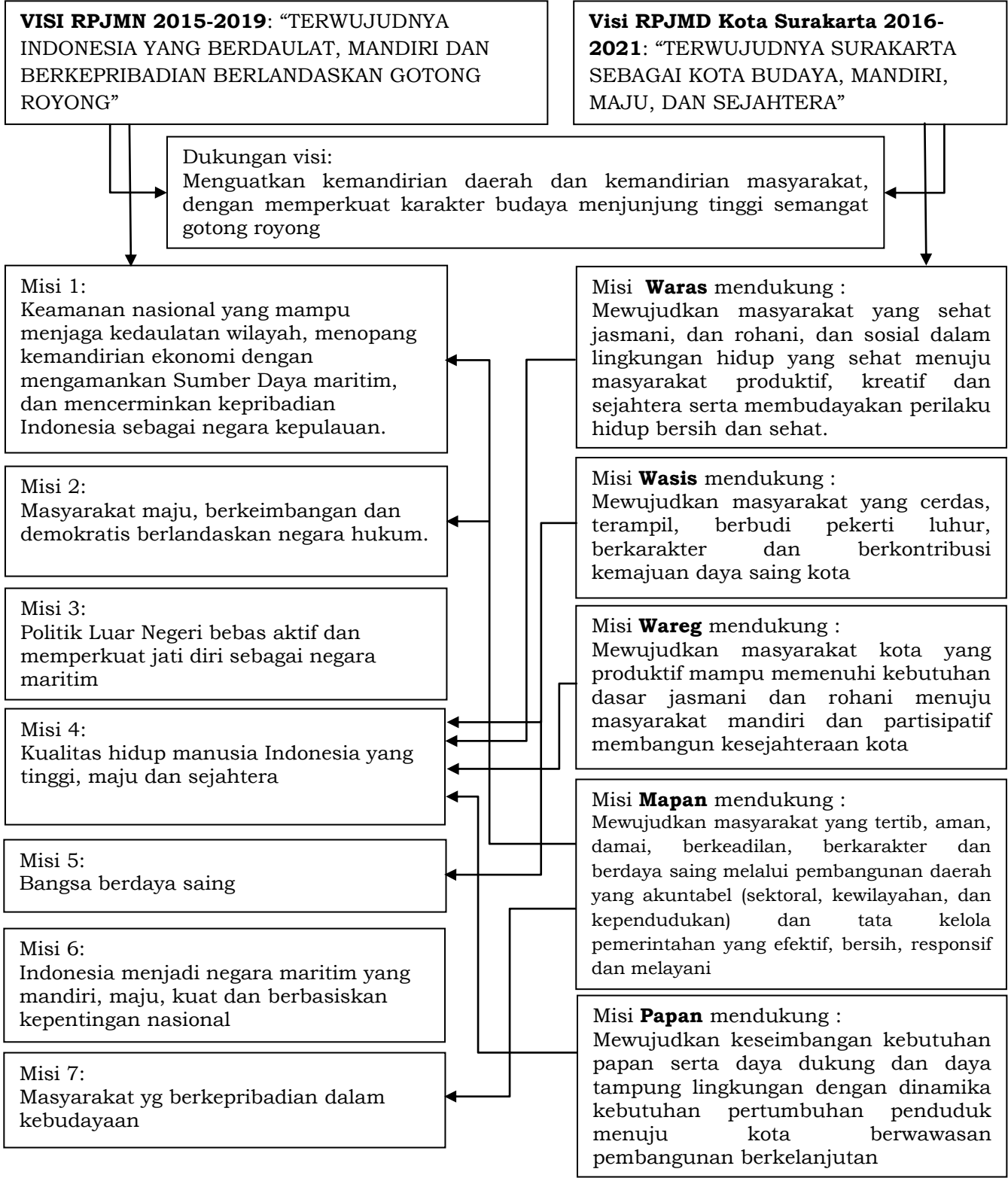
Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter, dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif dan melayani.

5. Papan

Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, tempat untuk berusaha dan berkreasi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya.

C. Keterkaitan Visi-Misi Walikota Tahun 2016-2021 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penjabaran visi misi Walikota Surakarta di atas sebagai dasar perumusan sasaran hasil pembangunan daerah yang akan diwujudkan kurun 2016-2021. Penjabaran misi ke dalam tujuan dan sasaran strategis daerah didesain untuk mendukung pencapaian sasaran pokok RPJPD Kota Surakarta tahun 2005-2025, prioritas RPJMN tahun 2015-2019, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018. Keterkaitan dukungan tersebut dijelaskan melalui bagan berikut :



Gambar 5.1
Skema keterkaitan Visi-Misi RPJMN 2015-2019 dengan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021

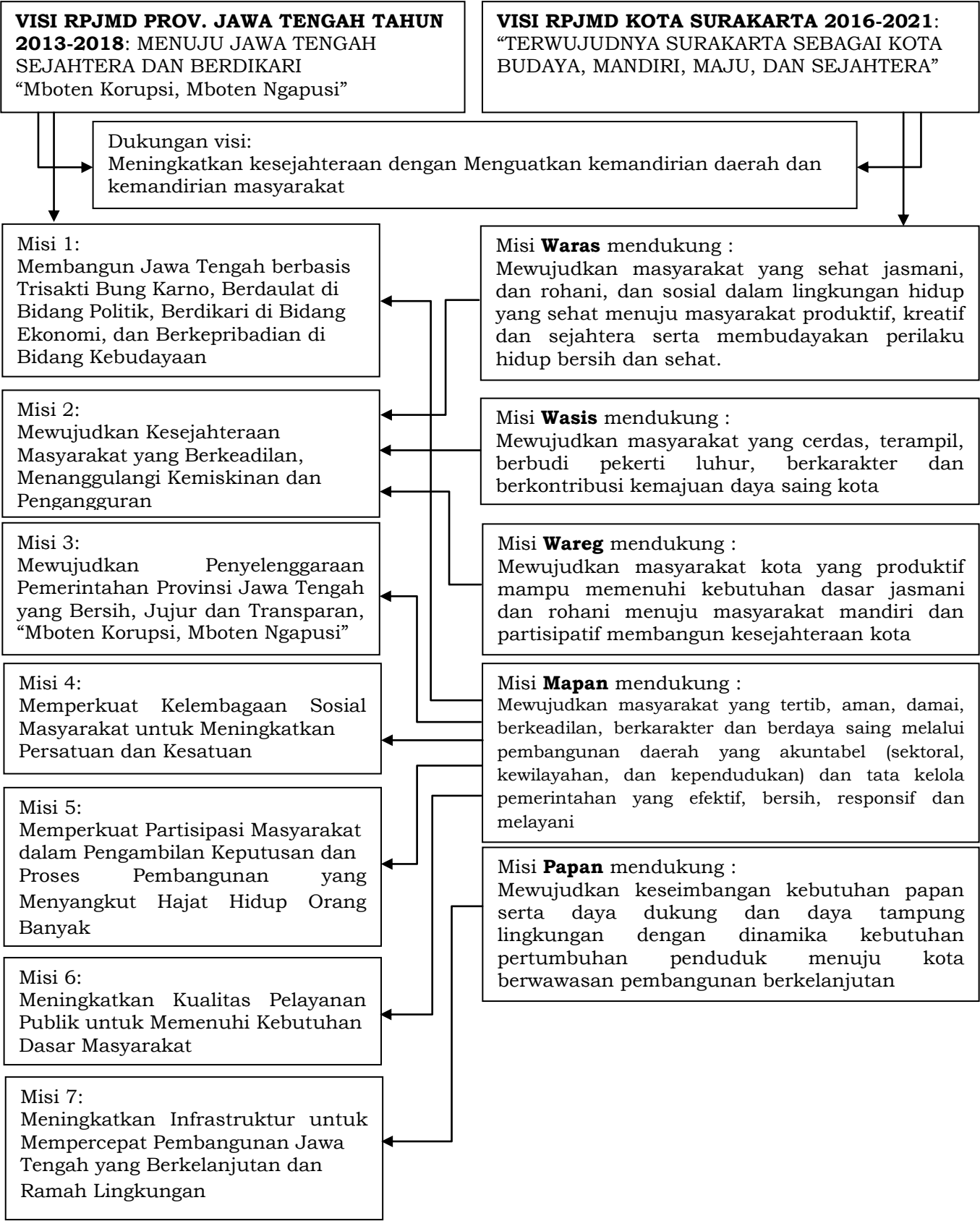
Sinkronisasi agenda prioritas nasional ke dalam penjabaran visi misi Kota Surakarta dikembangkan dari kerangka persandingan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Sinkronisasi RPJMN 2014–2019 dengan RPJMD Kota Surakarta
Tahun 2016–2021

9 Agenda Prioritas RPJMN	Penjabaran dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021
Agenda 1: Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara.	Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari Misi Mapan dengan fokus peningkatan kualitas sistem pemberdayaan masyarakat yang cerdas mendukung kondusivitas kota.
Agenda 2: Akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.	Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari Misi Mapan dengan fokus akuntabilitas tata kelola pemerintahan, integritas aparatur, dan kapasitas fiskal daerah.
Agenda 3: Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.	Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari Misi Papan dengan fokus mengurangi kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok.
Agenda 4: Akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.	Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari Misi Mapan dengan fokus akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan integritas aparatur.
Agenda 5: Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera.	Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari : 1. Misi Waras 2. Misi Wasis 3. Misi Wareg
Agenda 6: Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.	Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari: 1. Misi Wareg dengan fokus peningkatan produktivitas kota dan pendapatan per kapita masyarakat; 2. Misi Mapan dengan fokus peningkatan kualitas sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan akuntabel memperkuat kota pro investasi.
Agenda 7: Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.	Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari Misi Wareg dengan fokus peningkatan produktivitas kota dan pendapatan per kapita masyarakat.
Agenda 8: Akan melakukan revolusi karakter bangsa.	Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari elemen visi kota Budaya yang diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari : 1. Misi Wasis dengan fokus tujuan mendidik

9 Agenda Prioritas RPJMN	Penjabaran dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021
	<p>generasi muda yang terampil, berbudi pekerti luhur, dan berprestasi;</p> <p>2. Misi Mapan dengan fokus peningkatan kualitas sistem pemberdayaan masyarakat yang cerdas mendukung kondusivitas kota.</p>
<p>Agenda 9: Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.</p>	<p>Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari Misi Mapan dengan fokus peningkatan kualitas sistem pemberdayaan masyarakat yang cerdas mendukung kondusivitas kota.</p>

Sinkronisasi penjabaran Visi Misi RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Keterkaitan dukungan tersebut dijelaskan melalui bagan berikut :



Gambar 5.2
Skema keterkaitan Visi-Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dengan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021

Sinkronisasi Visi Misi RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 dengan RTRW Kota Surakarta Tahun 2011-2031, RPJPD kota Surakarta Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018:

Tabel 5.2
Sinkronisasi RTRW Kota Surakarta Tahun 2011–2031, RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005–2025 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dengan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016–2021

ARAH KEBIJAKAN		SASARAN	
RTRW 2011 - 2031	RPJPD 2005-2025	RPJMD PROV JATENG 2013-2018	RPJMD Kota Surakarta 2016-2021
<p>Kebijakan pengembangan struktur ruang :</p> <p>1. Pemantapan peran kota dalam sistem nasional Sebagai PKN, yang melayani kegiatan skala nasional;</p> <p>2. Pengembangan kota sebagai pusat pelayanan Kawasan Andalan Subosukowono-sraten dalam peningkatan ekonomi masyarakat kota</p>	<p>Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.</p>	<p>Sasaran dari tujuan 1: Meningkatnya demokratisasi, kesejahteraan dan nilai-nilai budaya berbasis ajaran Trisakti Bung Karno.</p> <p>Sasaran dari tujuan 2: Menurunnya angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka; Meningkatnya produktivitas masyarakat; Meningkatnya investasi; keadilan gender dan perlindungan perempuan dan anak; Penanganan PMKS.</p> <p>Sasaran dari tujuan 6: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pendidikan, budaya baca, kualitas lingkungan permukiman, infrastruktur pertanian dalam arti luas.</p>	<p>Diterjemahkan dalam penjabaran sasaran dari :</p> <p>1. Misi Wasis</p> <p>2. Misi Wareg</p> <p>3. Misi Mapan</p>
<p>Kebijakan pengembangan struktur ruang : Pemantapan peran kota dalam sistem nasional Sebagai PKN, yang melayani kegiatan skala nasional;</p>	<p>Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan umum,</p>	<p>Sasaran dari tujuan 3: Penyelenggara pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel, penegakan hukum, berorientasi pada pelayanan prima.</p> <p>Sasaran dari Tujuan 5: Meningkatnya ketepatan perencanaan pembangunan dan meningkatnya peran</p>	<p>Diterjemahkan dalam penjabaran sasaran dari Misi Mapan</p>

ARAH KEBIJAKAN	SASARAN		
RTRW 2011 - 2031	RPJPD 2005-2025	RPJMD PROV JATENG 2013-2018	RPJMD Kota Surakarta 2016-2021
		masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.	
Kebijakan Pengembangan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi sebagai kota budaya yang produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya keamanan dan ketertiban kota	Sasaran dari Tujuan 4: Menurunnya potensi konflik antar kelompok; memperkuat Pancasila sebagai dasar negara; Meningkatnya partisipasi politik masyarakat; lestari budaya Jawa Tengah pada semua aspek kehidupan	Diterjemahkan dalam penjabaran sasaran dari Misi Mapan
Kebijakan pengembangan pola ruang : pengembangan kawasan budidaya	Terwujudnya perekonomian daerah yang mantap	Sasaran dari tujuan 2: Menurunnya angka kemiskinan; Tingkat Pengangguran Terbuka; meningkatnya produktivitas masyarakat, meningkatnya investasi.	Diterjemahkan dalam penjabaran sasaran dari: 1. Misi Wareg 2. Misi Mapan
Kebijakan pengembangan pola ruang : pengembangan kawasan lindung	Terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat	Sasaran dari tujuan 7: Meningkatnya implementasi ramah lingkungan dalam setiap pembangunan; ketangguhan dalam penanggulangan bencana.	Diterjemahkan dalam penjabaran sasaran dari: 1. Misi Waras 2. Misi Papan
Kebijakan Pengembangan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi sebagai kota budaya yang produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya perlindungan sosial	Sasaran dari tujuan 2: Menurunnya angka kemiskinan; Tingkat Pengangguran Terbuka; meningkatnya produktivitas masyarakat, meningkatnya investasi, keadilan gender dan perlindungan perempuan dan anak, penanganan PMKS.	Diterjemahkan dalam penjabaran sasaran dari: 1. Misi Waras 2. Misi Wareg

ARAH KEBIJAKAN	SASARAN		
RTRW 2011 - 2031	RPJPD 2005-2025	RPJMD PROV JATENG 2013-2018	RPJMD Kota Surakarta 2016-2021
Kebijakan pengembangan struktur ruang : 1. Pemantapan peran kota dalam sistem nasional Sebagai PKN, yang melayani kegiatan skala nasional; 2. Pengembangan kota sebagai pusat pelayanan Kawasan Andalan Subosukowono-sraten dalam peningkatan ekonomi masyarakat kota	Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang cukup dan berkualitas	Sasaran dari tujuan 7: Meningkatnya daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi; infrastruktur komunikasi; implementasi ramah lingkungan dalam setiap pembangunan; ketangguhan dalam penanggulangan bencana.	Diterjemahkan dalam penjabaran sasaran dari Misi Papan

Sinkronisasi dengan sasaran prioritas tingkat nasional dan provinsi di atas menjadi dasar perumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021.

D. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dimasa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari 5 (lima) misi: Waras, Wasis, Wareg, Mapan, Papan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Keterkaitan misi, tujuan, sasaran, serta indikator tujuan dan sasaran strategis daerah ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator dalam Mencapai Visi
RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI 2015	KONDISI 2021	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI 2015	KONDISI 2021	URUSAN PERANGKAT DAERAH
Misi Waras : Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang sehat	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, promosi dan preventif kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani	Angka Harapan Hidup (tahun)	77	77,27	Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat jasmani dan rohani	1) Prosentase rumah tangga berperilaku pola hidup bersih dan sehat (PHBS) (%) 2) Prevalensi HIV-AIDS pada populasi dewasa 3) Persentase penanganan kasus gangguan jiwa berat (%) 4) Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada balita	53,17 0,015 100 1,95	80 0,010 100 1,80	PD Urusan Kesehatan
					Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan	1) Angka kematian ibu 2) Angka Kematian Bayi 3) Angka Kematian Balita 4) Angka kesakitan DBD	52,28 2,82 3,56 92,15	41,83 2,20 3,03 39,98	PD Urusan Kesehatan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI 2015	KONDISI 2021	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI 2015	KONDISI 2021	URUSAN PERANGKAT DAERAH
						5) Angka kesakitan TB 6) Proporsi Kasus Penyakit Tidak Menular 7) Tingkat Deteksi Dini Masyarakat (%) 8) Rasio rumah sakit	126 29,50 100 0,25	118 20,00 100 0,33	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	40,71	44,71	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan perilaku pelaku usaha yang peduli pada lingkungan sehat	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) (%)	44,44	77,77	PD Urusan Lingkungan Hidup
Misi Wasis: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, mandiri dan berkarakter menjunjung tinggi nilai-nilai	Terwujudnya Pendidikan untuk semua yang berkarakter, unggul, dan berkeadilan	1. Rata-rata lama sekolah (tahun) 2. Harapan Lama Sekolah (tahun)	10,36 14,14	10,83 15,37	Meningkatnya perluasan akses dan kualitas pendidikan masyarakat	1) APK : PAUD, SD, SMP 2) APK : SD, SMP 3) Angka Kelulusan	52,76 108,25 96,95 97,39 86,20	80 105 105 100 100	PD Urusan Pendidikan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI 2015	KONDISI 2021	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI 2015	KONDISI 2021	URUSAN PERANGKAT DAERAH
luhur dan melestarikan warisan budaya daerah						(AL) : SD, SMP	100 100	100 100	PD Urusan Perpustakaan
						4) Jumlah prestasi pendidikan (siswa, guru, sekolah) tingkat regional/ nasional/ internasional (buah)	30	60	
						5) Jumlah pengunjung perpustakaan / Taman Cerdas (orang)	450.020	942.024	
	Terwujudnya masyarakat yang cakap mengupayakan	1. Tingkat aktualisasi pelestarian seni dan	78,57	100	Terwujudnya masyarakat dan angkatan kerja yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing	1) Cakupan layanan pendidikan non formal (%) 2) Cakupan serapan tenaga kerja terampil (%)	2,18 68,75	3,87 79,91	PD Urusan Pendidikan PD Urusan Tenaga Kerja
					Meningkatnya pelestarian warisan karya budaya, adat	1) Rasio grup kesenian per 10.000 penduduk 2) Jumlah	6,80	7,05	PD Urusan Kebudayaan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI 2015	KONDISI 2021	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI 2015	KONDISI 2021	URUSAN PERANGKAT DAERAH
	pelestarian warisan karya budaya, adat istiadat, nilai-nilai seni budaya, serta prestasi pemuda dan olah raga	budaya (%) 2. Tingkat prestasi pemuda dan olah raga (%)	55,49	62,08	istiadat, nilai-nilai seni budaya	penyelenggaraan festival seni dan budaya (kegiatan)	34	15	
					Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	1) Persentase atlet cabang olahraga yang mempunyai prestasi tingkat regional/ nasional/ internasional (%)	80,98	82,15	PD Urusan Kepemudaan dan Olah raga
						2) Persentase pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional/ nasional/ internasional (%)	30	42	
Misi Wareg : Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri dan berkeadilan mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat jasmani dan rohani	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,12	72,92	Menurunnya PMKS	Persentase penanganan PMKS (%)	13	9,40	PD Urusan Sosial
		2. Tingkat Kemiskinan (%)	10,30	6,38	Terjaganya ketersediaan pangan yang terjangkau	1) Produksi padi (ton)	1.378	1.448	PD Urusan Pertanian
		3. Indeks Gini	0,351	0,299		2) Produksi hasil peternakan (ton)	3.834	4.298	
						3) Produksi budidaya ikan (ton)	36,23	46	PD Urusan Kelautan dan Perikanan
						4) Persentase	161,51	161,81	

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI 2015	KONDISI 2021	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI 2015	KONDISI 2021	URUSAN PERANGKAT DAERAH
dan rohani		4. TPT (Tingkat Penggangguran Terbuka) (%)	5,95	5,46		Ketersediaan pangan utama yang terjangkau (%)	69,77	89,15	PD Urusan Pangan
		5. Pendapatan per kapita (rupiah)	55.614.295,67	72.163.382,69		5) Tingkat Terlindunginya Konsumen (%)			PD Urusan Perdagangan
		6. Pengeluaran per kapita (rupiah)	13.604.000	16.697.250	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kewilayahan	1) Persentase jumlah Swadaya Masyarakat terhadap total Program pemberdayaan masyarakat kelurahan (%)	10	16	PD Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa
						2) Persentase transmigran yang diberangkatkan (%)	14,29	25	PD Urusan Transmigrasi
						3) Persentase klaster Industri yang berkembang (%)	64,29	100	PD Urusan perindustrian
					Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1) Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	53,69	53,75	PD urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
						2) Cakupan perempuan dan	100	100	

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI 2015	KONDISI 2021	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI 2015	KONDISI 2021	URUSAN PERANGKAT DAERAH
						anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)			
					Meningkatnya kesempatan kerja	1) Pencari kerja yang ditempatkan (%)	72,10	85,82	PD Urusan Tenaga Kerja
						2) Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM yang dibina (%)	0	12,03	PD Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						3) Persentase wirausaha baru (%)	0	42	
	Terwujudnya perekonomian kota yang maju, kuat dan mandiri	1. Pertumbuhan ekonomi/ PDRB (%) 2. Tingkat inflasi (%)	5 ± 1 2 ± 1	6 ± 1 3 ± 1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	11,06	7,00	Fungsi penunjang urusan pemerintahan (Keuangan)
					Meningkatnya jumlah investasi	Persentase Pertumbuhan Investasi (%)	19,30	6,28	PD urusan Penanaman Modal
					Berkembangnya ekonomi kreatif dan kota tujuan wisata seni dan	1) Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	4.142.785	5.750.000	PD urusan pariwisata

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI 2015	KONDISI 2021	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI 2015	KONDISI 2021	URUSAN PERANGKAT DAERAH
					budaya	2) Persentase Penerapan inovasi (%)	0	29,41	PD Penunjang urusan pemerintahan: penelitian dan pengembangan
Misi Mapan: Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif dan melayani	Terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis <i>E-Government</i>	Rata rata nilai survey kepuasan masyarakat	62,51 (baik)	82 (amat baik)	Meningkatnya pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi (Solo Smart City)	1) Persentase SKPD yang melaksanakan integrasi aplikasi <i>E-governance</i> (%)	0	100	PD urusan komunikasi dan informatika
						2) Persentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku (%)	30,53	100	PD urusan kearsipan
						3) Ketersediaan SOP persandian (%)	0	100	PD Urusan Persandian
						4) Persentase informasi keluaran aktivitas DPRD yang dipublikasikan berbasis teknologi informasi sesuai SOP yang berlaku (%)	82,37	95,03	PD Fungsi lainnya kewenangan dukungan fungsi DPRD
					Meningkatnya	1) Maturitas SPIP	2,48	3,2	PD Fungsi

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI 2015	KONDISI 2021	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI 2015	KONDISI 2021	URUSAN PERANGKAT DAERAH
					Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	(Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Pemerintah Kota Surakarta 2) Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah 3) Persentase pelayanan kecamatan yang memenuhi standar ISO 9001:2008 (%) 4) Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur (%) 5) Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	(level berkembang) WTP 43 0,087 91,28	(level terkelola dan terukur) WTP 91,2 0,022 95,73	Penunjang Pengawasan Fungsi penunjang urusan pemeritahan (Keuangan) PD Fungsi Penunjang Kewilayahan PD urusan Kepegawaian serta pendidikan dan latihan PD administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI 2015	KONDISI 2021	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI 2015	KONDISI 2021	URUSAN PERANGKAT DAERAH
						(%) 6) Persentase aset yang bersertifikat (%)	81,93	94,84	PD Urusan Pertanahan
	Meningkatnya kinerja pembangunan daerah berwawasan kependudukan dan keberlanjutan lingkungan	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan (%) : RPJMD RKPD	80 63	80 80	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan	1) Persentase ketersediaan data perencanaan sesuai Standar Kebutuhan Layanan Data (%)	61,76	100	PD Urusan Statistik
						2) Hasil AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) bernilai Baik : Nilai EKPPD / LPPD Hasil Evaluasi LKjIP	3 (T) 51,21 (CC)	3,4 (ST) 93 (AA)	Semua urusan PD dengan koordinator PD fungsi Penyusunan kebijakan, koordinasi administratif dan pelayanan administratif (Sekretariat Daerah)
					Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan	1) Cakupan Peserta KB Aktif (%) 2) Rata-rata Laju	66,83 0,9	69,8 0,6	PD pengendalian penduduk dan keluarga

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI 2015	KONDISI 2021	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI 2015	KONDISI 2021	URUSAN PERANGKAT DAERAH
					daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pertumbuhan Penduduk (%)			berencana
	Meningkatnya ketertiban, keamanan, penegakan hukum dan hak asasi manusia serta harmoni sosial masyarakat	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	79,33	96,67	Menurunnya konflik antargolongan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan (%)	40	100	PD Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
					Menurunnya pelanggaran produk hukum daerah	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda (%)	76,19	88,57	
Misi Papan : Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, tempat untuk berusaha dan berkreasi, pembangunan infrastruktur	Tersedianya permukiman dan infrastruktur perkotaan yang berkualitas, merata, manusiawi, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan siaga	1. Persentase luasan Kawasan Kumuh (%)	8,16	0	Meningkatnya ketersediaan perumahan yang layak huni dan berkurangnya permukiman kumuh	1) Persentase Penurunan RTLH (%)	100	70,74	PD Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
		2. Infrastuktur Kota dalam kondisi baik (%)	76,05	87,61		2) Persentase Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (%)	91,84	100	
						3) Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih (%)	80,99	100	
						4) Persentase Rumah tangga bersanitasi	97,10	100	

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI 2015	KONDISI 2021	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI 2015	KONDISI 2021	URUSAN PERANGKAT DAERAH
dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya	bencana					(%)			
					Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan yang berkualitas	1) Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	73,37	90,05	PD Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
						2) Persentase Panjang jembatan dalam Kondisi baik (%)	85	91	
						3) Persentase Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (%)	69,77	81,77	
						4) Persentase operasional koridor BST yang terlayani	14,29	100	
					Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah (%)	95,90	97,32	PD Urusan Lingkungan Hidup
					Meningkatnya kesiapsiagaan sistem antisipasi risiko kebencanaan	Persentase kelurahan tangguh bencana (%)	0	23,53	PD Urusan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI 2015	KONDISI 2021	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI 2015	KONDISI 2021	URUSAN PERANGKAT DAERAH
									masyarakat
					Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Publik	1) Persentase penambahan luasan ruang publik (%)	22,03	100	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						2) Rasio ruang Terbuka hijau publik	9,72	10	PD Urusan Lingkungan Hidup
	Meningkatnya sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang berkualitas, merata, manusiawi, berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Persentase Sarana dan Prasarana (%): 1. kegiatan sosial dan budaya yang representatif	70,33	85,77	Tersedianya sarana prasarana ekonomi yang berdaya saing	1) Persentase Pasar Rakyat yang representatif (%)	63,64	77,27	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						2) Persentase tersedianya Prasarana Umum di kluster Ekonomi Kreatif (%)	4,00	28,00	
		2. kegiatan ekonomi yang representatif	33,82	52,64	Tersedianya sarana prasarana sosial budaya	Persentase prasarana sosial budaya yang representatif (%) : 1) Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 2) Persentase Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	41,86 94,12	59,30 100	PD urusan kebudayaan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI 2015	KONDISI 2021	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI 2015	KONDISI 2021	URUSAN PERANGKAT DAERAH
						yang respresentatif 3) Persentase tempat ibadah yang dibina	45	92	PD Urusan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kota Surakarta dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

A. Strategi

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Surakarta Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan melalui 5 (lima) misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang menurut misi sebagai berikut:

1. Strategi dari Misi Waras

Rangkaian strategi dari misi WARAS, diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani maupun secara sosial dalam lingkungan hidup yang sehat.

Tabel 6.1
Sasaran dan Strategi Misi Waras

No	Sasaran	Strategi
	Misi Waras: Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani, rohani, dan sosial dalam lingkungan hidup yang sehat.	
1.	Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat jasmani dan rohani	Promosi dan edukasi PHBS menuju penguatan upaya kesehatan preventif
2.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan jumlah fasilitas cakupan dan jenis layanan kesehatan
3.	Meningkatnya perilaku masyarakat dan pelaku usaha yang peduli pada lingkungan sehat	Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

Salah satu strategi untuk mewujudkan masyarakat yang sehat adalah dengan mengembangkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat yang dimulai dari meningkatnya kesadaran individu, keluarga, dan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat secara jasmani dan rohani yang didukung dengan peningkatan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan layanan kesehatan sehingga kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan meningkat. Selain itu perwujudan masyarakat yang sehat juga harus disertai dengan peningkatan perilaku masyarakat dan pelaku usaha yang peduli pada lingkungan sehat.

2. Strategi Misi Wasis

Rangkaian strategi dari misi WASIS, diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, mandiri, dan berkarakter dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan melestarikan warisan budaya daerah.

Tabel 6.2
Sasaran dan Strategi Misi Wasis

No	Sasaran	Strategi
	Misi Wasis: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, mandiri dan berkarakter menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan melestarikan warisan budaya daerah	
4.	Meningkatnya perluasan akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Perluasan akses dan penguatan mutu pendidikan formal dan non formal yang berkarakter unggul
5.	Terwujudnya masyarakat dan angkatan kerja yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing	Mengintegrasikan kurikulum karakter unggul dalam pengembangan media pendidikan
6.	Meningkatnya pelestarian warisan karya budaya, adat istiadat, nilai-nilai seni budaya	Memasyarakatkan budaya inovatif dan kreatif melalui pendidikan luar sekolah dan masyarakat berbasis nilai adat istiadat dan seni budaya
7.	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	Pemberdayaan pemuda untuk mengembangkan prestasi seni dan olahraga

Masyarakat yang Wasis dibangun melalui strategi (1) perluasan akses dan penguatan mutu pendidikan formal dan non formal yang berkarakter unggul dan (2) membudayakan pendidikan karakter unggul dan kreativitas masyarakat melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mencakup di dalamnya peningkatan prestasi pemuda dan olah raga.

3. Strategi dari Misi Wareg

Rangkaian strategi pendukung misi WAREG, diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkeadilan mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani.

Tabel 6.3
Sasaran dan Strategi Misi Wareg

No	Sasaran	Strategi
	Misi Wareg: Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri dan berkeadilan mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani	
8.	Menurunnya PMKS	Penguatan kemampuan produktif dan karakter mandiri pada kelompok PMKS, pengangguran dan rentan miskin
9.	Terjaganya ketersediaan pangan yang terjangkau	Peningkatan produktivitas dan kecukupan bahan kebutuhan pokok
10.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kewilayahan	Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan sosial, ekonomi, budaya, fisik prasarana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi
11.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Penguatan kapasitas perempuan berkontribusi dalam kegiatan ekonomi, sosial, politik, budaya dan perlindungan hak anak
12.	Meningkatnya kesempatan kerja	Pengembangan kemampuan kerja dan berusaha (wirausaha), pengembangan program padat karya dan usaha produktif
13.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
14.	Meningkatnya jumlah investasi	Pengembangan Sektor Unggulan daerah dan penguatan promosi
15.	Berkembangnya ekonomi kreatif dan kota tujuan wisata seni dan budaya	Pemberdayaan masyarakat mengembangkan ekonomi kreatif berbasis seni budaya

Masyarakat yang Wareg diwujudkan melalui: (1) Percepatan pengentasan masyarakat miskin dan (2) Peningkatan kualitas penduduk dan pemberdayaan masyarakat untuk daya saing tenaga kerja, produktivitas, dan kemandirian ekonomi menuju peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kewilayahan.

4. Strategi dari Misi Mapan

Rangkaian strategi pendukung misi MAPAN diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif, dan melayani.

Tabel 6.4
Sasaran dan Strategi Misi Mapan

No	Sasaran	Strategi
	Misi Mapan: Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif dan melayani	
16.	Meningkatnya pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi (<i>Solo Smart City</i>)	Optimalisasi pemanfaatan basis data terintegrasi dan teknologi informasi
17.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Pengembangan <i>e-government</i>
18.	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan	pengintegrasian data kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan
19.	Terkendalnya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk
20.	Menurunnya konflik antargolongan	Penegakan hukum dan regulasi daerah dengan membuka ruang monitoring publik
21.	Menurunnya pelanggaran produk hukum daerah	Perluasan pendidikan kesadaran hukum masyarakat

Misi MAPAN membawa tata kehidupan kota yang berkeadilan, akuntabel, tertib, aman, nyaman dan berdaya saing, melalui jalinan strategi: (1) Peningkatan kualitas aparatur dan manajemen kinerja pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan basis data (kependudukan, sektoral dan kewilayahan) dan teknologi informasi dan (2) Peningkatan kondusivitas keamanan, ketertiban, kenyamanan kota mendukung investasi dan kesejahteraan sosial melalui meningkatnya kuantitas dan kualitas kinerja *e-Government*, meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, dan meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja pembangunan.

5. Strategi Misi Papan

Rangkaian strategi pendukung misi PAPAN diarahkan untuk mewujudkan: (1) pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, (2) pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan dan berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya.

Tabel 6.5
Sasaran dan Strategi Misi Papan

No	Sasaran	Strategi
	Misi Papan: Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, tempat untuk berusaha dan berkreasi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan dan yang berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya	
22.	Meningkatnya ketersediaan perumahan yang layak huni dan berkurangnya pemukiman kumuh	Pemerataan pembangunan kawasan permukiman yang sehat dan berkeadilan
23.	Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan yang berkualitas	Pengembangan aksesibilitas dan kualitas transportasi dan lalu lintas yang tertib, lancar, nyaman, dan selamat
24.	Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan	Peningkatan pengelolaan persampahan dan limbah
25.	Tersedianya kesiapsiagaan sistem antisipasi risiko bencana	Peningkatan kapabilitas masyarakat siaga antisipasi resiko bencana
26.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Publik	Perencanaan dan Pengendalian tata kota menuju kota kreatif ekonomi, sosial, budaya melalui optimalisasi partisipasi masyarakat
27.	Tersedianya sarana dan prasarana ekonomi yang berdaya saing	Pemerataan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian yang berdaya saing
28.	Tersedianya sarana dan prasarana sosial budaya	Pengembangan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur sosial budaya yang berkeadilan (inklusif)

Sasaran misi papan diarahkan pada peningkatan ketersediaan perumahan yang layak huni dan berkurangnya pemukiman kumuh dengan orientasi strategi diarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas permukiman beserta sarana prasarana infrastruktur bagi penguatan daya dukung lingkungan sesuai perkembangan kebutuhan penduduk secara merata dan partisipatif dan perencanaan dan Pengendalian tata kota menuju kota kreatif ekonomi, sosial, budaya melalui optimalisasi partisipasi masyarakat.

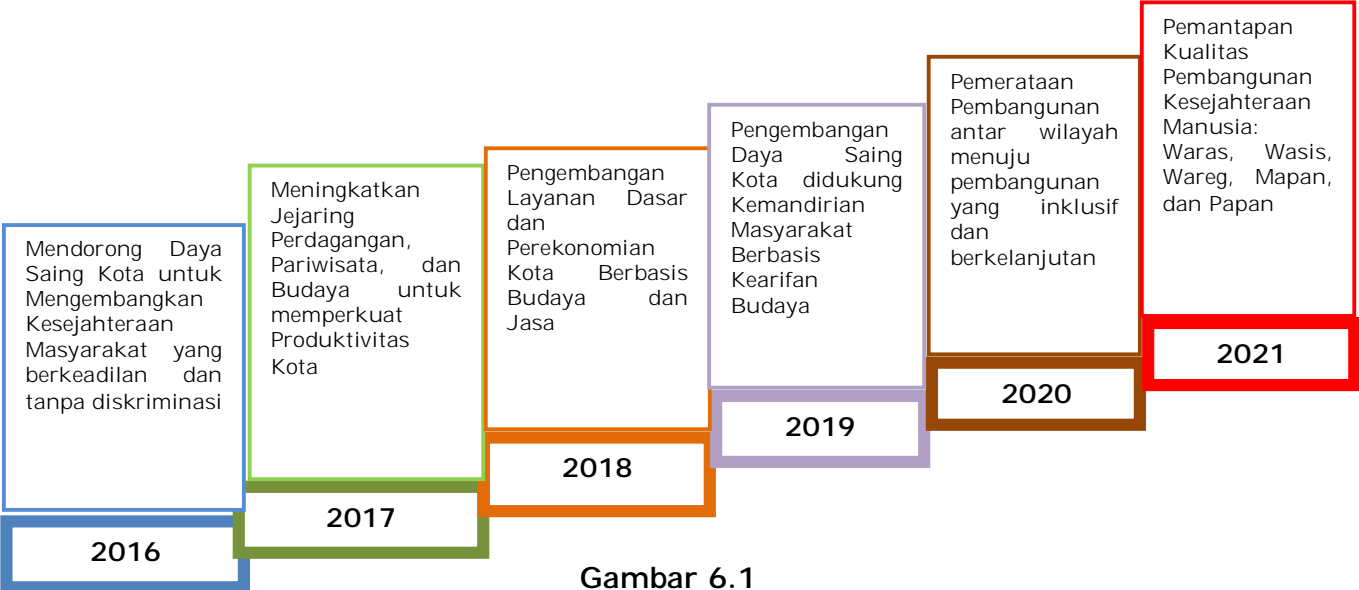
B. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda,

namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Penetapan tema atau fokus tahunan tidak berarti mengabaikan kondisi lain yang memang harus dikerjakan terus menerus setiap tahun. Alokasi program rutin dan penyelenggaraan layanan publik terus menerus ada dan dialokasikan anggaran. Hal ini didasari prinsip perencanaan strategik tehnokratis. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua: (1) **Perencanaan Strategik** yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah; (2) **Perencanaan Operasional** yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Tema tahapan pembangunan Kota Surakarta Tahun 2016-2021 dapat digambarkan dalam Gambar 6.1. berikut:



Gambar 6.1
Tema Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2016-2021

Penjelasan makna dan fokus tema tahapan pembangunan kota Surakarta tahun 2016-2021 sebagai berikut. Pentahapan prioritas dimaksudkan untuk memberi fokus arah kebijakan yang menjadi payung program dan kegiatan unggulan tahun tersebut, tanpa mengabaikan keberlanjutan atau pemantapan kebijakan lainnya. Fokus tahapan pembangunan akan mendasari kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD). Selain arah kebijakan khusus yang mendasari fokus prioritas, disertakan pula arah kebijakan yang bersifat mendasari kerangka reformasi birokrasi sebagai pilar penyangga prioritas pembangunan. Selaras dengan hal itu, arah kebijakan yang menterjemahkan suatu pengaruutamaan tertentu juga akan melekat pada semua tahapan. Arah kebijakan yang termasuk dalam kelompok dasar ini yaitu: (i) Pengembangan sistem manajemen pembangunan partisipatif; (ii) Peningkatan kesetaraan gender dan

perlindungan anak; (iii) Penguatan reformasi birokrasi; (iv) Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah; (v) Pelembagaan budaya masyarakat tertib hukum.

Pentahapan pembangunan Kota Surakarta tahun 2016-2021 sebagai berikut.

1. **Tahun 2016** Mendorong Daya Saing Kota untuk Mengembangkan Kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi. Tahap ini sudah dilaksanakan pada RKPD tahun 2016 (hasil Musrenbang tahun 2015), dan sedang dilaksanakan pada saat RPJMD ini disusun. Pada saat perubahan RKPD 2016, prioritas program dan kegiatan disesuaikan dengan prioritas RPJMD tahun 2016-2021. Fokus prioritas diarahkan pada daya saing sumber daya masyarakat pada semua kelompok untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan. Kebijakan pemilihan program dan kegiatan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai modal daya saing kota melalui:
 - a. Pembiasaan Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 - b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan
 - c. Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan
 - d. Membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkarakter unggul
 - e. Pelembagaan budaya kreatif dan inovatif masyarakat
 - f. Pengembangan kreatifitas pemuda
 - g. Percepatan pengentasan masyarakat miskin dan pengangguran
 - h. Peningkatan kesempatan kerja dan peluang kerja
 - i. Peningkatan perekonomian kota yang masju, kuat dan mandiri
 - j. Pengembangan *e-government*
 - k. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur memenuhi *Universal Access*
 - l. Peningkatan infrastruktur perhubungan
 - m. Peningkatan tata kelola lingkungan hidup
 - n. Pengendalian kawasan rawan bencana
 - o. Perencanaan dan pengendalian tata kota berkarakter *Eco Cultural City* berbasis partisipasi publik
 - p. Peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian
 - q. Peningkatan infrastruktur sosial budaya
2. **Tahun 2017** Meningkatkan Jejaring Perdagangan, Pariwisata, dan Budaya untuk memperkuat Produktivitas Kota. Fokus tahun ini pada jejaring pemasaran produk berbasis perdagangan, pariwisata dan budaya dalam semakin meningkatkan produktivitas masyarakat. Jadi kebijakan pemilihan program dan kegiatan diarahkan pada perwujudan: (i) pencukupan akses dan kualitas layanan dasar pendidikan, kesehatan, pemukiman layak huni; (ii) peningkatan pelayanan publik dan ruang publik untuk demokratisasi; (iii) penguatan ekonomi kreatif berbasis usaha rakyat; (iv) infrastruktur dasar dan penunjang berwawasan

lingkungan dan kependudukan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang mendasari rencana kerja pembangunan kota Surakarta dan diterjemahkan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangan urusannya adalah:

- a. Pembiasaan Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan
- c. Peningkatan tata kelola lingkungan sehat
- d. Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan
- e. Membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkarakter unggul Pelembagaan budaya kreatif dan inovatif masyarakat
- f. Pengembangan kreatifitas pemuda
- g. Percepatan pengentasan masyarakat miskin dan pengangguran
- h. Peningkatan kesempatan kerja dan peluang kerja Optimalisasi potensi daerah untuk peningkatan kapasitas PAD
- i. Peningkatan perekonomian kota yang masju, kuat dan mandiri
- j. Pengembangan *e-government*
- k. Manajemen pembangunan berwawasan kependudukan
- l. Pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan
- m. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur memenuhi *Universal Access*
- n. Peningkatan infrastruktur perhubungan
- o. Peningkatan tata kelola lingkungan hidup
- p. Pengendalian kawasan rawan bencana
- q. Perencanaan dan pengendalian tata kota berkarakter *Eco Cultural City* berbasis partisipasi publik
- r. Peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian
- s. Peningkatan infrastruktur sosial budaya

3. Tahun 2018 Pengembangan Layanan Dasar dan Perekonomian Kota Berbasis Budaya dan Jasa.

Tahun 2018 temanya melanjutkan penguatan layanan dasar wajib dan pengembangan industri kreatif berbasis budaya dan jasa untuk menjadi pilar kuat pendongkrak perekonomian kota dari sektor industri dan perdagangan. Fokus prioritas pada program dan kegiatan yang berdampak pada peningkatan kompetensi dan daya kompetisi pelaku usaha, infrastruktur penunjang aktivitas perekonomian, dan kebijakan kota yang berdampak perluasan jangkauan pemasaran citra industri jasa dan budaya kota Surakarta. Selain itu, prioritas pendukung diletakkan pada program dan kegiatan yang berdampak meningkatkan kecukupan dan kualitas layanan dasar pendidikan, kesehatan, pemukiman, dan komponen penguat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berkeadilan. Dalam rangka siaga tahun politik (pemilukada Provinsi) program dan kegiatan yang berdampak pada penguatan kesiagaan masyarakat untuk meningkatkan kondusivitas kota juga menjadi prioritas. Oleh karena itu, arah kebijakan yang mendasari rencana

kerja pembangunan kota Surakarta dan diterjemahkan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangan urusannya adalah:

- a. Pembiasaan Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan
- c. Peningkatan tata kelola lingkungan sehat
- d. Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan
- e. Membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkarakter unggul
- f. Pelembagaan budaya kreatif dan inovatif masyarakat
- g. Pengembangan kreatifitas pemuda
- h. Percepatan pengentasan masyarakat miskin dan pengangguran
- i. Peningkatan perekonomian kota yang masju, kuat dan mandiri
- j. Manajemen pembangunan berwawasan kependudukan
- k. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur memenuhi *Universal Access*
- l. Peningkatan infrastruktur perhubungan
- m. Peningkatan tata kelola lingkungan hidup
- n. Perencanaan dan pengendalian tata kota berkarakter *Eco Cultural City* berbasis partisipasi publik
- o. Peningkatan kondusivitas keamanan, ketertiban, kenyamanan kota

4. Tahun 2019 Pengembangan Daya Saing Kota didukung Kemandirian Masyarakat Berbasis Kearifan Budaya.

Tahun 2019 melanjutkan pencapaian pembangunan tahun 2018, dan menambahkan penekanan pada penguatan daya saing serta kemandirian masyarakat. Program dan kegiatan pembangunan diprioritaskan yang berdampak pada partisipasi masyarakat sebagai pelaku ekonomi dan pelaku pemasaran keunggulan kota melalui aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya sehingga menghasilkan jangkauan pemasaran produk kota bertambah, peningkatan jumlah pengunjung dari luar kota beraktivitas di Kota Surakarta. Dampak lainnya adalah penambahan jumlah variasi produk, jasa, maupun event kota yang semakin luas melibatkan pelaku dari luar daerah. Selain itu, kemandirian masyarakat rentan dalam pengembangan usaha untuk menambah pendapatan semakin besar. Program dan kegiatan pembangunan juga diprioritas pada hal yang berdampak menguatkan kearifan budaya menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa merusak lingkungan, menjaga keadilan antar golongan kelompok masyarakat, dan menguatkan kesiagaan masyarakat untuk antisipasi bencana (baik bencana alam maupun bencana sosial). Pengembangan infrastruktur yang berdampak meningkatkan daya tarik kota dan kenyamanan pengunjung kota dari luar daerah juga menjadi prioritas. Arah kebijakan yang mendasari rencana kerja pembangunan Kota Surakarta dan diterjemahkan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangan urusannya adalah:

- a. Pembiasaan Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan

- c. Peningkatan tata kelola lingkungan sehat
- d. Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan
- e. Membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkarakter unggul
- f. Pelembagaan budaya kreatif dan inovatif masyarakat
- g. Pengembangan kreatifitas pemuda
- h. Percepatan pengentasan masyarakat miskin dan pengangguran
- i. Peningkatan kesempatan kerja dan peluang kerja
- j. Optimalisasi potensi daerah untuk peningkatan kapasitas PAD
- k. Peningkatan perekonomian kota yang masju, kuat dan mandiri
- l. Pengembangan *e-government*
- m. Manajemen pembangunan berwawasan kependudukan
- n. Pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan
- o. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur memenuhi *Universal Access*
- p. Peningkatan infrastruktur perhubungan
- q. Peningkatan tata kelola lingkungan hidup
- r. Pengendalian kawasan rawan bencana
- s. Peningkatan kondusivitas keamanan, ketertiban, kenyamanan kota
- t. Peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian
- u. Peningkatan infrastruktur sosial budaya

5. Tahun 2020 Pemerataan Pembangunan antar wilayah menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tahun 2020 melanjutkan pencapaian pembangunan tahun 2019 dengan tambahan penekanan prioritas pada mengoptimalkan upaya mengatasi kesenjangan antar kelompok pendapatan dan kesenjangan antar wilayah yang berdampak pada akses kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu program dan kegiatan diprioritaskan yang berdampak pada pemerataan infrastruktur di wilayah tertinggal untuk pemerataan kualitas pelayanan publik, peningkatan pendapatan kelompok rentan, peningkatan kemampuan hidup produktif bagi kelompok rentan, penegakkan pemanfaatan ruang yang tidak merusak lingkungan, dan menguatkan kesiagaan masyarakat untuk antisipasi bencana (baik bencana alam maupun bencana sosial). Arah kebijakan yang mendasari rencana kerja pembangunan kota Surakarta dan diterjemahkan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangan urusannya adalah:

- a. Pembiasaan Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan
- c. Peningkatan tata kelola lingkungan sehat
- d. Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan
- e. Membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkarakter unggul
- f. Pelembagaan budaya kreatif dan inovatif masyarakat
- g. Pengembangan kreatifitas pemuda

- h. Percepatan pengentasan masyarakat miskin dan pengangguran
 - i. Peningkatan perekonomian kota yang masju, kuat dan mandiri
 - j. Manajemen pembangunan berwawasan kependudukan
 - k. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur memenuhi *Universal Access*
 - l. Peningkatan infrastruktur perhubungan
 - m. Peningkatan tata kelola lingkungan hidup
 - n. Perencanaan dan pengendalian tata kota berkarakter *Eco Cultural City* berbasis partisipasi publik
 - o. Peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian
 - p. Peningkatan infrastruktur sosial budaya
- 6. Tahun 2021** Pemantapan Kualitas Pembangunan Kesejahteraan Manusia: Waras, Wasis, Wareg, Mapan, dan Papan
- Tahun 2021 merupakan tahun transisi, sehingga program dan kegiatan tahun ini diprioritaskan pada dampak penguatan tata kelola pemerintahan, menjaga stabilitas partisipasi masyarakat menjaga kondusivitas daerah, dan pemantapan posisi kualitas pelayanan dasar wajib. Program dan pembangunan tahun 2021 bersifat menyiapkan jembatan penghubung untuk visi-misi pembangunan tahap berikutnya (tahun 2021-2025). Arah kebijakan yang mendasari rencana kerja pembangunan kota Surakarta dan diterjemahkan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangan urusannya adalah:
- a. Pembiasaan Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 - b. Membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkarakter unggul
 - c. Peningkatan kesempatan kerja dan peluang kerja
 - d. Optimalisasi potensi daerah untuk peningkatan kapasitas PAD
 - e. Pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan
 - f. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur memenuhi *Universal Access*
 - g. Peningkatan infrastruktur perhubungan
 - h. Peningkatan tata kelola lingkungan hidup
 - i. Pengendalian kawasan rawan bencana

Secara keseluruhan arah kebijakan berdasarkan fokus tema pembangunan dijabarkan keterkaitan strategi dan arah kebijakan diuraikan dalam Tabel 6.6.

Tabel 6.6
Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan

Misi	Strategi	Arah Kebijakan	TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
WARAS	Promosi dan edukasi PHBS menuju penguatan upaya kesehatan preventif	Pembiasaan Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	v	v	v	v	v	v

Misi	Strategi	Arah Kebijakan	TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Peningkatan jumlah fasilitas cakupan dan jenis layanan kesehatan	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	v	v	v	v	v	
	Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup	Peningkatan tata kelola lingkungan sehat		v	v	v	v	
WASIS	Perluasan akses dan penguatan mutu pendidikan formal dan non formal yang berkarakter unggul	Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan	v	v	v	v	v	
	Mengintegrasikan kurikulum karakter unggul ke dalam pengembangan media pendidikan	Membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkarakter unggul	v	v	v	v	v	v
	Memasyarakatkan budaya inovatif dan kreatif melalui pendidikan luar sekolah dan masyarakat berbasis nilai adat istiadat dan seni budaya	Pelembagaan budaya kreatif dan inovatif masyarakat	v	v	v	v	v	
	Pemberdayaan pemuda untuk mengembangkan prestasi seni dan olahraga	Pengembangan kreatifitas pemuda	v	v	v	v	v	
WAREG	Penguatan kemampuan produktif dan karakter mandiri pada kelompok PMKS, pengangguran dan rentan miskin	Percepatan pengentasan masyarakat miskin dan pengangguran	v	v	v	v	v	
	Peningkatan produktivitas dan kecukupan bahan kebutuhan pokok	Penguatan ketahanan pangan	v	v	v	v	v	
	Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan sosial, ekonomi, budaya, fisik	Pengembangan sistem manajemen pembangunan partisipatif	v	v	v	v	v	v

Misi	Strategi	Arah Kebijakan	TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	prasarana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi							
	Penguatan kapasitas perempuan berkontribusi dalam kegiatan ekonomi, sosial, politik, budaya dan perlindungan hak anak	Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak	v	v	v	v	v	v
	Pengembangan kemampuan kerja dan berusaha (wirausaha), pengembangan program padat karya dan usaha produktif	Peningkatan kesempatan kerja dan peluang kerja	v	v		v		v
	pemberdayaan dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Optimalisasi potensi daerah untuk peningkatan kapasitas PAD		v		v		v
	Pengembangan Sektor Unggulan daerah dan penguatan promosi	Peningkatan iklim investasi yang berdaya saing		v		v		
	Pemberdayaan masyarakat mengembangkan ekonomi kreatif berbasis seni budaya	Peningkatan perekonomian kota yang maju, kuat dan mandiri	v	v	v	v	v	
	Optimalisasi pemanfaatan basis data terintegrasi dan teknologi informasi	Pengembangan <i>e-government</i>	v	v		v		
	Peningkatan kualitas aparatur dan manajemen kinerja pembangunan	Penguatan reformasi birokrasi	v	v	v	v	v	v
MAPAN	pengintegrasian data kependudukan untuk	Manajemen pembangunan berwawasan kependudukan		v	v	v	v	

Misi	Strategi	Arah Kebijakan	TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan							
	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan		v		v		v
	Penegakan hukum dan regulasi daerah dengan membuka ruang monitoring publik	Peningkatan kondusivitas keamanan, ketertiban, kenyamanan kota	v	v	v	v	v	v
	Perluasan pendidikan kesadaran hukum masyarakat	Pelembagaan budaya masyarakat tertib hukum	v	v	v	v	v	v
PAPAN	Pemerataan pembangunan kawasan permukiman yang sehat dan berkeadilan	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur memenuhi <i>Universal Access</i>	v	v	v	v	v	v
	Pengembangan aksesibilitas dan kualitas transportasi dan lalu lintas yang tertib, lancar, nyaman, dan selamat	Peningkatan infrastruktur perhubungan	v	v		v		v
	Peningkatan pengelolaan persampahan dan limbah	Peningkatan tata kelola lingkungan hidup	v	v	v	v	v	v
	Peningkatan kapabilitas masyarakat siaga antisipasi resiko bencana	Pengendalian kawasan rawan bencana	v	v		v		v
	Perencanaan dan Pengendalian tata kota menuju kota kreatif ekonomi, sosial, budaya melalui optimalisasi partisipasi masyarakat	Perencanaan dan pengendalian tata kota berkarakter <i>Eco Cultural City</i> berbasis partisipasi publik	v	v	v		v	
	Pemerataan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur	Peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian	v	v		v	v	

Misi	Strategi	Arah Kebijakan	TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	pendukung perekonomian yang berdaya saing							
	Pengembangan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur sosial budaya yang berkeadilan (inklusif)	Peningkatan infrastruktur sosial budaya	v	v		v	v	

Tabel 6.7

Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI: "Terwujudnya Surakarta Sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera"

MISI WARAS : Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang sehat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, promosi dan preventif kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani	Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat jasmani dan rohani	Promosi dan edukasi PHBS menuju penguatan upaya kesehatan preventif	Pembiasaan Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan jumlah fasilitas dan jenis layanan kesehatan	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota	Meningkatnya perilaku masyarakat dan pelaku usaha yang peduli pada lingkungan sehat	Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup	Peningkatan tata kelola lingkungan sehat
MISI WASIS : Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, mandiri dan berkarakter menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan melestarikan warisan budaya daerah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Pendidikan untuk semua yang berkarakter, unggul, dan berkeadilan	Meningkatnya perluasan akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Perluasan akses dan penguatan mutu pendidikan formal dan non formal yang berkarakter unggul	Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan
	Terwujudnya masyarakat dan angkatan kerja yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing	Memasyarakatkan budaya inovatif dan kreatif melalui pendidikan luar sekolah dan masyarakat	Pelebagaan budaya kreatif dan inovatif
Terwujudnya masyarakat yang cakap mengupayakan pelestarian warisan karya budaya, adat istiadat, nilai-nilai seni budaya, serta prestasi pemuda dan olah raga	Meningkatnya pelestarian warisan karya budaya, adat istiadat, nilai-nilai seni budaya	Pemberdayaan masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan nilai seni, adat, dan karya budaya	Pengembangan kreativitas masyarakat
	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	Pemberdayaan pemuda untuk mengembangkan prestasi seni dan olahraga	Pengembangan kreativitas pemuda

MISI WAREG : Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri dan berkeadilan mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat jasmani dan rohani	Menurunnya PMKS	Penguatan kemampuan produktif dan karakter mandiri pada kelompok PMKS, pengangguran dan rentan miskin	Percepatan pengentasan masyarakat miskin dan pengangguran
	Terjaganya ketersediaan pangan yang terjangkau	Peningkatan produktivitas dan kecukupan bahan kebutuhan pokok	Penguatan ketahanan pangan
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kewilayahan	Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan sosial, ekonomi, budaya, fisik prasarana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi	Pengembangan sistem manajemen pembangunan partisipatif
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Penguatan kapasitas perempuan berkontribusi dalam kegiatan ekonomi, sosial, politik, budaya dan perlindungan hak anak	Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak
	Meningkatnya kesempatan kerja	Pengembangan kemampuan kerja dan berusaha (wirausaha), pengembangan program padat karya dan usaha produktif	Peningkatan kesempatan kerja dan peluang kerja
Terwujudnya perekonomian kota yang maju, kuat dan mandiri	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	pemberdayaan dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal untuk meningkatkan PAD	Optimalisasi potensi daerah untuk peningkatan kapasitas PAD
	Meningkatnya jumlah investasi	Pengembangan Sektor Unggulan daerah dan penguatan promosi	Peningkatan iklim investasi yang berdaya saing
	Berkembangnya ekonomi kreatif dan kota tujuan wisata seni dan budaya	Pemberdayaan masyarakat mengembangkan ekonomi kreatif berbasis seni budaya	Peningkatan perekonomian kota yang maju, kuat dan mandiri

MISI MAPAN : Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif dan melayani			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis <i>E-Government</i>	Meningkatnya pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi (<i>Solo Smart City</i>)	optimalisasi pemanfaatan basis data terintegrasi dan teknologi informasi	Pengembangan e-government
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Peningkatan kualitas aparatur dan manajemen kinerja pembangunan	Penguatan reformasi birokrasi.
Meningkatnya kinerja pembangunan daerah berwawasan kependudukan dan keberlanjutan lingkungan	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan	pengintegrasian data kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan	Manajemen pembangunan berwawasan kependudukan
	Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan
Meningkatnya ketertiban, keamanan, penegakan hukum dan hak asasi manusia serta harmoni sosial masyarakat	Menurunnya konflik antar golongan	Penegakan hukum dan regulasi daerah dengan membuka ruang monitoring publik	Peningkatan kondusivitas keamanan, ketertiban, kenyamanan kota
	Menurunnya pelanggaran produk hukum daerah	Perluasan pendidikan kesadaran hukum masyarakat	Pelebagaan budaya masyarakat tertib hukum
MISI PAPAN: Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, tempat untuk berusaha dan berkreasi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan dan yang berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tersedianya permukiman dan infrastruktur perkotaan yang berkualitas, merata, manusiawi, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan siaga bencana	Meningkatnya ketersediaan perumahan yang layak huni dan berkurangnya pemukiman kumuh	Pemerataan pembangunan kawasan permukiman yang sehat dan berkeadilan	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur memenuhi <i>Universal Access</i>
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan yang berkualitas	Pengembangan aksesibilitas dan kualitas transportasi dan lalu lintas yang tertib, lancar, nyaman, dan selamat	Peningkatan infrastruktur perhubungan
	Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan	Peningkatan pengelolaan persampahan dan limbah	Peningkatan tata kelola lingkungan hidup
	Meningkatnya kesiapsiagaan sistem antisipasi risiko kebencanaan	Peningkatan kapabilitas masyarakat siaga antisipasi resiko bencana	Pengendalian kawasan rawan bencana

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang berkualitas, merata, manusiawi, berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Publik	Perencanaan dan Pengendalian tata kota menuju kota kreatif ekonomi, sosial, budaya melalui optimalisasi partisipasi masyarakat	Perencanaan dan pengendalian tata kota berkarakter <i>Eco Cultural City</i> berbasis partisipasi publik
	Tersedianya sarana prasarana ekonomi yang berdaya saing	Pemerataan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian yang berdaya saing	Peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian
	Tersedianya sarana prasarana sosial budaya	Pengembangan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur sosial budaya yang berkeadilan (inklusif)	Peningkatan infrastruktur sosial budaya

C. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Terpadu (Kawasan Strategis)

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN) Surakarta mempunyai kedudukan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta mempunyai fungsi sebagai Kawasan Andalan dalam konstelasi pengembangan wilayah regional Subosukawonosraten. Sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan Kawasan Andalan, kebijakan pengembangan wilayah Kota Surakarta diarahkan untuk:

1. Peningkatan aksesibilitas untuk melayani kegiatan-kegiatan skala nasional;
2. Pengembangan infrastruktur dalam rangka mendukung kota sebagai pusat dan simpul utama kegiatan ekspor-impor serta pintu gerbang nasional dan internasional;
3. Pengembangan sistem transportasi kota untuk meningkatkan fungsi kota yang dapat mendorong pertumbuhan kegiatan industri/ekonomi kreatif dan jasa skala regional maupun nasional.

Sedangkan pengembangan wilayah Kota Surakarta dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta arah kebijakannya adalah:

1. Menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung konsep pembangunan kota yang berkelanjutan;
2. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30%; yang terdiri dari RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%;
3. Menumbuhkembangkan industri/ekonomi kreatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah;
4. Mendorong pertumbuhan kota ke arah Utara untuk mengurangi disparitas pertumbuhan wilayah Utara-Selatan;
5. Mengendalikan pertumbuhan kota; khususnya bagian selatan; untuk mengelola dampak negatif dari pertumbuhan kota bagian selatan yang melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungannya;
6. Mengembangkan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi dan berhierarki untuk mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta bertumpu pada pengembangan industri kreatif, perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata, dan olah raga.

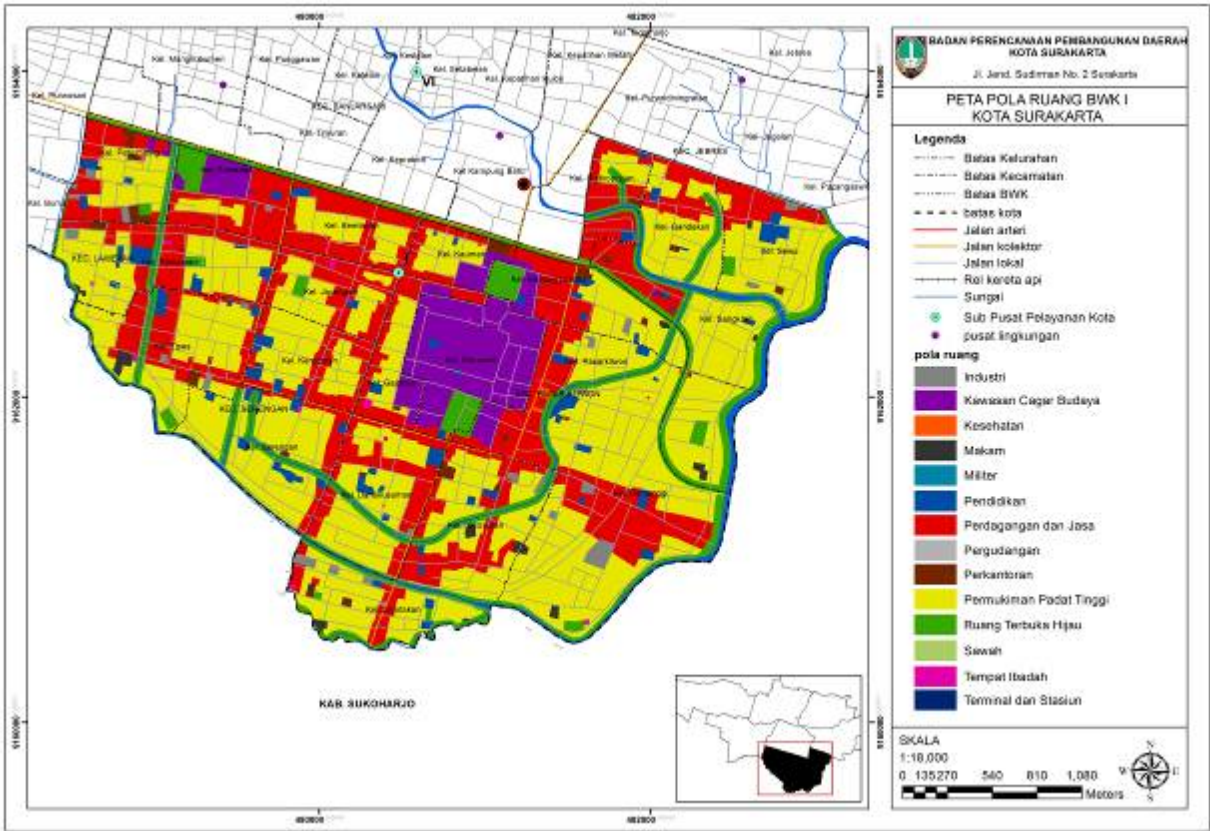
Sistem pusat pelayanan kota dikembangkan melalui penetapan Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK) dengan tujuan untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai pada tiap pusat pelayanan sehingga akan tercapai pemerataan pertumbuhan kawasan di setiap SPK sesuai dengan potensinya. PPK mempunyai kedudukan di Kecamatan Pasar Kliwon yang mempunyai fungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, budaya, pariwisata dan industri kreatif; serta terbagi menjadi 6 (enam) SPK yaitu SPK Kawasan I, SPK Kawasan II, SPK Kawasan III, SPK Kawasan IV, SPK Kawasan V dan SPK Kawasan VI.

Selanjutnya arah kebijakan pengembangan wilayah masing-masing SPK adalah sebagai berikut:

1. Arah Pengembangan Wilayah Kota Surakarta sesuai SPK

Sebagai bentuk upaya mengoptimalkan pengembangan wilayah di tiap wilayah pengembangan maka ditetapkan arah pengembangan wilayah di 6 (enam) wilayah pengembangan sebagai berikut:

a. SPK Kawasan I



Gambar 6.2
Peta Pola Ruang SPK Kawasan I

Merupakan wilayah yang berada di bagian Selatan Kota Surakarta yang meliputi wilayah dari:

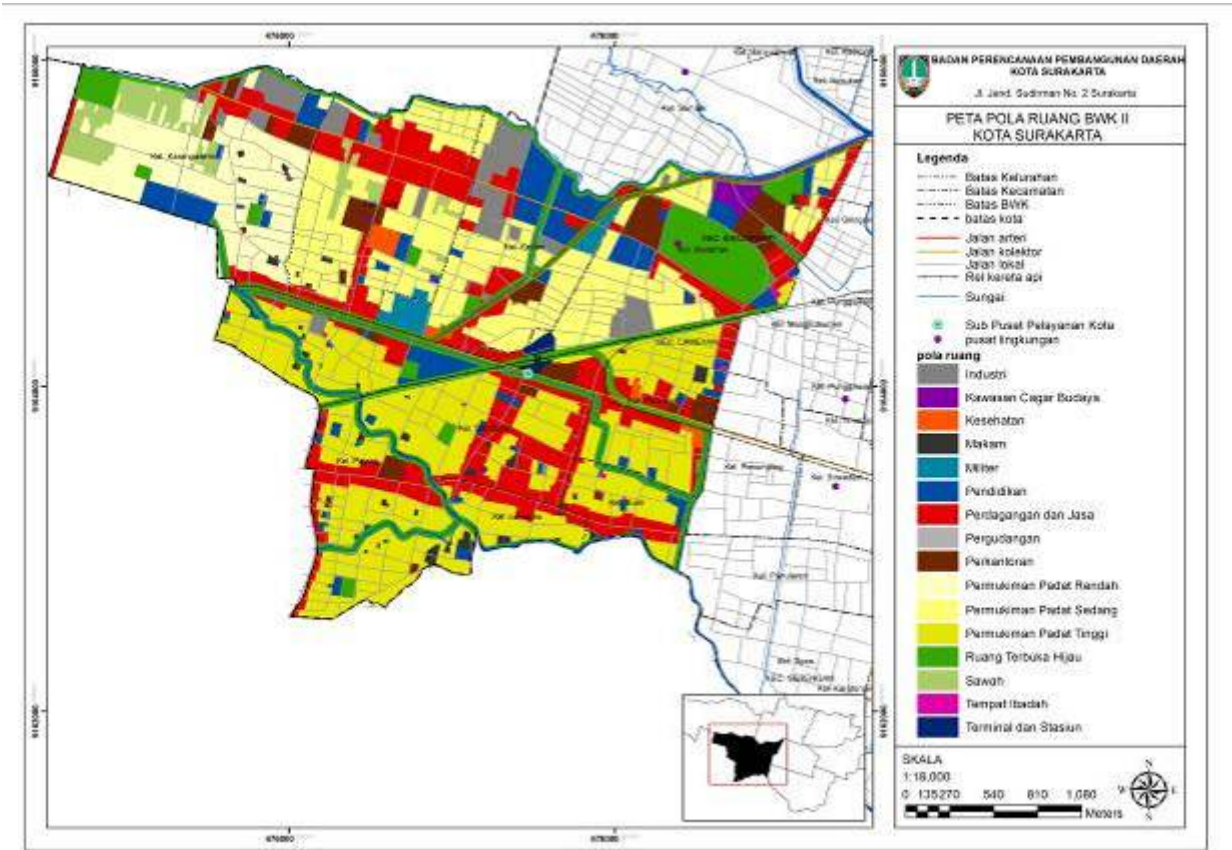
- Sebagian Wilayah Kecamatan Jebres
- Sebagian Wilayah Kecamatan Pasar Kliwon
- Sebagian Wilayah Kecamatan Serengan
- Sebagian Wilayah Kecamatan Laweyan

Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK) Kawasan I berada di Kelurahan Kemlayan (Kawasan Singosaren). SPK Kawasan I diarahkan dan ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan pariwisata, budaya, perdagangan, jasa dan olah raga sebagai pusat pariwisata (budaya), perdagangan dan jasa, olah raga serta industri kreatif. SPK Kawasan I dibagi menjadi sub lingkungan yaitu pusat lingkungan di Kawasan I terletak di Kelurahan Sriwedari, Kelurahan Sangkrah, dan Kelurahan Baluwarti. Kawasan I Kota Surakarta dibagi dalam Pusat Lingkungan yaitu Kelurahan Sriwedari, Kelurahan Sangkrah, dan Kelurahan Baluwarti.

Berkembangnya potensi pariwisata seperti Kampung Batik Kauman, dengan promosi wisata melalui pameran nusantara di

dalam maupun luar negeri, tersedianya aksesibilitas menuju kawasan pariwisata, terbentuknya kawasan penunjang pariwisata, mempertahankan dan mengembangkan kawasan cagar budaya sebagai kawasan *heritage*, pusaka maupun pariwisata. Berkembangnya potensi ekonomi lokal melalui industri kreatif baik berupa industri untuk mengolah hasil pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan maupun industri batik tradisional dan kerajinan lainnya serta dengan mengatur perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa di sepanjang koridor jalan. Pada SPK kawasan I ini terdapat kawasan *heritage* yang sangat berperan di Kota Surakarta, yaitu Kawasan Keraton Kasunanan yang di dalam RTRW telah ditetapkan sebagai kawasan strategis dari sudut budaya. Meningkatnya kawasan RTH menjadi kawasan dengan pelayanan lebih tinggi agar dapat dinikmati oleh masyarakat serta tersedianya kawasan RTH pada pengembangan permukiman baru. Meningkatnya kualitas permukiman dan kawasan perumahan melalui pengaturan kegiatan rumah huni dengan kegiatan usaha, serta menetapkan lokasi pengembangan kegiatan rumah tunggal, rumah kampung, dan perumahan yang dibangun pengembang.

b. SPK Kawasan II



Gambar 6.3
Peta Pola Ruang SPK Kawasan II

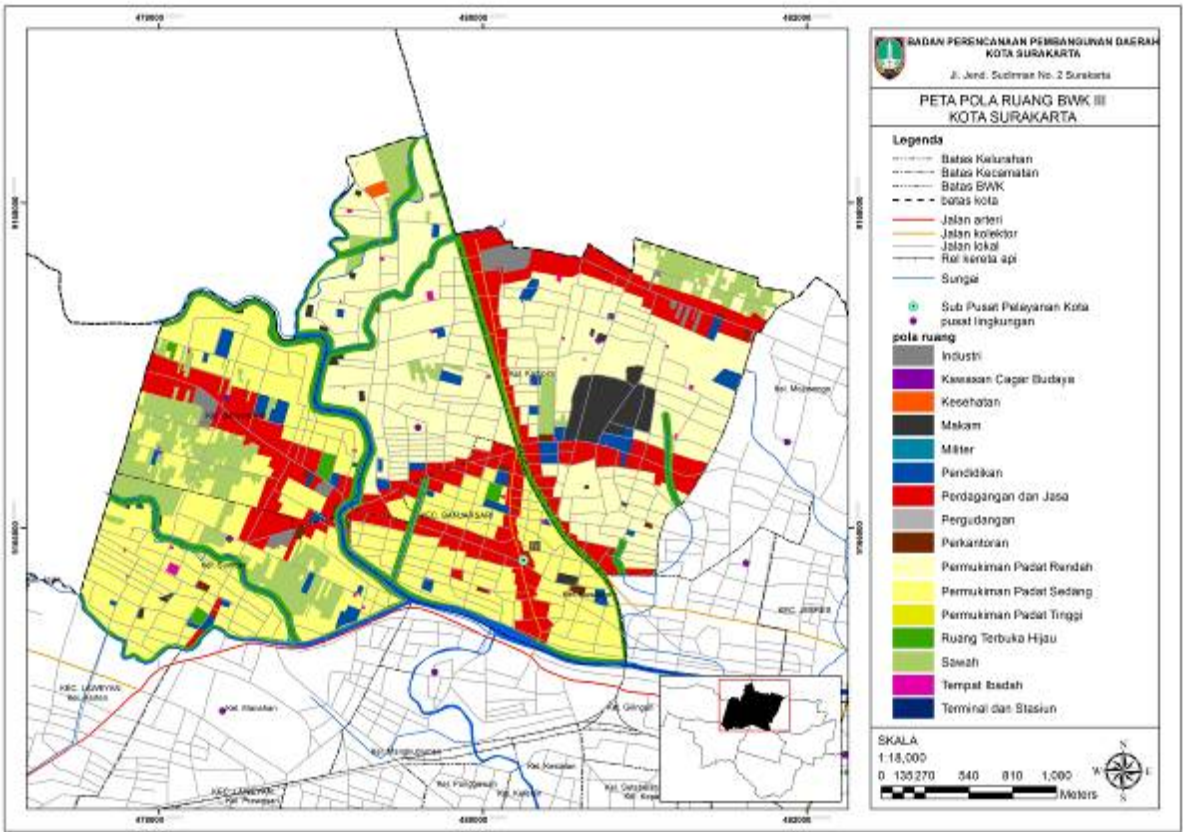
Merupakan wilayah yang berada di bagian Barat Daya Kota Surakarta yang meliputi wilayah :

- Sebagian Wilayah Kecamatan Laweyan
- Sebagian Wilayah Kecamatan Banjarsari

SPK Kawasan II berada di sekitar Kelurahan Purwosari. SPK Kawasan II diarahkan dan ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan pariwisata, olah raga dan perdagangan/jasa sebagai pusat pariwisata, olah raga dan industri kreatif. SPK Kawasan II Kota Surakarta dibagi dalam Pusat Lingkungan yaitu Kelurahan Sondakan, Kelurahan Jajar, dan Kelurahan Manahan.

Berkembangnya potensi pariwisata Kawasan Kampung Batik Laweyan dengan promosi wisata melalui pameran nusantara di dalam maupun luar negeri, adanya penambahan atraksi wisata, tersedianya fasilitas dan utilitas umum, aksesibilitas yang memadai sebagai akses keluar masuk kawasan Kampung Batik Laweyan, serta melakukan konservasi kawasan Kampung Batik Laweyan. Optimalnya ruang terbuka melalui pembatasan dan penertiban fungsi dan aktivitas yang mengganggu fungsi utama sebagai fasilitas olah raga pada kompleks Gelora Manahan. Berkembangnya aktivitas ruang terbuka di Taman Balekambang melalui penambahan atraksi wisata berupa wisata siang dan wisata malam, dengan unggulan atraksi budaya dan kuliner khas, serta adanya rute wisata pendek yang menghubungkan antara Taman Balekambang dan Gelora Manahan dengan mengoptimalkan potensi wisata kuliner yang ada. Berkembangnya potensi ekonomi lokal melalui industri kreatif berupa batik tradisional dan kerajinan lainnya yang dilengkapi dengan IPAL.

c. SPK Kawasan III

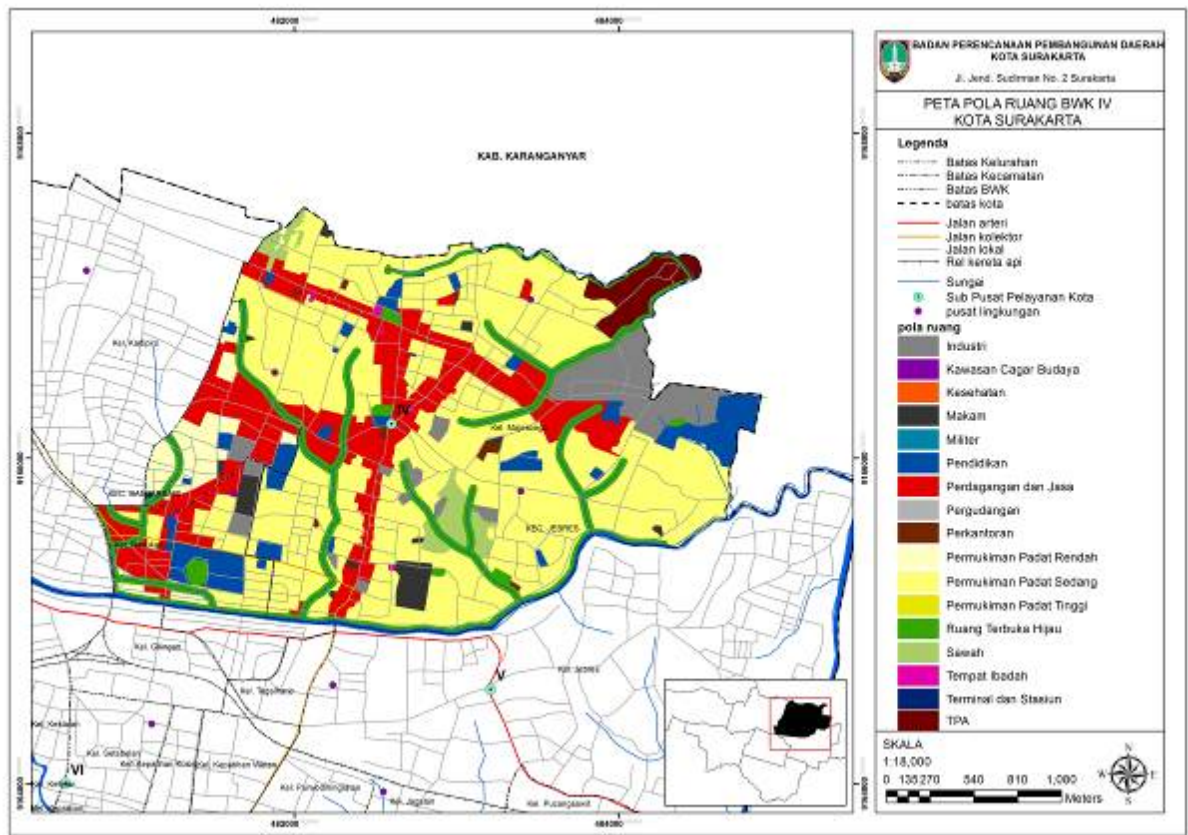


Gambar 6.4
Peta Pola Ruang SPK Kawasan III

Merupakan wilayah yang berada di bagian Barat Laut Kota Surakarta yang meliputi Sebagian Wilayah Kecamatan Banjarsari. SPK Kawasan III terpusat di Kelurahan Nusukan. SPK Kawasan III diarahkan dan ditetapkan dengan fungsi utama untuk permukiman perdagangan dan jasa sebagai pusat permukiman dan perdagangan dan jasa. SPK Kawasan III Kota Surakarta dibagi dalam Pusat Lingkungan yaitu Kelurahan Banyuanyar, Kelurahan Sumber dan Kelurahan Kadipiro (dua pusat lingkungan).

Berkembangnya kawasan permukiman baru pada lahan-lahan pertanian non produktif, dan tidak pada kawasan pertanian yang masih produktif, dengan tetap memberikan RTH pada kawasan permukiman tersebut. Perkembangan permukiman ini dilakukan untuk mendukung dan memantapkan fungsi SPK Kawasan III Kota Surakarta dalam rangka menunjang perdagangan jasa. Berkembangnya potensi ekonomi lokal melalui industri menengah dan rumah tangga. Berkembangnya kawasan perdagangan dan jasa meliputi bidang kayu, besi, dan kebutuhan sehari hari untuk menunjang kebutuhan bagi penduduk di SPK Kawasan III Kota Surakarta yang berada di sepanjang jalan utama (Jalan Piere Tendean, Jalan Ki Mangunsarkoro, dan Jalan Kapten Adi Sumarmo).

d. SPK Kawasan IV



Gambar 6.5
Peta Pola Ruang SPK Kawasan IV

Merupakan wilayah yang berada di bagian Timur Laut Kota Surakarta yang meliputi wilayah dari :

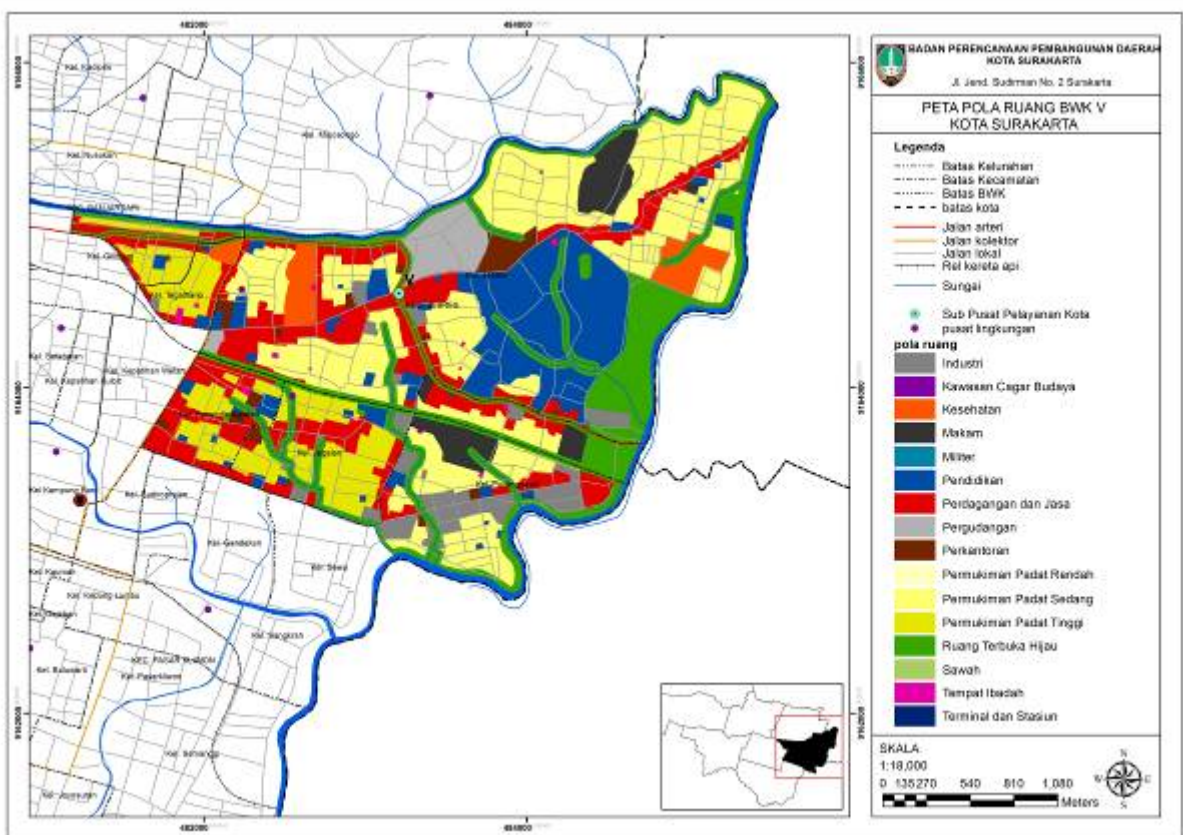
- Sebagian Wilayah Kecamatan Jebres

- Sebagian Wilayah Kecamatan Banjarsari

SPK Kawasan IV ini berada di sekitar Kantor Kelurahan Mojosongo. SPK Kawasan IV diarahkan dan ditetapkan dengan fungsi utama untuk permukiman, perdagangan dan jasa, industri kecil, dan industri ringan. Kawasan IV Kota Surakarta dibagi dalam Pusat Lingkungan yaitu Kelurahan Mojosongo (tiga pusat lingkungan) dan Kelurahan Nusukan.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat menempati Rumah Layak Huni dilakukan melalui pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Capaian pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Surakarta. Serta meningkatkan event-event bertaraf nasional dan internasional, sehingga mendorong *capital inflow* yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan sentra-sentra industri potensial dan unggulan di Kota Surakarta semakin berkembangnya dan semakin dikenal luas oleh masyarakat, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

e. SPK Kawasan V



Gambar 6.6
Peta Pola Ruang SPK Kawasan V

Merupakan wilayah yang berada di bagian Timur Kota Surakarta yang meliputi wilayah dari :

- Sebagian Wilayah Kecamatan Jebres
- Sebagian Wilayah Kecamatan Banjarsari

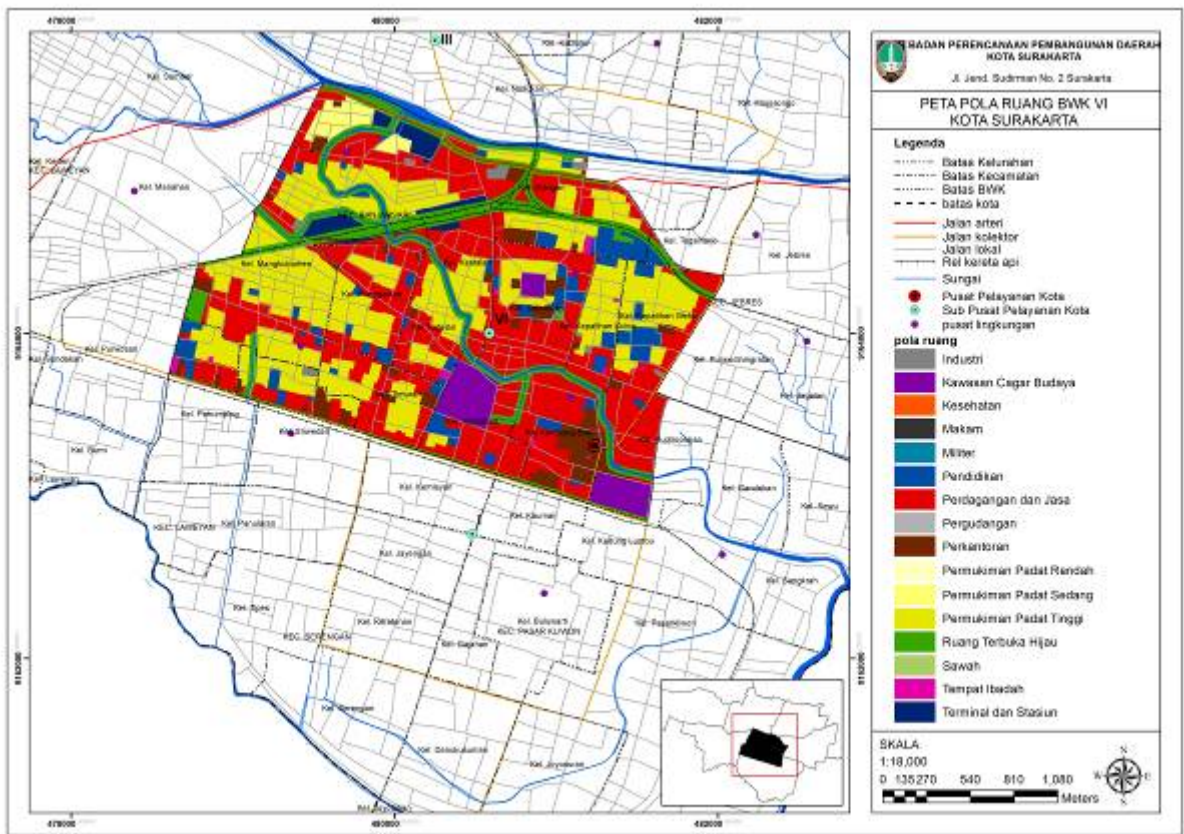
SPK Kawasan V ini berada di sekitar Kelurahan Jebres. SPK Kawasan V diarahkan dan ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan pariwisata, pendidikan tinggi dan industri kreatif. SPK

Kawasan V Kota Surakarta dibagi dalam Pusat Lingkungan yaitu Kelurahan Jebres, Kelurahan Pucangsawit, dan Kelurahan Jagalan.

Meningkatnya pelayanan dan perluasan akses masyarakat di bidang pendidikan, antara lain dengan program sekolah gratis, sekolah plus, bantuan pendidikan masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan. Sedangkan untuk Perbaikan kualitas obyek wisata dengan memberikan event, promosi dan penyediaan fasilitas yang mendukung. Pengembangan pariwisata dengan mempertahankan konsep sebagai Taman Satwa Taru Jurug.

Pada kawasan ini terdapat Kawasan Solo Technopark (STP) yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis dari sudut ilmu pengetahuan dan teknologi.

f. SPK Kawasan VI



Gambar 6.7
Peta Pola Ruang SPK Kawasan VI

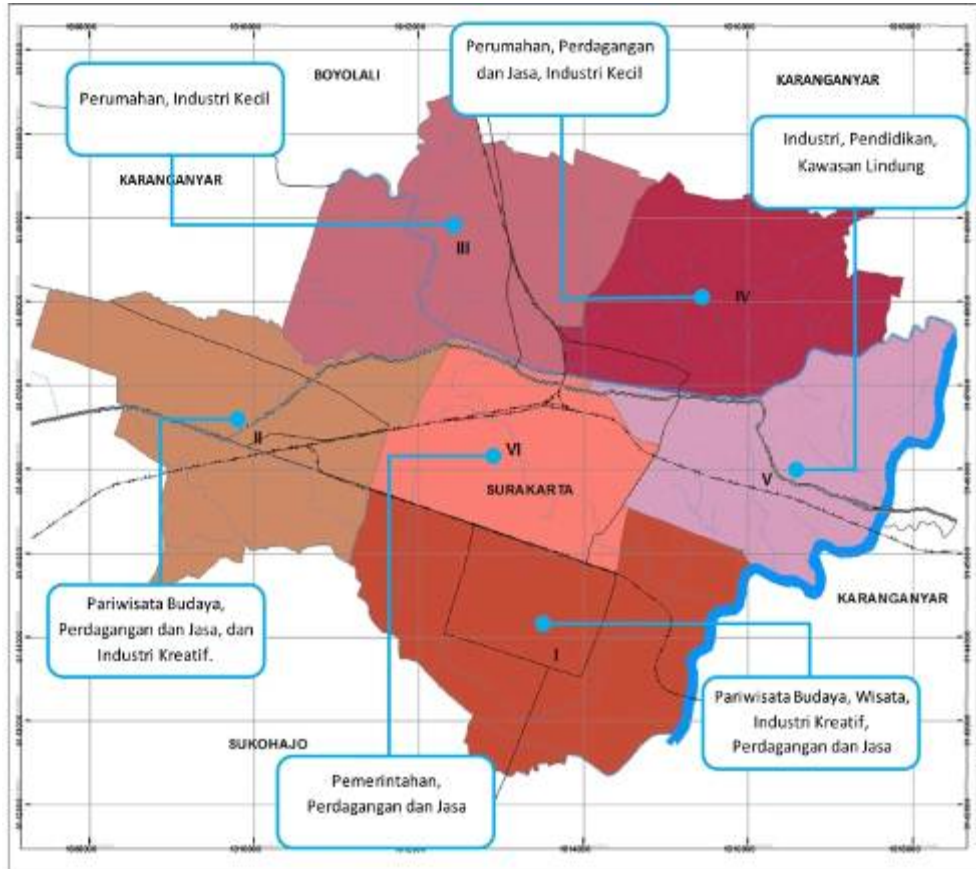
Merupakan wilayah yang berada di bagian Tengah Kota Surakarta yang meliputi wilayah dari:

- Sebagian Wilayah Kecamatan Jebres
- Sebagian Wilayah Kecamatan Banjarsari
- Sebagian Wilayah Kecamatan Laweyan
- Sebagian Wilayah Kecamatan Pasar Kliwon

SPK Kawasan VI ini berada di sekitar Kelurahan Setabelan. SPK Kawasan VI diarahkan dan ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan pemerintahan, pariwisata budaya, perdagangan

dan jasa. SPK Kawasan VI Kota Surakarta dibagi dalam Pusat Lingkungan yaitu Kelurahan Gilingan, Kelurahan Setabelan, Kelurahan Kampung Baru, dan Kelurahan Mangkubumen.

Mengadakan event untuk memperkenalkan Kota Surakarta pada kancah internasional. Pengembangan dan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pariwisata untuk menarik wisatawan. Peningkatan kunjungan wisata, sehingga meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Serta pengelolaan ruang terbuka hijau untuk memelihara lingkungan Kota Surakarta.



Gambar 6.8
Pembagian PPK dan SPK di Kota Surakarta

Sektor unggulan di Kota Surakarta secara umum dapat dilihat pada masing-masing klaster di setiap kecamatan merujuk RTRW Kota Surakarta, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Laweyan berupa Kampung Batik Laweyan, mencakup batik, garmen maupun olahan tekstil, mebel, dengan kegiatan pendukungnya adalah pendidikan, biro travel, perhotelan, maupun tempat wisata.
- b. Kecamatan Serengan berupa industri pengolahan makanan dan minuman, pakaian tradisional, industri kreatif, baik kerajinan batik, maupun pembuatan *letter*.
- c. Kecamatan Pasar Kliwon berupa kerajinan dan batik kayu, biro perjalanan, kesenian tradisional, tempat wisata maupun jasa sablon.

- d. Kecamatan Jebres berupa mebel, batik tekstil dan garmen, serta jasa pendukung berupa hotel, jasa kursus, jasa pendidikan maupun pelatihan dan gedung olah raga.
- e. Kecamatan Banjarsari berupa minuman tradisional (jamu), krupuk, sangkar burung, mebel, dan jasa pendukungnya berupa pendidikan, biro perjalanan dan hotel/penginapan.

Dengan mempertimbangkan potensi sektor unggulan di lima kecamatan, pengembangan wilayah di Kota Surakarta selama kurun waktu 2016-2021 akan dikembangkan menjadi 6 (enam) kawasan yang dibagi berdasarkan karakteristik, fungsi, dan aspek prioritas yang sama sebagai berikut:

a. Kawasan Inti Kota (*Inner City*)

Kawasan ini berada di kawasan SPK Kawasan I dengan potensi pelayanan pariwisata budaya; perdagangan dan jasa; olah raga; dan industri kreatif. Kawasan ini merupakan kawasan strategis dari aspek ekonomi dan budaya. Kawasan Keraton Kasunanan, Pasar Klewer, Pusat Perdagangan Coyudan, dan Gatot Subroto semakin memperkuat peran *Inner City* ini sebagai Pusat Perdagangan, Ekonomi, dan Budaya.

b. Kawasan Pusat Bisnis (*Central Business District-CBD*) Kawasan Utara

Kawasan ini berada di sebagian SPK Kawasan III dan SPK Kawasan IV dengan potensi Perumahan, Industri Kecil, dan Perumahan, Perdagangan dan Jasa, Industri Kecil. Dari dua SPK tersebut, terdapat beberapa pusat lingkungan. Pusat lingkungan di SPK kawasan III terletak di Kelurahan Banyuanyar, Kelurahan Sumber dan Kelurahan Kadipiro (dua pusat lingkungan). Pusat lingkungan di SPK kawasan IV terletak di Kelurahan Mojosongo (tiga Pusat lingkungan) dan Kelurahan Nusukan. Saat ini, Kota Surakarta sedang melakukan pemerataan pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan yang sangat kentara antara Surakarta bagian selatan dengan bagian utara. Karena bagian selatan saat ini kondisinya sudah sangat terbangun, maka pemerintah Kota Surakarta memberikan intervensi lebih di kawasan utara untuk dikembangkan.

Kawasan pusat bisnis Surakarta bagian utara ini terletak di Kelurahan Banyuanyar, Kadipiro, Nusukan dan Mojosongo. Keempat kelurahan tersebut masih terdapat kawasan kumuh. Di Kelurahan Banyuanyar, tipologi kumuh yang terjadi adalah kumuh padat perkotaan dan kumuh bantaran sungai, dengan kategori kumuh ringan dan prioritas penanganan rendah. Permasalahan utama yang terjadi adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, tidak berdayanya masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan rumah sehat dan layak huni sehingga masih terdapat RTLH, serta ketidakteraturan bangunan. Masalah persampahan yang terjadi adalah masih terdapat kawasan yang tidak dilengkapi dengan

sarana prasarana sampah sesuai persyaratan teknik, kawasan terlayani sarana prasarana sampah namun tidak terpelihara, dan masih terdapat beberapa rumah tangga yang tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS dan TPA. Selain masalah persampahan, terdapat pula masalah drainase seperti adanya kawasan yang mengalami genangan ketika musim hujan, adanya kawasan yang tidak terlayani saluran drainase, saluran drainase yang tidak terhubung pada sistem perkotaan hingga saluran drainase yang tidak memadai dan tidak terpelihara.

Permasalahan air limbah juga terjadi di Kelurahan Mojosongo. Masih terdapat kawasan yang tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga, seperti *saptic tank* yang tidak memenuhi standar teknis sehingga mencemari lingkungan.

Permasalahan air minum terdapat pada kualitas dan kuantitas. Masih terdapat rumah tangga yang tidak mampu mengakses air minum, mandi dan cuci yang aman dan layak.

Di Kelurahan Mojosongo, tipologi kumuh yang terjadi adalah kumuh perkampungan, dengan kategori kumuh sedang dan prioritas penanganan sedang. Permasalahan utama yang terjadi serupa dengan yang terjadi di Banyuanyar, yaitu masalah persampahan, drainase, air limbah, air minum RTLH dan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat rendah. Hingga tahun 2015, masih ada kawasan yang belum terlayani sarana prasarana persampahan sesuai standar teknis. Tidak ada kawasan yang mengalami banjir ataupun terjadi genangan, namun masih terdapat permasalahan drainase berupa tidak tersedianya saluran drainase, saluran drainase yang tidak terpelihara, tidak terhubung dengan sistem perkotaan dan konstruksi saluran yang tidak sesuai standar teknis. Pada permasalahan air limbah, masih terdapat kawasan yang tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan dan menciptakan kawasan kumuh. Masih ada rumah tangga yang tidak bisa mengakses air yang aman dan layak.

Permasalahan di Kelurahan Nusukan dan Kadipiro juga serupa dengan Kelurahan Banyuanyar dan Mojosongo. Terdapat kawasan yang tidak dilengkapi sarana prasarana sampah, tidak ada kawasan yang mengalami genangan namun masih ada saluran drainase yang tidak memadai dan tidak terpelihara, terdapat kawasan yang tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan sehingga terjadi pencemaran lingkungan dan masih terdapat rumah tangga yang tidak mendapatkan akses air yang aman dan layak. Di Kelurahan Kadipiro, terdapat dua kawasan kumuh yaitu kawasan Kadipiro Barat dan Kadipiro Timur.

Kawasan CBD utara ini memiliki potensi wilayah yang tinggi dalam hal dukungan masyarakat terhadap pembangunan. Area yang belum terbangun dan masih terdapat banyak lahan kosong

merupakan kelebihan dalam pembangunan karena lebih mudah merencanakan lahan kosong daripada lahan yang sudah terbangun. Tujuan dari pengembangan CBD kawasan utara ini mengacu pada visi walikota Surakarta, yaitu waras, wasis, wareg, mapan, dan papan.

c. Kawasan Industri Kreatif

Kawasan peruntukan industri kreatif ini meliputi:

- 1) Industri rumah tangga mebel di Jalan Jend. Ahmad Yani, Kecamatan Jebres;
- 2) Industri rumah tangga pembuatan *shuttle cock* dan gitar di Kecamatan Pasarkliwon;
- 3) Industri pengolahan tahu dan tempe di Kelurahan Mojosongo-Kecamatan Jebres; dan
- 4) Industri pembuatan sangkar burung di Kelurahan Mojosongo-Kecamatan Jebres.

d. Kawasan Industri Kreatif Batik

Kawasan ini dengan potensi industri batik di Kawasan Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Pasar Kliwon. Kawasan industri ini harus dilengkapi dengan pengolahan limbah supaya tidak mengganggu lingkungan.

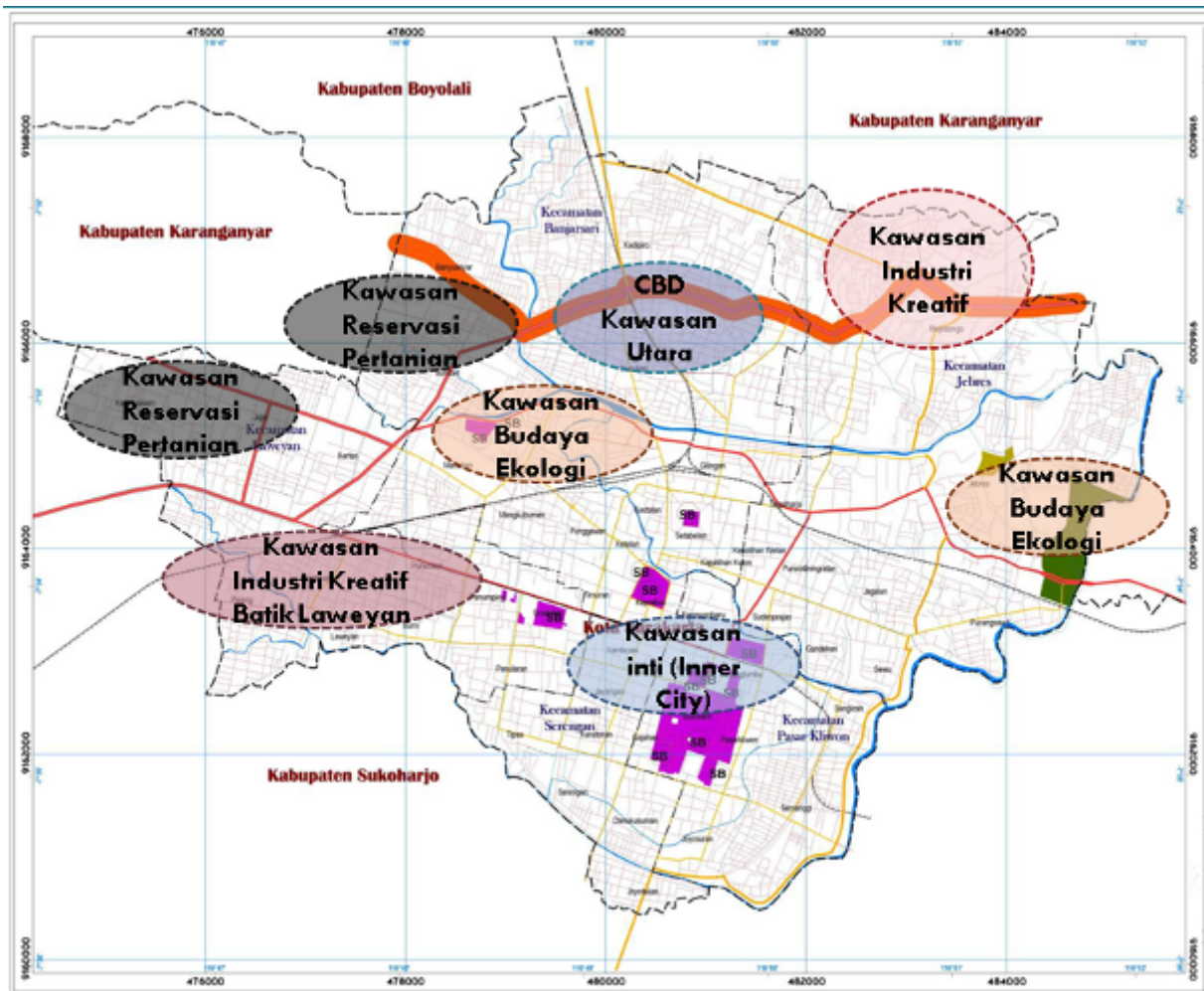
e. Kawasan Pertanian

Kawasan ini berada di SPK Kawasan II dan Kawasan III tepatnya di Kelurahan Karangasem, Sumber, dan Banyuanyar. Penetapan lahannya mengacu pada potensi eksisting lahan pertanian dan prasarana pendukungnya, dengan mempertimbangkan kemanfaatannya dari aspek produktifitas dan kontribusinya sebagai daya dukung keragaman ruang kota.

f. Kawasan Budaya Ekologi

Kawasan ini berada di SPK Kawasan II dan SPK Kawasan V dengan potensi fungsi pelayanan budaya dan kawasan lindung di Balekambang, Tirtonadi, dan Taman Satwa Taru Jurug.

Kebijakan pengembangan kawasan lindung melalui kelestarian fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.



Gambar 6.9
Pembagian Kawasan di Kota Surakarta Tahun 2016-2021

2. Prioritas Pengembangan Wilayah

Dengan mempertimbangkan potensi sektor unggulan di lima kecamatan, pengembangan wilayah di Kota Surakarta selama kurun waktu 2016-2021 akan dilakukan melalui intervensi terhadap 6 SPK kota yang telah ditetapkan dalam RTRW, dengan prioritas sebagai berikut:

a. Prioritas 1 (SPK Kawasan III)

1) Capaian Kinerja Saat Ini

SPK Kawasan III merupakan kawasan yang terdiri dari Kelurahan Banyuanyar, Kadipiro, Nusukan, dan Sumber. Terdapat tujuh kawasan kumuh di SPK III yang meliputi kawasan kumuh Bantaran Kali Anyar, Bantaran Rel KA Kadipiro, Bantaran Rel KA Nusukan, Kawasan Nusukan, Kadipiro Barat, Kadipiro Timur, Sumber, dan Banyuanyar dengan luas total kawasan kumuh sebesar 60,61 Hektar. Di dalam kawasan kumuh tersebut, terdapat permasalahan persampahan, air limbah, drainase, air minum, infrastruktur jalan, dan jembatan serta adanya RTLH. Jumlah RTLH sebanyak 2.262 unit Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan hanya kawasan kumuh saja yang mengalami permasalahan tersebut, namun kawasan yang tidak tergolong kumuh pun juga mengalami permasalahan-permasalahan di atas.

Permasalahan persampahan yang terjadi adalah masih terdapatnya kawasan yang tidak dilengkapi sarana prasarana persampahan sesuai prasyarat teknis seluas 45,48 Ha, adanya rumah tangga yang tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPA dan TPS sebanyak 2.589 unit rumah tangga, serta masih terdapat kawasan yang sarana dan prasarana persampahannya tidak terawat seluas 53,02 Ha.

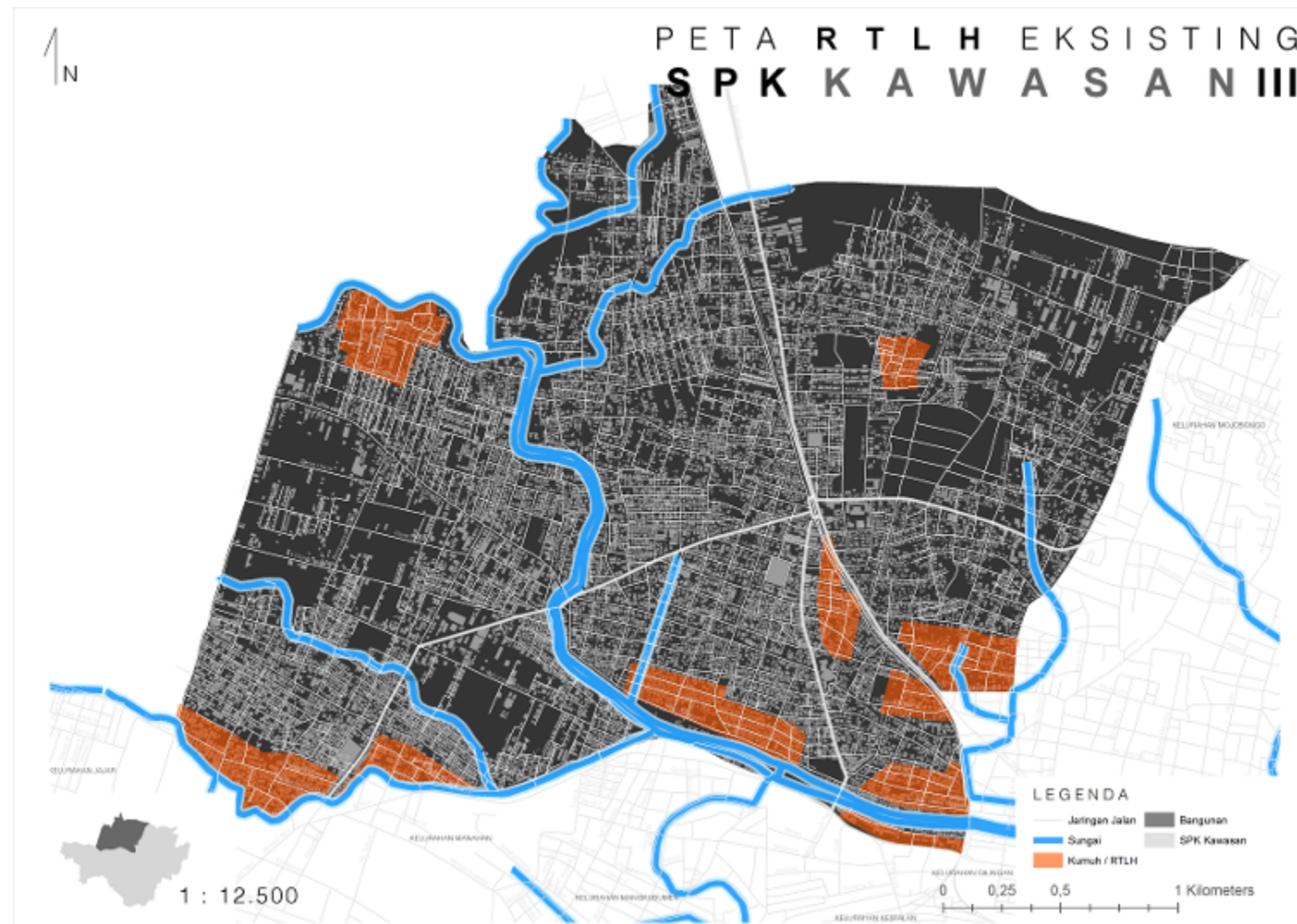
Permasalahan air limbah yang terjadi adalah adanya kawasan yang tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis seluas 166,94 Ha, 600 unit rumah tangga tidak memiliki sarana prasarana pengolahan limbah sesuai persyaratan (*septic tank*), serta 97,02 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengelolaan air limbahnya.

Permasalahan drainase yang terjadi adalah kondisi saluran drainase yang tidak baik dan adanya banjir atau genangan. Di SPK III, masih terdapat 1,22 Ha kawasan yang tergenang air saat hujan deras, 55,81 Ha kawasan tidak terlayani saluran drainase, 51.315 meter saluran drainase tidak terhubung sistem perkotaan, dan 11.980 meter konstruksi saluran drainase tidak memadai.

Cakupan pelayanan air minum aman dan layak dapat menjangkau 5.412 unit rumah tangga. Akan tetapi, masih terdapat rumah tangga yang tidak mengakses air (minum, mandi, cuci) yang aman dan layak sebanyak 3.197 unit rumah tangga dan yang tidak terpenuhi kebutuhan air minimal (60 liter/orang/hari) sebanyak 124 unit rumah tangga.

Permasalahan jalan yang terjadi adalah masih terdapatnya jalan yang tidak sesuai persyaratan teknis dan mengalami kerusakan. Dari total panjang jalan dalam kawasan kumuh di SPK II yaitu sepanjang 56.216 meter, sepanjang 34.135 meter tidak sesuai persyaratan (tidak dilengkapi saluran samping jalan) dan 6.541 meter tidak diperkeras dan mengalami kerusakan.

Dari seluruh Kawasan kumuh tersebut, yang paling luas sehingga paling mendesak untuk ditangani adalah kawasan Bantaran Kali Anyar. Selain terluas, keberadaannya yang dekat dengan sungai juga menjadi alasan untuk menjadi prioritas penanganan. Kelurahan terluas dari kawasan Bantaran Kali Anyar ini adalah Kelurahan Nusukan. Tidak hanya berada pada kawasan Bantaran Kali Anyar, di Kelurahan Nusukan juga terdapat area kumuh yang lain, yaitu di Kawasan Nusukan.



Gambar 6.10
Peta Kawasan Permukiman Kumuh SPK III

Sumber: Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan 2015, Bappeda Kota Surakarta

Tabel 6.8
Kondisi Permukiman di SPK III

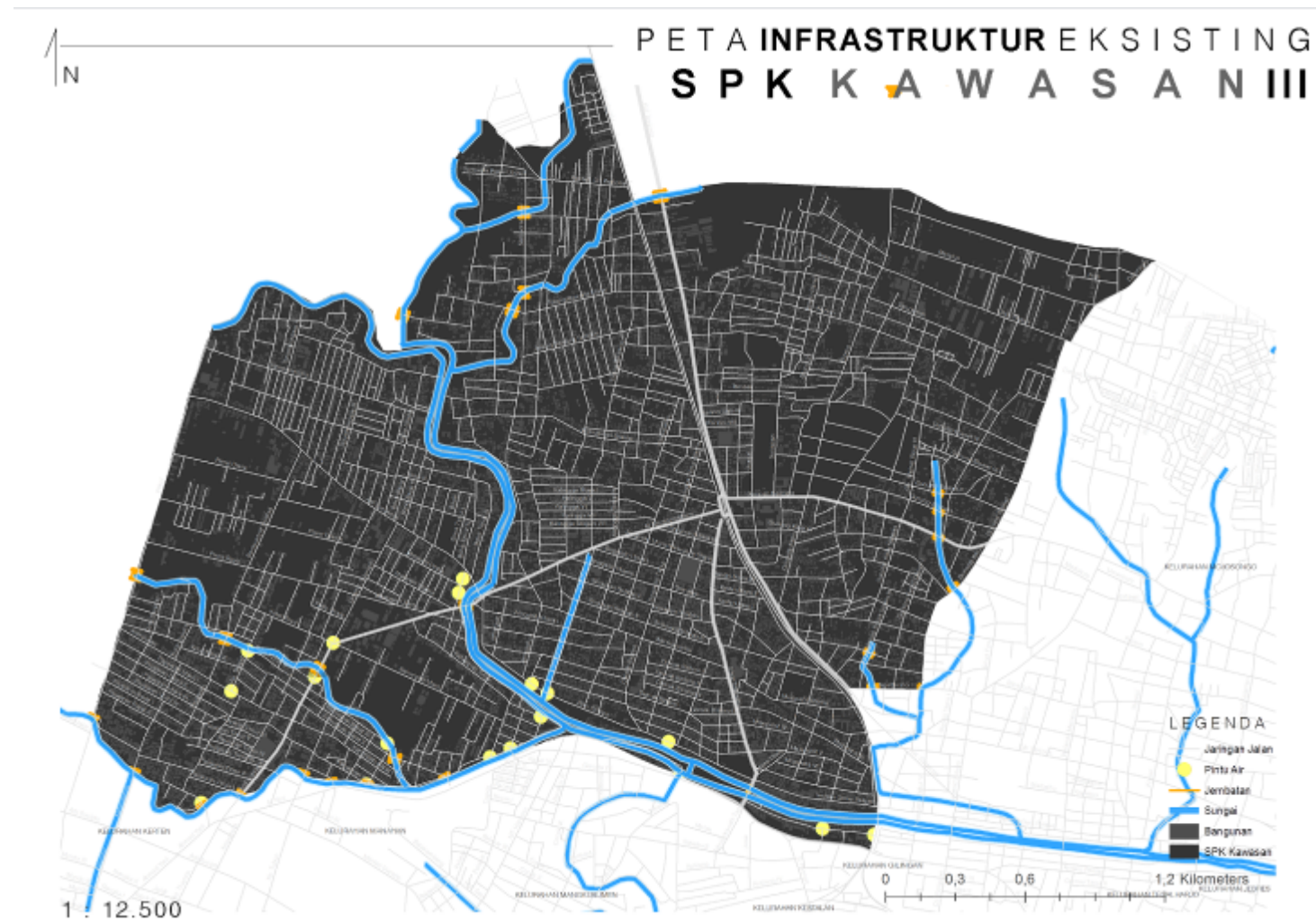
Kawasan Kumuh	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	Luas Kumuh (Ha)	Persampahan			Air Limbah			Drainase					Air Minum			Jalan Lingkungan			Jumlah RTLH (unit rumah)
						A (Ha)	B (unit rumah)	C (Ha)	D (Ha)	E (unit rumah)	F (Ha)	G (Ha)	H (Ha)	I (m)	J (m)	K (m)	L (unit rumah)	M (unit rumah)	N (unit rumah)	O (m)	P (m)	Q (m)	
Kawasan Bantaran Kali Anyar	Banjarsari	Gilingan	V	1, 2, 3, 4	3,88	25,66	1.762	29,32	41,24	369	21,99	0,05	25,66	13.272,3	28.765,65	13.780	3.115	1.607	8	56.530	11.398	6.290	1.123
			XV	1, 4, 5																			
			XVII	1, 2																			
			XXI	1, 2, 3, 4																			
		Manahan	I	1, 2, 3, 4	2,79																		
			II	2																			
		Nusukan	V	5	11,97																		
			VI	3																			
			VII	9																			
			VIII	6																			
			IX	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7																			
			XI	6																			
			XIII	1, 2, 3																			
			XIV	1, 2																			
			XXIII	4, 5, 7																			
		Sumber	I	1, 2, 3, 4	0,78																		
			II	1, 3																			
		Mojosongo	I	2, 3, 4	17,23																		
			II	3, 4, 5																			
			III	1, 2, 3, 5																			
			IV	1, 3																			
			VII	1																			

Kawasan Kumuh	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	Luas Kumuh (Ha)	Persampahan			Air Limbah			Drainase					Air Minum			Jalan Lingkungan			Jumlah RTLH (unit rumah)
						A (Ha)	B (unit rumah)	C (Ha)	D (Ha)	E (unit rumah)	F (Ha)	G (Ha)	H (Ha)	I (m)	J (m)	K (m)	L (unit rumah)	M (unit rumah)	N (unit rumah)	O (m)	P (m)	Q (m)	
Kawasan Bantaran Rel KA Kadipiro	Banjarsari	Kadipiro	IV	8	3,58	3,49	455	3,49	5,6	65	3,49	0,01	9,96	13.894	13.849	4.234	868	596	26	23.225	16.745	3.639	419
			VIII	1, 3																			
			X	5																			
			XXIII	1																			
			XXVII	3																			
		Nusukan	XIII	2, 5, 6	3,95																		
			XIV	3, 4, 5, 8																			
			XV	1, 2, 3, 4, 5, 7																			
			XVII	7,8																			
			XVII	1, 4, 5																			
			XVIII	1, 2, 3, 7																			
			XX	1																			
Kawasan Nusukan	Banjarsari	Nusukan	XXI	2	1,206	1,17	95	1,46	3,29	73	2,21	0	1,17	256	384	400	109	84	0	2.406	811	445	32
Kawasan Kadipiro Barat	Banjarsari	Kadipiro	XXVIII	3	0,501	0,32	101	0,54	1,2	6	0,13	0	0,43	290	435	350	32	69	0	2.051	401	400	19
Kawasan Kadipiro Timur	Banjarsari	Kadipiro	XXIV	9	0,537	0,36	2	0,71	2	1	0,03	0	0,71	269,2	471,1	405	96	15	0	1.765	379	246	40
Kawasan Sumber	Banjarsari	Manahan	XIII	2, 3, 4	3,469	4,17	114	5,01	94,57	50	67,25	0,23	5,84	2.129,4	2.433,6	2.536	382	284	0	7.569	1.664	786	233
		Sumber	XII	3	5,44																		
			XIII	1, 2, 4,																			
			XIV	1																			
			XV	1, 3																			
Kawasan Banyuanyar	Banjarsari	Banyuanyar	I	1	5,277	7,84	60	8,82	11,02	36	0,52	0,93	7,84	3.619,6	4.976,95	26.770	810	542	90	13.547	2.737	396	396
			I	3																			
			IV	4																			

Kawasan Kumuh	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	Luas Kumuh (Ha)	Persampahan			Air Limbah			Drainase					Air Minum			Jalan Lingkungan			Jumlah RTLH (unit rumah)	
						A (Ha)	B (unit rumah)	C (Ha)	D (Ha)	E (unit rumah)	F (Ha)	G (Ha)	H (Ha)	I (m)	J (m)	K (m)	L (unit rumah)	M (unit rumah)	N (unit rumah)	O (m)	P (m)	Q (m)		
						V	1, 2, 4																	
						VII	1, 2, 6																	
			VIII	1, 2, 3, 4																				
					60,61	43	2.589	49,35	158,92	600	95,62	1,220	51,61	33.730,5	51.315.3	48.475	5.412	3.197	124	10.7093	34.135	12.202	2.262	

Sumber : Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan 2015, Bappeda Kota Surakarta

Selain terdapat kawasan kumuh, SPK III juga memiliki infrastruktur jalan yang terdiri dari jalan, jembatan sebanyak 14 unit dan adanya pintu air sebanyak 23 unit. Adanya *ring road* menjadi hal penting dalam pengembangan SPK III karena perannya yang penting dalam peningkatan aksesibilitas dalam SPK III. *Ring road* memiliki fungsi jalan arteri primer sehingga terdapat 1.833,10 meter jalan arteri primer. Fungsi jalan yang terdapat di SPK III yang lainnya adalah jalan kolektor primer sepanjang 234,7 meter, jalan lokal sepanjang 155.511,08 meter, jalan setapak sepanjang 17.091,09 meter serta jalan kereta api sepanjang 2.861,82 meter.



Gambar 6.11
Peta Infrastruktur SPK III

Sumber: Bappeda Kota Surakarta

Tabel 6.9
Infrastruktur Jalan SPK III

No.	Jenis Jalan	Panjang Jalan
1	Arteri Primer	1.833,10
2	Kolektor Primer	234,7
3	Lokal	155.511,08
4	Setapak	17.091,09
5	Jalan KA	2.861,82

Sumber: RTRW Kota Surakarta

Tabel 6.10
Sebaran Infrastruktur Jembatan SPK III

NO	NAMA JEMBATAN	NAMA RUAS JALAN	SPK	Kecamatan	Kelurahan
1	JEMB.KOMPLANG/ S.ANYAR	JL. MANGUN SARKORO	III	Banjarsari	Nusukan
2	JEMB.TEMPUREJO/ S.SUMBER	JL. TEMPUREJO	III	Banjarsari	Sumber
3	JEMB.SUMBER/ S.SUMBER	JL. LETJEN SUPRAPTO	III	Banjarsari	Sumber
4	JEMB.KREMBYONGAN I/S.SERUNI	JL. SAMODRA PASAI	III	Banjarsari	Kadipiro
5	JEMB.KREMBYONGAN II/S.BAYAN	JL. SAMODRA PASAI	III	Banjarsari	Kadipiro
6	JEMB.JL. TULANG BAWANG UTARA/ S.SERUNI	JL. TULANG BAWANG UTARA	III	Banjarsari	Kadipiro
7	JEMB.POPDA/S. JENGGOLO	JL. POPDA	III	Banjarsari	Nusukan
8	JEMB.TEGAL MULYO/S.JENGGOLO	JL. ADI SUMARMO	III	Banjarsari	Banyuanyar
9	JEMB.TEGALMULYO/ S.PUTRI CEMPO	JL. SINGOSARI UTARA	III	Banjarsari	Nusukan
10	JEMB.KOMPLANG/ S.PEPE	JL. ADI SUMARMO	III	Banjarsari	Banyuanyar
11	JEMB.BAYAN/S. BAYAN	JL. AMD BAYAN	III	Banjarsari	Kadipiro
12	JEMB.TEGALMULYO/ S.TANGGUL	JL. ADI SUMARMO	III	Banjarsari	Banyuanyar
13	JEMB.TEGALMULYO/ S.TEGALMULYO	JL. ADI SUMARMO	III	Banjarsari	Banyuanyar
14	JEMB.KAHURIPAN III S.SUMBER (KEONG)	JL. KAHURIPAN III	III	Banjarsari	Sumber
15	JEMB.SUMBER/S. GADJAH PUTIH	JL. LETJEN SUPRAPTO	III	Banjarsari	Sumber
16	JEMB.YOSEP/ S. GADJAH PUTIH	JL. PAJAJARAN	III	Banjarsari	Sumber

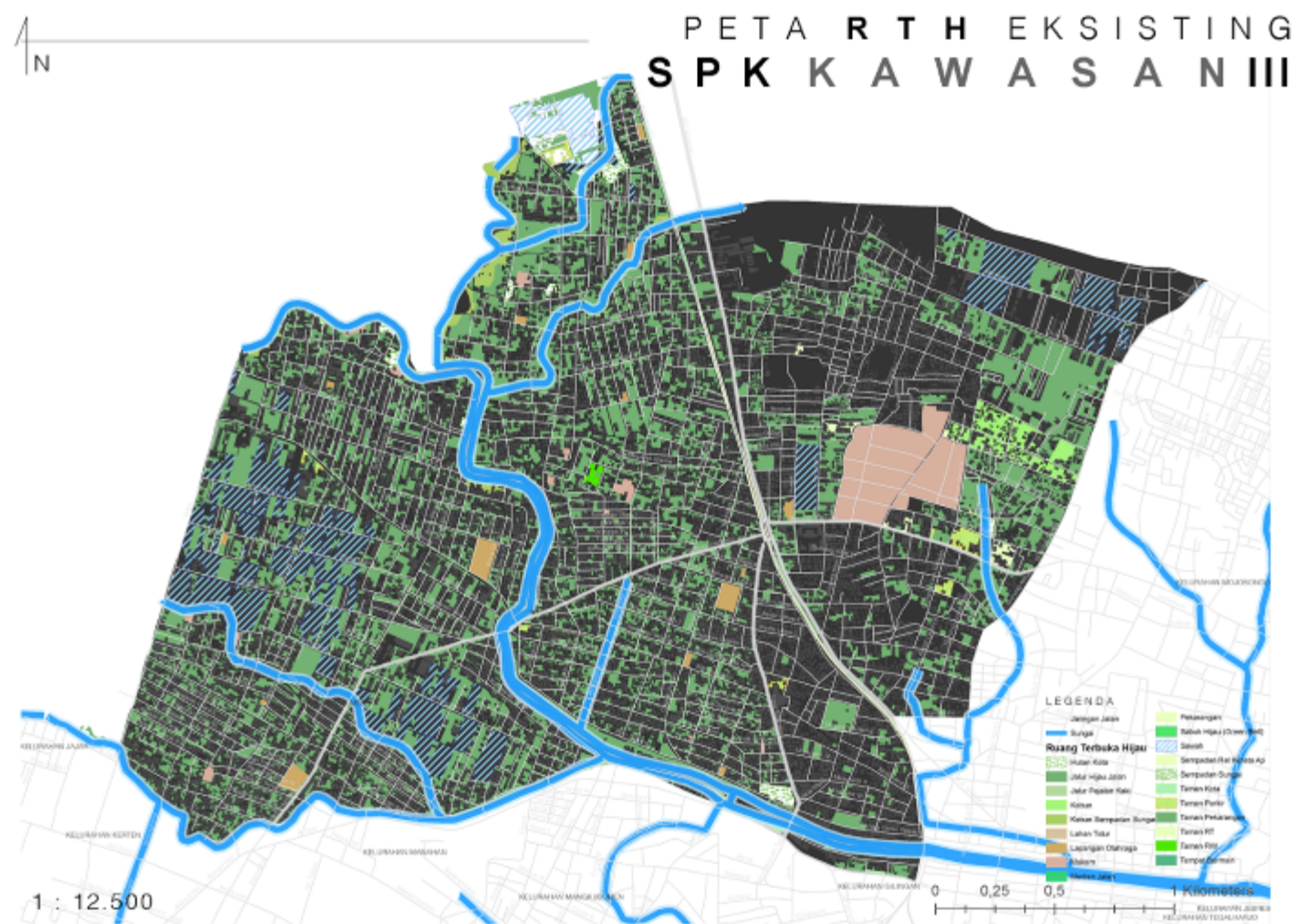
Sumber: Bappeda Kota Surakarta

Tabel 6.11
Sebaran Pintu Air SPK III

NO	NAMA PINTU AIR	NAMA RUAS JALAN	SPK	Kecamatan	Kelurahan
1	CANGGUL LAMA JALAN POPDA	MINAPADI	III	Banjarsari	Nusukan
2	MINAPADI RT.1 / IX JL. POPDA	MINAPADI	III	Banjarsari	Nusukan
3	JL. MATARAM TIMUR	BANYUANYAR	III	Banjarsari	Banyuanyar
4	JL. MATARAM TIMUR	LOMBONG TIMUR	III	Banjarsari	Banyuanyar
5	TAPEN RT.04 / V JL. POPDA	TAPEN	III	Banjarsari	Nusukan
6	TAPEN RT.4 / V JL. POPDA SELATAN MASJID	TAPEN	III	Banjarsari	Nusukan
7	SUMBER KRAJAN RT.2/1 JL. KAHURIPAN	SUMBER KRAJAN	III	Banjarsari	Sumber
8	SUMBER RT.05 / II	TEMPUR REJO	III	Banjarsari	Sumber
9	SUMBER RT.04 / II	TEMPUR REJO	III	Banjarsari	Sumber
10	SUMBER TAPEN RT.3/3 JL. KAHURIPAN BARAT	SUMBER TAPEN	III	Banjarsari	Sumber
11	SUMBER TAPEN RT.3/3 JL. KAHURIPAN BARAT	SUMBER TAPEN	III	Banjarsari	Sumber
12	SUMBER JETIS RT.6/VIII JL. KUTAI TENGAH	SUMBER JETIS	III	Banjarsari	Sumber
13	SUMBER JETIS RT.6/VIII JL. KUTAI TENGAH	SUMBER JETIS	III	Banjarsari	Sumber
14	SUMBER TRANGKILAN RT.01 / XV JL.PEJAJARAN SELATAN	SUMBER TRANGKILAN	III	Banjarsari	Sumber
15	SUMBER TRANGKILAN RT.01 / XII JL.PEJAJARAN TIMUR	SUMBER TRANGKILAN	III	Banjarsari	Sumber
16	JL. LETJEN SUPRAPTO	SUMBER	III	Banjarsari	Sumber
17	TIRTOYOSO RT. 3/XIII JL.KASWARI 2	SUMBER TIRTOYOSO	III	Banjarsari	Sumber
18	JL. KAHURIPAN RAYA RT.04/XII	SUMBER BERGAN	III	Banjarsari	Sumber
19	SUMBER BERGAN RT 03/XII JL.	SUMBER BERGAN	III	Banjarsari	Sumber

NO	NAMA PINTU AIR	NAMA RUAS JALAN	SPK	Kecamatan	Kelurahan
	KAHURIPAN SELATAN RAYA UTARA				
20	UTARA TAMAN BALEKAMBANG	SUMBER TEGALAN	III	Banjarsari	Sumber
21	TAPEN RT.2/3 JL. KAHURIPAN TENGAH	SUMBER TAPEN RT.2/3	III	Banjarsari	Sumber
22	TAPEN RT.3/3 JL. KAHURIPAN TENGAH	SUMBER TAPEN	III	Banjarsari	Sumber
23	JALAN POPDA	PUTRI CEMPO	III	Banjarsari	Nusukan

Sumber: Bappeda Kota Surakarta



Gambar 6.12
Peta RTK SPK III

Sumber: Inventarisasi RTH, BLH Kota Surakarta

RTH yang terdapat di SPK III meliputi RTH umum dan privat. Dari peta di atas, terlihat bahwa di SPK III terdapat makam yang cukup luas. Makam tersebut merupakan RTH umum. Jenis RTH lainnya adalah RTH sabuk hijau karena SPK III dilewati oleh sungai. Selain itu terdapat pula RTH Lapangan Olahraga dan masih banyak RTH privat karena masih luasnya tanah pekarangan di RTH III yang belum terbangun.

2) Potensi dan Keunggulan Wilayah

SPK Kawasan III terdiri dari Kelurahan Banyuanyar, Kadipiro, Nusukan dan Sumber. Di SPK Kawasan III terdapat empat pusat lingkungan yang terletak di Kelurahan Banyuanyar, Kelurahan Sumber, dan Kelurahan Kadipiro (dua pusat lingkungan).

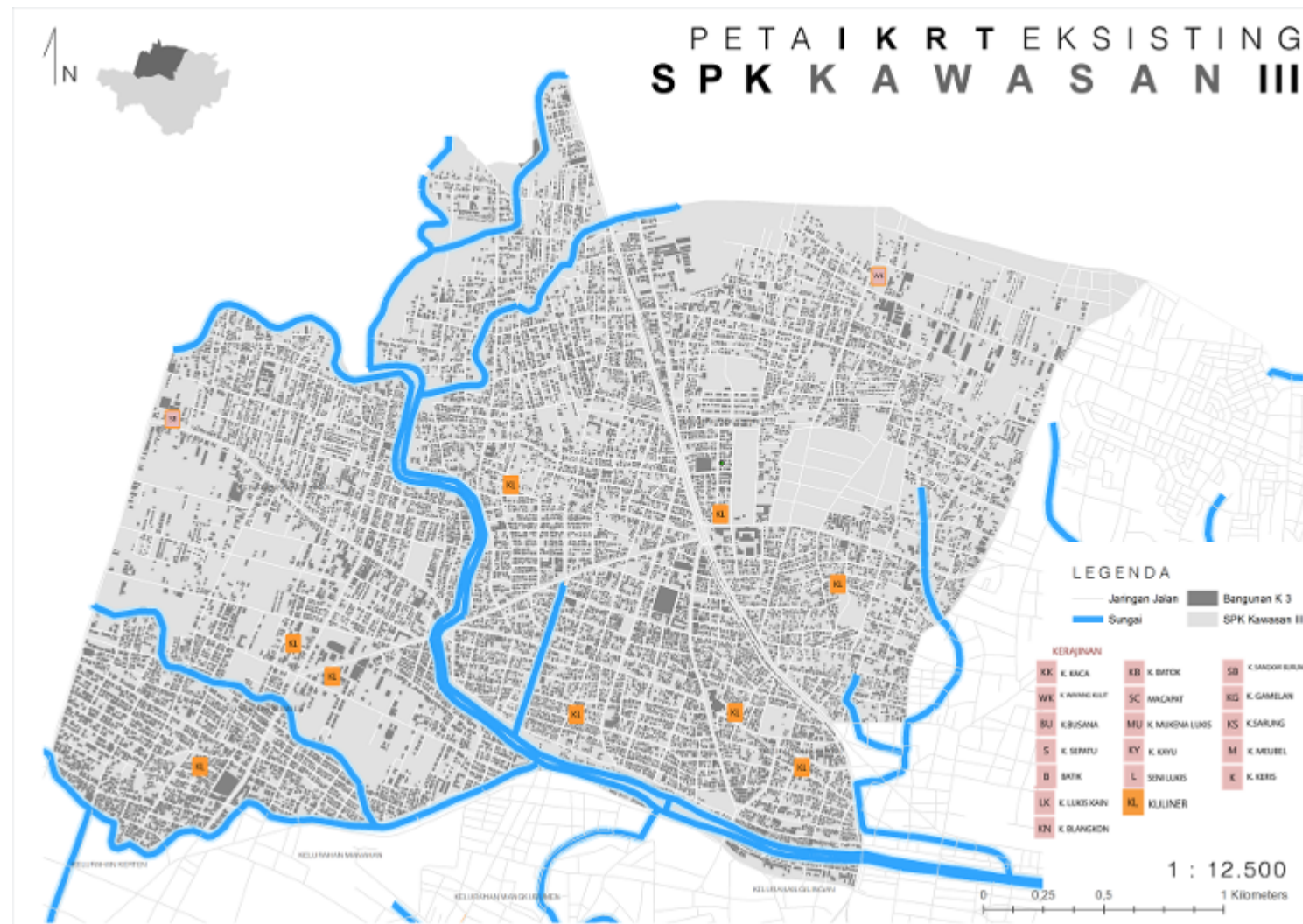
SPK Kawasan III terletak di bagian utara Kota Surakarta. Meskipun perkembangan yang terjadi saat ini tidak sepesat yang terjadi di bagian selatan, namun hal ini justru menjadikan bagian utara memegang peran sebagai area perkembangan kota Surakarta. Keberadaan *ring road* sebagai jaringan jalan arteri menjadi salah satu faktor perkembangan SPK Kawasan III.

Di Kelurahan Nusukan, terdapat pasar tradisional. Nusukan direncanakan dalam RTRW sebagai kawasan peruntukan kegiatan sektor informal. Hal ini mampu menjadikan potensi ekonomi wilayah.

Sedangkan Kelurahan Sumber dan Kadipiro masih terdapat lahan sawah. Di samping dapat menjadi ruang untuk pembangunan baru guna menampung perkembangan Kota Surakarta yang tidak bisa lagi dilakukan di Surakarta bagian selatan, adanya lahan sawah tersebut menjadi dasar pertimbangan penetapan area konservasi pertanian di SPK Kawasan III.

Selain itu, terdapat sentra industri yang merupakan potensi ekonomi bagi SPK III, yaitu sentra tempe, kerupuk, daur ulang kertas koran, dan sangkar burung.

Dari semua sentra tersebut, sentra sangkar memiliki jumlah unit usaha dan tenaga yang paling tinggi, sehingga perlu diprioritaskan dalam pengembangan sentra industri di SPK III.



Gambar 6.13
Peta Sentra Industri SPK III

Sumber: Bappeda Kota Surakarta

Tabel 6.12
Potensi Sentra Industri SPK III

No.	Nama Sentra	Jumlah Unit Usaha	Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp)
1.	Sentra Tempe Sumber Makmur	20	Sumber	Banjarsari	50	64.800.000
2.	Sentra Kerupuk	17	Kadipiro	Banjarsari	62	57.000.000
3.	Sentra Daur Ulang Kertas Koran	10	Kadipiro	Banjarsari	50	56.000.000
4.	Sentra Sangkar Sarana Sejahtera	24	Kadipiro	Banjarsari	62	57.000.000

Sumber: Bappeda Kota Surakarta

3) Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada arahan fungsi SPK Kawasan IV dalam RTRW Kota Surakarta, tujuan dari pengembangan SPK Kawasan III adalah mengembangkan SPK Kawasan III sebagai pusat konservasi SDA, pelayanan permukiman, dan perdagangan/Jasa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dan mempertimbangkan potensi yang ada, maka sasaran yang ditetapkan adalah: 1) meningkatnya ketersediaan perumahan yang layak huni dan berkurangnya permukiman kumuh; 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan; 3) Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan yang berkualitas; 4) Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Publik; 5) Tersedianya kesiapsiagaan sistem antisipasi risiko kebencanaan; 6) Tersedianya sarana dan prasarana ekonomi yang berdaya saing.

4) Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan potensi dan arahan fungsi dalam RTRW, serta mendukung tujuan dan sasaran, ditetapkan strategi dan arah kebijakan pengembangan SPK Kawasan III. Setiap sasaran memiliki strategi sebagai ide dasar untuk tercapainya sasaran, dan setiap strategi memiliki arah kebijakan pelaksanaannya. Berikut merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan dari dua sasaran yang telah dirumuskan.

Untuk mewujudkan kawasan permukiman layak huni, strategi yang ditetapkan adalah pengembangan permukiman berbasis masyarakat. Potensi sebagai area penyedia area permukiman, dan adanya kawasan kumuh di dalam kawasan karena rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, menjadi dasar pertimbangan perumusan strategi tersebut. Guna mendukung pelaksanaan strategi tersebut, ditetapkan arahan kebijakan memberdayakan masyarakat dalam peningkatan kualitas permukiman; memperluas lapangan usaha untuk menjamin keberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungannya, pendampingan peningkatan kualitas lingkungan oleh pemerintah.

Untuk mewujudkan terciptanya pusat perdagangan/jasa di Surakarta bagian utara, maka strategi yang ditetapkan adalah Pengembangan CBD di sekitar *ring road*. *Ring road* memiliki peran penting dalam perkembangan wilayah ini. Akan tetapi pengembangan CBD ini harus didukung oleh kawasan sekitarnya, tidak hanya di area sepanjang ring road saja. Dengan arahan kebijakan Menyediakan layanan pendukung kawasan CBD.

Tabel 6.13
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengembangkan SPK Kawasan III sebagai pusat konservasi SDA, pelayanan permukiman, dan perdagangan/Jasa	Meningkatnya ketersediaan perumahan yang layak huni dan berkurangnya permukiman kumuh	Peningkatan kuantitas dan kualitas penanganan RTLH beserta lingkungannya.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penanganan RTLH beserta lingkungannya
		Pengembangan permukiman berbasis masyarakat	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam peningkatan kualitas permukiman
	Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan	Peningkatan cakupan pelayanan akses aman air minum serta sanitasi	Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana serta sistem penyediaan akses aman air minum dan sanitasi (SPAM dan TPA regional)
		Pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Mengembangkan skema pengelolaan sampah melalui pemberdayaan komunitas yang ada di masyarakat
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan yang berkualitas	Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan serta kapasitas kelembagaan	Meningkatkan pengelolaan sistem transportasi dengan memperbesar aksesibilitas
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Publik	Peningkatan pemanfaatan ruang sempadan sungai	Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian ruang sempadan sungai
		Peningkatan ruang terbuka hijau	Meningkatkan pengelolaan dan sebaran RTH
		Peningkatan konsentrasi sumber daya alam	Meningkatkan pengelolaan penanganan lahan kritis melalui preservasi kawasan pertamanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Tersedianya kesiapsiagaan sistem antisipasi risiko kebencanaan	Pengurangan risiko genangan	Meningkatkan kualitas lingkungan pada titik-titik potensi genangan terutama pada wilayah Kelurahan Kadipiro, Banyuanyar dan Sumber.
			Meningkatkan manajemen penanggulangan bencana meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi
	Tersedianya sarana dan prasarana ekonomi yang berdaya saing	Pengembangan CBD pada kawasan ring road	Meningkatkan sarana prasarana CBD di sepanjang ring road
			Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian ruang bagi perdagangan dan jasa di sepanjang ring road
		Peningkatan sarana prasarana sentra industri kecil yang tersebar di dalam kawasan serta kapasitas SDM	Meningkatkan infrastruktur pendukung sentra industri kecil yang terpadu
			Meningkatkan kapasitas SDM industri kecil yang memiliki daya saing unggul
		Peningkatan pengelolaan IPAL bagi sentra industri tempe	Menciptakan ekosistem sentra ekonomi kreatif

b.Prioritas 2 (SPK Kawasan IV)

1) Capaian Kinerja Saat Ini

SPK Kawasan IV terdiri dari Kelurahan Mojosongo dan Nusukan. Terdapat satu kawasan kumuh di SPK IV, yaitu kawasan kumuh Mojosongo dengan luas total kawasan kumuh sebesar 11,886 Hektar. Di dalam kawasan kumuh tersebut, terdapat permasalahan persampahan, air limbah, drainase, air minum, infrastruktur jalan dan jembatan serta adanya RTLH. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan hanya kawasan kumuh saja yang mengalami permasalahan tersebut, namun kawasan yang tidak tergolong kumuh pun juga mengalami permasalahan-permasalahan di atas.

Permasalahan persampahan yang terjadi adalah masih terdapatnya kawasan yang tidak dilengkapi sarana prasarana persampahan sesuai prasyarat teknis seluas 10,33 Ha, adanya rumah tangga yang tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPA dan TPS sebanyak 29 unit rumah tangga, serta masih terdapat kawasan yang sarana dan prasarana persampahannya tidak terawat seluas 8,85 Ha.

Permasalahan air limbah yang terjadi adalah adanya kawasan yang tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis seluas 8,3 Ha.

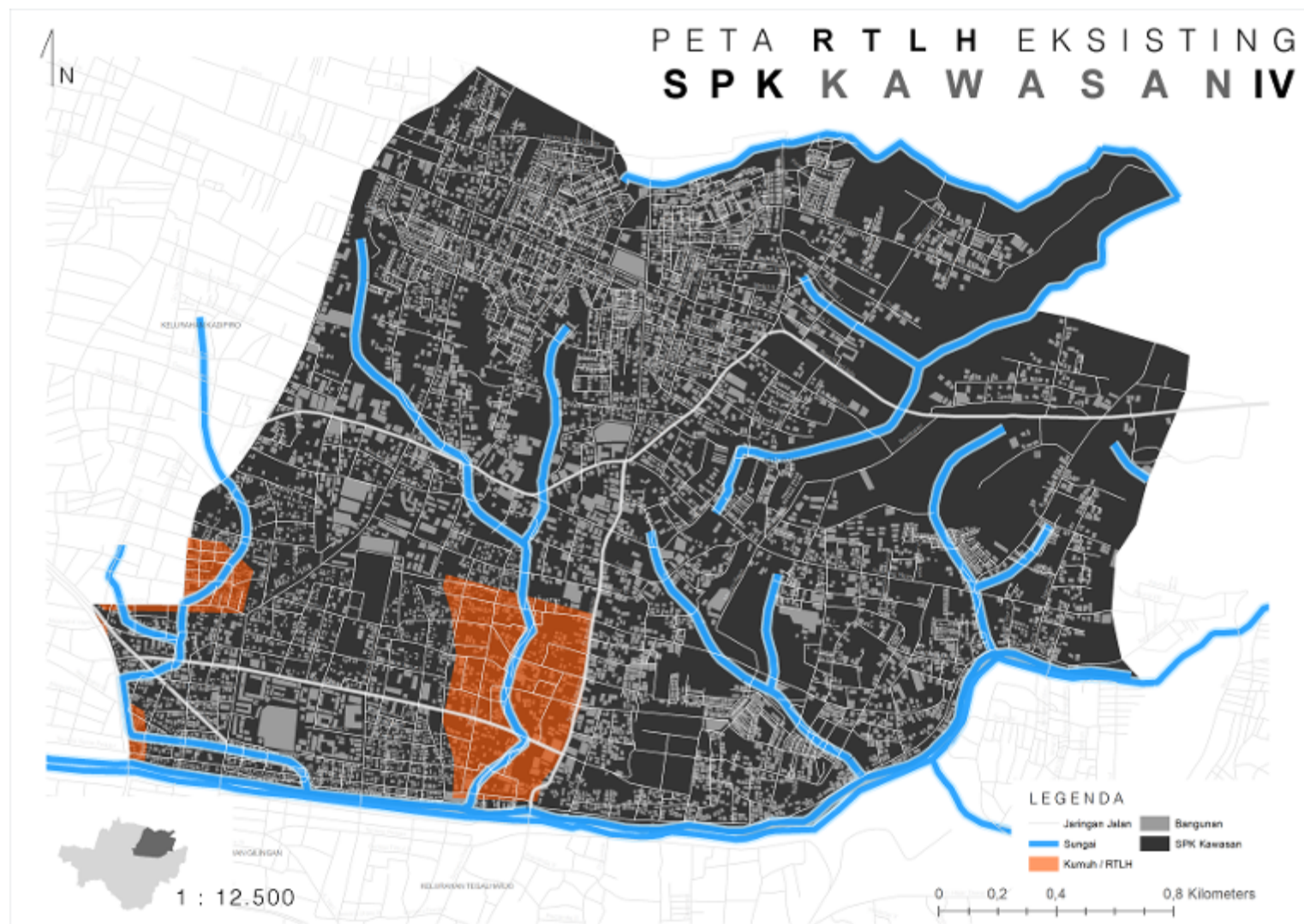
Permasalahan drainase yang terjadi adalah kondisi saluran drainase yang tidak baik dan adanya banjir atau genangan. Di SPK IV, tidak terdapat area genangan atau banjir. Namun masih ditemukan 2,95 Ha kawasan tidak terlayani saluran drainase, 3.804 meter saluran drainase tidak terhubung sistem perkotaan, 4.755,0 meter saluran drainase tidak terpelihara dan 242 meter konstruksi saluran drainase tidak memadai.

Cakupan pelayanan air minum aman dan layak dapat menjangkau 465 unit rumah tangga. Akan tetapi, masih terdapat rumah tangga yang tidak mengakses air (minum, mandi, cuci) yang aman dan layak sebanyak 42 unit rumah tangga.

Permasalahan jalan yang terjadi adalah masih terdapatnya jalan yang tidak sesuai persyaratan teknis dan mengalami kerusakan. Dari total panjang jalan dalam kawasan kumuh di SPK IV yaitu sepanjang 373 meter, sepanjang 130 meter tidak sesuai persyaratan (tidak dilengkapi saluran samping jalan) dan 100 meter tidak diperkeras dan mengalami kerusakan.

Kawasan kumuh Mojosongo perlu untuk ditangani agar tercipta lingkungan permukiman yang sehat di SPK IV.

Berikut merupakan kondisi permukiman kumuh di Kelurahan Mojosongo yang merupakan bagian dari SPK IV.



Gambar 6.14
Peta Kawasan Permukiman Kumuh SPK IV

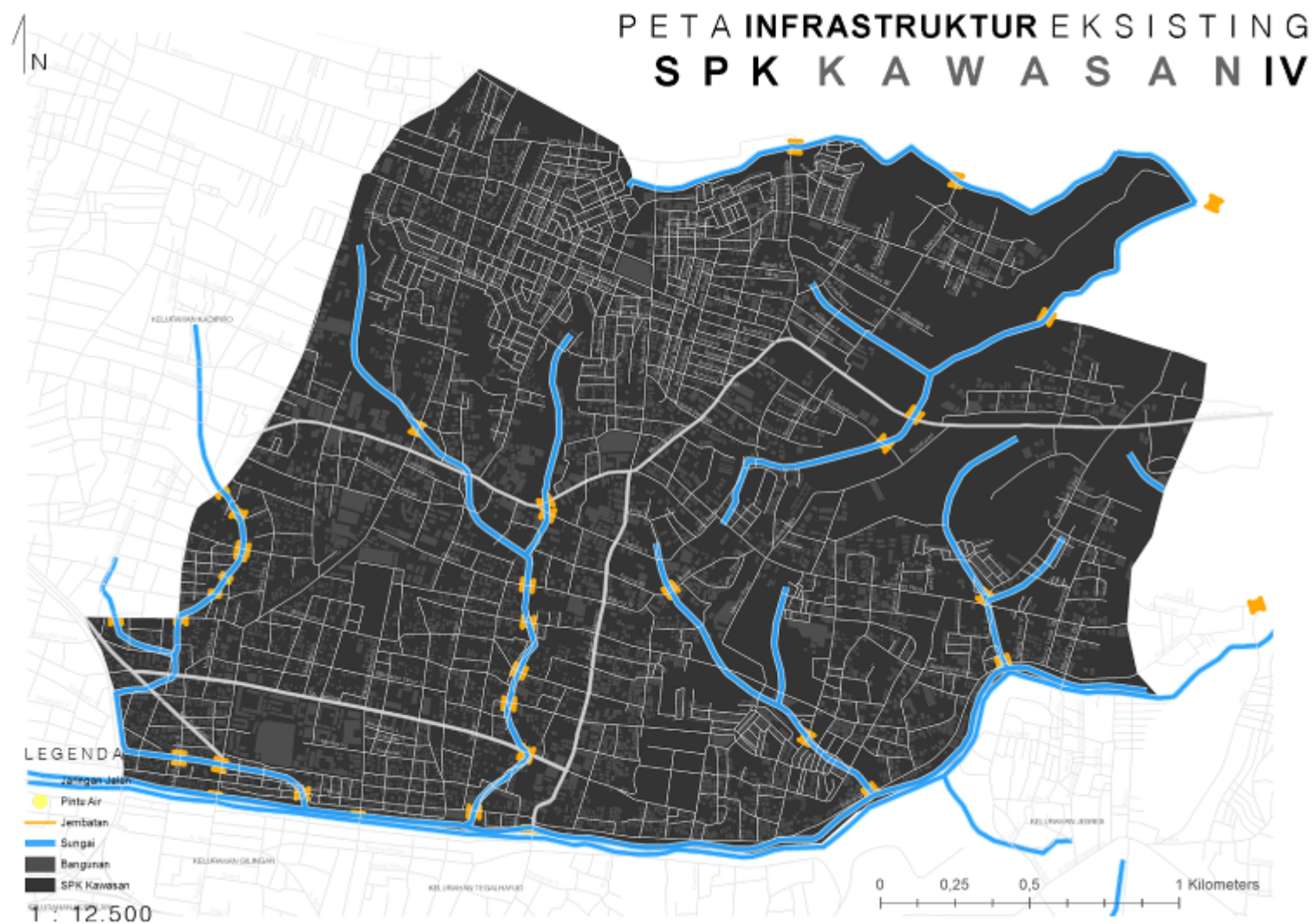
Sumber: Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan 2015, Bappeda Kota Surakarta

Tabel 6.14
Kondisi Permukiman di SPK IV

Kawasan Kumuh	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	Luas Kumuh (Ha)	Persampahan			Air Limbah			Drainase					Air Minum			Jalan			Jumlah RTLH (unit rumah)
						A (Ha)	B (unit rumah)	C (Ha)	D (Ha)	E (unit rumah)	F (Ha)	G (Ha)	H (Ha)	I (m)	J (m)	K (m)	L (unit rumah)	M (unit rumah)	N (unit rumah)	O (m)	P (m)	Q (m)	
Kawasan Mojosongo	Jebres	Mojosongo	VII	3. 1	11,886	10,33	29	8,85	8,3	0	0	0	2,95	3.804	4.755,00	242	465	42	0	373	130	100	61
			VIII	3. 4. 5																			

Sumber: Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan 2015, Bappeda Kota Surakarta

Selain terdapat kawasan kumuh, SPK IV juga memiliki infrastruktur jalan yang terdiri dari jalan, jembatan sebanyak 19 unit dan adanya pintu air sebanyak 1 unit. Adanya *ring road* menjadi hal penting dalam pengembangan SPK IV karena perannya yang penting dalam peningkatan aksesibilitas dalam SPK IV. *Ring road* memiliki fungsi jalan arteri primer sehingga terdapat 1.458,97 meter jalan arteri primer. Fungsi jalan yang terdapat di SPK IV yang lainnya adalah jalan kolektor primer sepanjang 460,54 meter, jalan lokal sepanjang 350,42 meter, jalan setapak sepanjang 27.057,82 meter serta jalan kereta api sepanjang 2.861,82 meter.



Gambar 6.15
Peta Infrastruktur SPK IV

Sumber: Bappeda Kota Surakarta

Tabel 6.15
Infrastruktur Jalan SPK IV

No.	Jenis Jalan	Panjang Jalan (m)
1	Arteri Primer	1.458,97
2	Kolektor Primer	460,54
3	Lokal	350,42
4	Setapak	27.057,82
5	Jalan KA	2.861,82

Sumber: RTRW Kota Surakarta

Tabel 6.16
Kondisi Permukiman di SPK IV

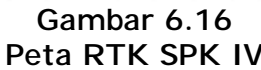
NO	NAMA JEMBATAN	NAMA RUAS JALAN	SPK	Kecamatan	Kelurahan
1	JEMB. MIPIDAN I / S.ANYAR	JL. MIPIDAN	IV	Jebres	Mojosongo
2	JEMB. MIPIDAN II / S.ANYAR	JL. MIPIDAN	IV	Jebres	Mojosongo
3	JEMB.NGEMPLAK 1/ S.GONDANG	JL. SABRANG LOR	IV	Jebres	Mojosongo
4	JEMB.SABRANG LOR/S.SABRANG LOR	JL. SABRANG LOR	IV	Jebres	Mojosongo
5	JEMB.DEBEGAN/S.DEBEGAN	JL. SABRANG LOR	IV	Jebres	Mojosongo
6	JEMB.KANDANG SAPI/KALIANYAR I	JL. BRIG,KATAMSO	IV	Jebres	Mojosongo
7	JEMB.KANDANG SAPI/KALIANYAR	JL. BRIG,KATAMSO	IV	Jebres	Mojosongo
8	JEMB.KEDUNG TUNGKUL/S.KEDUNG TUNGKUL	JL. SABRONG LOR	IV	Jebres	Mojosongo
9	JEMB.NGEMPLAK II/ S. GONDANG	JL. SABRANG LOR	IV	Jebres	Mojosongo
10	JEMB.S. GONDANG	JL. NGEMPLAK SUTAN	IV	Jebres	Mojosongo
11	JEMB.SUMBING/ S.GONDANG	JL. SUMBING IV	IV	Jebres	Mojosongo
12	JEMB.DEBEGAN/S.KEDUNG JUMBLENG	JL.MR. SARTONO	IV	Jebres	Mojosongo
13	JEMB.SARTONO I/ S.KRAKATAU	JL.MR.SARTONO	IV	Jebres	Mojosongo
14	JEMB.SARTONO II/S. TEMPURAN	JL.MR.SARTONO	IV	Jebres	Mojosongo
15	JEMB.KEDUNG JUMBLENG	JL. SUMPAH PEMUDA	IV	Jebres	Mojosongo
16	JEMB.WONOWOSO	JL. SUMPAH PEMUDA	IV	Jebres	Mojosongo
17	JEMB. DUKUHAN NAYU II	JL. SUMPAH PEMUDA	IV	Jebres	Mojosongo
18	JEMB. DUKUHAN NAYU I	JL. SUMPAH PEMUDA	IV	Jebres	Mojosongo
19	JEMB. SABRANG KULON /S.SABRANG KULON	JL. SABRANG LOR	IV	Jebres	Mojosongo

Sumber: Bappeda Kota Surakarta

Tabel 6.17
Sebaran Pintu Air SPK IV

NO	NAMA PINTU AIR	NAMA RUAS JALAN	SPK	Kecamatan	Kelurahan
1	NGEMPLAK TIMUR PASAR NGEMPLAK	NGEMPLAK	IV	Jebres	Mojosongo

Sumber: Bappeda Kota Surakarta



VI-55

RTH yang terdapat di SPK IV meliputi RTH umum dan privat. Dari peta di atas, terlihat bahwa di SPK IV terdapat lahan tidur yang cukup luas. Lahan tidur tersebut merupakan RTH privat. Jenis RTH lainnya adalah RTH sabuk hijau karena SPK III dilewati oleh sungai. Selain itu terdapat pula RTH Lapangan Olahraga dan masih banyak RTH privat karena masih luasnya tanah pekarangan di RTH IV yang belum terbangun.

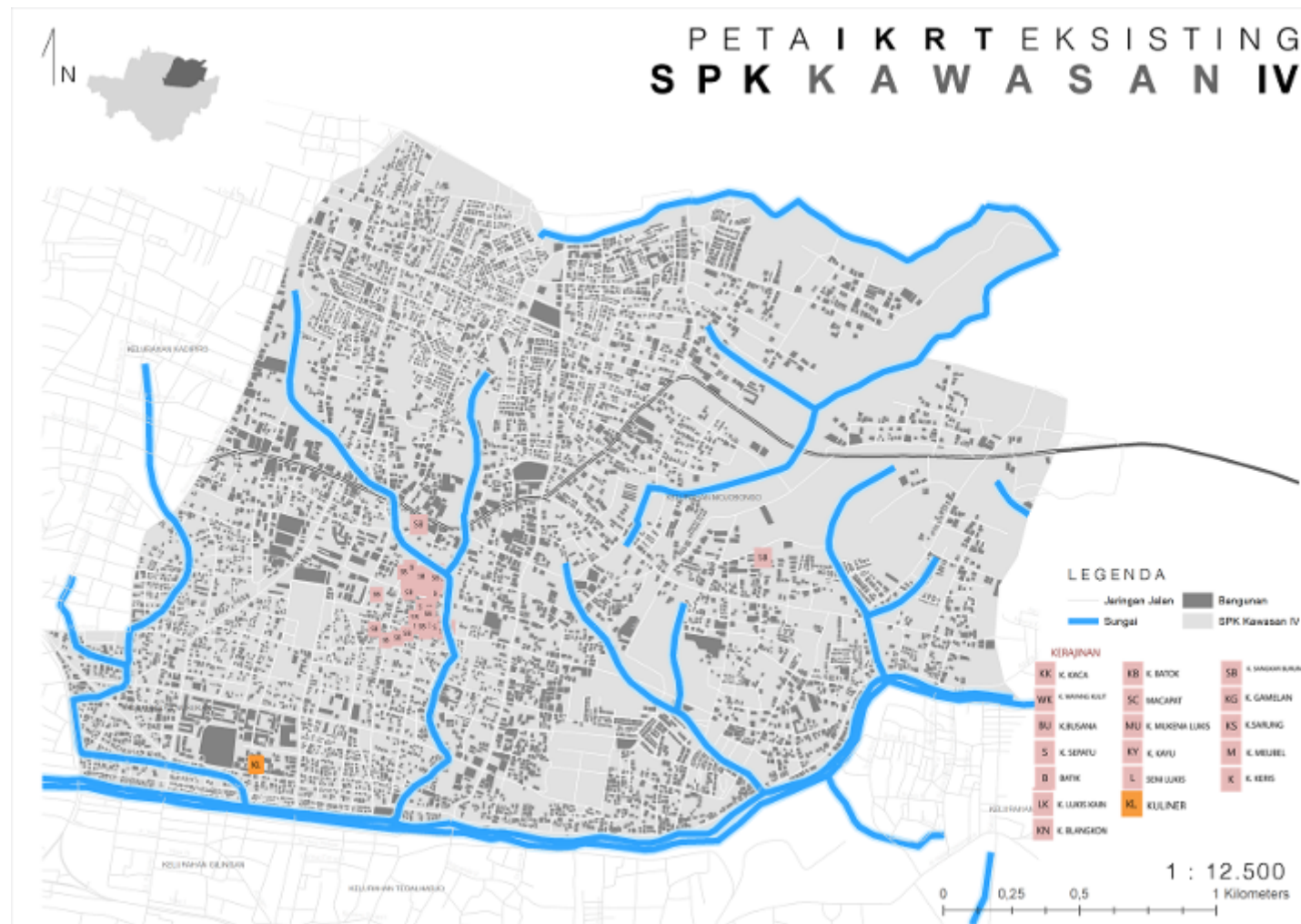
2) Potensi dan Keunggulan Wilayah

SPK Kawasan IV terletak di Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Nusukan. Pusat lingkungan di kawasan IV terletak di Kelurahan Mojosongo (tiga Pusat lingkungan) dan Kelurahan Nusukan. Saat ini, Kota Surakarta sedang melakukan pemerataan pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan yang sangat kentara antara Surakarta bagian selatan dengan bagian utara. Karena bagian selatan saat ini kondisinya sudah sangat terbangun, maka Pemerintah Kota Surakarta memberikan intervensi lebih di kawasan utara untuk dikembangkan. Upaya tersebut nampak pada intensnya pembangunan jalur transportasi di Solo Utara.

Kelurahan Mojosongo dilewati oleh jalan lingkar dan merupakan daerah yang direncanakan pembangunan jalan akses tol. Guna mendukung adanya jalan lingkar tersebut, di Mojosongo terdapat terminal angkutan barang untuk memfasilitasi truk-truk yang melintas *ring road*. Melalui peningkatan aksesibilitas tersebut, diharapkan pengembangan ke arah utara Kota Surakarta akan terjadi sehingga masalah kesenjangan pembangunan antara selatan dengan utara dapat teratasi.

Untuk menjamin ketersediaan air bersih, di Mojosongo terdapat instalasi pengolahan air bersih untuk mensupply kebutuhan air bersih Surakarta bagian utara. Mojosongo merupakan area tujuan relokasi Kota Surakarta karena masih banyak lahan kosong. Melalui peningkatan aksesibilitas, permukiman mulai tumbuh di kawasan utara Surakarta ini.

Selain terkait dengan potensi pengembangan aksesibilitas, Mojosongo juga memiliki potensi berupa adanya klaster industri yang meliputi industri tahu dan sangkar burung. Karena keberadaan industri tahu, maka perlu diperhatikan pengelolaan limbah hasil industri tersebut, saat ini, limbah yang berwujud cair dari industri tahu tersebut dibuang pada saluran limbah rumah tangga. Industri sangkar burung dengan jumlah unit usaha sebanyak 55 menjadi potensi yang kuat dalam pengembangan perekonomian di SPK IV berbasis masyarakat.. Selain itu, potensi ekonomi lain yang bisa dimunculkan adalah usaha pengolahan sampah berbasis masyarakat dengan adanya TPA Putri Cempo. Pengolahan sampah tersebut dapat berupa pembuatan kompos ataupun pembuatan barang dari hasil daur ulang sampah plastik, ataupun mengolah sampah menjadi sumber energi alternatif.



Gambar 6.17
Peta Sentra Industri SPK IV

Sumber: Bappeda Kota Surakarta

Tabel 6.18
Potensi Sentra Industri SPK IV

No.	Nama Sentra	Jumlah Unit Usaha	Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp)
1.	Sentra Tahu Sumber Rejeki	31	Mojosongo	Jebres	76	100.000.000
2.	Sentra Sangkar Burung Manunggal	55	Mojosongo	Jebres	170	121.450.000

Sumber: Bappeda Kota Surakarta

3) Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada arahan fungsi SPK Kawasan IV dalam RTRW Kota Surakarta, tujuan dari pengembangan SPK Kawasan IV adalah mengembangkan SPK Kawasan IV sebagai pusat pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa, industri kecil dan industri ringan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dan mempertimbangkan potensi yang ada, maka sasaran yang ditetapkan adalah: 1) Meningkatkan ketersediaan perumahan layak huni dan berkurangnya permukiman kumuh; 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan; 3) Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan yang berkualitas; 4) Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Publik; 5) Tersedianya sarana dan prasarana ekonomi yang berdaya saing.

4) Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan potensi dan arahan fungsi dalam RTRW, serta mendukung tujuan dan sasaran, ditetapkan strategi dan arah kebijakan pengembangan SPK Kawasan IV. Setiap sasaran memiliki strategi sebagai ide dasar untuk tercapainya sasaran, dan setiap strategi memiliki arah kebijakan pelaksanaannya. Berikut merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan dari tiga sasaran yang telah dirumuskan.

Untuk mewujudkan terciptanya kawasan permukiman layak huni, strategi yang ditetapkan adalah pengembangan permukiman berbasis masyarakat. Sebagai area tujuan relpkasi, dan adanya kawasan kumuh di dalam kawasan karena rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat serta karena keberadaan TPA Putri Cempo, maka kebijakan yang disusun adalah: 1) Memberdayakan masyarakat dalam peningkatan kualitas permukiman; 2) Mengembangkan usaha pengolahan sampah berbasis masyarakat melalui pembuatan kompos, pembuatan barang dari hasil daur ulang sampah plastik, ataupun mengolah sampah menjadi sumber energi alternatif; 3) Pendampingan peningkatan kualitas lingkungan oleh pemerintah.

Untuk mewujudkan terciptanya pusat perdagangan/jasa di Surakarta bagian utara, maka strategi yang ditetapkan adalah Pengembangan CBD di sekitar *ring road*. *Ring road* memiliki peran penting dalam perkembangan wilayah ini. Akan tetapi pengembangan CBD ini harus didukung oleh kawasan sekitarnya, tidak hanya di area sepanjang ring road saja. Dengan arahan kebijakan Menyediakan layanan pendukung kawasan CBD.

Untuk mewujudkan terciptanya industri kreatif yang mampu bersaing, strategi yang ditetapkan adalah Pengembangan klaster industri sangkar burung dan industri ringn yang berkelanjutan. Arahan Kebijakan yang disusun adalah: 1) Meningkatkan kemampuan pelaku industri; 2) meningkatkan akses terhadap permodalan; 3) menjamin ketersediaan bahan baku industri; 4) meningkatkan pasar produk industri; 5) menyederhanakan proses pengajuan izin usaha.

Tabel 6.19
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arahan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan
mengembangkan SPK Kawasan IV sebagai pusat pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa, industri kecil dan industri ringan.	Meningkatkan ketersediaan perumahan layak huni dan berkurangnya permukiman kumuh	Peningkatan kuantitas dan kualitas penanganan RTLH beserta lingkungannya	Meningkatka kuantitas dan kualitas penanganan RTLH di kawasan kumuh Mojosongo
		Peningkatan cakupan pelayanan akses aman terhadap air minum	Meningkatkan kapasitas sistem pengediaan akses yang aman terhadap air minum
	Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan	Peningkatan jumlah dan kinerja IPAL rumah tangga dan kawasan	Meningkatkan kuantitas IPAL rumah tangga di kawasan kumuh Mojosongo
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan yang berkualitas	Peningkatan infrastruktur kebinamargaan	Meningkatkan kuantitas jembatan
			Meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan fungsi jalan lokal menjadi kolektor
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Publik	Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang berbasis DAS	Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian ruang sempadan sungai di sepanjang kali Anyar
		Peningkatan kauntitas dan kualitas RTH	Meningkatkan pengelolaan dan sebaran RTH di Kelurahan Mojosongo
	Tersedianya sarana dan prasarana ekonomi yang berdaya saing	Pengembangan CBD pada wilayah ring road utara	Meningkatkan sarana dan prasarana kebinamargaan yang menunjang pengembangan CBD
		Peningkatan sarana pendukung sentra industri kecil yang tersebar di dalam kawasan SPK IV	Meningkatkan infrastruktur pendukung untuk pengembangan sentra industri sangkar burung yang terpadu di kawasan mojosongo
		Peningkatan penanganan limbah industri tahu	Meningkatkan kapasitas SDM industri sangkar burung Menciptakan kawasan sentra ekonomi kreatif

a. Prioritas 3 (SPK Kawasan V)

1) Capaian Kinerja Saat Ini

SPK Kawasan V merupakan kawasan yang terdiri dari Kelurahan Jebres, Pucangsawit, Jagalan, Purwodiningratan, dan Tegalharjo. Di Kelurahan-kelurahan tersebut, masing-masing terdapat kawasan kumuh. Luas total kawasan kumuh sebesar 63,146 Hektar dengan jumlah RTLH 2.651 unit rumah

Kawasan kumuh di SPK V, yaitu Bantaran Bengawan Solo dan bantaran rel kereta api, Kawasan Purwodiningratan, Tegalharjo, dan Kawasan Pucangsawit. Di dalam kawasan kumuh tersebut, terdapat permasalahan persampahan, air limbah, drainase, air minum, infrastruktur jalan dan jembatan serta adanya RTLH. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan hanya kawasan kumuh saja yang mengalami permasalahan tersebut, namun kawasan yang tidak tergolong kumuh pun juga mengalami permasalahan-permasalahan di atas.

Permasalahan persampahan yang terjadi adalah masih terdapatnya kawasan yang tidak dilengkapi sarana prasarana persampahan sesuai prasyarat teknis seluas 39,76 Ha, adanya rumah tangga yang tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPA dan TPS sebanyak 1.510 unit rumah tangga, serta masih terdapat kawasan yang sarana dan prasarana persampahannya tidak terawat seluas 49,98 Ha.

Permasalahan air limbah yang terjadi adalah adanya kawasan yang tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis seluas 90,23 Ha. 837 unit rumah tidak memiliki sarpras limbah sesuai prasyarat teknis (*septic tank*) dan 428,05 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampahnya.

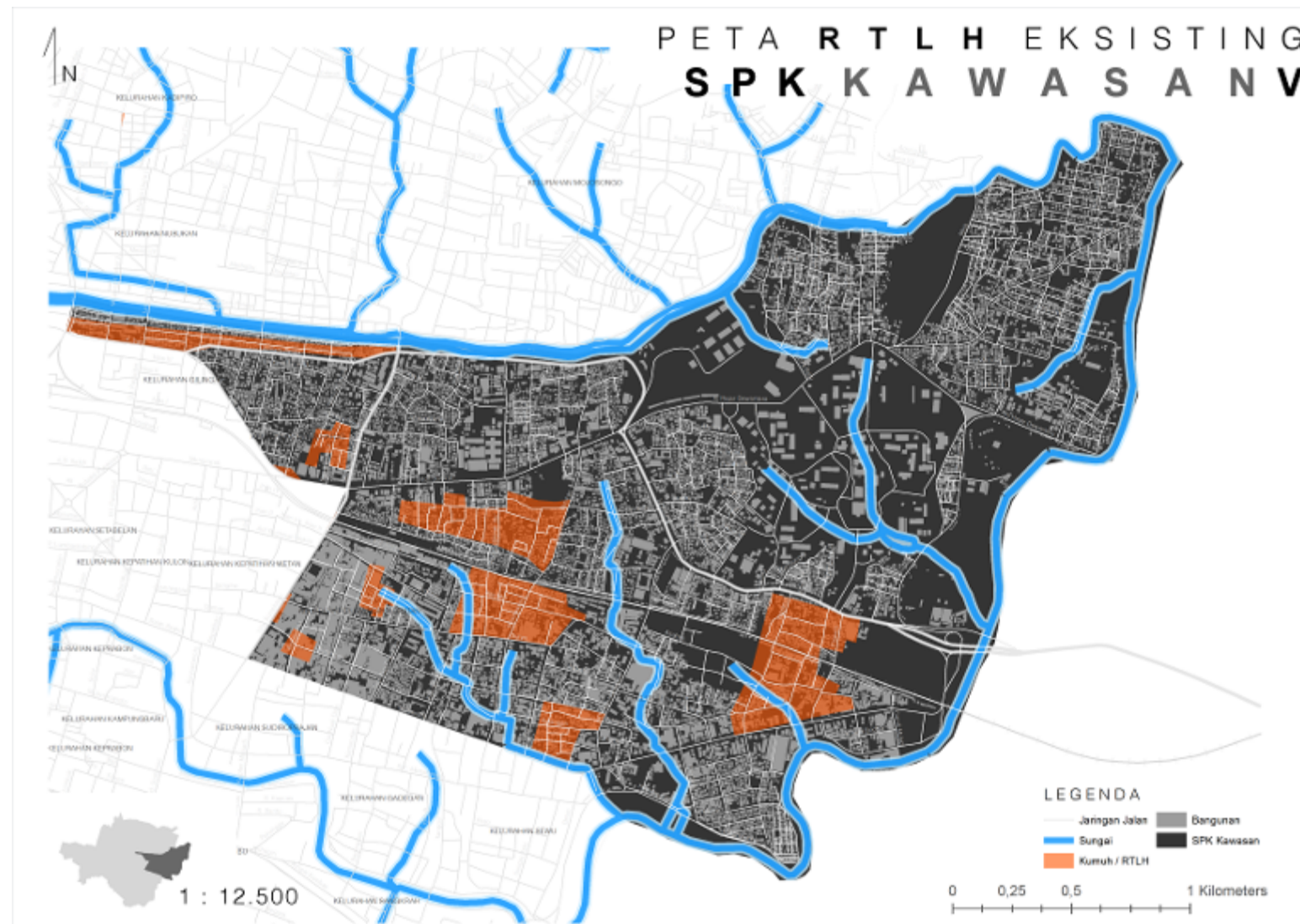
Permasalahan drainase yang terjadi adalah kondisi saluran drainase yang tidak baik dan adanya banjir atau genangan. Di SPK IV, terdapat 20,37 Ha area mengalami banjir saat terjadi hujan deras. Selain itu, masih ditemukan 62,88 Ha kawasan tidak terlayani saluran drainase, 26.835,27 meter saluran drainase tidak terhubung sistem perkotaan, 40.138,26 meter saluran drainase tidak terpelihara dan 27.015 meter konstruksi saluran drainase tidak memadai.

Cakupan pelayanan air minum aman dan layak dapat menjangkau 4.806 unit rumah tangga. Akan tetapi, masih terdapat rumah tangga yang tidak mengakses air (minum, mandi, cuci) yang aman dan layak sebanyak 1.755 unit rumah tangga dan sebanyak 1.267 rumah tangga tidak terpenuhi kebutuhan air minimal (60/orang/hari).

Permasalahan jalan yang terjadi adalah masih terdapatnya jalan yang tidak sesuai persyaratan teknis dan mengalami kerusakan. Dari total panjang jalan dalam kawasan kumuh di SPK V yaitu sepanjang 68.661,5 meter, sepanjang 14.678,8 meter

tidak sesuai persyaratan (tidak dilengkapi saluran samping jalan) dan 6.848,8 meter tidak diperkeras dan mengalami kerusakan.

Permasalahan utama yang perlu diperhatikan di SPK V adalah drainase, hal ini didasarkan oleh kondisi eksisting SPK V yang masih terjadi banjir saat musim penghujan khususnya di Kelurahan Pucangsawit.



Gambar 6.18
Peta Kawasan Permukiman Kumuh SPK V

Sumber: Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan 2015, Bappeda Kota Surakarta

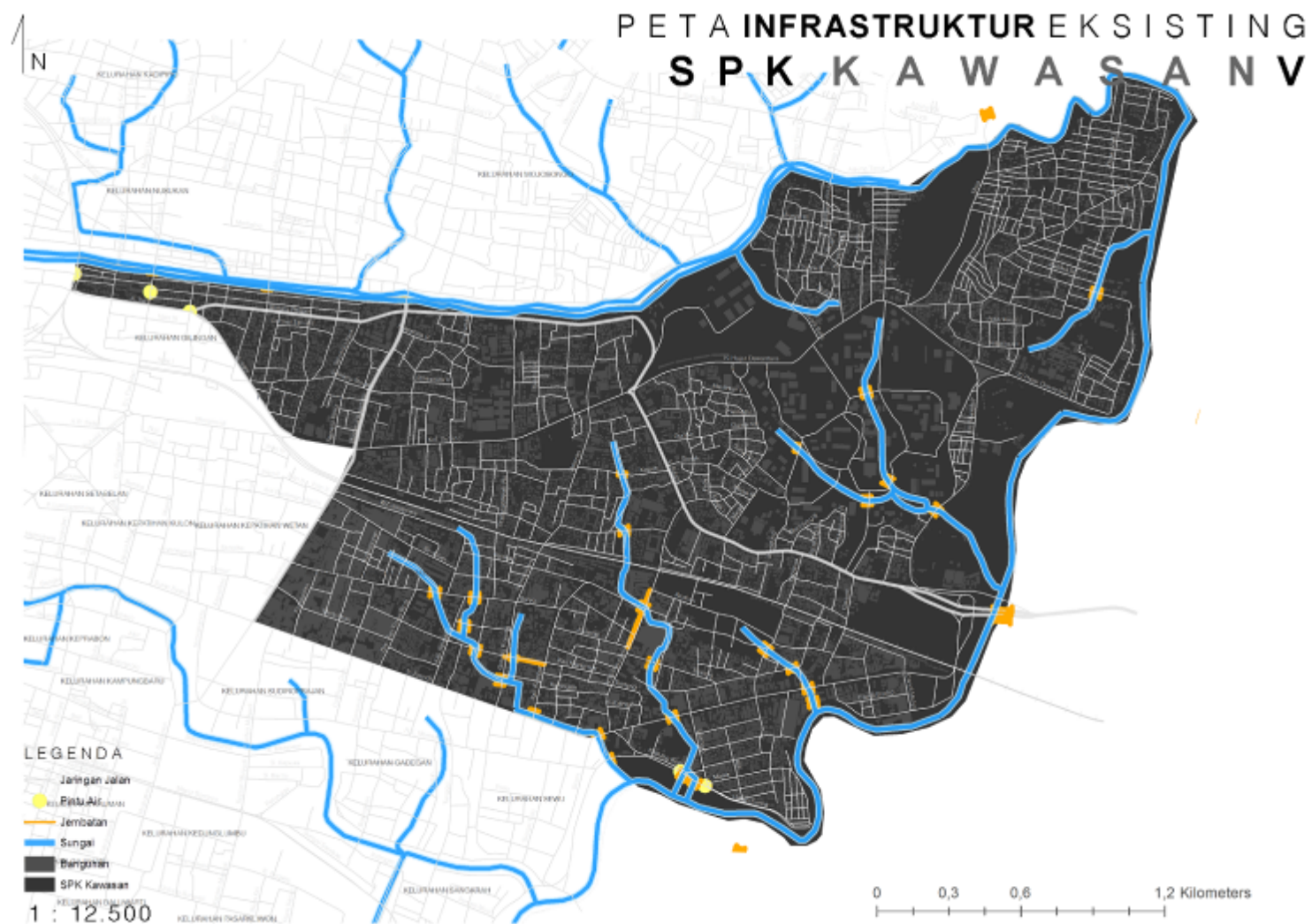
Tabel 6.1
Kondisi Permukiman di SPK V

Kawasan Kumuh	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	Luas Kumuh (Ha)	Persampahan			Air Limbah			Drainase					Air Minum			Jalan			Jumlah RTLH (unit rumah)	
						A (Ha)	B (unit rumah)	C (Ha)	D (Ha)	E (unit rumah)	F (Ha)	G (Ha)	H (Ha)	I (m)	J (m)	K (m)	L (unit rumah)	M (unit rumah)	N (unit rumah)	O (m)	P (m)	Q (m)		
KawasanB antaran Bengawan Solo	Jebres	Jebres	XX	1. 2. 4. 6	9,413	6,7	133	7,82	12,57	42	1,4	8,94	13,41	508	508	785	485	187	100	1154	334	21	137	
			XX XVI	1. 2. 3. 4																				
Kawasan Purwodini ngratan	Jebres	Jagalan	VII	2. 3	2,66	6,58	348	10,97	24,68	188	5,02	3,81	15,35	8365,56	13145,88	10605,4	995	647	271	19496,2	4136,1	1289	898	
			VIII	3. 5																				
		Jebres	VII	1. 2. 3	5,562																			
			Pucangsawit	I	3. 4																			6,447
		II		1. 2																				
		XV		1. 2. 3																				
		Purwodinin gratan	VI	2. 3	0,919																			
				VII																				4
				VIII																				4
				IX																				4
X	2																							
Kawasan Pucangsawit	Jebres	Jagalan	I	2. 3. 4	4,358	17,62	939	20,56	33,04	229	411	6,64	23,49	14062,76	19336,3	10084	2592	677	370	31276,9	5817,7	1743,8	1002	
			II	2. 3. 4																				
			V	1. 2. 3. 4. 5. 6																				
			XIV	2. 3																				
		Pucangsawit	III	1. 2. 3	10,979																			

Kawasan Kumuh	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	Luas Kumuh (Ha)	Persampahan			Air Limbah			Drainase					Air Minum			Jalan			Jumlah RTLH (unit rumah)
						A (Ha)	B (unit rumah)	C (Ha)	D (Ha)	E (unit rumah)	F (Ha)	G (Ha)	H (Ha)	I (m)	J (m)	K (m)	L (unit rumah)	M (unit rumah)	N (unit rumah)	O (m)	P (m)	Q (m)	
		t	IV	2																			
			V	1. 2																			
			VI	1. 3																			
			VIII	4. 5																			
			X	2																			
			XIII	2. 3. 4																			
			XIV	2																			
		Sewu	I	3	2,281																		
			II	1. 2. 3																			
			III	1																			
Kawasan Tegalharjo	Jebres	Tegalharjo	I	1, 3, 4, 5	20,527	8,86	90	10,63	19,94	378	10,63	0,98	10,63	3898.95	7148.08	5541	734	244	526	16734.4	4391	3795	614
			II	1, 2, 3																			
			III	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9																			
			IV	2, 4																			
			V	2, 6																			
			VI	1, 2, 3																			
Jumlah					63,146	39,76	1510	49,98	90,23	837	428,05	20,37	62,88	26835,27	40138.26	27015.4	4806	1755	1267	68661.5	14678.8	6848.8	2651

Sumber: Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan 2015, Bappeda Kota Surakarta

Selain terdapat kawasan kumuh, SPK V juga memiliki infrastruktur jalan yang terdiri dari jalan, jembatan sebanyak 17 unit dan adanya pintu air sebanyak 5 unit. Adanya *ring road* menjadi hal penting dalam pengembangan SPK V karena perannya yang penting dalam peningkatan aksesibilitas dalam SPK V. *Ring road* memiliki fungsi jalan arteri primer sehingga terdapat 5.758,4 meter jalan arteri primer. Fungsi jalan yang terdapat di SPK V yang lainnya adalah jalan kolektor primer sepanjang 679,1 meter, jalan lokal sepanjang 84.126,3 meter, jalan setapak sepanjang 27.057,82 meter serta jalan kereta api sepanjang 25.095,58 meter.



Gambar 6.19
Peta Infrastruktur SPK V

Sumber: Bappeda Kota Surakarta

Tabel 6.2
Infrastruktur Jalan SPK V

No.	Jenis Jalan	Panjang Jalan (m)
1	Arteri Primer	5.758,4
2	Kolektor Primer	679,1
3	Lokal	84.126,3
4	Setapak	27.057,82
5	Jalan KA	25.095,58

Sumber: RTRW Kota Surakarta

Tabel 6.3
Sebaran Infrastruktur Jembatan SPK V

NO	NAMA JEMBATAN	NAMA RUAS JALAN	SPK	Kecamatan	Kelurahan
1.	JEMB. KENTINGAN I	JL. KH.MASKHUR	V	Jebres	Jebres
2.	JEMB.KENTINGAN II (sdh dicat dari ujung, tdk diteruskan)	JL. KH.MASKHUR	V	Jebres	Jebres
3.	JEMB.SUDIROPRAJAN	JL.RE. MARTADINATA	V	Jebres	Sudiroprajan
4.	JEMB.GOTONG ROYONG /S. BORO	JL.GOTONG ROYONG	V	Jebres	Jagalan
5.	JEMB.KALI SAMPANG/S.BORO	JL.KALI SIMPANG	V	Jebres	Jagalan
6.	JEMB.BELIK	JL.SURYO	V	Jebres	Purwodining ratan
7.	JEMB. PURWOHARJO	JL.SURYO	V	Jebres	Purwodining ratan
8.	JEMB.ABATOIR/S. JENES	JL. JAGALAN	V	Jebres	Jagalan
9.	JEMB.WONOSAREN	JL. SURYO	V	Jebres	Purwodining ratan
10.	JEMB.NGASINAN	JL. PETIR	V	Jebres	Jebres
11.	JEMB.SARI WARNA/ S. BORO	JL. HOS.COKROAMINO TO	V	Jebres	Pucangsawit
12.	JEMB.PUCANGSAWIT SWH TIMR I	JL. PORONG	V	Jebres	Pucangsawit
13.	JEMB.PUCANGSAWIT SWH TIMR II	JL. PORONG	V	Jebres	Pucangsawit
14.	JEMB.URIP SUMOHARJO/KALI PEPE	JL.JEND.URIP SOMOHARJO	V	Jebres	Purwodining ratan
15.	JEMB.SUDIRMAN/ SIMPON	JL. JEND.SUDIRMAN	V	Jebres	Purwodining ratan
16.	JEMB. PNP GULA JL RONGGOWARSITO	JL. RONGGOWARSITO	V	Jebres	Jebres
17.	JEMB.NGEBRUSAN/ S.PEPE	JL. SUTAN SYAHRIR	V	Jebres	Kepatihan Wetan

Sumber: Bappeda Kota Surakarta

Tabel 6.4
Sebaran Pintu Air SPK V

NO	NAMA PINTU AIR	NAMA RUAS JALAN	SPK	Kecamatan	Kelurahan
1.	PUCANG SAWIT RT.3/6 KEDUNG BELANG	PUCANG SAWIT	V	Jebres	Pucangwasit
2.	PUCANG SAWIT RT.3/6 KEDUNG BELANG KLEP	PUCANG SAWIT	V	Jebres	Pucangwasit
3.	PUCANG SAWIT RT.3/13	PUCANG SAWIT	V	Jebres	Pucangwasit
4.	PUCANG SAWIT RT.2/9 KEDUNG KOPI	PUCANG SAWIT	V	Jebres	Pucangwasit
5.	PUCANG SAWIT RT.3/9	PUCANG SAWIT	V	Jebres	Pucangwasit

Sumber: Bappeda Kota Surakarta

RTH yang terdapat di SPK V meliputi RTH umum dan privat. Dari peta di atas, terlihat bahwa RTH dominan di SPK V terdapat pada area kampus UNS dan Pedaringan yang merupakan hutan Kota. Jenis RTH lainnya adalah RTH sabuk hijau karena SPK III dilewati oleh sungai. Selain itu terdapat pula RTH Lapangan Olahraga dan RTH privat dari tanah pekarangan tidak seluas SPK III dan IV karena SPK V lebih terbangun.

2) Potensi dan Keunggulan Wilayah

SPK Kawasan V ditetapkan sebagai pusat pelayanan pariwisata, pendidikan tinggi dan industri kreatif. Di SPK Kawasan V terdapat taman satwataru jurug. Keberadaan Taman Satwa Taru ini sejalan dengan penetapan fungsi pelayanan pariwisata. Selain sebagai destinasi wisata, taman satwataru jurug juga memegang peran sebagai area hijau Kota Surakarta yang perlu dijaga kelestariannya.

Pada SPK Kawasan V juga terdapat kawasan pendidikan tinggi kentingan yang terdiri dari kampus UNS, Kampus ISI dan Technopark yang mendukung penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, terdapat pula sentra industri tempe dengan jumlah usaha 20 unit yang perlu diperhatikan pengembangannya karena mampu menggerakkan perekonomian kawasan.



Gambar 6.21
Peta Sentra Industri SPK V

Sumber: Bappeda Kota Surakarta

Tabel 6.5
Potensi Sentra Industri SPK V

No.	Nama Sentra	Jumlah Unit Usaha	Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp)
1.	Sentra Tempe Putri Mandiri	20	Sumber	Banjarsari	53	65.800.000

3) Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada arahan fungsi SPK Kawasan V dalam RTRW Kota Surakarta, tujuan dari pengembangan SPK Kawasan V adalah mengembangkan SPK Kawasan V sebagai pusat pelayanan pariwisata, pendidikan tinggi, dan industri kreatif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dan mempertimbangkan potensi yang ada, maka sasaran yang ditetapkan adalah: 1) terciptanya kawasan pariwisata yang berwawasan *eco-cultural*; dan 2) terciptanya iklim kawasan pendidikan tinggi yang kondusif; 3) terciptanya klaster industri kreatif yang berdaya saing.

4) Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan potensi dan arahan fungsi dalam RTRW, serta mendukung tujuan dan sasaran, ditetapkan strategi dan arah kebijakan pengembangan SPK Kawasan V. Setiap sasaran memiliki strategi sebagai ide dasar untuk tercapainya sasaran, dan setiap strategi memiliki arah kebijakan pelaksanaannya. Berikut merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan dari tiga sasaran yang telah dirumuskan.

Untuk mewujudkan kawasan pariwisata yang berwawasan *eco-cultural*, strategi yang ditetapkan adalah pengembangan kawasan wisata jurug sebagai kawasan wisata budaya ekologi. Arahan kebijakan yang disusun adalah: 1) Menyediakan fasilitas pendukung wisata; 2) Meningkatkan materi publikasi terkait wisata Jurug; 3) Meningkatkan kinerja kelembagaan guna mengembangkan pariwisata Jurug.

Untuk mewujudkan iklim kawasan pendidikan tinggi yang kondusif, ditetapkan strategi Pengembangan kawasan pendidikan kentingan yang kondusif dengan arah kebijakan menyediakan fasilitas pendukung pendidikan yang memadai.

Tabel 6.6
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arahkan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahkan Kebijakan
Mengembangkan SPK Kawasan V sebagai pusat pelayanan pariwisata, pendidikan tinggi dan industri kreatif	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan berkurangnya permukiman kumuh	Peningkatan kualitas dan kuantitas penanganan RTLH beserta lingkungan kumuh	Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanganan RTLH beserta lingkungannya di kawasan bantaran bengawan solo, kawasan purwodiningratan dan kawasan pucangsawit dengan prioritas penanganan pada kulurahan jagalan dan pucangsawit
	Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan	Peningkatan cakupan pelayanan drainase dan sanitasi untuk mendukung terwujudnya perumahan layak huni	Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana drainase dan sanitasi
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan yang berkualitas	Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	Meningkatkan struktur, pelebaran, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala pada jalan arteri primer
		Peningkatan kapasitas penanganan jalan dan jembatan	Meningkatkan kecepatan penanganan kerusakan jalan dan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan untuk menuju jalan bebas lubang
			Meningkatkan penuntasan penanganan secara bertahap dan terarah pada ruas jalan aretri primer
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Publik	Peningkatan penataan dan pemanfaatan ruang sempadan sungai bengawan solo	Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian ruang DAS di sepanjang sungai bengawan solo
		Peningkatan kualitas RTH	Meningkatkan pemanfaatan RTH kawasan jurug

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan
	Tersedianya kesiapsiagaan sistem antisipasi risiko kebencanaan	Pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas masyarakat	Meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi-rekonstruksi) terutama pada kawasan di sepanjang sungai Bengawan Solo (Kelurahan Pucangsawit dan Jebres)
		Meningkatkan koordinasi antar stakeholder dalam penanggulangan bencana	
		Meningkatkan kinerja sarana prasarana pengendalian banjir	
	Tersedianya sarana dan prasarana sosial budaya	Peningkatan sarana prasarana pendidikan kentingan dan wisata jurug sebagai kawasan wisata eco-cultural	Meningkatkan akses transportasi untuk menopang kawasan pendidikan dan pariwisata
		Peningkatan kawasan pendidkan yang kondusif	
	Tersedianya sarana dan prasarana ekonomi yang berdaya saing	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa berbasis klaster industri kecil di Kelurahan Pucangsawit	Menetapkan ekosistem kawasan sentra ekonomi kreatif industri tempe di Pucangsawit

b.Prioritas 4 (SPK Kawasan VI)

1) Capaian Kinerja Saat Ini

SPK Kawasan VI ini secara letak dalam Peta Kota Surakarta berada pada posisi di tengah kawasan ini terdiri dari Kelurahan Mangkubumen, Punggawan, Ketelan, Keprabon, Timuran, Kampung Baru, Kepatihan Kulon, Kepatihan Wetan, Sudiroprajan, Kestalan dan Gilingan.

Terdapat empat kawasan kumuh di SPK VI yaitu kawasan Timuran, Kawasan Kestalan, Kawasan Sudiroprajan dan Kawasan Punggawan, dengan luas total kawasan kumuh sebesar 48,3889 Hektar dan jumlah RTLH 2185 unit rumah. Di dalam kawasan kumuh tersebut, terdapat permasalahan persampahan, air limbah, drainase, air minum, infrastruktur jalan dan jembatan serta adanya RTLH. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan hanya kawasan kumuh saja yang mengalami permasalahan tersebut, namun kawasan yang tidak tergolong kumuh pun juga mengalami permasalahan-permasalahan di atas.

Permasalahan persampahan yang terjadi adalah masih terdapatnya kawasan yang tidak dilengkapi sarana prasarana persampahan sesuai prasyarat teknis seluas 26,45 Ha, adanya rumah tangga yang tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPA dan TPS sebanyak 929 unit rumah tangga, serta masih terdapat kawasan yang sarana dan prasarana persampahannya tidak terawat seluas 37,5 Ha.

Permasalahan air limbah yang terjadi adalah adanya kawasan yang tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis seluas 78,71 Ha. 820 unit rumah tidak memiliki sarpras limbah sesuai prasyarat teknis (*septic tank*) dan 23,21 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampahnya.

Permasalahan drainase yang terjadi adalah kondisi saluran drainase yang tidak baik dan adanya banjir atau genangan. Di SPK IV, terdapat 5,19 Ha area mengalami banjir saat terjadi hujan deras. Selain itu, masih ditemukan 35,61 Ha kawasan tidak terlayani saluran drainase, 12.078,84 meter saluran drainase tidak terhubung sistem perkotaan, 19.381,48 meter saluran drainase tidak terpelihara dan 18.657 meter konstruksi saluran drainase tidak memadai.

Cakupan pelayanan air minum aman dan layak dapat menjangkau 4615 unit rumah tangga. Akan tetapi, masih terdapat rumah tangga yang tidak mengakses air (minum, mandi, cuci) yang aman dan layak sebanyak 2332 unit rumah tangga dan sebanyak 101 rumah tangga tidak terpenuhi kebutuhan air minimal (60/orang/hari).

Permasalahan jalan yang terjadi adalah masih terdapatnya jalan yang tidak sesuai persyaratan teknis dan mengalami kerusakan. Dari total panjang jalan dalam kawasan kumuh di SPK VI yaitu sepanjang 80.367,8 meter, sepanjang 21.382 meter

tidak sesuai persyaratan (tidak dilengkapi saluran samping jalan) dan 8.590 meter tidak diperkeras dan mengalami kerusakan. Permasalahan utama yang perlu diperhatikan di SPK VI adalah persampahan dan drainase, hal ini didasarkan oleh kondisi eksisting SPK VI yang masih terjadi banjir saat musim penghujan. Permasalahan persampahan dipilih untuk menjadi prioritas penanganan karena padatnya permukiman yang berada di SPK VI.



Gambar 6.22
Peta Kawasan Permukiman Kumuh SPK VI

Sumber: Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan 2015, Bappeda Kota Surakarta

Tabel 6.7
Kondisi Permukiman di SPK VI

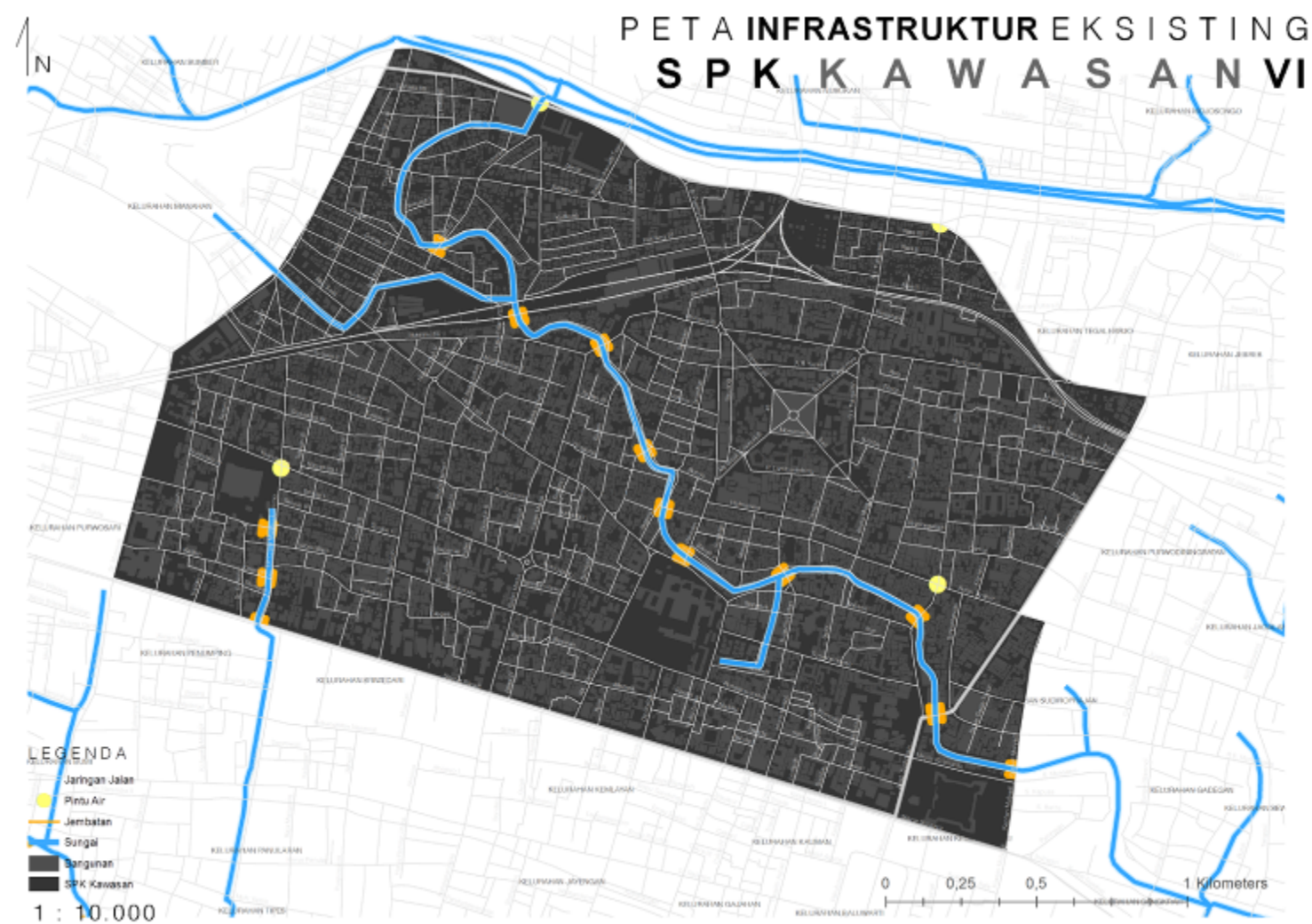
Kawasan Kumuh	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	Luas Kumuh (Ha)	Persampahan			Air Limbah			Drainase					Air Minum			Jalan			Jumlah RTLH (unit rumah)
						A (Ha)	B (unit rumah)	C (Ha)	D (Ha)	E (unit rumah)	F (Ha)	G (Ha)	H (Ha)	I (m)	J (m)	K (m)	L (unit rumah)	M (unit rumah)	N (unit rumah)	O (m)	P (m)	Q (m)	
Kawasan Timuran	Banjarsari	Timuran	I	4	9,533	4,51	4	7,89	12,09	32	1,61	0	7,89	3123,75	4908,75	1370	2252	197	28	9495	7000	550	228
			II	1, 2, 3																			
			III	3																			
			IV	1, 2, 4, 5																			
		Sriwedari	IV	1	0,273																		
Kawasan Kestalan	Banjarsari	Gilingan	III	1, 2, 3, 4	9,401	16,69	579	20,86	46,94	548	15,92	0,18	20,86	8591,25	13746	10357	1564	1414	52	45413	9456	5691	933
			V	6																			
			IX	6																			
			X	1, 2, 3, 4, 5, 6																			
			XIII	1, 8																			
		Keprabon	III	1, 2	0,4693																		
			IV	1																			
			V	4, 5, 6																			
			VI	1, 2																			
		Kestalan	I	2, 3	8,671																		
			II	1																			
			III	2, 3																			
			IV	1, 2																			

Kawasan Kumuh	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	Luas Kumuh (Ha)	Persampahan			Air Limbah			Drainase					Air Minum			Jalan			Jumlah RTLH (unit rumah)
						A (Ha)	B (unit rumah)	C (Ha)	D (Ha)	E (unit rumah)	F (Ha)	G (Ha)	H (Ha)	I (m)	J (m)	K (m)	L (unit rumah)	M (unit rumah)	N (unit rumah)	O (m)	P (m)	Q (m)	
			V	1, 2																			
			VI	2, 3																			
			II	3																			
		Ketelan	III	1, 2, 3	6,275																		
			IV	2																			
			V	1, 2, 3, 4																			
			VI	1, 2, 3																			
		IX	2																				
		Mangkubumen	II	3, 4, 5, 7	4,818																		
		Punggawan	I	1	1,285																		
		Setabelan	IX	2, 4	0,588																		
Kawasan Sudioprajan	Banjarsari	Kepatihan Kulon	II	2, 3, 4, 6, 7	0,578	4,84	346	8,06	18,13	229	5,13	4,96	6,45	3.844	6.727	5980	750	690	21	23769.8	4876	2109	997
			III	4																			
		Setabelan	V	1, 2, 3	0,267																		
		Kepatihan Wetan	I	5, 6	1,69																		
II	1, 4, 5, 6																						

Kawasan Kumuh	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	Luas Kumuh (Ha)	Persampahan			Air Limbah			Drainase					Air Minum			Jalan			Jumlah RTLH (unit rumah)
						A (Ha)	B (unit rumah)	C (Ha)	D (Ha)	E (unit rumah)	F (Ha)	G (Ha)	H (Ha)	I (m)	J (m)	K (m)	L (unit rumah)	M (unit rumah)	N (unit rumah)	O (m)	P (m)	Q (m)	
		Purwodinigratan	II	2	0,77																		
		Sudioprajan	VI	1, 2, 3, 4, 5, 6	2,746																		
			VII	1, 2																			
		Kampung Baru	0	0	0,749																		
			VI	1, 3																			
Kawasan Punggawan	Banjarsari	Punggawan	IV	6	0,226	0.41	0	0.69	1.55	11	0.55	0.05	0.41	360	720	950	49	31	0	1690	50	240	27
Jumlah					48,3889	26,45	929	37.5	78.71	820	23.21	5.19	35.61	15919	26101,75	18657	4615	2332	101	80367.8	21382	8590	2185

Sumber: Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan 2015, Bappeda Kota Surakarta

Selain terdapat kawasan kumuh, SPK VI juga memiliki infrastruktur jalan yang terdiri dari jalan, jembatan sebanyak 22 unit dan adanya pintu air sebanyak 5 unit. Fungsi jalan yang terdapat di SPK VI adalah jalan arteri primer sebanyak 5.758,4 meter, jalan kolektor primer sepanjang 792,64 meter, jalan lokal sepanjang 72.444,36meter, jalan setapak sepanjang 28.065,53 meter serta jalan kereta api sepanjang 4.730,58 meter.



Gambar 6.23
Peta Infrastruktur SPK VI

Sumber: Bappeda Kota Surakarta

Tabel 6.8
Infrastruktur Jalan SPK VI

No.	Jenis Jalan	Panjang Jalan (m)
1	Arteri Primer	5.758,4
2	Kolektor Primer	792,64
3	Lokal	72.444,36
4	Setapak	28.065,53
5	Jalan KA	4.730,58

Sumber: RTRW Kota Surakarta

Tabel 6.9
Sebaran Infrastruktur Jembatan SPK VI

NO	NAMA JEMBATAN	NAMA RUAS JALAN	SPK	Kecamatan	Kelurahan
1.	JEMB.SMP TP JL YOSODIPURO	JL.YOSODIPURO	VI	Banjarsari	Ketelan
2.	JEMB.PASAR LEGI / S.PEPE	JL.LETJEND.S.PARMAN	VI	Banjarsari	Setabelan
3.	JEMB.BALAPAN/ S. PEPE	JL.GAJAH MADA	VI	Banjarsari	Ketelan
4.	JEMB.SUNGAI ANYAR	JL. WALANDA MARAMIS	VI	Banjarsari	Gilingan
5.	JEMB.SUNGAI BIBIS BARU	JL. TENTARA GENI PELAJAR	VI	Banjarsari	Gilingan
6.	JEMB. SUNGAI KRAKATAU	JL. TENTARA GENI PELAJAR	VI	Banjarsari	Gilingan
7.	JEMB.SUNGAI KEDUNG JUMBLENG	JL. TENTARA GENI PELAJAR	VI	Banjarsari	Gilingan
8.	JEMB.RINGIN SEMAR	JL. MONGINSIDI	VI	Banjarsari	Gilingan
9.	JEMB.NGEMPLAK	JL. DI PANJAITAN	VI	Banjarsari	Gilingan
10.	JEMB.NGAMPON/S. KEDUNG JUMLENG	JL. NGAMPON	VI	Jebres	Jebres
11.	JEMB.GILINGAN/ S.ANYAR	JL. KAPTEN TENDEAN	VI	Banjarsari	Gilingan
12.	JEMB.SAMBENG/S. PEPE	JL. TIRTONADI/BIDO IV	VI	Banjarsari	Gilingan
13.	JEMB.TIRTONADI/S. PEPE	JL. TIRTONADI/BIDO IV	VI	Banjarsari	Gilingan
14.	JEMB.BRAYAT I/ S.PEPE	JL. SETIA BUDI	VI	Banjarsari	Gilingan
15.	JEMB.SAMBENG/S. PEPE	JL. COCAK V/DEP.KEL	VI	Banjarsari	Gilingan
16.	GORONG-GORONG PS.BELING	JL. YOSODIPURO	VI	Banjarsari	Ketelan
17.	JEMB.KAMPUNG BARU JL.RONGGO WARSITO	JL. RONGGOWARSITO	VI	Pasar Kliwon	Kampung Baru
18.	JEMB.KAMPUNG BARU/ S.TOKLO	JL. IMAM BONJOL	VI	Pasar Kliwon	Kampung Baru

NO	NAMA JEMBATAN	NAMA RUAS JALAN	SPK	Kecamatan	Kelurahan
19.	JEMB.KUSUMOYUDAN/S.PEPE	JL. KUSUMOYUDAN	VI	Banjarsari	Setabelan
20.	JEMB.NGEBLUKAN/S. TOKLO	JL. SAHARDJO	VI	Pasar Kliwon	Kampung Baru
21.	JEMB.SUNGAI NAYU BARAT	JL. TENTARA GENI PELAJAR	VI	Banjarsari	GILINGAN
22.	JEMB.SMP TP JL YOSODIPURO	JL.YOSODIPURO	VI	Banjarsari	Ketelan

Sumber: Bappeda Kota Surakarta

Tabel 6.10
Sebaran Pintu Air SPK VI

NO	NAMA PINTU AIR	NAMA RUAS JALAN	SPK	Kecamatan	Kelurahan
1.	TIRTONADI RUBBER DAM	TIRTONADI	VI	Banjarsari	Gilingan
2.	JOGOBAYAN JL. SUTAN SYAHIR	JOGOBAYAN	VI	Banjarsari	Setabelan
3.	REJOSARI RT.03 / XV JL. A. YANI	REJOSARI	VI	Banjarsari	Gilingan
4.	JL. A YANI UTARA ASRAMA CPM	ASRAMA CPM	VI	Banjarsari	Gilingan
5.	GILINGAN JL.A. YANI TIMUR ASRAMA CPM	GILINGAN	VI	Banjarsari	Gilingan

Sumber: Bappeda Kota Surakarta

RTH yang terdapat di SPK VI meliputi RTH umum dan privat. Dari peta di atas, terlihat bahwa di SPK III alun-alun sebagai RTH umum. Jenis RTH lainnya adalah RTH sabuk hijau karena SPK III dilewati oleh sungai. Selain itu terdapat pula RTH Lapangan Olahraga dan RTH privat dari tanah pekarangan tidak banyak karena mahalnya lahan pusat kota sehingga sangat intens dalam pembangunannya.

2) Potensi dan Keunggulan Wilayah

SPK Kawasan VI merupakan kawasan pusat kota Surakarta. Di dalamnya terdapat titik nol kota. Karena merupakan pusat kota, SPK Kawasan VI sudah sangat terbangun. Aktivitas dominan di dalam kawasan ini adalah aktivitas perdagangan dan jasa. Ikon dari aktivitas ini adalah Pasar Gede, Galabo, dan perkantoran di sepanjang Jalan Slamet Riyadi.

Selain itu, SPK Kawasan VI juga terdapat pusat kota dengan adanya balai kota yang memperlihatkan fungsi kawasan sebagai kawasan pelayanan pemerintahan. Saat ini, teknologi informasi sedang berkembang pesat. Sehingga pelayanan pemerintahan ini dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintahan.

Aktivitas yang menonjol lain di pusat kota adalah aktivitas pariwisata. Pariwisata di pusat kota merupakan pariwisata budaya, karena banyaknya aset kebudayaan kota seperti pasar gede, benteng vastenburg dan keraton mangkunegaran. Selain itu juga terdapat pasar barang antik.

Sebagai pendukung pariwisata budaya, terdapat *city walk* di sepanjang jalan slamet riyadi. Adanya *city walk* memudahkan wisatawan untuk berwisata menikmati suasana pusat kota Surakarta.

SPK Kawasan VI merupakan lokasi strategis kota Surakarta, sehingga aksesibilitas sangat tinggi. Selain itu SPK I juga memiliki potensi sentra industri mebel dengan jumlah usaha 70 unit dan investasi hingga 276.000.000 rupiah.



Gambar 6.25
Peta Sentra Industri SPK VI

Sumber: Bappeda Kota Surakarta

Tabel 6.11
Potensi Sentra Industri SPK VI

No.	Nama Sentra	Jumlah Unit Usaha	Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp)
1.	Sentra Mebel Mentari	70	Gilingan	Banjarsari	235	276.000.000

Sumber: Bappeda Kota Surakarta

3) Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada arahan fungsi SPK Kawasan VI dalam RTRW Kota Surakarta, tujuan dari pengembangan SPK Kawasan VI adalah mengembangkan SPK Kawasan VI sebagai pusat pelayanan pemerintahan, Pariwisata budaya, Perdagangan/Jasa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dan mempertimbangkan potensi yang ada, maka disusun empat sasaran yaitu: 1) Terwujudkannya kawasan pelayanan pemerintahan yang efektif dan efisien; 2) Terwujudnya kawasan pariwisata budaya; 3) Terwujudkannya kawasan perdagangan dan jasa pusat kota berwawasan budaya.

4) Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan potensi dan arahan fungsi dalam RTRW, serta mendukung tujuan dan sasaran, ditetapkan strategi dan arah kebijakan pengembangan SPK Kawasan VI. Setiap sasaran memiliki strategi sebagai ide dasar untuk tercapainya sasaran, dan setiap strategi memiliki arah kebijakan pelaksanaannya. Berikut merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan dari tiga sasaran yang telah dirumuskan.

Untuk mewujudkan kawasan pelayanan pemerintahan yang efektif dan efisien, strategi yang ditetapkan adalah pengembangan pelayanan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi. Sesuai dengan potensi yang ada, bahwa teknologi informasi saat ini sudah berkembang dengan sangat pesat dan adanya konsep *smart city* yang menawarkan sebuah ide *e-governance*, dimana pelayanan pemerintahan dapat diakses melalui internet. Oleh karena itu kebijakan yang disusun adalah: 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan; 2) Meningkatkan pendayagunaan teknologi informasi untuk mengakses layanan pemerintahan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan kawasan pariwisata budaya terpadu, maka strategi yang ditetapkan adalah pengembangan wisata di titik nol. Dengan arahan kebijakan menyediakan fasilitas pendukung wisata, meningkatkan materi publikasi terkait wisata titik nol, serta meningkatkan kinerja kelembagaan guna mengembangkan paket wisata titik nol.

Untuk mendukung terciptanya kawasan perdagangan dan jasa pusat kota berwawasan budaya, strategi yang ditetapkan adalah pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pusat kota berbasis budaya lokal. Arah kebijakan dari pelaksanaan strategi tersebut adalah mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa pusat kota yang terintegrasi dengan pariwisata.

Tabel 6.12
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arahan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan
Mengembangkan SPK Kawasan VI sebagai pusat pelayanan pemerintahan, Pariwisata budaya, Perdagangan/ Jasa	Meningkatnya ketersediaan perumahan yang layak huni dan berkurangnya pemukiman kumuh	Peningkatan kualitas penanganan RTLH beserta lingkungan permukiman pada empat kawasan kumuh di SPK VI	Meningkatkan kualitas penanganan RTLH beserta lingkungan permukiman kumuh terutama pada kawasan Sudiroprajan dengan jumlag RTLH terbanyak, dan Kelurahan Timuran dengan luas kumuh terluas
		Peningkatan cakupan pelayanan drainase, air limbah dan sampah	Meningkatkan kuantitas dan kinerja IPAL rumah tangga dan komunal
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan yang berkualitas	Peningkatan kualitas penanganan jalan dan jembatan	Meningkatkan struktur, rehabilitasi dan pemeliharaan secara berkala
		Peningkatan kinerja jalan dan jembatan	Meningkatkan kondisi baik jalan dan jembatan serta mengupayakan peningkatan kecepatan penanganan kerusakan jalan
		Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana kebinamargaan	Meningkatkan ketersediaan peralatan yang mendukung pemeliharaan jalan dan SDM serta SDM teknis kebinamargaan.
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Publik	Peningkatan penataan dan pemanfaatan ruang sempadan Kali Pepe yang melintas pada SPK VI	Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian ruang DAS di sepanjang Kali Pepe
		Peningkatan RTH pada kawasan sempadan Kali Pepe	Meningkatkan pemanfaatan RTH sempadan Kali Pepe
		Meningkatkan penanggulangan bencana banjir di sempadan Kali Pepe	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menangani bencana terutama yang bermukim di sempadan
	Meningkatnya pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi	peningkatan sarana prasarana dalam pengembagn pusat pelayanan pemerintahan terpadu	Meningkatkan fasilitas bandwidth/kuota pelayanan internet untuk program e-governance

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan
	informasi (<i>Solo Smart City</i>)	Peningkatan aksesibilitas kantor pelayanan lembaga pemerintah	
	Tersedianya sarana dan prasarana ekonomi yang berdaya saing	Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan perdagangan dan jasa	Meningkatkan kawasan perdagangan dan jasa pusat kota berbasis budaya lokal
		Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang wisata
	Meningkatnya pelestarian warisan karya budaya, adat istiadat, nilai-nilai seni budaya	Peningkatan proses konservasi cagar budaya yang ditetapkan secara ilegal	Meningkatkan pendokumentasian benda cagar budaya serta yang diduga BCB
			Mengembangkan proses pemanfaatan dan pengelolaan cagar bersama bersama-sama antar stakeholders (<i>public privat partnership</i>)
		Peningkatan dalam pemanfaatan dan pengelolaan BCB yang dilakukan secara kreatif dalam kaidah konservasi	Mengintegrasikan kawasan potensi cagar budaya dengan kawasan wisata yang berkelanjutan
	Berkembangnya ekonomi kreatif dan kota tujuan wisata seni dan budaya	Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan indsutri kecil	Mengoptimalkan kondisi klaster industri
		Peningkatan sinergisitas sarana prasarana dalam mendukung interaksi yang terjadi dalam sentra industri	Meningkatkan sinergisitas kawasan pada industri kecil

c. Prioritas 5 (SPK Kawasan II)

1) Capaian Kinerja Saat Ini

SPK Kawasan II ini secara letak dalam Peta Kota Surakarta berada pada posisi barat-selatan kawasan ini terdiri dari Kelurahan Karangasem, Jajar, Kerten, Manahan, Purwosari, Sondakan, Pajang, Laweyan dan Bumi.

Terdapat empat kawasan kumuh di SPK II yaitu kawasan Karangasem, Kawasan Laweyan, Kawasan Sondakan, Kawasan Kerten, Kawasan Manahan dan Kawasan Pajang dengan luas total kawasan kumuh sebesar 34,18 Hektar dan jumlah RTLH 2856 unit rumah. Di dalam kawasan kumuh tersebut, terdapat permasalahan persampahan, air limbah, drainase, air minum, infrastruktur jalan dan jembatan serta adanya RTLH. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan hanya kawasan kumuh saja yang mengalami permasalahan tersebut, namun kawasan yang tidak tergolong kumuh pun juga mengalami permasalahan-permasalahan di atas.

Permasalahan persampahan yang terjadi adalah masih terdapatnya kawasan yang tidak dilengkapi sarana prasarana persampahan sesuai prasyarat teknis seluas 28,67 Ha, adanya rumah tangga yang tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPA dan TPS sebanyak 432 unit rumah tangga, serta masih terdapat kawasan yang sarana dan prasarana persampahannya tidak terawat seluas 42,01 Ha.

Permasalahan air limbah yang terjadi adalah adanya kawasan yang tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis seluas 76,38 Ha. 543 unit rumah tidak memiliki sarpras limbah sesuai prasyarat teknis (*septic tank*) dan 15,88 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampahnya.

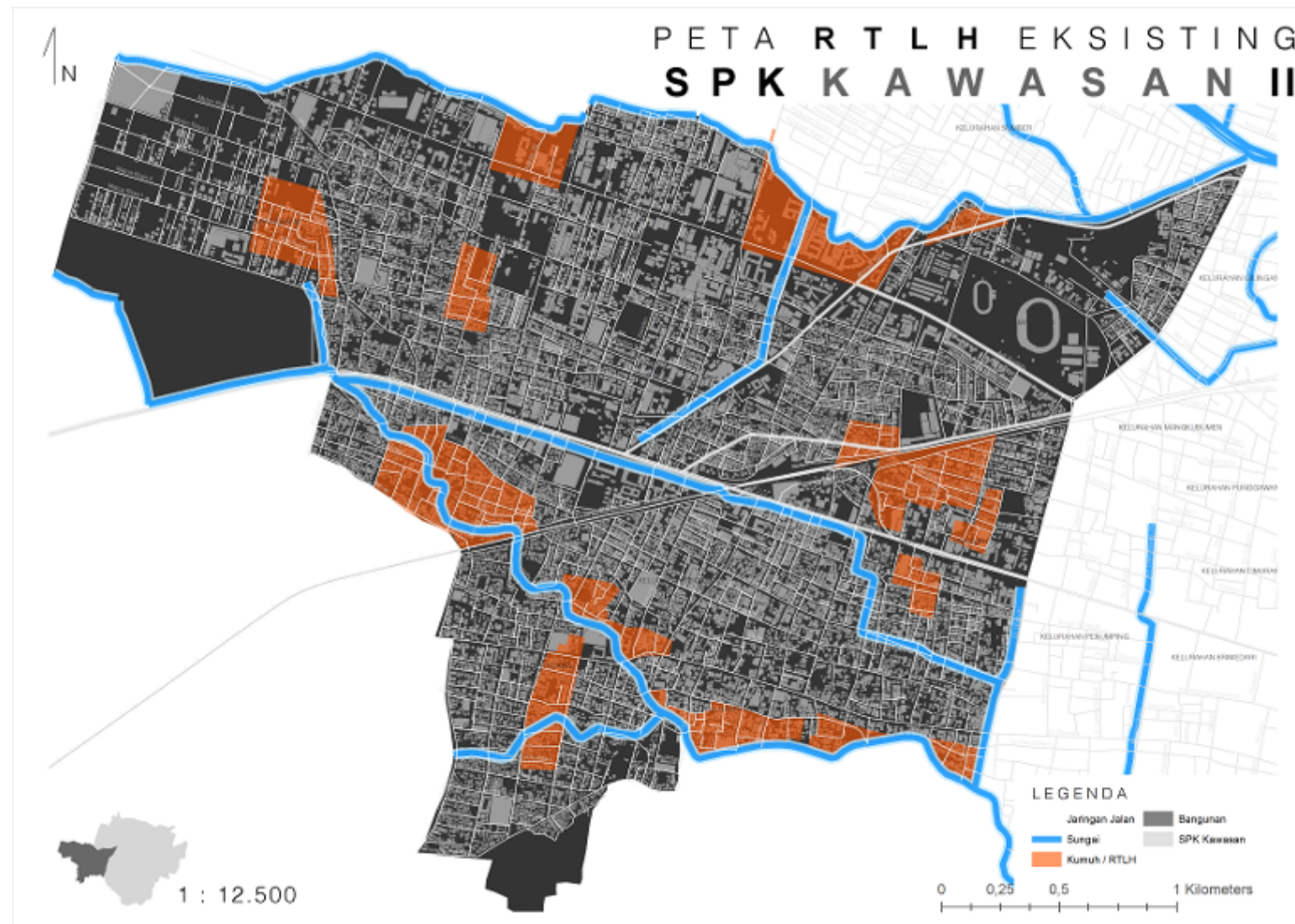
Permasalahan drainase yang terjadi adalah kondisi saluran drainase yang tidak baik dan adanya banjir atau genangan. Di SPK IV, terdapat 35,31 Ha area mengalami banjir saat terjadi hujan deras. Selain itu, masih ditemukan 104,47 Ha kawasan tidak terlayani saluran drainase, 27.142,4 meter saluran drainase tidak terhubung sistem perkotaan, 43.280,75 meter saluran drainase tidak terpelihara dan 16.581 meter konstruksi saluran drainase tidak memadai.

Cakupan pelayanan air minum aman dan layak dapat menjangkau 3252 unit rumah tangga. Akan tetapi, masih terdapat rumah tangga yang tidak mengakses air (minum, mandi, cuci) yang aman dan layak sebanyak 2664 unit rumah tangga dan sebanyak 318 rumah tangga tidak terpenuhi kebutuhan air minimal (60/orang/hari).

Permasalahan jalan yang terjadi adalah masih terdapatnya jalan yang tidak sesuai persyaratan teknis dan mengalami kerusakan. Dari total panjang jalan dalam kawasan kumuh di SPK VI yaitu sepanjang 104.948 meter, sepanjang 11.626,8 meter

tidak sesuai persyaratan (tidak dilengkapi saluran samping jalan) dan 9.295,6 meter tidak diperkeras dan mengalami kerusakan.

Dari Permasalahan di atas, yang menjadi prioritas utama SPK II adalah drainase. Hal ini dikarenakan masih adanya genangan di SPK II khususnya di Kelurahan Laweyan, Pajang dan Sondakan. Adanya PDAM di SPK II menjadi potensi untuk menjamin tercukupinya kebutuhan air minum di dalam SPK II, bahkan PDAM tersebut melayani seluruh bagian Kota Surakarta.



Gambar 6.26
Peta Kawasan Permukiman Kumuh SPK II

Sumber: Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan 2015, Bappeda Kota Surakarta

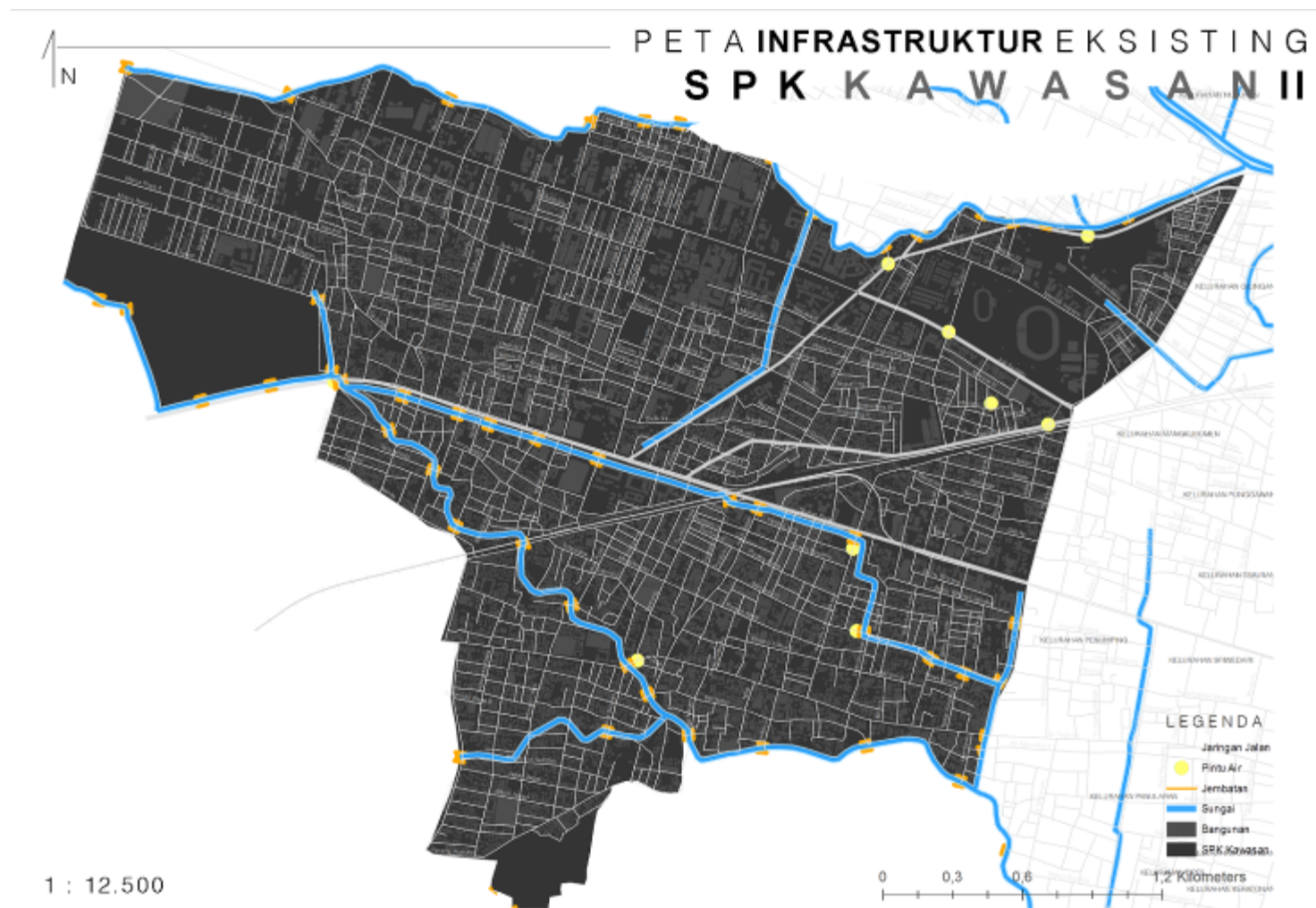
Tabel 6.13
Kondisi Permukiman di SPK II

Kawasan Kumuh	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	Luas Kumuh (Ha)	Persampahan			Air Limbah			Drainase					Air Minum			Jalan			Jumlah RTLH (unit rumah)																		
						A (Ha)	B (unit rumah)	C (Ha)	D (Ha)	E (unit rumah)	F (Ha)	G (Ha)	H (Ha)	I (m)	J (m)	K (m)	L (unit rumah)	M (unit rumah)	N (unit rumah)	O (m)	P (m)	Q (m)																			
Kawasan Karangasem	Laweyan	Jajar	III	6	6,109	5,84	44	8,17	13,14	0	5,48	0	7.47	4956.8	9913.6	2699	514	288	4	15840	358	1097	250																		
			IV	4																																					
			V	1, 2, 5, 7																																					
		Karangasem	I	4	7,133																			5,84	44	8,17	13,14	0	5,48	0	7.47	4956.8	9913.6	2699	514	288	4	15840	358	1097	250
			II	2																																					
			III	2, 3																																					
			IV	4																																					
Kawasan Laweyan	Banjarsari	Manahan	X	6, 7	0,62	12,1	287	18,16	34,04	302	6,69	14,36	15.13	9551.75	15282.8	7359	1281	1450	225	44728	6702	3422.6	1900																		
	Laweyan	Bumi	I	2, 4	2,804																																				
			II	2, 4																																					
			III	1, 4																																					
			IV	1, 5																																					
			V	1																																					
			VI	2, 3, 4																																					
			VII	3																																					
	Laweyan	I	3, 4	3,487																																					
		II	2																																						
	Pajang	IV	1, 2	0,689																																					
	Panularan	I	2	1,356																																					
		II	1																																						

Kawasan Kumuh	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	Luas Kumuh (Ha)	Persampahan			Air Limbah			Drainase					Air Minum			Jalan			Jumlah RTLH (unit rumah)
						A (Ha)	B (unit rumah)	C (Ha)	D (Ha)	E (unit rumah)	F (Ha)	G (Ha)	H (Ha)	I (m)	J (m)	K (m)	L (unit rumah)	M (unit rumah)	N (unit rumah)	O (m)	P (m)	Q (m)	
		Purwosari	V	4	3,881																		
			XI	2																			
			XIII	3																			
			XIV	1, 2																			
Kawasan Sondakan	Laweyan	Pajang	XIII	1, 4, 5, 6	2,901	6,01	65	9,01	16,9	221	3.21	18.95	10.52	8573.95	12248.5	4921	1399	672	65	27513.8	3474.8	2140	515
			XIV	1																			
			XVI	6																			
		Sondakan	VII	2	2,57																		
			IX	3																			
			X	3, 4																			
			XI	2, 3, 5, 6																			
Kawasan Kerten	Laweyan	Kerten	XIV	4	0,677	0,93	0	1.16	2.62	1	0.04	0	0.93	368.4	552.6	152	58	51	1	1842	122	116	33
Kawasan Manahan	Banjarsari	Manahan	IV	2	1,722	2.12	0	3.17	5.95	2	0.06	0	3.17	1524	2032	455		64	2	7600	670	1595	102
			V	3																			
			VI	3																			
Kawasan Pajang	Laweyan	Pajang	I	1, 2, 3	0,231	1.67	36	2.34	3.73	17	0.4	2	67.25	2167.5	3251.25	995		139	21	7425	300	925	56
Jumlah					34,18	28,67	432	42,01	76,38	543	15,88	35,31	104.47	27142.4	43280.75	16581	3252	2664	318	104948.8	11626.8	9295.6	2856

Sumber: Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan 2015, Bappeda Kota Surakarta

Selain terdapat kawasan kumuh, SPK II juga memiliki infrastruktur jalan yang terdiri dari jalan, jembatan sebanyak 12 unit dan adanya pintu air sebanyak 7 unit. Fungsi jalan yang terdapat di SPK VI adalah jalan arteri primer sebanyak 240,78 meter, jalan kolektor primer sepanjang 7,29 meter, jalan lokal sepanjang 128.478,25 meter, jalan setapak sepanjang 30.368,25 meter serta jalan kereta api sepanjang 2.102,9 meter.



Gambar 6.27
Peta Infrastruktur SPK II

Sumber: Bappeda Kota Surakarta

Tabel 6.1
Infrastruktur Jalan SPK II

No.	Jenis Jalan	Panjang Jalan (m)
1	Arteri Primer	240,78
2	Kolektor Primer	7,29
3	Lokal	128.478,25
4	Setapak	30.368,25
5	Jalan KA	2.102,9

Sumber: RTRW Kota Surakarta

Tabel 6.2
Sebaran Infrastruktur Jembatan SPK II

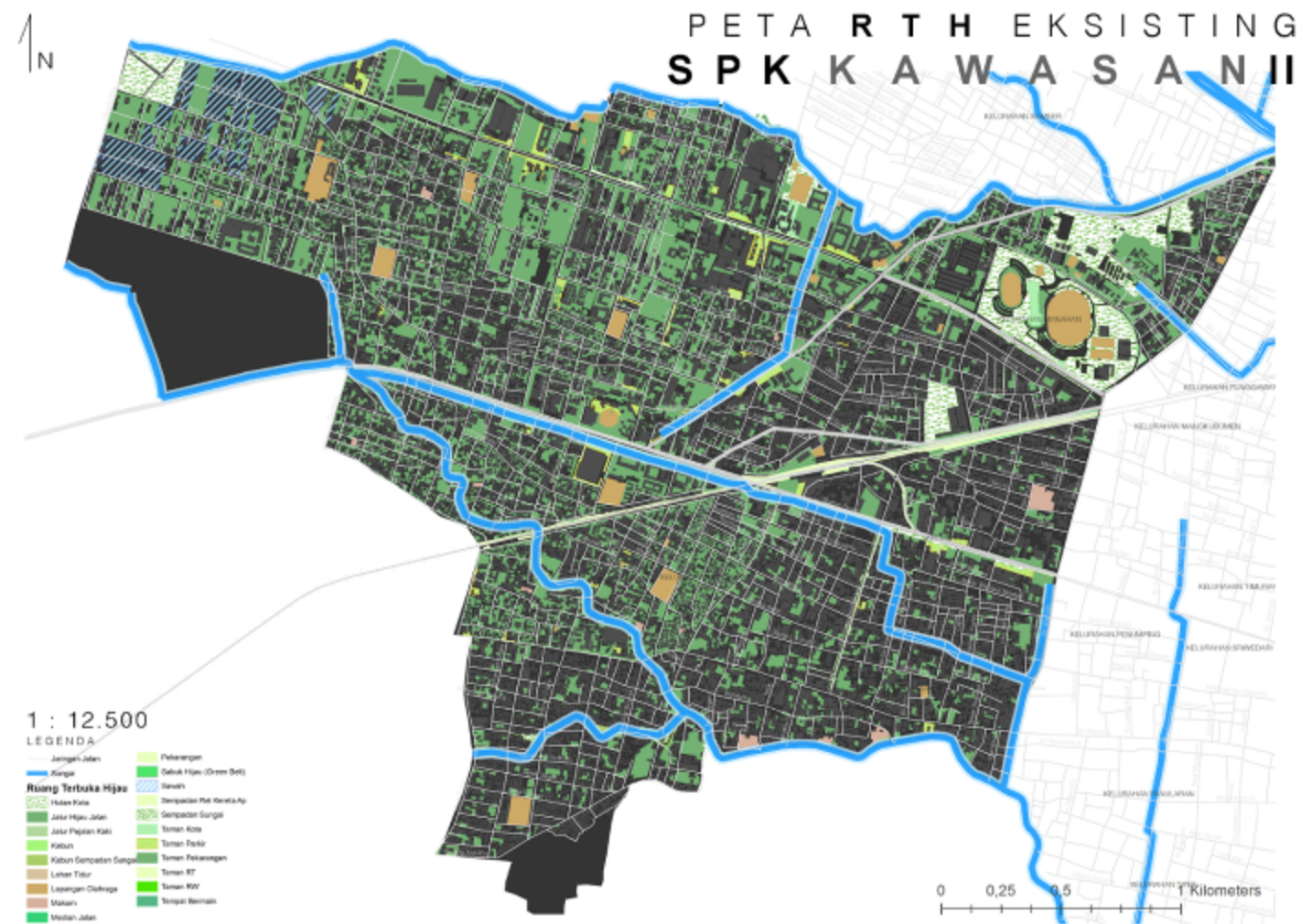
NO	NAMA JEMBATAN	NAMA RUAS JALAN	SPK	Kecamatan	Kelurahan
1.	JEMB.PAKEL/S. GAJAH PUTIH	JL. PAKEL	II	Laweyan	Kerten
2.	JEMB.PAKEL/ S.SUMBER	JL. PAKEL	II	Laweyan	Kerten
3.	JEMB.GRIYAN/ S. PREMULUNG	JL. GRIYAN TRANSITO	II	Laweyan	Sondakan
4.	JEMB.MUTIHAN /S. PREMULUNG	JL. LATAR PUTIH	II	Laweyan	Sondakan
5.	JEMB.SANTO PAULUS/ S.BROJO	JL. TIRTO TEJO SELATAN	II	Laweyan	Pajang
6.	JEMB.PAJANG /S.BROJO	JL. JOKO TINGKIR	II	Laweyan	Pajang
7.	JEMB. GONDOSULI/S. BROJO	JL. GONDOSULI	II	Laweyan	Purwosari
8.	JEMB. SONGGALAN/S. BROJO	JL. SIDOMUKTI TIMUR	II	Laweyan	Pajang
9.	JEMB.JONGKE/ S.PREMULUNG	JL. RAJIMAN	II	Laweyan	Pajang
10.	JEMB. GENDENGAN	JL. SLAMET RIYADI	II	Laweyan	Purwosari
11.	GORONG- GORONG JL KENANGA	JL. KENANGA	II	Laweyan	Purwosari
12.	JEMB.TELUKAN	JL. SADEWO	II	Laweyan	Sondakan

Tabel 6.3
Sebaran Pintu Air SPK II

NO	NAMA PINTU AIR	NAMA RUAS JALAN	SPK	Kecamatan	Kelurahan
1.	NGENTAK MANAHAN RT 02/I	NGENTAK MANAHAN	II	Banjarsari	Manahan
2.	JL. SAM RATULANGI BARAT	GREMET	II	Banjarsari	Manahan

NO	NAMA PINTU AIR	NAMA RUAS JALAN	SPK	Kecamatan	Kelurahan
3.	JL. SLAMET RIYADI	KLECO	II	Laweyan	Karangasem
4.	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN SLAMET RIYADI	PURWOSARI	II	Laweyan	Purwosari
5.	TEGALAYU RT.01 / II JL. SAMANHUDI	TEGAL AYU	II	Laweyan	Laweyan
6.	JAGALAN RT.03 / V LAWEYAN. JL. RAJIMAN	JAGALAN	II	Jebres	Jagalan
7.	JL.RAJIMAN SELATAN RT.1/3	RAJIMAN SELATAN	II	Laweyan	Pajang

Sumber: Bappeda Kota Surakarta



Gambar 6.28
Peta RTK SPK II

Sumber: Inventarisasi RTH, BLH Kota Surakarta

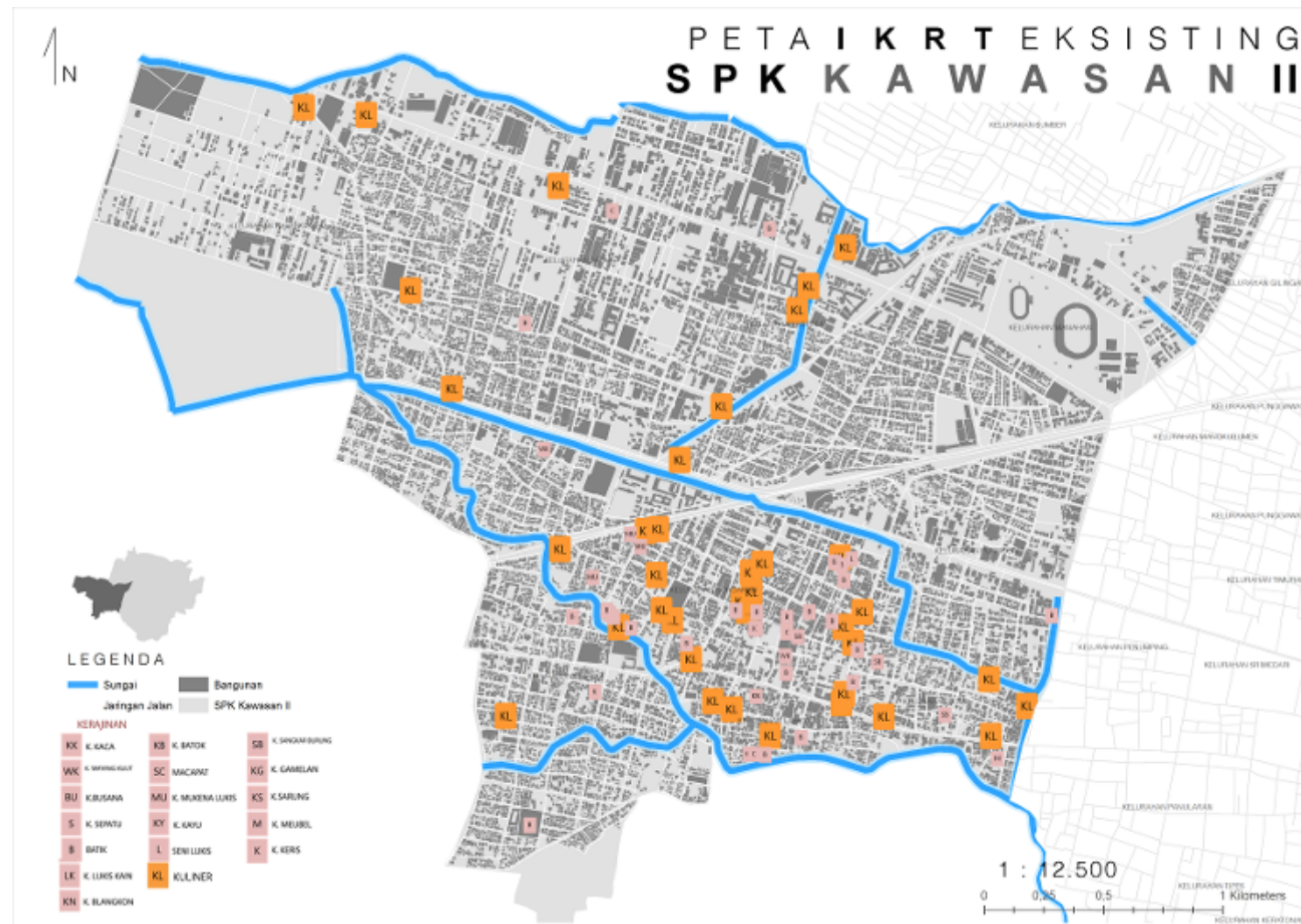
RTH yang terdapat di SPK II meliputi RTH umum dan privat. Dari peta di atas, terlihat bahwa di SPK II terdapat Gedung Olah Raga Manahan yang merupakan GOR kelas nasional. GOR tersebut merupakan RTH umum. Jenis RTH lainnya adalah RTH sabuk hijau karena SPK III dilewati oleh sungai.

1) Potensi dan Keunggulan Wilayah

SPK Kawasan II memiliki potensi adanya kampung wisata batik laweyan yang dapat menjadi destinasi wisata budaya. Selain menjaga terjaminnya eksistensi batik di Kota Surakarta, keberadaan kampung batik laweyan ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi penduduk sekitar karena banyaknya wisatawan yang berkunjung.

Selain wisata kampung batik Laweyan yang di dalamnya terdapat sentra industri batik dan sentra pembuatan cap batik,, potensi ekonomi yang terdapat di SPK II adalah sentra usaha hasil makanan tempe dan karak.

Selain potensi kampung batik laweyan, terdapat GOR Manahan. GOR Manahan tidak hanya melayani skala kota, akan tetapi juga wilayah sekitarnya bahkan hingga nasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya upacara pembukaan Pekan Olah Raga Nasional yang di lakukan di GOR Manahan. Selain GOR, RTH yang terdapat di BWK II adalah taman balekambang. Taman balekambang merupakan salah satu destinasi wisata kota surakarta.



Gambar 6.29
Peta Sentra Industri SPK II

Sumber: Bappeda Kota Surakarta

Tabel 6.4
Potensi Sentra Industri SPK II

No.	Nama Sentra	Jumlah Unit Usaha	Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp)
1.	Sentra Tempe	17	Pajang	Laweyan	56	77.000.000
2.	Sentra Karak Bratan	10	Laweyan	Laweyan	50	313.000.000
3.	Sentra Batik Laweyan	90	Pajang	Laweyan	750	8.900.000.000
4.	Sentra Pembuatan Cap Batik	15	Pajang	Laweyan	28	43.000.000

Sumber: Bappeda Kota Surakarta

2) Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada arahan fungsi SPK Kawasan II dalam RTRW Kota Surakarta, tujuan dari pengembangan BWK II adalah mengembangkan SPK Kawasan II sebagai pusat pelayanan pariwisata, olah raga dan industri kreatif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dan mempertimbangkan potensi yang ada, maka disusun tiga sasaran yaitu: 1) Terwujudkannya kawasan pariwisata budaya; 2) Terwujudnya kawasan RTH/olah raga yang representatif; 3) Terciptanya klaster industri Kreatif yang mampu bersaing.

3) Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan potensi dan arahan fungsi dalam RTRW, serta mendukung tujuan dan sasaran, ditetapkan strategi dan arah kebijakan pengembangan SPK Kawasan II. Setiap sasaran memiliki strategi sebagai ide dasar untuk tercapainya sasaran, dan setiap strategi memiliki arah kebijakan pelaksanaannya. Berikut merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan dari tiga sasaran yang telah dirumuskan.

Untuk mewujudkan kawasan kawasan pariwisata budaya, strategi yang ditetapkan adalah pengembangan destinasi wisata kampung batik laweyan. Dengan arahan kebijakan yang disusun adalah: 1) Menyediakan fasilitas pendukung wisata; 2) Meningkatkan materi publikasi terkait wisata kampung batik Laweyan; 3) Meningkatkan kinerja kelembagaan guna mengembangkan pariwisata kampung batik laweyan.

Untuk mewujudkan kawasan RTH/olah raga yang representatif, maka strategi yang ditetapkan adalah pengembangan kawasan RTH Manahan yang representatif. Dengan arahan kebijakan: 1) Optimalisasi fungsi dari keberadaan Balekambang; dan 2) optimalisasi fungsi dari keberadaan GOR Manahan.

Untuk mewujudkan terciptanya industri kreatif yang mampu bersaing, strategi yang ditetapkan adalah pengembangan klaster industri batik laweyan berkelanjutan. Arahan kebijakan yang

disusun adalah: 1) Meningkatkan kemampuan pelaku industri; 2) meningkatkan akses terhadap permodalan; 3) menjamin ketersediaan bahan baku industri; 4) meningkatkan pasar produk industri; 5) menyederhanakan proses pengajuan izin usaha.

Tabel 6.5
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arahan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan
Mengembangkan SPK Kawasan II sebagai pusat pelayanan pariwisata, olah raga dan industri kreatif	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni dan kualitas lingkungan permukiman kumuh	Peningkatan penanganan RTLH dan sarana prasarana pada permukiman kumuh	Meningkatkan kualitas penanganan RTLH dan lingkungan permukiman kumuh
		Peningkatan cakupan pelayanan akses yang aman terhadap air minum, sarana prasarana persampahan serta drainase	Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana serta sistem penyediaan akses terhadap air minum, srpras sampah dan drainase
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan yang berkualitas	Peningkatan kualitas dan kapasitas penanganan jalan dan jembatan	Meningkatkan struktur, pelebaran, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala
		Peningkatan kinerja kondisi jalan dan jembatan	Meningkatkan kondisi jalan dan jembatan dengan mengupayakan peningkatan kecepatan penanganan kerusakan terutama pada ruas jalan penghubung Kota Surakarta dengan Kabupaten Sukoharjo
		Peningkatan ketersediaan sarana prasarana kebinamargaan serta kapasitas SDM	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Publik	Peningkatan penataan dan pemanfaatan ruang sempadan sungai	Penuntasan penanganan secara bertahap dan terarah pada ruas jalan dan jembatan khususnya untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan pengembangan wilayah
		Mengoptimalkan pengembangan kawasan RTH Balekambang dan Manahan	Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian ruang DAS di sepanjang Kali Jenes
			Meningkatkan RTH di sepanjang Kali Jenes

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan
	Tersedianya kesiapsiagaan sistem antisipasi risiko kebencanaan	Pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas masyarakat kawasan rawan bencana di kawasan sungai Jenes	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana
		Meningkatkan koordinasi antar stakeholders dari hulu ke hilir pada kawasan sepanjang Sungai Jenes dalam pengendalian banjir dan pencemaran sungai akibat limbah industri	Meningkatkan kualitas SDM dan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan sehat pada kawasan DAS Kali Jenes
	Tersedianya sarana dan prasarana ekonomi yang berdaya saing	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa melalui penyediaan sentra industri kerajinan, fashion dan desain batik	Meningkatkan ekosistem kawasan sentra ekonomi kreatif industri kerajinan, fashion dan desain batik
	Meningkatnya pelestarian warisan karya budaya, adat istiadat, nilai-nilai seni budaya	Pengembangan dan oemanfaatan kawasan industri bersejarah sebagai kawasan cagar budaya sebagai identitas kota	Meningkatkan infrastruktur transportasi untuk menopang fungsi kawasan sentra industri dan pariwisata kerajinan, fashion dan desain batik

f. Prioritas 6 (SPK Kawasan I)

1) Capaian Kinerja Saat Ini

SPK Kawasan II ini secara letak dalam Peta Kota Surakarta berada pada posisi timur-selatan kawasan ini terdiri dari Kelurahan Penumping, Panularan, Sriwedari, Kemlayan, Jayengan, Kratonan, Tipes, Kauman, Baluwarti, Gajahan, Serengan, Danukusuman, Joyotakan, Joyosuran, Pasar Kliwon, Kedunglumbu, Gandekan, Sewu, Sangkrah, dan Semanggi. Terdapat enam kawasan kumuh di SPK I yaitu kawasan Semanggi, Danukusuman, Pasarkliwon, Panularan, Kratonan dan Penumping dengan luas total kawasan kumuh sebesar 135,759 Hektar dan jumlah RTLH 428 unit rumah. Di dalam kawasan kumuh tersebut, terdapat permasalahan persampahan, air limbah, drainase, air minum, infrastruktur jalan dan jembatan serta adanya RTLH. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan hanya kawasan kumuh saja yang mengalami permasalahan tersebut, namun kawasan yang tidak tergolong kumuh pun juga mengalami permasalahan-permasalahan di atas.

Permasalahan persampahan yang terjadi adalah masih terdapatnya kawasan yang tidak dilengkapi sarana prasarana persampahan sesuai prasyarat teknis seluas 249,22 Ha, adanya rumah tangga yang tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPA dan TPS sebanyak 2098 unit rumah tangga, serta masih terdapat kawasan yang sarana dan prasarana persampahannya tidak terawat seluas 129,39 Ha.

Permasalahan air limbah yang terjadi adalah adanya kawasan yang tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis seluas 645,96 Ha. 2956 unit rumah tidak memiliki sarpras limbah sesuai prasyarat teknis (*septic tank*) dan 169,84 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampahnya.

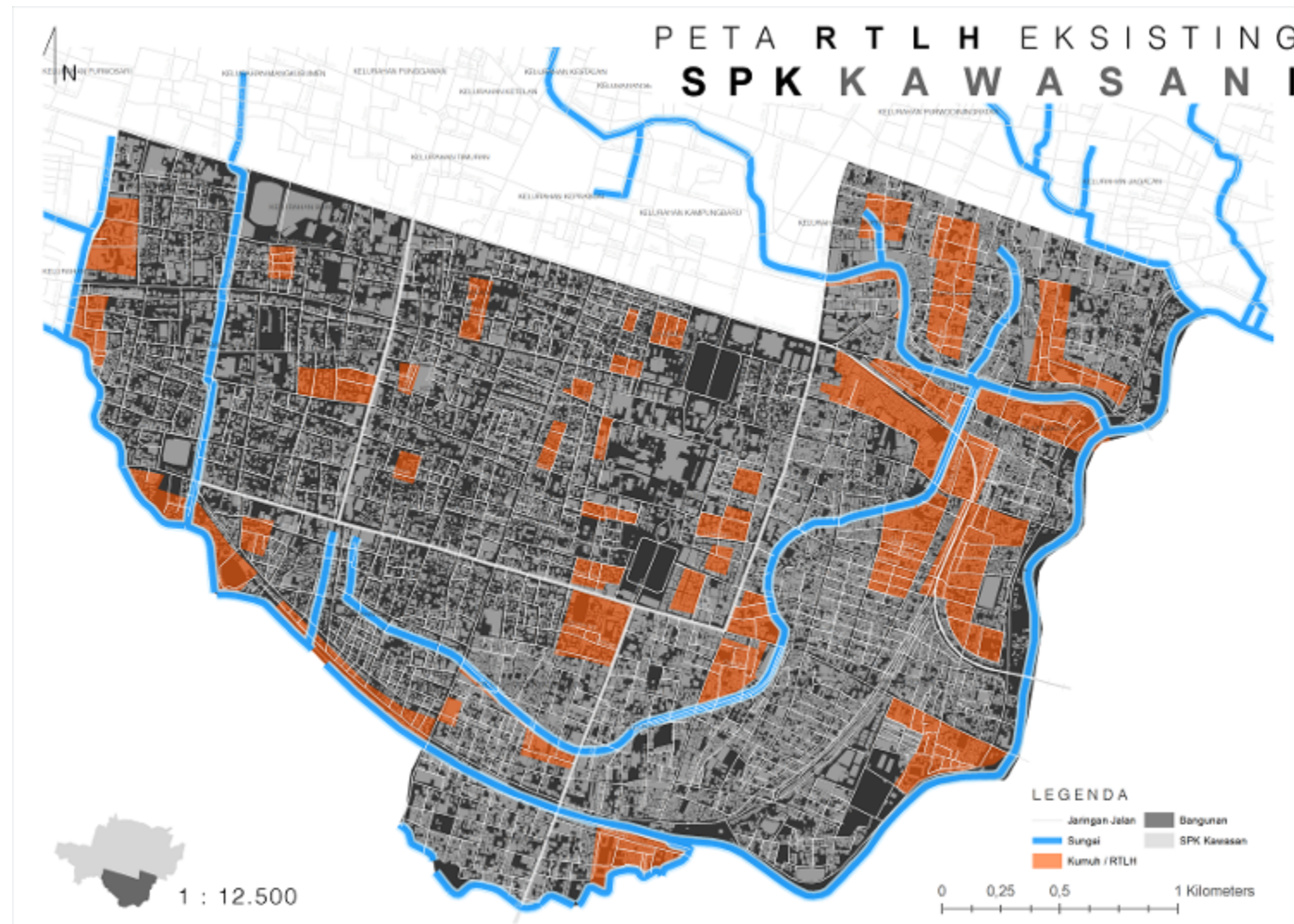
Permasalahan drainase yang terjadi adalah kondisi saluran drainase yang tidak baik dan adanya banjir atau genangan. Di SPK I, terdapat 59,64 Ha area mengalami genangan saat terjadi hujan deras. Selain itu, masih ditemukan 140,42 Ha kawasan tidak terlayani saluran drainase, 44.191,32 meter saluran drainase tidak terhubung sistem perkotaan, 90.670,06 meter saluran drainase tidak terpelihara dan 41.514,47 meter konstruksi saluran drainase tidak memadai.

Cakupan pelayanan air minum aman dan layak dapat menjangkau 11.663 unit rumah tangga. Akan tetapi, masih terdapat rumah tangga yang tidak mengakses air (minum, mandi, cuci) yang aman dan layak sebanyak 4427 unit rumah tangga dan sebanyak 725 rumah tangga tidak terpenuhi kebutuhan air minimal (60/orang/hari).

Permasalahan jalan yang terjadi adalah masih terdapatnya jalan yang tidak sesuai persyaratan teknis dan mengalami kerusakan. Dari total panjang jalan dalam kawasan kumuh di

SPK VI yaitu sepanjang 159.955 meter, sepanjang 37.121,7 meter tidak sesuai persyaratan (tidak dilengkapi saluran samping jalan) dan 101.186,8 meter tidak diperkeras dan mengalami kerusakan.

Kawasan I merupakan area permukiman padat perkotaan sehingga masalah permukiman harus ditangani secara serius. Dari data Strategi Sanitasi Kota (SSK) ada beberapa kelurahan yang mempunyai kategori resiko terhadap persampahan tinggi antara lain Joyosuran, Joyotakan dan Serengan sedangkan untuk kelurahan-kelurahan lainnya rata-rata termasuk dalam kategori resiko rendah. Pada beberapa Kelurahan pada kawasan ini ada beberapa yang berbatasan langsung dengan Sungai Bengawan Solo antara lain: Sewu, Sangkrah, Semanggi dan Joyotakan sehingga permasalahan banjir akibat dari luapan Sungai Bengawan Solo juga masih terjadi di 4 kelurahan tersebut di atas.



Gambar 6.30
Peta Kawasan Permukiman Kumuh SPK I

Sumber: Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan 2015, Bappeda Kota Surakarta

Tabel 6.6
Kondisi Permukiman SPK I

Kawasan Kumuh	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	Luas Kumuh (Ha)	Persampahan			Air Limbah			Drainase					Air Minum			Jalan			Jumlah RTLH (unit rumah)
						A (Ha)	B (unit rumah)	C (Ha)	D (Ha)	E (unit ruma h)	F (Ha)	G (Ha)	H (Ha)	I (m)	J (m)	K (m)	L (unit rumah)	M (unit rumah)	N (unit rumah)	O (m)	P (m)	Q (m)	
Kawasan Semanggi	Jebres	Gandekan	I	1, 2, 3, 4, 5	7,769	50,44	797	58,85	94,57	874	67,25	9,97	67,25	27994.55	41991.82	23228.87	5570	2311	320	55651.4	9082.2	92529	1405
			II	1																			
			III	1, 2, 3, 4, 6																			
			IV	2																			
			V	2, 3																			
			VI	2, 3, 4, 5																			
			IX	1, 2, 3																			
		Sewu	VII	1, 2, 3	4,869																		
	VIII		1, 4, 5, 6																				
	Pasar Kliwon	Kedunglumbu	I	2, 3	4,31																		
			III	1, 2, 4, 5																			
			VII	1, 2, 5, 6																			
		Sangkrah	I	1, 2	28,703																		
			II	2, 3, 4																			
			III	1, 2, 3, 4																			
			IV	1, 2, 3, 4																			
			V	1, 2, 3, 4																			
			VI	1, 2, 3																			
			IX	1, 2, 3, 4, 5																			
			X	2, 3																			

Kawasan Kumuh	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	Luas Kumuh (Ha)	Persampahan			Air Limbah			Drainase					Air Minum			Jalan			Jumlah RTLH (unit rumah)
						A (Ha)	B (unit rumah)	C (Ha)	D (Ha)	E (unit rumah)	F (Ha)	G (Ha)	H (Ha)	I (m)	J (m)	K (m)	L (unit rumah)	M (unit rumah)	N (unit rumah)	O (m)	P (m)	Q (m)	
			XI	1, 2, 3, 4, 5																			
			XII	1, 2, 3, 4																			
			XIII	1, 2, 3, 4, 5, 6																			
		Semanggi	I	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	30,379																		
			II	3, 4, 5																			
			III	1, 3, 4, 5																			
			IV	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9																			
			V	1, 6																			
			VI	3, 4																			
			VII	1, 2, 4, 5, 6																			
			VIII	1, 2, 3, 4																			
			X	1, 2, 3, 4, 5, 6																			
			XIII	1, 2, 3, 4																			
			XIX	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8																			
			XX	3, 4																			
			XXII	1, 2																			
			XXII I	2, 3, 5																			

Kawasan Kumuh	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	Luas Kumuh (Ha)	Persampahan			Air Limbah			Drainase					Air Minum			Jalan			Jumlah RTLH (unit rumah)
						A (Ha)	B (unit rumah)	C (Ha)	D (Ha)	E (unit ruma h)	F (Ha)	G (Ha)	H (Ha)	I (m)	J (m)	K (m)	L (unit rumah)	M (unit rumah)	N (unit rumah)	O (m)	P (m)	Q (m)	
Kawasan Danukusu man	Pasar Kliwon	Joyosuran	X	2	0,20	21	815	25,2	47,26	726	19,49	20,19	25,2	6647.6	9140.45	2361	2342	788	269	25202	6107	2738	1114
		Danukusuman	VI	4	5,2																		
			VII	2, 3																			
			VIII	1, 2, 3, 4																			
			IX	3																			
			X	3, 4																			
			XII	2																			
			XIII	2, 3																			
			XIV	1, 2																			
		XV	3, 4	7,00																			
		Joyotakan	I		1, 2, 3																		
			III		2, 3																		
			VI	1, 2, 3, 5																			
		Serengan	VII	2, 3	6,38																		
			VIII	3, 4																			
			X	4																			
			XII	4																			
			XIII	2, 3, 4																			
			XIV	1, 2, 3																			
			XV	5																			
		Tipes	VIII	3	7,24																		
			X	1, 2, 3																			
			XI	1, 3, 4																			

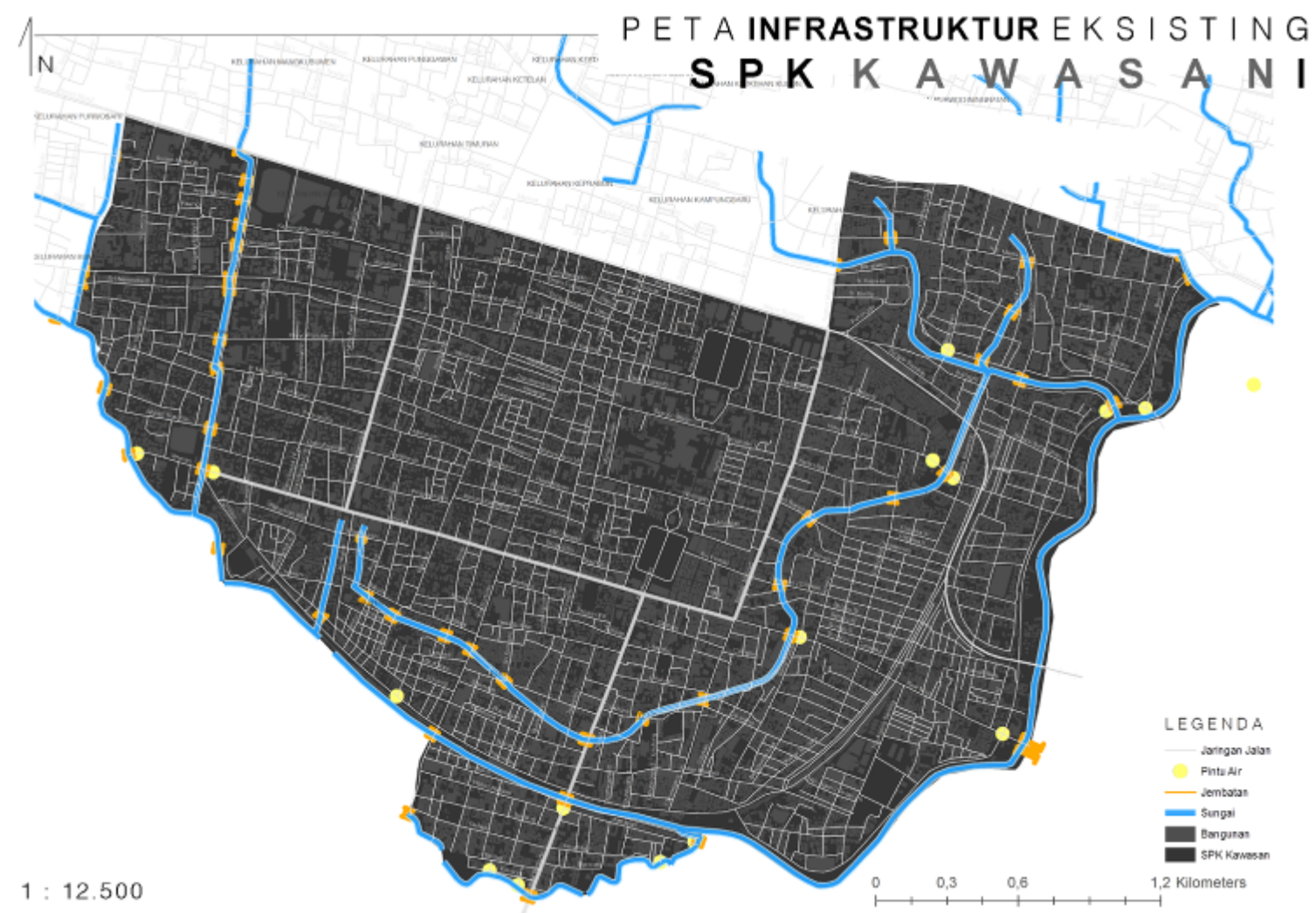
Kawasan Kumuh	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	Luas Kumuh (Ha)	Persampahan			Air Limbah			Drainase					Air Minum			Jalan			Jumlah RTLH (unit rumah)
						A (Ha)	B (unit rumah)	C (Ha)	D (Ha)	E (unit rumah)	F (Ha)	G (Ha)	H (Ha)	I (m)	J (m)	K (m)	L (unit rumah)	M (unit rumah)	N (unit rumah)	O (m)	P (m)	Q (m)	
			XII	3, 4																			
			XIII	1, 2, 3, 4																			
			XV	2, 3, 4																			
Kawasan Pasar Kliwon	Pasar Kliwon	Baluwarti	IV	2, 3	1,915	13.63	7	20.45	94.57	874	67.25	16.6	20.45	6586.36	9879.54	4329.6	947	208	24	15855.9	13806.5	1666	381
			VI	1, 2																			
			VIII	1, 2, 3																			
			XII	1																			
		Gajahan	I	1, 2, 4	2,239																		
			II	1, 2, 3																			
			V	1, 2																			
		Joyosuran	III	1	0,764																		
			IV	1, 2																			
		Pasar Kliwon	I	3	8,138																		
			II	2																			
			III	1, 2, 3																			
			V	2																			
			VI	3																			
			VII	1, 2																			
			IX	2																			
			XI	3																			
			XII	1, 2																			
		Semanggi	XII	8	0,189																		

Kawasan Kumuh	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	Luas Kumuh (Ha)	Persampahan			Air Limbah			Drainase					Air Minum			Jalan			Jumlah RTLH (unit rumah)
						A (Ha)	B (unit rumah)	C (Ha)	D (Ha)	E (unit ruma h)	F (Ha)	G (Ha)	H (Ha)	I (m)	J (m)	K (m)	L (unit rumah)	M (unit rumah)	N (unit rumah)	O (m)	P (m)	Q (m)	
	Serengan	Danukusuman	IV	2, 3, 5, 6	1,396																		
Kawasan Panularan	Laweyan	Panularan	III	4	0,186	136	0	1,59	256	41	0,64	0,01	1,36	717	1434	660	221	69	0	2236	150	426.4	69
	Serengan	Tipes	IV	5	0,327																		
Kawasan Kratonan	Laweyan	Panularan	VIII	4, 5	1,342	16,52	461	22,02	61,93	423	13.93	8.86	22.02	10.806	24313	8660	2339	1004	110	49335.4	7676	1922.4	1126
		Sriwedari	II	2	0,511																		
	Pasar Kliwon	Baluwarti	I	2, 3	1,249																		
			II	4																			
			III	3																			
		Gajahan	VI	3	0,961																		
			VII	4																			
			VIII	1, 2																			
			IX	1, 2																			
		Kampung Baru	I	1	0,074																		
		Kauman	II	1, 2	1,332																		
			III	3, 4																			
			IV	2																			
			V	2, 3																			
			VI	1, 2																			

Kawasan Kumuh	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	Luas Kumuh (Ha)	Persampahan			Air Limbah			Drainase					Air Minum			Jalan			Jumlah RTLH (unit rumah)
						A (Ha)	B (unit rumah)	C (Ha)	D (Ha)	E (unit ruma h)	F (Ha)	G (Ha)	H (Ha)	I (m)	J (m)	K (m)	L (unit rumah)	M (unit rumah)	N (unit rumah)	O (m)	P (m)	Q (m)	
	Serengan	Jayengan	II	2	1,206																		
			IX	4																			
		Kemlayan	I	1	7,844																		
			II	3																			
			III	2, 3, 4																			
			IV	1, 2, 3																			
			V	1, 3																			
			VI	2, 3																			
		Kratonan	I	2, 3, 5, 6, 7	2,834																		
			II	3																			
			III	1																			
			IV	1, 3, 4																			
			V	3																			
			VI	2																			
Kawasan Penumping	Laweyan	Penumping	I	1	0,772	11.63	18	1.28	91.63	18	1.28	4.01	4.14	2235	3911.25	2275	244	47	2	11675	300	1905	133
			III	5																			
			V	1																			
		Sriwedari	I	2	0,43																		
Jumlah					135,759	249.22	2098	107,37	645.96	2956	169.84	59.64	140.42	44191.32	90670.06	41514.47	11663	4427	725	159955.7	37121.7	99264,4	4228

Sumber: Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan 2015, Bappeda Kota Surakarta

Selain terdapat kawasan kumuh, SPK I juga memiliki infrastruktur jalan yang terdiri dari jalan, jembatan sebanyak 19 unit dan adanya pintu air sebanyak 21 unit. Jumlah pintu air tersebut merupakan jumlah terbanyak dari seluruh SPK lainnya. Fungsi jalan yang terdapat di SPK VI adalah jalan kolektor primer sepanjang 31,58 meter, jalan lokal sepanjang 144.007,19 meter, jalan setapak sepanjang 38.845,35 meter serta jalan kereta api sepanjang 2.224,99 meter.



Gambar 6.31
Peta Infrastruktur SPK I

Sumber: Bappeda Kota Surakarta

Tabel 6.1
Infrastruktur Jalan SPK I

No.	Jenis Jalan	Panjang Jalan (m)
1	Kolektor Primer	31,58
2	Lokal	144.007,19
3	Setapak	38.845,35
4	Jalan KA	2.224,99

Sumber: RTRW Kota Surakarta

Tabel 6.2
Sebaran Infrastruktur Jembatan SPK I

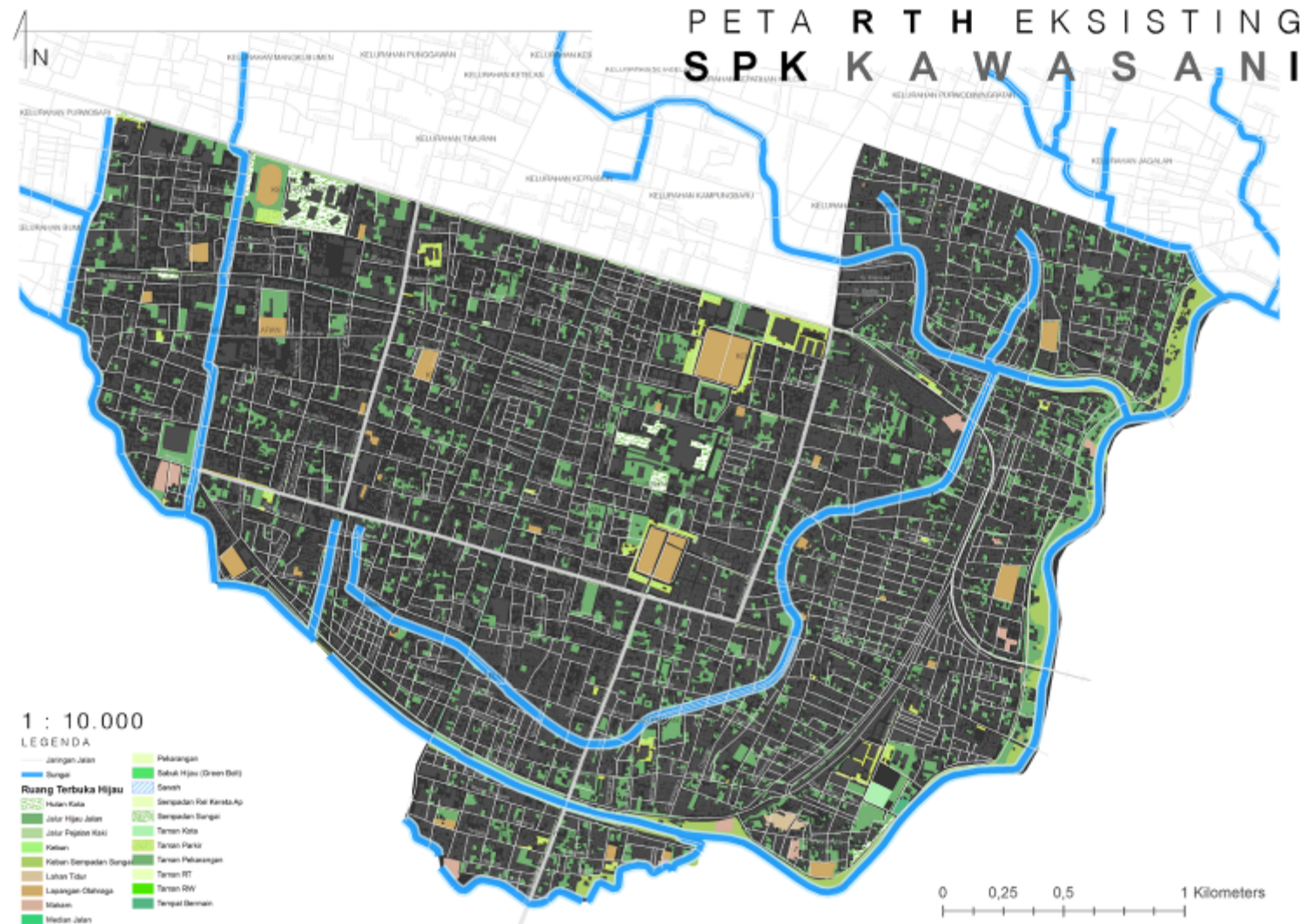
NO	NAMA JEMBATAN	NAMA RUAS JALAN	SPK	Kecamatan	Kelurahan
1.	JEMB.BATURONO II/S. JENES	JL.KYAI MOJO	I	Pasar Kliwon	Semanggi
2.	JEMB.DEWUTAN/ S. JENES	JL.SUNGAI BRANTAS	I	Pasar Kliwon	Semanggi
3.	JEMB. WIROPATEN/ S.JENES	JL.SERAYU	I	Pasar Kliwon	Semanggi
4.	JEMB. SANGGUNG/ S. JENES	JL.CEMPAKA	I	Pasar Kliwon	Pasar Kliwon
5.	JEMB. SAMPANGAN/ S. JENES	JL.UNTUNG SUROPATI	I	Pasar Kliwon	Pasar Kliwon
6.	JEMB. SANGKRAH/ S.JENES	JL.INDRAGIRI	I	Pasar Kliwon	Sangkrah
7.	JEMB.GANDEKAN/ S.PEPE	JL.BATANGHARI/ GANDEKAN	I	Jebres	Gandekan
8.	JEMB.STADION/ KODIM	JL. SLAMET RIYADI	I	Laweyan	Sriwedari
9.	JEMB.KALITAN	JL. KALITAN	I	Laweyan	Penumping
10.	JEMB.TIPES BARAT	JL. VETERAN BARAT	I	Serengan	Tipes
11.	JEMB.COKRO BASKORO	JL. COKRO BASKORO	I	Serengan	Tipes
12.	JEMB.JL PATIMURA/S.JENES	JL. PATIMURA	I	Serengan	Danukusu man
13.	JEMB.ARJUNA/ S.JENES	JL. ARJUNA	I	Serengan	Serengan
14.	JEMB.BRONDONGAN/ S.JENES	JL. YUDISTIRA	I	Serengan	Serengan
15.	JEMB.KAJEN	JL. KOM.YOS SUDARSO	I	Serengan	Serengan
16.	JEMB.GAJAHAN	JL. GAJAHAN	I	Pasar Kliwon	Gajahan
17.	JEMB.GURAWAN	JL. IBU PERTIWI	I	Pasar Kliwon	Pasar Kliwon
18.	JEMB.CARANGAN	JL. CARANGAN	I	Pasar Kliwon	Pasar Kliwon
19.	JEMB.ARIFIN/ KALI PEPE	JL. ARIFIN	I	Pasar Kliwon	Pasar Kliwon

Sumber: Bappeda Kota Surakarta

Tabel 6.3
Sebaran Pintu Air SPK I

NO	NAMA PINTU AIR	NAMA RUAS JALAN	SPK	Kecamatan	Kelurahan
1.	KEDUNG LUMBU, RT 5 / IX. JL. UNTUNG SUROPATI	KEDUNG LUMBU	I	Pasar Kliwon	Kedunglumbu
2.	JL. VETERAN RT.4 / RW XII TIPES	VETERAN	I	Serengan	Serengan
3.	JL. PATIMURA	MAKAM BERGOLO	I	Serengan	Serengan
4.	JL. BRIG SUDIARTO RT.3/1 JOYOTAKAN	JOYOTAKAN	I	Serengan	Joyotakan
5.	JOYOTAKAN RT.02/RW.3 SELATAN MASJID ANIMAH	JOYOTAKAN	I	Serengan	Joyotakan
6.	JOYOTAKAN RT.02 / RW.3 TIMUR MASDJID ALI IMAH	JOYOTAKAN	I	Serengan	Joyotakan
7.	JOYOTAKAN RT.02 / RW.3 BARAT KUBURAN	JOYOTAKAN	I	Serengan	Joyotakan
8.	JOYOTAKAN RT.3 / RW.4 SELATAN KUBURAN	JOYOTAKAN	I	Serengan	Joyotakan
9.	JOYOTAKAN RT.3 / RW.4 BARAT AKADEMI MABAU ULUM	JOYOTAKAN	I	Serengan	Joyotakan
10.	JOYOTAKAN RT.3 / RW.4 TIMUR AKADEMI MABAU ULUM	JOYOTAKAN	I	Serengan	Joyotakan
11.	JOYOTAKAN RW.V – RW VI REJONITEN	JOYOTAKAN	I	Serengan	Joyotakan
12.	SEMANGGI KIDUL RT.3 / VII TANGGUL BESAR	SEMANGGI KIDUL	I	Pasar Kliwon	Semanggi
13.	JL. KYAI MOJO RT.8/ RW 13	SEMANGGI KIDUL	I	Pasar Kliwon	Semanggi
14.	SEMANGGI MOJO RT.5 / 23	SEMANGGI MOJO	I	Pasar Kliwon	Semanggi
15.	SEMANGGI MOJO RT.1 / IV – KYAI MOJO	SEMANGGI MOJO	I	Pasar Kliwon	Semanggi
16.	LOSARI RT.5/3 JL. UNTUNG SUROPATI	LOSARI	I	Pasar Kliwon	Semanggi
17.	PINTU AIR DEMANGAN	GANDEKAN	I	Jebres	Gandekan
18.	SANGKRAH RT.01/ XIII	DEMANGAN	I	Pasar Kliwon	Sangkrah
19.	KAMPUNG SEWU RT.3/RW VII	KAMPUNG SEWU	I	Jebres	Sewu
20.	SANGKRAH RT.01 / XIII TIMUR PINTU DEMANGAN	DEMANGAN	I	Pasar Kliwon	Sangkrah
21.	KAMPUNG SEWU RT.3 / RW 2	KAMPUNG SEWU	I	Pasar Kliwon	Sewu

Sumber: Bappeda Kota Surakarta



Gambar 6.32
Peta RTK SPK I

Sumber: Inventarisasi RTH, BLH Kota Surakarta

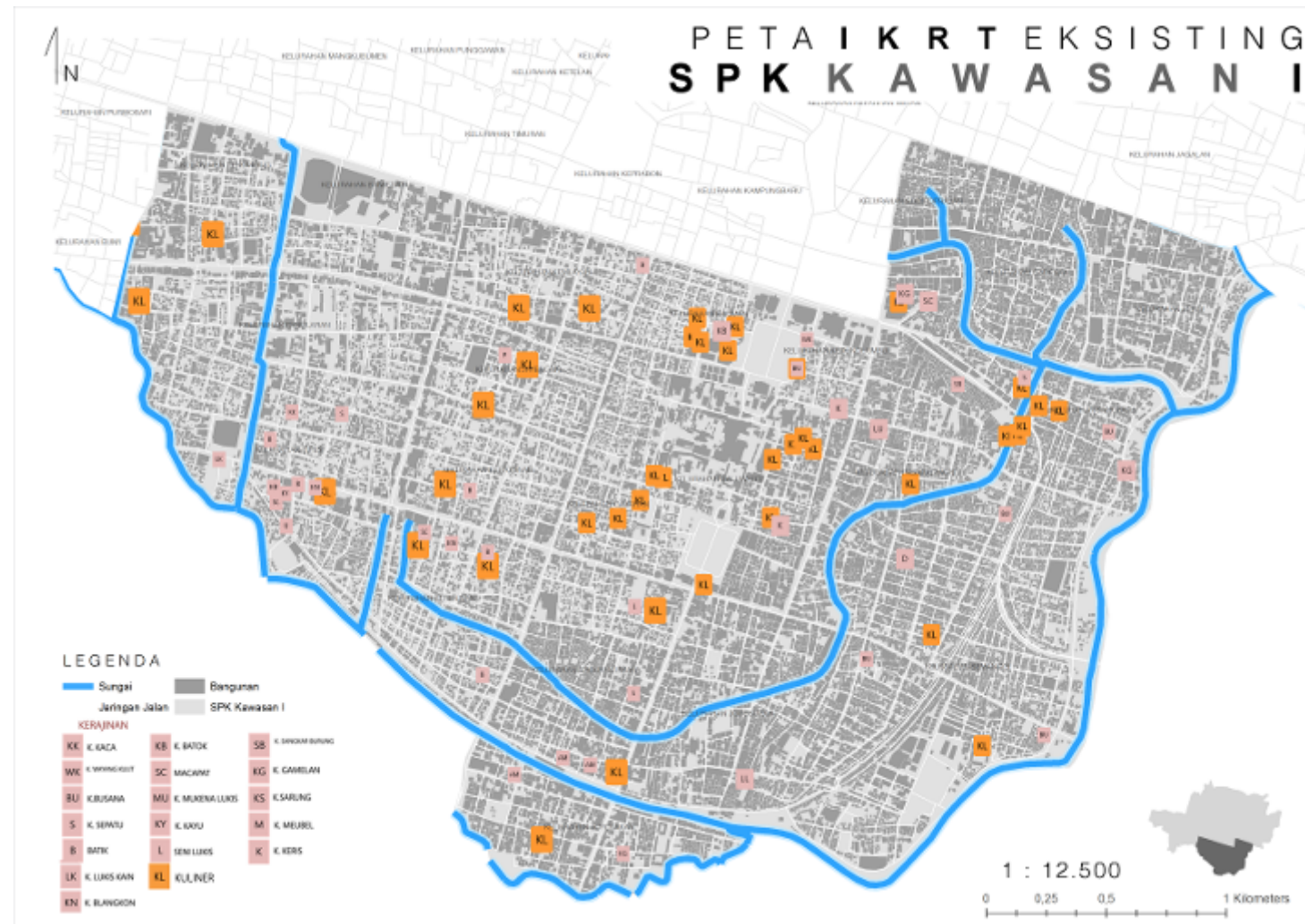
RTH yang terdapat di SPK I meliputi RTH umum dan privat. Dari peta di atas, terlihat bahwa di SPK I terdapat Kali Pepe yang mana menyebabkan adanya RTH sabuk hijau yang cukup luas, dan merupakan RTH umum. Jenis RTH lainnya adalah RTH Manahan karena sebagian kawasan Manahan selain masuk pada SPK II juga masuk pada SPK I. RTH privat sangat minim, karena padatnya permukiman.

2) Potensi dan Keunggulan Wilayah

SPK Kawasan I memiliki potensi dikembangkan sebagai kawasan strategis kepentingan sosial budaya. Hal ini didukung dengan adanya Keraton Kasunanan yang terletak di Kelurahan Banjarsari, yang menjadi sejarah penting bagi Kota Surakarta. Selain sebagai warisan budaya Kota, keberadaan Keraton juga dapat menjadi potensi ekonomi bagi daerah di sekitarnya melalui adanya pengembangan wisata budaya. Saat ini, adanya Keraton Kasunanan telah dikelola dengan baik, sehingga selain bangunan keraton terjaga eksistensinya, keraton juga memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah karena banyaknya wisatawan yang berkunjung. Keberadaan suatu objek wisata akan meningkatkan perekonomian daerah di sekitarnya, begitu juga yang terjadi di kawasan wisata budaya Keraton Kasunanan ini. Penduduk di dalam kawasan dan di sekitar kawasan mendapat kesempatan kerja sebagai penyedia layanan pendukung wisata seperti penjual souvenir dan jasa tarik andong.

Potensi industri kreatif rumah tangga juga mewarnai SPK Kawasan I. Industri kreatif ini membentuk klaster di Kecamatan Serengan dan Pasar Kliwon yang terdiri dari industri *shuttlecock*, batik, keris, blangkon, pengolahan makanan dan minuman, keris dan alat musik keroncong. Pemerintah Kota Surakarta memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan industri kreatif melalui kebijakannya telah menjadikan industri kreatif sebagai salah satu basis dalam mencapai tujuan Kota Surakarta dalam RTRW Kota Surakarta tahun 2012-2032.

Di SPK Kawasan I terdapat stadion R. Maladi Sriwedari di Kelurahan Sriwedari. Selain sebagai RTH dan sarana olah raga, stadion tersebut juga menjadi wadah aktivitas sosial budaya seperti pelaksanaan berbagai festival. Selain itu, di SPK Kawasan I juga terdapat pusat perdagangan Nonongan yang merupakan pusat perdagangan yang melayani wilayah Subosukawonosraten.



Gambar 6.33
Peta Sentra Industri SPK I

Sumber: Bappeda Kota Surakarta

Tabel 6.4
Potensi Sentra Industri SPK I

No.	Nama Sentra	Jumlah Unit Usaha	Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp)
1.	Sentra Batik Kauman	72	Kauman	Pasar Kliwon	540	7.200.000
2.	Sentra Batik Warna Alam Semanggi	10	Semanggi	Pasar Kliwon	50	235.500.000
3.	Sentra Dandang Kompot	10	Semanggi	Pasar Kliwon	34	82.800.000
4.	Sentra Sangkar Burung	55	Mojosongo	Jebres	170	121.450.000
5.	Sentra Blangkon	10	Tipes	Serengan	85	16.500.000
6.	Sentra Shuttlecock	13	Tipes	Serengan	26	65.000.000
7.	Sentra Kain Perca Sumber Rejeki	20	Tipes	Serengan	20	10.000.000
8.	Sentra Kain Perca Pasori	20	Tipes	Serengan	20	10.000.000
9.	Sentra Sepatu Sandal	20	Gandekan	Jebres	64	66.000.000
10.	Sentra Letter	32	Jayengan	Serengan	86	298.200.000

Sumber: Bappeda Kota Surakarta

2) Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada arahan fungsi SPK Kawasan I dalam RTRW Kota Surakarta, tujuan dari pengembangan SPK Kawasan I adalah mengembangkan BWK I berbasis pariwisata budaya; perdagangan dan jasa; olah raga/RTH; dan industri kreatif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dan mempertimbangkan potensi yang ada, maka disusun empat sasaran yaitu: 1) Terciptanya industri Kreatif yang mampu bersaing; 2) Terciptanya iklim perdagangan jasa yang kondusif; 3) Terciptanya sarana olah raga/RTH yang optimal; 4) Terciptanya pariwisata budaya di kawasan inti kota.

3) Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan potensi dan arahan fungsi dalam RTRW, serta mendukung tujuan dan sasaran, ditetapkan strategi dan arah kebijakan pengembangan SPK Kawasan I. Setiap sasaran memiliki strategi sebagai ide dasar untuk tercapainya sasaran, dan setiap strategi memiliki arah kebijakan pelaksanaannya. Berikut merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan dari keempat sasaran yang telah dirumuskan.

Untuk mewujudkan terciptanya industri kreatif yang mampu bersaing, strategi yang ditetapkan adalah pengembangan klaster industri berkelanjutan. Sesuai dengan potensi yang ada, bahwa industri kecil rumah tangga yang ada di SPK Kawasan I membentuk suatu klaster. Oleh karena itu perlu dipikirkan bagaimana pengembangannya agar

berkelanjutan. Sehingga kebijakan yang disusun adalah: 1) Meningkatkan kemampuan pelaku industri; 2) meningkatkan akses terhadap permodalan; 3) menjamin ketersediaan bahan baku industri; 4) meningkatkan pasar produk industri; 5) menyederhanakan proses pengajuan izin usaha.

Untuk mewujudkan terciptanya iklim perdagangan jasa yang kondusif, dan melihat tipe perdagangan yang ada adalah grosir dan eceran, maka strategi yang ditetapkan adalah Pengembangan kawasan perdagangan grosir dan eceran. Dengan arahan kebijakan Menyediakan layanan pendukung kawasan perdagangan grosir dan eceran.

Untuk mendukung terciptanya sarana olah raga/RTH yang optimal, strategi yang ditetapkan adalah pengembangan sarana ruang terbuka sebagai wadah aktivitas sosial budaya. Hal ini mempertimbangkan banyaknya aktivitas sosial budaya seperti festival atau perayaan kebudayaan lainnya yang dilaksanakan di Stadion R. Maladi Sriwedari yang terletak di SPK Kawasan I. Arahan kebijakan dari pelaksanaan strategi tersebut adalah mengoptimalkan penggunaan RTH sebagai sarana olah raga dan aktivitas sosial.

Untuk mendukung sasaran terciptanya pariwisata budaya di kawasan inti kota, maka strategi yang ditetapkan adalah pengembangan seluruh aspek pendukung wisata budaya keraton kasunanan dengan arahan kebijakan: 1) Meningkatkan dukungan infrastruktur pendukung wisata keraton; 2) Menyediakan layanan pendukung wisata keraton; dan 3) Mengembangkan data dan informasi wisata keraton yang akurat dan terkini.

Tabel 6.5
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengembangkan SPK Kawasan I berbasis pengembangan eco-cultural, perdagangan dan jasa, serta sentra industri	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni dan kualitas lingkungan permukiman kumuh	Peningkatan penanganan RTLH dan sarana prasarana pada permukiman kumuh	Meningkatkan kualitas penanganan RTLH dan lingkungan permukiman kumuh
		Peningkatan cakupan pelayanan akses yang aman terhadap air minum, sarana prasarana persampahan serta drainase	Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana serta sistem penyediaan akses terhadap air minum, srpras sampah dan drainase
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan yang berkualitas	Peningkatan kualitas dan kapasitas penanganan jalan dan jembatan	Meningkatkan struktur, pelebaran, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala
		Peningkatan kinerja kondisi jalan dan jembatan	Meningkatkan kondisi jalan dan jembatan dengan mengupayakan peningkatan kecepatan penanganan kerusakan terutama pada ruas jalan penghubung Kota Surakarta dengan Kartasura
		Peningkatan ketersediaan sarana prasarana kebinamargaan serta kapasitas SDM	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Publik	Peningkatan penataan dan pemanfaatan ruang sempadan sungai Bengawan Solo	Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian ruang DAS di sepanjang Bengawan Solo
		Mengoptimalkan pengembangan kawasan RTH pada sempadan Sungai Bengawan Solo	Meningkatkan RTH di sepanjang Bengawan Solo

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan
	Tersedianya kesiapsiagaan sistem antisipasi risiko kebencanaan	Pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas masyarakat kawasan rawan bencana di kawasan sungai Jenes	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana
		Meningkatkan koordinasi antar stakeholders dari hulu ke hilir pada kawasan sepanjang Sungai Jenes dalam pengendalian banjir dan pencemaran sungai akibat limbah industri	Meningkatkan kualitas SDM dan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan sehat pada kawasan DAS Bengawan Solo
	Tersedianya sarana dan prasarana ekonomi yang berdaya saing	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa melalui penyediaan sentra industri kerajinan, fashion dan desain batik	Meningkatkan ekosistem kawasan sentra ekonomi kreatif industri kerajinan, fashion dan desain batik
	Meningkatnya pelestarian warisan karya budaya, adat istiadat, nilai-nilai seni budaya	Pengembangan dan pemanfaatan kawasan industri bersejarah sebagai kawasan cagar budaya sebagai identitas kota	Meningkatkan infrastruktur transportasi untuk menopang fungsi kawasan sentra industri dan pariwisata kerajinan, fashion dan desain batik

a. Sinergi Antar SPK di Kota Surakarta

Terjadinya kesenjangan pembangunan antara Surakarta bagian utara dan selatan, menuntut adanya suatu intervensi sehingga kesenjangan tersebut dapat diselesaikan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan benang-benang interaksi yang kuat di antara SPK, baik III, IV, V, VI, II dan I. Setiap SPK memiliki masalah dan potensi masing-masing. Adanya potensi di satu SPK bisa jadi mampu mengatasi masalah yang ada di SPK lainnya. Untuk itulah interaksi diperlukan sehingga tercapai simbiosis mutualisme dan mampu meminimalisir kesenjangan yang saat ini terjadi.

Potensi yang menonjol dari SPK III adalah tersedianya ruang yang cukup sebagai area pengembangan kota. Selain itu, keberadaan *ring road* menjadikan tingginya aksesibilitas di SPK III. Selain memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai CBD kawasan utara dengan skala pelayanan kota, khususnya bagi SPK IV dan V, SPK III juga memiliki peluang untuk dikembangkan permukiman baru yang dapat dijadikan ruang untuk menampung pesatnya pertumbuhan permukiman di SPK I, sehingga dapat mengatasi kepadatan dan kekumuhan di SPK I.

SPK IV memiliki potensi utama industri kreatif, dengan adanya sentra industri sangkar burung dengan jumlah usaha sebanyak 55 unit. Adanya potensi sentra sangkar burung ini dapat menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat khususnya SPK IV dan III sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan memiliki kapasitas memperbaiki kualitas lingkungan secara swadaya. Keberadaan TPA Putri Cempo menyebabkan area di sekitarnya, yang juga termasuk dalam SPK IV, menjadi terkesan kumuh, oleh karena itu keberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungannya sangat diperlukan.

SPK V memiliki potensi unggulan untuk dikembangkan sebagai kawasan budaya ekologi. Hal ini didukung dengan keberadaan kawasan pendidikan Kertingan dan taman satwa taru jurug. Kampus UNS dan ISI menjadi sarana pendidikan tinggi yang melayani masyarakat baik dari SPK I, II, III, IV, V, V, bahkan luar kota hingga mancanegara. Technopark menjadi pusat pengembangan teknologi yang melayani masyarakat kota Surakarta.

Sebagai kawasan yang terletak di pusat kota, SPK VI memegang peran penting dalam memberikan identitas bagi Kota Surakarta. Banyaknya bangunan bersejarah menyebabkan SPK VI berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata sejarah.

SPK I memiliki potensi sentra industri. Terdapat delapan sentra industri dengan jumlah usaha lebih dari 100 unit. Merupakan kawasan permukiman yang padat sehingga diprediksikan kedepannya membutuhkan lahan untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Tersedianya banyak lahan kosong di SPK III dan IV menjadi solusi dari permasalahan tersebut.

SPK I juga masih memiliki lahan pertanian, oleh karena itu perlu untuk diarahkan sebagai kawasan konservasi lahan pertanian kota. Lahan pertanian ini berperan sebagai area penyerapan air hujan

sehingga mengurangi debit air yang mengalir di permukaan. Hal ini dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan banjir yang terjadi di SPK I.

Melalui sinergi antar SPK di atas, kesenjangan antar SPK dapat terasi dan mampu mewujudkan pemerataan pembangunan Kota Surakarta.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Kebijakan Pengembangan Wilayah

Dalam rangka pencapaian tujuan pengembangan wilayah Kota Surakarta, maka dilakukan strategi pengembangan wilayah Kota Surakarta melalui:

- a. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan layanan kesehatan
- b. Peningkatan tata kelola lingkungan sehat
- c. Membudayakan pendidikan karakter unggul dan kreativitas masyarakat melalui ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- d. Percepatan pengentasan masyarakat miskin
- e. Peningkatan kualitas penduduk dan pemberdayaan masyarakat untuk daya saing tenaga kerja, produktivitas dan kemandirian ekonomi
- f. Peningkatan kualitas aparatur dan manajemen kinerja pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan basis data (kependudukan, sektoral dan kewilayahan) dan teknologi informasi
- g. Peningkatan kuantitas dan kualitas permukiman beserta sarana prasarana infrastruktur bagi penguatan daya dukung lingkungan sesuai perkembangan kebutuhan penduduk secara merata dan partisipatif
- h. Perencanaan dan Pengendalian tata kota menuju kota kreatif ekonomi, sosial, budaya melalui optimalisasi partisipasi masyarakat

Sebagai arahan implementasi sektoral dalam mendukung perwujudan tujuan pengembangan wilayah di Kota Surakarta, maka ditetapkan arah kebijakan untuk perwujudan strategi pengembangan wilayah Kota Surakarta meliputi:

- a. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan layanan kesehatan melalui peningkatan jumlah fasilitas dan jenis layanan kesehatan dengan strategi:
 - 1) Meningkatkan sarana dan prasarana serta infrastruktur pelayanan kesehatan di lima kecamatan, meliputi penyebaran RSUD dan peningkatan kapasitas Puskesmas dan
 - 2) Meningkatkan koordinasi dan jejaring pelayanan kesehatan dengan wilayah sekitar untuk mendukung peran kota sebagai pusat pelayanan bagi daerah *hinterland*-nya (Kota Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional).
- b. Peningkatan tata kelola lingkungan sehat melalui pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup dengan strategi:

- 1) Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan kawasan strategis kota, utamanya mengembangkan kawasan strategi bagian utara Kota Surakarta;
 - 2) Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang berbasis DAS;
 - 3) Peningkatan ruang terbuka hijau (RTH) pada kawasan strategis terpilih;
 - 4) Pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan masyarakat; dan
 - 5) Meningkatkan koordinasi antar stakeholder dalam penanggulangan bencana.
- c. Membudayakan pendidikan karakter unggul dan kreativitas masyarakat melalui ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dan mengintegrasikan kurikulum karakter unggul ke dalam pengembangan media pendidikan dan informasi publik sebagai kesatuan sistem pendidikan masyarakat terpadu dengan strategi:
- 1) Peningkatan potensi kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan secara sinergis berkelanjutan dan mendorong pengembangan perekonomian
 - 2) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung Solo sebagai Kota Vokasi
- d. Percepatan pengentasan masyarakat miskin melalui penguatan kemampuan produktif dan karakter mandiri pada kelompok PMKS dan rentan miskin, dengan strategi:
- 1) Pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan air bersih;
 - 2) Pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan drainase;
 - 3) Penambahan infrastruktur air limbah (IPAL kota, komunal, dan kawasan);
 - 4) Peningkatan sinergisitas kerjasama dalam pengelolaan sampah kota dan air bersih secara regional (Subosukawonosraten); dan
 - 5) Penambahan ruang-ruang publik berbasis komunitas/masyarakat di wilayah dengan angka kemiskinan yang relatif tinggi.
- e. Peningkatan kualitas penduduk dan pemberdayaan masyarakat untuk daya saing tenaga kerja, produktivitas dan kemandirian ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan kecukupan bahan kebutuhan pokok; pengembangan kebijakan untuk peningkatan kecakapan dan ketrampilan dalam sistem budaya meraih keunggulan menuju kemandirian dan keadilan; peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah; dan pengembangan sistem manajemen pembangunan partisipatif yang akuntabel, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi dengan strategi:
- 1) Mengoptimalkan sarana dan prasarana pada sentra industri sentra industri berada di SPK Kawasan I, II, V serta memprioritaskan peningkatan sarana prasarana di SPK Kawasan III dan IV dan
 - 2) Mengoptimalkan daya dukung pasar tradisional dan sektor informal

- f. Peningkatan kualitas aparatur dan manajemen kinerja pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan basis data (kependudukan, sektoral dan kewilayahan) dan teknologi informasi melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas aparatur melalui sistem manajemen data dan informasi (kependudukan, sektoral dan kewilayahan) berbasis indikator kinerja dengan strategi:
- 1) Pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan listrik;
 - 2) Pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi; dan
 - 3) Fasilitasi pemenuhan cakupan sarana komunikasi dan informasi.
- g. Peningkatan kuantitas dan kualitas permukiman beserta sarana prasarana infrastruktur bagi penguatan daya dukung lingkungan sesuai perkembangan kebutuhan penduduk secara merata dan partisipatif melalui:
- 1) Pemerataan pembangunan infrastruktur dan kawasan permukiman yang sehat dan berkeadilan dengan strategi:
 - a) Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh yang sehat dan berkeadilan
 - b) Peningkatan sarana dan prasarana disabilitas
 - c) Mengoptimalkan ekosistem ramah anak
 - 2) Pengembangan sistem transportasi dan lalu lintas yang tertib, lancar, nyaman, dan selamat dengan strategi:
 - a) Peningkatan kualitas dan kapasitas penanganan jalan dan jembatan;
 - b) Peningkatan ketersediaan prasarana sarana dan kebinamargaan serta kapasitas SDM;
 - c) Peningkatan kinerja kondisi baik jalan dan jembatan;
 - d) Peningkatan prasarana sarana dan pengembangan antar moda transportasi publik;
 - e) Peningkatan prasarana sarana keselamatan transportasi;
 - 3) Pengelolaan lingkungan kota yang kota berwawasan keamanan dan keselamatan dengan strategi:

Peningkatan kerjasama dalam pengembangan, penyediaan dan penanganan infrastruktur dan transportasi strategis untuk percepatan penanganan kebutuhan dan masyarakat;
- h. Perencanaan dan Pengendalian tata kota menuju kota kreatif ekonomi, sosial, budaya melalui optimalisasi partisipasi masyarakat melalui perencanaan dan pengendalian tata kota berkarakter *Eco Cultural City* berbasis partisipasi publik dengan strategi:
- 1) Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang tata kota berkarakter *Eco Cultural City*;
 - 2) Mengkondisikan ekosistem yang menunjang terbentuknya kota kreatif berdasarkan 10 prinsip kota kreatif;
 - 3) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung MICE (*Meetings, Incentives, Conference, Exhibitions*).

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

A. Kebijakan Umum

Program prioritas Walikota ditetapkan sesuai dengan janji Walikota dan Wakil Walikota selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah, dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun. Program kampanye Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2016-2021 diformulasikan sebagai program prioritas pembangunan daerah. Program prioritas pembangunan daerah ini diimplementasikan melalui nomenklatur program sesuai dengan regulasi yang berlaku. Formulasi program unggulan walikota terpilih sebagai berikut.

Tabel 7.1 Program Pembangunan Daerah Walikota Terpilih Tahun 2016-2021

No	Janji Kampanye	Formulasi Program Pembangunan Daerah	Program Permendagri 13/2006
Waras			
1	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Miskin dengan Jaminan Kesehatan (BPJS Plus)	Program kota sehat berkeadilan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
2	Memberikan Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan (Memberikan fasilitas cek laborat bagi warga yang berusia 40 tahun ke atas dan ibu hamil)		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
3	Pemerataan Pelayanan Kesehatan dengan Mendirikan Rumah Sakit Daerah di tiap Kecamatan		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
4	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Makanan Bergizi bagi Anak Sekolah Dasar		Program Perbaikan Gizi Masyarakat
5	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Posyandu, Balita dan Lansia		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
6	Meningkatkan Rasio, Kualitas dan Kuantitas Tenaga Medis		Program upaya Kesehatan Masyarakat
7	Memberikan Jaminan Layanan Persalinan untuk Anak ke 1, 2, dan 3		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

No	Janji Kampanye	Formulasi Program Pembangunan Daerah	Program Permendagri 13/2006
8	Mengintegrasikan Sistem Manajemen Pelayanan Kesehatan, yang Berbasis IT		Program Upaya Kesehatan Masyarakat
9	Meningkatkan Pelayanan IVA tes		Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	Wasis		
1	Mendirikan Sekolah Olahraga berprestasi	Program pendidikan non formal berdaya saing	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
2	Mendirikan Pusat Latihan Pengembangan Prestasi	Program pendidikan non formal yang adaptif	Program Pendidikan Non Formal
3	Mengembangkan dan Meningkatkan kualitas <i>Solo Technopark</i>	Program pendidikan non formal berdaya saing	Program Pelayanan BLUD
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
4	Wajib Belajar 12 tahun	Program Kota Cerdas untuk semua	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
5	Meningkatkan Fasilitas Pendidikan PAUD	Program Kota Cerdas untuk semua	Program Pendidikan Anak Usia Dini
6	Memperluas Akses Pendidikan Tinggi	Program Kota Cerdas untuk semua	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
7	Memberikan Beasiswa untuk Perguruan Tinggi	Program Kota Cerdas untuk semua	
8	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	Program Kota Cerdas untuk semua	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
9	Memperbanyak Taman Cerdas.	Program Kota Cerdas untuk semua	
10	Melanjutkan Kota Layak Anak	Program Kota Cerdas untuk semua	
11	Meningkatkan Pendidikan dan Potensi Budaya Lokal	Pendidikan berkarakter budaya lokal	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
12	Mengembangkan Solo sebagai Kota Vokasi	Program pendidikan non formal berdaya saing	Program Pengembangan dan Kesperasian Kebijakan Pemuda
13	Meningkatkan pelayanan Pendidikan Inklusi	Program pendidikan non formal yang adaptif	Program Pendidikan Non Formal
14	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga (kualitas dan kuantitas)	Program pendidikan non formal berdaya saing	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
	Wareg		
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan Berbasis Potensi Lokal	Program pengembangan ekonomi kota kreatif kerakyatan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
			Program peningkatan penerapan teknologi

No	Janji Kampanye	Formulasi Program Pembangunan Daerah	Program Permendagri 13/2006
			peternakan
			Program pengembangan budidaya perikanan
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
			Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
			Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
2	Meningkatkan Pelayanan Investasi yang Nyaman dan Aman		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3	Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan melalui Pengembangan Sektor Riil/ Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja
4	Meningkatkan Destinasi Wisata		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Mapan			
1	Meningkatkan Akses Pelayanan Publik Berbasis Informasi dan Teknologi (IT)	Pelayanan berbasis budaya unggul (jujur, cepat, tepat, sesuai kebutuhan)	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
			Program pengembangan data/informasi
			Program Persandian
			Program kerjasama informasi dan media massa
			Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
			Program Penataan Administrasi Kependudukan
			Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

No	Janji Kampanye	Formulasi Program Pembangunan Daerah	Program Permendagri 13/2006
			Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
		Program pengembangan akuntabilitas kebijakan pembangunan partisipatif	Program Pengembangan data/informasi
		Program pembangunan berkeadilan	Program Pengembangan Kemitraan Wawasan Kebangsaan
2	Meningkatkan Pembinaan Kerohanian	Program kesejahteraan sosial	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya)
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
			Program Keluarga Berencana
	Papan		
1	Menyediakan Pemukiman bagi Warga Miskin (Rumah Renteng, Rusunawa, Relokasi	Program perumahan layak huni	Program Lingkungan Sehat Perumahan
2	Merevitalisasi Rumah Tidak Layak Huni		Program Pengembangan Perumahan
3	Meningkatkan Pelayanan Transportasi Massal	Program transportasi publik nyaman, aman, dan selamat	Program peningkatan pelayanan angkutan
4	Menyediakan Akses bagi Pejalan Kaki dan Pengguna Kendaraan Tak Bermotor		
5	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Jalan dan Jembatan		Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
6	Menata Kawasan Kumuh, Bangunan Tak Berizin dan Bantaran	Program pengembangan ruang publik berwawasan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

No	Janji Kampanye	Formulasi Program Pembangunan Daerah	Program Permendagri 13/2006
	Sungai yang Berwawasan Lingkungan	lingkungan	Program Pemanfaatan Ruang
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
7	Merevitalisasi Drainase Kota		Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
8	Merevitalisasi <i>Hydrant</i>	Program lingkungan sehat, aman, dan nyaman	
9	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bencana		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
10	Menambah Fasilitas Pengelolaan Sampah		
11	Mengembangkan Kawasan Solo Utara	Program pembangunan berkeadilan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
12	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Ramah Difabel		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
13	Meningkatkan Pelayanan untuk Disabilitas		
14	Mengembangkan Kawasan industri kreatif		Program Pengembangan Kemitraan Wawasan Kebangsaan
15	Merevitalisasi Pasar Tradisional	Program pengembangan ekonomi kota kreatif kerakyatan	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
16	Melanjutkan Penataan PKL		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
17	Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengelolaan Tata Ruang yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan		Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
18	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Kegiatan Keagamaan	Pengembangan tata ruang dan tata bangunan berkarakter budaya	Program Pengembangan Nilai Budaya
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya
			Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Sumber: Bappeda Kota Surakarta, 2016

Untuk mewujudkan program Walikota dan Wakil Walikota tersebut dibutuhkan etos kerja 5 (lima) Mantab, yaitu: (i) Mantab Kejujuran, (ii) Mantab Kedisiplinan, (iii) Mantab Pelayanan, (iv) Mantab Organisasi, dan (v)

Mantab Gotong Royong yang dijabarkan ke dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran (indikator dan target) pembangunan.

Dalam rangka mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah, dibutuhkan strategi untuk mendapatkan rumusan tentang program prioritas yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah. Di lain pihak, guna mendapatkan program prioritas yang melekat (*inherent*) di setiap strategi, dibutuhkan kebijakan umum.

Kebijakan umum menjelaskan tentang (i) Strategi lebih spesifik, konkrit, operasional, dan fokus; (ii) Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih; dan (iii) Mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran, dan program-program yang inheren.

B. Program Pembangunan

Program pembangunan merupakan program prioritas sebagai fokus dan penjabaran kebijakan umum yang langsung berhubungan dengan pencapaian sasaran Visi dan Misi Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2016-2021, yang dijabarkan pada setiap misi sebagai berikut:

1. WARAS: Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang sehat menuju masyarakat produktif, kreatif, dan sejahtera

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada:

- a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- c. Program Pengawasan Obat dan Makanan
- d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
- e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- i. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
- j. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
- k. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
- l. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
- m. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
- n. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
- o. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
- p. Program peningkatan BLUD
- q. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- r. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- s. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

- t. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- u. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

2. WASIS: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur, berkarakter, dan berkontribusi kemajuan daya saing kota

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada:

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- c. Program Pendidikan Menengah
- d. Program Pendidikan Luar Biasa
- e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- g. Program Layanan Autis
- h. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- i. Program Pendidikan Non Formal
- j. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- k. Program Pengembangan Nilai Budaya
- l. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- m. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- n. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- o. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
- p. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- q. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
- r. Program peningkatan peran serta kepemudaan

3. WAREG: Mewujudkan masyarakat kota yang produktif mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani menuju masyarakat mandiri dan partisipatif membangun kesejahteraan kota

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada:

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- c. Program pembinaan anak terlantar
- d. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
- e. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
- f. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
- g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- h. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
- i. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- j. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- k. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
- l. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- m. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

- n. Program peningkatan produksi hasil peternakan
- o. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
- p. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
- q. Program pengembangan budidaya perikanan
- r. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- s. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
- t. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- u. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
- v. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- w. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- x. Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
- y. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- z. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- aa. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
- bb. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- cc. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- dd. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
- ee. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- ff. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- gg. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- hh. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- ii. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
- jj. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- kk. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- ll. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- mm. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- nn. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- oo. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- pp. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- qq. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- rr. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- ss. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
- tt. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- uu. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- vv. Program Pengembangan Kemitraan
- ww. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

4. MAPAN: Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan masyarakat yang berbudaya adi luhung menuju kehidupan kota yang berkeadilan, akuntabel, tertib, aman, nyaman, dan berdaya saing

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada:

- a. Program Pengembangan data/informasi
- b. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
- c. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
- d. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
- e. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
- f. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- g. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
- h. Program peningkatan disiplin aparatur
- i. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
- j. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- k. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- l. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- m. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
- n. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- o. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- p. Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- q. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- r. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- s. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
- t. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- u. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- v. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
- w. Program Pendidikan Kedinasan
- x. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- y. Program Persandian
- z. Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- aa. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
- bb. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- cc. Program Penataan Administrasi Kependudukan
- dd. Program kerjasama informasi dan media massa
- ee. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
- ff. Program Kerjasama Pembangunan
- gg. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- hh. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

- ii. Program perencanaan pembangunan daerah
- jj. Program perencanaan pembangunan ekonomi
- kk. Program perencanaan sosial budaya
- ll. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
- mm. Program Peningkatan Pelayanan BLUD
- nn. Program Keluarga Berencana
- oo. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- pp. Program pelayanan kontrasepsi
- qq. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
- rr. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
- ss. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
- tt. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
- uu. Program pengembangan wawasan kebangsaan
- vv. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
- ww. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- xx. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
- yy. Program pendidikan politik masyarakat
- zz. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- aaa. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- bbb. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
- ccc. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

5. PAPAN: Mewujudkan keseimbangan kebutuhan papan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan dinamika kebutuhan pertumbuhan penduduk menuju kota berwawasan pembangunan berkelanjutan

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada:

- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan
- b. Program Pengembangan Perumahan
- c. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
- d. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
- e. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- f. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- g. Program Pembangunan turap/talud/bronjong
- h. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- i. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
- j. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- k. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- l. Program pengendalian banjir
- m. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- n. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

- o. Program peningkatan pelayanan angkutan
- p. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- q. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
- r. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
- s. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- t. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
- u. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
- v. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- w. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
- x. Program Perencanaan Tata Ruang
- y. Program Pemanfaatan Ruang
- z. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- aa. Program pengelolaan areal pemakaman
- bb. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
- cc. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- dd. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan;
- ee. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- ff. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- gg. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
- hh. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- ii. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
- jj. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- kk. Program pengembangan wawasan kebangsaan

Keterkaitan antara visi, misi, dan program unggulan dalam program pembangunan daerah Kota Surakarta dapat dilihat dalam Tabel 7.2 di bawah ini.

Tabel 7.2
Keterkaitan Visi, Misi, dan Program Unggulan
dengan Program Pembangunan Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021

No	Visi	Misi	Program Unggulan	Program Permendagri 13/2006	Indikator
1.	Kota Budaya	Wasis, mapan, papan	Pendidikan berkarakter budaya lokal	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
					Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru PAUD_Sertifikat Pendidik
					Guru SD/MI_Sertifikat Pendidik
					Guru SMP/MTs_Sertifikat Pendidik

No	Visi	Misi	Program Unggulan	Program Permendagri 13/2006	Indikator
					Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan Fasilitas Seni
					Cakupan Kajian Seni
					Cakupan Organisasi seni
				Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya
					Jumlah gedung kesenian
			Pengembangan tata ruang dan tata bangunan berkarakter budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase dokumen teknis pelestarian bangunan/ kawasan cagar budaya yang dihasilkan
				Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah forum kebersamaan umat beragama
			Program pembangunan berkeadilan	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Penanganan Unjuk Rasa dan Konflik Sosial
					Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2.	Mandiri	Wasis, wareg, mapan	Program pendidikan non formal yang adaptif	Program Pendidikan Non Formal	Persentase LKP Terakreditasi
					Persentase Lembaga PKBM Terakreditasi
					Persentase angka melek huruf
			Program pengembangan ekonomi kreatif kerakyatan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan	Persentase ketersediaan beras
					Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
					Persentase skor Pola Pangan Harapan (PPH)
				Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Tingkat produksi pertanian
				Program Peningkatan Kesejahteraan	Cakupan bina kelompok petani

No	Visi	Misi	Program Unggulan	Program Permendagri 13/2006	Indikator
				Petani	
				Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Cakupan produksi daging yang memenuhi kriteria ASUH
				Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Angka mortalitas hewan
				Program pengembangan budidaya perikanan	Cakupan bina kelompok perikanan
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
				Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah KK yang diberangkatkan
				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
				Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	angka sengketa pengusaha -pekerja per tahun
					Persentase perusahaan yang menerapkan tentang norma kerja dan K3
				Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase pemahaman pelaku usaha terhadap produk jasa keuangan dari lembaga pembiayaan
				Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase Peningkatan kualitas KUMKM yang dibina
3.	Maju	Wasis, wareg, mapan, papan	Program pendidikan non formal berdaya saing	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah Prestasi pemuda (kali)
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rasio Lapangan Olah raga dalam kondisi baik
				Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang memiliki sertifikat standar mutu

No	Visi	Misi	Program Unggulan	Program Permendagri 13/2006	Indikator
		Pelayanan berbasis budaya unggul (jujur, cepat, tepat, sesuai kebutuhan)			organisasi Olahraga dari pemerintah daerah (buah)
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
			Pelayanan berbasis budaya unggul (jujur, cepat, tepat, sesuai kebutuhan)	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tingkat Pembaruan (updating) publikasi informasi melalui website pemerintah
				Program pengembangan data/informasi	Buku Kota dalam angka
					Buku PDRB Kota
				Program kerjasama informasi dan media massa	Tingkat persepsi masyarakat dalam menilai kebijakan, kinerja atau perilaku pemerintah kota
					Persentase Publikasi informasi melalui media cetak pemerintah
				Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip	Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikat dalam bentuk informatika
				Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase RAPERDA yang disetujui DPRD
				Program Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan penatausahaan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan regulasi yang berlaku
				Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase realisasi kinerja kegiatan APBD tahun berkenaan (%)
				Program penataan peraturan perundang-undangan	Persentase produk hukum/ regulasi daerah yang dihasilkan sesuai prolegda
				Program peningkatan	Persentase kerjasama (MoU,

No	Visi	Misi	Program Unggulan	Program Permendagri 13/2006	Indikator
				kerjasama antar pemerintah daerah	Peraturan Bersama, PKS/Agreement) yang difasilitasi dan dikoordinasikan hingga program aksi (%)
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase rata-rata capaian laba BUMD/Perusda
				Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase cakupan SKPD yang menjadi obyek pemeriksaan dalam kegiatan pengawasan
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Ketepatan Waktu Perda dan Perwali tentang APBD
					Ketepatan Waktu Perda dan Perwali Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
				Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase terjaminnya Aset / Barang Milik Daerah
				Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pengembangan organisasi perangkat daerah yang efektif efisien(rightsizing)
					Persentase pegawai yang berprestasi (%)
					Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kualifikasi dan Kompetensinya
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur PNS yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional
				Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase penyelesaian proses mutasi dan pensiun tepat waktu
				Program Penataan Administrasi	Persentase kepemilikan KTP dan

No	Visi	Misi	Program Unggulan	Program Permendagri 13/2006	Indikator
				Kependudukan	KK
					Persentase Kepemilikan akte
					Persentase pemahaman administrasi kependudukan sampai tingkat ketua RT dan RW
					Persentase pertambahan jenis layanan kependudukan yang diselenggarakan online
			Program pengembangan akuntabilitas kebijakan pembangunan partisipatif	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase serapan aspirasi hasil musrenbang dalam RKPD
				Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai amanat pemerintah
				Program perencanaan sosial budaya	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah
				Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah
				Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kebijakan teknis bidang pemerintahan umum yang dihasilkan
				Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	
			Program transportasi publik nyaman, aman, dan selamat	Program peningkatan pelayanan angkutan	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
					Persentase pelaku usaha yang melaksanakan

No	Visi	Misi	Program Unggulan	Program Permendagri 13/2006	Indikator
					andalalin sesuai dengan rekomendasi
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan kota yang tertangani
				Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jembatan kota yang tertangani
				Program pengendalian banjir	Persentase wilayah genangan bebas banjir dan genangan yang tertangani
				Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase kepemilikan uji KIR angkutan umum
			Program pengembangan ruang publik berwawasan lingkungan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rasio ruang terbuka hijau
					Persentase penambahan ruang publik
			Program pengembangan ekonomi kreatif kerakyatan	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rata-rata lama tinggal wisatawan (hari)
4.	Sejahtera	Waras, wasis, wareg, mapan, papan	Program kota sehat berkeadilan	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif
				Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Desa/kalurahan melakukan STBM
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Pemeriksaan HIV dan AIDS di Pusk dan RSUD
					Angka Kematian DBD
					Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate)
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Tim Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM)
					Proporsi kasus hipertensi di fasilitas pelayanan kesehatan
					Cakupan skrining kesehatan reproduksi

No	Visi	Misi	Program Unggulan	Program Permendagri 13/2006	Indikator
					penduduk dewasa (usia 15-59 tahun)
					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
					Jumlah Kunjungan puskesmas orang per hari
					BOR (Bed Occupancy Ratio)
				Program peningkatan BLUD	BOR (Bed Occupancy Ratio)
				Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi gizi buruk pada balita
				Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
				Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan kunjungan bayi
					Cakupan pelayanan anak balita
				Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Proporsi Puskesmas PONED sesuai standar
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Proporsi Puskesmas terakreditasi
					Proporsi RS PONEK
				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
				Program Pengawasan Obat dan Makanan	Presentase makanan yang memenuhi syarat
				Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Proporsi TPM memenuhi syarat
				Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-	Rasio cakupan pelayanan RSUD

No	Visi	Misi	Program Unggulan	Program Permendagri 13/2006	Indikator
				paru/rumah sakit mata	
			Pelayanan berbasis budaya unggul (jujur, cepat, tepat, sesuai kebutuhan)	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase meningkatnya Penerimaan Pajak Hotel, Reklame, Sarang Burung Walet dan Restoran
					Persentase meningkatnya Penerimaan Pajak Parkir, Air Tanah, Hiburan, dan BPHTB
					Persentase meningkatnya Penerimaan PBB
				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan perijinan kategori baik
				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tingkat Pembaruan (updating) publikasi informasi melalui website pemerintah
					Tingkat persepsi masyarakat dalam menilai kebijakan, kinerja atau perilaku pemerintah kota
				Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa
					Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan
				Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase tutor pendidikan pendahuluan bela negara
				Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase aduan yang tertangani
				Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah Linmas Per RT atau sebutan lainnya

No	Visi	Misi	Program Unggulan	Program Permendagri 13/2006	Indikator
			Program lingkungan sehat, aman, dan nyaman	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara
					Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air
					Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Indeks Pencemaran Udara
					Indeks Pencemaran Air
					Indeks Tutupan Hutan
			Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana
					Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah rawan bencana sesuai amanat pemerintah
					persentase SDM yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan pembangunan
			Program Kota Cerdas untuk semua	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota Surakarta
				Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Tingkat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

No	Visi	Misi	Program Unggulan	Program Permendagri 13/2006	Indikator
			Program pengembangan ekonomi kreatif kerakyatan	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pertumbuhan Industri
				Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase pelayanan kemetrologian (tera/tera ulang alat UTTP: Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) di wilayah Kota Surakarta
				Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Persentase pasar rakyat yang direvitalisasi
				Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase sarana prasarana peralatan elektrik dan mekanikal pasar serta pemeliharannya
					Persentase Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU yang tertangani
			Program pengelolaan areal pemakaman		Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk
				Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	persentase lokasi PKL yang tertata
			Program kesejahteraan sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan PMKS yang dibina
				Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	
				Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	
				Program pembinaan anak terlantar	
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan	

No	Visi	Misi	Program Unggulan	Program Permendagri 13/2006	Indikator
				Sosial	
				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
				Program Keluarga Berencana	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)
			Program pembangunan berkeadilan	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk
					Persentase sampah yang dikelola melalui bank sampah
					Persentase jumlah pasar yang memiliki sarana dan prasarana kebersihan
			Program perumahan layak huni	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih
					Persentase jaringan sistem air limbah yang memadai
					Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih
			Program pengembangan ruang publik berwawasan lingkungan	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya dokumen perencanaan RDTR yang ditetapkan dengan Perda
					Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten / kota beserta rencana rincinya melalui peta analog

No	Visi	Misi	Program Unggulan	Program Permendagri 13/2006	Indikator
				Program Pemanfaatan Ruang	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan PERDA tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya
				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan
				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program	Luasan ruang Terbuka hijau publik
				Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase taman kota dalam kondisi baik
			Program perumahan layak huni	Program Pengembangan Perumahan	Persentase RTLH yang terehabilitasi

Sumber: Bappeda Kota Surakarta, 2016

Untuk melihat keterkaitan antara sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam pencapaian misi RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021, dapat dilihat pada Tabel 7.3.

Tabel 7.3
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Surakarta

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)		TARGET KINERJA TAHUN							BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							KONDISI AWAL (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	KONDISI AKHIR (2021)		
	Misi 1 Waras: Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani, rohani, dan sosial dalam lingkungan hidup yang sehat															
	1.1.1. Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat jasmani dan rohani	Promosi dan edukasi PHBS menuju penguatan upaya kesehatan preventif	Pelebagaan Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Menguatkan UKBM dlm upaya budaya hidup bersih dan sehat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Kesehatan	PD Urusan Kesehatan
				Menggalang peran aktif masyarakat dalam mewujudkan STBM	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Desa/kalurahan melakukan STBM	5	17	27	37	47	51	51	51	Bidang Kesehatan	PD Urusan Kesehatan
				Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Pemeriksaan HIV dan AIDS di Pusk dan RSUD	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Kesehatan	PD Urusan Kesehatan
				Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan,	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Tim Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM)	0	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Kesehatan	PD Urusan Kesehatan
				Peningkatan status gizi masyarakat	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi gizi buruk pada balita	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,000	Bidang Kesehatan	PD Urusan Kesehatan
	1.1.2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan jumlah fasilitas dan jenis layanan kesehatan	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	81,30	83,80	85,00	87,50	88,00	89,00	90,00	90,00	Bidang Kesehatan	PD Urusan Kesehatan
				Peningkatan kualitas kesehatan anak bayi	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan kunjungan bayi	95,47	96,00	96,50	97,00	97,50	98,00	98,00	98,00	Bidang Kesehatan	PD Urusan Kesehatan
				Peningkatan kualitas kesehatan anak balita	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan pelayanan anak balita	73,75	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	80,00	80,00	Bidang Kesehatan	PD Urusan Kesehatan
				Penurunan angka kematian DBD	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka Kematian DBD	2,06	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Bidang Kesehatan	PD Urusan Kesehatan
				Peningkatan pelayanan pengobatan TB	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate)	94,01	94,61	95,21	95,81	96,41	97,01	97,01	97,01	Bidang Kesehatan	PD Urusan Kesehatan
				Peningkatan pelayanan penderita hipertensi	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Proporsi kasus hipertensi di fasilitas pelayanan kesehatan	0	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Kesehatan	PD Urusan Kesehatan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2015)	TARGET KINERJA TAHUN						KONDISI AKHIR (2021)	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								2016	2017	2018	2019	2020	2021			
				Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan skrining kesehatan lansia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Kesehatan	PD Urusan Kesehatan
				Penerapan pendekatan pelayanan berkelanjutan (continuum of care)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan skrining kesehatan reproduksi penduduk dewasa (usia 15-59 tahun)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Kesehatan	PD Urusan Kesehatan
				Peningkatan pelayanan penderita DM	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	0	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Kesehatan	PD Urusan Kesehatan
				Peningkatan status kesehatan masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kunjungan puskesmas orang per hari	128,00	133,00	137,00	141,00	145,00	150,00	150,00	150,00	Bidang Kesehatan	PD Urusan Kesehatan
				Peningkatan kecukupan dan kualitas sarana prasarana kesehatan DKK, Puskesmas dan jaringannya	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Proporsi Puskesmas PONED sesuai standar	24,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	Bidang Kesehatan	PD Urusan Kesehatan
				Peningkatan kualitas sarana layanan kesehatan tingkat dasar dengan prioritas mewujudkan akreditasi di semua puskesmas	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Proporsi Puskesmas terakreditasi	0	65	100	100	100	100	100	100	Bidang Kesehatan	PD Urusan Kesehatan
						Proporsi RS PONEK	40	40	40	50	50	60	60	60	Bidang Kesehatan	PD Urusan Kesehatan
				Peningkatan pemenuhan sediaan farmasi dan alkes	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	0	80	82	84	87	90	90	90	Bidang Kesehatan	PD Urusan Kesehatan
				Peningkatan pengawasan makanan	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Presentase makanan yang memenuhi syarat	87,12	87,71	88,3	88,65	89,24	89,6	89,83	89,83	Bidang Kesehatan	PD Urusan Kesehatan
				Peningkatan tempat pengolahan makanan	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Proporsi TPM memenuhi syarat	93,12	93,5	94	94,5	95	95	95	95.000	Bidang Kesehatan	PD Urusan Kesehatan
				Peningkatan kecukupan dan kualitas sarana prasarana kesehatan di rumah sakit umum daerah	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Rasio cakupan pelayanan RSUD	54,738	60	65	70	72,5	75	77,5	77.500	Bidang Kesehatan	PD Urusan Kesehatan
				Peningkatan kecukupan dan kualitas sarana prasarana kesehatan di rumah sakit umum daerah	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	BOR (Bed Occupancy Ratio)	58,64	55,71	52,92	50,28	47,76	45,37	83,45	83.450	Bidang Kesehatan	PD Urusan Kesehatan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2015)	TARGET KINERJA TAHUN						KONDISI AKHIR (2021)	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								2016	2017	2018	2019	2020	2021			
				Peningkatan kecukupan dan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah	Program peningkatan BLUD											
	1.2.1. Meningkatkan perilaku masyarakat dan pelaku usaha yang peduli pada lingkungan sehat	Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup	Peningkatan tata kelola lingkungan sehat	Peningkatan pemantauan terhadap pelaksanaan perizinan di bidang lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	80	80	100	100	100	100	100	100	Bidang Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup
						Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	70	80	90	100	100	100	100	100	Bidang Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup
						Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup
				Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Indeks Pencemaran Udara	64,68	64,68	64,68	64,68	64,68	64,68	64,68	64,68	Bidang Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup
						Indeks Pencemaran Air	40,00	40,56	41,11	41,67	42,22	42,78	43,33	43,33	Bidang Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup
						Indeks Tutupan Hutan	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	Bidang Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup
2	Misi 2 Wasis: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, mandiri dan berkarakter menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan melestarikan warisan budaya daerah															
	2.1.1. Meningkatkan perluasan akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Perluasan akses dan penguatan mutu pendidikan formal dan non formal yang berkarakter unggul	Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan	Peningkatan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan untuk PAUD	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	53,00	54,06	55,14	56,24	57,37	58,52	58,52	58,52	Bidang Pendidikan	PD Urusan Pendidikan
				Peningkatan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan untuk PAUD dan Pendidikan dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	Bidang Pendidikan	PD Urusan Pendidikan
						Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,33	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,00	Bidang Pendidikan	PD Urusan Pendidikan
				Peningkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk PAUD Pendidikan dasar	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru PAUD_Sertifikat Pendidik	33%	40%	50%	60%	70%	90%	90%	90%	Bidang Pendidikan	PD Urusan Pendidikan
						Guru SD/MI_Sertifikat Pendidik	45%	50%	60%	70%	80%	90%	90%	90%	Bidang Pendidikan	PD Urusan Pendidikan
						Guru SMP/MTs_Sertifikat Pendidik	59,70%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	Bidang Pendidikan	PD Urusan Pendidikan
				Penguatan minat baca masyarakat	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Tingkat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)	2,58	2,82	3,07	3,34	3,60	3,87	4,15	4,15	Bidang Perpustakaan	PD Urusan Perpustakaan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2015)	TARGET KINERJA TAHUN						KONDISI AKHIR (2021)	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								2016	2017	2018	2019	2020	2021				
	2.1.2. Terwujudnya masyarakat dan angkatan kerja yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing	Memasyarakatkan budaya inovatif dan kreatif melalui pendidikan luar sekolah dan masyarakat	Pelembagaan budaya kreatif dan inovatif	Pengembangan pendidikan kualitas standarisasi dan sertifikasi pendidikan non formal	Program Pendidikan Non Formal	LKP Terakreditasi (%)	23,29	35,62	47,95	60,27	72,61	86,31	100,00	100,00	Bidang Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
						Lembaga PKBM Terakreditasi (%)	23,08	39,75	56,42	73,09	89,75	93,33	100,00	100,00	Bidang Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
						Persentase angka melek huruf (%)	97,81	98,00	98,18	98,37	98,56	98,75	98,94	98,94	Bidang Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
				Penguatan penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup berorietasi pasar	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0	33,33	34,48	36,36	38,46	40	41,67	41,67	Bidang tenaga kerja	Bidang tenaga kerja	
	2.2.1. Meningkatnya pelestarian warisan karya budaya, adat istiadat, nilai-nilai seni budaya	Pemberdayaan masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan nilai seni, adat, dan karya budaya	Pengembangan kreativitas masyarakat	Peningkatan kebanggaan dan wawasan kekayaan budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan Fasilitasi Seni	85,71	85,71	100	100	100	100	100	100	Bidang Kebudayaan	PD Urusan kebudayaan	
						Cakupan Kajian Seni	60	60	60	60	60	60	60	60	60	Bidang Kebudayaan	PD Urusan kebudayaan
						Cakupan Organisasi seni	50	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Kebudayaan	PD Urusan kebudayaan
	2.2.2. Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	Pemberdayaan pemuda untuk mengembangkan prestasi seni dan olahraga	Pengembangan kreativitas pemuda	Peningkatan kualitas sarpras olah raga tingkat kota	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rasio Lapangan Olah raga dalam kondisi baik	80	80	80	80	80	80	80	80	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah raga	
				Peningkatan kualitas organisasi olah raga tingkat kota	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi Olahraga dari pemerintah daerah (buah)	40	40	40	40	40	40	40	40	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah raga	
				Peningkatan prestasi dan daya saing pemuda	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah Prestasi pemuda (kali)	15	16	17	18	19	20	21	21	Bidang Pemuda dan Olah Raga	PD Urusan Pemuda dan Olah Raga	
3	Misi 3 Wareg : Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri dan berkeadilan mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani																

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2015)	TARGET KINERJA TAHUN						KONDISI AKHIR (2021)	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	3.1.1. Menurunnya PMKS	Penguatan kemampuan produktif dan karakter mandiri pada kelompok PMKS, pengangguran dan rentan miskin	Percepatan pengentasan masyarakat miskin dan pengangguran	Peningkatan kemandirian dan keterampilan PMKS	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Cakupan PMKS yang dibina	0,00	0,53	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78	0,78	Bidang Sosial	PD Urusan Sosial
				Pembangunan budaya wirausaha bagi penyandang cacat melalui palatihan ketrampilan	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma											
				Pelatihan keterampilan bagi anak terlantar	Program pembinaan anak terlantar											
				Pelaksanaan penangnan sosial terhadap PGOT dan PMKS	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial											
	3.1.2. Terjaganya ketersediaan pangan yang terjangkau	Peningkatan produktivitas dan kecukupan bahan kebutuhan pokok	Penguatan ketahanan pangan	Penyediaan sarana prasarana pertanian/perkebunan di lahan terbatas wilayah perkotaan (urban farming)	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Tingkat produksi pertanian	0,00	1,50	1,00	1,00	0,75	0,50	0,25	5,00	Bidang Pertanian	PD Urusan Pertanian
				Pembinaan/pelatihan SDM kelompok tani, kelompok perikanan, kelompok ternak sebagai pelaku agribisnis	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan bina kelompok petani	80,00	82,00	84,00	88,00	92,00	97,00	100,00	100,00	Bidang Pertanian	PD Urusan Pertanian
				Peningkatan kecukupan ketersediaan hasil peternakan	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Cakupan produksi daging yang memenuhi kriteria ASUH	84	85	86	87	88	89	90	90	Bidang Pertanian	PD Urusan Pertanian
				Penyelenggaraan sarana prasarana kesehatan hewan	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Angka mortalitas hewan	28,8	27,16	22,4	17,64	12,88	8,12	3,36	3,36	Bidang Pertanian	PD Urusan Pertanian
				Peningkatan kecukupan ketersediaan hasil perikanan	Program pengembangan budidaya perikanan	Cakupan bina kelompok perikanan	30,77	60	80	85	90	95	100	100	Bidang Kelautan dan Perikanan	PD Urusan Kelautan dan Perikanan
				Peningkatan kecukupan ketersediaan bahan pangan utama	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Persentase ketersediaan beras	161,51	161,56	161,61	161,66	161,71	161,76	161,81	161,81	Bidang Pangan	PD Urusan Pangan
						Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Pangan	PD Urusan Pangan
						Persentase skor Pola Pangan Harapan (PPH)	80,8	82	83	84	85	86	87	87	Bidang Pangan	PD Urusan Pangan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2015)	TARGET KINERJA TAHUN						KONDISI AKHIR (2021)	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								2016	2017	2018	2019	2020	2021			
				Perlindungan konsumen	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase pelayanan kemetrologian (tera/tera ulang alat UTPP: Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) di wilayah Kota Surakarta	18,66	36,96	37,69	38,81	39,96	41,54	42,36	42,00	Bidang Perdagangan	PD Urusan perdangan
	3.1.3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kewilayahan	Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan sosial, ekonomi, budaya, fisik prasarana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi	Pengembangan sistem manajemen pembangunan partisipatif	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengaduan masyarakat	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase hasil temuan pengawasan dan aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	75	75	80	80	85	85	85	85	Bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa	PD Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa
				Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah KK yang diberangkatkan	10	10	10	10	10	10	10	10	Bidang tranmisgrasi	PD Urusan Transmigrasi
				Peningkatan kualitas produk industri	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pertumbuhan Industri	0,46	0,40	0,40	0,34	0,45	0,34	0,45	0,45	Bidang perindustrian	PD Urusan Perindustrian
	3.1.4. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Penguatan kapasitas perempuan berkontribusi dalam kegiatan ekonomi, sosial, politik, budaya dan perlindungan hak anak	Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak	Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3,51	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	3,56	3.560,00	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
				Penguatan perlindungan perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	60	80	100	100	100	100	100	100.000	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	3.1.5. Meningkatkan kesempatan kerja	Pengembangan kemampuan kerja dan berusaha (wirausaha), pengembangan program padat karya dan usaha produktif	Peningkatan kesempatan kerja dan peluang kerja	Peningkatan perlindungan tenaga kerja	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	angka sengketa pengusaha -pekerja per tahun	3,58	2,58	2,50	2,42	2,35	2,28	2,22	2,22	Bidang Tenaga Kerja	PD Urusan Tenaga Kerja
						Persentase perusahaan yang menerapkan tentang norma kerja dan K3	72,03	75,05	77,08	79,00	81,00	83,00	85,00	85,00	Bidang Tenaga Kerja	PD Urusan Tenaga Kerja

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2015)	TARGET KINERJA TAHUN							KONDISI AKHIR (2021)	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								2016	2017	2018	2019	2020	2021				
				Peningkatan kualitas KUMKM	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase pemahaman pelaku usaha terhadap produk jasa keuangan dari lembaga pembiayaan	0	5	5	5	5	5	5	5	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PD Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				Peningkatan pemahaman KUMKM terhadap produk jasa keuangan	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase Peningkatan kualitas KUMKM yang dibina	0	5	5	5	5	5	5	5	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PD Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				Pengembangan koperasi aktif	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	40,4	0,88	1,2	1,5	1,8	2	2	49,78	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PD Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	3.2.1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal untuk meningkatkan PAD	Optimalisasi potensi daerah untuk peningkatan kapasitas PAD	Peningkatan tata kelola keuangan yang optimal untuk mendukung peningkatan PAD	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase meningkatnya Penerimaan Pajak Hotel, Reklame, Sarang Burung Walet dan Restoran	3,46%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	Fungsi penunjang urusan pemerintahan (Keuangan)	PD Fungsi penunjang urusan pemerintahan (Keuangan)	
						Persentase meningkatnya Penerimaan Pajak Parkir, Air Tanah, Hiburan, dan BPHTB	11%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	Fungsi penunjang urusan pemerintahan (Keuangan)	PD Fungsi penunjang urusan pemerintahan (Keuangan)	
						Persentase meningkatnya Penerimaan PBB	5%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	Fungsi penunjang urusan pemerintahan (Keuangan)	PD Fungsi penunjang urusan pemerintahan (Keuangan)	
						Peningkatan ketaatan ketertiban pembayaran pajak	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Ketaatan dan ketertiban pembayaran pajak atas belanja daerah bagi seluruh SKPD Kota Surakarta	100	100	100	100	100	100	100	100	Fungsi penunjang urusan pemerintahan (Keuangan)
					3.2.2.Meningkatnya jumlah investasi	Pengembangan Sektor Unggulan daerah dan penguatan promosi	Peningkatan iklim investasi yang berdaya saing	Pemanfaatan teknologi informasi di bidang pelayanan perizinan	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Pertumbuhan jumlah pelayanan yang dilayani SPIPISE	100	100	100	100	100	100	100
			Peningkatan kualitas Pelayanan perizinan	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan perijinan kategori baik	73,00	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	80,00	Bidang Penanaman modal	PD urusan Penanaman Modal		
			Peningkatan promosi kerjasama investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Proporsi Lol dari jumlah potensi yang ditawarkan	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Penanaman modal	PD urusan Penanaman Modal		
			Peningkatan jumlah UMK yang mengikuti promosi produk	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah UMK yang telah mengikuti pameran/promosi produk	23	29	48	53	59	65	800	1.054	Bidang Perdagangan	PD Urusan Perdagangan		

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2015)	TARGET KINERJA TAHUN						KONDISI AKHIR (2021)	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	3.2.3. Berkembangnya ekonomi kreatif dan kota tujuan wisata seni dan budaya	Pemberdayaan masyarakat mengembangkan ekonomi kreatif berbasis seni budaya	Peningkatan perekonomian kota yang maju, kuat dan mandiri	Peningkatan daya saing usaha wisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase usaha pariwisata yang memiliki sertifikasi/memenuhi standar usaha pariwisata	42	50	55	60	65	70	75	75	Bidang pariwisata	PD urusan pariwisata
				Peningkatan daya saing dan perluasan pemasaran pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rata-rata lama tinggal wisatawan (hari)	1,4	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8	Bidang pariwisata	PD urusan pariwisata
				Pengembangan kreasi dan inovasi daerah	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persentase ketersediaan dokumen IPTEK sesuai amanat pemerintah	0	29,41	17,65	11,76	11,76	11,76	17,65	100	Penunjang urusan pemerintahan: penelitian dan pengembangan	PD Penunjang urusan pemerintahan: penelitian dan pengembangan
Misi 4 Mapan: Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif dan																
	4.1.1 Meningkatnya pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi (Solo <i>Smart City</i>)	Optimalisasi pemanfaatan basis data terintegrasi dan teknologi informasi	Pengembangan <i>e-government</i>	Pengembangan <i>E-Governance</i>	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tingkat Pembaruan (updating) publikasi informasi melalui website pemerintah	0	7	7	7	10	10	10	10	Bidang komunikasi dan informatika	PD urusan komunikasi dan informatika
				Membangun jejaring komunikasi dan informasi	Program kerjasama informasi dan media massa	Persentase Publikasi informasi melalui media cetak pemerintah	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang komunikasi dan informatika	PD urusan komunikasi dan informatika
				Peningkatan kualitas Manajemen kearsipan	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip	Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikat dalam bentuk informatika	10	15	15	15	15	15	15	15	Bidang kearsipan	PD urusan kearsipan
				Peningkatan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase RAPERDA yang disetujui DPRD	80	85	85	90	90	95	95	95	Bidang Fungsi Lainnya (Sekretariat DPRD)	PD Fungsi Lainnya (Sekretariat DPRD)
				Peningkatanpelayana n kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Program Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan penatausahaan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan regulasi yang berlaku	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang fungsi lainnya (Sekretariat Daerah)	PD fungsi lainnya (Sekretariat Daerah)
				Peningkatan kinerja serapan anggaran	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase realisasi kinerja kegiatan APBD tahun berkenaan (%)	90	92	95	96	97	98	99	99	Bidang fungsi lainnya (Sekretariat Daerah)	PD fungsi lainnya (Sekretariat Daerah)
				Pengembangan kerangka regulasi daerah	Program penataan peraturan perundang-undangan	Persentase produk hukum/ regulasi daerah yang dihasilkan sesuai prolegda	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang fungsi lainnya (Sekretariat Daerah)	PD fungsi lainnya (Sekretariat Daerah)

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2015)	TARGET KINERJA TAHUN						KONDISI AKHIR (2021)	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								2016	2017	2018	2019	2020	2021			
				Peningkatan kinerja hasil kerjasama	Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Persentase kerjasama (MoU, Peraturan Bersama, PKS/Agreement) yang difasilitasi dan dikoordinasikan hingga program aksi (%)	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95	Bidang fungsi lainnya (Sekretariat Daerah)	PD fungsi lainnya (Sekretariat Daerah)
				Fasilitasi dan koordinasi penyediaan kebijakan pengembangan usaha daerah	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase rata-rata capaian laba BUMD/Perusda	105,6	100	100	100	100	100	100	100	Bidang fungsi lainnya (Sekretariat Daerah)	PD fungsi lainnya (Sekretariat Daerah)
	4.1.2. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Peningkatan kualitas aparatur dan manajemen kinerja pembangunan	Penguatan reformasi birokrasi	Penguatan kualitas pengendalian internal	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase cakupan SKPD yang menjadi obyek pemeriksaan dalam kegiatan pengawasan	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang fungsi Penunjang urusan pemerintahan (Pengawasan)	Bidang fungsi Penunjang urusan pemerintahan (Pengawasan)
				Peningkatan tata kelola keuangan dan aset daerah yang optimal untuk mendukung peningkatan PAD	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Ketepatan Waktu Perda dan Perwali tentang APBD	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Fungsi penunjang urusan pemerintahan (Keuangan)	PD Fungsi penunjang urusan pemerintahan (Keuangan)
						Ketepatan Waktu Perda dan Perwali Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100	100	100	100	100	100	100	100	Fungsi penunjang urusan pemerintahan (Keuangan)	PD Fungsi penunjang urusan pemerintahan (Keuangan)
				Pengelolaan dan penjaminan aset/barang milik daerah	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase terjaminnya Aset / Barang Milik Daerah	40	0	5	5	5	5	5	65	Bidang Pertanahan	PD Urusan Pertanahan
				Pengembangan kualitas pelayanan kecamatan	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	70	70	72	74	76	78	80	80	Bidang Fungsi Penunjang Lainnya (Sekretariat Daerah)	PD Urusan fungsi lainnya kewilayahan
				peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	3,2	4,2	4,4	4,6	4,8	4,8	4,8	4,8	Bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa	PD Urusan fungsi lainnya kewilayahan
				Peningakatan pengembangan wawasan kebangsaan masyarakat	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	14	15	23	26	31	34	40	54	Bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	PD Urusan fungsi lainnya kewilayahan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2015)	TARGET KINERJA TAHUN						KONDISI AKHIR (2021)	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								2016	2017	2018	2019	2020	2021			
				Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pada usaha dana tau kegiatan di wilayah	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	68	69	72	73	74	76	77	77	Bidang Lingkungan Hidup	PD Urusan fungsi lainnya kewilayahan
				Pelestarian seni dan budaya di masyarakat	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	45	45,2	45,4	45,8	46	46,2	46,2	46,2	Bidang Kebudayaan	PD Urusan fungsi lainnya kewilayahan
				Pembinaan dan pengembangan aparatur	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pengembangan organisasi perangkat daerah yang efektif efisien(rightsizing)	100,00	10,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	Bidang Fungsi Penunjang Lainnya (Sekretariat Daerah)	PD Fungsi Penunjang Lainnya (Sekretariat Daerah)
						Persentase pegawai yang berprestasi (%)	3,86	2,86	3,49	3,61	3,75	3,9	4,05	4,05	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan)	PD Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan)
						Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kualifikasi dan Kompetensinya	10,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	87,00	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan)	PD Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan)
				Peningkatan kapasitas aparatur melalui diklat teknis fungsional	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur PNS yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional	10,30	11,00	11,50	12,00	12,50	13,00	13,50	73,50	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan)	PD Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan)
				Peningkatan penyelesaian proses mutasi dan purna tugas aparatur	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase penyelesaian proses mutasi dan pensiun tepat waktu	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	96,00	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan)	PD Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan)
				Peningkatan kualitas pelayanan adminsitrase kependudukan dan pencatatan sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan KTP dan KK	98,74	88,18	99,25	90,075	99,55	99,7	99,8	99,8	Bidang fungsi administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil	PD administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil
						Persentase Kepemilikan akte	89,14	90,14	91,00	91,86	92,71	93,57	94,57	94,57	Bidang fungsi administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil	PD administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil
						Persentase pemahaman administrasi kependudukan sampai tingkat ketua RT dan RW	-	-	11,57	15,73	16,94	24,02	31,74	31,74	Bidang fungsi administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil	PD administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil
						Persentase penambahan jenis layanan kependudukan yang diselengagrakan online	-	13,33	13,33	13,33	20,00	20,00	20,00	20,00	Bidang fungsi administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil	PD administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2015)	TARGET KINERJA TAHUN						KONDISI AKHIR (2021)	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	4.2.1. Meningkatkan kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan	Pengintegrasian data kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan	Manajemen pembangunan berwawasan kependudukan	Meningkatkan kualitas manajemen database	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Buku Kota dalam angka	61,76	2,46	10,66	25,41	47,54	73,77	100	100	Bidang fungsi penunjang urusan pemerintahan (Perencanaan)	PD urusan penunjang urusan Perencanaan
						Buku PDRB Kota	61,76	2,46	10,66	25,41	47,54	73,77	100	100	Bidang fungsi penunjang urusan pemerintahan (Perencanaan)	PD urusan penunjang urusan Perencanaan
				Meningkatkan serapan aspirasi stakeholders diprioritaskan terhadap dokumen perencanaan tahunan	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase serapan aspirasi hasil musrenbang dalam RKPD	52,31	55	57,5	60	62,5	65	67,5	68	Bidang fungsi penunjang urusan pemerintahan (Perencanaan)	PD urusan penunjang urusan Perencanaan
				Meningkatkan kualitas analisis hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai amanat pemerintah	100	17,65	16,18	16,18	16,18	16,18	17,65	100	Bidang fungsi penunjang urusan pemerintahan (Perencanaan)	PD urusan penunjang urusan Perencanaan
				Peningkatan intensitas koordinasi antar bidang, SKPD dan stakeholders dalam penyusunan dokumen perencanaan sosial budaya	Program perencanaan sosial budaya	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	0	17,31	21,15	16,35	14,42	13,46	17,31	100	Bidang fungsi penunjang urusan pemerintahan (Perencanaan)	PD urusan penunjang urusan Perencanaan
				Peningkatan intensitas koordinasi antar bidang, SKPD dan stakeholders dalam penyusunan dokumen perencanaan ekonomi	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah	0	15,91	15,91	15,91	15,91	15,91	20,45	100	Bidang fungsi penunjang urusan pemerintahan (Perencanaan)	PD urusan penunjang urusan Perencanaan
				Perumusan kebijakan pemerintah kota melalui pelimpahan wewenang camat dan lurah	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kebijakan teknis bidang pemerintahan umum yang dihasilkan	0,00	22,22	22,22	22,22	11,11	11,11	11,11	100,00	Bidang fungsi lainnya (Sekretariat Daerah)	PD fungsi lainnya (Sekretariat Daerah)
				Perumusan kebijakan pemerintah kota terkait pemekaran kelurahan	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan											

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2015)	TARGET KINERJA TAHUN						KONDISI AKHIR (2021)	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								2016	2017	2018	2019	2020	2021			
				Penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui media Komunikasi, Informasi,dan Media Massa	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tingkat persepsi masyarakat dalam menilai kebijakan, kinerja atau perilaku pemerintah kota	Baik (80)	Sangat Baik (82)	Sangat Baik (85)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (93)	Sangat Baik (95)	Sangat Baik (95)	Sangat Baik (95)	Bidang fungsi lainnya (Sekretariat Daerah)	PD fungsi lainnya (Sekretariat Daerah)
				Penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui kerjasama dengan media massa	Program kerjasama informasi dan media massa											
	4.2.2. Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan	Peningkatan keluarga sejahtera berencana	Program Keluarga Berencana	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	11	11	10	10	10	10	10	10	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
	4.3.1. Menurunnya konflik antar golongan	Penegakan hukum dan regulasi daerah dengan membuka ruang monitoring publik	Peningkatan kondusivitas keamanan, ketertiban, kenyamanan kota	Penguatan wawasan kebangsaan masyarakat	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	PD Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
				Penguatan kemitraan wawasan kebangsaan masyarakat	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase tutor pendidikan pendahuluan bela negara	25,00	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00	85,00	85,00	Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	PD Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
				Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Penanganan Unjuk Rasa dan Konflik Sosial	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	PD Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
	4.3.2 Menurunnya pelanggaran produk hukum daerah	Perluasan pendidikan kesadaran hukum masyarakat	Pelembagaan budaya masyarakat tertib hukum	Peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
				Penegakan Perda	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase aduan yang tertangani	0	70	73	76	80	83	86	86	Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
				Peningkatan keamanan lingkungan	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah Linmas Per RT atau sebutan lainnya	0,46	0,5	0,52	0,54	0,55	0,57	0,59	0,59	Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Misi 5 Papan: Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, tempat untuk berusaha dan berkreasi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan dan yang berwawasan kependudukan, lingkun																

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2015)	TARGET KINERJA TAHUN						KONDISI AKHIR (2021)	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	5.1.1. Meningkatnya ketersediaan perumahan yang layak huni dan berkurangnya pemukiman kumuh	Pemerataan pembangunan kawasan permukiman yang sehat dan berkeadilan	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur memenuhi <i>Universal Access</i>	Peningkatan kualitas perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Persentase RTLH yang terehabilitasi	0	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	29,06	Bidang Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	PD Urusan Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
				Peningkatan Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU yang tertangani	91,84	1,63	1,67	1,56	1,70	1,60	0,00	100,00	Bidang Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	PD Urusan Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
				Pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi dan sarana prasarana permukiman sehat	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih	80,99	4,01	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	100,00	Bidang Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	PD Urusan Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
						Persentase jaringan sistem air limbah yang memadai	97,10	0,90	0,50	0,50	1,00	0,00	0,00	100,00	Bidang Urusan Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	PD Urusan Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
	5.1.2. Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan yang berkualitas	Pengembangan aksesibilitas dan kualitas transportasi dan lalu lintas yang tertib, lancar, nyaman, dan selamat	Peningkatan infrastruktur perhubungan	Peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan kota yang tertangani	73,37	2,22	2,96	3,55	2,96	2,00	3,00	90,05	Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	PD Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
				Pemeliharaan jalan dan jembatan	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jembatan kota yang tertangani	85	1	1	1	1	1	1	91	Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	PD Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
				Peningkatan kualitas drainase kota	Program pengendalian banjir	Persentase wilayah genangan bebas banjir dan genangan yang tertangani	90	2	2	2	1	1	1	99	Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	PD Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
				Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase kepemilikan uji KIR angkutan umum	88,18	72,48	72,70	72,92	73,14	73,36	73,58	74,00	Bidang Perhubungan	PD Urusan Perhubungan
				Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan angkutan massa	Program peningkatan pelayanan angkutan	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	52,53	9,83	11,24	11,24	11,24	11,24	0	100	Bidang Perhubungan	PD Urusan Perhubungan
						Persentase pelaku usaha yang melaksanakan andalalin sesuai dengan rekomendasi	0	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Perhubungan	PD Urusan Perhubungan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2015)	TARGET KINERJA TAHUN						KONDISI AKHIR (2021)	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	5.1.3. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	Peningkatan pengelolaan persampahan dan limbah	Peningkatan tata kelola lingkungan hidup	Pengelolaan sampah perkotaan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	2,5	2,6	2,76	2,81	2,75	2,7	2,64	3	Bidang Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup
						Persentase sampah yang dikelola melalui bank sampah	0,18	0,29	0,43	0,56	0,69	0,81	0,88	0,88	Bidang Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup
				Pemeliharaan taman, Penataan taman, Revitalisasi taman	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase taman kota dalam kondisi baik	30	33,3	47	57	67	77	87	87	Bidang Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup
				Pengelolaan lahan makam	Program pengelolaan areal pemakaman	Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk	38	36	33	64	101	96	91	91	Bidang Perumahan dan Permukiman	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
	5.1.4. Meningkatkan kesiapsiagaan sistem antisipasi risiko kebencanaan	Peningkatan kapabilitas masyarakat siaga antisipasi risiko bencana	Pengendalian kawasan rawan bencana	Pengembangan kesiagaan dan daya tanggap antisipasi bahaya kebakaran	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota Surakarta	5,00	5,00	5,80	6,40	7,00	7,60	8,20	8,00	Bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	PD Urusan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
				Pengembangan kesiagaan dan daya tanggap antisipasi risiko bencana	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	75	75	80	85	90	95	98	98	Bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	PD Urusan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
						Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah rawan bencana sesuai amanat pemerintah	14	28	42	57	71	85	100	100	Bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	PD Urusan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
						persentase SDM yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan pembangunan	0	75	80	85	90	95	95	95	Bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	PD Urusan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
	5.1.5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Ruang Publik	Perencanaan dan Pengendalian tata kota menuju kota kreatif ekonomi, sosial, budaya melalui optimalisasi partisipasi masyarakat	Perencanaan dan pengendalian tata kota berkarakter <i>Eco Cultural City</i> berbasis partisipasi publik	Sinergitas antara perencanaan sektoral dengan dokumen penataan ruang, terutama dokumen tata ruang pada rencana rinci	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya dokumen perencanaan RDTR yang ditetapkan dengan Perda	0	0	0	66,67	22,22	11	0	100	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten / kota beserta rencana rincinya melalui peta analog	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pengendalian tata kota berkarakter Eco Cultural City	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan	8,09	8,76	9,43	10,09	10,76	11,43	12	12	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2015)	TARGET KINERJA TAHUN						KONDISI AKHIR (2021)	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								2016	2017	2018	2019	2020	2021			
				Pengendalian tata kota berkarakter Eco Cultural City	Program Pemanfaatan Ruang	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan PERDA tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan ketersediaan RTH	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Luasan ruang Terbuka hijau publik	427,88	427,88	430,38	432,88	435,38	437,88	440,38	440,38	Bidang Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup
	5.2.1. Tersedianya sarana prasarana ekonomi yang berdaya saing	Pemerataan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian yang berdaya saing	Peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian	Pengembangan daya Tarik dan daya saing pasar	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Persentase pasar rakyat yang direvitalisasi	47,62	47,62	50,00	52,38	54,76	57,14	59,52	59,52	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
				Pengembangan sarana prasarana klaster ekonomi kreatif	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase sarana prasarana peralatan elektrikl dan mekanikal pasar serta pemeliharaannnya	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
				Pengembangan kinerja pengelolaan sampah pasar	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah pasar yang memiliki sarana dan prasarana kebersihan	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup
				Peningkatan keamanan lingkungan pasar	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase pasar yang memiliki tenaga keamanan pasar-pasar	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	PD Urusan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
				Pengelolaan dan penataan PKL	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	persentase lokasi PKL yang tertata	82,14	83,93	85,71	87,50	89,29	91,07	92,86	93,00	Bidang Perdagangan	PD Urusan Perdagangan
	5.2.2. Tersedianya sarana prasarana sosial budaya	Pengembangan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur sosial budaya yang berkeadilan (inklusif)	Peningkatan infrastruktur sosial budaya	Pembuatan panduan teknis pengelolaan benda, situs, kawasan cagar budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase dokumen teknis pelestarian bangunan/ kawasan cagar budaya yang dihasilkan (%)	2,33	3,49	4,65	5,81	6,98	8,14	9,30	9,30	Bidang Kebudayaan	PD Urusan kebudayaan
				Pengembangan sarana prasarana seni budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah gedung kesenian	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	Bidang Kebudayaan	PD Urusan kebudayaan
				Pengembangan sarana prasarana ibadah	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah forum kebersamaan umat beragama	50	60	75	75	75	75	75	75	Bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	PD urusan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)		TARGET KINERJA TAHUN							BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							KONDISI AWAL (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	KONDISI AKHIR (2021)		
				Pengembangan sarana prasarana ibadah	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah forum kebersamaan umat beragama	50	60	75	75	75	75	75	75	Bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	PD urusan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis SKPD.

Guna memastikan kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, maka dalam proses penyusunan RPJMD telah dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

Kerangka pendanaan program direncanakan melalui:

1. APBD Kota
2. APBD Provinsi Jawa Tengah
3. APBN
4. Pihak-pihak lain (Investor, CSR, masyarakat, dan bantuan lain yang tidak mengikat).

Program untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan yang terdiri dari 171 program yang ada pada dokumen RPJMD, meliputi:

INDIKASI RENCANA PROGRAM / PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KOTA SURAKARTA

NO	Bidang Urusan Pemerintahan & Program	Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN	
	Prioritas Pembangunan	(OUTPUT)			TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA			
					PADA AKHIR PERIODE															
					URAIAN	SATUAN	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	WAJIB																			
1.1	Pelayanan Dasar																			
1.1.1	Pendidikan																			
		124.559.620.591			186.066.994.845			186.629.947.990			185.567.831.453			198.609.941.420			177.161.100.709			1.058.595.437.008
1	01.01.15 - Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMA/MA	%	59,07	60	1.798.436.000	62	2.978.060.000	65	2.117.091.000	67	2.231.974.100	70	2.349.231.510	70	2.483.692.161	59	13.958.484.771	Pendidikan	
		Guru PAUD_Sertifikat Pendidik	%	33	40		50		60		70		80		90		33			
		Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah	Orang	53	54,06		55,14		56,24		57,37		58,52		58,52		58,52			
		Rasio guru terhadap murid	Org	60,69	61,9		63,14		64,4		65,69		67,01		67,01		67,01			
		Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	Org	35,04	35,74		36,46		37,18		37,93		38,69		38,69		38,69			
2	01.01.16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/ MTs	%	95,12	96,07	66.658.981.040	97,03	109.359.448.445	98	108.892.557.590	98,98	109.274.706.577	100	118.129.470.886	100	107.934.587.804	100	620.249.752.342	Pendidikan	
		Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik	%	75,61	100		100		100		100		100		100		76			
		Di setiap SMP dan MTs tersedia minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	%	87,8	100		100		100		100		100		100		88			
		Di setiap SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya	%	95,12	100		100		100		100		100		100		95			
		Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.	%	84,34	100		100		100		100		100		100		84			
		Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40%	%	98,78	100		100		100		100		100		100		99			
		Kunjungan pengawas ke SD/ MI dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	%	99,19	100		100		100		100		100		100		99			
		Kunjungan pengawas ke SMP/ MTs dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	%	71,95	76,99		82,38		88,14		9.431,00		100		100		100			
		Setiap SMP dan MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.	%	67,07	100		100		100		100		100		100		67			

NO	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
					TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
		URAIAN	SATUAN		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Jumlah kelas yang memiliki rombongan belajar rata-rata 34 minggu	%	98,3	98,79		99,29		99,78		100		100		100		100		
		Satuan pendidikan SMP/MTs menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : Kelas VII–IX:27 jam per minggu	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Setiap guru SMP/MTs menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Kepala SMP/MTs melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.	%	86,75	100		100		100		100		100		100		87		
		Laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik. "	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik "	%	98,3	100		100		100		100		100		100		100		
		Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	%	99,8	100		100		100		100		100		100		100		
		Angka Mengulang Jenjang SMP/MTs (AU SMP/MTs/Paket B)	%	0,01	0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0		
		Persentase SMP/MTs yang terakreditasi A	%	80	81		82		83		84		85		86		80		
		IP-22.1 SEKOLAH	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		IP-23.1 SEKOLAH	%	99,6	100		100		100		100		100		100		100		
		Pembinaan Guru jenjang SMP/MTs	%	33,64	33,98		34,32		34,66		35,01		35,36		35,36		35,36		
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	92,07	92,99		93,92		94,86		95,81		100		100		100		
		Di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	%	97,56	100		100		100		100		100		100		98		
		Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran	%	86,59	100		100		100		100		100		100		87		
		Perbandingan SMP/ MTs tiap satu set buku teks untuk setiap peserta didik.	%	74,39	78,85		83,58		88,6		93,92		100		100		100		
		IP-15.1 SEKOLAH	%	83,81	98		100		100		100		100		100		84		
		IP-16.1 SEKOLAH	%	74,39	100		100		100		100		100		100		74		

Bidang Urusan Pemerintahan & Program		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
NO	Prioritas Pembangunan	(OUTPUT)			TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
					PADA AKHIR PERIODE														
		URAIAN	SATUAN		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Satuan pendidikan SD/MI menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : Kelas I-II: 18 jam per minggu Kelas III : 24 jam per minggu Kela	%	98,3	100		100		100		100		100		100		98		
		Setiap SMP/MTs menerapkan Kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku.	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Setiap guru SD/MI menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.	%	97,97	100		100		100		100		100		100		98		
		Setiap SD/MI mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.	%	99,6	99,85		100		100		100		100		100		100		
		Setiap SMP/MTs mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.	%	96,34	97,3		98,28		99,26		100		100		100		100		
		Kepala SD/MI melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.	%	99,19	100		100		100		100		100		100		99		
		Setiap Guru SMP/MTs menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Setiap SMP/MTs menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kemenag Kab/Kota pada setiap akhir semester.	%	70,73	77,8		85,58		94,14		100		100		100		100		
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,33	0,22		0,22		0,21		0,21		0,2		0,2		0		
		Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 13-15 tahun (APS 13-15 tahun)	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	%	86,59	100		100		100		100		100		100		87		

Bidang Urusan Pemerintahan & Program		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
NO	Prioritas Pembangunan	(OUTPUT)			TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
					PADA AKHIR PERIODE														
		URAIAN	SATUAN		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Setiap guru tetap di SMP/ MTs dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.	%	93,9	95,31		96,74		98,19		99,66		100		100		100		
		Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	%	96,96	100		100		100		100		100		100		100		
		Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn	%	95,95	98		99		100		100		100		100		96		
		Perbandingan SD/MI tiap satu set buku teks untuk setiap peserta didik.	%	83,81	87,16		90,65		94,27		98,05		100		100		100		
		Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi	%	75,71	95		98		99		100		100		100		76		
		Setiap Guru SD/MI menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar p	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Setiap guru tetap di SD/ MI dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.	%	98,79	99,04		99,28		99,53		99,78		100		100		100		
		Pembinaan Guru jenjang SD/MI	%	82,83	84,49		86,18		87,9		89,66		91,45		91,45		91,45		
		Setiap SD/MI menerapkan Kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku.	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Setiap SD/MI menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kemenag Kab/Kota pada setiap akhir semester.	%	96,76	100		100		100		100		100		100		100		
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI	%	6,85	6,92		6,99		7,06		7,13		7,2		7,2		7,2		
		Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan po	%	82,59	98		99		100		100		100		100		83		

Bidang Urusan Pemerintahan & Program		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
NO	Prioritas Pembangunan	(OUTPUT)			TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
					PADA AKHIR PERIODE														
		URAIAN	SATUAN		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Di setiap SD/MI tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya	%	93,52	98		100		100		100		100		100		94		
		Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar	Orang	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	90,03	91,83		93,67		95,54		97,45		100		100		100		
		Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Jumlah ruang kelas SD/MI yang memenuhi kebutuhan	%	93,12	94,05		94,99		95,94		96,9		100		100		100		
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,03	0,03		0,03		0,02		0,02		0,01		0,01		0,01		
		Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah	Orang	53	54,06		55,14		56,24		57,37		58,52		58,52		58,52		
3	01.01.17 - Program Pendidikan Menengah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	Sekolah	53,73	54,8	38.630.401.550	55,9	55.652.964.400	57,02	57.279.386.700	58,16	54.880.493.355	59,32	58.634.253.862	59,32	46.893.552.866	100	311.971.052.733	Pendidikan
		Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA	%	68,96	70,68		72,45		74,26		76,12		78,02		78,02		78,02		
		Laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik. "	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	%	98,18	99,16		100		100		100		100		100		100		
		IP-23.1 SEKOLAH	%	99,6	100		100		100		100		100		100		100		
		Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	99,8	99,85		99,99		99,99		99,99		99,97		99,99		100		
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMA/MA	%	59,07	60		62		65		67		70		70		59		
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN) siswa SMK	%	59,17	60		63		65		67		70		70		59		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		IP-16.1 SEKOLAH	%	74,39	100		100		100		100		100		100		74		

NO	Bidang Urusan Pemerintahan & Program	Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
	Prioritas Pembangunan	(OUTPUT)			TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
					PADA AKHIR PERIODE														
		URAIAN	SATUAN		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	01.01.18 - Program Pendidikan Non Formal	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	83,27	84,94	1.090.672.000	86,63	1.196.460.000	88,37	1.324.000.000	90,13	1.409.000.000	91,94	1.467.000.000	91,94	1.570.200.000	91,94	8.057.332.000	Pendidikan
		Angka Mengulang Jenjang SMP/MTs (AU SMP/MTs/Paket B)	%	0,01	0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0		
		Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn	%	95,95	98		99		100		100		100		100		96		
		Perbandingan SD/MI tiap satu set buku teks untuk setiap peserta didik.	%	83,81	87,16		90,65		94,27		98,05		100		100		100		
		LKP Terakreditasi	%	23,29	35,62		47,95		60,27		72,61		86,31		100		23		
		Lembaga PKBM Terakreditasi	%	23,08	39,75		56,42		73,09		89,75		93,33		100		23		
		Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar	Orang	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/ MTs	%	95,12	96,07		97,03		98		98,98		100		100		100		
		Jumlah ruang kelas SMP/ MTs yang memenuhi kebutuhan	%	92,68	94,07		95,48		96,91		98,37		100		100		100		
		Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik	%	75,61	100		100		100		100		100		100		76		
		Di setiap SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya	%	95,12	100		100		100		100		100		100		95		
		Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	%	99,6	100		100		100		100		100		100		100		
		Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 13-15 tahun (APS 13-15 tahun)	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Rasio guru terhadap murid	Org	60,69	61,9		63,14		64,4		65,69		67,01		67,01		67,01		
		Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	Org	35,04	35,74		36,46		37,18		37,93		38,69		38,69		38,69		
		Angka Melek Huruf		97,81	98		98,18		98,37		98,56		98,75		98,94		98,94		
5	01.01.19 - Program Pendidikan Luar Biasa	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,03	0,03	946.500.000	0,03	700.000.000	0,02	730.000.000	0,02	760.000.000	0,01	790.000.000	0,01	820.000.000	0,01	4.746.500.000	Pendidikan
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	0,17	0,15		0,13		0,11		0,1		0,1		0,1		0		
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,33	0,22		0,22		0,21		0,21		0,2		0,2		0		

Bidang Urusan Pemerintahan & Program		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
NO	Prioritas Pembangunan	(OUTPUT)			TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
					PADA AKHIR PERIODE														
		URAIAN	SATUAN		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
6	01.01.20 - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	82,83	84,49	13.459.035.000	86,18	13.553.332.000	87,9	13.625.662.200	89,66	13.691.709.420	91,45	13.762.272.362	91,45	13.824.483.798	91,45	81.916.494.780	Pendidikan
		Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	83,83	84,67		85,51		86,37		87,23		88,11		88,11		88,11		
		Guru SMA/MA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	81,72	84,42		87,2		90,08		93,05		96,12		96,12		96,12		
		Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	%	99,6	100		100		100		100		100		100		100		
		Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	%	96,36	100		100		100		100		100		100		96		
		Setiap guru tetap bekerja 37, 5 jam per minggu di satuan pendidikan	%	96,35	100		100		100		100		100		100		96		
		Guru PAUD_Sertifikat Pendidik	%	33	40		50		60		70		80		90		33		
		Guru SD/MI_Sertifikat Pendidik	%	45	50		60		70		80		90		100		45		
		Guru SMP/MTs_Sertifikat Pendidik	%	59,7	60		70		80		90		100		100		60		
		Guru SMA/MA/SMK_Sertifikat Pendidik	%	53,7	55		65		75		85		95		100		54		
		Di setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	%	96,76	100		100		100		100		100		100		97		
		Kepala SD/MI melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.	%	99,19	100		100		100		100		100		100		99		
		IP-19.1 SEKOLAH	%	98,79	95		98		99		100		100		100		99		
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	83,27	84,94		86,63		88,37		90,13		91,94		91,94		91,94		
		Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV 35% telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 20%.	%	85,37	100		100		100		100		100		100		85		
		Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa	%	69,51	100		100		100		100		100		100		70		

Bidang Urusan Pemerintahan & Program		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
NO	Prioritas Pembangunan	(OUTPUT)			TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
					PADA AKHIR PERIODE														
		URAIAN	SATUAN		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	%	86,59	100		100		100		100		100		100		87		
		Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		IP-25.1 SEKOLAH	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik.	%	92	95		97		98		99		100		100		92		
		Di setiap SD/MI tersedia 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.	%	88,66	100		100		100		100		100		100		89		
		Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40%	%	98,78	100		100		100		100		100		100		99		
7	01.01.22 - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,03	0,03	1.689.095.001	0,03	1.986.730.000	0,02	1.921.250.500	0,02	2.479.948.001	0,01	2.537.712.800	0,01	2.594.584.080	0,01	13.209.320.382	Pendidikan
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	0,17	0,15		0,13		0,11		0,1		0,1		0,1		0		
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,33	0,22		0,22		0,21		0,21		0,2		0,2		0		
		Angka Mengulang Jenjang SMP/MTs (AU SMP/MTs/Paket B)	%	0,01	0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0		
		Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
8	01.01.24 - Program Layanan Autis	Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.	%	100	100	286.500.000	100	640.000.000	100	740.000.000	100	840.000.000	100	940.000.000	100	1.040.000.000	100	4.486.500.000	Pendidikan
1.1.2	Kesehatan				90.181.361.173		264.841.135.211		330.660.157.962		379.239.984.358		419.834.146.862		119.573.095.945		1.604.276.891.511		
9	01.02.15 - Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	hari	2,9	3,34	700.000.000	3,84	1.000.000.000	3,76	1.200.000.000	3,78	1.500.000.000	3,8	1.700.000.000	3,82	2.000.000.000	3,82	8.100.000.000	Kesehatan

NO	Bidang Urusan Pemerintahan & Program	Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
	Prioritas Pembangunan	(OUTPUT)			TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
					PADA AKHIR PERIODE														
		URAIAN	SATUAN		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	%	0	80	2.626.320.000	82	2.887.390.000	84	3.103.960.000	87	3.331.950.000	90	3.584.440.000	90	795.830.012	90	16.276.900.012	Kesehatan
		Persentase obat yang memenuhi syarat	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Proporsi sarana produksi dan distribusidi bidang farmasi dan perbekes sesuai standar	%	70	72		73		74		75		75		75		75		
		Proporsi sarana pelayan an kefarmasian sesuai standar	%	80	82		83		83		84		85		85		85		
10	01.02.16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat	BOR (Bed Occupancy Ratio	%	69,89	71,99	573.175.000	74,15	960.000.000	76,37	1.090.000.000	78,66	1.005.000.000	81,02	1.160.000.000	83,45	850.000.000	83,45	5.638.175.000	Kesehatan
		Cakupan Skrining Kesehatan & pelayanan kesehatan Reproduksi penduduk dewasa (usia 15-59 th)	%	100	100	7.906.336.172	100	7.828.728.960	100	8.418.690.012	100	9.021.468.603	100	9.571.373.148	100	10.145.001.055	100	52.891.597.950	Kesehatan
		Cakupan Skrining Kesehatan Siswa Pendidikan Dasar kelas 1 dan klas 7	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase kunjungan baru rawat jalan di Puskesmas	%	36,52	37		38		39		40		41		41		41		
		Jumlah Kunjungan puskesmas orang per hari	Org	128	133		137		141		145		150		150		150		
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	0	100		100		100		100		100		100		100		
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	0	100		100		100		100		100		100		100		
		Prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Tim Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKIM)	%	0	0		33,33		58,82		80,39		100		100		100		
11	01.02.17 - Program Pengawasan Obat dan Makanan	Presentase makanan yang memenuhi syarat	%	87,12	87,71	41.949.000	88,3	48.145.000	88,65	51.982.500	89,24	55.876.375	89,6	59.576.219	89,83	44.971.554	89,83	302.500.648	Kesehatan
12	01.02.19 - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	BOR (Bed Occupancy Ratio	%	69,89	71,99	102.506.000	74,15	200.000.000	76,37	200.000.000	78,66	250.000.000	81,02	250.000.000	83,45	300.000.000	83,45	1.302.506.000	Kesehatan
		Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	1.257.469.000	100	1.393.740.900	100	1.534.239.850	100	1.687.662.675	100	1.692.162.675	100	215.245.309	100	7.780.520.409	Kesehatan
		Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	%	71,63	76,5		77		78		79		80		80		80		
		Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan	dok	0	0		1		1		1		1		1		1		
13	01.02.20 - Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	0	35	2.006.224.000	33	2.253.514.750	30	2.340.456.087	28	2.530.065.594	25	2.472.165.383	25	1.694.320.282	25	13.296.746.096	Kesehatan
		Prevelansi Bumil KEK	%	2,8	2,75		2,71		2,66		2,61		2,57		2,52		2,52		
		Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	%	2,76	2,73		2,7		2,67		2,64		2,59		2,56		2,56		
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	%	73,64	74		74,2		74,5		74,7		74,8		75		75		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta	%	5,66	5,65		5,63		5,6		5,57		5,54		5,5		5,5		
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100		100		100	VIII-10	100		100		100		100		

Bidang Urusan Pemerintahan & Program		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
NO	Prioritas Pembangunan	(OUTPUT)			TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
					PADA AKHIR PERIODE														
		URAIAN	SATUAN		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	0	15		20		25		30		35		40		40		
		Prevalensi gizi buruk pada balita	%	0	0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	%	0	17,31	55.000.000	21,15	55.000.000	16,35	55.000.000	14,42	55.000.000	13,46	55.000.000	17,31	55.000.000	100	330.000.000	Perencanaan
14	01.02.21 - Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Proporsi TTU memenuhi syarat	%	95,97	96	152.339.000	96,5	234.812.950	97	253.600.783	97,5	276.614.706	98	304.709.359	98	217.420.633	98	1.439.497.431	Kesehatan
		Desa/kalurahan melakukan STBM	Kel	5	17		27		37		47		51		51		51		
		Cakupan Inspeksi Pangan di pendidikan dasar	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
15	01.02.22 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka Kematian DBD	%	2,06	1	1.823.559.000	1	1.779.531.150	1	1.946.998.028	1	2.106.766.036	1	2.269.082.153	1	1.059.232.452	1	10.985.168.819	Kesehatan
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Angka kesakitan malaria	per 1.000 penduduk	0	0		0		0		0		0		0		0		
		Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	%	65,69	70		75		80		85		90		90		90		
		Cakupan pemeriksaan Terduga TB di Puskesmas & RSUD	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate)	%	94,01	94,61		95,21		95,81		96,41		97,01		97,01		97,01		
		Angka penemuan kasus baru HIV	%	0,35	0,32		0,3		0,29		0,29		0,28		0,27		0,27		
		Cakupan Pemeriksaan HIV dan AIDS di Pusk dan RSUD	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Angka penemuan kasus baru kusta	Per 100.000 penduduk	0,78	5		5		5		5		5		5		5		
		Angka penemuan kasus diare balita	%	40,59	40,5		40		39,5		39		38,5		38		38		
		Persentase Diare KLB dapat ditangani < 24 jam	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Angka penemuan kasus ISPA Balita	%	6,76	20		25		30		35		40		45		45		
		Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu	%	0	10		20		30		40		40		40		40		
		Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	97	97,5		98		98,2		98,4		98,5		98,6		98,6		
		Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	98,04	100		100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam"	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	0	2		2		2		2		2		2		2		
		Proporsi kasus hipertensi di fasilitas pelayanan kesehatan	%	31,68	25		22		20		20		20		20		20		

NO	Bidang Urusan Pemerintahan & Program	Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
	Prioritas Pembangunan	(OUTPUT)			TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
					PADA AKHIR PERIODE														
					URAIAN	SATUAN	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Proporsi kasus Diabetes melitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	27,38	25		22		20		20		20		20		20		
		"Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia 18+ tahun "	%	0	20		18		17		16		15,4		15,4		15,4		
		Prevalensi merokok pada usia ≥ 18 tahun	%	0	6,4		5,9		5,6		5,4		5,4		5,4		5,4		
		Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral	%	90	90,5		91		91,5		92		92,5		93		93		
		Angka Penemuan Kasus Baru AIDS	%	0,59	0,54		0,49		0,44		0,4		0,35		0,3		0,3		
		Cakupan Warga Peduli Aids (WPA)	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
16	01.02.23 - Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Proporsi Puskesmas terakreditasi	%	0	65	2.760.750.000	100	2.825.799.100	100	3.059.721.900	100	2.963.684.775	100	3.268.525.136	100	1.816.723.591	100	16.695.204.502	Kesehatan
		Proporsi RS PONEK	%	40	40		40		50		50		60		60		60		
		Proporsi RS terakreditasi	%	36	50		57		57		64		64		71		71		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota"	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase pencapaian rata-rata target SPM kesehatan	%	0	100		100		100		100		100		100		100		
		Proporsi waktu pelayanan perijinan bidang farmasi sesuai standar	%	0	65		70		75		80		85		90		90		
		Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	puskesmas	8	8		10		12		14		16		17		17		
		Persentase RSU Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		"Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif) "	Buah	150	175		200		225		250		275		300		300		
		Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Rasio dokter per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	1,91	1,76		1,76		1,76		1,76		1,76		1,76		1,76		
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	2,2	2		2		2		2		2		2		2		
17	01.02.25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Proporsi Puskesmas PONED sesuai standar	%	24	29	9.069.866.000	29	12.600.000.000	29	12.930.000.000	29	6.171.500.000	29	1.610.650.000	29	1.763.715.000	29	44.145.731.000	Kesehatan
		Cakupan puskesmas	%	340	340		340		340		340		340		340		340		
		Cakupan pembantu puskesmas	%	47	47		47		47		47		47		47		47		
		Rasio puskesmas,poliklinik, pustu per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	0,22	0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		

Bidang Urusan Pemerintahan & Program		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN		
NO	Prioritas Pembangunan						TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			KONDISI KINERJA	
		URAIAN			SATUAN	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp	PADA AKHIR PERIODE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
18	01.02.26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase Rumah Sakit (RS) yang terbangun	%	0	0	400.000.000	25	150.450.000.000	50	200.500.000.000	75	250.550.000.000	100	300.000.000.000	100	0	100	901.900.000.000	Kesehatan		
		Rasio Cakupan Pelayanan RSUD	%	53,72	57,5	11.373.937.000	60	24.321.000.000	62,5	36.429.500.000	65	33.575.000.000	67,5	27.085.000.000	70	27.550.000.000	70	160.334.437.000	Kesehatan		
19	01.02.27 - Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	hari	2,9	3,34	450.000.000	3,84	500.000.000	3,76	550.000.000	3,78	550.000.000	3,8	600.000.000	3,82	600.000.000	3,82	3.250.000.000	Kesehatan		
20	01.02.29 - Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar di Puskesmas dan Jaringannya	%	100	100	112.648.001	100	157.317.251	100	169.263.239	100	181.303.831	100	193.253.404	100	185.163.775	100	998.949.501	Kesehatan		
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	23,64	83,5		85		87,5		90		92,5		95		95				
		Cakupan kunjungan bayi	%	95,47	96		96,5		97		97,5		98		98		98				
		Cakupan pelayanan anak balita	%	73,75	76		77		78		79		80		80		80				
		Cakupan Pelayanan Kesehatan untuk Balita di Puskesmas dan Jaringannya	%	100	100		100		100		100		100		100		100				
		Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	%	0	41		44		47		48		49		50		50				
21	01.02.30 - Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan skrining kesehatan lansia	%	100	100	79.275.000	100	127.498.000	100	163.765.025	100	179.037.652	100	188.026.264	100	107.508.832	100	845.110.773	Kesehatan		
22	01.02.31 - Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Proporsi TPM memenuhi syarat	%	93,12	93,5	23.010.000	94	29.510.000	94,5	33.600.000	95	37.200.000	95	43.300.000	95	15.705.028	95	182.325.028	Kesehatan		
23	01.02.32 - Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan pelayanan antenatal pada ibu hamil	%	100	100	330.980.000	100	441.897.000	100	459.328.330	100	472.851.023	100	502.198.896	100	500.914.483	100	2.708.169.732	Kesehatan		
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	92,74	93		93,5		94		94,5		95		95		95				
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	98,55	99		99,1		99,2		99,3		99,4		99,5		99,5				
		Cakupan pelayanan persalinan di puskesmas dan jaringannya	%	100	100		100		100		100		100		100		100				
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	93		93,5		94		94,5		95		95		95				
		Prosentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	81,3	83,8		85		87,5		88		89		90		90				
		Cakupan pelayanan nifas	%	92,14	93		93,5		94		94,5		95		95		95				
24	01.02.33 - Program peningkatan BLUD	BOR (Bed Occupancy Ratio	%	69,89	71,99	28.260.055.000	74,15	33.000.000.000	76,37	33.500.000.000	78,66	39.000.000.000	81,02	39.500.000.000	83,45	48.000.000.000	83,45	221.260.055.000	Kesehatan		
		Proporsi Puskesmas yang menerapkan pola tata kelola BLUD	%	100	100	20.075.963.000	100	21.747.250.150	100	22.670.052.208	100	23.739.003.088	100	23.724.684.225	100	21.656.343.939	100	133.613.296.610	Kesehatan		
1.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				219.232.627.000			432.429.376.481		969.585.300.000		1.634.478.450.207		1.650.993.100.003		218.615.150.000		5.125.334.003.691			

Bidang Urusan Pemerintahan & Program		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
NO	Prioritas Pembangunan				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
					URAIAN	SATUAN	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
25	01.03.15 - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Prosentase panjang jalan kota yang tertangani	%	73,37	2,22	78.779.344.000	2,96	123.609.850.000	3,55	603.500.000.000	2,96	1.295.750.000.000	2	1.325.250.000.000	3	28.750.000.000	90,06	3.455.639.194.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang jembatan kota dalam yang tertangani	%	85	1		1		1		1		1		1		91		
		Lingkungan pemukiman	%	60	60	50.000.000	60	50.000.000	60	75.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	60	125.000.000	60	500.000.000	Kelurahan
		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	0	0	0	60	6.000.000	65	7.000.000	70	75.000.000	75	8.000.000	80	9.000.000	80	105.000.000	Kecamatan
26	01.03.16 - Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	69,77	2	13.227.149.000	2	51.165.400.900	2	42.713.550.000	2	40.724.200.000	2	32.617.350.003	2	38.138.350.000	81,77	218.585.999.903	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
27	01.03.17 - Program Pembangunan turap/talud/brojong	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	%	35	5	21.631.375.000	5	25.120.125.581	10	45.262.750.000	10	45.262.750.000	10	45.262.750.000	10	37.119.000.000	85	219.658.750.581	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	0	0	0	10	5.000.000	8	6.000.000	7	7.000.000	6	8.000.000	5	9.000.000	5	35.000.000	Kecamatan
28	01.03.18 - Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase panjang jalan kota yang tertangani	%	73,37	2,22	13.300.000.000	2,96	30.925.000.000	3,55	20.790.000.000	2,96	20.990.000.000	2	17.505.000.000	3	2.250.000.000	90,06	105.760.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase panjang city walk yang terpelihara	%	0	13,3	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,3	200.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang jalan dilalui Roda 4	KM	40	40	0	40	0	42	95.000.000	44	100.000.000	45	155.000.000	100	0	100	350.000.000	Kelurahan
29	01.03.19 - Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	0	0	0	90	10.000.000	92	10.000.000	94	10.000.000	96	10.000.000	100	10.000.000	100	50.000.000	Kecamatan
30	01.03.23 - Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan	%	80	2	100.000.000	2	4.800.000.000	3	2.900.000.000	3	1.450.000.000	3	250.000.000	2	250.000.000	95	9.750.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
31	01.03.24 - Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	0	0	0	100	500.000.000	100	500.000.000	100	0	0	0	0	0	100	1.000.000.000	Kelurahan
32	01.03.28 - Program pengendalian banjir	Persentase wilayah bebas banjir dan genangan	%	90	2	2.500.000.000	2	2.505.000.000	2	3.506.000.000	1	4.007.000.000	1	4.508.000.000	1	4.009.000.000	99	21.035.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase orang yang mengikuti pelatihan	%	75	75	200.000.000	80	250.000.000	85	300.000.000	90	350.000.000	95	400.000.000	95	450.000.000	95	1.950.000.000	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
33	01.03.29 - Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah pasar yang memiliki sarana prasarana peralatan elektrikal dan mekanikal pasar serta pemeliharannya	%	100	100	4.663.440.000	100	5.000.000.000	100	5.500.000.000	100	6.325.000.000	100	7.084.000.000	100	8.500.800.000	100	37.073.240.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	0	20	41.000.000.000	80	76.000.000.000	0	50.000.000.000	0	0	0	0	0	0	100	167.000.000.000	Penelitian dan Pengembangan
		Proporsi ketersediaan infrastruktur sesuai Masterplan STP	%	0	100		0		0		0		0		0		100		
		Lingkungan pemukiman	%	8,16	6,53	26.713.450.000	4,89	73.025.000.000	3,3	129.325.000.000	1,6	112.562.500.207	0	71.000.000.000	0	52.500.000.000	100	465.125.950.207	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	91,84	1,63		1,67		1,56		1,7		1,6		0		100		

Bidang Urusan Pemerintahan & Program		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
NO	Prioritas Pembangunan				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	PADA AKHIR PERIODE		
0	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
34	01.03.30 - Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Persentase pasar rakyat yang direvitalisasi	%	45	48	13.019.369.000	50	23.013.000.000	52	26.200.000.000	55	97.350.000.000	57	121.400.000.000	60	41.750.000.000	60	322.732.369.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	78	80	100.000.000	83	100.000.000	85	120.000.000	88	120.000.000	90	140.000.000	100	150.000.000	100	730.000.000	Kelurahan
35	01.05.15 - Program Perencanaan Tata Ruang	persentase rencana detail kawasan strategis kota sesuai dengan amanat dalam regulasi	%	0	0	800.000.000	0	1.450.000.000	60	2.380.000.000	20	700.000.000	20	550.000.000	0	200.000.000	100	6.080.000.000	Perencanaan
		Tersedianya dokumen perencanaan: RDTR yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	dok	0	0		0		66,67		22,22		11		0		100		
		tersedianya dokumen perencanaan RTRW yang ditetapkan dengan Perda	%	0	20		60		20		0		0		0		100		
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah	%	0	46,15		30,77		7,69		3,85		3,85		7,69		100		
		Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog	%	100	100	2.165.000.000	100	4.500.000.000	100	3.800.000.000	100	4.000.000.000	100	3.600.000.000	100	3.200.000.000	100	21.265.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
36	01.05.16 - Program Pemanfaatan Ruang	Terlaksanannya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) ka	%	100	16,67	100.000.000	16,67	350.000.000	16,67	350.000.000	16,67	350.000.000	16,67	350.000.000	16,67	400.000.000	100	1.900.000.000	Perencanaan
		Ketaatan terhadap RTRW	%	0	0		40		45		50		55		60		60		
		Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	%	100	100	233.500.000	100	7.205.000.000	100	29.875.000.000	100	3.925.000.000	100	20.475.000.000	100	475.000.000	100	62.188.500.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
37	01.05.17 - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja	%	100	100	450.000.000	100	2.840.000.000	100	2.370.000.000	100	320.000.000	100	320.000.000	100	320.000.000	100	6.620.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	8,09	8,76		9,43		10,09		10,76		11,43		12		12		
1.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				62.443.182.000		118.058.000.000		79.938.000.000		63.232.850.000		55.812.612.000		70.912.500.000		450.397.144.000		
38	01.04.15 - Program Pengembangan Perumahan	Jumlah MBR yang terfasilitasi Rusunami/Rusunawa	KK	0	45	478.075.000	30	35.000.000	67	350.000.000	45	400.000.000	30	450.000.000	33	0	250	1.713.075.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Lingkungan kawasan kumuh	%	8,16	6,53	23.428.000.000	4,89	67.256.000.000	3,3	27.906.000.000	1,6	27.920.000.000	0	23.695.000.000	0	16.000.000.000	100	186.205.000.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang terehabilitasi	%	0	4,84		4,84		4,84		4,84		4,84		4,84		29,06		

Bidang Urusan Pemerintahan & Program		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
NO	Prioritas Pembangunan	(OUTPUT)			TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
					PADA AKHIR PERIODE														
		URAIAN	SATUAN		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
39	01.04.16 - Program Lingkungan Sehat Perumahan	Tersedianya jaringan sistem air limbah yang memadai	%	97,1	0,9	26.161.018.000	0,5	14.000.000.000	0,5	13.450.000.000	1	13.050.000.000	0	8.200.000.000	0	8.000.000.000	100	82.861.018.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
40	01.04.17 - Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang terehabilitasi	%	4	0,84	6.020.000.000	27,22	0	53,59	0	78,9	0	100	0	100	0	100	6.020.000.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
41	01.04.18 - Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Persentase Relokasi sertifikat hak milik di banataran Sungai Bengawan Solo	%	70	1,43	4.000.000.000	22,86	9.000.000.000	44,29	9.000.000.000	65,71	9.000.000.000	87,14	9.000.000.000	100	0	100	40.000.000.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
42	01.04.19 - Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota Surakarta	%	17	17	1.657.335.000	18	8.876.000.000	20	6.966.000.000	21	5.460.000.000	22	5.813.000.000	25	36.939.000.000	25	65.711.335.000	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
		tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dari pangkalan Damkar	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		persentase penyediaan APAR dari pemilik usaha yang memadai	%	20	33		46		59		73		80		86		86		
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional penanganan bencana	%	10	20		30		40		50		60		70		70		
		Persentase orang yang mengikuti pelatihan	%	75	75		80		85		90		95		95		95		
43	01.04.20 - Program pengelolaan areal pemakaman	Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk	orang	38	36	464.859.000	33	15.941.000.000	64	19.021.000.000	101	3.995.600.000	96	5.077.000.000	91	6.217.100.000	91	50.716.559.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Rasio Ketersediaan lahan TMP	-	0,5	0,5	233.895.000	0,5	2.950.000.000	0,5	3.245.000.000	0,5	3.407.250.000	0,5	3.577.612.000	0,5	3.756.400.000	0,5	17.170.157.000	Sosial
1.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				24.243.743.000		32.712.749.400		35.402.558.280		39.460.729.996		42.705.020.492		44.761.446.415		219.444.647.583		
44	01.19.15 - Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	%	100	100	237.900.000	100	237.900.000	100	240.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	275.000.000	600	1.490.800.000	Kelurahan
		Cakupan Penanganan Unjuk Rasa & Konflik Sosial	%	100	100	1.134.126.000	100	1.230.371.200	100	1.325.705.440	100	1.443.806.528	100	1.604.627.834	100	1.799.813.400	100	8.538.450.402	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Kelurahan
		Petugas perlindungan masyarakat (linmas) di Kota Surakarta	%	0,2	0,2	9.228.975.000	0,3	10.787.951.000	0,4	10.987.835.000	0,5	11.589.535.000	0,6	12.274.010.000	0,7	11.550.476.026	0,7	66.418.782.026	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Kecamatan, dan Kelurahan
		Jumlah Linmas per RT atau sebutan lainnya	Rasio	0,46	0,5		0,52		0,54		0,55		0,57		0,59		0,59		

NO	Bidang Urusan Pemerintahan & Program	Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
	Prioritas Pembangunan	(OUTPUT)			TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
					PADA AKHIR PERIODE														
		URAIAN	SATUAN		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Rasio	1,25	1,36	1.340.690.000	1,45	2.948.480.000	1,81	2.836.700.000	1,81	3.277.500.000	2,17	3.320.200.000	2,17	3.661.200.000	2,17	17.384.770.000	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Kelurahan
		persentase pasar yang memiliki tenaga keamanan	%	100	100	4.216.160.000	100	4.800.000.000	100	5.280.000.000	100	6.100.000.000	100	6.832.000.000	100	6.950.000.000	100	34.178.160.000	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
		Cakupan patroli petugas Satpol PP	%	3	3	260.480.000	3	286.528.000	4	315.180.800	4	330.939.000	5	347.486.000	5	364.860.000	5	1.905.473.800	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Kelurahan
45	01.19.16 - Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Rasio	1,25	1,36	85.000.000	1,45	705.000.000	1,81	489.820.000	1,81	650.980.000	2,17	710.780.000	2,17	945.000.000	2,17	3.586.580.000	Kecamatan
		Cakupan pembinaan kegiatan dan keberadaan orang asing di kota Surakarta	%	30	40	100.000.000	50	120.000.000	60	144.000.000	70	172.800.000	80	207.360.000	90	248.832.000	90	992.992.000	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
46	01.19.17 - Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan pemahaman Persaudaraan Bangsa	%	45	60	1.677.049.000	70	2.012.458.800	80	2.414.950.560	90	2.897.940.672	100	3.477.528.807	100	4.173.034.568	100	16.652.962.407	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Rasio	1,25	1,36	0	1,45	50.000.000	1,81	55.000.000	1,81	61.000.000	2,17	67.000.000	2,17	75.000.000	2,17	308.000.000	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
		Jumlah forum kebersamaan umat beragama	%	50	60	697.635.000	75	764.975.000	75	553.475.000	75	562.475.000	75	569.475.000	75	569.475.000	75	3.717.510.000	Setda dan Kecamatan
		Cakupan pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa	%	100	100	10.000.000	100	75.000.000	100	78.000.000	100	7.200.020	100	95.000.000	100	10.400.000	100	434.000.020	Kecamatan
47	01.19.18 - Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan	Prosentase jumlah tutor pendidikan Pendahuluan Bela Negara	%	25	35	435.492.000	45	522.590.400	55	627.108.480	65	752.530.176	75	903.036.211	85	1.083.643.453	85	4.324.400.720	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
		Cakupan Pemahaman toleransi terhadap organisasi kemasyarakatan	%	10	15	1.443.092.000	35	1.505.055.000	55	1.509.055.000	75	1.555.550.000	95	1.107.550.000	100	1.112.550.000	100	8.232.852.000	Kecamatan
48	01.19.19 - Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	%	17,09	17,09	2.696.144.000	17,09	4.900.000.000	17,09	6.500.000.000	17,09	7.500.000.000	17,09	8.500.000.000	17,09	9.350.000.000	17,9	39.446.144.000	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
		Jumlah Linmas per RT atau sebutan lainnya	Rasio	0,46	0,5		0,52		0,54		0,55		0,57		0,59		0,59		
		Cakupan patroli petugas Satpol PP	%	3	3		3		4		4		5		5		5		
49	01.19.20 - Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Cakupan pembinaan cukai ilegal di 51 kelurahan	%	100	100	119.000.000	100	135.000.000	100	157.000.000	100	186.000.000	100	178.000.000	100	169.000.000	100	944.000.000	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan kecamatan
		Cakupan penyuluhan P4GN pada siswa sekolah SLTP dan SLTA di Kota Surakarta	%	15	45	200.000.000	60	240.000.000	75	288.000.000	90	345.600.000	100	414.720.000	100	497.664.000	100	1.985.984.000	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Urusan Pemerintahan & Program		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
NO	Prioritas Pembangunan	(OUTPUT)			TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
					PADA AKHIR PERIODE														
		URAIAN	SATUAN		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
50	01.19.21 - Program pendidikan politik masyarakat	Tingkat partisipasi perempuan di parlemen	%	22	24	150.000.000	26	201.440.000	28	205.728.000	30	246.873.600	30	296.246.640	30	355.497.968	30	1.455.786.208	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
		Cakupan partisipasi pemilih	%	1	0	0	1	350.000.000	1	385.000.000	1	400.000.000	0	400.000.000	1	400.000.000	5	1.935.000.000	
51	01.19.22 - Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase SDM yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan pembangunan	%	0	75	212.000.000	80	840.000.000	85	1.010.000.000	90	1.130.000.000	95	1.150.000.000	95	1.170.000.000	95	5.512.000.000	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
		Persentase pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	%	55	62		69		70		76		83		100		100		
		Persentase orang yang mengikuti pelatihan	%	75	75		80		85		90		95		95		95		
		cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	%	75	75		80		85		90		95		98		98		
		persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	60	65		70		75		80		85		90		90		
1.1.6	Sosial				4.705.055.000		5.714.486.800		6.283.279.480		6.934.634.928		7.278.463.740		8.057.263.245		38.973.183.193		
52	01.13.15 - Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Cakupan PMKS yang dibina	%	0,19	0,26	18.380.000	0,26	34.700.000	0,26	36.400.000	0,27	38.100.000	0,27	40.000.000	0,27	49.000.002	0,27	216.580.002	Sosial, Kecamatan, dan Kelurahan
53	01.13.16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan PMKS yang dibina	%	0,19	0,26	1.192.580.000	0,26	1.686.400.000	0,26	1.820.135.000	0,27	1.950.857.000	0,27	2.056.859.020	0,27	2.175.184.051	0,27	10.882.015.071	
54	01.13.17 - Program pembinaan anak terlantar	Cakupan PMKS yang dibina	%	0,19	0,26	100.000.000	0,26	110.000.000	0,26	121.000.000	0,27	133.100.000	0,27	146.410.000	0,27	161.051.000	0	771.561.000	Sosial
55	01.13.18 - Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	20,21	25,33	500.000.000	33,93	550.000.000	51,37	605.000.000	53,94	665.500.000	56,64	732.050.000	59,47	805.254.000	59	3.857.804.000	Sosial
56	01.13.19 - Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	%	100	100	862.527.000	100	938.810.000	100	1.021.610.000	100	1.141.610.000	100	1.135.630.000	100	1.389.106.000	100	6.489.293.000	Sosial
		Persentase (%) panti sosial skala kabupaten kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	1.106.888.000	100	1.217.576.800	100	1.339.334.480	100	1.473.267.928	100	1.620.594.720	100	1.782.654.192	100	8.540.316.120	Sosial
57	01.13.20 - Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Cakupan PMKS yang dibina	%	0,19	0,26	600.000.000	0,26	660.000.000	0,26	726.600.000	0,27	799.200.000	0,27	879.120.000	0,27	967.032.000	0	4.631.952.000	Sosial
58	01.13.21 - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Sosial Mandiri	Buah	40	40	174.680.000	40	467.000.000	40	513.200.000	40	563.000.000	40	617.800.000	40	677.982.000	40	3.013.662.000	Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan & Program		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
NO	Prioritas Pembangunan				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
					PADA AKHIR PERIODE														
		URAIAN	SATUAN		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	%	0	17,31	150.000.000	21,15	50.000.000	16,35	100.000.000	14,42	170.000.000	13,46	50.000.000	17,31	50.000.000	100	570.000.000	Perencanaan
1	WAJIB																		
1.2	Pelayanan Dasar																		
1.2.1	Tenaga Kerja	2.826.205.0003.093.682.0003.303.900.0003.517.067.0003.725.198.0003.952.613.00020.418.665.000																	
59	01.14.15 - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	0	33,33	1.927.500.000	34,48	2.023.750.000	36,36	2.127.000.000	38,46	2.222.450.000	40	2.325.320.000	41,67	2.438.172.000	41	13.064.192.000	Tenaga Kerja
60	01.14.16 - Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	0	33,33	300.000.000	34,48	365.000.000	36,36	401.500.000	38,46	441.650.000	40	485.815.000	41,67	534.400.000	41	2.528.365.000	Tenaga Kerja
61	01.14.17 - Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	3,58	2,58	598.705.000	2,5	704.932.000	2,42	775.400.000	2,35	852.967.000	2,28	914.063.000	2,22	980.041.000	2	4.826.108.000	Tenaga Kerja
		Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	77	100		100		100		100		100		100		100		
		Prosentase Perusahaan yang menerapkan tentang norma kerja dan K3		72,03	75,05		77,08		79		81		83		85		85		
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	72,54	75		76,26		79		81		83		85		85		
		Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	67,19	64,52		62,5		60,61		58,82		57,14		55,5		56		
		Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	24	25		25		25		25		25		25		25		
1.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	12.367.445.51422.196.780.00018.460.086.75021.105.888.27519.326.684.23319.595.656.908112.240.041.680																	
62	01.11.15 - Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	%	1,1	1,1	435.000.000	1	639.099.000	1	709.358.000	0,9	826.794.000	0,9	900.153.000	0,8	750.000.000	0,8	4.260.404.000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Angka melek huruf perempuan usia 15th ke atas	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	3,51	3,51		3,52		3,53		3,54		3,55		3,56		3,56		
		Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	63,15	63,3		63,5		64		64,3		65		65,3		65,3		
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	100	100	60.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	100	85.000.000	100	90.000.000	100	95.000.000	100	485.000.000	Kecamatan
		Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
63	01.11.16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	3,51	3,51	1.861.000.000	3,52	7.062.055.500	3,53	7.215.751.250	3,54	7.314.716.575	3,55	7.435.837.533	3,56	7.158.700.000	3,56	38.048.060.858	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kelurahan

Bidang Urusan Pemerintahan & Program		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
NO	Prioritas Pembangunan	(OUTPUT)			TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
					PADA AKHIR PERIODE														
		URAIAN	SATUAN		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS.	%	100	100	33.900.000	100	39.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	57.000.000	100	63.000.000	100	288.900.000	Kelurahan
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	100	100	563.960.000	100	4.818.700.000	100	776.950.000	100	808.650.000	100	838.710.000	100	853.850.008	100	8.660.820.008	Kelurahan
		Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100	100	35.900.000	100	39.300.000	100	44.800.000	100	47.800.000	100	52.800.000	100	56.800.000	100	277.400.000	Kelurahan
		Rasio program dan kegiatan responsif gender di SKPD Provinsi	%	100,00	100	25.700.000	100	27.520.000	100	29.522.000	100	30.622.000	100	31.778.000	100	32.991.000	100	178.133.000	Kelurahan
		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	24900014	100	39.900.000	100	40.500.000	100	41.000.000	100	42.500.000	100	43.500.000	100	232.300.014	Kelurahan
		Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang terbina	%	16	16	14.500.000	16	42.000.000	16	45.000.000	16	47.000.000	16	49.000.000	16	51.000.000	16	248.500.000	Kelurahan
		Rasio KDRT	%	0,03	0,03	35.500.000	0,03	39.100.000	0,03	41.100.000	0,03	44.100.000	0,03	46.100.000	0,03	48.100.000	0,03	254.000.000	Kelurahan
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	%	0	17,31	15.000.000	21,15	200.000.000	16,35	50.000.000	14,42	50.000.000	13,46	50.000.000	17,31	200.000.000	100	565.000.000	Perencanaan
64	01.11.17 - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	%	0,03	0,03	911.880.000	0,03	1.143.300.000	0,03	1.208.300.000	0,03	3.282.900.000	0,03	1.378.000.000	0,03	1.128.810.000	0,03	9.053.190.000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kelurahan
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS.	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		

Bidang Urusan Pemerintahan & Program		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
NO	Prioritas Pembangunan				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
		URAIAN			SATUAN	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	PADA AKHIR PERIODE	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	60	80		100		100		100		100		100		100		
		Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
65	01.11.18 - Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	100	100	8.159.300.000	100	7.800.000.000	100	7.925.000.000	100	8.200.000.000	100	8.075.000.000	100	8.810.000.000	100	48.969.300.000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PKK aktif	%	100	100	153.000.000	100	193.500.000	100	210.000.000	100	237.000.000	100	239.000.000	100	260.000.000	100	480.000.000	Kecamatan dan Kelurahan
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	1	1		1		1		1		1		1		1		
		Posyandu aktif	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
66	01.11.19 - Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	100	100	25.800.000	100	25.800.000	100	25.800.000	100	25.800.000	100	25.800.000	100	27.900.000	0	156.900.000	Kelurahan
		Swadaya Masyarakat terhadap total Program pemberdayaan masyarakat	%	31,19	33	12.100.000	35	12.500.000	37	13.000.000	38	13.500.000	39	15.000.000	100	16.000.000	100	82.100.000	Kelurahan
		Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100	100	5.500	100	5.500	100	5.500	100	5.700	100	5.700	100	5.900	100	33.800	Kelurahan
1.2.3	Pangan				10.946.186.000		11.736.000.000		11.823.500.000		12.619.500.000		12.718.000.000		13.126.000.000		72.969.186.000		
67	01.21.15 - Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	80,8	82	10.946.186.000	83	11.736.000.000	84	11.823.500.000	85	12.619.500.000	86	12.718.000.000	87	13.126.000.000	87	72.969.186.000	Pangan dan Setda
		Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Ketersediaan energi perkapita (Kkal/Kap/Hr)	Kkal/Kap/Hari	3.155,00	3.155,00		3.155,00		3.155,00		3.155,00		3.155,00		3.155,00		3.155,00		
		Ketersediaan protein perkapita (Gram/Kap/Hr)	Gram/Kap/Hari	92,92	92,92		92,92		92,92		92,92		92,92		92,92		93		
		Banyaknya Regulasi ketahanan pangan	Buah	3	3		3		3		3		3		3		18		
		Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
1.2.4	Pertanahan				1.736.925.000		1.750.000.000		1.777.000.000		1.778.000.000		1.780.000.000		1.785.000.000		10.606.925.000		
68	01.09.16 - Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	100	1.636.925.000	100	1.650.000.000	100	1.675.000.000	100	1.675.000.000	100	1.675.000.000	100	1.680.000.000	100	9.991.925.000	Setda
69	01.09.18 - Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	terjaminnya aset barang milik daerah	%	100	100	100.000.000	5	100.000.000	5	102.000.000	5	103.000.000	5	105.000.000	5	105.000.000	100	615.000.000	Pertanahan
1.2.5	Lingkungan Hidup				83.925.769.935		129.263.689.925		126.682.603.025		150.419.214.170		135.915.828.935		147.836.175.029		750.913.936.934		

Bidang Urusan Pemerintahan & Program		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
NO	Prioritas Pembangunan				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	PADA AKHIR PERIODE		
0	1	URAIAN	SATUAN		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
70	01.08.15 - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	persentase pasar yang memiliki sarana dan prasarana kebersihan	%	100	100	2.650.000.000	100	2.900.000.000	100	3.300.000.000	100	3.795.000.000	100	4.550.000.000	100	5.460.000.000	100	22.655.000.000	Lingkungan Hidup
		Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	per 1000 penduduk	2,5	2,6	24.015.160.935	2,76	32.169.612.925	2,81	33.667.484.025	2,75	56.385.598.170	2,7	36.605.154.935	2,64	37.102.139.688	3	196.815.806.593	Lingkungan Hidup
		Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	%	100	0,2	250.000.000	0,2	250.000.000	0,2	250.000.000	0,2	250.000.000	0,2	250.000.000	0,2	250.000.000	0	1.500.000.000	Kelurahan
		Persentase sampah yang dikelola melalui bank sampah	%	0,18	0,29	500.000.000	0,43	2.000.000.000	0,56	2.000.000.000	0,69	2.000.000.000	0,81	2.000.000.000	0,88	2.000.000.000	0,88	10.500.000.000	Lingkungan Hidup
		Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	50	50	260.795.000	70	270.000.000	80	280.000.000	90	290.000.000	100	300.000.000	100	300	450	1.400.795.300	Kelurahan
71	01.08.16 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	1.100.000.000	100	5.930.000.000	100	3.884.000.000	100	1.893.000.000	100	1.897.000.000	100	1.900.000.000	100	16.604.000.000	Lingkungan Hidup
		Pencemaran status mutu air	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	%	70	80		90		100		100		100		100		100		
		Persentase usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara	%	80	80		100		100		100		100		100		100		
		Persentase taman kota dalam kondisi baik	%	30	33,3	91.100.000	47	115.100.000	57	125.000.000	67	100.000.000	77	100.000.000	87	100.000.000	87	631.200.000	Lingkungan Hidup
72	01.08.17 - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik	Ha	427,88	427,88	550.000.000	430,38	12.750.000.000	432,88	11.800.000.000	435,38	12.850.000.000	437,88	13.800.000.000	440,38	14.850.000.000	440,38	66.600.000.000	Lingkungan Hidup
		Indeks Pencemaran Air	-	40	40,56		41,11		41,67		42,22		42,78		43,33		43,33		
		Indeks Pencemaran Udara	-	64,68	64,68		64,68		64,68		64,68		64,68		64,68		64,68		
		Indeks Tutupan Hutan	-	23,26	23,26		23,26		23,26		23,26		23,26		23,26		23,26		
73	01.08.18 - Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	50.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	475.000.000	Lingkungan Hidup
74	01.08.19 - Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Sekolah Adiwiyata	%	7,33	11,41	230.000.000	15,48	330.000.000	19,55	340.000.000	23,63	340.000.000	27,7	400.000.000	31,77	400.000.000	31,77	2.040.000.000	Lingkungan Hidup
		Indeks Pencemaran Air	-	40	40,56		41,11		41,67		42,22		42,78		43,33		43,33		
		Indeks Pencemaran Udara	-	64,68	64,68		64,68		64,68		64,68		64,68		64,68		64,68		
		Indeks Tutupan Hutan	-	23,26	23,26		23,26		23,26		23,26		23,26		23,26		23,26		
75	01.08.20 - Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase kualitas udara ambien	%	80	100	35.000.000	100	585.000.000	100	585.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	1.310.000.000	Lingkungan Hidup
76	01.08.24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah	%	0	46,15	0	30,77	0	7,69	0	3,85	0	3,85	0	7,69	400.000.000	100	400.000.000	Perencanaan

Bidang Urusan Pemerintahan & Program		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
NO	Prioritas Pembangunan	(OUTPUT)			TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	PADA AKHIR PERIODE		
		URAIAN	SATUAN		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	1.000.575.000	100	2.315.477.000	100	1.428.719.000	100	1.457.216.000	100	1.606.674.000	100	1.585.635.041	100	9.394.296.041	Kecamatan dan Kelurahan
		Persentase Lampu Penerangan Jalan Umum termeterisasi	%	30	30	53.085.739.000	45	69.448.500.000	60	68.875.400.000	100	70.869.400.000	100	74.161.000.000	100	83.515.400.000	100	419.955.439.000	Lingkungan Hidup dan Kelurahan
		Persentase taman kota dalam kondisi baik	%	30	33,3		47		57		67		77		87		87		
		Kawasan kumuh	Rumah	0,28	0,25	84.000.000	0,17	95.000.000	0,11	40.000.000	0,6	45.000.000	0,3	75.000.000	0,1	100.000.000	1,53	439.000.000	Kelurahan
		Persentase Luas pemukiman yang tertata	%	100	100	23.400.000	100	30.000.000	100	32.000.000	100	34.000.000	100	36.000.000	100	38.000.000	100	193.400.000	Kelurahan
1.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				3.245.970.600			4.735.433.600		4.923.268.560		5.200.847.381		5.590.662.093		5.485.250.000		29.181.432.234	
77	01.10.15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan	persentase pertambahan jenis layanan kependudukan yang diselenggarakan on line	%	0	13,33	2.875.970.600	26,66	4.055.433.600	39,99	4.293.268.560	59,99	4.740.847.381	79,99	5.175.662.093	100	5.125.250.000	100	26.266.432.234	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
		Kepemilikan KTP	%	97,48	98		98,5		98,7		99,1		99,4		99,6		100		
		Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	%	74	78		81		84		87		90		92		92		
		Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase kepemilikan Akte Kematian	%	60	63		66		69		72		75		80		80		
		Rasio bayi berakte kelahiran	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Cakupan penerbitan akte kelahiran	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Rasio pasangan berakte nikah	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Pengakuan dan Pengesahan Anak	%	90	90		90		90		90		90		90		90		
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	-	77,16	8		8,2		8,3		8,4		8,5		8,6		8,6		
		Cakupan Penerbitan Akte Cerai	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
							11,57		27,3		44,24		68,26		100		100		
		persentase pemahaman administrasi kependudukan sampai tingkat RT dan RW	%	0	0	235.000.000	78	380.000.000	79	330.000.000	80	310.000.000	80	315.000.000	85	345.000.000	100	1.915.000.000	Kecamatan
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	%	0	17,31	135.000.000	21,15	300.000.000	16,35	300.000.000	14,42	150.000.000	13,46	100.000.000	17,31	15.000.000	100	1.000.000.000	Perencanaan
1.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				4.530.187.000			5.507.778.100		5.253.711.100		5.321.916.100		6.004.215.100		4.837.629.358		31.455.436.758	
78	01.22.15 - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	PKK aktif	%	100	100	1.738.523.000	100	2.558.513.000	100	2.194.345.000	100	2.149.148.000	100	2.386.947.000	100	2.232.360.038	100	13.259.836.038	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Setda, Kecamatan, dan Kelurahan
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	3	3		3		3		3		3		3		3		
		LPM Berprestasi	%	9,8	9,8		9,8		9,8		9,8		9,8		9,8		9,8		
		Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang terbina	%	3	3	84.870.000	3	92.470.100	3	102.570.100	3	110.970.100	3	119.470.100	3	100.470.100	3	610.820.500	Kelurahan
79	01.22.16 - Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	%	10	10	896.000.000	10	1.096.000.000	10	1.196.000.000	10	1.296.000.000	10	1.732.000.000	10	1.409.000.000	10	7.625.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang Urusan Pemerintahan & Program		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
NO	Prioritas Pembangunan	(OUTPUT)			TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
					PADA AKHIR PERIODE														
		URAIAN	SATUAN		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80	01.22.17 - Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	%	0	17,31	1.645.000.000	21,15	1.595.000.000	16,35	1.595.000.000	14,42	1.600.000.000	13,46	1.600.000.000	17,31	930.000.220	100	8.965.000.220	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Perencanaan
		Persentase Laporan Hibah yang tidak ada penyimpangan	%	100	100	165.794.000	100	165.795.000	100	165.796.000	100	165.798.000	100	165.798.000	100	165.799.000	100	994.780.000	Setda
1.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				2.574.519.800			4.575.972.000		6.779.612.000		5.904.761.500		5.510.136.000		5.716.825.000		31.061.826.300	
81	01.12.15 - Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	1,87	1,86	1.520.093.800	1,85	3.353.972.000	1,84	5.421.301.000	1,83	4.435.675.500	1,82	3.915.561.000	1,81	4.001.500.000	1,81	22.648.103.300	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kelurahan
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	%	2,94	2,94		2,94		2,92		2,92		2,91		2,91		2,91		
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	10,53	10,53		10,43		10,33		10,23		10,13		10,03		10,03		
		Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern)	%	21,61	22		23		24		25		26		27		27		
		Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan		82,35	82,35		82,35		84,35		84,35		86,35		86,35		86,35		
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	76,01	76,01		76,19		76,2		76,21		76,22		76,21		76,21		
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	77,22	77,22		77,3		77,3		77,3		77,4		77,4		77,4		
		Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	26,33	25		25		23		23		21		21		21		
82	01.12.16 - Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap seda/kelurahan	%	100	100	216.500.000	100	224.500.000	100	238.000.000	100	252.500.000	100	285.500.000	100	325.500.000	100	1.542.500.000	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kelurahan
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	%	2,94	2,94	20.450.000	2,94	28.750.000	2,92	35.250.000	2,92	42.300.000	2,91	48.800.000	2,91	55.300.000	2,91	230.850.000	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kelurahan
		Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan		100	100	61.500.000	100	68.500.000	100	79.000.000	100	88.000.000	100	97.000.000	100	108.000.000	100	502.000.000	Kelurahan
		Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	12.000.000	100	15.500.000	100	18.000.000	100	20.500.000	100	24.000.000	100	25.500.000	100	115.500.000	Kelurahan
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	80	80	9.000.000	85	9.000.000	85	10.000.000	90	10.000.000	90	10.000.000	95	12.000.000	95	60.000.000	Kelurahan
		Posyandu aktif	%	100	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.500.000	100	4.750.000	100	4.850.000	100	5.000.000	100	27.100.000	Kelurahan
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	98	100	4.000.000	100	4.500.000	100	5.000.000	100	5.500.000	100	6.000.000	100	6.500.000	100	31.500.000	Kelurahan
		Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	100	100	4.000.000	100	4.500.000	100	5.000.000	100	5.500.000	100	6.000.000	100	6.500.000	100	31.500.000	Kelurahan

Bidang Urusan Pemerintahan & Program		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
NO	Prioritas Pembangunan	(OUTPUT)			TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
					PADA AKHIR PERIODE														
		URAIAN	SATUAN		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	%	30	25	4.000.000	25	5.000.000	25	6.000.000	20	7.000.000	20	8.000.000	15	9.000.000	15	39.000.000	Kelurahan
83	01.12.17 - Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	9	10	505.676.000	15	570.300.000	20	621.911.000	25	655.886.000	25	688.775.000	30	708.375.000	30	3.750.923.000	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
84	01.12.18 - Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	10,53	10,53	130.100.000	10,43	154.800.000	10,33	175.000.000	10,23	193.500.000	10,13	210.500.000	10,03	226.500.000	10,03	1.090.400.000	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, dan kelurahan
		Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan		75	75	4.000.000	75	4.000.000	75	4.000.000	75	4.500.000	75	4.500.000	75	4.500.000	75	25.500.000	Kelurahan
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	80	80	4.000.000	82	4.000.000	84	4.000.000	86	4.000.000	86	4.500.000	90	4.500.000	90	25.000.000	Kelurahan
		Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	45	40		35		32		30		28		25		25		
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	100	0,2	4.000.000	0,2	5.000.000	0,2	5.000.000	0,2	6.000.000	0,2	6.000.000	0,2	6.000.000	0	32.000.000	Kelurahan
85	01.12.19 - Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	1,87	1,86	57.400.000	1,85	90.000.000	1,84	111.500.000	1,83	128.000.000	1,82	144.500.000	1,81	161.000.000	1,81	692.400.000	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	%	2,94	2,94		2,94		2,92		2,92		2,91		2,91		2,91		
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	10,53	10,53		10,43		10,33		10,23		10,13		10,03		10,03		
86	01.12.20 - Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	%	2,94	2,94	11.800.000	2,94	27.150.000	2,92	33.150.000	2,92	37.650.000	2,91	41.650.000	2,91	46.150.000	2,91	197.550.000	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
87	01.12.24 - Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Posyandu aktif	%	100	100	2.000.000	100	2.500.000	100	3.000.000	100	3.500.000	100	4.000.000	100	5.000.000	100	20.000.000	Kecamatan
1.2.9 Perhubungan					42.305.591.176		84.473.954.176		71.689.102.676		61.774.602.676		72.187.602.676		61.633.420.100		394.064.273.480		
88	01.07.15 - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase kendaraan pribadi yang lulus emisi gas buang	%	81	89,6	1.712.000.000	90,3	1.812.000.000	92,4	2.042.000.000	94,7	2.042.000.000	97	2.292.000.000	98,5	2.307.000.000	99	12.207.000.000	Perhubungan
		Persentase kajian MRLL	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Jumlah Izin Penyelenggaraan dan Prasarana Parkir	%	100	100	1.044.000.000	100	2.644.000.000	100	2.694.000.000	100	2.694.000.000	100	2.694.000.000	100	100	100	11.770.000.100	Perhubungan
		Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	%	16.182.815	16.373.353	372.004.000	16.537.086	377.004.000	16.702.456	382.004.000	16.898.480	387.004.000	17.038.174	392.004.000	17.177.868	397.004.000	17.177.868	2.307.024.000	Perhubungan
89	01.07.16 - Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	1.821,00	3.314,00	1.127.682.676	3.324,00	1.077.682.676	3.334,00	737.682.676	3.344,00	747.682.676	3.354,00	657.682.676	3.364,00	787.000.000	3.364,00	5.135.413.380	Perhubungan
		Persentase kepemilikan uji KIR angkutan umum	%	88,18	72,48		72,7		72,92	VIII-25	73,14		73,36		73,58		74		

Bidang Urusan Pemerintahan & Program		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
NO	Prioritas Pembangunan				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
					URAIAN	SATUAN	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90	01.07.17 - Program peningkatan pelayanan angkutan	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	52,53	9,83	32.752.920.000	11,24	60.865.350.000	11,24	59.839.850.000	11,24	50.084.350.000	11,24	60.167.350.000	0	53.304.850.000	100	317.014.670.000	Perhubungan
		Persentase ketersediaan rambu lalu lintas	%	52	6		6		6		6		6		6		87		
		Persentase pelaku usaha yang melaksanakan andalalin sesuai dengan rekomendasi	%	0	100		100		100		100		100		100		100		
		Jumlah armada yang memiliki ijin trayek angkutan kota	unit	1.024,00	1.124,00		1.100,00		1.145,00		1.190,00		1.210,00		1.210,00		1.210,00		
		Jumlah Izin Penyelenggaraan dan Prasarana Parkir	%	100	100	662.000.000	100	712.000.000	100	762.000.000	100	812.000.000	100	812.000.000	100	0	100	3.760.000.000	Perhubungan
		Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	%	16.182.815	16.373.353	646.400.000	16.537.086	718.400.000	16.702.456	790.400.000	16.898.480	416.400.000	17.038.174	431.400.000	17.177.868,00	446.400.000	17.177.868,00	3.449.400.000	Perhubungan
91	01.07.18 - Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	%	16.182.815	16.373.353	150.000.000	16.537.086	210.000.000	16.702.456	-	16.898.480	-	17.038.174	0	17.177.868,00	0	17.177.868,00	360.000.000	Perhubungan
		Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	52,53	9,83	0	11,24	1.000.000.000	11,24	1.100.000.000	11,24	1.200.000.000	11,24	1.300.000.000	0	1.400.000.000	100	6.000.000.000	Perhubungan
92	01.07.19 - Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Persentase ketersediaan marka jalan	%	100	100	3.488.584.500	100	4.657.517.500	100	2.991.166.000	100	2.991.166.000	100	2.991.166.000	100	2.991.166.000	100	20.110.766.000	Perhubungan
		Persentase ketersediaan Apill	%	87,88	6,06		3,03		1,52		1,52		0		0		100		
		Jumlah Izin Penyelenggaraan dan Prasarana Parkir	%	100	100	350.000.000	100	400.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	450.000.000	100	0	100	1.950.000.000	Perhubungan
93	01.07.20 - Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	1.821,00	3.314,00	0	3.324,00	10.000.000.000	3.334,00	0	3.344,00	0	3.354,00	0	3.364,00	0	3.364,00	10.000.000.000	Perhubungan
		Persentase kepemilikan uji KIR angkutan umum	%	88,18	72,48		72,7		72,92		73,14		73,36		73,58		74		
1.2.10	Komunikasi dan Informatika				9.410.875.500		21.521.614.500		22.406.614.500		22.966.914.500		23.517.044.500		23.733.873.000		123.556.936.500		
94	01.25.15 - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tingkat pembaruan (updating) publikasi informasi melalui website pemerintah	kali	0	7	3.411.455.500	7	15.024.800.000	7	15.212.800.000	10	15.245.800.000	10	15.157.900.000	10	14.672.210.000	10	78.724.965.500	Komunikasi dan Informatika dan Sekretariat DPRD
		Tingkat persepsi masyarakat dalam menilai kebijakan, kinerja atau perilaku pemerintah kota	nilai	80	82	350.000.000	85	450.000.000	90	600.000.000	93	660.000.000	95	730.000.000	95	850.000.000	95	3.640.000.000	Setda
95	01.25.16 - Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Tingkat pembaharuan (updating) publikasi informasi melalui website pemerintah	%	60	70	180.000.000	75	250.000.000	80	325.000.000	85	365.000.000	95	400.000.000	95	440.000.000	95	1.960.000.000	Setda
96	01.25.18 - Program kerjasama informsi dan media massa	Tingkat persepsi masyarakat dalam menilai kebijakan, kinerja atau perilaku pemerintah kota	nilai	80	82	1.700.000.000	85	2.040.000.000	90	2.300.000.000	93	2.570.000.000	95	2.830.000.000	95	3.120.000.000	95	14.560.000.000	Setda
		Jumlah surat kabar nasional/lokal	Jenis	12	16	2.469.420.000	16	2.326.814.500	16	2.395.814.500	16	2.395.814.500	16	2.495.814.500	16	2.558.000.000	16	14.641.678.000	Komunikasi dan Informatika
		Cakupan penyelenggaraan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK METRA)	unit	0	2		4		4	VIII-26	4		4		4		22		

Bidang Urusan Pemerintahan & Program		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
NO	Prioritas Pembangunan				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
					URAIAN	SATUAN	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
0	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Persentase Publikasi informasi melalui media cetak pemerintah	%	0	100		100		100		100		100		100		100		
		Tingkat pembaruan (updating) publikasi informasi melalui website pemerintah	kali	1.460,00	1.460,00	1.300.000.000	1.600,00	1.430.000.000	1.650,00	1.573.000.000	1.700,00	1.730.300.000	1.750,00	1.903.330.000	1.750,00	2.093.663.000	1.750,00	10.030.293.000	Sekretariat DPRD
1.2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				3.269.298.000		5.909.515.900		6.436.061.340		7.086.579.630		7.763.232.980		8.283.634.172		47.748.322.022		
97	01.15.15 - Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase koperasi sehat	%	16,6	4,5	752.343.000	4,5	827.577.300	4,5	910.335.000	4,5	1.001.368.000	4,5	1.101.505.000	4,5	1.211.655.000	43,6	5.804.783.300	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
98	01.15.16 - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Usaha Mikro dan Kecil	%	99,81	99,81	1.166.643.000	99,81	3.223.226.900	99,81	3.484.643.470	99,81	3.836.020.473	99,81	4.167.117.707	99,81	4.340.093.007	99,81	29.217.744.557	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Penelitian dan Pengembangan
99	01.15.17 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis bidang UMKM	%	100	100	78.115.000	100	85.000.000	100	90.000.000	100	95.000.000	100	100.000.000	100	105.000.000	100	553.115.000	Setda
		Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	11,62	0,33	891.325.000	0,33	1.190.000.000	0,32	1.309.000.000	0,32	1.447.900.000	0,3	1.617.690.000	0,3	1.784.126.000	13,52	8.240.041.000	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		Persentase pemahaman pelaku usaha terhadap produk jasa keamanan dari lembaga pembiayaan	%	0	5		5		5		5		5		5		30		
		Persentase Peningkatan kualitas KUMKM yang dibina	%	0	5		5		5		5		5		5		30		
100	01.15.18 - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	40,4	0,88	380.872.000	1,2	583.711.700	1,5	642.082.870	1,8	706.291.157	2	776.920.273	2	842.760.165	49,78	3.932.638.165	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
1.2.12	Penanaman Modal Daerah				1.031.825.000		1.311.200.000		1.537.620.000		1.531.182.000		1.684.100.200		1.876.610.220		8.972.537.420		
101	01.16.15 - Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Proporsi Lol dari jumlah potensi yang ditawarkan	%	100	100	540.950.000	100	547.000.000	100	596.000.000	100	645.000.000	100	694.000.000	100	743.000.000	100	3.765.950.000	Penanaman Modal Daerah
		Pertumbuhan jumlah investor	%	-1	1		1		1		1		1		1		6		
		Rata-rata capaian laba BUMD/Perusda	%	105,6	100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.000.000	100	133.100.000	100	146.410.000	100	161.051.000	100	771.561.000	Setda
102	01.16.16 - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase jumlah kebijakan investasi	%	100	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	100	300.000.000	Penanaman Modal Daerah
		Tingkat ketersediaan regulasi pendukung pro investasi yang sinergis	%	100	100	158.875.000	100	240.000.000	100	386.000.000	100	347.000.000	100	370.000.000	100	475.000.000	100	1.976.875.000	Penanaman Modal Daerah
		Pertumbuh jenis obyek proyek investasi yang siap ditawarkan	%	100	0		100		100		100		100		100		100		
		Pertumbuhan jumlah investor	%	-1	1		1		1		1		1		1		6		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan perijinan kategori baik	%	79	89		90		91		92		93		94		94		
103	01.16.17 - Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Pertumbuhan jenis obyek proyek investasi yang siap ditawarkan	%	100	0	0	100	220.000.000	100	225.000.000	100	230.000.000	100	235.000.000	100	240.000.000	100	1.150.000.000	Penanaman Modal Daerah
VIII-27																			

Bidang Urusan Pemerintahan & Program		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
NO	Prioritas Pembangunan	(OUTPUT)			TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
					PADA AKHIR PERIODE														
		URAIAN	SATUAN		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pertumbuhan jumlah investor	%	-1	1		1		1		1		1		1		6		
		Rata-rata capaian laba BUMD/Perusda	%	105,6	100	182.000.000	100	144.200.000	100	159.620.000	100	126.082.000	100	188.690.200	100	207.559.220	100	1.008.151.420	Setda
1.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				6.522.551.000		26.169.349.800		26.353.202.000		59.108.408.000		68.297.155.000		70.225.934.003		256.676.599.803		
104	01.18.15 - Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda	Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	50	60	275.000.000	70	275.000.000	80	275.000.000	90	275.000.000	100	275.000.000	100	275.000.000	100	1.650.000.000	Kepemudaan dan Olah Raga
		Jumlah organisasi pemuda	Kelompok	37	38		39		40		41		42		42		42		
		Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha	%	2.000,00	2.050,00		2.100,00		2.150,00		2.200,00		2.250,00		2.250,00		2.250,00		
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	%	0	17,31	80.000.000	21,15	0	16,35	0	14,42	0	13,46	0	17,31	0	100	80.000.000	Perencanaan
105	01.18.16 - Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	50	60	947.027.000	70	1.018.877.000	80	1.054.377.000	90	1.075.677.000	100	1.088.857.000	100	1.099.505.003	100	6.284.320.003	Kepemudaan dan Olah Raga
		Jumlah organisasi pemuda	Kelompok	37	38		39		40		41		42		42		42		
		Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	1	2	333.555.000	2	405.472.500	2	415.500.000	2	415.500.000	2	420.500.000	2	422.500.000	2	2.413.027.500	Setda
		Capaian prestasi di bidang pemuda, olahraga, seni dan budaya	%	75	80		90		95		95		95		95		95		
106	01.18.19 - Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	%	0	17,31	0	21,15	0	16,35	100.000.000	14,42	150.000.000	13,46	0	17,31	50.000.000	100	300.000.000	Perencanaan
		Jumlah organisasi olahraga	Kelompok	40	40	200.000.000	40	375.000.000	40	100.000.000	40	5.150.000.000	40	5.200.000.000	40	5.220.000.000	40	16.245.000.000	Kepemudaan dan Olah Raga
		Jumlah klub olahraga	Kelompok	40	40		40		40		40		40		40		40		
		Jumlah kegiatan olahraga	kegiatan	30	35		38		40		45		50		50		50		
107	01.18.20 - Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah klub olahraga	Kelompok	40	40	2.090.255.000	40	9.457.500.300	40	9.684.200.000	40	10.686.300.000	40	11.619.820.000	40	12.746.602.000	40	56.284.677.300	Kepemudaan dan Olah Raga dan kecamatan
		Jumlah organisasi olahraga	Kelompok	40	40		40		40		40		40		40		40		
		Jumlah kegiatan olahraga	kegiatan	30	35		38		40		45		50		50		50		
		Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi	%	10	12		14		16		18		20		20		20		
		Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	%	17	17		17		17		17		17		17		17		
		Jumlah gedung olahraga	Buah	30	32		36		40		45		50		50		50		
		Rasio Lapangan Olah raga yang dibangun	Buah	10	10		10		10		10		10		10		10		
		Jumlah organisasi olahraga yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi Olahraga dari pemerintah daerah	%	40	40		40		40		40		40		40		40		
		Jumlah Kegiatan Olahraga dan Kesenian	kegiatan	11	11	515.000.000	11	552.500.000	11	586.125.000	11	617.931.000	11	652.978.000	11	687.327.000	11	3.611.861.000	Kepemudaan dan Olah Raga
108	01.18.21 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah kegiatan olahraga	kegiatan	30	35	2.081.714.000	38	14.085.000.000	40	14.138.000.000	45	40.738.000.000	50	49.040.000.000	50	49.725.000.000	50	169.807.714.000	Kepemudaan dan Olah Raga
		Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	%	17	17		17		17		17		17		17		17		
		Jumlah gedung olahraga	Buah	30	32		36		40		45		50		50		50		
		Rasio Lapangan Olah raga yang dibangun	Buah	10	10		10		10		10		10		10		10		
VIII-28																			

Bidang Urusan Pemerintahan & Program		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
NO	Prioritas Pembangunan	(OUTPUT)			TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
					PADA AKHIR PERIODE														
		URAIAN	SATUAN		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Rasio Lapangan Olah raga dalam kondisi baik	%	80	80		80		80		80		80		80		80		
1.2.14	Statistik				240.000.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000		75.000.000		1.275.000.000		
109	01.23.15 - Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Buku Kota dalam angka	%	100	16,67	240.000.000	16,67	240.000.000	16,67	240.000.000	16,67	240.000.000	16,67	240.000.000	16,67	75.000.000	100	1.275.000.000	Perencanaan
		Buku PDRB Kota	%	100	16,67		16,67		16,67		16,67		16,67		16,67		100		
1.2.15	Persandian								20000000								20000000		
110	01.20.33 - Program Persandian	Persentase Ketersediaan SOP Persandian	%	1	0	0	0	0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	2	20.000.000	Bagian Umum
1.2.16	Kebudayaan				12.274.636.000		75.193.925.000		2.184.198.155.100		1.282.903.108.000		669.598.207.040		19.806.744.625		4.243.974.775.765		
111	01.17.15 - Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan Gelar Seni	%	100	100	2.345.112.000	100	4.987.500.000	100	6.105.200.000	100	6.198.120.000	100	6.981.282.000	100	6.539.710.225	100	33.156.924.225	Kebudayaan
112	01.17.16 - Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah grup kesenian	Kelompok	5	5	2.533.100.000	5	2.578.600.000	5	2.566.100.100	5	2.941.100.000	5	3.018.600.040	5	3.136.250.075	5	16.773.750.215	Kecamatan dan kelurahan
		Misi Kesenian	%	0	50	15.000.000	50	17.500.000	50	20.000.000	50	22.500.000	50	25.000.000	50	27.500.000	50	127.500.000	Kelurahan
		Cakupan Fasilitasi Seni	%	30	35	22.500.000	40	25.000.000	45	25.000.000	50	25.000.000	55	25.000.000	60	25.000.000	60	147.500.000	Kelurahan
		Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Buah	32	34	3.229.700.000	34	1.931.300.000	34	2.134.330.000	34	2.342.763.000	34	2.566.800.000	34	2.761.759.300	34	14.966.652.300	Kebudayaan
		Cakupan Tempat umum	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Jumlah gedung kesenian	Buah	1,5	1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	%	0	17,31	0	21,15	450.000.000	16,35	250.000.000	14,42	0	13,46	0	17,31	0	100	700.000.000	Perencanaan
		Cakupan Fasilitasi Seni	%	100	100	27.500.000	100	29.500.000	100	21.000.000	100	34.000.000	100	34.000.000	100	24.000.000	100	170.000.000	Kelurahan
		persentase dokumen teknis pelestarian bangunan/ kawasan cagar budaya	%	2,33	3,49	850.000.000	4,65	60.700.000.000	5,81	2.167.875.000.000	6,98	1.265.875.000.000	8,14	650.875.000.000	9,3	875.000.000	9,3	4.147.050.000.000	Kebudayaan
113	01.17.17 - Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Misi Kesenian	%	100	100	3.001.724.000	100	4.124.525.000	100	4.951.525.000	100	5.014.625.000	100	5.622.525.000	100	5.967.525.025	100	28.682.449.025	Kebudayaan, Kecamatan, Setda, dan kelurahan
		Jumlah grup kesenian	Kelompok	6,8	7		7		7		7		7		7		7		
		Cakupan Fasilitasi Seni	%	85,71	85,71		100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Kajian Seni	%	60	60		60		60		60		60		60		60		
		Jumlah film dokumentasi budaya kota Surakarta yang dihasilkan	Buah	50	46		50		50		50		50		50		50		
		Cakupan Organisasi seni	%	50	100		100		100		100		100		100		100		
114	01.17.18 - Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Cakupan Fasilitasi Seni	%	85,71	85,71	250.000.000	100	350.000.000	100	250.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	2.200.000.000	Kebudayaan
1.2.17	Perpustakaan				6.219.057.000		10.148.446.000		6.769.300.000		5.848.100.000		5.932.000.000		5.883.250.013		40.800.153.013		
115	01.26.15 - Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Tingkat Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	2,58	2,82	1.414.591.000	3,07	1.942.500.000	3,34	2.217.800.000	3,6	2.273.850.000	3,87	2.330.000.000	4,15	2.278.750.000	414	12.457.491.000	Perpustakaan dan kelurahan
		Jumlah Perpustakaan	Buah	1	1	1.685.746.000	1	2.760.246.000	1	1.377.000.000	1	396.000.000	1	419.500.000	1	418.000.013	1	7.056.492.013	Kelurahan
		Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun"	%	100	100	3.118.720.000	100	5.445.700.000	100	3.174.500.000	100	3.178.250.000	100	3.182.500.000	100	3.186.500.000	100	21.286.170.000	Kelurahan
1.2.18	Kearsipan				630.459.000		685.248.000		709.250.000		649.562.500		772.440.625		745.387.656		4.192.347.781		

Bidang Urusan Pemerintahan & Program		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
NO	Prioritas Pembangunan				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
		URAIAN	SATUAN		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
116	01.24.15 - Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Peningkatan SDM pengelola kearsipan"	%	0	100	198.862.000	100	236.248.000	100	251.250.000	100	267.562.500	100	285.440.625	100	305.387.656	100	1.544.750.781	Sekretariat DPRD
117	01.24.16 - Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikat dalam bentuk informatika	%	10	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	900.000.000	Kearsipan
		Pertumbuhan arsip uang terdigitalkan dengan arsip fisik	%	31	10	50.000.000	10	55.000.000	10	60.000.000	10	70.000.000	10	80.000.000	10	90.000.000	60	405.000.000	Kearsipan
		Persentase produk hukum dan informasi kebijakan daerah yang dipublikasikan melalui website kota dan JDIH	%	80	80	40.000.000	80	44.000.000	80	48.000.000	80	52.000.000	80	57.000.000	80	0	80	241.000.000	Setda
118	01.24.17 - Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Peningkatan SDM pengelola kearsipan"	%	10	20	91.597.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	10.000.000	15	100.000.000	10	100.000.000	10	501.597.000	Kearsipan
119	01.24.18 - Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase arsip daerah yang diterbitkan naskah sumbernya	%	10	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	600.000.000	Kearsipan
2	PILIHAN																		
2.1	Kelautan dan Perikanan				104.980.000		567.220.000		640.600.000		684.900.000		789.500.000		886.700.000		3.673.900.000		
120	02.05.20 - Program pengembangan budidaya perikanan	Cakupan bina kelompok perikanan	%	30,77	60	104.980.000	80	567.220.000	85	640.600.000	90	684.900.000	95	789.500.000	100	886.700.000	100	3.673.900.000	Kelautan dan Perikanan
2.2	Pariwisata				3.055.000.000		4.380.000.000		4.827.500.000		5.289.250.000		5.767.875.500		6.266.422.500		29.586.048.000		
121	02.04.15 - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase obyek wisata yang dipromosikan	%	100	100	1.375.000.000	100	1.980.000.000	100	2.200.000.000	100	2.432.000.000	100	2.678.400.000	100	2.942.000.000	100	13.607.400.000	Pariwisata
		Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	5,11	5,11		5,11		5,11		5,11		5,11		5,11		5,11		
		Rata-rata lama tinggal wisatawan	hari	1,4	1,4		1,5		1,6		1,7		1,8		1,8		1,8		
122	02.04.16 - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase obyek wisata yang dipromosikan	%	100	100	1.300.000.000	100	1.600.000.000	100	1.760.000.000	100	1.920.000.000	100	2.080.000.000	100	2.240.000.000	100	10.900.000.000	Pariwisata
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	5,11	5,11		5,11		5,11		5,11		5,11		5,11		5,11		
		Jumlah obyek wisata unggulan	Buah	46	46		47		47		47		47		47		47		
		Rata-rata lama tinggal wisatawan	hari	1,4	1,4		1,5		1,6		1,7		1,8		1,8		1,8		
		Persentase SDM pelaku usaha pariwisata yang memiliki sertifikat/memenuhi standar kompetensi	%	25	30		40		50		60		70		80		80		
		Persentase usaha pariwisata yang memiliki sertifikasi/memenuhi standar usaha pariwisata	%	42	50		55		60		65		70		75		75		
123	02.04.17 - Program Pengembangan Kemitraan	Persentase SDM pelaku usaha pariwisata yang memiliki sertifikat/memenuhi standar kompetensi	%	25	30	380.000.000	40	800.000.000	50	867.500.000	60	937.250.000	70	1.009.475.500	80	1.084.422.500	80	5.078.648.000	Pariwisata
		Persentase usaha pariwisata yang memiliki sertifikasi/memenuhi standar usaha pariwisata	%	42	50		55		60		65		70		75		75		

Bidang Urusan Pemerintahan & Program		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
NO	Prioritas Pembangunan	(OUTPUT)			TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
					PADA AKHIR PERIODE														
		URAIAN	SATUAN		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Jumlah objek/destinasi yang dibangun /dikembangkan	Buah	46	46		47		47		47		47		47		47		
2.3	Pertanian				707.925.000		4.108.950.000		3.809.800.000		3.181.000.000		3.715.500.000		3.975.500.000		19.498.675.000		
124	02.01.15 - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan bina kelompok petani	%	80	82	70.000.000	84	444.000.000	88	351.000.000	92	408.000.000	97	459.500.000	100	484.500.000	100	2.217.000.000	Pertanian
		pendapatan petani	Rp	7.361.700	7.729.800		8.116.000		8.522.000		8.948.300		9.395.000		9.865.000		9.865.000		
125	02.01.17 - Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	pendapatan petani	Rp	7.361.700,00	7.729.800,00	145.275.000	8.116.000,00	288.600.000	8.522.000,00	330.800.000	8.948.300,00	404.000.000	9.395.000,00	465.500.000	9.865.000,00	552.000.000	9.865.000,00	2.186.175.000	Pertanian
126	02.01.18 - Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Persentase produk pertanian/ perkebunan yang aman	%	0	0	0	50	100.000.000	60	120.000.000	70	150.000.000	80	200.000.000	90	275.000.000	90	845.000.000	Pertanian
127	02.01.19 - Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Tingkat produksi pertanian	%	0,68	1,5	242.650.000	1,00	525.000.000	1,00	555.000.000	0,75	600.000.000	0,5	625.000.000	0,25	760.000.000	5	3.307.650.000	Pertanian
		panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	km	1,97	1,98		1,99		2		2,1		2,2		2,3		2,3		
		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton/ha	66,89	64		64,64		65,29		65,94		66,6		67,26		67,26		
		Rasio panjang saluran irigasi	%	0,25	0,49		0,5		0,5		0,5		0,52		0,55		0,55		
128	02.01.21 - Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Angka mortalitas hewan	%	28,8	27,16	100.000.000	22,4	301.350.000	17,64	448.000.000	12,88	550.000.000	8,12	650.500.000	3,36	720.000.000	3,36	2.769.850.000	Pertanian
129	02.01.22 - Program peningkatan produksi hasil peternakan	Cakupan produksi daging yang memenuhi kriteria ASUH	%	84	85	0	86	0	87,00	300.000.000	88,00	330.000.000	89,00	350.000.000	90,00	380.000.000	90,00	1.360.000.000	Pertanian
130	02.01.23 - Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Cakupan produksi daging yang memenuhi kriteria ASUH	%	84	85	150.000.000	86	725.000.000	87	255.000.000	88	289.000.000	89	315.000.000	90	354.000.000	90	2.088.000.000	Pertanian
131	02.01.24 - Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Cakupan produksi daging yang memenuhi kriteria ASUH	%	84	85	0	86	1.725.000.000	87	1.450.000.000	88	450.000.000	89	650.000.000	90	450.000.000	90	4.725.000.000	Pertanian
2.4	Perdagangan				6.703.446.000		10.621.600.000		159.954.640.000		111.576.200.000		112.982.989.000		14.083.300.000		415.922.175.000		
132	02.06.15 - Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase pelayanan kemetrologian (tera/tera ulang alat UTPP: Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) di wilayah Kota Surakarta	%	18,66	36,96	577.260.000	77,52	1.135.000.000	79,84	1.067.500.000	81,4	1.119.000.000	82,95	1.181.500.000	89,15	1.296.000.000	89,15	6.376.260.000	Perdagangan
133	02.06.17 - Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah UMK yang telah mengikuti pameran/promosi produk	Unit	23	29	1.862.280.000	48	2.800.000.000	53	3.070.840.000	59	4.057.000.000	65	4.832.409.000	800	5.150.000.000	1.054,00	21.772.529.000	Perdagangan
134	02.06.18 - Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Pengelolaan Pasokan LPG 3 kg	%	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	360.000.000	Setda
		Jumlah UMK yang telah mengikuti pameran/promosi produk	Unit	23	29	1.831.700.000	48	3.632.000.000	53	152.617.000.000	59	102.802.700.000	65	102.937.200.000	800	3.052.300.000	1.054,00	366.872.900.000	Perdagangan
		persentase kenaikan pendapatan pasar dan PKL terhadap PAD	%	3,54	3,54	538.200.000	3,54	650.000.000	3,54	690.000.000	3,54	793.500.000	3,54	888.000.000	3,54	990.000.000	4	4.549.700.000	Perdagangan
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	16,67	16,67	50.100.000	16,67	75.000.000	16,67	75.000.000	16,67	75.000.000	16,67	75.000.000	16,67	75.000.000	16,67	425.100.000	Perdagangan

Bidang Urusan Pemerintahan & Program		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
NO	Prioritas Pembangunan	(OUTPUT)			TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
					PADA AKHIR PERIODE														
		URAIAN	SATUAN		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
135	02.06.19 - Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	82,14	83,93	1.793.906.000	85,71	2.279.600.000	87,5	2.374.300.000	89,29	2.669.000.000	91,07	2.998.880.000	92,86	3.450.000.000	93	15.565.686.000	Perdagangan
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
2.5	Perindustrian				1.425.230.000		12.757.000.000		12.962.000.000		13.125.000.000		13.287.000.000		4.397.000.000		57.953.230.000		
136	02.07.15 - Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Jumlah industri kecil dan menengah	Buah	1.758,00	1.765,00	30.000.000	1.772,00	50.000.000	1.778,00	50.000.000	1.786,00	58.000.000	1.792,00	65.000.000	1.800,00	70.000.000	1.800,00	323.000.000	Perindustrian
137	02.07.16 - Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	1,14	1,7	673.730.000	2,54	1.205.000.000	3,37	1.310.000.000	4,2	1.415.000.000	5,02	1.520.000.000	5,83	1.625.000.000	5,83	7.748.730.000	Perindustrian
138	02.07.17 - Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pertumbuhan Industri	%	0,46	0,4	316.500.000	0,4	400.000.000	0,34	500.000.000	0,45	550.000.000	0,34	600.000.000	0,45	600.000.000	0,45	2.966.500.000	Perindustrian
		besaran peserta diklat/calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	0	15	405.000.000	15	11.102.000.000	15	11.102.000.000	15	11.102.000.000	15	11.102.000.000	25	2.102.000.000	100	46.915.000.000	Penelitian dan Pengembangan
2.6	Transmigrasi				225.000.000		400.000.000		440.000.000		484.000.000		508.600.000		534.000.000		2.591.600.000		
139	02.08.15 - Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Transmigran diberangkatkan	KK	10	10	225.000.000	10	400.000.000	10	440.000.000	10	484.000.000	10	508.600.000	10	534.000.000	70	2.591.600.000	Transmigrasi
3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
3.1	Perencanaan				15.865.892.150		17.350.603.255		15.502.689.055		15.162.990.135		15.458.331.423		17.181.940.956		96.522.446.974		
140	01.06.15 - Program Pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai amanat pemerintah	%	0	30	740.100.000	20	1.058.000.000	20	813.000.000	60	868.000.000	80	903.000.000	100	915.000.000	100	5.297.100.000	Perencanaan
		Persentase tersedianya Renstra SKPD	%	100	100	0	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	30.000.000	Perencanaan
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah	%	0	15,91	340.000.000	15,91	763.000.000	15,91	733.000.000	15,91	809.000.000	15,91	794.000.000	20,45	839.000.000	100	4.278.000.000	Perencanaan
		Persentase kegiatan hasil kesepakatan pengembangan wilayah perbatasan yang terakomodir dalam RKPD	%	0	9,38		12,5		15,63		18,75		21,88		21,88		100		
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	%	0	17,31		21,15		16,35		14,42		13,46		17,31		100		
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	%	0	17,31		21,15		16,35		14,42		13,46		17,31		100		
141	01.06.16 - Program Kerjasama Pembangunan	Persentase realisasi kinerja kegiatan APBD tahun berkenaan	%	77,43	80	145.000.000	85	157.000.000	90	169.700.000	95	183.170.000	95	195.000.000	100	202.500.000	100	1.052.370.000	Setda
		Persentase realisasi kegiatan CSR	%	33	40		50		60		70		80		90		90		
142	01.06.17 - Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	%	100	100	721.394.000	100	525.000.000	100	550.000.000	100	575.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	700	3.571.394.000	Setda

Bidang Urusan Pemerintahan & Program		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
NO	Prioritas Pembangunan				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
URAIAN		SATUAN	TARGET		Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	PADA AKHIR PERIODE		TARGET	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
143	01.06.18 - Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	%	0	0	675.000.000	100	1.375.000.000	0	175.000.000	0	75.000.000	0	425.000.000	0	75.000.000	100	2.800.000.000	Perencanaan
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	%	0	25		0		25		8,33		16,67		25		100		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	%	100	16,67		16,67		16,67		16,67		16,67		16,67		100		
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah	%	0	46,15		30,77		7,69		3,85		3,85		7,69		100		
		Persentase serapan aspirasi hasil musrenbang dalam RKPD	%	52,31	55		57,5		60		62,5		65		67,5		67,5		
144	01.06.19 - Program Perencanaan Pengembangan Kota- kota menengah dan besar	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	%	0	17,31	2.148.310.000	21,15	2.450.000.000	16,35	1.385.000.000	14,42	950.000.000	13,46	835.000.000	17,31	665.000.000	100	8.433.310.000	Perencanaan
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah rawan bencana sesuai amanat pemerintah	%	0	0		25		25		25		25		0		100		
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah	%	0	46,15		30,77		7,69		3,85		3,85		7,69		100		
		Persentase Ketersediaan dokumen evaluasi perencanaan sesuai amanat pemerintah	%	100	17,65		16,18		16,18		16,18		16,18		17,65		100		
		persentase ketersediaan dokumen IPTEK sesuai amanat pemerintah	%	0	29,41		17,65		11,76		11,76		11,76		17,65		100		
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah	%	20	20	68.800.000	20	60.000.000	20	65.000.000	20	70.000.000	20	75.000.000	20	80.000.000	100	418.800.000	Setda
145	01.06.20 - Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase SDM yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan pembangunan	%	100	100	85.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	1.085.000.000	Setda
		Persentase SDM yang memiliki kompetensi perencana	%	100	100	464.480.000	100	510.928.000	100	612.020.800	100	668.222.880	100	730.045.168	100	748.049.685	100	3.733.746.533	Perencanaan dan Sekretariat DPRD
		Persentase aparatur PNS yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase perangkat daerah yang budaya kerjanya baik	%	0	15	250.000.000	15	360.000.000	15	695.000.000	15	620.000.000	20	650.000.000	20	725.000.000	20	3.300.000.000	Setda
		Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah sesuai pedoman yang berlaku	%	5	25		35		50		75		90		100		100		
		Persentase tersedianya Renstra SKPD	%	100	100	0	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	50.000.000	Kecamatan
146	01.06.21 - Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	%	0	0	4.132.375.150	100	3.214.563.255	0	3.332.853.255	0	3.047.478.255	0	2.839.163.255	0	3.904.263.271	100	20.470.696.441	Perencanaan, PD, kecamatan, dan kelurahan

NO	Bidang Urusan Pemerintahan & Program	Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
	Prioritas Pembangunan	(OUTPUT)			TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
					PADA AKHIR PERIODE														
					URAIAN	SATUAN	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	%	0	25		0		25		8,33		16,67		25		100		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	%	100	16,67		16,67		16,67		16,67		16,67		16,67		100		
		Persentase realisasi kinerja kegiatan APBD tahun berkenaan	%	90	93	421.785.000	94	450.000.000	96	475.000.000	97	525.000.000	98	525.000.000	99	675.000.000	99	3.071.785.000	Setda
		Persentase ketersediaan dokumen evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai amanat pemerintah	%	100	17,65	195.000.000	16,18	175.000.000	16,18	195.000.000	16,18	200.000.000	16,18	200.000.000	17,65	320.000.000	100	1.285.000.000	Setda
		Persentase serapan aspirasi hasil musrenbang dalam RKPD	%	52,31	55	206.110.000	57,5	306.112.000	60	306.115.000	62,5	306.119.000	65	306.123.000	67,5	207.128.000	67,5	1.637.707.000	Setda
147	01.06.22 - Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah	%	0	15,91	700.000.000	15,91	660.000.000	15,91	680.000.000	15,91	720.000.000	15,91	745.000.000	20,45	900.000.000	100	4.405.000.000	Perencanaan
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	%	0	17,31		21,15		16,35		14,42		13,46		17,31		100		
148	01.06.23 - Program perencanaan sosial budaya	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	%	0	17,31	236.390.000	21,15	220.000.000	16,35	235.000.000	14,42	250.000.000	13,46	265.000.000	17,31	390.000.000	100	1.596.390.000	Perencanaan
149	01.06.24 - Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	%	0	0	250.000.000	100	500.000.000	0	250.000.000	0	200.000.000	0	0	0	300.000.000	100	1.500.000.000	Perencanaan
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	%	0	25		0		25		8,33		16,67		25		100		
		Tersedianya dokumen perencanaan: RDTR yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	dok	0	0		0		66,67		22,22		11		0		100		
		tersedianya dokumen perencanaan RTRW yang ditetapkan dengan Perda	%	0	20		60		20		0		0		0		100		
150	01.06.25 - Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Persentase SDM yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan pembangunan	%	0	75	86.148.000	80	100.000.000	85	115.000.000	90	130.000.000	95	155.000.000	95	170.000.000	95	756.148.000	Perencanaan
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah rawan bencana sesuai amanat pemerintah	%	14	28		42		57		71		85		100		100		
151	01.06.26 - Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Penerima Jasa Layanan	Orang	750	800	4.000.000.000	850	4.250.000.000	900	4.500.000.000	950	4.750.000.000	1.000,00	5.000.000.000	1.050,00	5.250.000.000	1.050,00	27.750.000.000	Penelitian dan Pengembangan
		besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	0	0		20		20		20		20		20		100		
3.2	Keuangan					15.572.343.000		15.836.721.000		16.417.780.375		17.152.930.000		18.668.967.400		4.279.867.450		87.928.609.225	
152	00.00.06 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Ketepatan waktu penetapan APBD	%	100	20	1.011.084.000	20	1.090.000.000	20	1.095.000.000	20	1.125.000.000	20	1.150.000.000	20	1.150.000.000	100	6.621.084.000	Keuangan
VIII-34																			

Bidang Urusan Pemerintahan & Program		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
NO	Prioritas Pembangunan	(OUTPUT)			TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	PADA AKHIR PERIODE				
		URAIAN	SATUAN												TARGET	Rp			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Ketepatan waktu perda dan perwali tentang APBD	%	100	20		20		20		20		20		20		100		
		Ketepatan waktu perda dan perwali tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	%	100	20		20		20		20		20		20		100		
									20		20		20		20		100		
		Persentase ketersediaan dokumen evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai amanat pemerintah	%	100	100	204.000.000	100	219.750.000	100	230.840.000	100	244.074.000	100	301.361.400	100	263367450	100	1.463.392.850	Keuangan
		Jumlah laporan	dok	1	1	76.750.000	1	62.500.000	1	67.000.000	1	70.250.000	1	72.500.000	1	116.000.000	1	465.000.000	Keuangan
		Ketaatan dn ketertiban pembayaran pajak atas belanja daerah bagi seluruh SKPD kota Surakarta	%	100	20	50.000.000	20	52.500.000	70	55.000.000	80	57.500.000	90	60.000.000	93	62.500.000	93	337.500.000	Setda
		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu	%	100	100	20.000.000	100	63.000.000	100	66.600.000	100	71.500.000	100	76.000.000	100	83.000.000	100	380.100.000	Keuangan
153	01.20.17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah kota yang baik	%	100	20	13.335.509.000	20	13.473.971.000	20	14.028.340.375	20	14.709.606.000	20	15.684.106.000	20	1.730.000.000	100	72.961.532.375	Keuangan
		Meningkatnya penerimaan pajak hotel, reklame, sarang burung walet dan restoran	%	3,46	7		7		7		7		7		7		7		
		Meningkatnya penerimaan PBB	%	5	7		7		7		7		7		7		7		
		meningkatnya penerimaan pajak parkir, air tanah, hiburan dan BPHTB	%	11	7		7		7		7		7		7		7		
		Persentase standar/pedoman yang telah diterapkan oleh perangkat daerah	%	100	100	650.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	1.100.000.000	100	650.000.000	100	4.350.000.000	Setda
		Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	%	100	16,67	225.000.000	16,67	225.000.000	16,67	225.000.000	16,67	225.000.000	16,67	225.000.000	16,67	225.000.000	100	1.350.000.000	Perencanaan
3.3	Kepegawaian dan Diklat					7.233.542.000		8.187.210.500		7.965.031.000		8.578.701.000		8.511.644.000		8.919.847.000		49.395.975.500	
154	00.00.03 - Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pemanfaatan fingerprint sebagai sarana presensi aparatur	%	55,1	17	210.190.000	27,89	310.000.000	0	52.500.000	0	55.125.000	0	57.880.000	0	270.965.000	44,89	956.660.000	Kepegawaian dan Diklat
155	00.00.04 - Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	persentase penyelesaian proses mutasi dan pensiun tepat waktu	%	90	91	0	92	70.000.000	93	85.000.000	94	91.000.000	95	75.000.000	96	33.000.000	96	354.000.000	Kepegawaian dan Diklat
156	00.00.05 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	%	0	0	0	20	100.000.000	20	107.500.000	20	115.625.000	20	124.431.000	20	133.975.000	100	581.531.000	Kepegawaian dan Diklat
157	01.20.29 - Program Pendidikan Kedinasan	Persentase aparatur PNS yang mengikuti diklat penjenjangan struktural	%	54	88	2.283.593.000	45	2.283.600.000	40	2.100.000.000	50	2.500.000.000	55	2.550.000.000	53	2.555.000.000	331	14.272.193.000	Kepegawaian dan Diklat
158	01.20.30 - Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase aparatur PNS yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional	%	10,3	11	1.950.385.000	11,5	2.353.500.000	12	2.330.675.000	12,5	2.431.700.000	13	2.530.000.000	13,5	2.651.000.000	73,5	14.247.260.000	Kepegawaian dan Diklat
159	01.20.31 - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Prosentase Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) yang dinilai	%	0	80	25.000.000	85	25.000.000	90	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	150.000.000	Kepegawaian dan Diklat
		jumlah pegawai yang diterima sesuai formasi	Orang	54	450	2.614.374.000	300	1.945.110.500	300	2.164.356.000	300	2.260.251.000	300	2.049.333.000	300	2.150.907.000	1.950,00	13.184.331.500	Kepegawaian dan Diklat

Bidang Urusan Pemerintahan & Program		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
NO	Prioritas Pembangunan				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
					PADA AKHIR PERIODE														
		URAIAN	SATUAN		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0		Persentase penempatan pegawai sesuai kualifikasi dan kompetensinya	%	10	12		13		14		15		16		17		87		
		Persentase pegawai yang berprestasi	%	3,86	2,86		3,49		3,61		3,75		3,9		4,05		25,52		
		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda tepat waktu	%	100	100	150.000.000	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	5.650.000.000	Setda
		Persentase pengembangan organisasi perangkat daerah yang efektif efisien(rightsizing)	%	100	10		18		18		18		18		18		100		
3.4	Penelitian dan Pengembangan					870.000.000		820.000.000		835.000.000		885.000.000		895.000.000		960.000.000		5.265.000.000	
160	01.06.18 - Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	jumlah pengunjung Solo Science Center	Orang	8.000	10.000	400.000.000	12.000	450.000.000	14.000	450.000.000	16.000	485.000.000	18.000	485.000.000	20.000	535.000.000	20.000	2.805.000.000	Penelitian dan Pengembangan
		Persentase keikutsertaan siswa	%	2	4		6		8		10		13		15		15		
161	02.07.15 - Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Jumlah industri kecil dan menengah	Buah	1.758	1.765	470.000.000	1.772	370.000.000	1.778	385.000.000	1.786	400.000.000	1.792	410.000.000	1.800	425.000.000	1.800	2.460.000.000	Penelitian dan Pengembangan
3.5	Pengawasan					2.270.400.000		3.052.440.000		3.014.921.400		3.009.336.200		3.067.792.700		2.553.154.500		16.968.044.800	
162	01.20.20 - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase cakupan SKPD yang menjadi obyek pemeriksaan dalam kegiatan pengawasan	%	100	100	1.630.400.000	100	1.735.440.000	100	1.751.021.400	100	1.768.536.200	100	1.785.092.700	100	1.090.654.500	100	9.761.144.800	Pengawasan
		Prosentase hasil temuan pengawasan dan aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	87,08	90		93		95		95		95		95		95		
		Prosentase hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	%	55	60		65		70		75		80		85		85		
		Jumlah kebijakan teknis di bidang pelaksanaan kegiatan APBD	dok	1	1	140.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	975.000.000	Setda
		Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100	100	8.000.000	100	8.500.000	100	8.900.000	100	9.300.000	100	9.700.000	100	10.500.000	100	54.900.000	Kelurahan
		persentase penurunan jumlah kasus hukum Pemerintahan Kota	%	100	20		20		20		20		20		20		100		
163	01.20.21 - Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	Prosentase APiP yang memiliki kompetensi	%	78	80	115.000.000	83	60.000.000	85	60.000.000	88	60.000.000	90	60.000.000	95	60.000.000	95	415.000.000	Pengawasan
164	01.20.22 - Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase jumlah unit kegiatan yang telah menerapkan SOP pada seluruh SKPD	%	32	0	312.000.000	33	1.033.500.000	34	970.000.000	35	981.500.000	36	1.023.000.000	37	1.172.000.000	37	5.492.000.000	Setda dan Kelurahan
		Persentase SKPD yang bersertifikat ISO	%	31	31		32		33		34		35		36		36		
		Persentase SKPD pelayan publik yang telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat	%	32	33		34		35		36		37		38		38		

Bidang Urusan Pemerintahan & Program		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
NO	Prioritas Pembangunan	(OUTPUT)			TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
					PADA AKHIR PERIODE														
		URAIAN	SATUAN		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0		Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.	Unit	1	6		6		6		6		6		6		6		
		Jumlah kebijakan tentang sistem dan prosedur pengawasan	Buah	1	1	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	45.000.000	8	270.000.000	Setda
4	FUNGSI LAINNYA																		
4.1	Sekretariat Daerah																		
165	01.20.16 - Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Prosentase pemenuhan pelayanan penatausahaan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan regulasi yang berlaku	%	100	100	47.000.000	100	58.000.000	100	70.000.000	100	76.000.000	100	82.000.000	100	70.000.000	100	403.000.000	Setda
		prosentase pemenuhan sarana pendukung pelayanan kedinasan Kepala Daerah	%	100	100	1.047.868.000	100	1.613.960.000	100	1.627.960.000	100	1.641.960.000	100	1.956.960.000	100	1.949.960.000	100	9.838.668.000	Setda
		Hasil survey kepuasan pengguna layanan keprotokolan	nilai	80	85	550.000.000	87	610.000.000	90	725.000.000	94	800.000.000	96	930.000.000	96	1.040.000.000	96	4.655.000.000	Setda
166	01.20.23 - Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa yang terlayani secara elektronik	%	100	100	200.000.000	100	150.000.000	100	175.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	1.125.000.000	Setda
		Persentase pengadaan barang/jasa yang terlayani melalui ULP	%	100	100	330.000.000	100	431.500.000	100	483.000.000	100	534.500.000	100	586.000.000	100	640.000.000	100	3.005.000.000	Setda
		Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	%	100	100	50.000.000	100	45.000.000	100	32.000.000	100	33.000.000	100	36.000.000	100	30.000.005	100	226.000.005	Kecamatan dan kelurahan
		Sistim Informasi Manajemen Pemda	Buah	1	1		1		1		1		1		1		1		
		Pertumbuhan jumlah pelayanan yang dilayani SPIPISE	%	0	20	227.705.000	20	300.000.000	20	320.000.000	20	350.000.000	20	380.000.000	20	410.000.000	20	1.987.705.000	Penanaman Modal Daerah
		Pertumbuhan jumlah pelayanan yang dilayani PTSP	%	-18	4		4		4		4		4		4		24		
		Jumlah Perizinan	dokumen	9.000,00	9.500,00		10.000,00		10.500,00		11.000,00		11.500,00		12.000,00		12.000,00		
		Tingkat ketepatan implementasi SOP perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Pertumbuhan jenis layanan yang berbasis teknologi informasi	nilai	0	0		100		100		100		100		100		100		
167	01.20.24 - Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase hasil temuan pengawasan dan aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	87,08	90	313.580.000	93	216.500.000	95	222.000.000	95	228.000.000	95	239.000.000	95	243.000.000	95	1.462.080.000	Pengawasan
168	01.20.25 - Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase kerjasama (MoU, Peraturan Bersama, PKS/Agreement) yang diimplementasi	%	65	70	580.000.000	75	880.000.000	80	990.000.000	85	1.100.000.000	90	1.210.000.000	95	1.320.000.000	95	6.080.000.000	Setda
169	01.20.26 - Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum/ regulasi daerah yang dihasilkan sesuai prolegda	%	100	100	1.703.050.000	100	2.171.300.000	100	2.374.930.000	100	2.560.900.000	100	2.695.500.000	100	2.919.240.000	100	14.424.920.000	Setda
		Persentase regulasi yang dikaji ulang kesesuaiannya dengan kondisi kekinian	%	100	100		100		100		100		100		100		100		

Bidang Urusan Pemerintahan & Program		Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
NO	Prioritas Pembangunan				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA		
		URAIAN	SATUAN		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase cakupan kelompok sasaran yang menerima diseminasi produk hukum dan informasi kebijakan daerah sesuai substansi hukumnya	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase Pentaan Peraturan Perundang-undangan	%	0	100	0	100	425.000.000	100	295.000.000	100	297.250.000	100	49600000	100	104.180.000	600	1.171.030.000	Setda
		Jumlah kebijakan teknis di bidang organisasi dan kepegawaian yang dihasilkan (SE, Keputusan Walikota, Perwali)	dok	2	2	0	2	150.000.000	2	0	2	150.000.000	2	0	2	150.000.000	2	450.000.000	Setda
		Persentase pnyelesaian kasus hukum Pemerintahan Kota	%	100	100	238.080.000	100	600.000.000	100	630.000.000	100	675.000.000	100	720.000.000	100	775.000.000	100	3.638.080.000	Setda
		Prosentase hasil temuan pengawasan dan aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	87,08	90	25.000.000	93	0	95	0	95	0	95	0	95	0	95	25.000.000	Pengawasan
		Jumlah kebijakan teknis di bidang tata usaha pimpinan dan sandi telekomunikasi, rumah tangga dan keuangan, perlengkapan	dok	0	0	0	2	30.000.000	1	0	2	30.000.000	1	0	2	30.000.000	8	90.000.000	Setda
		Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti	%	0	100	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	150.000.000	Penelitian dan Pengembangan
		Jumlah kebijakan teknis bidang pengembangan kerjasama daerah yang dihasilkan	dok	2	0	0	2	140.000.000	2	150.000.000	2	160.000.000	3	260.000.000	3	200.000.000	3	910.000.000	Setda
		Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah	%	100	100	0	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	75.000.000	Kecamatan
		Lama proses perizinan	bln	0	0,03	0	0,03	15.000.000	0,03	15.000.000	0,03	20.000.000	0,03	20.000.000	0,03	20.000.000	0,03	90.000.000	Kecamatan
		Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	%	0	25	27.350.000	50	27.500.000	75	27.500.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	172.350.000	Kecamatan
		Jumlah kebijakan tentang sistem dan prosedur pengawasan	Buah	12	12	200.000.000	12	0	12	0	12	100.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	700.000.000	Keuangan
		PERDA yang ditetapkan	dok	16	20	490.691.000	20	539.760.100	20	593.687.000	20	653.055.700	20	718.361.270	20	790.197.397	120	3.785.752.467	Sekretariat DPRD
		Persentase RAPERDA yang disetujui DPRD	%	80	85		85		90		90		95		95		95		
		Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
170	01.20.27 - Program Penataan Daerah Otonomi Baru	prosentase pemenuhan sarana pendukung pelayanan kedinasan Kepala Daerah	%	0	100	100.000.000	0	600.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	100	1.900.000.000	Setda
		prosentase pemenuhan sarana pendukung pelayanan kedinasan Kepala Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase perangkat daerah yang terbentuk sesuai regulasi beserta tugas dan fungsinya	%	100	100	350.000.000	100	475.000.000	100	210.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	2.385.000.000	Setda
4.1	Sekretariat DPRD				17.369.154.000		18.510.818.600		20.693.994.990		22.752.394.489		25.027.633.939		27.460.764.227		131.814.760.245		
171	01.20.15 - Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	PERDA yang ditetapkan	dok	16	20	17.369.154.000	20	18.510.818.600	20	20.693.994.990	20	22.752.394.489	20	25.027.633.939	20	27.460.764.227	120	131.814.760.245	Sekretariat DPRD
		Persentase RAPERDA yang disetujui DPRD	%	80	85		85		90		90		95		95		95		
		Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
TOTAL					807.456.326.439		1.554.421.415.193		4.364.162.264.583		4.169.176.500.198		3.635.555.047.131		1.137.064.633.433		17.124.156.578.268		

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Tabel penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Surakarta sebagaimana tertuang pada Tabel 9.1.

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Surakarta

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TAHUN						KONDISI AKHIR
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Pertumbuhan ekonomi/PDRB	5 + 1	5 + 1	5 + 1	6 + 1	6 + 1	6 + 1	6 + 1	6 + 1
2	Tingkat inflasi	2 + 1	3 + 1	4 + 1	3 + 1	3 + 1	4 + 1	3 + 1	3 + 1
3	Indeks Gini	0,351	0,332	0,321	0,320	0,305	0,301	0,299	0,299
4	Tingkat Kemiskinan (%)	10,30	9,64	8,99	8,34	7,68	7,03	6,38	6,38
5	Angka Harapan Hidup (tahun)	77,00	77,08	77,11	77,16	77,19	77,23	77,27	77,27
6	Rata-rata lama sekolah (tahun)	10,36	10,44	10,51	10,59	10,67	10,75	10,83	10,83
6	Harapan lama sekolah (tahun)	14,14	14,34	14,53	14,73	14,94	15,15	15,37	15,37
7	Pengeluaran per kapita (Rupiah)	13.604.000,00	14.291.000,00	14.806.000,00	15.301.000,00	15.776.000,00	16.242.000,00	16.697.250,00	16.697.250,00
8	Pendapatan per kapita (Rupiah)	55.614.295,67	58.142.285,46	60.922.565,68	63.823.145,56	66.534.165,91	69.337.235,56	72.163.382,69	72.163.382,69
9	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	74,12	73,15	72,85	72,63	73,65	73,14	72,92	72,92
10	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	5,95	5,83	5,76	5,68	5,61	5,55	5,46	5,46
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	Layanan Urusan Wajib								
	Pelayanan Dasar								
1	Urusan Pendidikan								
	a. APK PAUD	52,76	57,30	61,84	66,38	70,92	75,46	80,00	80,00
	b. APK SD	108,25	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	c. APK SMP	96,95	99,98	103,32	106,65	105,00	105,00	105,00	105,00
	d. APM SD	97,39	97,82	98,26	98,69	99,13	99,56	100,00	100,00
	e. APM SMP	86,20	88,50	90,80	93,10	95,40	97,70	100,00	100,00
	f. Angka Kelulusan (AL) SD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	g. Angka Kelulusan (AL) SMP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	h. Jumlah prestasi pendidikan (siswa, guru, sekolah) tingkat regional/nasional/internasional (buah)	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	60,00
	i. Cakupan layanan pendidikan non formal (%)	2,18	2,40	2,64	2,91	3,20	3,52	3,87	3,87
2	Urusan Kesehatan								
	a. Prosentase rumah tangga berperilaku pola hidup bersih dan sehat (PHBS) (%)	53,17	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
	b. Prevalensi HIV-AIDS pada populasi dewasa	0,015	0,014	0,013	0,012	0,011	0,010	0,010	0,010

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	TARGET KINERJA TAHUN						KONDISI AKHIR 2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	c. Persentase penanganan kasus gangguan jiwa berat (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
	d. Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada balita	1,95	1,93	1,90	1,88	1,85	1,83	1,80	1,80
	e. Angka kematian ibu	52,28	52,28	52,28	52,28	41,83	41,83	41,83	41,83
	f. Angka Kematian Bayi	2,82	2,72	2,61	2,51	2,41	2,30	2,20	2,20
	g. Angka Kematian Balita	3,56	3,45	3,45	3,35	3,24	3,14	3,03	3,03
	h. Angka kesakitan DBD	92,15	69,82	64,83	59,83	55,00	44,91	39,98	39,98
	i. Angka kesakitan TB	126	125	124	123	121	120	118	118
	j. Proporsi Kasus Penyakit Tidak Menular	29,50	25,00	22,09	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	k. Tingkat Deteksi Dini Masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
	l. Rasio rumah sakit	0,25	0,25	0,27	0,29	0,31	0,33	0,33	0,33
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	a. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	73,37	75,59	78,54	82,09	85,05	87,05	90,05	90,05
	b. Persentase Pajang jembatan dalam Kondisi baik (%)	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	91,00
	c. Persentase Panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air dalam kondisi baik (%)	69,77	71,77	73,77	75,77	77,77	79,77	81,77	81,77
	d. Persentase penambahan luasan ruang publik yang dimanfaatkan (%)	22,03	0,00	4,29	41,49	3,58	28,61	0,00	100,00
	e. Persentase Pasar Rakyat yang memenuhi persyaratan (%)	63,64	65,91	68,18	70,45	72,73	75,00	77,27	77,27
	f. Persentase Tersedianya Prasarana Umum di kluster Ekonomi Kreatif (%)	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	24,00	28,00	28,00
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
	a. Persentase Luasan Kawasan Kumuh (%)	8,16	6,54	4,93	3,29	1,66	0,00	0,00	0,00
	b. Persentase Penurunan RTLH (%)	100,00	95,16	90,31	85,47	80,63	75,79	70,94	70,94
	c. Persentase Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (%)	91,84	93,47	95,14	96,70	98,40	100,00	100,00	100,00
	d. Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih (%)	80,99	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	TARGET KINERJA TAHUN						KONDISI AKHIR 2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	e. Persentase Rumah tangga bersanitasi (%)	97,10	98,00	98,50	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
	a. Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	79,33	80,00	84,67	90,00	94,67	96,00	96,67	96,67
	b. Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan (%)	40,00	54,86	64,86	74,86	90,00	100,00	100,00	100,00
	c. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda (%)	76,19	78,10	80,00	82,86	84,76	87,62	88,57	88,57
	d. Persentase kelurahan tangguh	0,00	1,96	3,92	3,92	3,92	3,92	5,88	23,53
	e. Persentase tempat ibadah yang dibina (%)	45	43	62	68	75	85	92	92
6	Urusan Sosial								
	Persentase penanganan PMKS (%)	13,00	5,43	5,88	6,55	7,48	8,54	9,40	9,40
	Layanan Urusan Wajib								
	Bukan Pelayanan Dasar								
1	Urusan Tenaga Kerja								
	a. Cakupan serapan tenaga kerja terampil (%)	68,75	70,12	70,69	75,00	75,26	79,90	79,91	79,91
	b. Pencari kerja yang ditempatkan (%)	72,10	74,89	76,36	78,64	80,98	83,32	85,82	85,82
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
	a. Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	53,69	53,70	53,71	53,72	53,73	53,74	53,75	53,75
	b. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Urusan Pangan								
	Persentase Ketersediaan pangan utama yang terjangkau	161,51	161,56	161,61	161,66	161,71	161,76	161,81	161,81
4	Urusan Pertanahan								
	Persentase aset yang bersertifikat (%)	81,93	84,08	86,23	88,38	90,53	92,69	94,84	94,84
5	Urusan Lingkungan Hidup								

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	TARGET KINERJA TAHUN						KONDISI AKHIR 2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	a. Indeks Kesehatan Lingkungan Hidup (IKLH)	40,71	40,87	41,04	41,21	41,37	41,54	41,71	41,71
	b. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) (%)	44,44	50,00	55,55	61,11	66,67	72,22	77,77	77,77
	c. Persentase penanganan sampah (%)	95,90	96,73	96,87	97,00	97,12	97,25	97,32	97,32
	d. Rasio ruang Terbuka hijau publik	9,72	9,72	9,77	9,83	9,89	9,94	10,00	10,00
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
	Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan (%)	91,28	89,60	92,83	91,46	94,93	91,28	95,73	95,73
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
	Persentase jumlah Swadaya Masyarakat terhadap total Program pemberdayaan masyarakat kelurahan (%)	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	16,00
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	a. Cakupan peserta KB aktif (%)	66,83	67,30	67,80	68,30	68,80	69,30	69,80	69,80
	b. Laju Pertumbuhan Penduduk (Jiwa)	0,90	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
9	Urusan Perhubungan								
	Persentase operasional koridor BST yang terlayani (%)	14,29	28,57	28,57	28,57	0,00	0,00	0,00	100,00
10	Urusan Komunikasi dan Informatika								
	Persentase SKPD yang melaksanakan integrasi aplikasi E-governance (%)	0,00	17,07	34,15	51,22	68,29	85,37	100,00	100,00
11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								
	a. Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM yang dibina (%)	0,00	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	12,03
	b. Persentase wirausaha baru (%)	0,00	2,00	12,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
12	Urusan Penanaman Modal								

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	TARGET KINERJA TAHUN						KONDISI AKHIR 2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Persentase Rata-rata Pertumbuhan Investasi (%)	19,30	5,68	5,91	6,14	6,39	6,65	6,92	6,28
13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga								
	a. Tingkat prestasi pemuda dan olahraga (%)	55,49	56,64	57,81	59,01	60,04	61,04	62,08	62,08
	b. Persentase atlet cabang olahraga yang mempunyai prestasi tingkat regional/ nasional/ internasional (%)	80,98	81,28	81,62	82,02	82,09	82,09	82,15	82,15
	c. Persentase pemuda/organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional/ nasional/ internasional (%)	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00	42,00	42,00
14	Urusan Persandian								
	Ketersediaan SOP persandian (%)	0	0	0	100	0	0	0	100
15	Urusan Statistik								
	Persentase ketersediaan data perencanaan sesuai Standar Kebutuhan Layanan Data (%)	61,76	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
16	Urusan Kebudayaan								
	a. Tingkat aktualisasi pelestarian seni budaya (%)	78,57	95,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	b. Rasio grup kesenian per 10.000 penduduk	6,80	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05
	c. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (kegiatan)	34	15	15	15	15	15	15	15
	d. Persentase Sarana dan Prasarana kegiatan sosial dan budaya yang representatif (%)	70,33	74,92	76,89	78,86	80,83	83,47	85,77	85,77
	e. Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	41,86	44,77	47,67	50,58	53,49	56,40	59,30	59,30
	f. Persentase Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang resrepresentatif (%)	94,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Urusan Perpustakaan								
	Jumlah pengunjung perpustakaan/ Taman Cerdas (orang)	450.020	532.024	614.024	696.024	778.024	860.024	942.024	942.024
18	Urusan Kearsipan								

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	TARGET KINERJA TAHUN						KONDISI AKHIR 2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Persentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku (%)	30,53	45,26	58,95	72,63	86,32	100,00	100,00	100,00
	Layanan Urusan Pilihan								
1	Urusan Kelautan dan Perikanan								
	Produksi budidaya ikan (ton)	36,23	38,00	40,00	42,00	44,00	45,00	46,00	46,00
2	Urusan Pariwisata								
	Jumlah kunjungan wisatawan	4.142.785	4.500.000	4.750.000	5.000.000	5.250.000	5.500.000	5.750.000	5.750.000
3	Urusan Pertanian								
	a. Produksi padi (ton)	1.378	1.398	1.413	1.427	1.437	1.445	1.448	1.448
	b. Produksi hasil peternakan (ton)	3.834	4.014	4.071	4.128	4.185	4.242	4.298	4.298
4	Urusan Perdagangan								
	Tingkat terlindunginya konsumen	69,77	75,97	77,52	79,84	81,40	82,95	89,15	89,15
5	Urusan Perindustrian								
	Persentase klaster Industri yang berkembang (%)	64,29	64,29	71,43	78,57	85,71	92,86	100,00	100,00
6	Urusan Transmigrasi								
	Persentase transmigran yang diberangkatkan (%)	14,29	15,38	18,52	18,90	22,22	24,44	25,00	25,00
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								
1	Perencanaan								
	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan: (%)								
	a. RPJMD	80	80	80	80	80	80	80	80
	b. RKPD	63,00	65,00	67,50	70,00	72,50	75,00	80,00	80,00
2	Keuangan								
	a. Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	11,06	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	b. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kepegawaian dan Diklat								
	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur (%)	0,087	0,076	0,065	0,054	0,043	0,033	0,022	0,022
4	Penelitian dan Pengembangan								
	Persentase Penerapan inovasi (%)	0,00	6,00	11,67	14,29	20,00	25,00	29,41	29,41
5	Pengawasan								
	Maturitas SPIP Pemerintah Kota Surakarta	2,48	2,50	2,75	2,90	3,00	3,10	3,20	3,20

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	TARGET KINERJA TAHUN					KONDISI AKHIR 2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Fungsi Lainnya							
6	Sekretariat Daerah							
	a. Rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat Kota Surakarta	62,51	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	82,00
	b. Hasil AKIP bernilai Baik							
	- Nilai LPPD dan EKPPD	3.00 (T)	3.1 (ST)	3.2 (ST)	3.25 (ST)	3.3 (ST)	3.35 (ST)	3.4 (ST)
	- Hasil Evaluasi LKjIP	51.21 (CC)	60 (B)	65 (BB)	70 (A)	80 (AA)	90 (AA)	93 (AA)
7	Sekretariat DPRD							
	Persentase informasi keluaran aktivitas DPRD yang dipublikasikan berbasis teknologi informasi sesuai SOP yang berlaku (%)	82,37	85,03	87,02	89,00	91,03	93,02	95,03
8	Kewilayahan							
	Persentase pelayanan kecamatan yang memenuhi standar ISO 9001:2008 (%)	43,00	45,00	47,00	67,00	71,20	73,20	91,20
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Infrastuktur Kota dalam kondisi baik (%)	76,05	77,79	79,77	81,95	83,94	85,61	87,61
2	Persentase Sarana dan Prasarana kegiatan ekonomi yang representatif (%)	33,82	36,95	40,09	43,23	46,36	49,50	52,64

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2016-2021 merupakan dokumen yang strategis bagi pembangunan di Kota Surakarta selama 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen RPJMD ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih untuk diimplementasikan ke dalam arah kebijakan yang dilengkapi dengan program prioritas pembangunan disertai target tahunan. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Manfaat dari RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021, antara lain sebagai berikut:

A. Pedoman Transisi

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2021-2026 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN.

B. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Surakarta serta para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi dan transparansi diperlukan agar target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Adapun agar efisien dan efektif dalam pelaksanaannya diperlukan kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam lingkup Pemerintah Kota Surakarta dan para pemangku kepentingan wajib mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021;
2. Seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam lingkup Pemerintah Kota Surakarta dan para pemangku kepentingan wajib melaksanakan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021;
3. Seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam lingkup Pemerintah Kota Surakarta, agar segera menetapkan Rencana Strategis (Renstra) PD dengan berpedoman pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021;
4. Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan melalui konsultasi publik, dengan harapan program yang tertuang dalam RPJMD sesuai

dengan kebutuhan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021, menugaskan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Surakarta selaku PD yang memiliki tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah, untuk melakukan fasilitasi, pengendalian dan evaluasi terhadap PD dalam lingkup Pemerintah Kota Surakarta untuk menyusun perencanaan pembangunan;

5. Apabila terjadi ketidak-keberhasilan pencapaian target RPJMD yang disebabkan karena adanya pergeseran asumsi-asumsi kemampuan keuangan daerah, kebijakan fiskal, dan adanya penambahan program baru dari pemerintah pusat yang tidak berpengaruh terhadap target kinerja tahunan yang telah ditetapkan, dan selanjutnya target kinerja dipakai sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan rencana;
6. Apabila terjadi perubahan nomenklatur PD penanggungjawab yang disebabkan perubahan regulasi untuk sasaran, strategi dan arah kebijakan, urusan dan target kinerja tidak diubah, hanya urusan dan target perlu penyesuaian dengan PD penanggungjawab; dan
7. Tahapan pelaksanaan Tahun 2021 masih tetap sebagai acuan sebagai pedoman perencanaan, sebelum adanya penetapan RPJMD Kota Surakarta berdasarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk periode 2021-2026.

BAB XI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran tahapan ketiga dan keempat RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025 untuk terwujudnya **“Surakarta sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera”**, serta menjadi pedoman bagi PD dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah melalui penyusunan Renstra PD dan perencanaan pembangunan tahunan. RPJMD dapat dijadikan alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan melalui proses panjang antara lain berupa penjaringan aspirasi dan identifikasi permasalahan, diskusi dengan tenaga ahli (akademisi), konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan Pimpinan dan Badan Anggaran DPRD Kota Surakarta, penyelenggaraan Musrenbang untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD, serta FGD perumusan akhir RPJMD. Disamping itu juga telah dikonsultasikan kepada Gubernur Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta telah dievaluasi oleh tim Bappeda Provinsi Jawa Tengah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan dukungan, kesungguhan dan rasa tanggung jawab, serta semangat etos kerja 5 (lima) Mantab, yaitu: Mantab **“Kejujuran, Kedisiplinan, Pelayanan, Organisasi, dan Gotong Royong”** oleh seluruh pemangku kepentingan di Kota Surakarta, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kewenangan dan perannya, sehingga visi **“Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera”** menuju Masyarakat **“Waras, Wasis, Wareg, Mapan, dan Papan”** dapat terwujud.

WALIKOTA SURAKARTA

Ttd & Cap

FX. HADI RUDYATMO